



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkompetensi
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



PERATURAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD KOTA BOGOR 2025 – 2029



DEDE A RACHIM



JENAL MUTAQIN

*Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor
Tahun 2025*



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
 8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 121);
 9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 163);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025 – 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor;



2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sesuai visi dan misi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk :

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan Pembangunan;
- b. menjamin adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah Kota dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- c. pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah, Renstra rencana strategis Perangkat Daerah dan Renja rencana kerja Perangkat Daerah;

Pasal 4

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.



- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah RPJPD, rencana pembangunan jangka nasional RPJMN, rencana tata ruang wilayah dan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan RPJMD kabupaten/kota sekitar.

BAB II SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Daerah
 - c. BAB III : Visi, Misi Dan Program Prioritas Pembangunan
 - d. BAB IV : Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - e. BAB : Penutup
- (2) Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD

DEDIE ABDU RACHIM

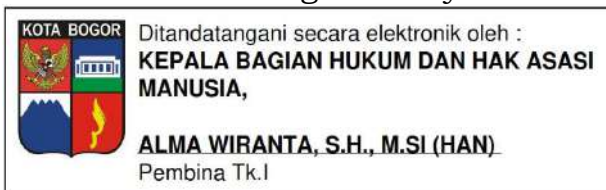
Diundangkan di Bogor
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD

DENNY MULYADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
(5/133/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 bahwa Rencana pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 berakhir seiring dengan berakhirnya masa kepemimpinan Wali Kota Bogor periode 2019-2024 yakni Dr. Bima Arya Sugiarto dengan Wakil Wali Kota Bogor, Drs. Dedie A. Rachim, M.A. Pada 27 November 2024 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak, yang telah menetapkan Wali Kota Bogor untuk periode 2025-2030 yakni Drs. Deddi A. Rachim, M.A. dengan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin. Pelantikan Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden RI.

Visi Wali Kota Bogor 2025-2029 adalah Bogor Beres, Bogor Maju, dengan 4 Misi yaitu Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera dan Bogor Lancar. Visi Misi inilah yang menjadi acuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, selain Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Perda No. 10 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Bogor 2025-2045 serta RPJMD Provinsi Jawa Barat, sebagaimana amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah, juga mewujudkan visi jangka panjang daerah sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045. RPJMD Tahun



2025-2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah lima tahun pada tahapan pertama RPJPD 2025-2045. RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan baik tingkat Pemerintah Daerah (RKPD) dan tingkat Perangkat Daerah (Renja-PD) serta menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran, evaluasi kinerja, dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, dan top-down serta bottom-up. Pendekatan proses perencanaan sebagaimana dimaksud diatas yaitu :

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana program karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dalam hal ini, pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. Pendekatan politis juga dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Bogor, yang mengacu pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan, para pakar/narasumber yang kompeten di bidangnya. Penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dilaksanakan melalui proses konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan, pembahasan dengan perangkat daerah sebagai pelaksana pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 juga menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Tematik artinya bahwa RPJMD disusun dengan berfokus pada tema tertentu yang relevan dengan kebutuhan Kota Bogor. Holistik artinya



menekankan pada pentingnya memandang pembangunan dari berbagai sudut pandang dan sektor secara menyeluruh. Integratif artinya mengedepankan koordinasi lintas sector dan lintas kelembagaan untuk dapat menciptakan sinergi antar berbagai instansi yang ada di Kota Bogor. Sedangkan spasial artinya menekankan pada pentingnya mempertimbangkan karakteristik geografis atau lokasi dalam perencanaan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

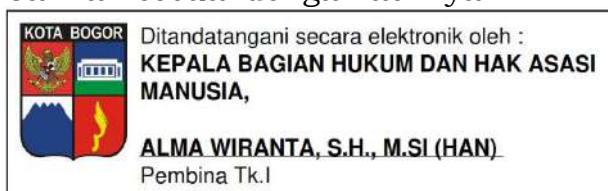
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 172

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR****NOMOR : 5 TAHUN 2025****TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR GRAFIK.....	9
BAB 1 PENDAHULUAN	11
1.1. LATAR BELAKANG.....	11
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	14
1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA	16
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	23
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	23
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	30
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	30
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah	30
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam	34
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	42
2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	52
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas.....	58
2.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	66
2.1.7. Demografi	85
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	97
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	97
2.2.2. Kesehatan untuk Semua	110
2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata	117
2.2.4. Penyediaan dan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur	124
2.2.5. Perlindungan Sosial yang Adaptif	153
2.2.6. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	154
2.2.7. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	185
2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	190
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia	190
2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.....	193
2.3.3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	207
2.3.4. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	208
2.3.5. Stabilitas Ekonomi Makro.....	210
2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM.....	213
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....	213
2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial.....	219
2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan.....	221
2.4.4. Kinerja setiap Urusan Pemerintahan Daerah.....	222
2.5. STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	259
2.5.1. Capaian SPM Urusan Pendidikan.....	269
2.5.2. Capaian SPM Urusan Kesehatan.....	269
2.5.3. Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum.....	271
2.5.4. Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	271
2.5.5. Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Trantibum	272
2.5.6. Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Daerah	273
2.5.7. Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Pemadam Kebakaran.....	273
2.5.8. Capaian SPM Urusan Sosial.....	274
2.6. KERJA SAMA DAERAH.....	275
2.7. KINERJA BUMD KOTA BOGOR.....	299
2.8. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	303

2.8.1.	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024	303
2.8.2.	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030	337
2.9.	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	351
2.9.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah	351
2.9.2.	Isu Strategis Daerah	383
BAB 3	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	411
3.1.	VISI DAN MISI.....	411
3.1.1.	Visi	411
3.1.2.	Misi.....	412
3.2.	TUJUAN DAN SASARAN	419
3.3.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH	426
3.4.	PROGRAM - PROGRAM PRIORITAS DAERAH	473
3.4.1.	PROGRAM PRIORITAS SESUAI DENGAN AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH.....	473
3.4.2.	DUKUNGAN PROGRAM DAERAH TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI JAWA BARAT.....	551
3.5.	RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH APBN DAN/ATAU APBD PROVINSI DI KOTA BOGOR.....	572
3.5.1.	Rencana Pembangunan Infrastruktur berdasarkan RPJMN 2025-2029....	572
3.5.2.	Rencana Pembangunan Infrastruktur berdasarkan RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031	579
3.6.	SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA	591
BAB 4	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	597
4.1.	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	597
4.2.	PROYEKSI INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KOTA BOGOR 2025-2030	658
4.3.	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	660
4.4.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	664
4.5.	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	684
BAB 5	PENUTUP	695
5.1.	PEDOMAN TRANSISI	696
5.2.	MANAJEMEN RISIKO	697

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan, RT dan RW Menurut Kecamatan	31
Tabel 2.2 Luas wilayah Kota Bogor berdasarkan jenis batuan.....	37
Tabel 2.3 Rata-rata suhu di Kota Bogor Tahun 2020–2024	40
Tabel 2.4 Jumlah hari hujan dan curah hujan di Kota Bogor Tahun 2020–2024	41
Tabel 2.5 Kondisi Daya Dukung Pangan Kota Bogor	43
Tabel 2.6 Proyeksi Daya Dukung Pangan Kota Bogor.....	43
Tabel 2.7 Status Daya Dukung Pangan terhadap Ambang Batas di Kota Bogor	45
Tabel 2.8 Kebutuhan Air di Kota Bogor	47
Tabel 2.9 Kebutuhan Air Proyeksi Tahun 2029 di Kota Bogor	48
Tabel 2.10 Ketersediaan Air di Kota Bogor.....	48
Tabel 2.11 Status Daya Dukung Air Terhadap Ambang Batas	51
Tabel 2.12 Indikator RTRW di Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	62
Tabel 2.13 Pengelolaan Sampah di Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	65
Tabel 2.14 Kelas Risiko Banjir Per Kecamatan di Kota Bogor	69
Tabel 2.15 Kelas Risiko Banjir Bandang Per Kecamatan di Kota Bogor	71
Tabel 2.16 Kelas Risiko Cuaca Ekstrem Per Kecamatan di Kota Bogor	73
Tabel 2.17 Kelas Risiko Bencana Tanah Longsor Per Kecamatan di Kota Bogor.	75
Tabel 2.18 Kelas Risiko Bencana Gempa Bumi Per Kecamatan di Kota Bogor	77
Tabel 2.19 Kelas Risiko Bencana Letusan Gunung Api Per Kecamatan di Kota Bogor	79
Tabel 2.20 Kelas Risiko Bencana Kegagalan Teknologi Per Kecamatan di Kota Bogor	80
Tabel 2.21 Kelas Risiko Bencana Kekeringan Per Kecamatan di Kota Bogor	82
Tabel 2.22 Struktur Kependudukan di Kota Bogor Tahun 2020-2024.....	88
Tabel 2.23 Struktur Penduduk Kota Bogor berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2020-2024	90
Tabel 2.24 Komposisi Penduduk berdasarkan Tingkat Produktivitas dan Angka Ketergantungan Kota Bogor Tahun 2020-2024	91
Tabel 2.25 Struktur Kependudukan di Kota Bogor berdasarkan Proyeksi Tahun 2025-2030.....	94
Tabel 2.26 Komposisi Penduduk berdasarkan Tingkat Produktivitas dan Angka Ketergantungan Kota Bogor Proyeksi Tahun 2025-2030	95
Tabel 2.27 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Wilayah Sekitar Tahun 2020-2024.....	99
Tabel 2.28 Tingkat Kemiskinan Kota Bogor dan Wilayah Sekitar Tahun 2020-2024	101
Tabel 2.29 PDRB Per kapita ADHK (Juta Rupiah) Kota Bogor dan Wilayah Sekitar	103
Tabel 2.30 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor dan Wilayah Sekitar	106
Tabel 2.31 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor dan Wilayah Sekitar	110
Tabel 2.32 Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2024.....	125
Tabel 2.33 Perkembangan Sarana Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2020 - 2024	126
Tabel 2.34 Jumlah dan Sebaran Rumah Sakit di Kota Bogor Tahun 2025.....	129
Tabel 2.35 Jumlah dan Sebaran Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2025.....	130
Tabel 2.36 Jumlah dan Sebaran Fasilitas Olah Raga Tahun 2025	133
Tabel 2.37 Profil Pengelolaan Air Limbah Kota Bogor	139
Tabel 2.38 Sumber dan Tingkat Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kota Bogor Tahun 2024	142
Tabel 2.39 Panjang Jalan Menurut Kewenangan Tahun 2024.....	143

Tabel 2.40 Persentase Panjang Jalan Menurut Kondis Jalan Kewenangan Kota di Kota Bogor Tahun 2019 – 2022.....	143
Tabel 2.41 Rute Trayek Angkutan Bis Kita Trans Pakuan.....	146
Tabel 2.42 Profil Backlog Kebutuhan Rumah Kota Bogor Tahun 2022.....	149
Tabel 2.43 Profil Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Bogor Tahun 2022.....	151
Tabel 2.44 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Bogor Berdasarkan SK Kumuh Nomor 600.2.1/KEP.216-disperumkim/2024.....	152
Tabel 2.45 Cagar Budaya di Kota Bogor yang Sudah Ditetapkan dan Dilestarikan.....	174
Tabel 2.46 Warisan Budaya Tak Benda di Kota Bogor yang Sudah Ditetapkan dan Dilestarikan serta yang Sedang Diusulkan.....	180
Tabel 2.47 Capaian Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor Tahun 2020-2024.....	185
Tabel 2.48 Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bogor, Tahun 2019-2024.....	201
Tabel 2.49 Rasio Kewirausahaan Kota Bogor Tahun 2020-2024.....	203
Tabel 2.50 Kinerja Perbankan Syariah di Kota Bogor tahun 2024.....	206
Tabel 2.51 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	207
Tabel 2.52 Indeks Infrastruktur Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	209
Tabel 2.53 Nilai Survei Penilaian Integritas Kota Bogor Tahun 2021-2024.....	218
Tabel 2.54 Angka Tingkat Kriminalitas di Kota Bogor Tahun 2019-2024 (kejadian).....	221
Tabel 2.55 Capaian Kinerja IKK pada RPJMD Kota Bogor 2019-2024.....	223
Tabel 2.56 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan.....	260
Tabel 2.57 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan.....	261
Tabel 2.58 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	264
Tabel 2.59 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat.....	265
Tabel 2.60 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial.....	266
Tabel 2.61 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	267
Tabel 2.62 Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan Kota Bogor.....	269
Tabel 2.63 Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan Kota Bogor.....	270
Tabel 2.64 Hasil Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Bogor.....	271
Tabel 2.65 Hasil Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Bogor.....	272
Tabel 2.66 Hasil Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Trantibum Kota Bogor.....	272
Tabel 2.67 Hasil Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Daerah Kota Bogor.....	273
Tabel 2.68 Hasil Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Pemadam Kebakaran Kota Bogor.....	274
Tabel 2.69 Hasil Capaian SPM Urusan Sosial Kota Bogor.....	274
Tabel 2.70 Implementasi Kerja sama Kota Bogor.....	276
Tabel 2.71 Kinerja BUMD Kota Bogor Tahun 2019-2022.....	302
Tabel 2.72 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020-2024.....	306
Tabel 2.73 Persentase Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Kota Bogor 2020-2024.....	311
Tabel 2.74 Realisasi Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020-2024.....	315
Tabel 2.75 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019-2023.....	319
Tabel 2.76 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bogor 2020-2024.....	326

<i>Tabel 2.77 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bogor</i>	<i>331</i>
<i>Tabel 2.78 Defisit Riil Anggaran Kota Bogor Tahun 2020-2024</i>	<i>333</i>
<i>Tabel 2.79 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bogor Tahun 2020-2024.....</i>	<i>335</i>
<i>Tabel 2.80 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bogor tahun 2020-2024.....</i>	<i>335</i>
<i>Tabel 2.81 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 Kota Bogor</i>	<i>339</i>
<i>Tabel 2.82 Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bogor.....</i>	<i>343</i>
<i>Tabel 2.83 Komponen Belanja Operasi dan Belanja Modal</i>	<i>347</i>
<i>Tabel 2.84 Kertas Kerja Masalah dan Akar Masalah dalam Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah.....</i>	<i>352</i>
<i>Tabel 2.85 Sintesis Isu Strategis</i>	<i>384</i>
<i>Tabel 3.1 Keterkaitan Misi RPJMD Kota Bogor 2025-2029 dengan Misi RPJPD Kota Bogor 2025- 2045 dan Misi RPJM Nasional 2025-2029.....</i>	<i>416</i>
<i>Tabel 3.2 Visi/Misi dan Tujuan RPJMD Kota Bogor</i>	<i>420</i>
<i>Tabel 3.3 Penahapan Pembangunan RPJMD Kota Bogor 2026-2030</i>	<i>427</i>
<i>Tabel 3.4 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029.....</i>	<i>429</i>
<i>Tabel 3.5 Program Kepala Daerah di Kota Bogor Tahun 2025-2030</i>	<i>473</i>
<i>Tabel 3.6 Program Infrastruktur Prioritas Kota Bogor</i>	<i>476</i>
<i>Tabel 3.7 Program Prioritas Infrastruktur Berdasarkan Tiap Kecamatan.....</i>	<i>477</i>
<i>Tabel 3.8 Penyelarasan Program Prioritas Kepala Daerah Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat</i>	<i>480</i>
<i>Tabel 3.9 Program Prioritas RPJMD Kota Bogor 2025-2029.....</i>	<i>484</i>
<i>Tabel 3.10 Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan.....</i>	<i>552</i>
<i>Tabel 3.11 Dukungan Prioritas Pembangunan Kota Bogor Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat.....</i>	<i>564</i>
<i>Tabel 3.12 Lokasi Prioritas dan Highlight Indikasi Intervensi RPJMN 2025-2029 yang terkait dengan Kota Bogor.....</i>	<i>572</i>
<i>Tabel 3.13 Program/Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang terkait dengan Kota Bogor</i>	<i>578</i>
<i>Tabel 3.14 Indikasi Program Utama Struktur Ruang RTRW Kota Bogor 2026-2031</i>	<i>579</i>
<i>Tabel 3.15 Rencana Pembangunan Infrastruktur Melalui Skema Creative Financing</i>	<i>596</i>
<i>Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2026-2030</i>	<i>598</i>
<i>Tabel 4.2 Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2030</i>	<i>659</i>
<i>Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Kota Bogor Tahun 2025-2030.....</i>	<i>661</i>
<i>Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030</i>	<i>665</i>
<i>Tabel 4.5 Standar Pelayanan Minimal.....</i>	<i>684</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Lainnya.....	17
Gambar 1.2 Keterkaitan Muatan RPJMN dan RPJMD.....	18
Gambar 1.3 Keterkaitan Muatan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota	19
Gambar 1.4 Keterkaitan Muatan RPJPD, RTRW dan RPJMD	20
Gambar 1.5 Keterkaitan Muatan RPJMD Teknokratik dan RPJMD	21
Gambar 1.6 Keterkaitan Muatan RPJMD dan KLHS RPJMD.....	21
Gambar 1.7 Keterkaitan Muatan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral.....	22
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Bogor.....	32
Gambar 2.2 Peta Ketinggian.....	35
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kota Bogor.....	36
Gambar 2.4 Peta Geologi Regional Kota Bogor.....	37
Gambar 2.5 Peta Hidrologi	39
Gambar 2.6 Peta Kebutuhan Energi Pangan Kota Bogor.....	44
Gambar 2.7 Peta Ketersediaan Energi Pangan Kota Bogor	44
Gambar 2.8 Status Daya Dukung Pangan Kota Bogor	45
Gambar 2.9 Peta Ambang Batas Pangan	46
Gambar 2.10 Peta Kebutuhan Air Kota Bogor.....	49
Gambar 2.11 Peta Ketersediaan Air Kota Bogor	49
Gambar 2.12 Peta Status Daya Dukung Air Kota Bogor	50
Gambar 2.13 Peta Ambang Batas Air Kota Bogor.....	52
Gambar 2.14 Peta Perubahan Penggunaan Lahan Kota Bogor Tahun 2015-2023	61
Gambar 2.15 Peta Risiko Banjir Kota Bogor	70
Gambar 2.16 Peta Risiko Banjir Bandang di Kota Bogor	72
Gambar 2.17 Peta Risiko Cuaca Ekstrem Kota Bogor	74
Gambar 2.18 Peta Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor	76
Gambar 2.19 Peta Risiko Gempa Bumi di Kota Bogor	78
Gambar 2.20 Peta Risiko Kegagalan Teknologi di Kota Bogor.....	80
Gambar 2.21 Peta Risiko Kekeringan di Kota Bogor	81
Gambar 2.22 Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2024	87
Gambar 2.23 Peta Sebaran Sarana Pendidikan	127
Gambar 2.24 Peta Sebaran Perguruan Tinggi.....	128
Gambar 2.25 Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan	132
Gambar 2.26 Peta Fasilitas Sarana Olah Raga	134
Gambar 2.27 Peta Sebaran Ruang Terbuka Hijau.....	136
Gambar 2.28 Peta Sistem Penyediaan Air Minum.....	137
Gambar 2.29 Peta Sebaran TPS dan TPS 3R.....	141
Gambar 2.30 Peta Jaringan Jalan Kota Bogor.....	144
Gambar 2.31 Peta Rute Angkutan Jalan	146
Gambar 2.32 Peta Sebaran Wifi Publik.....	147
Gambar 2.33 Peta Sebaran Rumah Susun	150
Gambar 2.34 Peta Kawasan Bersejarah Kota Bogor	156
Gambar 2.35 Sungai Ciliwung yang melewati Kebun Raya Bogor.....	158

<i>Gambar 2.36 Kawasan Situ Gede</i>	<i>159</i>
<i>Gambar 2.37 Pohon (Heritage Tree) di area kebun raya</i>	<i>160</i>
<i>Gambar 2.38 Peta Sub Kawasan Kota Bogor</i>	<i>170</i>
<i>Gambar 2.39 Pusaka Saujana Kota Bogor</i>	<i>173</i>
<i>Gambar 2.40 Isu Megatren Global 2045.....</i>	<i>389</i>
<i>Gambar 2.41 Risiko Global Jangka Menengah</i>	<i>390</i>
<i>Gambar 3.1 Uraian Misi RPJMD Kota Bogor 2025-2029, Misi RPJPD Kota Bogor 2025-2045, dan Misi RPJM Nasional 2025-2029.....</i>	<i>415</i>
<i>Gambar 3.2 Pengelompokan Misi Pembangunan dengan Prioritas Kota.....</i>	<i>551</i>
<i>Gambar 4.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah (Permendagri 86/2017, Gambar G-B.5)..</i>	<i>657</i>



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Rata-Rata Suhu di Kota Bogor Tahun 2020–2024.....	40
Grafik 2.2 Konsumsi Listrik per Kapita di Kota Bogor Tahun 2019-2023.....	53
Grafik 2.3 Capaian kinerja pelayanan air minum di Kota Bogor tahun 2020 -2024.....	54
Grafik 2.4 Indeks Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2020–2024.....	55
Grafik 2.5 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	57
Grafik 2.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2020–2024	60
Grafik 2.7 Indikator RTRW di Kota Bogor tahun 2019-2024	63
Grafik 2.8 Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang Layak di Kota Bogor Tahun 2020-2024	64
Grafik 2.9 Pengelolaan Sampah di Kota Bogor Tahun 2019-2024	66
Grafik 2.10 Indeks Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2019–2024.....	68
Grafik 2.11 Potensi Penurunan Emisi GRK di Kota Bogor Tahun 2021-2024	83
Grafik 2.12 Indeks Ketahanan Daerah Kota Bogor Tahun 2021-2024.....	84
Grafik 2.13 Persentase Penduduk per Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2020-2024.....	89
Grafik 2.14 Piramida Penduduk Kota Bogor Tahun 2020-2024	93
Grafik 2.15 Proyeksi Piramida Penduduk Kota Bogor berdasarkan Proyeksi Tahun 2025-2030 ..	97
Grafik 2.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	98
Grafik 2.17 Tingkat Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	100
Grafik 2.18 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Bogor Tahun 2019-2024	102
Grafik 2.19 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2019–2024.....	104
Grafik 2.20 Proyeksi Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2025-2030.....	107
Grafik 2.21 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	108
Grafik 2.22 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	110
Grafik 2.23 Indeks Keluarga Sehat Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2018-2023	112
Grafik 2.24 Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) di Kota Bogor Tahun 2020-2024	114
Grafik 2.25 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	115
Grafik 2.26 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Bogor Tahun 2019-2024	116
Grafik 2.27 Indeks Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	117
Grafik 2.28 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bogor Tahun 2019-2024	119
Grafik 2.29 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	120
Grafik 2.30 Angka Literasi dan Numerasi SD Kota Bogor Tahun 2023-2024	121
Grafik 2.31 Angka Literasi dan Numerasi SMP Kota Bogor Tahun 2023-2024.....	122
Grafik 2.32 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bogor Tahun 2022-2024.....	124
Grafik 2.33 Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum Layak (persen) ..	137
Grafik 2.34 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Bogor Tahun 2022-2024	153
Grafik 2.35 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor Tahun 2020-2024.....	154
Grafik 2.36 Indeks Ketimpangan Gender di Kota Bogor Tahun 2020-2024.....	186
Grafik 2.37 Indeks Pembangunan Gender di Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	187
Grafik 2.38 Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	188
Grafik 2.39 Indeks Pembangunan Pemuda di Kota Bogor 2020-2023.....	190

Grafik 2.40 Angka Ketergantungan Kota Bogor Tahun 2019-2024	191
Grafik 2.41 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Bogor Tahun 2019-2024	193
Grafik 2.42 Laju PDRB Industri Pengolahan Kota Bogor Tahun 2020-2024	195
Grafik 2.43 Rasio PDRB Akomodasi Makanan dan Minuman Kota Bogor Tahun 2020-2024	196
Grafik 2.44 Laju PDRB Akomodasi Makanan dan Minuman Kota Bogor Tahun 2020-2024	197
Grafik 2.45 Rasio PDRB Perdagangan Kota Bogor Tahun 2020-2024	198
Grafik 2.46 Laju PDRB Perdagangan Kota Bogor Tahun 2020-2024	200
Grafik 2.47 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bogor Tahun 2019-2024	204
Grafik 2.48 Indeks Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024	205
Grafik 2.49 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau di Kota Bogor Tahun 2019-2024	209
Grafik 2.50 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Bogor Tahun 2020-2024	211
Grafik 2.51 Tingkat Inflasi Kota Bogor Tahun 2019-2024	212
Grafik 2.52 Indeks Reformasi Hukum Kota Bogor Tahun 2023 dan 2024	214
Grafik 2.53 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bogor Tahun 2019-2024	216
Grafik 2.54 Indeks Pelayanan Publik Kota Bogor Tahun 2020-2024	217
Grafik 2.55 Indeks Daya Saing Daerah di Kota Bogor Tahun 2019-2024	222
Grafik 2.56 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor 2020-2024	305
Grafik 2.57 Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bogor 2020-2024	305
Grafik 2.58 Realisasi Belanja Daerah Kota Bogor 2020-2024	313
Grafik 2.59 Realisasi Komponen Belanja Daerah Kota Bogor 2020-2024	313
Grafik 2.60 Realisasi Komponen Pembiayaan Daerah Kota Bogor 2019-2024	318
Grafik 2.61 Neraca Daerah Kota Bogor Tahun 2020-2024	323

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 bahwa Rencana pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 berakhir seiring dengan berakhirnya masa kepemimpinan Wali Kota Bogor periode 2019-2024 yakni Dr. Bima Arya Sugiarto dengan Wakil Wali Kota Bogor, Drs. Dedie A. Rachim, M.A. Pada 27 November 2024 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak, yang telah menetapkan Wali Kota Bogor untuk periode 2025-2030 yakni Drs. Dedie A. Rachim, M.A. dengan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin. Pelantikan Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden RI.

Visi Wali Kota Bogor 2025-2029 adalah Bogor Beres, Bogor Maju, dengan 4 Misi yaitu Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera dan Bogor Lancar. Visi Misi inilah yang menjadi acuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, selain Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Perda No. 10 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Bogor 2025-2045 serta RPJMD Provinsi Jawa Barat, sebagaimana amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan

Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RPJMN.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah, juga mewujudkan visi jangka panjang daerah sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah lima tahun pada tahapan pertama RPJPD 2025-2045. RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan baik tingkat Pemerintah Daerah (RKPD) dan tingkat Perangkat Daerah (Renja-PD) serta menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran, evaluasi kinerja, dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, dan top-down serta bottom-up. Pendekatan proses perencanaan sebagaimana dimaksud diatas yaitu :

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana program karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dalam hal ini, pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. Pendekatan politis juga dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Bogor, yang mengacu pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah

terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan, para pakar/narasumber yang kompeten di bidangnya. Penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dilaksanakan melalui proses konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan, pembahasan dengan perangkat daerah sebagai pelaksana pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 juga menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Tematik artinya bahwa RPJMD disusun dengan berfokus pada tema tertentu yang relevan dengan kebutuhan Kota Bogor. Holistik artinya menekankan pada pentingnya memandang pembangunan dari berbagai sudut pandang dan sektor secara menyeluruh. Integratif artinya mengedepan dan koordinasi lintas sektor dan lintas kelembagaan untuk dapat menciptakan sinergi antar berbagai instansi yang ada di Kota Bogor. Sedangkan spasial artinya menekankan pada pentingnya mempertimbangkan karakteristik geografis atau lokasi dalam perencanaan pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

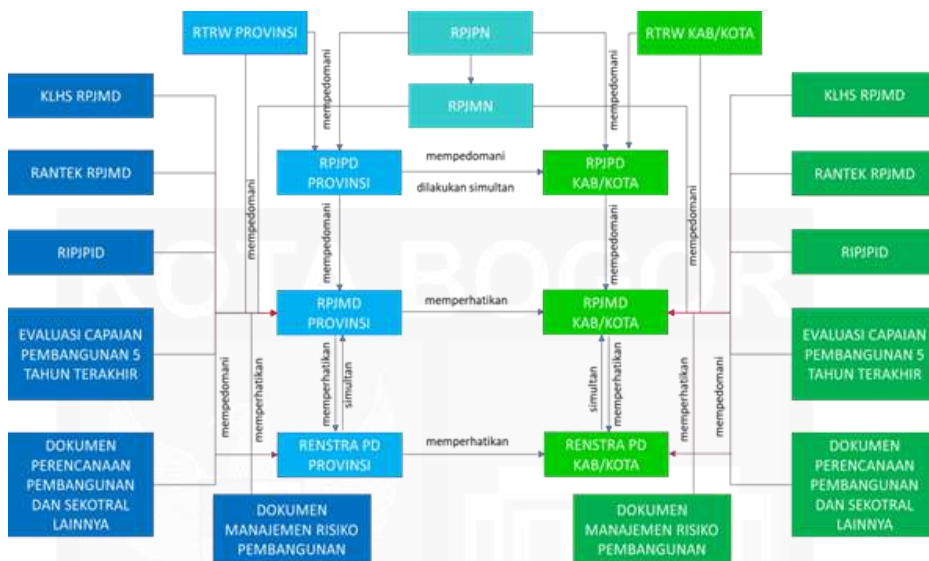
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Bogor No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2045.

1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan dan penyusunan anggaran pemerintah di tingkat pusat (APBN) dan di tingkat daerah (APBD). Dokumen perencanaan di tingkat daerah merupakan rangkaian dokumen yang saling terkait dan terintegrasi, mulai dari tingkat perencanaan jangka panjang hingga jangka pendek. Masing-masing

dokumen memiliki peran dan tujuan yang spesifik, namun secara keseluruhan membentuk suatu sistem yang koheren untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan muatannya, keterkaitan antar dokumen perencanaan disajikan pada Gambar 1.1.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri

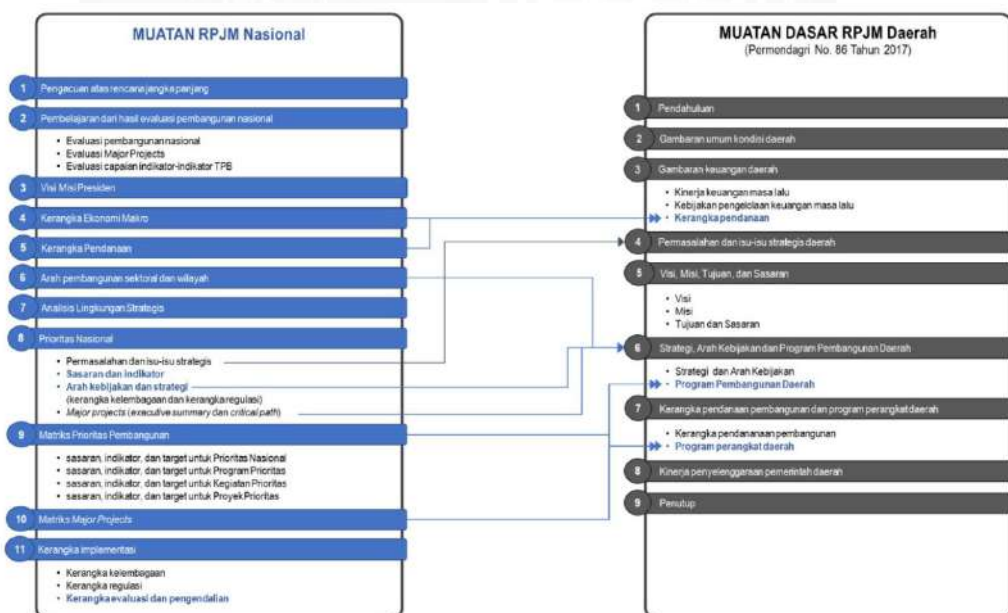
Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Lainnya

1. Keterkaitan antara RPJMD Kota Bogor dengan RPJMN

RPJM Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD dan RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan yang saling terkait, di mana RPJMD di tingkat daerah harus selaras dengan RPJMN di tingkat nasional. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Kota Bogor harus turut serta dalam

mendukung tujuan nasional. Selain itu, keterkaitan antara RPJMD Kota Bogor dengan RPJMN terletak pada upaya sinkronisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di berbagai tingkatan pemerintahan. Diantaranya terkait kerangka ekonomi makro yang termuat dalam RPJMN perlu dipertimbangkan dalam menyusun kerangka pendanaan pada Bab 3 RPJMD. Isu-isu strategis nasional juga perlu menjadi rujukan dalam menyusun permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Muatan arah pembangunan sektoral dan wilayah pada RPJMN perlu mendapatkan perhatian dalam menyusun permasalahan dan isu-isu strategis daerah (RPJMD). Matriks Prioritas Pembangunan dan matrik major perlu menjadi rujukan dalam penyusunan program pembangunan daerah dan program perangkat daerah pada RPJMD. Gambaran keterkaitan selengkapnya terkait keterkaitan keduanya sesuai disajikan pada Gambar 1.2.

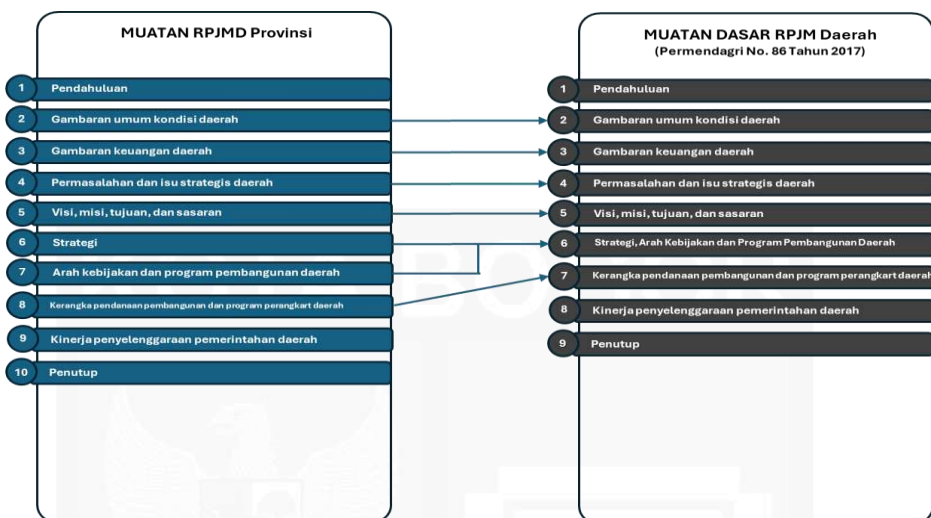


Gambar 1.2 Keterkaitan Muatan RPJMN dan RPJMD

2. Keterkaitan antara RPJMD Kota Bogor dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Keterkaitan antara RPJMD Kota Bogor dan RPJMD Provinsi Jawa Barat adalah harus saling memperhatikan Gambar 1.3. Dokumen RPJMD Provinsi harus menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD

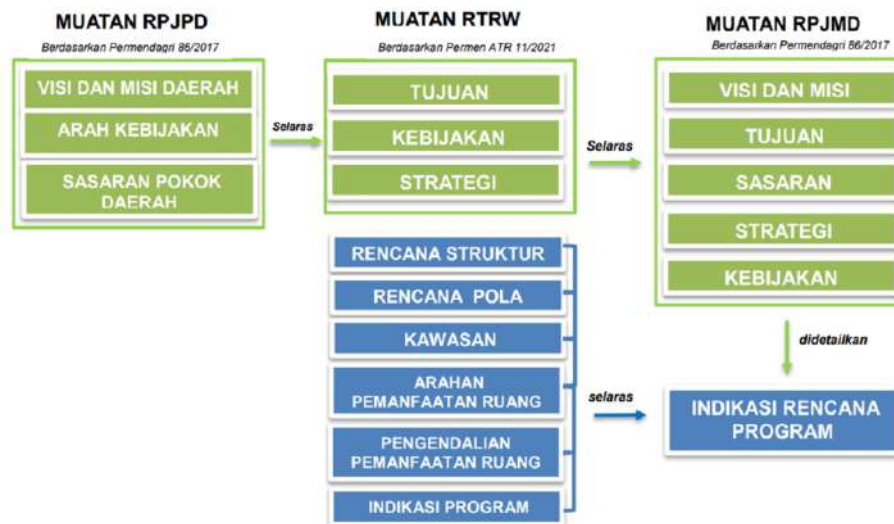
Kota Bogor. Visi dan Misi yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 akan diintegrasikan ke dalam prioritas sasaran pembangunan daerah Kota Bogor sebagai bagian dari penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih.



Gambar 1.3 Keterkaitan Muatan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota

3. Keterkaitan antara RPJMD Kota Bogor dengan RPJPD Kota Bogor dan RTRW Kota Bogor

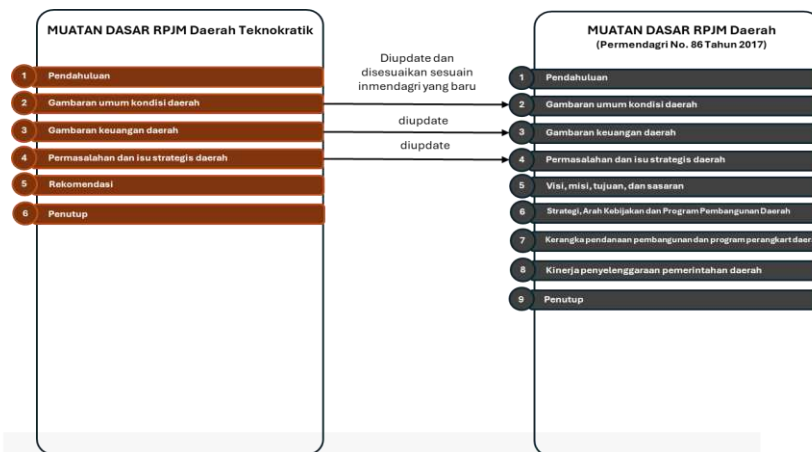
RPJMD berpedoman pada RPJPD. RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 menjabarkan prioritas pembangunan Tahap I pada RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045. RTRW Kota Bogor diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031. Berdasarkan muatannya, ketiga dokumen ini saling terkait. Dokumen RPJPD harus selaras dengan muatan dalam RTRW dan juga selaras dengan RPJMD. Utamanya terkait indikasi rencana program dalam RPJMD harus selaras dengan pola ruang, struktur ruang, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian ruang, dan indikasi program. Gambaran selengkapnya terkait keterkaitan ini sesuai disajikan pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4 Keterkaitan Muatan RPJPD, RTRW dan RPJMD

4. Keterkaitan antara RPJMD Kota Bogor dengan RPJMD Teknokratik Kota Bogor

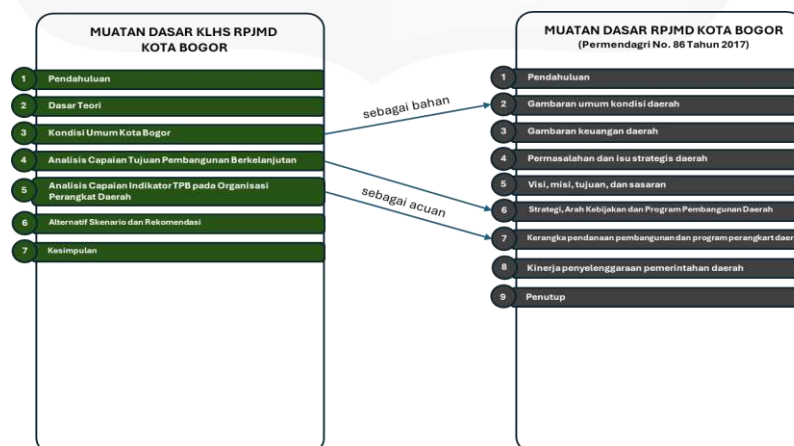
Sebelum menyusun RPJMD, telah dilakukan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Bogor. Rancangan Teknokratik RPJMD disusun oleh pemerintah daerah sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penyusunannya menggunakan pendekatan teknokratik, yaitu metode ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif. Kegunaan menyusun RPJMD teknokratik adalah menyusun RPJMD awal, membantu calon kepala daerah menyusun visi, misi, dan program prioritas, dan memberikan pedoman dan informasi awal bagi calon kepala daerah. Hal-hal catatan penting tertuang dalam bab akhir rekomendasi dalam RPJMD Teknokratik. Sementara itu, apabila ditinjau dari isi dokumen RPJMD Teknokratik dapat menjadi baseline dalam menyusun RPJMD. Umumnya perlu melakukan updating data untuk digunakan dalam RPJMD. Gambaran selengkapnya keterkaitan RPJMD Teknokratik dan RPJMD sesuai disajikan pada Gambar 1.5.



Gambar 1.5 Keterkaitan Muatan RPJMD Teknokratik dan RPJMD

5. Keterkaitan antara RPJMD Kota Bogor dengan KLHS RPJMD

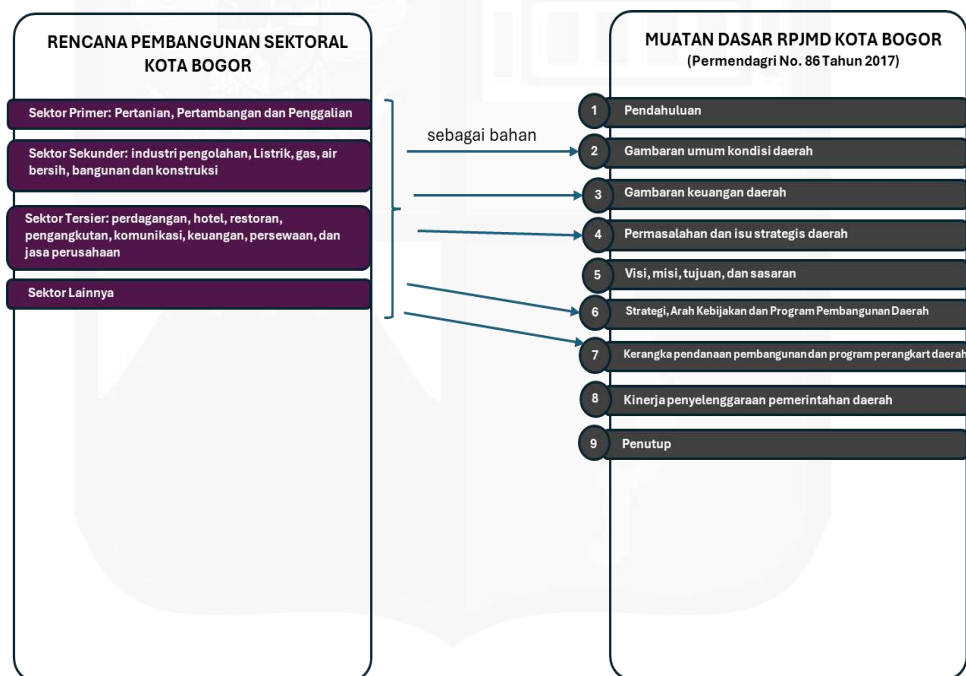
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD merupakan dokumen yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam RPJMD. KLHS menjadi instrumen wajib untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Secara fungsi, dokumen KLHS RPJMD digunakan untuk menyempurnakan tujuan dan sasaran RPJMD, membantu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, dan digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif kebijakan, rencana, dan/atau program. Guna memastikan keberlanjutan dalam setiap aspek perencanaan, dokumen RPJMD perlu merujuk KLHS RPJMD. Gambaran selengkapnya keterkaitan kedua dokumen sesuai disajikan pada Gambar 1.6.



Gambar 1.6 Keterkaitan Muatan RPJMD dan KLHS RPJMD

6. Keterkaitan antara RPJMD Kota Bogor dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berkaitan dengan rencana pembangunan sektoral dalam hal memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. RPJMD juga harus sinkron dan sinergi dengan rencana pembangunan sektoral. Isu, dan permasalahan yang ada di sektoral harus di-record dalam RPJMD. Beberapa data dan informasi yang terdapat dalam dokumen perencanaan sektoral berkontribusi dalam isi bab pada RPJMD, khususnya bagian-bagian yang terkait sektoral, mulai dari gambaran umum sampai pada pendanaan. Keterkaitan selengkapnya sesuai disajikan pada Gambar 1.7.



Gambar 1.7 Keterkaitan Muatan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektor

7. Keterkaitan antara RPJMD Kota Bogor dengan Dokumen Manajemen Resiko Pembangunan

Dokumen manajemen risiko pembangunan adalah dokumen yang berisi tentang usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar

dampak risiko bisa diminimalisasi. Dalam penyusunan RPJMD Kota Bogor harus memperhatikan dokumen manajemen risiko pembangunan. Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa untuk menjalankan rencana pembangunan nasional, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi, baik didalam maupun lintas kementerian/Lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 adalah tersusunnya pedoman pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran Visi Misi Wali Kota Bogor 2025-2029. Tujuan penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Tersusunnya gambaran umum kondisi daerah.
- b. Tersusunnya gambaran umum dan proyeksi keuangan daerah.
- c. Terumuskannya permasalahan dan isu strategis Pembangunan Daerah.
- d. Terjabarkannya Visi Misi Kepala Daerah menjadi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.
- e. Terumuskannya kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi kepala daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025- 2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID, Rencana Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

1.5. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Memuat data-data dan informasi mengenai a) Posisi dan Peran Strategis Daerah; b) Potensi Sumber Daya Alam; c) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; d) Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan; e) Lingkungan Hidup Berkualitas; f) Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim; g) Demografi.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Memuat data-data dan informasi mengenai a) Kesejahteraan Ekonomi; b) Kesehatan untuk Semua; c) Pendidikan Berkualitas yang Merata; d) Perlindungan Sosial yang Adaptif; e) Beragama

Maslahat dan Berkebudayaan Maju; f) Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Memuat data-data dan informasi mengenai a) Daya Saing Sumber Daya Manusia; b) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; c) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; d) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi; e) Stabilitas Ekonomi Makro.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Memuat data-data dan informasi mengenai a) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif; b) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial; c) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan; d) Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

2.5. Standar Pelayanan Minimal

Memuat data-data dan informasi mengenai capaian Standar Pelayanan Minimal setiap urusan di lingkup Pemerintah Daerah Kota Bogor.

2.6. Kerja Sama Daerah

Memuat data-data dan informasi mengenai kerja sama yang telah diimplementasikan oleh setiap perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Bogor.

2.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kota Bogor

Memuat data-data dan informasi mengenai berbagai rencana pembangunan infrastruktur oleh yang didanai oleh APBN dan/atau APBD Provinsi Jawa Barat di Kota Bogor.

2.8. Kinerja BUMD Kota Bogor

Memuat data-data dan informasi mengenai BUMD yang ada di Kota Bogor.

2.9. Gambaran Keuangan Daerah

2.9.1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dengan menggunakan data yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.9.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029

Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026-2030 yang disusun berdasarkan kinerja keuangan tahun 2020-2024, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis. Proyeksi keuangan ini seyogyanya bersumber dari perangkat daerah yang mampu pendapatan dan belanja keuangan daerah.

2.10. Permasalahan dan Isu Strategis

2.10.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja, sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

2.10.2. Isu Strategis Daerah

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB 3. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi dan Misi

3.1.1. Visi

Visi disajikan sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tertulis pada persyaratan ketika mendaftar di KPUD.

3.1.2. Misi

Misi disajikan sesuai dengan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tertulis pada persyaratan ketika mendaftar di KPUD dan dapat disesuaikan dengan pendekatan teknokratik agar sesuai dengan kaidah penyusunan misi.

3.1.3. Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota disajikan sesuai dengan yang tertulis pada persyaratan ketika mendaftar di KPUD

3.2. Tujuan dan sasaran

Tujuan diturunkan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Arah kebijakan merupakan rangkaian

kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

3.4. Program-Program Prioritas Daerah

Program prioritas dihasilkan dari *cascading* kinerja (bukan *cascading* indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

BAB 4. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Memuat daftar program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2029, sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034

4.2. Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor 2025-2029

Bagian ini berisi proyeksi indikator makro yang menjadi salah satu tolok ukur kunci keberhasilan rencana pembangunan Kota Bogor selama Tahun 2025-2029.

4.3. Indikator Kinerja Utama Daerah

Memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

4.4. Indikator Kinerja Daerah

Memuat penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD). IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang

pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

BAB 5. PENUTUP

Bagian ini merupakan penegasan kesimpulan dan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Muatannya kesimpulan penting substansial, pedoman transisi, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan aspek demografi merupakan hal yang penting dalam pembangunan suatu daerah. Aspek geografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah Kota Bogor yang mencakup luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan serta karakteristik dan potensi pengembangan wilayah. Sementara itu, aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi di Kota Bogor dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti jumlah, struktur, laju dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk.

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara $106^{\circ}43'30''\text{BT}$ – $106^{\circ}51'00''\text{BT}$ dan $6^{\circ}30'30''\text{LS}$ – $6^{\circ}41'00''\text{LS}$. Kota Bogor berada pada posisi yang strategis dari segi pengembangan wilayah karena berada di tengah wilayah kabupaten Bogor merupakan bagian dari kawasan aglomerasi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Cianjur (Jabodetabekjur). Luas wilayah Kota Bogor sebesar $111,39 \text{ km}^2$ yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan (Tabel 2.1). Keenam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, dan Kecamatan Tanah Sareal. Kecamatan Bogor Selatan merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar, yaitu $30,50 \text{ km}^2$ (27,38%), sementara itu Kecamatan Bogor Tengah merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil, yaitu $8,37 \text{ km}^2$ (7,51%).

Dilihat dari karakteristik wilayah, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur, dan Kecamatan Tanah Sereal memiliki karakteristik wilayah *urban* yang dicirikan di antaranya dengan infrastruktur lebih lengkap, pusat bisnis dan ekonomi, pusat layanan pendidikan dan kesehatan, serta aksesibilitas yang lebih mudah. Sementara itu, Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan memiliki karakteristik wilayah cenderung lebih dominan *rural* yang dicirikan di antaranya oleh fasilitas perekonomian, kesehatan dan pendidikan yang lebih terbatas serta struktur jaringan jalan yang lebih kecil.

Secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut:

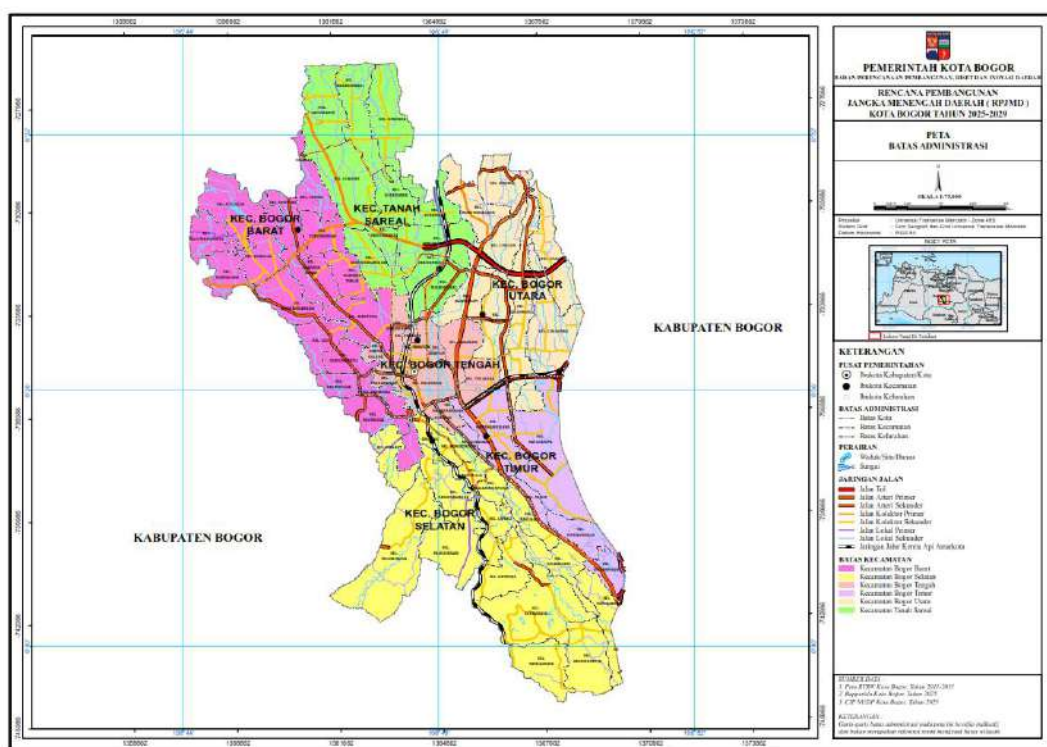
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cijeruk, dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah dan batas-batas wilayah administratif dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan, RT dan RW Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan	Jumlah RT/RW	
					RT	RW
1	Bogor Selatan	30,50	27,38	16	764	190
2	Bogor Timur	10,46	9,41	6	357	67
3	Bogor Utara	18,14	16,27	8	558	109
4	Bogor Tengah	8,37	7,51	11	433	99
5	Bogor Barat	23,32	20,93	16	853	197
6	Tanah Sereal	20,60	18,50	11	687	139
Total		111,39	100,00	68	3642	801

Sumber: BPS Kota Bogor, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031



Sumber: Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Bogor

2.1.1.1. Kota Bogor dalam Konstelasi Regional Jabodetabek

Dalam konstelasi Jabodetabek, Kota Bogor memainkan peran strategis sebagai kota yang tidak hanya menopang kebutuhan permukiman tetapi juga berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di selatan Jakarta. Kota Bogor memiliki potensi diberbagai sektor untuk terus berkembang yaitu :

a. Sektor Ekonomi

Kota Bogor mempunyai daya tarik wisata dengan keberadaan Kebun Raya Bogor, Istana Bogor, kawasan heritage dan kuliner, Hutan Penelitian Dramaga dan Situ Gede, *Bogor Street Festival*, Festival budaya Sunda dan berbagai parade komunitas, venue event, hotel, dan gedung pertemuan. Keberadaan UMKM di Kota Bogor menjadi kekuatan utama ekonomi lokal, seperti kuliner, kerajinan, fashion, tanaman hias, produk olahan. Peran program inkubasi bisnis oleh IPB turut mendorong perkembangan UMKM. Selain itu, perkembangan ekonomi kreatif mempunyai peranan besar dalam ekonomi kota, seperti kuliner, kriya dan kerajinan, desain grafis,

fotografi dan videografi, fashion, kuliner lifestyle, musik, seni pertunjukan, aplikasi dan pengembangan perangkat lunak serta arsitektur dan interior kreatif.

b. Pendidikan dan Kesehatan

Keberadaan IPB University dan perguruan tinggi lainnya serta banyaknya sekolah menengah, lembaga keahlian lainnya yang berkualitas di Kota Bogor menjadi daya tarik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Setidaknya terdapat 24 perguruan tinggi di Kota Bogor. Selain itu Kota Bogor memiliki beberapa rumah sakit termasuk senior living yang menjadi tujuan memperoleh layanan kesehatan baik warga Kota Bogor maupun di luar Kota Bogor.

c. Infrastruktur dan Lingkungan

Aksesibilitas transportasi baik menuju Kota Bogor maupun internal Kota Bogor sangat mudah seperti Jalan Tol Jagorawi, Jalan Tol Bogor Ring Road, KRL, Kereta Api Bogor - Sukabumi, Bus konektivitas Jabodetabek dan antar provinsi maupun Bandara Soekarno Hatta, pelayanan bus kota. Selain itu terus dikembangkannya jalur pedestrian, taman kota dan lanscape jalur hijau yang masih terjaga, menambah daya tarik Kota Bogor.

Suburbanisasi yang terjadi di Kota Bogor berdampak pada peningkatan tekanan terhadap infrastruktur dan lingkungan. Keberadaan jalan tol dan KRL memang mendukung aksesibilitas, tetapi di sisi lain, peningkatan jumlah kendaraan pribadi juga memicu kemacetan yang semakin parah. Selain itu, hilangnya ruang hijau akibat ekspansi lahan terbangun meningkatkan risiko banjir serta berkurangnya daya dukung lingkungan.

Meskipun pertumbuhan ini membawa dampak positif seperti peningkatan investasi dan ekonomi lokal, tantangan besar juga muncul dalam hal tata kelola lingkungan dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih baik dalam pengendalian alih fungsi lahan

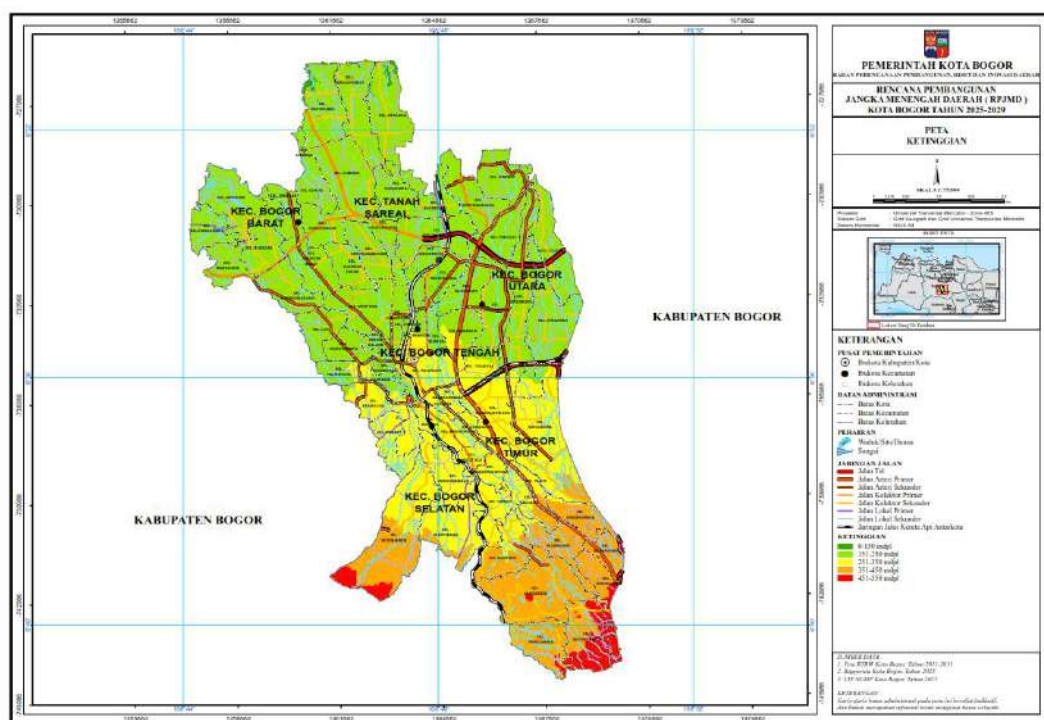
melalui penguatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pengembangan transportasi publik juga menjadi faktor kunci dalam mengurangi kemacetan dan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Selain itu, pelestarian ruang terbuka hijau harus menjadi prioritas agar keseimbangan ekologi tetap terjaga di tengah pesatnya urbanisasi. Dengan strategi pembangunan yang berkelanjutan, Kota Bogor dapat terus berkembang secara harmonis dalam ekosistem metropolitan Jabodetabek tanpa mengorbankan daya dukung wilayahnya.

Seiring dengan pertumbuhan populasi dan meningkatnya kebutuhan ruang permukiman, lahan terbangun diprediksi akan semakin meluas ke arah selatan dan timur, mengarah ke wilayah perbatasan dengan Kabupaten Bogor. Tekanan terhadap konversi lahan pertanian dan ruang hijau akan semakin meningkat, seiring dengan terus berkembangnya kawasan perumahan, komersial, serta infrastruktur pendukung lainnya. Salah satu faktor utama yang akan mempercepat pertumbuhan ini adalah pembangunan infrastruktur transportasi yang semakin massif. Rencana pengembangan jalur transportasi publik seperti perpanjangan jalur KRL dan pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang menghubungkan Bogor dengan Jakarta akan meningkatkan daya tarik Kota Bogor sebagai kawasan sub urban yang ideal bagi para komuter. Selain itu, dengan meningkatnya mobilitas dan aksesibilitas, industri kreatif dan sektor ekonomi berbasis jasa diprediksi akan tumbuh signifikan, mengubah struktur ekonomi Kota Bogor yang sebelumnya lebih banyak bergantung pada sektor agraris dan pariwisata.

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

2.1.2.1. Topografi

Kota Bogor mempunyai bentang alam bervariasi mulai dari permukaan datar di bagian Utara, melandai di bagian Tengah hingga berbukit dan bergelombang di bagian Selatan, dengan ketinggian bervariasi, dengan ketinggian minimum 190 m dan ketinggian maksimum 550 m di atas permukaan laut (lihat Gambar 2.2).

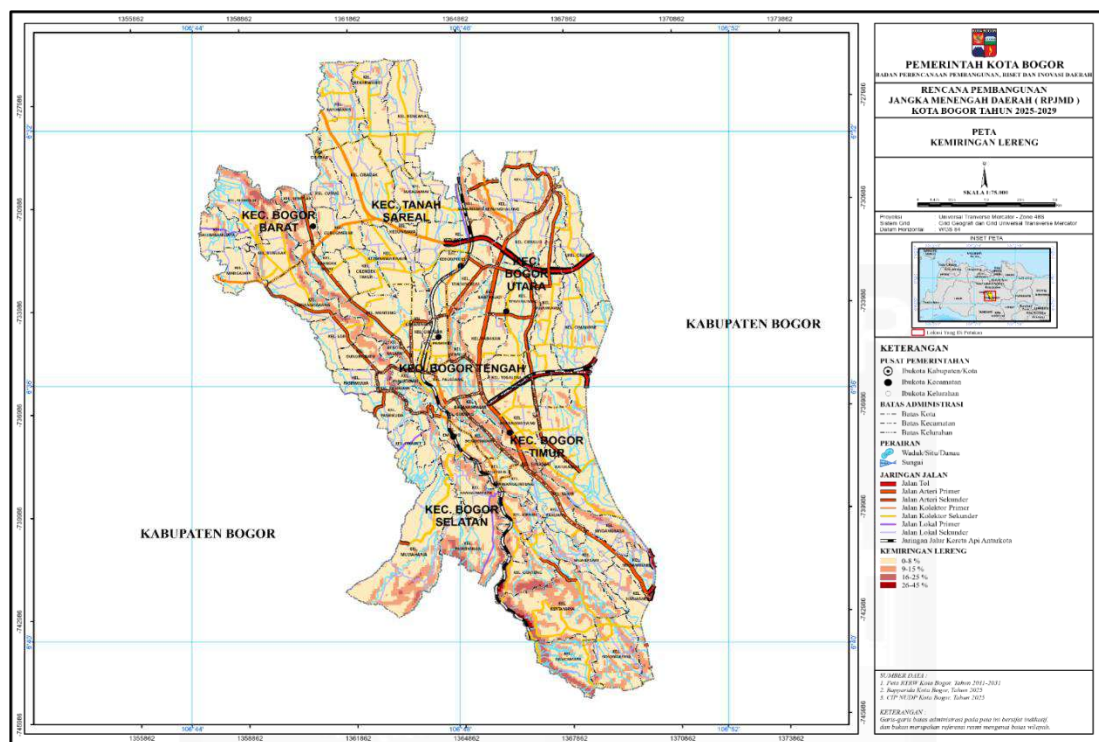


Gambar 2.2 Peta Ketinggian

Berdasarkan kemiringan lereng, sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan berkisar 0–8 persen seluas 10.415,03 hektar yang tersebar di enam kecamatan. Sementara itu 651,57 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 9–15 persen, seluas 63,88 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 16–25 persen, seluas 7,10 hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 26–40 persen dan lahan sangat curam seluas 0,84 hektar dengan kemiringan lebih dari 40 persen.

Lahan dengan kemiringan lebih dari 40% tersebar di Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Tanah Sareal. Sementara itu, Kecamatan Bogor Utara tidak memiliki lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen. Kecamatan Bogor Barat merupakan daerah di Kota Bogor yang tergolong sangat rawan terhadap bencana longsor, karena mempunyai lahan terluas dengan kemiringan lebih dari 40 persen atau sangat curam yaitu seluas 0,31 Ha. Wilayah lain yang memiliki lahan sangat curam adalah Kecamatan Bogor

Selatan dan Kecamatan Bogor Tengah dengan luas 0,25 Ha. Sementara itu, Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Tanah Sareal masing-masing memiliki lahan sangat curam 0,02 Ha dan 0,01 Ha.



Sumber: Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031

Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kota Bogor

2.1.2.2. Geologi

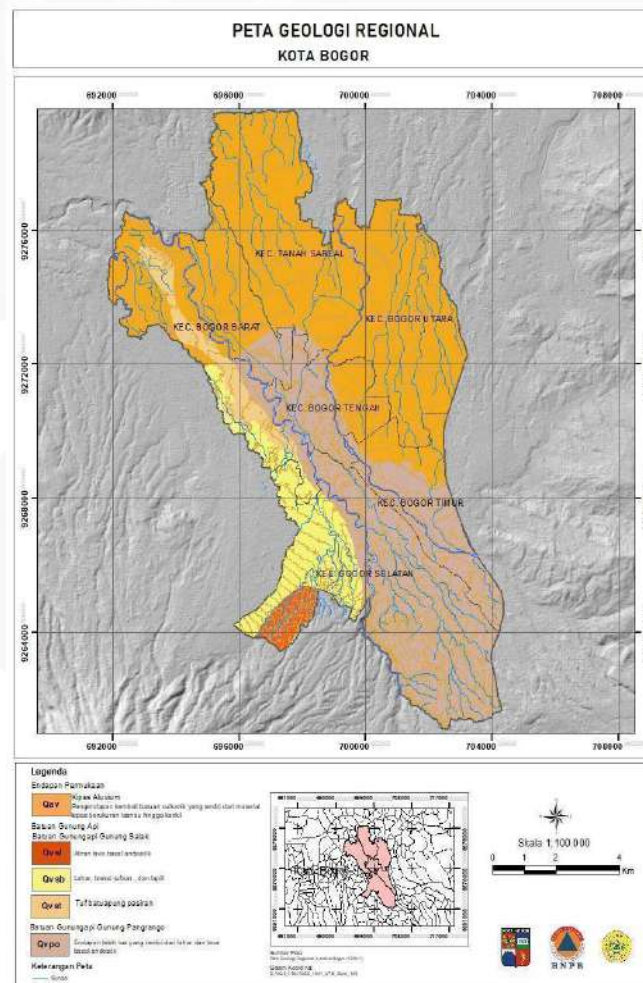
Kondisi geologi di Kota Bogor umumnya tersusun oleh batuan vulkanik dari Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Batuan vulkanik dari gunung tersebut tersebar di bagian selatan Kota Bogor, sedangkan bagian utara tersusun oleh material hasil pelapukan batuan vulkanik. Kemudian untuk batuan di sekitar aliran sungai utama berupa endapan aluvium yang terdiri dari kerikil dan pasir. Bagian barat Kota Bogor didominasi oleh Endapan Lebih Tua yang terdiri dari lahar dan lava dengan kandungan andesit basaltic (Qvpo). Batuan ini berasal dari Gunung Pangrango. Bagian timur disusun oleh batuan yang berasal dari Gunung Salak, terdiri dari lahar, breksi tufan, dan lapilli (Qvsb), aliran lava basal (qvsl), dan tuf batuapung pasir (Qvst). Bagian utara didominasi oleh kipas alluvium yang merupakan

pengendapan kembali dari batuan vulkanik, terdiri dari material endapan dengan ukuran lanau hingga kerikil (Qav) (Gambar 2.4).

Tabel 2.2 Luas wilayah Kota Bogor berdasarkan jenis batuan

No	Jenis Batuan	Luas (ha)
1	Batuan Gunung Api Pangrango	3.338,88
2	Batuan Gunung Api Salak	1.812,90
3	Breksi dan Lava Gunung Kencana dan Limo	49,42
4	Formasi Bojonmanik	42,09
5	Formasi Jatiluhur	39,21
6	Kipas Aluvium	5.855,92
Total		11.138,42

Sumber : Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031



Sumber : Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031

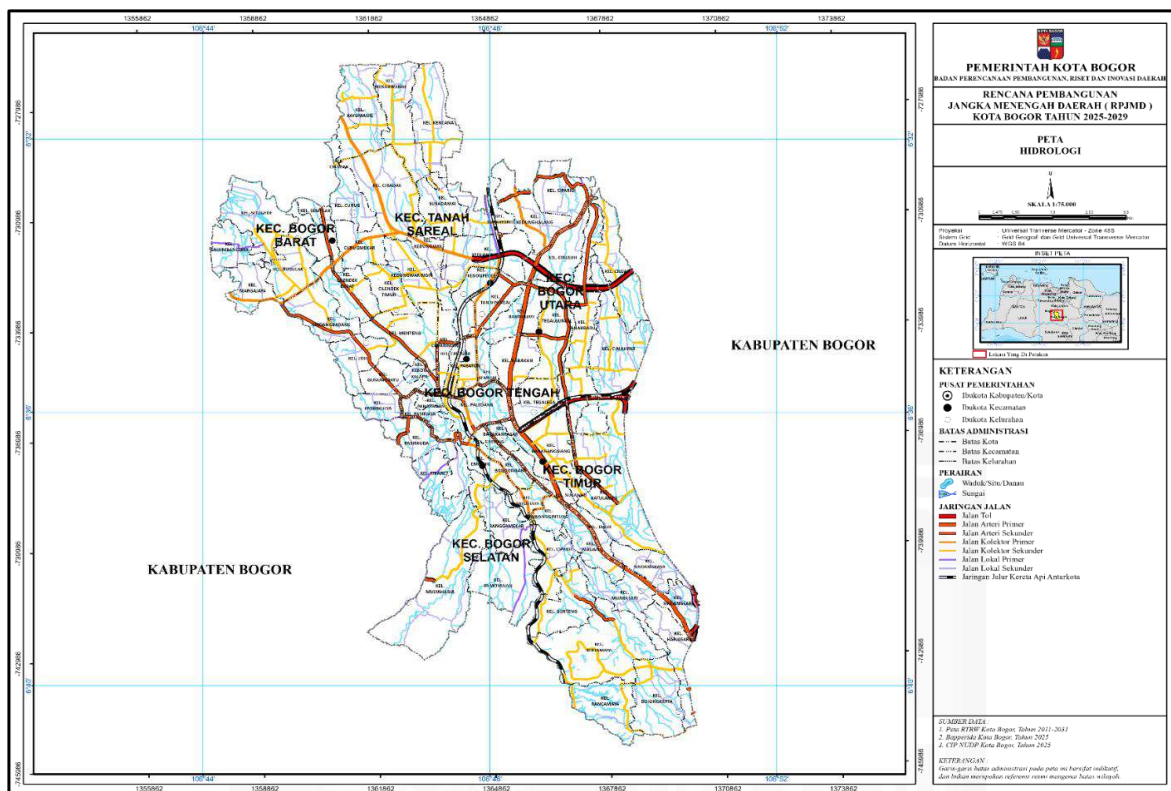
Gambar 2.4 Peta Geologi Regional Kota Bogor

2.1.2.3. Hidrologi

Di wilayah Kota Bogor terdapat enam lokasi mata air, empat lokasi air tanah dalam dan dua lokasi air tanah dangkal yang biasa digunakan untuk air minum non perpipaan. Kapasitas sumber mata air dan air tanah dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini lantaran lahan potensial kritis di Kecamatan Bogor Selatan dan di Kecamatan Bogor Barat menunjukkan semakin berkurangnya resapan air, karena semakin bertambahnya daerah pemukiman di wilayah Kota Bogor.

Beberapa danau, situ, dan kolam di Kota Bogor ada yang berfungsi untuk irigasi, retensi, dan rekreasi. Situ Gede, Situ Panjang, Situ Anggalena dan Situ Leutik difungsikan sebagai irigasi dan retensi. Danau Bogor Raya, Kolam Retensi Cimanggu dan Kolam Retensi Taman Sari Persada selain difungsikan sebagai retensi juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Danau atau situ terluas di Kota Bogor adalah Situ Panjang (4,5 ha) dan Situ Gede (4 ha).

Disamping itu Kota Bogor dilalui oleh dua buah aliran sungai sebagai utamanya, yaitu Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Sungai Cisadane mempunyai panjang aliran sungai utama hampir 126 km dan Sungai Ciliwung mempunyai panjang aliran sungai utama sepanjang 120 km. Kondisi ini dimanfaatkan sebagai sumber air yang diproduksi Perumda Tirta Pakuan Bogor. Dengan kondisi debit air permukaan diperoleh dari aliran Sungai Ciliwung sebesar 76.000 liter/detik dan Sungai Cisadane sebesar 24.000 liter/detik (Review Masterplan Drainase TA 2018). Untuk lebih jelasnya mengenai hidrologi Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5 Peta Hidrologi

Sementara untuk kualitas air, pada umumnya kualitas air sungai di wilayah Kota Bogor kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Hal itu disebabkan beberapa unsur seperti sulfat, fosfat, nitrat dan jumlah total coliform dalam air sungai melebihi kriteria baku. Kondisi yang mirip juga terdapat pada air situ yang umumnya berkualitas di bawah persyaratan baku mutu. Sedangkan air sumur penduduk, nilai pH-nya cenderung fluktuatif, dan di beberapa lokasi kandungan detergen dan bakteri E.coli di atas kriteria yang disyaratkan.

2.1.2.4. Klimatologi

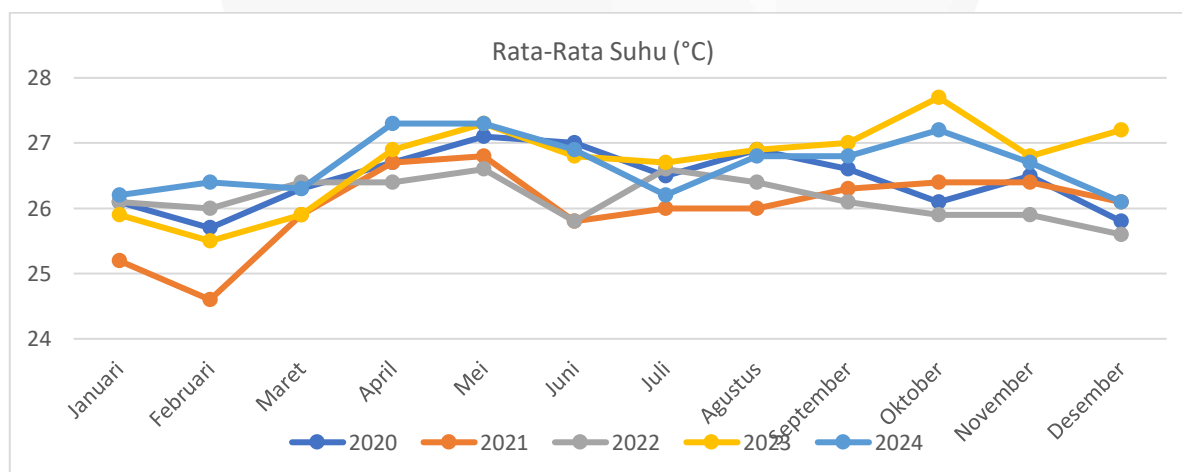
Kondisi suhu merupakan salah satu isu yang penting terkait dengan perubahan iklim jangka panjang. Walaupun Kota Bogor bukan merupakan wilayah yang berada di kawasan pesisir tetapi peningkatan suhu ekstrem bisa berpengaruh terhadap aktivitas penduduk di Kota Bogor di masa mendatang. Kota Bogor, yang dikenal dengan julukan "Kota Hujan", memiliki karakteristik

iklim tropis basah dengan curah hujan tinggi, suhu sedang, dan kelembaban udara yang relatif tinggi sepanjang tahun. Berdasarkan data rata-rata suhu dan kelembaban udara bulanan di Kota Bogor selama lima tahun terakhir pada periode tahun 2020–2024 (Tabel 2.3), terlihat adanya tren kenaikan suhu rata-rata tahunan dari 26,0°C pada tahun 2021 menjadi 26,7°C pada tahun 2024, di mana suhu terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 26,0°C dan suhu tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 26,7°C. Sementara itu, kelembaban udara menunjukkan tren menurun dari 84,8% pada tahun 2022 menjadi 82,8% pada tahun 2024, di mana kelembaban terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 81,1% dan kelembaban terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 84,8%. (lihat Tabel 2.3 dan Grafik 2.1)

Tabel 2.3 Rata-rata suhu di Kota Bogor Tahun 2020–2024

Bulan	Suhu (°C)					Kelembaban (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	26,1	25,2	26,1	25,9	26,2	88,9	88,0	84,8	84,8	87,0
Februari	25,7	24,6	26,0	25,5	26,4	89,4	86,0	84,5	85,8	87,0
Maret	26,3	25,9	26,4	25,9	26,3	86,3	85,0	84,0	86,3	87,0
April	26,7	26,7	26,4	26,9	27,3	85,4	84,0	85,1	82,9	85,0
Mei	27,1	26,8	26,6	27,3	27,3	84,1	84,0	84,8	82,6	84,0
Juni	27,0	25,8	25,8	26,8	26,9	82,3	86,0	85,6	83,4	83,0
Juli	26,5	26,0	26,6	26,7	26,2	81,2	80,0	81,7	79,0	79,0
Agustus	26,9	26,0	26,4	26,9	26,8	77,7	82,0	83,0	75,5	77,0
September	26,6	26,3	26,1	27,0	26,8	80,1	81,0	83,9	72,0	78,0
Oktober	26,1	26,4	25,9	27,7	27,2	84,8	83,0	86,5	74,9	78,0
November	26,5	26,4	25,9	26,8	26,7	83,7	84,0	86,5	85,1	84,0
Desember	25,8	26,1	25,6	27,2	26,1	84,0	85,0	86,7	81,4	85,0
Rata-Rata	26,4	26,0	26,2	26,7	26,7	84,0	84,0	84,8	81,1	82,8

Sumber : BPS Kota Bogor



Grafik 2.1 Rata-Rata Suhu di Kota Bogor Tahun 2020–2024

Iklim berpengaruh besar terhadap aktivitas manusia. Kondisi curah hujan dan jumlah hari hujan merupakan indikator penting dalam pengelolaan lingkungan dan perencanaan pembangunan wilayah, khususnya untuk Kota Bogor yang secara geografis berada di wilayah beriklim tropis basah dengan karakteristik curah hujan tinggi. Selama lima tahun terakhir pada periode tahun 2020-2024 (Tabel 2.4), rata-rata jumlah hari hujan di Kota Bogor meningkat dari 13 hari per bulan pada tahun 2020 menjadi puncaknya 28 hari per bulan pada tahun 2022, sebelum menurun menjadi 21 hari per bulan pada tahun 2024, dimana rata-rata jumlah hari hujan tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 28 hari, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 13 hari. Sementara itu, rata-rata jumlah curah hujan tahunan pada periode tahun 2020-2024 terjadi peningkatan dari 202 mm pada tahun 2020 dan 351 mm pada tahun 2021 menjadi 405 mm pada tahun 2024. Meski terdapat fluktuasi pada nilai bulanan, bulan-bulan seperti Mei dan November 2024 mencatat curah hujan sangat tinggi yaitu 551 mm dan 730 mm. Beberapa bulan lain yang mencatat lonjakan ekstrem seperti Maret 2024 sebesar 723 mm dan April 2024 sebesar 620 mm.

Tabel 2.4 Jumlah hari hujan dan curah hujan di Kota Bogor Tahun 2020–2024

Bulan	Jumlah hari hujan (hari)					Jumlah Curah hujan (mm)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	14	18	30	21	25	208	304	106	211	394
Februari	18	20	23	24	25	337	487	145	258	228
Maret	19	20	28	26	27	293	233	112	325	723
April	19	17	29	17	23	271	505	316	312	620
Mei	15	16	25	14	21	292	510	226	294	551
Juni	5	17	27	20	20	30	311	463	310	224
Juli	7	8	29	9	13	64	116	358	134	140
Agustus	4	16	31	12	14	42	400	384	144	123
September	7	19	29	9	15	88	317	344	62	402
Oktober	17	22	28	13	14	327	567	499	102	494
November	16	17	28	25	25	207	184	321	1.068	730
Desember	16	20	28	20	27	262	279	225	563	231
Rata-Rata	13	18	28	18	21	202	351	292	226	405

Sumber : BPS Kota Bogor

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, keseimbangan antar keduanya, dan ekosistem secara berkelanjutan. Sementara itu, Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

2.1.3.1. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan

Kota bogor merupakan daerah perkotaan dengan luas kawasan yang terbatas. Selain itu Kota Bogor bukan menjadi daerah produsen pertanian, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Meskipun demikian, kondisi daya dukung pangan dibutuhkan sebagai baseline awal dalam menentukan kebijakan terkait dengan ketahanan pangan. Untuk melihat tingkat kebutuhan pangan maka dihitung kebutuhan pangan berdasarkan jumlah penduduk yang dibandingkan dengan ketersediaan pangan. Secara umum selisih ketersediaan pangan di Kota Bogor adalah defisit untuk seluruh wilayah kecamatan (Tabel 2.5).

Analisis perhitungan kebutuhan pangan di Kota Bogor 2.150 kkal/orang/hari berdasarkan Kementerian Kesehatan. Sedangkan jumlah penduduk eksisting menggunakan jumlah penduduk tahun 2023 dan dilakukan proyeksi sampai tahun 2029 dengan produktivitas padi tahun 2023 sebesar 723,03 kg/ha. Perbandingan ketersediaan energi pangan di Kota Bogor untuk setiap kecamatannya cukup berbeda jauh. Ketersediaan energi pangan dalam jumlah besar ditemukan di Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan yaitu mencapai 8.073 juta Kkal/tahun. Kebutuhan pangan terbesar ditemukan di Kecamatan Bogor Barat yaitu 91.673 juta Kkal sedangkan terendah ditemukan di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 37.769 juta Kkal. Adapun selisih ketersediaan pangan terbesar terdapat di Kecamatan Bogor

Barat dan Tanah Sereal mencapai lebih dari 80.000 juta Kkal. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Kondisi Daya Dukung Pangan Kota Bogor

Kecamatan	Penduduk (Jiwa) Tahun 2023	Kebutuhan Pangan (Juta Kkal)	Ketersediaan Pangan (Juta Kkal)	Selisih Ketersediaan Pangan (Juta Kkal)
Bogor Barat	233.637	91.673	8.477	-83.196
Bogor Selatan	204.030	80.056	8.073	-71.984
Bogor Tengah	96.258	37.769	-	-37.769
Bogor Timur	104.327	40.935	3.318	-37.617
Bogor Utara	186.724	73.266	775	-72.491
Tanah Sereal	218.094	85.575	3.052	-82.522

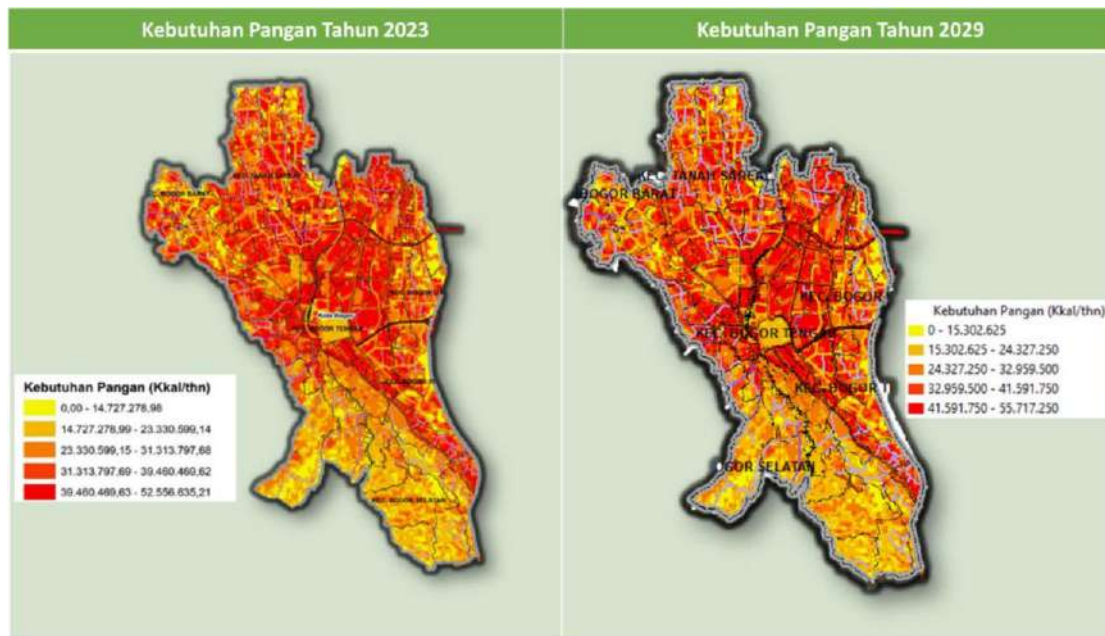
Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor 2025–2029

Prediksi kebutuhan pangan tahun 2029 terbesar ditemukan di Kecamatan Bogor Barat yaitu 92.957 juta Kkal sedangkan terendah ditemukan di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 38.298 juta Kkal. Adapun selisih ketersediaan pangan terbesar di tahun 2029 terdapat di Kecamatan Bogor Barat dan Tanah Sereal mencapai >80.000 juta Kkal. Hal itu akibat dari jumlah penduduk di dua kecamatan tersebut tergolong paling besar. Untuk lebih jelasnya mengenai proyeksi daya dukung pangan dan Peta Kebutuhan, ketersediaan dan selisih pangan dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2.6 Proyeksi Daya Dukung Pangan Kota Bogor

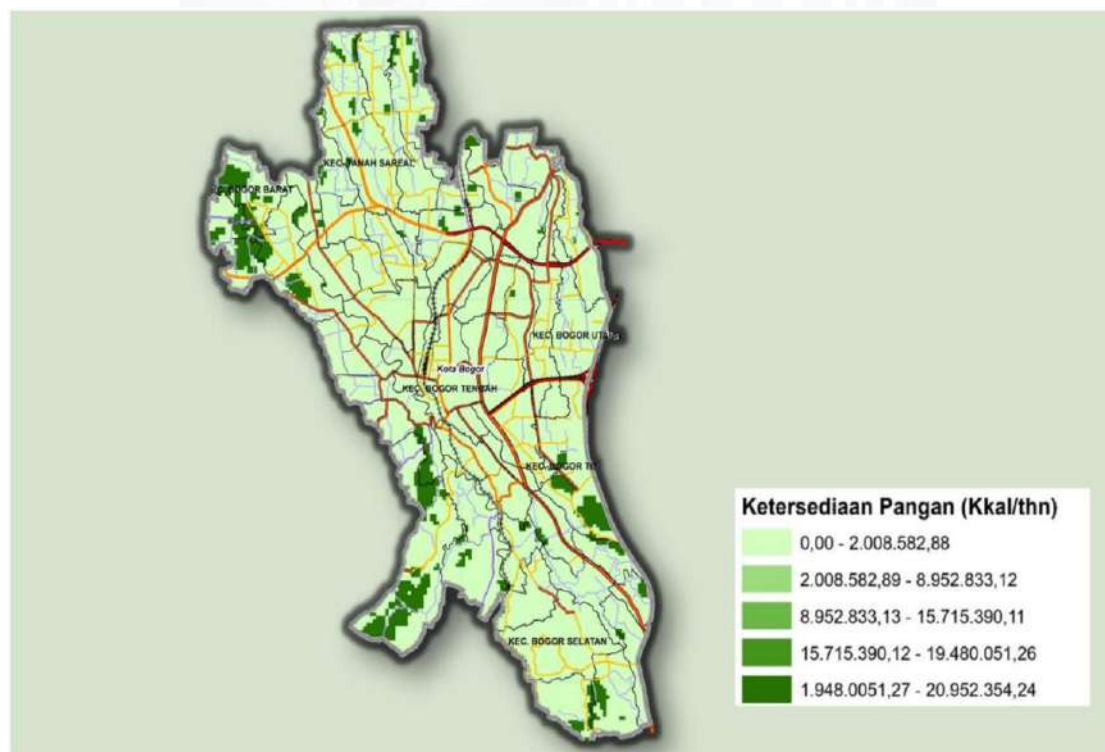
Kecamatan	Penduduk 2029 (Jiwa)	Kebutuhan Pangan (Juta Kkal)	Ketersediaan Pangan (Juta Kkal)	Selisih Ketersediaan Pangan (Juta Kkal)
Bogor Barat	236.908	92.957	8.477	-84.480
Bogor Selatan	206.886	81.177	8.073	-73.104
Bogor Tengah	97.606	38.298	0	-38.298
Bogor Timur	105.788	41.508	3.318	-38.190
Bogor Utara	189.338	74.292	775	-73.517
Tanah Sereal	221.147	86.773	3.052	-83.721

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor 2025–2029



Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029

Gambar 2.6 Peta Kebutuhan Energi Pangan Kota Bogor



Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029

Gambar 2.7 Peta Ketersediaan Energi Pangan Kota Bogor



Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029

Gambar 2.8 Status Daya Dukung Pangan Kota Bogor

Secara umum jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Bogor termasuk kategori rendah karena Bogor bukan merupakan sentra produksi dengan keterbatasan lahan. Meskipun demikian, wilayah dengan luas jasa ekosistem penyediaan pangan yang paling besar ada di Bogor Barat dan di Bogor Selatan. Penyediaan pangan di Kota Bogor secara mandiri tidak dapat dilakukan karena neraca pangan di Kota Bogor defisit dimana ketersediaan lebih rendah daripada kebutuhan. Oleh karena itu kepastian penyediaan pangan dari daerah lain yang masuk ke Kota Bogor perlu dipastikan keberlanjutannya. Untuk lebih jelasnya mengenai status daya dukung pangan terhadap ambang batas penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.7

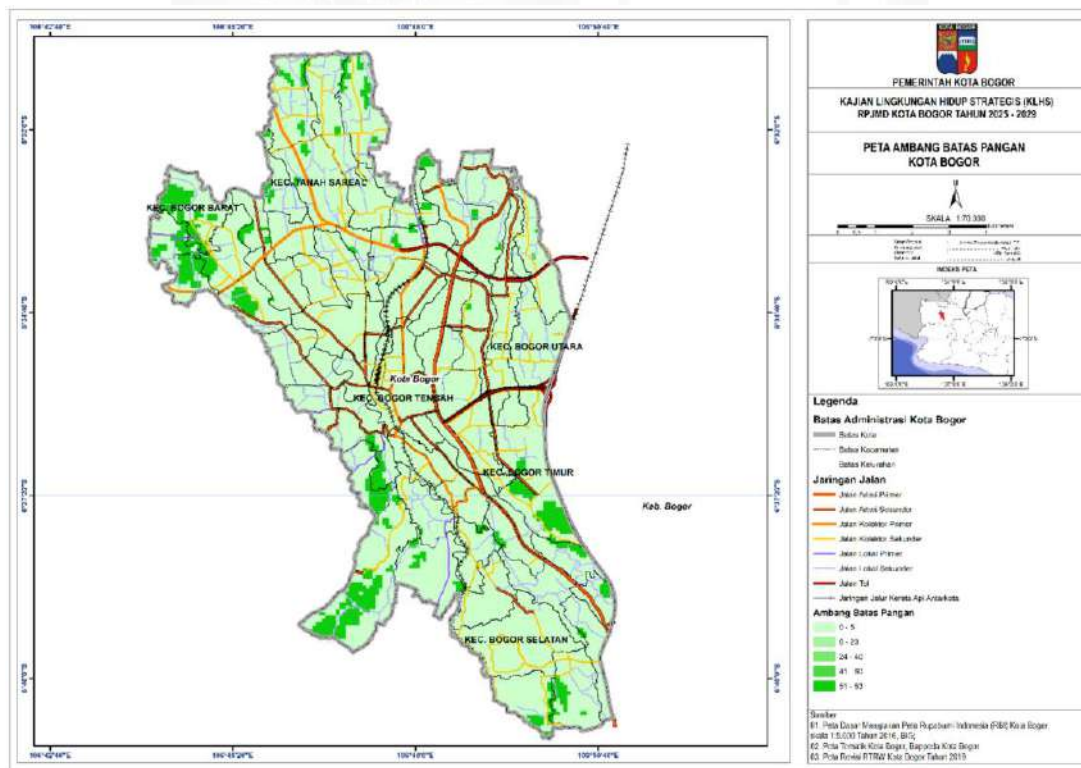
Tabel 2.7 Status Daya Dukung Pangan terhadap Ambang Batas di Kota Bogor

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Ambang Batas Pangan (Jiwa)	Status Ambang Batas Pangan (Jiwa)	Status Daya Dukung Pangan
Bogor Barat	233.637	21.605	-212.032	Terlampau
Bogor Selatan	204.030	20.574	-183.456	Terlampau
Bogor Tengah	96.258	-	-96.258	Terlampau
Bogor Timur	104.327	8.456	-95.871	Terlampau
Bogor Utara	186.724	1.975	-184.749	Terlampau
Tanah Sareal	218.094	7.779	-210.315	Terlampau

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029

Ambang batas penduduk terhadap ketersediaan pangan dapat dilihat pada Tabel di atas. Ambang batas pangan menunjukkan batas penduduk yang dapat ditampung sesuai dengan kapasitas penyedia pangan di wilayah itu sendiri. Keberlanjutan pasokan pangan dari luar sangat penting karena status daya dukung pangan Kota Bogor yang rendah. Berdasarkan jumlah penduduk dan ambang batas pangan di setiap kecamatan di Kota Bogor maka diperoleh bahwa seluruh kecamatan telah memiliki status daya dukung pangan terlampaui dengan nilai terlampaui terbesar terdapat di Kecamatan Bogor Barat.

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran ambang batas pangan di Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 2.10.



Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029

Gambar 2.9 Peta Ambang Batas Pangan

2.1.3.2. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air

Daya dukung air di Kota Bogor dilakukan melalui analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik dan lahan pertanian serta memperhatikan faktor kehilangan air selama pemanfaatan air secara domestik dan non-domestik sehingga pada akhirnya diperoleh kebutuhan air secara total.

Asumsi yang digunakan dalam proses perhitungan kebutuhan air domestik adalah dengan cara mengalikannya dengan angka KHL sebesar 43,2 m³/tahun/kapita (standar kebutuhan air hidup layak) dan angka 2 sebagai faktor koreksi. Kebutuhan air non-domestik diasumsikan sebesar 30% dari kebutuhan domestik dengan kategori Bogor sebagai kota metropolitan. Faktor kehilangan air selama pemakaian diasumsikan sebesar 15% dari total pemakaian air secara domestik dan non-domestik.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan air, diketahui bahwa Kecamatan Bogor Selatan merupakan kecamatan yang mempunyai kebutuhan air paling tinggi mencapai 29 juta m³ per tahun. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan air tersebut, memang secara populasi penduduk menunjukkan bahwa kebutuhan di Kecamatan Bogor Barat lebih besar dibandingkan Kecamatan Bogor Selatan, namun pada Kecamatan Bogor Selatan juga dibutuhkan air dalam jumlah yang lebih besar tidak hanya untuk keperluan domestik dan non-domestik tetapi juga untuk mengairi lahan pertanian yang masih ada di kecamatan tersebut.

Tabel 2.8 Kebutuhan Air di Kota Bogor

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /Tahun)	Kebutuhan Air Non-Domestik (m ³ /Tahun)	Kehilangan Air (m ³ /Tahun)	Kebutuhan Air untuk Lahan (m ³ /Tahun)	Total Kebutuhan Air (m ³ /Tahun)
Bogor Barat	233.637	12.791.626	3.837.488	2.494.367	8.786.319	27.909.799
Bogor Selatan	204.03	11.170.643	3.351.193	2.178.275	12.733.319	29.433.430
Bogor Tengah	96.258	5.270.126	1.581.038	1.027.674	119.933	7.998.770
Bogor Timur	104.327	5.711.903	1.713.571	1.113.821	3.643.664	12.182.959
Bogor Utara	186.724	10.223.139	3.066.941	1.993.512	5.721.953	21.005.546
Tanah Sareal	218.094	11.940.647	3.582.194	2.328.426	6.613.468	24.464.734

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029

Berdasarkan hasil proyeksi, total kebutuhan air di Kota Bogor tahun 2029 sebesar 120.426 ribu m³/thn, Kecamatan Bogor Selatan memiliki jumlah kebutuhan air terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yaitu 28.930 m³/tahun kemudian diikuti oleh Kecamatan Bogor Barat sebesar 27.334 m³/tahun. Sedangkan kebutuhan air terendah terdapat di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 7.761 m³/tahun.

Tabel 2.9 Kebutuhan Air Proyeksi Tahun 2029 di Kota Bogor

Kecamatan	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /Tahun)	Kebutuhan Air Non-Domestik (m ³ /Tahun)	Kehilangan Air (m ³ /Tahun)	Kebutuhan Air untuk Lahan (m ³ /Tahun)	Total Kebutuhan Air (m ³ /Tahun)
Bogor Barat	12.970.709	3.891.213	1.686.192	8.786.319	27.334.432
Bogor Selatan	11.327.031	3.398.109	1.472.514	12.733.319	28.930.974
Bogor Tengah	5.343.907	1.603.172	694.708	119.933	7.761.720
Bogor Timur	5.791.870	1.737.561	752.943	3.643.664	11.926.038
Bogor Utara	10.366.263	3.109.879	1.347.614	5.721.953	20.545.709
Tanah Sareal	12.107.816	3.632.345	1.574.016	6.613.468	23.927.644

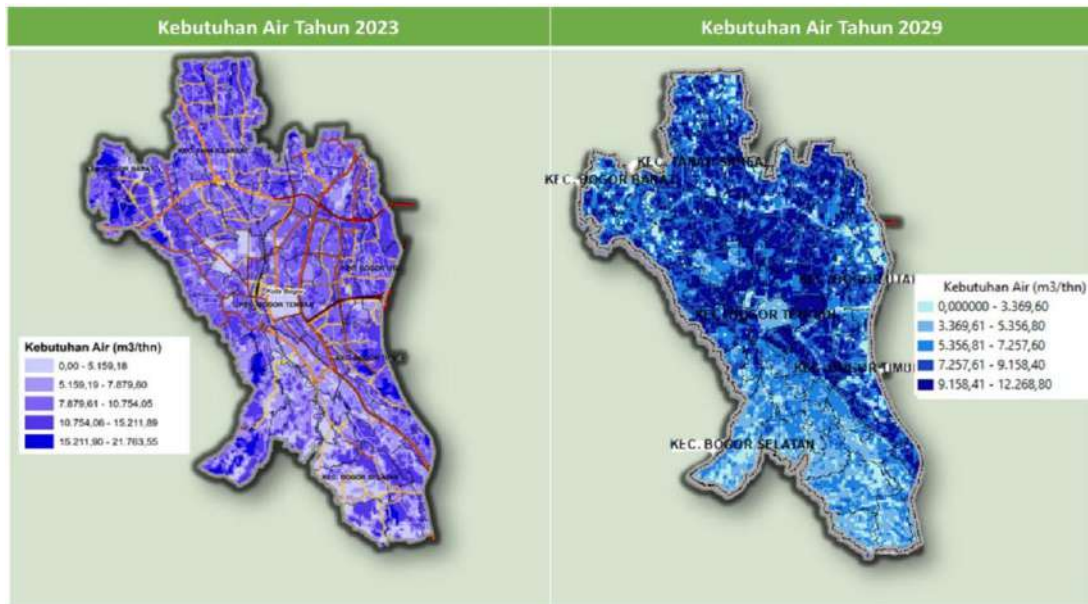
Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor 2025–2029

Ketersediaan air di Kota Bogor diperoleh melalui analisis ketersediaan air berbasis zona DAS dan berbasis jasa ekosistem di Kota Bogor. Hasil perhitungan ketersediaan air dapat dilihat pada tabel di bawah berikut. Ketersediaan air terbesar dari seluruh kecamatan di Kota Bogor dalam satu tahun terdapat di Kecamatan Bogor Selatan yaitu 42.120.077 m³. Sedangkan ketersediaan air terendah terdapat di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 11.690.708 m³/tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai ketersediaan air dapat dilihat pada Tabel 2.10. Sementara itu untuk kebutuhan air, ketersediaan air, dan status daya dukung air dapat dilihat pada Gambar 2.10-2.12.

Tabel 2.10 Ketersediaan Air di Kota Bogor

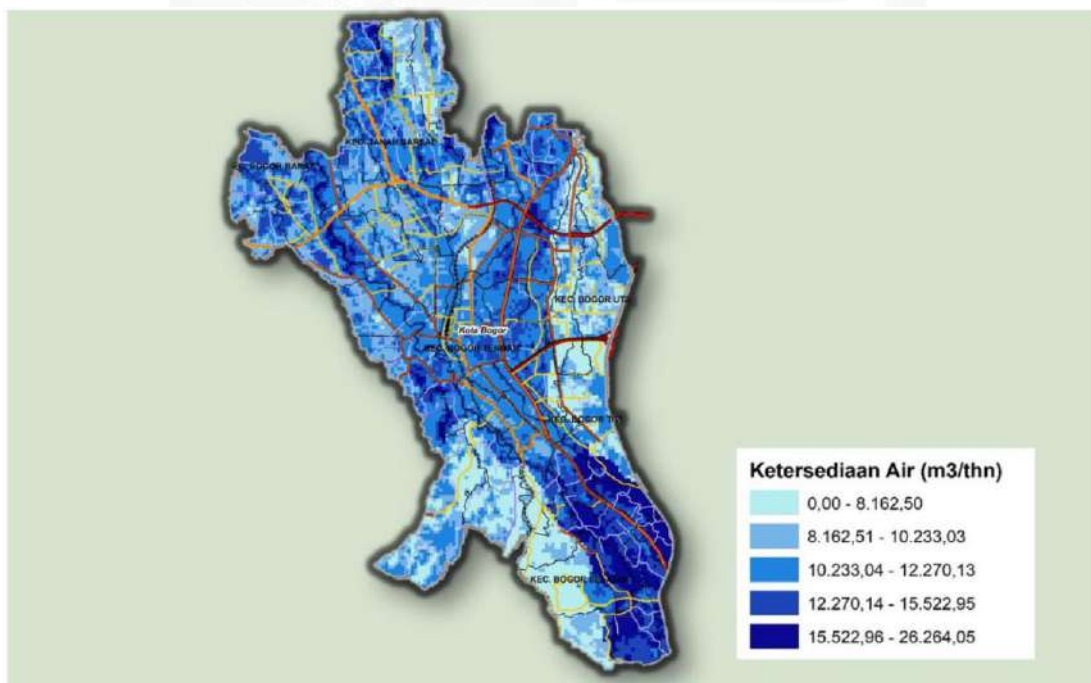
Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /Tahun)
Bogor Barat	33.368.580
Bogor Selatan	42.120.077
Bogor Tengah	11.690.708
Bogor Timur	16.472.101
Bogor Utara	23.532.315
Tanah Sareal	28.215.326

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor 2025–2029



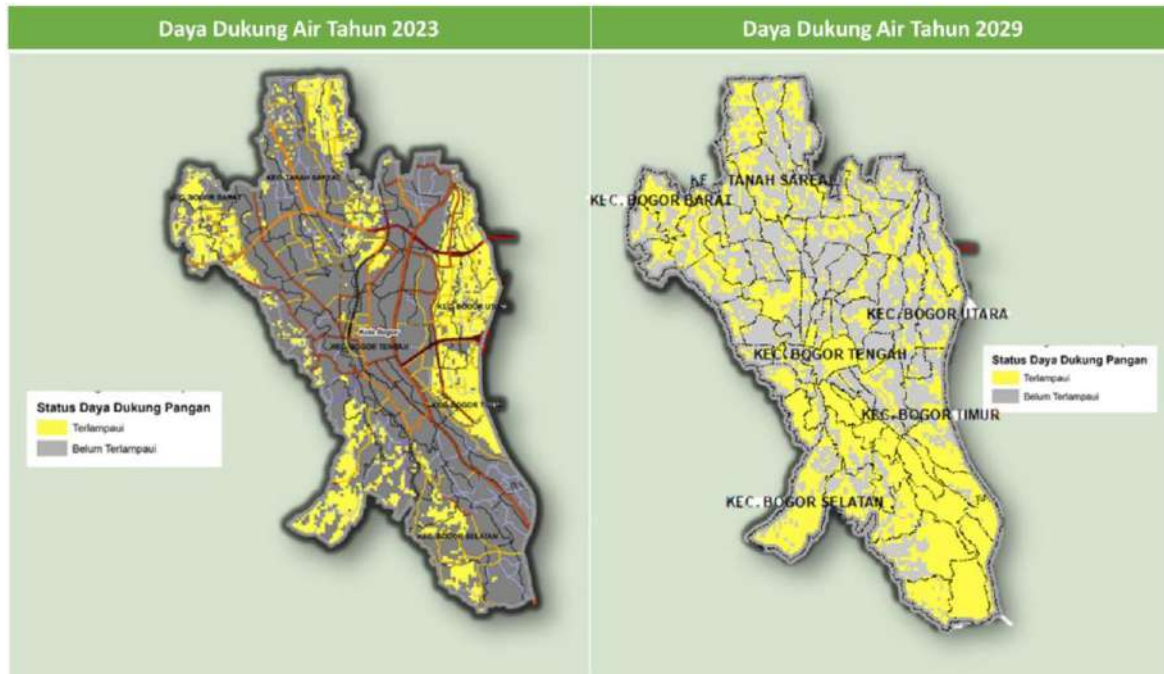
Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029

Gambar 2.10 Peta Kebutuhan Air Kota Bogor



Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029

Gambar 2.11 Peta Ketersediaan Air Kota Bogor



Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029

Gambar 2.12 Peta Status Daya Dukung Air Kota Bogor

Selanjutnya, status daya dukung air tahun 2023 secara keseluruhan di Kota Bogor masih belum terlampaui, dengan penambahan penduduk sampai tahun 2029 dan berbanding lurus dengan kebutuhan domestik dan non domestik. Terlihat selisih ketersediaan air sampai tahun 2029 belum terlampaui. Total kebutuhan paling banyak adalah kecamatan Bogor Selatan sebesar 28.930.974,04 m³/thn, namun ketersediaan juga termasuk pada kecamatan yang paling besar sebesar 42.120.077,12 m³/tahun.

Angka kebutuhan air pada tahun 2029 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 karena perhitungan kebutuhan air tidak hanya memperhitungkan kebutuhan domestik, tapi juga memperhitungkan kebutuhan untuk lahan pertanian. Luas lahan pertanian Kota Bogor kedepannya diperkirakan akan mengalami penurunan. Penurunan luas lahan pertanian ini menyebabkan turunnya kebutuhan air pada tahun 2029.

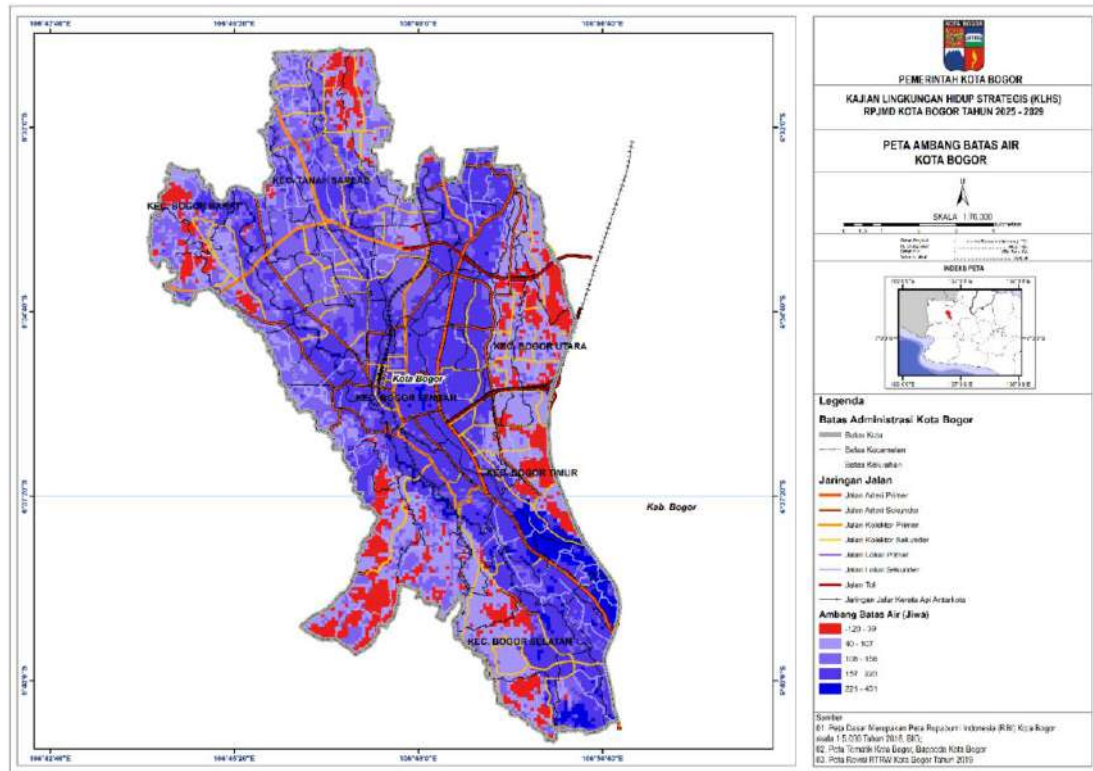
Untuk lebih jelasnya mengenai status daya dukung air terhadap ambang batas dapat dilihat pada Tabel 2.11, sementara gambar mengenai ambang batasnya dapat dilihat pada Gambar 2.13.

Tabel 2.11 Status Daya Dukung Air Terhadap Ambang Batas

Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /Tahun)	Tahun 2023		Tahun 2029	
		Total Kebutuhan Air (m ³ /Tahun)	Selisih Ketersediaan Air (m ³ /Tahun)	Total Kebutuhan Air (m ³ /Tahun)	Selisih Ketersediaan Air (m ³ /Tahun)
Bogor Barat	33.368.580	27.909.798,89	5.458.780,81	27.334.432,17	6.034.147,53
Bogor Selatan	42.120.077	29.433.429,65	12.686.647,48	28.930.974,04	13.189.103,08
Bogor Tengah	11.690.708	7.998.770,43	3.691.938,04	7.761.720,38	3.928.988,09
Bogor Timur	16.472.101	12.182.959,14	4.289.142,15	11.926.037,95	4.546.063,34
Bogor Utara	23.532.315	21.005.545,82	2.526.769,02	20.545.709,01	2.986.605,83
Tanah Sareal	28.215.326	24.464.733,65	3.750.591,91	23.927.644,24	4.287.681,32
TOTAL	155.399.107	122.995.238	32.403.869	120.426.518	120.426.517,79

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor 2025–2029

Salah satu upaya untuk memastikan kesediaan air adalah melalui upaya konservasi ekosistem penyediaan air bersih. Secara umum jasa ekosistem penyediaan air di Kota Bogor sangat bervariasi dengan sebaran mayoritas berada pada kondisi rendah. Ketersediaan air bersih ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bentang alam dan penggunaan lahan. Meskipun terdapat potensi curah hujan yang sangat tinggi tetapi perlu dikelola dengan sistem penyediaan air agar tidak kelebihan saat musim penghujan dan kekurangan di musim kemarau. Sebagian besar jasa ekosistem penyedia air bersih dengan kelas sangat tinggi ditemukan di Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan.



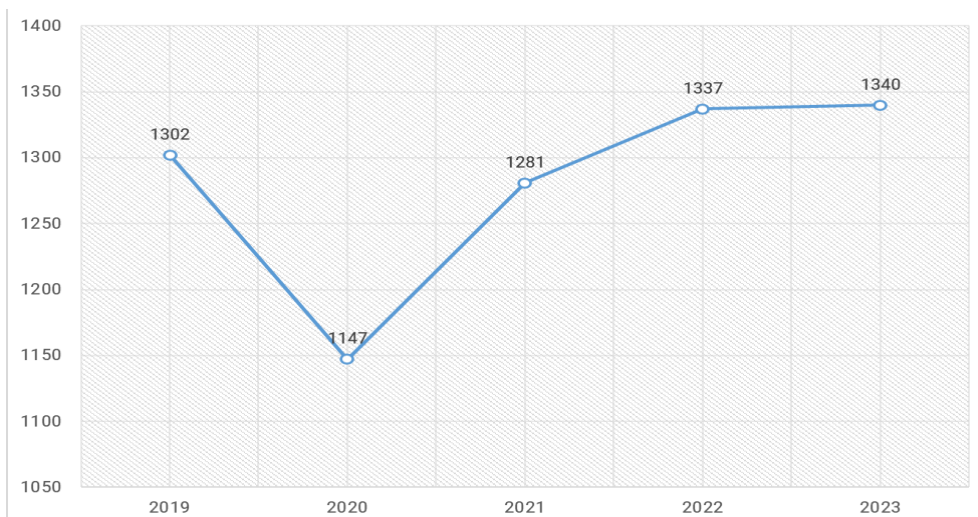
Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029

Gambar 2.13 Peta Ambang Batas Air Kota Bogor

2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi konsumsi listrik, umumnya mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan industri, serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi dan perangkat elektronik. Dinamika konsumsi listrik di Kota Bogor dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan penduduk, perkembangan infrastruktur, serta kebijakan energi yang diterapkan pemerintah.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.2 Konsumsi Listrik per Kapita di Kota Bogor Tahun 2019-2023

Konsumsi listrik per kapita di Kota Bogor mengalami fluktuasi dalam periode 2019–2023 (Grafik 2.2). Pada tahun 2019, konsumsi listrik tercatat sebesar 1.302 kWh per kapita, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 menjadi 1.147 kWh per kapita yang mencerminkan dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi dan aktivitas masyarakat. Pada tahun 2021, konsumsi listrik mulai meningkat kembali menjadi 1.281 kWh per kapita, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi serta meningkatnya kebutuhan energi di berbagai sektor. Tren peningkatan terus berlanjut hingga tahun 2022 dengan konsumsi mencapai 1.337 kWh per kapita, mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kebutuhan energi di berbagai sektor. Pada tahun 2023, konsumsi listrik sedikit meningkat menjadi 1.340 kWh per kapita. Stabilitas konsumsi listrik yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pentingnya perencanaan energi yang berkelanjutan untuk memastikan pasokan listrik yang cukup, efisien, dan ramah lingkungan.

2.1.4.2. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (Jaringan Perpipaan)

Ketersediaan air, terutama air minum, menjadi salah satu penentu kualitas hidup suatu masyarakat. Penyedia air perpipaan di Kota Bogor

diselenggarakan oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) yang bernama Perumda Tirta Pakuan. Dibandingkan dengan sumber air terbuka yang rentan terhadap kontaminasi, jaringan perpipaan menyediakan alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan. Sistem perpipaan yang terkelola dengan baik memungkinkan pemantauan dan pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien, mengurangi risiko eksploitasi berlebihan pada sumber air lokal. Capaian kinerja pelayanan air minum di Kota Bogor dari tahun 2020-2024 dapat dijelaskan pada Grafik 2.3.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

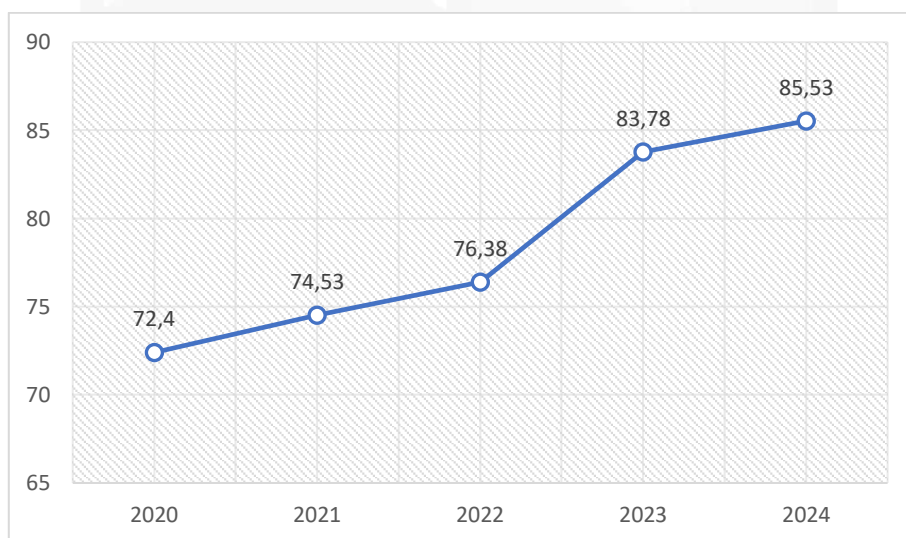
Grafik 2.3 Capaian kinerja pelayanan air minum di Kota Bogor tahun 2020 -2024

Berdasarkan Grafik 2.3 Capaian kinerja pelayanan air minum di Kota Bogor tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuasi. Persentase Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (Jaringan Perpipaan) pada tahun 2020 sebesar 81,46 persen, kemudian mengalami penurunan tajam menjadi 68,49 persen pada tahun 2021. Meskipun demikian, terjadi sedikit peningkatan menjadi 68,68 persen pada tahun 2022, 71,25 persen pada tahun 2023 hingga mencapai 72,8 persen pada tahun 2024. Secara umum, penurunan persentase Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (Jaringan Perpipaan) dari PDAM dalam beberapa tahun terakhir di Kota Bogor, dapat mengindikasikan adanya kendala dalam distribusi air, peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan kapasitas layanan PDAM, atau faktor

lingkungan seperti perubahan iklim yang memengaruhi ketersediaan sumber air baku dan peningkatan yang terjadi akibat adanya perbaikan pengelolaan.

2.1.4.3. Indeks Ketahanan Pangan

Selain dari konteks daya dukung untuk penyediaan pangan, aspek pangan juga dapat dilihat dari indikator ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Terdapat sembilan (9) indikator sebagai dasar penentuan IKP yaitu (1) rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih, (2) persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, (3) persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, (4) persentase rumah tangga tanpa akses listrik, (5) rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, (6) persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, (7) rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, (8) persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting), dan (9) angka harapan hidup pada saat lahir.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.4 Indeks Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2020–2024

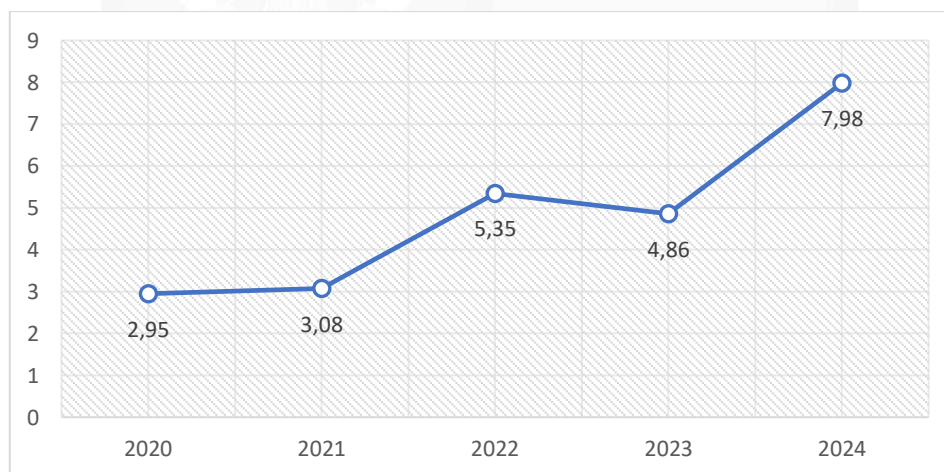
Berdasarkan data pada Grafik 2.4, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kota Bogor menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IKP meningkat berada pada angka 72,4, 74,53 pada tahun 2021, dan 76,38 pada tahun 2022. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 menjadi 83,78, meningkat sebesar 7,40 poin dari tahun sebelumnya. Tren ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan pencapaian indeks tertinggi sebesar 85,53. Peningkatan nilai Indeks Ketahanan Pangan di Kota Bogor mencerminkan adanya perbaikan multidimensional dalam aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pasokan pangan. Lonjakan signifikan pada tahun 2023-2024 diduga dipengaruhi oleh berbagai determinan, antara lain implementasi program ketahanan pangan yang lebih terstruktur dan efektif, peningkatan alokasi investasi di sektor pertanian, serta pemanfaatan teknologi secara optimal dalam proses produksi dan distribusi pangan. Meskipun secara makro Kota Bogor bukan merupakan wilayah sentral produksi pangan, berbagai upaya strategis dalam pengembangan sistem pertanian perkotaan (*urban farming*) telah berkontribusi nyata terhadap peningkatan indeks tersebut. Khususnya, penerapan model pertanian perkotaan berbasis komunitas menunjukkan efektivitas dalam memperkuat ketahanan pangan mikro, terutama pada skala rumah tangga.

Pada tahun 2025, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengamanatkan bahwa penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) untuk tingkat Kabupaten/Kota menggunakan metode lama dan metode baru. Penyusunan FSVA metode lama disusun dengan tujuan untuk Penilaian Kinerja Daerah Tahun 2025 karena sudah terinput dalam sistem SIPD pada tahun 2024. Penyusunan FSVA metode baru disusun dengan tujuan Penyelarasan dengan FSVA Nasional dan sebagai Tahun dasar/baseline penetapan target RPJMD, sehingga terdapat perbedaan angka target RPJMD 2025-2029 dengan capaian eksisting tahun 2020-2024.

2.1.4.4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*)

Ketahanan pangan merupakan faktor kunci dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, terutama di kota dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi yang pesat seperti Kota Bogor. Konsumsi pangan yang cukup dan bergizi menjadi indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dalam ketahanan pangan masih dihadapi, seperti aksesibilitas terhadap pangan berkualitas, ketimpangan ekonomi, dan dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan. Oleh karena itu, pemantauan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan sangat diperlukan sebagai dasar perumusan kebijakan untuk memastikan masyarakat Kota Bogor memiliki akses yang adil terhadap pangan yang cukup dan bergizi.

Untuk lebih jelasnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik 2.5.



Sumber: BPS Kota Bogor

Grafik 2.5 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kota Bogor Tahun 2020-2024

Pada Grafik 2.5 di atas jelas, bahwa prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Bogor mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022, dan mengalami penurunan di 2023 dan peningkatan kembali di tahun 2024. Pada tahun 2020, angka ketidakcukupan konsumsi pangan berada di 2,95%, kemudian meningkat menjadi 3,08% di 2021. Peningkatan

yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana angka tersebut melonjak hingga 5,35%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, gangguan rantai pasok pangan, dan penurunan daya beli masyarakat. Pada tahun 2023, angka ini sedikit menurun menjadi 4,86%, namun kembali meningkat menjadi 7,98% pada tahun 2024.

Peningkatan angka PoU ini menggambarkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang tidak mendapatkan asupan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi harian mereka agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Peningkatan PoU di Kota Bogor dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- a. Inflasi harga pangan, kenaikan harga bahan pokok (beras, telur, daging);
- b. Penurunan daya beli, dengan kenaikan harga pangan sementara pendapatan yang stagnan, menyebabkan daya beli masyarakat menurun;
- c. Ketergantungan impor/pasokan dari daerah lain terhadap pasokan beras dan pangan lainnya, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga;
- d. Distribusi pangan tidak merata, di mana pangan bergizi lebih banyak terkonsentrasi di pusat perbelanjaan modern;
- e. Cadangan pangan daerah dan diversifikasi pangan belum optimal, belum adanya insentif untuk pelaku urban farming.

Ketahanan pangan di Kota Bogor masih perlu mendapatkan perhatian serius. Pemerintah Kota Bogor perlu terus mengimplementasikan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan, seperti memperkuat produksi lokal, meningkatkan akses pangan bagi kelompok rentan, dan mengoptimalkan distribusi pangan agar dapat mengurangi angka ketidakcukupan konsumsi pangan di masa depan.

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

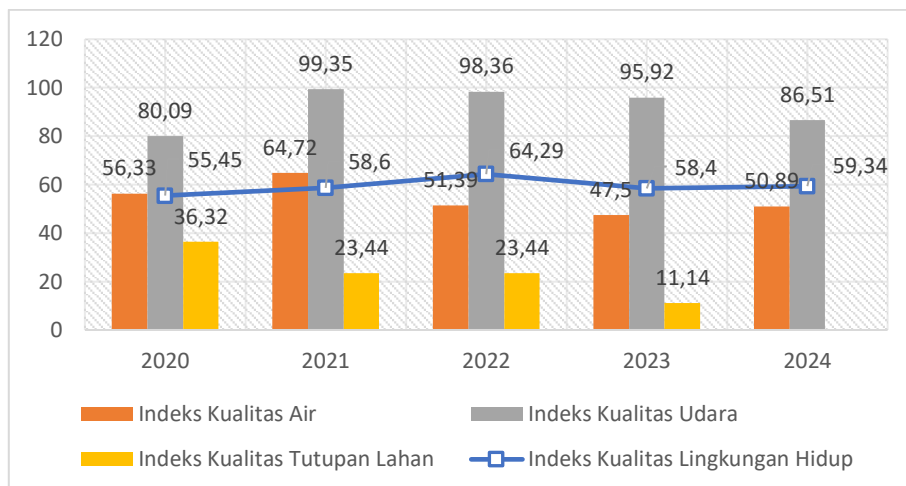
2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai

bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH merupakan upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan di Kota Bogor dengan pemulihan kualitas lingkungan. Pemantauan indikator-indikator lingkungan ini direpresentasikan dalam IKLH yang mencakup Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), sebagai refleksi keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perkotaan.

IKU mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 hingga mencapai puncaknya sebesar 99,35, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga 86,51 pada tahun 2024. IKA mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dimulai dari 56,33 pada tahun 2020, naik ke 64,72 pada tahun 2021, lalu turun kembali hingga 47,5 pada tahun 2023, dan sedikit membaik menjadi 59,34 pada tahun 2024. IKTL menunjukkan tren yang sangat menurun, dari 36,32 di tahun 2020 menjadi hanya 11,14 di tahun 2023, sebelum sedikit meningkat di tahun 2024.

Secara umum, IKLH di Kota Bogor mengalami peningkatan pada periode 2020-2024. Pada tahun 2020, IKLH berada di angka 55,45. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan indeks mencapai 58,6 sebelum mencapai puncaknya di 64,29 pada tahun 2022, hal ini mencerminkan kondisi lingkungan yang membaik. Namun, pada tahun 2023 IKLH mengalami penurunan tajam menjadi 58,4, hal ini terjadi akibat aktivitas industri, urbanisasi, atau konversi lahan hijau menjadi pemukiman dan komersial, serta dampak polusi udara akibat transportasi dan industri. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan menjadi 59,34, sebagai upaya pemulihan. Fluktuasi ini menggambarkan tantangan Kota Bogor dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota yang pesat dengan keberlanjutan lingkungan, sehingga diperlukan strategi jangka panjang yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas lingkungan secara konsisten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.6.



Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029

Grafik 2.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2020–2024

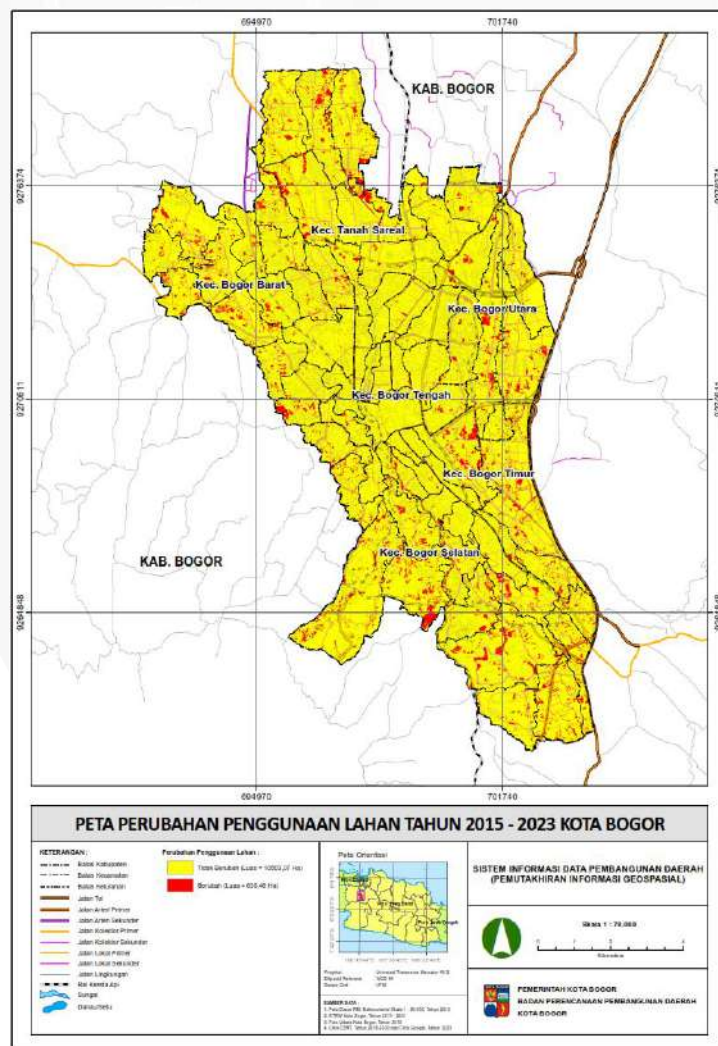
Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akan mengalami perubahan berupa penambahan parameter pada formulasi perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU), serta perubahan formulasi perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Pada perhitungan IKA terdapat penambahan parameter BOD, COD, TSS, PH, DO, Total Fosfat, NO_3 , dan Fecal coli. Pada perhitungan IKU terdapat penambahan parameter $\text{PM}_{2,5}$. Perubahan formulasi perhitungan ini akan menjadi dasar untuk penentuan target tahun 2026-2030.

2.1.5.2. Persentase Alih Fungsi Lahan

Kota Bogor merupakan wilayah perkotaan di Jabodetabek yang paling kecil luas wilayahnya dibandingkan Kota Depok dan Kota Bekasi. Kondisi ini menyebabkan pola penggunaan lahan di Kota Bogor juga terbatas. Sebagian besar lahan yang ada di Kota Bogor merupakan area terbangun. Dari total luas lahan sebesar 11.138,42 hektar, sebagian besar lahan yang ada di Kota Bogor merupakan area terbangun.

Berdasarkan data dari Pemutakhiran Informasi Geospasial Kota Bogor Tahun 2023 yang merupakan kegiatan memperbarui peta tematik penggunaan lahan dan bangunan, terjadi alih fungsi lahan dari tahun 2015 hingga 2023 di Kota Bogor. Pada periode tahun 2015-2023, terjadi

penambahan luas penggunaan lahan yang paling besar adalah untuk permukiman dan perumahan, di mana masing-masing bertambah 180,24 Ha (1,62%) dan 162,32 Ha (1,46%). Penggunaan lahan yang juga bertambah cukup besar adalah prasarana jalan dan kegiatan niaga, masing-masing 59,40 Ha (0,53%) dan 65,05 Ha (0,58%). Pada sisi lain, lahan sawah merupakan penggunaan lahan yang mengalami pengurangan luas paling besar selama kurun waktu tersebut, yaitu sekitar 157,61 Ha (1,41%), kemudian semak belukar berkurang 140,63 Ha (1,26%) dan ladang berkurang sekitar 65,01 Ha (0,58%). Secara spasial, alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Bogor pada periode tahun 2015-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.14.



Sumber : Bapperida Kota Bogor

Gambar 2.14 Peta Perubahan Penggunaan Lahan Kota Bogor Tahun 2015-2023

2.1.5.3. Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

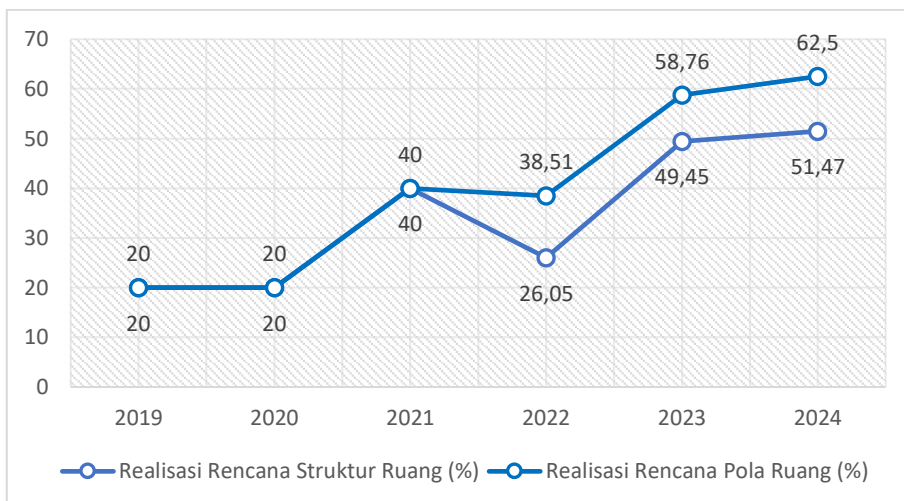
Mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bogor, paling tidak terdapat dua arahan utama yaitu pengembangan pola ruang dan struktur ruang. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, terhadap penggunaan ruang dalam RTRW, ketaatan terhadap tata ruang di Kota Bogor sudah cukup baik, artinya setiap proses pembangunan fisik dan pengembangan aktivitas perekonomian di Kota Bogor sudah mengacu kepada arahan penggunaan ruang dalam RTRW. Adapun pada tahun 2020–2023, indikator kinerja dalam tata ruang disesuaikan menjadi persentase realisasi rencana struktur ruang dan realisasi rencana pola ruang.

Berdasarkan data pada Tabel 2.12 dapat dilihat bahwa realisasi untuk rencana struktur ruang mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir walaupun realisasinya masih belum optimal. Begitu pun untuk realisasi dari pola ruang yang nilainya mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir walaupun realisasinya masih belum optimal. Namun, peningkatan dalam realisasi rencana struktur ruang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan tata ruang kota, termasuk pengembangan infrastruktur, kawasan permukiman, dan jaringan transportasi yang lebih baik. Sementara itu, kenaikan realisasi rencana pola ruang mencerminkan perbaikan dalam penataan fungsi lahan, seperti pemanfaatan lahan untuk kawasan hijau, area permukiman, dan zona industri yang lebih terstruktur. Persentase realisasi pola ruang yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pengembangan aktivitas masyarakat pada kawasan yang ditetapkan dalam RTRW sudah semakin baik.

Tabel 2.12 Indikator RTRW di Kota Bogor Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Realisasi Rencana Struktur Ruang (%)	20	20	40	26,05	49,45	51,47
2	Realisasi Rencana Pola Ruang (%)	20	20	40	38,51	58,76	62,5

Sumber: Bapperida Kota Bogor



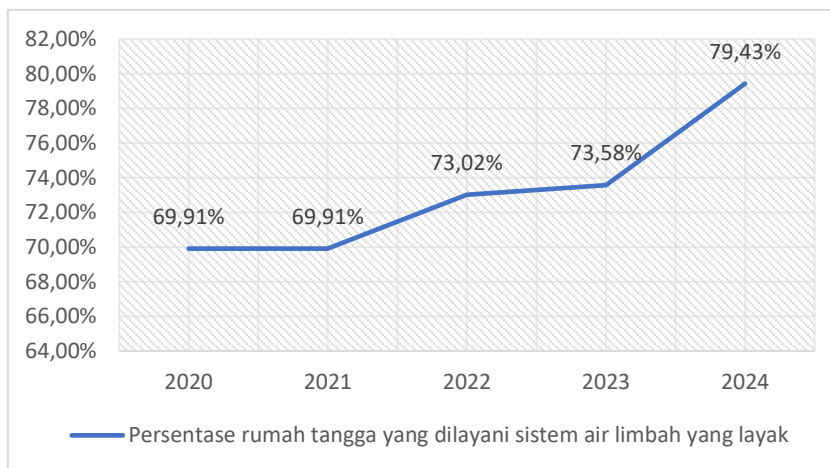
Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.7 Indikator RTRW di Kota Bogor tahun 2019-2024

2.1.5.4. Rumah Tangga dengan Akses Sistem Air Limbah yang Layak

Data tentang persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah. Selain itu, pengolahan air limbah yang layak juga berperan dalam menjaga kualitas lingkungan dalam suatu wilayah. Air limbah yang layak adalah air limbah yang memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan, sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan atau digunakan kembali. Standar tersebut mencakup berbagai parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi yang perlu diperhatikan.

Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah di Kota Bogor cenderung meningkat dalam kurun waktu 2020-2024 yang tersaji pada Grafik 2.7 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak adalah sebesar 69,91%, angka ini stagnan sampai dengan tahun berikutnya, dan baru mengalami kenaikan pada tahun 2022, dimana angkanya naik menjadi 73,02%. Tahun 2023 angka tersebut naik tipis menjadi 73,58%, dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 79,43%.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.8 Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Air Limbah yang Layak di Kota Bogor Tahun 2020-2024

Kedepannya, pelayanan sistem air limbah perlu ditingkatkan menjadi sistem air limbah yang aman. Capaian persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman di Kota Bogor masih tergolong kecil. Pada tahun 2024, persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah aman di Kota Bogor hanya mencapai 6,07%. Air limbah aman adalah air limbah yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan, sehingga tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia.

Menurut BPS, rumah tangga yang dilayani sistem air limbah aman adalah yang memiliki fasilitas sanitasi yang digunakan sendiri dengan jenis kloset leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam lima tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Dengan demikian, penyediaan layanan sistem air limbah di Kota Bogor kedepannya masih perlu diperhatikan sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Mengingat jumlah penduduk yang diperkirakan akan terus meningkat kedepannya, kesadaran mengenai kesehatan lingkungan permukiman merupakan hal yang penting untuk diperhatikan agar lingkungan yang menjadi wadah dimana

masyarakat hidup dan berkegiatan tetap terjaga kualitasnya, sehingga akan berimbas pada kesehatan masyarakat yang hidup di dalamnya.

2.1.5.5. Pengelolaan Persampahan

Permasalahan terkait sampah terus menjadi perhatian utama bagi kota-kota di Indonesia, termasuk Kota Bogor. Tempat penumpukan sampah, yang dikelola baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta, dapat berupa area terbuka atau tertutup. Pengelolaan tempat penimbunan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan.

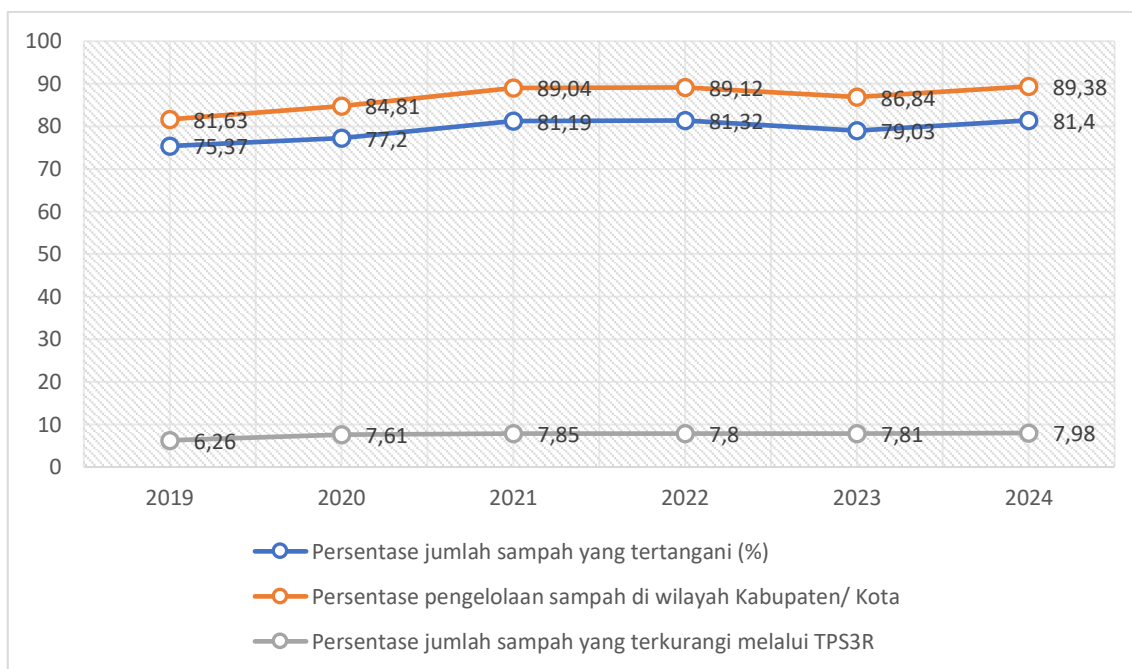
Sampah dibagi menjadi organik dan anorganik, dan upaya pengelolaan sampah diperlukan untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan masyarakat. Hal ini mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan daur ulang material sampah dengan tujuan mengurangi dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan estetika. Selain itu, pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Pemerintah Kota Bogor telah melakukan upaya maksimal dalam menangani masalah sampah demi keberlanjutan lingkungan yang lebih baik.

Dari data yang diperoleh, bahwa pengelolaan sampah di Kota Bogor Tahun 2019-2024 persentasenya mengalami fluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan. Data terkait pengelolaan sampah di Kota Bogor Tahun 2019 sampai 2024 disajikan pada Tabel 2.13 dan Grafik 2.9.

Tabel 2.13 Pengelolaan Sampah di Kota Bogor Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan sampah tahunan (ton)	240.205,33	245.922,33	245.922,33	271.727,57	284.631,60	275.707,63
Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/ Kota	81,63	84,81	89,04	89,12	86,84	89,38
Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	75,37	77,20	81,19	81,32	79,03	81,40
Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	6,26	7,61	7,85	7,80	7,81	7,98

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Grafik 2.9 Pengelolaan Sampah di Kota Bogor Tahun 2019-2024

Sejalan dengan itu, persentase jumlah sampah yang tertangani menunjukkan peningkatan dari 75,37% pada tahun 2019 hingga mencapai angka 81,40% pada tahun 2024. Tren serupa terlihat pada persentase jumlah sampah yang berhasil dikurangi melalui prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R), yang menunjukkan peningkatan dari 6,26% pada tahun 2019 menjadi 7,98% pada tahun 2024. Meskipun peningkatan relatif kecil, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam menerapkan konsep pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Tempat pengelolaan sampah Kota Bogor selain di Galuga juga di kelola di Tempat Pengolahan Pemrosesan Akhir Sampah Regional (TPPASR) Lulut Nambo.

2.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.6.1. Indeks Risiko Bencana

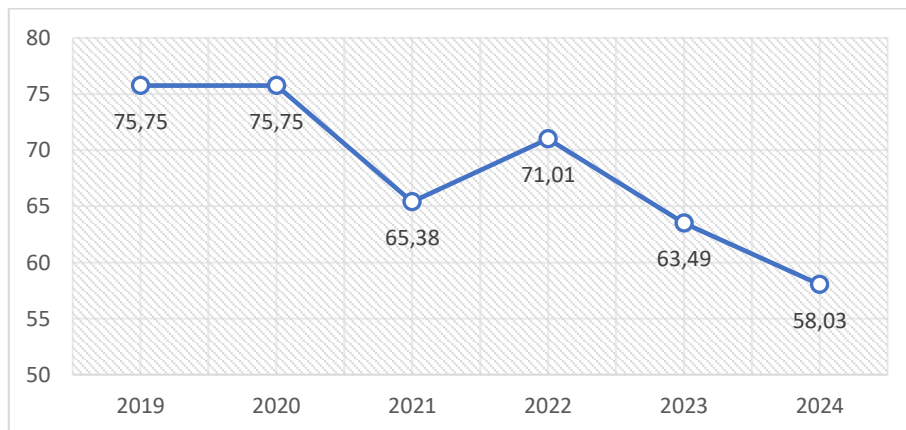
Secara umum Kota Bogor tidak lepas dari berbagai potensi bencana yang ada baik bencana yang berkaitan dengan aktivitas manusia (antropogenik) seperti banjir dan kebakaran tetapi juga dengan berbagai bencana alam lainnya seperti tanah longsor, angin puting beliung, gempa

bumi dan letusan gunung berapi. Oleh karena itu dalam merencanakan pembangunan 5 tahun ke depan diperlukan adanya pembangunan yang berwawasan kebencanaan sehingga infrastruktur dan masyarakat menjadi resilien terhadap potensi bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melakukan kajian terhadap risiko bencana yang ada di seluruh wilayah Indonesia melalui Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). IRBI merupakan indikator untuk mengukur tingkat risiko bencana suatu daerah terhadap berbagai ancaman, seperti gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Kajian IRBI dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

Berdasarkan hasil kajian IRBI, Kota Bogor secara umum selama periode 2019–2024 berada pada kelas risiko sedang. Pada level Provinsi Jawa Barat, kelas risiko yang ada di provinsi hanya ada risiko tinggi dan sedang. Nilai IRBI di Kota Bogor cenderung semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 dan 2020, indeks risiko bencana berada pada angka 75,75. Pada tahun 2021, indeks menurun cukup signifikan menjadi 65,38. Namun, pada tahun 2022, indeks kembali meningkat ke 71,01, yang mungkin menunjukkan adanya kejadian bencana yang lebih sering atau dampak dari perubahan iklim yang memperburuk kondisi lingkungan. Meskipun demikian, tren kembali menurun pada 2023 dengan indeks 63,49, dan berlanjut hingga 2024 dengan angka 58,03. Hal ini menandakan adanya upaya efektif mitigasi dan adaptasi dalam mengurangi risiko bencana yang

dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor untuk memastikan Kota Bogor aman siap terhadap bencana yang ada.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Nasional

Grafik 2.10 Indeks Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2019–2024

2.1.6.2. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan dokumen Laporan Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bogor Tahun 2023-2027, terdapat delapan risiko bencana yang berpotensi terjadi di Kota Bogor yaitu sebagai berikut.

1) Risiko Bencana Banjir

Kota Bogor berada pada wilayah dengan dataran menengah serta memiliki bentuk lahan berbukit. Rata-rata ketinggian minimum Kota Bogor adalah 190 mdpl dan maksimum 350 mdpl. Kota Bogor juga berada pada posisi perlintasan dua aliran sungai besar yang menjadi bagian dari DAS Ciliwung dan DAS Cisadane. Sehingga dengan kondisi seperti ini, potensi banjir di Kota Bogor cukup rentan. Wilayah yang masuk ke dalam area rawan banjir merupakan wilayah dengan topografi datar dan berada di sekitar sungai. Banjir yang terjadi di Kota Bogor merupakan banjir lintasan yang terjadi pada badan aliran sungai dan terjadi kurang dari 60 menit.

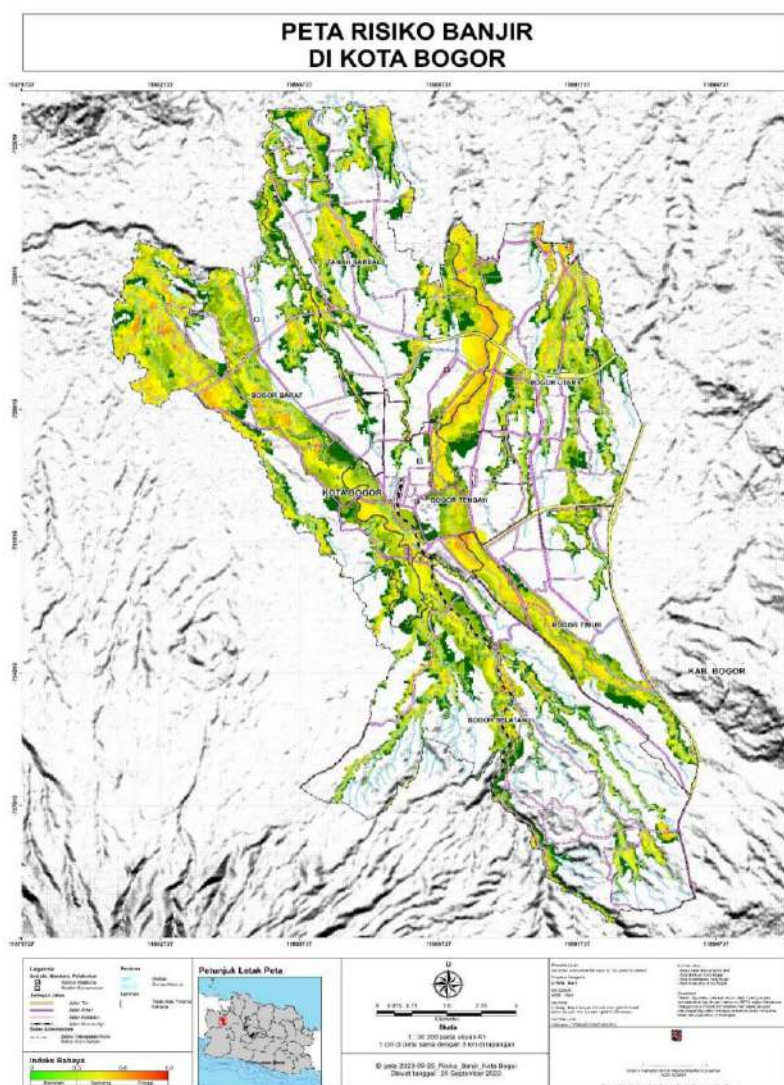
Telah dilakukan perhitungan mengenai tingkat risiko banjir yang diperoleh dari hasil tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas bencana banjir di Kota Bogor. Hasil dari perhitungan tingkat risiko banjir di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Kelas Risiko Banjir Per Kecamatan di Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)			Total Wilayah (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bogor Barat	528,21	883,62	39,87	1.451,70	Sedang
2	Bogor Selatan	483,12	434,52	22,05	939,69	Rendah
3	Bogor Tengah	149,40	224,28	15,66	389,34	Sedang
4	Bogor Timur	148,86	254,88	13,14	416,88	Sedang
5	Bogor Utara	349,29	561,06	20,61	930,96	Sedang
6	Tanah Sareal	413,37	533,07	29,52	975,96	Sedang
	Kota Bogor	2.072,25	2.891,43	140,85	5.104,53	Sedang

Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2023-2027

Jika dilihat pada Tabel 2.14 di atas maka secara keseluruhan wilayah di Kota Bogor memiliki tingkat risiko yang sedang dengan luas 5.104,53 Ha atau 45,83% dari luas wilayah Kota Bogor. Namun jika dilihat per kecamatan, terdapat satu kecamatan dengan risiko bencana banjir rendah, yaitu Kecamatan Bogor Selatan dengan luas 939,69 ha. Adapun lima kecamatan lainnya memiliki kelas risiko banjir sedang, yaitu Bogor Barat, Bogor Tengah, Bogor Timur, Bogor Utara, dan Tanah Sareal dengan luas tertinggi di Kecamatan Bogor Barat, yaitu 1.451,70 Ha. Banjir merupakan salah satu bencana yang terjadi hampir di setiap tahunnya dan mencakup semua kecamatan dengan kelas risiko sedang. Adanya risiko banjir di Kota Bogor ini disebabkan oleh keberadaan sungai-sungai di Kota Bogor, seperti Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Ciapus, Sungai Cipakancilan, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai daerah risiko banjir dapat dilihat pada Gambar 2.15.



Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2023-2027

Gambar 2.15 Peta Risiko Banjir Kota Bogor

2) Banjir Bandang

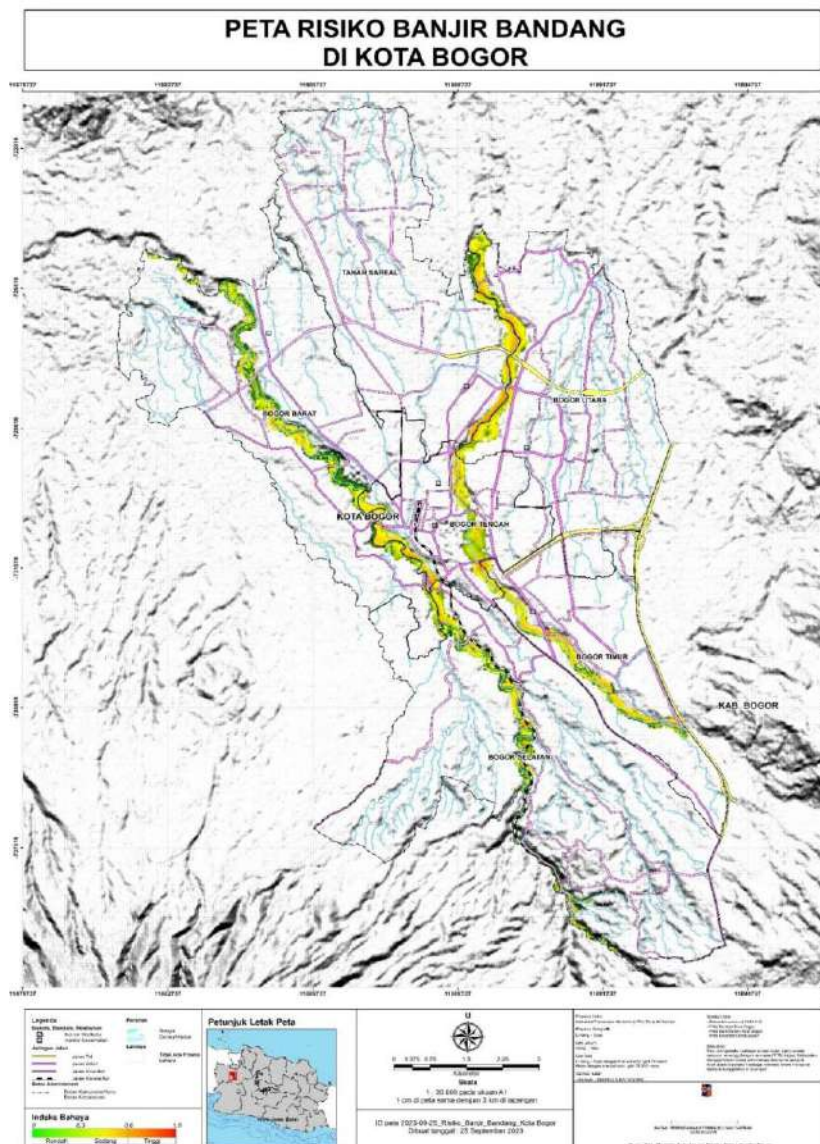
Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Tingkat risiko banjir bandang diperoleh dari hasil tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas bencana banjir bandang di Kota Bogor. Hasil perhitungan risiko banjir bandang di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15 Kelas Risiko Banjir Bandang Per Kecamatan di Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)			Total Wilayah (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bogor Barat	113,44	92,37	2,86	208,66	Rendah
2	Bogor Selatan	91,20	72,30	3,20	166,70	Rendah
3	Bogor Tengah	28,16	91,18	11,64	130,98	Sedang
4	Bogor Timur	27,25	75,06	5,88	108,19	Sedang
5	Bogor Utara	23,61	74,79	7,13	105,54	Sedang
6	Tanah Sareal	18,22	26,86	13,84	58,92	Sedang
	Kota Bogor	301,88	432,56	44,55	778,99	Sedang

Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2023-2027

Jika dilihat pada tabel diatas maka Kota Bogor yang tergolong dalam risiko banjir bandang sedang dengan potensi luas risiko 778,99 Ha. Meskipun demikian, jika dirinci per kecamatan, hanya terdapat empat kecamatan dengan kelas risiko banjir bandang sedang, yaitu Kecamatan Bogor Tengah (130,98 Ha), Bogor Timur (108,19 Ha), Bogor Utara (105,54 Ha), dan Tanah Sareal (58,92 Ha). Hal ini dikarenakan keempat kecamatan tersebut dilalui oleh Sungai Ciliwung. Sementara itu, dua kecamatan lainnya, yaitu Bogor Barat dan Bogor Selatan hanya memiliki risiko banjir bandang dengan kategori rendah.



Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2023-2027

Gambar 2.16 Peta Risiko Banjir Bandang di Kota Bogor

3) Bencana Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem di wilayah Kota Bogor menyebabkan dua fenomena bahaya, yaitu angin puting beliung dan pohon tumbang. Puting beliung adalah angin kencang atau bisa juga disebut badai besar yang sangat kuat dengan pusaran angin dengan kecepatan 120 km/jam atau lebih. Bencana angin puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada masa peralihan musim. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala

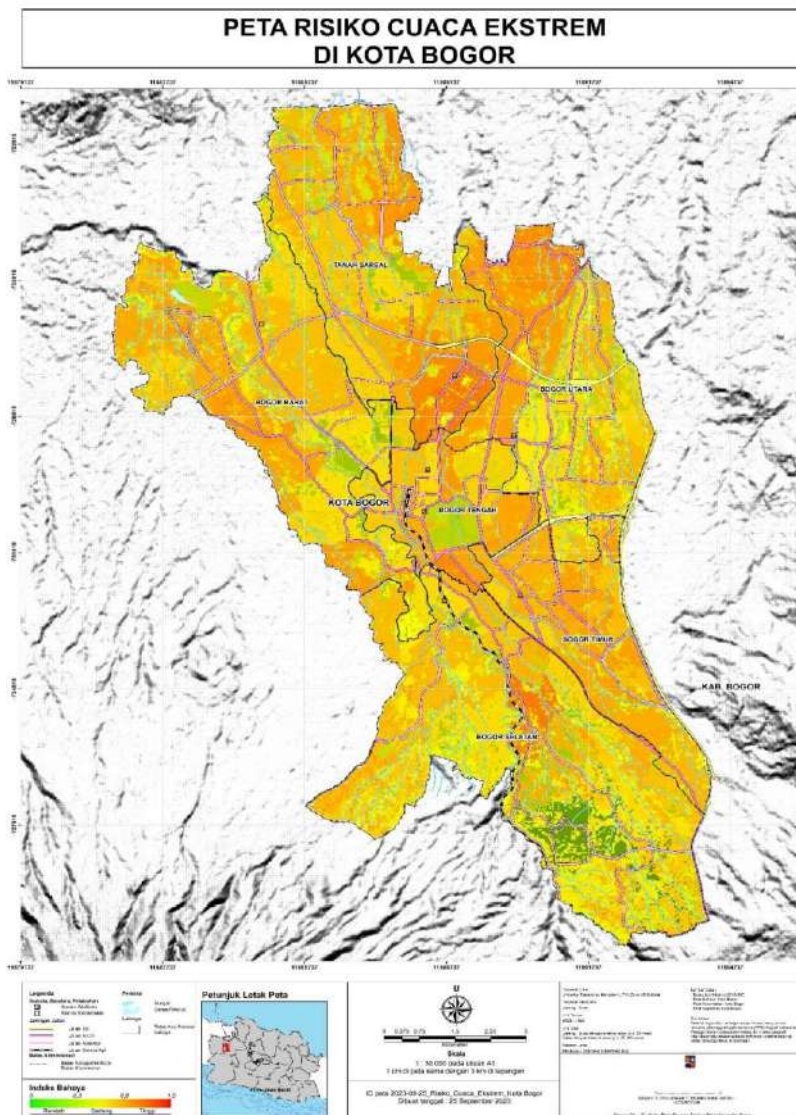
lokal. Tingkat risiko bencana cuaca ekstrem diperoleh dari hasil tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas bencana cuaca ekstrem di Kota Bogor dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.16 Kelas Risiko Cuaca Ekstrem Per Kecamatan di Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)			Total Wilayah (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bogor Barat	20,88	1.646,02	737,01	2.403,91	Sedang
2	Bogor Selatan	234,99	2.194,02	581,22	3.010,23	Sedang
3	Bogor Tengah	0,09	541,44	295,38	836,91	Sedang
4	Bogor Timur	0,09	393,48	638,82	1.032,39	Tinggi
5	Bogor Utara	15,30	1.011,33	770,76	1.797,39	Sedang
6	Tanah Sareal	1,53	996,84	1.048,50	2.046,87	Tinggi
	Kota Bogor	272,88	6.783,13	4.071,69	11.127,70	Sedang

Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2023-2027

Jika dilihat pada Tabel di atas, maka secara umum Kota Bogor memiliki tingkat risiko cuaca ekstrem sedang. Meskipun demikian, tidak berarti semua kelurahan di kecamatan-kecamatan ini memiliki risiko cuaca ekstrem sedang. Kecamatan Bogor Timur dan Tanah Sareal memiliki risiko cuaca ekstrem tinggi, sedangkan empat kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Tengah, dan Bogor Utara memiliki risiko cuaca ekstrem sedang.



Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2023-2027

Gambar 2.17 Peta Risiko Cuaca Ekstrem Kota Bogor

4) Bencana Tanah Longsor

Istilah “Gerakan Tanah” atau "Tanah Longsor" atau "Landslide", seperti yang didefinisikan oleh Cruden (1991) adalah gerakan massa batuan, puing-puing, atau tanah yang menuruni sebuah lereng. Longsoran adalah suatu konsekuensi fenomena dinamis alam untuk mencapai kondisi baru akibat gangguan keseimbangan lereng yang terjadi, baik secara alamiah maupun akibat ulah manusia. Tanah longsor akan terjadi pada suatu lereng, jika ada keadaan ketidakseimbangan yang menyebabkan terjadinya suatu proses mekanis, mengakibatkan sebagian dari lereng tersebut bergerak mengikuti

gaya gravitasi, dan selanjutnya setelah terjadi longsor, lereng akan seimbang atau stabil kembali. Jadi longsor merupakan pergerakan massa tanah atau batuan menuruni lereng mengikuti gaya gravitasi akibat terganggunya kestabilan lereng. Apabila massa yang bergerak pada lereng ini didominasi oleh tanah dan gerakannya melalui suatu bidang pada lereng, baik berupa bidang miring maupun lengkung, maka proses pergerakan tersebut disebut sebagai longsoran tanah.

Tipikal longsoran yang terjadi di Kota Bogor hampir seragam, yaitu terjadi pada lembah-lembah sungai. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan beberapa penelaahan studi literatur yang merupakan faktor penyebab terjadinya longsor paling dominan adalah kemiringan lereng, aktivitas sungai, jenis batuan, ketebalan serta jenis tanah penutup, dan tutupan lahan (aktivitas manusia). Faktor yang menjadi pemicu terjadinya tanah longsor di Kota Bogor adalah cenderung ke arah intensitas hujan. Semakin tinggi intensitas hujan maka kemungkinan terjadinya longsor pada lembah-lembah sungai semakin besar.

Tingkat risiko bencana tanah longsor berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas tanah longsor di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

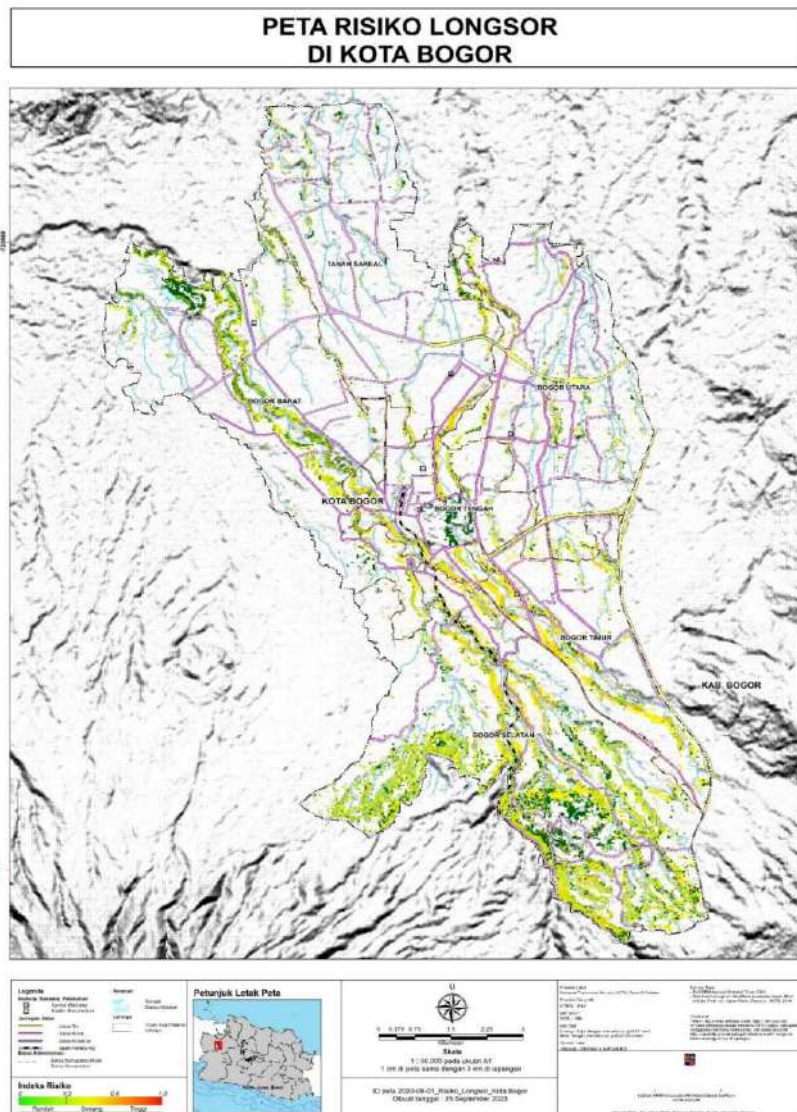
Tabel 2.17 Kelas Risiko Bencana Tanah Longsor Per Kecamatan di Kota Bogor.

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)			Total Wilayah (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bogor Barat	141,03	670,95	21,87	833,85	Sedang
2	Bogor Selatan	80,82	2.075,04	215,46	2.371,32	Sedang
3	Bogor Tengah	7,92	418,59	45,81	472,32	Sedang
4	Bogor Timur	15,93	437,58	128,34	581,85	Sedang
5	Bogor Utara	60,93	245,79	0,09	306,81	Sedang
6	Tanah Sareal	17,91	83,25	17,73	118,89	Sedang
	Total	324,54	3.931,20	429,30	4.685,04	Sedang

Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2023-2027

Jika dilihat pada Tabel 2.17 di atas, maka seluruh wilayah di Kota Bogor memiliki tingkat risiko bencana tanah longsor sedang dengan luas total adalah 4.685,04 Ha. Kecamatan dengan luas kelas risiko terbesar adalah Kecamatan Bogor Selatan yaitu seluas 2.371,32 Ha atau sekitar 50,61% dari

total luas risiko keseluruhan. Adapun kecamatan dengan luas kelas risiko terendah adalah Kecamatan Tanah Sareal, yaitu seluas 118,89 Ha (2,54%). Luasnya wilayah Bogor Selatan yang berisiko bahaya tanah longsor ini tidak terlepas dari kondisi topografi wilayah tersebut yang lebih bervariasi daripada kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Bogor.



Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2023-2027

Gambar 2.18 Peta Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor

5) Bahaya Gempa Bumi

Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi

dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Episentrum atau pusat gempa bumi terjadi pada zona patahan aktif, zona pertemuan lempeng atau di Indonesia dikenal sebagai zona subduksi.

Berdasarkan data geologi yang berasal dari data lapangan dan Peta Geologi Regional Lembar Bogor, tidak terdapat patahan aktif ataupun jejaknya berupa morfologi khas patahan (rupture). Selain itu Kota Bogor ditutupi oleh batuan vulkanik yang cukup tebal. Menurut peta KRB Gempa Bumi, Kota Bogor termasuk pada zona KRB gempa bumi menengah dengan potensi landaan gempa berskala intensitas antara VII – VIII MMI.

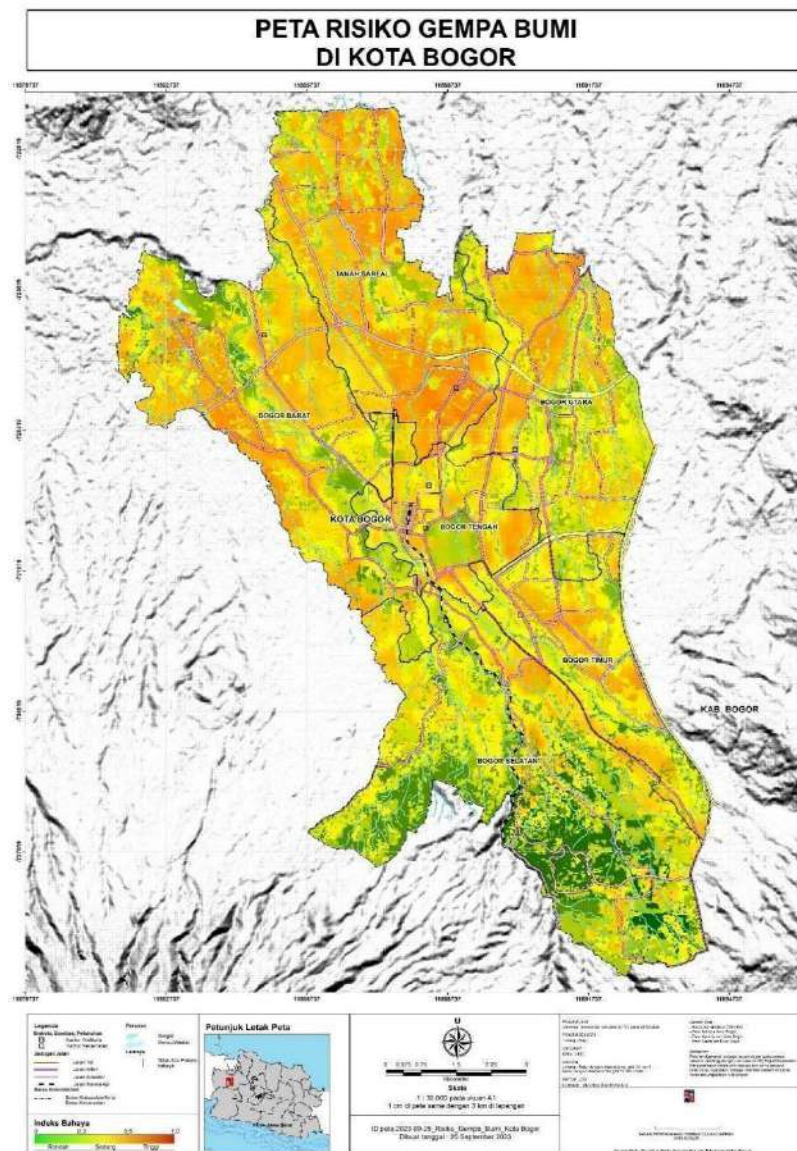
Tingkat risiko bencana gempa bumi yang diperoleh dari hasil analisis terhadap tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas gempa bumi di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18 Kelas Risiko Bencana Gempa Bumi Per Kecamatan di Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)			Total Wilayah (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bogor Barat	281,61	1.629,41	463,50	2.374,52	Sedang
2	Bogor Selatan	995,67	1.982,45	46,98	3.025,10	Sedang
3	Bogor Tengah	44,28	707,53	84,24	836,05	Sedang
4	Bogor Timur	120,06	816,39	110,52	1.046,97	Sedang
5	Bogor Utara	123,66	1.424,79	256,23	1.804,68	Sedang
6	Tanah Sareal	64,62	1.193,76	788,04	2.046,42	Sedang
	Total	1.629,90	7.754,33	1.749,51	11.133,74	Sedang

Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2023-2027

Jika dilihat pada Tabel 2.18 di atas maka seluruh wilayah di Kota Bogor memiliki tingkat risiko bencana gempa bumi sedang dengan luas total risiko 11.133,74 Ha. Dari jumlah tersebut, luasan tertinggi risiko gempa bumi berada di Kecamatan Bogor Selatan, yaitu 3.025,10 Ha (27,17%).



Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2023-2027

Gambar 2.19 Peta Risiko Gempa Bumi di Kota Bogor

6) Risiko Bencana Letusan Gunung Api

Letusan gunungapi merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunungapi dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB). Gunung yang sering meletus disebut gunung berapi aktif. Area sekitar keberadaan gunung berapi aktif merupakan wilayah rawan terhadap bencana letusan gunung api. Parameter yang digunakan dalam menentukan kajian bahaya letusan gunung

api yaitu: Zona aliran dan Zona jatuhan, data yang digunakan Peta KRB I, II dan III (letusan gunung api) dengan sumber data PVMBG Tahun 2010. Berdasarkan hasil analisis potensi bahaya letusan gunung api di Kota Bogor, terdapat tiga kecamatan yang masuk kedalam potensi bahaya letusan gunung api Zona I dengan kelas bahaya rendah, dengan total luas 389,70 Ha, dengan rincian Kecamatan Bogor Barat (257,04 Ha), Bogor Selatan (102,60 Ha), dan Bogor Tengah (30,06 Ha).

Setelah dilakukan perhitungan tingkat risiko bencana gunung api dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas letusan gunung api di Kota Bogor, kelas risiko bencana letusan gunung api di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19 Kelas Risiko Bencana Letusan Gunung Api Per Kecamatan di Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)			Total Wilayah (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bogor Barat	143,28	95,04	0,00	238,32	Rendah
2	Bogor Selatan	49,50	44,28	0,00	93,78	Rendah
3	Bogor Tengah	2,43	25,92	0,00	28,35	Sedang
4	Bogor Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	Rendah
5	Bogor Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	Rendah
6	Tanah Sareal	0,00	0,00	0,00	0,00	Rendah
	Total	195,21	165,24	0,00	360,45	Rendah

Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2023-2027

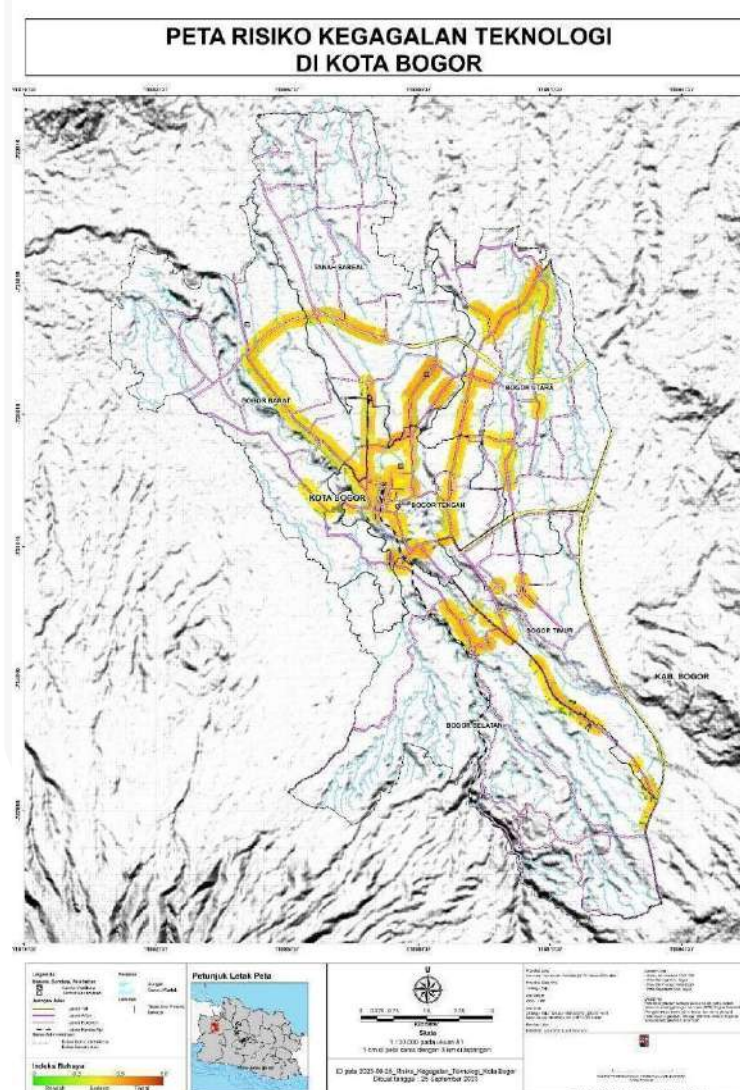
7) Bencana Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan karena kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesenjangan manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri. Tingkat risiko bencana kegagalan teknologi diperoleh dari hasil tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas kegagalan teknologi di Kota Bogor didapatkan bahwa seluruh wilayah di Kota Bogor memiliki tingkat risiko bencana kegagalan teknologi sedang sebagaimana dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 2.20 Kelas Risiko Bencana Kegagalan Teknologi Per Kecamatan di Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)			Total Wilayah (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bogor Barat	8,73	262,68	1,89	273,30	Sedang
2	Bogor Selatan	10,08	134,64	17,64	162,36	Sedang
3	Bogor Tengah	0,99	320,49	45,54	367,02	Sedang
4	Bogor Timur	9,90	114,39	15,12	139,41	Sedang
5	Bogor Utara	6,03	307,35	10,62	324,00	Sedang
6	Tanah Sareal	1,71	125,10	65,16	191,97	Sedang
	Total	37,44	1.264,65	155,97	1.458,06	Sedang

Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2023-2027

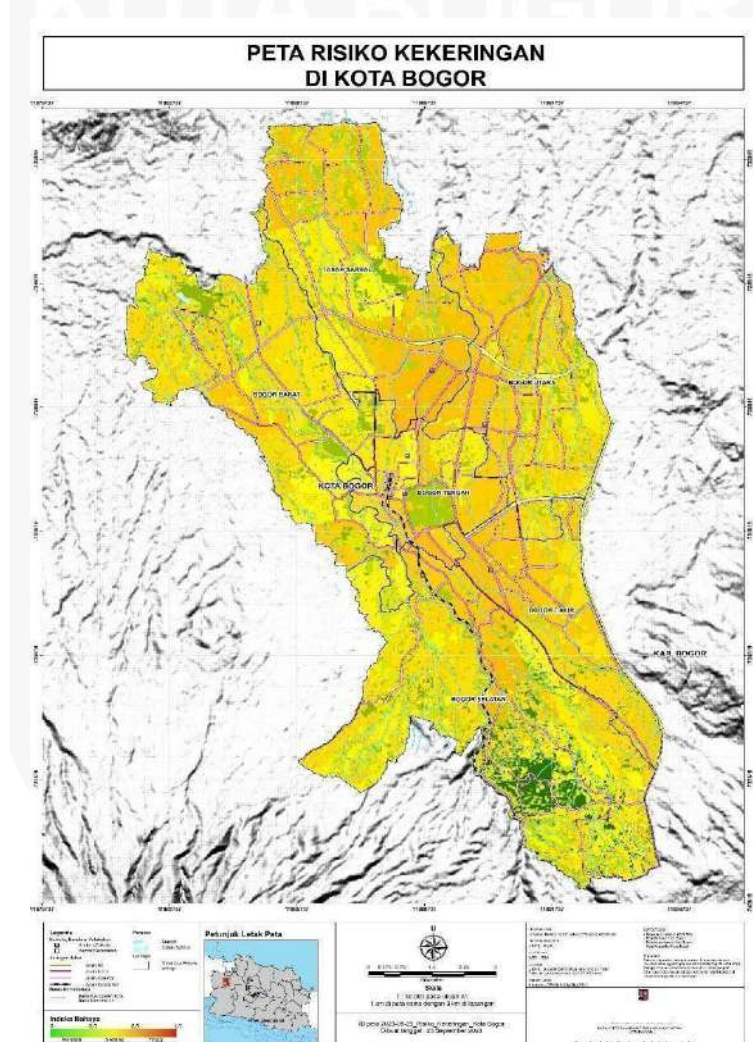


Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2023-2027

Gambar 2.20 Peta Risiko Kegagalan Teknologi di Kota Bogor

8) Risiko Bencana Kekeringan

Kekeringan merupakan jenis bencana alam meteorologi dimana bencana alam ini terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Tingkat risiko bencana kekeringan diperoleh dari hasil tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas kekeringan di Kota Bogor didapat bahwa seluruh wilayah di Kota Bogor memiliki tingkat risiko bencana kekeringan sedang dengan total luas risiko yaitu 11.149,73 Ha. Lebih detail mengenai kelas risiko bencana kekeringan per kecamatan di Kota Bogor adalah sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2.21 dan Tabel 2.21.



Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2023-2027

Gambar 2.21 Peta Risiko Kekeringan di Kota Bogor

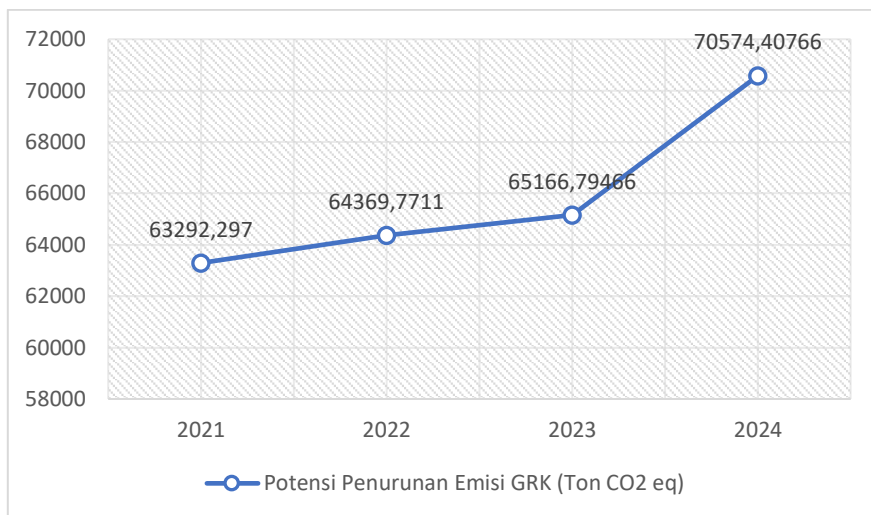
Tabel 2.21 Kelas Risiko Bencana Kekeringan Per Kecamatan di Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)			Total Wilayah (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Bogor Barat	229,39	2.097,72	0,08	2.327,18	Sedang
2	Bogor Selatan	420,76	2.613,34	9,63	3.043,73	Sedang
3	Bogor Tengah	12,39	835,23	0,00	847,62	Sedang
4	Bogor Timur	22,42	1.027,51	0,00	1.049,93	Sedang
5	Bogor Utara	68,62	1.745,91	0,00	1.814,53	Sedang
6	Tanah Sareal	52,64	1.935,55	78,55	2.066,74	Sedang
	Total	806,21	10.255,26	88,26	11.149,73	Sedang

Sumber: Laporan Kajian Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2023-2027

2.1.6.3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang memerlukan perhatian dan tindakan nyata di berbagai tingkatan, termasuk di tingkat kota. Kota Bogor sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan aktivitas sosial di Jawa Barat memiliki peran strategis dalam mendukung upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Peningkatan emisi GRK dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti perubahan pola cuaca ekstrem, peningkatan suhu udara, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengendalian emisi GRK menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Upaya ini sejalan dengan komitmen Kota Bogor dalam mendukung target pembangunan rendah karbon dan keberlanjutan lingkungan. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat, diharapkan Kota Bogor dapat terus menurunkan emisi GRK secara signifikan, sehingga mampu mewujudkan kota yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakatnya.



Sumber: Aksara, Bappenas 2025

Grafik 2.11 Potensi Penurunan Emisi GRK di Kota Bogor Tahun 2021-2024

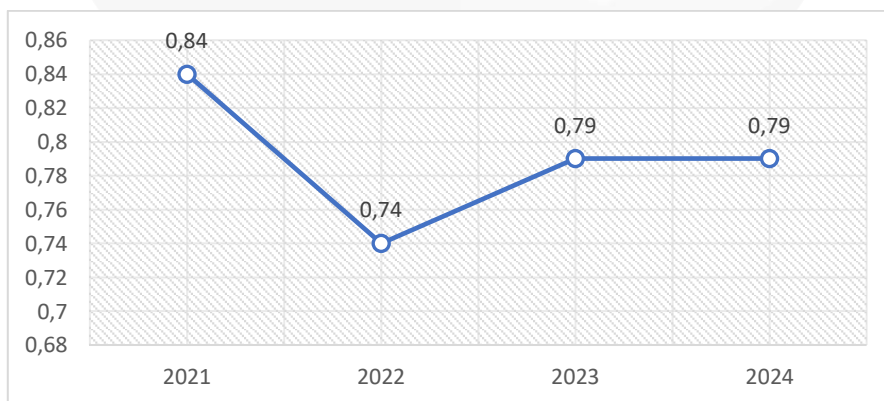
Peningkatan potensi penurunan emisi GRK di Kota Bogor menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2021-2024 (Grafik 2.11). Hal ini mencerminkan upaya Kota Bogor dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi dalam berbagai sektor, termasuk transportasi, industri, dan permukiman. Kenaikan yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kebijakan atau program yang semakin efektif dalam menurunkan emisi, seperti penerapan teknologi ramah lingkungan, peningkatan ruang terbuka hijau, serta penguatan regulasi terkait pengurangan emisi. Dengan meningkatnya angka penurunan emisi GRK, Kota Bogor menunjukkan komitmennya dalam mendukung target pembangunan berkelanjutan dan upaya mitigasi perubahan iklim. Namun, pencapaian ini tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan agar target pengurangan emisi bisa lebih optimal, terutama di tengah pertumbuhan kota yang pesat dan meningkatnya aktivitas ekonomi serta mobilitas penduduk.

2.1.6.4. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu daerah dalam menghadapi tantangan dan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, sosial, serta lingkungan. Kota Bogor sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Jawa Barat menghadapi

berbagai dinamika pembangunan yang memerlukan ketahanan daerah yang kuat agar dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Peningkatan IKD menjadi salah satu prioritas utama guna memastikan bahwa Kota Bogor tetap mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun ekologis. IKD yang tinggi mencerminkan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana, ketahanan terhadap gejolak ekonomi, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemantauan dan penguatan IKD menjadi langkah strategis dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas pembangunan Kota Bogor.

Indeks Ketahanan Daerah Kota Bogor menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2021 hingga 2024 (Grafik 2.12). Pada tahun 2021, IKD berada di angka 0,84, yang menunjukkan kondisi yang relatif baik. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 0,74, yang dapat mengindikasikan adanya tantangan besar yang dihadapi Kota Bogor pada periode tersebut, seperti dampak ekonomi akibat pandemi, peningkatan tekanan terhadap infrastruktur dan layanan publik, serta potensi bencana alam yang mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi daerah. Meski demikian, tren positif terlihat pada tahun 2023, di mana IKD kembali meningkat menjadi 0,79 dan bertahan di angka yang sama pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan dalam dua tahun terakhir, terdapat upaya pemulihan yang efektif dengan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah Kota Bogor.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.12 Indeks Ketahanan Daerah Kota Bogor Tahun 2021-2024

Salah satu faktor penting yang dapat memperkuat dan mempertahankan peningkatan IKD ke depan adalah adanya kebijakan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana dengan baik. Perencanaan pembangunan daerah perlu diarahkan pada prinsip keberlanjutan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai fondasi utama ketahanan wilayah.

Perubahan iklim merupakan determinan utama yang berdampak terhadap penurunan kapasitas adaptif daerah, terutama dalam dimensi ekologi dan sosial. Integrasi strategi adaptasi perubahan iklim dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi instrumen penting dalam meningkatkan resiliensi Kota Bogor. RPPLH dapat memperkuat arah kebijakan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan, perlindungan kawasan strategis lingkungan, serta pengendalian degradasi sumber daya alam. RPPLH berperan penting dalam menjaga fungsi ekologis kawasan, mengarahkan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, serta mengendalikan degradasi lingkungan. Kolaborasi lintas sektor serta sinkronisasi RPPLH dengan dokumen perencanaan lainnya diperlukan guna memastikan koherensi kebijakan dan peningkatan kapasitas adaptif sehingga mampu memperkuat ketahanan Kota Bogor dalam jangka panjang serta menjaga konsistensi peningkatan IKD secara berkelanjutan.

2.1.7. Demografi

2.1.7.1. Struktur Kependudukan

Kependudukan merupakan salah satu bagian penting yang menjadi perhatian dalam proses perencanaan, karena penduduk merupakan subjek utama dalam proses pembangunan. Dalam kurun waktu 2020-2024 jumlah penduduk Kota Bogor meningkat dari 1.043.070 jiwa pada tahun 2020 menjadi 1.078.351 jiwa pada tahun 2024 (Tabel 2.22). Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan kepadatan penduduknya, di mana Kota Bogor pada tahun 2020 memiliki kepadatan penduduk sebesar

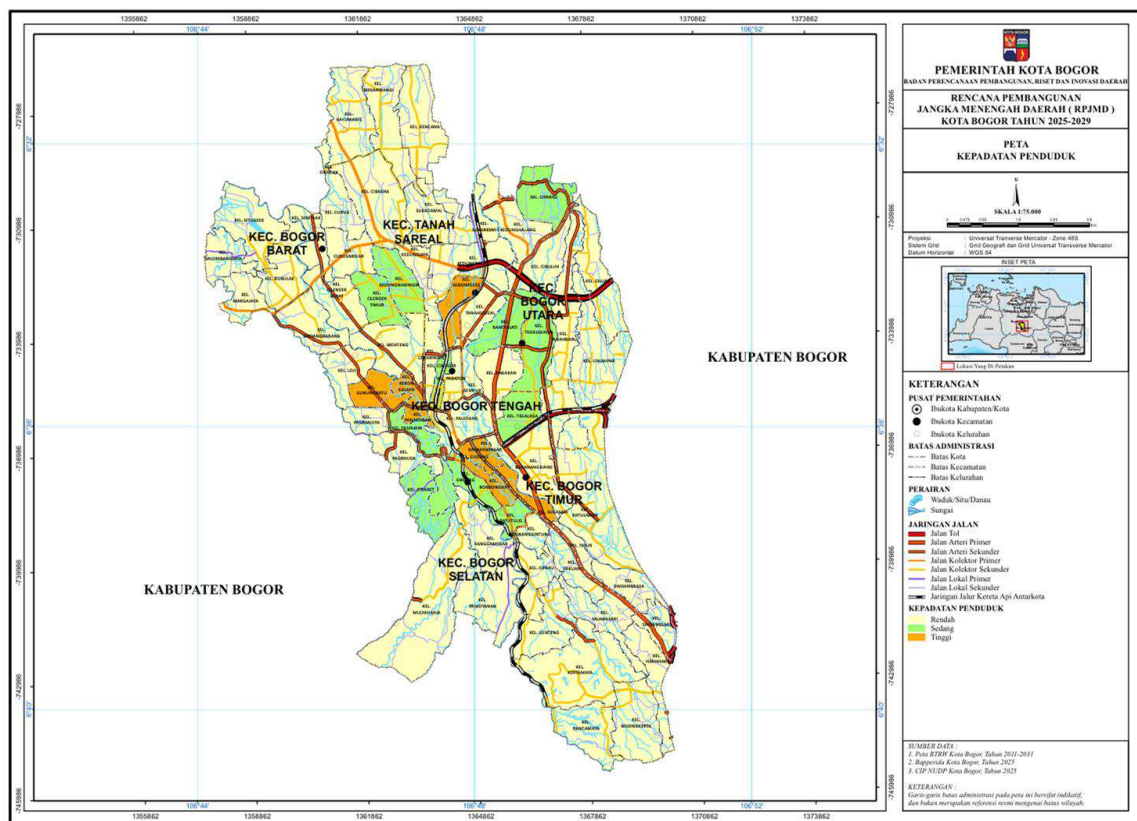
8.802 jiwa per kilometer persegi yang cenderung meningkat hingga mencapai 9.681 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024.

Laju pertumbuhan penduduk menggambarkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Tingkat laju pertumbuhan penduduk memiliki dampak terhadap ekonomi, lingkungan, dan sumber daya suatu wilayah. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor banyaknya imigran yang datang, tingginya tingkat fertilitas, dan rendahnya tingkat mortalitas. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Bogor selama periode tahun 2020-2024 adalah 0,89%). Penduduk yang semakin bertambah berimplikasi terhadap rasio ketersediaan ruang untuk menopang aktivitas penduduknya.

Lebih jelasnya jumlah dan kepadatan penduduk Kota Bogor dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.22 dan Gambar 2.22.

Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan persentase penduduk per kecamatan, persentase paling tinggi dalam setiap tahunnya adalah Kecamatan Bogor Barat, baik pada periode 2020 hingga tahun 2024, dengan persentase berada pada sekitar 22% tiap tahunnya. Sementara itu, kecamatan dengan persentase penduduk terendah pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Timur yang berada pada sekitar 9-10% setiap tahunnya.

Persentase jumlah penduduk ini mencerminkan tingkat pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan distribusi penduduk di Kota Bogor, yang dipengaruhi oleh faktor demografi seperti fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan penduduk). Dengan demikian dalam suatu wilayah akan berbeda-beda nilainya, tergantung dari fakto-faktornya yang mempengaruhinya.



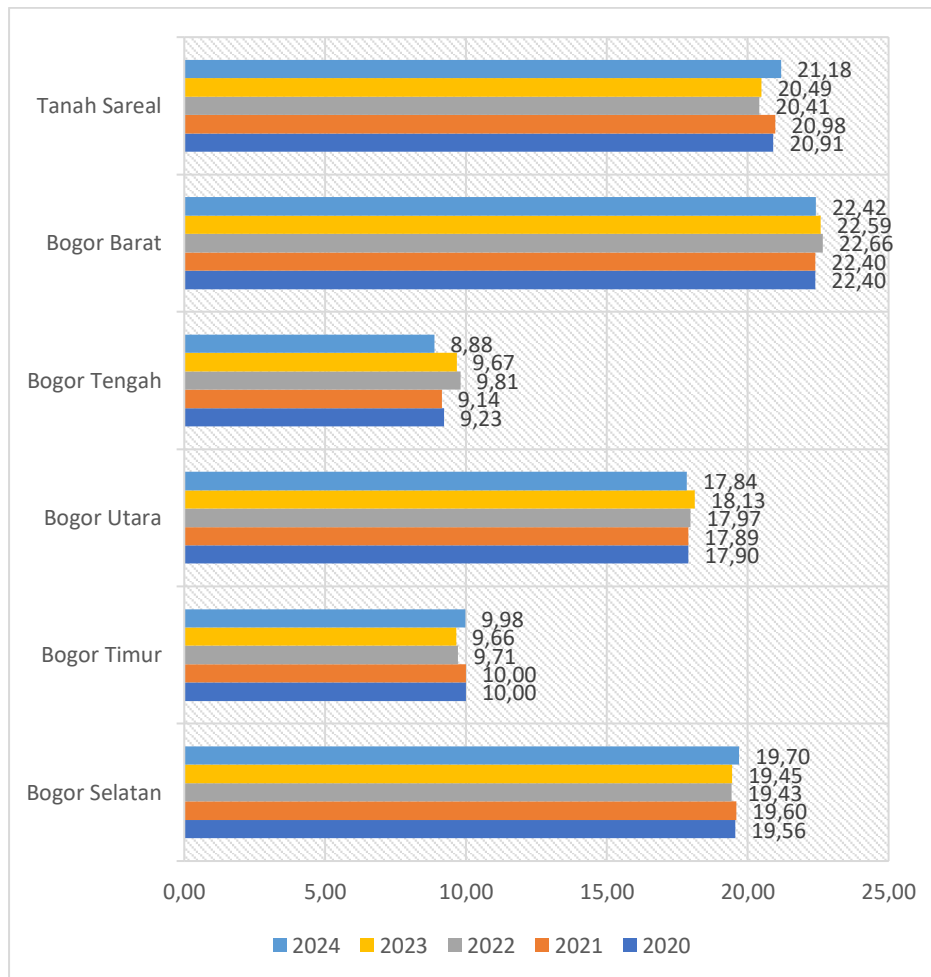
Gambar 2.22 Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2024



Tabel 2.22 Struktur Kependudukan di Kota Bogor Tahun 2020-2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Kepadatan penduduk/km ²					Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024 (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Bogor Selatan	204.030	206.217	216.501	219.309	212.423	6.622	6.693	7.097	7.190	6.964	1,08
Bogor Timur	104.327	105.188	108.212	108.919	107.573	10.278	10.363	10.341	10.409	10.280	0,82
Bogor Utara	186.724	188.240	200.200	204.454	192.430	10.537	10.623	11.037	11.273	10.610	0,81
Bogor Tengah	96.258	96.180	109.331	109.057	95.758	11.840	11.830	13.067	13.035	11.445	-0,14
Bogor Barat	233.637	235.770	252.433	254.629	241.738	7.112	7.177	10.826	10.921	10.368	0,91
Tanah Sareal	218.094	220.764	227.341	231.040	228.429	11.576	11.718	11.035	11.215	11.089	1,24
Kota Bogor	1.043.070	1.052.359	1.114.018	1.127.408	1.078.351	8.802	8.881	10.001	10.122	9.681	0,89

Sumber: BPS Kota Bogor



Sumber: BPS Kota Bogor

Grafik 2.13 Persentase Penduduk per Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2020-2024

Sementara itu, dilihat dari penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2020 berjumlah 1.078.351 jiwa yang terdiri dari 529.236 orang berjenis kelamin laki-laki dan 513.834 orang berjenis kelamin perempuan. Dari data tahun 2020, rasio jenis kelamin penduduk Kota Bogor pada tahun 2020 sebesar 103, yang artinya terdapat 103 laki-laki per 100 perempuan di Kota Bogor pada tahun 2020. Sementara itu, pada tahun 2024 Penduduk di Kota Bogor terdiri dari 545.945 orang berjenis kelamin laki-laki dan 532.406 orang berjenis kelamin perempuan. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Kota Bogor pada tahun 2024 sebesar 103, yang artinya terdapat 103 laki-laki per 100 perempuan.

Perubahan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ini bertujuan untuk memudahkan analisis demografi dan perencanaan pembangunan berdasarkan pemberdayaan gender, analisis ketenagakerjaan, dan dinamika sosial. Untuk lebih jelasnya mengenai penduduk menurut jenis kelamin dan rasionya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23 Struktur Penduduk Kota Bogor berdasarkan Jenis Kelamin
pada Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Laki-Laki (jiwa)	Jumlah Penduduk Perempuan (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
2020	529.236	513.834	103
2021	533.774	518.585	103
2022	563.033	550.985	102
2023	570.333	557.075	102
2024	545.945	532.406	103

Sumber: BPS Kota Bogor

2.1.7.2. Bonus Demografi

Aspek lainnya yang dapat dianalisis dari demografi ialah rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Misal rasio ketergantungan 40, hal ini dapat dimaknai bahwa, setiap 100 penduduk usia produktif, menanggung 40 penduduk usia belum produktif/tidak produktif. Bonus demografi terjadi saat nilai rasio ketergantungan kecil. Semakin kecil rasio ketergantungan maka semakin besar bonus demografi. Bonus demografi didapat jika lebih dari 60% penduduk ada pada usia produktif atau jika rasio ketergantungan <66. Hal ini dapat dihitung dengan rumus Berikut ini:

$$DR = \frac{P_{(0-14)} - P_{(65+)}}{P_{(15-64)}} \times 100$$

Keterangan:

DR = *Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan)

$P_{(0-14)}$ = Jumlah penduduk usia muda atau belum produktif (0-14 tahun)

$P_{(65+)}$ = Jumlah penduduk usia tidak produktif atau tua (65 tahun ke atas)

$P_{(15-64)}$ = Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun)

Angka ketergantungan di Kota Bogor (Tabel 2.24) menunjukkan tren yang sedikit meningkat selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, angka ketergantungan mencapai 42,74% dimana angka ini kemudian berfluktuasi menjadi 42,65% pada tahun 2021, 42,66% pada tahun 2022, 43,94% pada tahun 2023, dan 42,13 pada tahun 2024. Tren fluktuatif ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia muda dan usia tua di Kota Bogor relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. Angka ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk usia produktif harus menanggung beban yang lebih besar untuk menghidupi penduduk usia non-produktif. Perubahan struktur kependudukan ini dapat memiliki berbagai dampak sosial dan ekonomi. Misalnya, peningkatan jumlah penduduk usia tua dapat meningkatkan permintaan akan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.24 Komposisi Penduduk berdasarkan Tingkat Produktivitas dan Angka Ketergantungan Kota Bogor Tahun 2020-2024

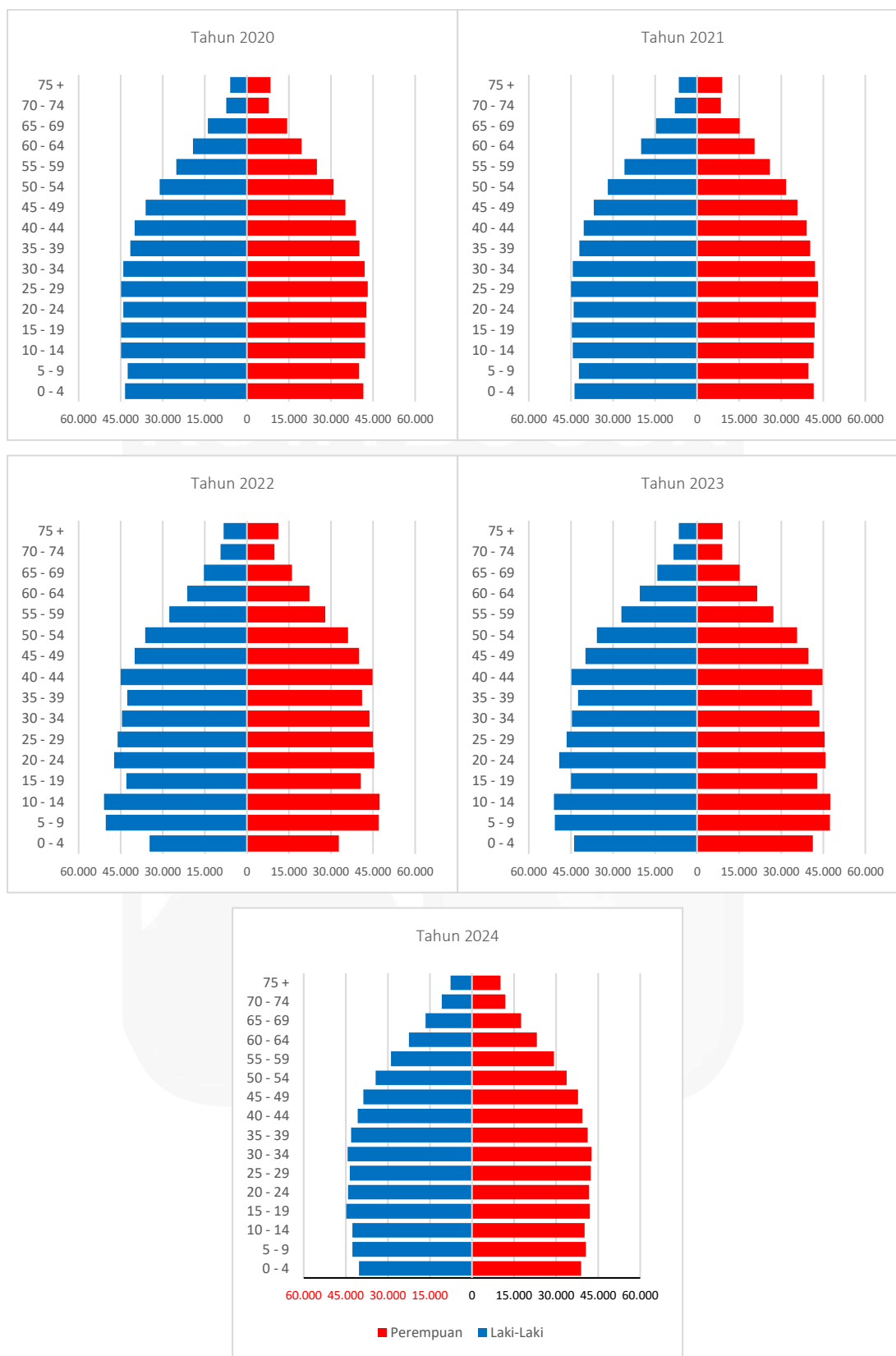
Kelompok Umur	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Muda (<15 Tahun) (jiwa)	254.552	253.135	263.022	281.716	245,153
Persentase Penduduk Usia Muda (%)	24,4	24,1	23,6	25,0	22.7
Penduduk Usia Tua (>65 Tahun) (jiwa)	57.775	61.510	70.083	62.442	74,495
Persentase Penduduk Usia Tua (%)	5,5	5,8	6,3	5,5	6.9
Penduduk Usia Produktif (15-65 Tahun) (jiwa)	730.743	737.714	780.913	783.250	758,703
Persentase Penduduk Usia Produktif (%)	70,1	70,1	70,1	69,5	70.4
Angka Ketergantungan	42,74	42,65	42,66	43,94	42.13

Sumber: BPS Kota Bogor (diolah)

Mengacu kepada data dari BPS, pada tahun 2024 (Tabel 2.23), jumlah penduduk laki-laki dan perempuan didominasi oleh laki-laki

dengan jumlah sebanyak 545,945 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 532,406 jiwa. Apabila dibedakan berdasarkan rentang umur, maka baik laki-laki maupun perempuan paling banyak berada pada rentang umur 10 hingga 39 tahun. Pada periode tahun 2020-2024, penduduk di Kota Bogor baik perempuan maupun laki-laki berada pada usia produktif dengan usia relatif masih muda, di mana secara keseluruhan jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) di Kota Bogor pada periode tahun 2020-2024 mencapai sekitar 69-70%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bogor pada periode tahun 2020-2023 selalu mengalami bonus demografi karena lebih dari 60% penduduknya berada pada usia produktif. Dampak positif adanya bonus demografi adalah jumlah penduduk usia kerja yang tinggi dan dapat diserap oleh pasar kerja sehingga total output dapat meningkat dan tersedianya sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Tingginya jumlah usia produktif, maka pemerintah Kota Bogor perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, layanan publik dan lapangan kerja sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Dalam periode tahun 2020-2024, struktur usia penduduk di Kota Bogor masih cenderung berupa piramida tipe ekspansif (Grafik 2.13). Piramida tipe ekspansif dapat dilihat dari pola piramida yang melebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah yang merupakan penduduk usia muda. Sementara di bagian atas yang merupakan penduduk usia tua meruncing. Bentuk piramida ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda yang lebih banyak daripada penduduk usia tua. Hal ini terjadinya biasanya dikarenakan tingkat kelahiran lebih tinggi daripada tingkat kematian. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur penduduk Kota Bogor yang digambarkan dalam piramida dapat dilihat pada Grafik 2.14.



Sumber: BPS Kota Bogor

Grafik 2.14 Piramida Penduduk Kota Bogor Tahun 2020-2024

2.1.7.3. Struktur Kependudukan berdasarkan Proyeksi Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 dari BPS Provinsi Jawa Barat, bahwa proyeksi penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2035 penduduk di Kota Bogor menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil selama periode 2025-2030. Pada tahun 2025, jumlah penduduk mencapai 1.083.780 jiwa, dan kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 1.110.510 jiwa pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bogor mengalami pertumbuhan penduduk rata-rata 0,25% per tahun selama periode tahun 2025-2030 tersebut.

Kepadatan penduduk di Kota Bogor juga menunjukkan tren peningkatan yang stabil selama periode 2025-2030. Pada tahun 2025, kepadatan penduduk mencapai 9.730 jiwa per kilometer persegi, dan kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 9.970 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2030. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan kondisi jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2024, terjadi penurunan jumlah penduduk Kota Bogor di masa yang akan datang. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya angka kelahiran sementara angka kematiannya tinggi atau tingkat migrasi ke luar Kota Bogor yang tinggi. Jika ditinjau dari rasio jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kota Bogor secara konsisten selalu lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan selama periode 2025-2030, dimana hal ini sama dengan pola pada periode tahun 2020-2024.

Tabel 2.25 Struktur Kependudukan di Kota Bogor berdasarkan Proyeksi Tahun 2025-2030

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk (km ²)	Jumlah Penduduk Laki-Laki (jiwa)	Jumlah Penduduk Perempuan (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
2025	1.083.780	9.730	548.330	535.450	102
2026	1.089.180	9.778	550.680	538.500	102
2027	1.094.550	9.826	553.000	541.550	102
2028	1.099.890	9.874	555.280	544.610	102
2029	1.105.200	9.922	557.530	547.670	102
2030	1.110.510	9.970	559.780	550.740	102

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

2.1.7.4. Bonus Demografi berdasarkan Proyeksi Penduduk

Angka ketergantungan di Kota Bogor (Tabel 2.26) menunjukkan tren yang sedikit meningkat selama periode 2025-2030. Pada tahun 2025, angka ketergantungan mencapai 42,25% dimana angka ini kemudian naik menjadi 43,61% pada tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia muda dan usia tua di Kota Bogor relatif stabil, dengan sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun. Angka ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk usia produktif harus menanggung beban yang lebih besar untuk menghidupi penduduk usia non-produktif.

Berdasarkan persentase penduduk usia bahwa tahun 2025-2030 akan selalu mengalami bonus demografi karena lebih dari 60% penduduknya berada pada usia produktif. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.26.

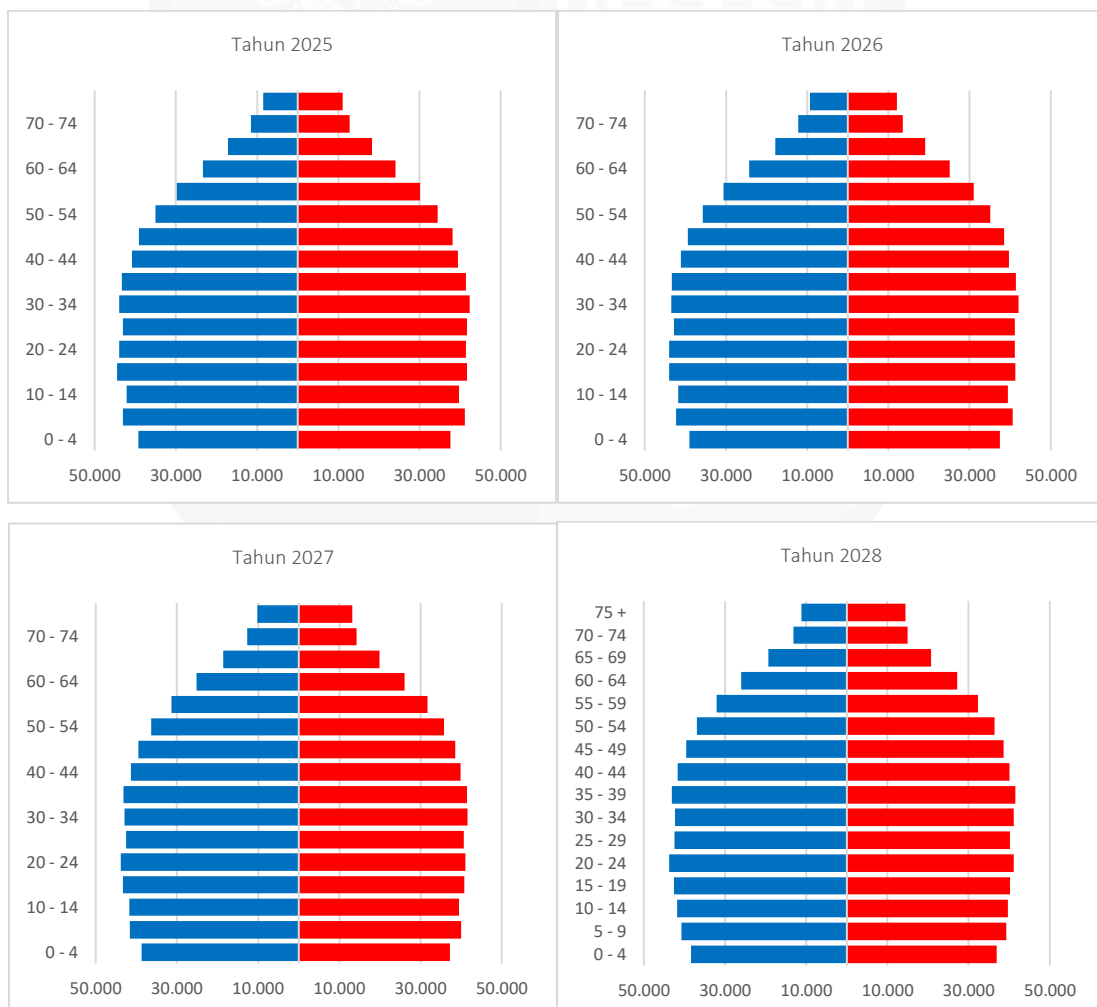
Tabel 2.26 Komposisi Penduduk berdasarkan Tingkat Produktivitas dan Angka Ketergantungan Kota Bogor Proyeksi Tahun 2025-2030

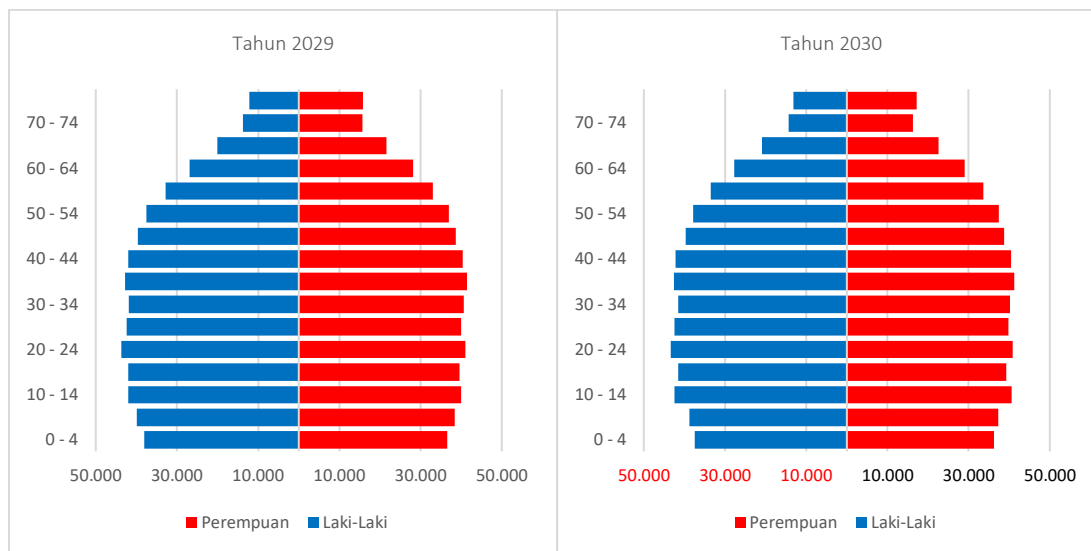
Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penduduk Usia Muda (<15 Tahun) (jiwa)	242.790	240.650	238.670	236.780	234.910	232,670
Persentase Penduduk Usia Muda (%)	22,4	22,1	21,8	21,5	21,3	21.0
Penduduk Usia Tua (>65 Tahun) (jiwa)	79.120	83.900	88.830	93.880	99.090	104,470
Persentase Penduduk Usia Tua (%)	7,3	7,7	8,1	8,5	9,0	9.4
Penduduk Usia Produktif (15-65 Tahun) (jiwa)	761.870	764.640	767.070	769.230	771.200	773,070
Persentase Penduduk Usia Produktif (%)	70,3	70,2	70,1	69,9	69,8	69.6
Angka Ketergantungan	42,25	42,44	42,69	42,99	43,31	43.61

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Dalam periode tahun 2025-2030 struktur usia penduduk di Kota Bogor masih cenderung berupa piramida tipe ekspansif (Grafik 2.14). Piramida tipe ekspansif dapat dilihat dari pola piramida yang melebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah yang merupakan penduduk usia muda. Sementara di bagian atas yang merupakan penduduk usia tua meruncing.

Bentuk piramida ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda yang lebih banyak daripada penduduk usia tua. Hal ini terjadinya biasanya dikarenakan tingkat kelahiran lebih tinggi daripada tingkat kematian. Dalam beberapa tahun ke depan dengan pola atau laju pertumbuhan proyeksi penduduk, maka pergeseran struktur usia penduduk di Kota Bogor akan menuju ke arah piramida stasioner. Bentuk piramida ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan penduduk usia tua. Hal ini terjadinya biasanya dikarenakan tingkat kelahiran dan kematian rendah sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduknya relatif tetap. Menuju kepada kondisi ini maka Kota Bogor perlu mempersiapkan infrastruktur dasar yang cukup baik dan sistem jaminan sosial yang kuat sebagai antisipasi adanya *aging communities* di masa mendatang.





Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020
 Grafik 2.15 Proyeksi Piramida Penduduk Kota Bogor berdasarkan Proyeksi Tahun 2025-2030

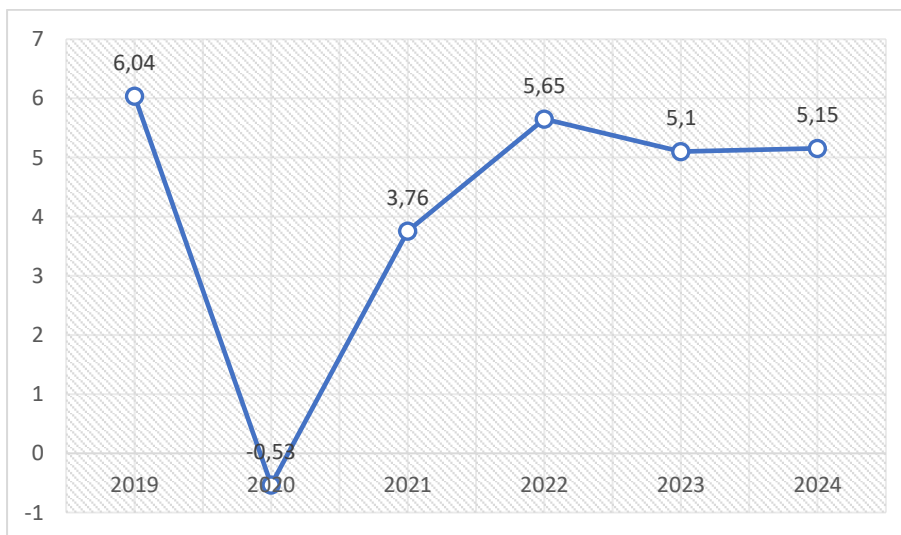
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan ekonomi di suatu wilayah dalam hal ini dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan tahun dasar 2010. Berdasarkan PDRB ADHK Kota Bogor didapatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2019 hingga 2024 mengalami fluktuasi (Gambar 2.33). Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor sebesar 6,04 persen, dan tahun 2024 menjadi sebesar 5,15 persen. Laju pertumbuhan Kota Bogor sempat mengalami nilai negatif di tahun 2020, yaitu turun menjadi -0,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Bogor pada saat itu mengalami penurunan disebabkan oleh kondisi COVID-19 sehingga semua sektor perekonomian mengalami hambatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Grafik 2.16.



Sumber: BPS Kota Bogor

Grafik 2.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2019-2024

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi wilayah pembandingnya memang tidak jauh berbeda. Setiap wilayah mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, bahkan mencapai angka negatif. Hal ini diakibatkan oleh krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, di mana arus perekonomian mengalami hambatan dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan, pariwisata, dan industri jasa. Namun, pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi baik Kota Bogor maupun wilayah pembanding lainnya mulai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Kota Bogor mencatat pertumbuhan sebesar 3,76 persen, yang terus meningkat pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor mencapai 5,65 persen dan menempati posisi ke-2 setelah Kota Tangerang Selatan yang tumbuh sebesar 5,82 persen. Apabila dibandingkan dengan capaian Kota Bogor pada tahun 2023, maka terjadi sedikit penurunan menjadi 5,10 persen. Penurunan ini menempatkan Kota Bogor pada urutan ke-5 di antara wilayah pembandingnya. Adapun posisi pertama ditempati oleh Kota Bekasi (5,43 persen), diikuti oleh Kabupaten Bogor (5,19 persen),

Kabupaten Tangerang (5,18 persen), dan Kabupaten Bekasi (5,17 persen).

Tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor kembali mengalami peningkatan tipis sebesar 0,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni mencapai 5,15 persen. Meski demikian, dalam tahun tersebut Kota Bogor berada pada urutan ke-6 dari tujuh wilayah yang dianalisis. Kota Depok mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 5,47 persen, disusul oleh Kabupaten Tangerang (5,25 persen), Kabupaten Bogor (5,21 persen), Kota Bekasi (5,19 persen), dan Kabupaten Bekasi (5,17 persen). Kota Tangerang Selatan berada di posisi terakhir dengan pertumbuhan sebesar 5,02 persen. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor beserta wilayah pembandingnya dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Wilayah Sekitar Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bogor	-0,53	3,76	5,65	5,1	5,15
Kabupaten Bogor	-1,76	3,55	5,25	5,19	5,21
Kota Bekasi	-2,58	3,22	4,96	5,43	5,19
Kabupaten Bekasi	-3,39	3,62	5,3	5,32	5,17
Kota Tangerang Selatan	-1,02	4,77	5,82	5,36	5,02
Kabupaten Tangerang	-3,74	4,7	5,47	5,18	5
Kota Depok	-1,92	3,76	5,24	5,05	5,47

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Provinsi Banten

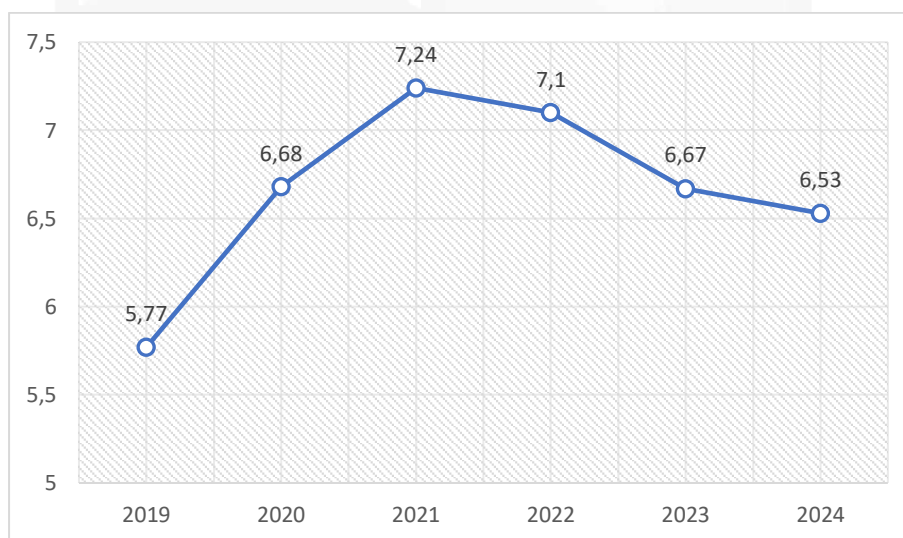
2.2.1.2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan ditandai oleh pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu menghambat perkembangan sosial dan ekonomi daerah secara keseluruhan. Tingkat kemiskinan sebagai salah satu indikator makroekonomi diharapkan terus mengalami penurunan ke depannya.

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Kota Bogor mengalami fluktuasi selama periode 2019–2024 (Grafik 2.15). Pada tahun 2019, angka kemiskinan tercatat sebesar 5,77%, namun

mengalami peningkatan menjadi 6,68% pada tahun 2020. Peningkatan ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, serta berkurangnya pendapatan masyarakat. Tren kenaikan berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 7,24%. Hal ini mencerminkan dampak ekonomi yang masih dirasakan oleh warga Bogor. Meskipun pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 7,1%, angka tersebut masih relatif tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

Kondisi mulai membaik pada tahun 2023 dan tahun 2024, dengan tingkat kemiskinan turun masing-masing menjadi 6,67% dan 6,53%, yang dapat dikaitkan dengan pemulihan ekonomi, peningkatan investasi di sektor UMKM, serta berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi dari pemerintah daerah. Meski menunjukkan tren perbaikan, angka kemiskinan di Kota Bogor masih memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses pendidikan dan keterampilan, serta mendorong sektor informal agar lebih produktif dan berkelanjutan, seperti pada grafik berikut ini.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.17 Tingkat Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2019-2024

Tingkat kemiskinan Kota Bogor jika dibandingkan dengan wilayah pembandingnya menunjukkan posisi yang cenderung menengah. Seperti halnya wilayah lain, tingkat kemiskinan Kota Bogor sempat mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebagai dampak dari pandemi COVID-19, yaitu dari 6,68 persen pada tahun 2020 menjadi 7,24 persen di tahun 2021. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan daerah, tren penurunan mulai terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, angka kemiskinan Kota Bogor turun menjadi 7,10 persen, lalu menjadi 6,67 persen pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 6,53 persen pada tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, capaian Kota Bogor pada tahun 2024 menempatkannya di urutan ke-4 dari tujuh wilayah yang dianalisis. Tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Kabupaten Bogor (7,05 persen), disusul oleh Kabupaten Tangerang (6,55 persen) dan Kota Bogor (6,53 persen). Sementara itu, tingkat kemiskinan terendah dicapai oleh Kota Depok sebesar 2,34 persen, diikuti oleh Kota Tangerang Selatan (2,36 persen), Kota Bekasi (4,01 persen), dan Kabupaten Bekasi (4,80 persen). Kota Bogor belum termasuk dalam tiga wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah, namun tren penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih memerlukan upaya yang lebih terfokus untuk menurunkan angka kemiskinan ke tingkat yang lebih kompetitif. Perkembangan tingkat kemiskinan Kota Bogor beserta wilayah pembandingnya dapat dilihat pada Tabel 2.28.

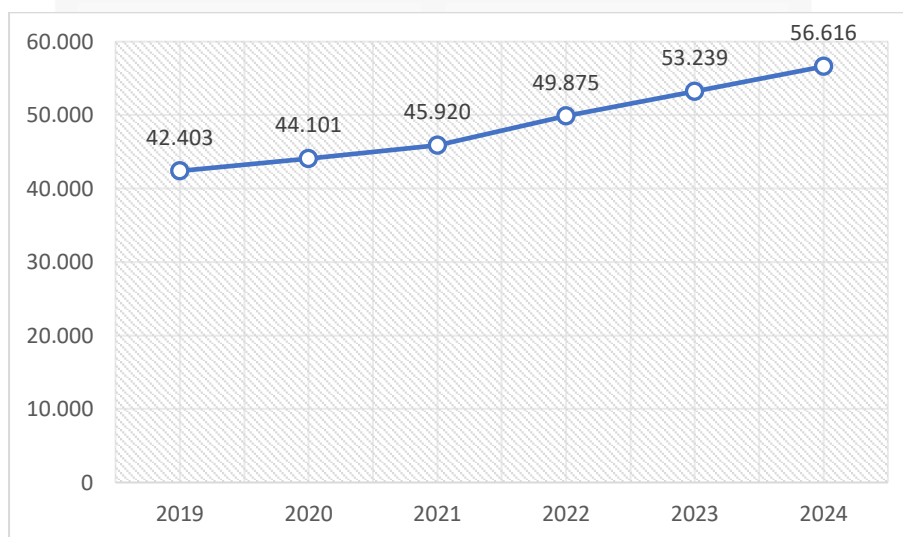
Tabel 2.28 Tingkat Kemiskinan Kota Bogor dan Wilayah Sekitar Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bogor	6,68	7,24	7,1	6,67	6,53
Kabupaten Bogor	7,69	8,13	7,73	7,27	7,05
Kota Bekasi	4,38	4,74	4,43	4,1	4,01
Kabupaten Bekasi	4,82	5,21	5,01	4,93	4,8
Kota Tangerang Selatan	2,29	2,57	2,5	2,57	2,36
Kabupaten Tangerang	6,23	7,12	6,92	6,93	6,55
Kota Depok	2,45	2,58	2,53	2,38	2,34

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Provinsi Banten

2.2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita mencerminkan pertumbuhan ekonomi penduduk di suatu wilayah dan berfungsi sebagai parameter makro untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi rata-rata individu di wilayah tersebut. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Bogor pada tahun 2024 mencapai 56.616 juta rupiah, meningkat sebesar 3.377 juta rupiah dibandingkan dengan 2023 yang sebesar 53,239 rupiah. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan produksi di hampir semua kategori usaha dan faktor inflasi harga.



Sumber: BPS Kota Bogor

Grafik 2.18 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Bogor Tahun 2019-2024

PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kota Bogor dan wilayah pembandingnya dapat dilihat pada Tabel 2.29, dimana PDRB per kapita ini menunjukkan PDRB ADHK per kepala atau per satu orang penduduk. Apabila dibandingkan dengan wilayah pembandingnya, PDRB per kapita Kota Bogor menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, PDRB per kapita Kota Bogor tercatat sebesar 30,89 juta rupiah, kemudian terus tumbuh hingga mencapai 36,13 juta rupiah pada tahun 2024. Hal ini menjadikan Kota Bogor menempati urutan keempat dari tujuh

wilayah yang dianalisis berdasarkan besaran PDRB per kapita. Posisi pertama ditempati oleh Kota Tangerang Selatan dengan capaian tertinggi sebesar 80,18 juta rupiah, diikuti oleh Kabupaten Bekasi (89,7 juta) dan Kabupaten Tangerang (54,73 juta). Pencapaian PDRB per kapita Kota Bogor yang berada di atas Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor menunjukkan adanya daya dorong produktivitas ekonomi yang cukup kuat di wilayah ini. Pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun mencerminkan peran aktif sektor-sektor ekonomi utama Kota Bogor, seperti jasa, perdagangan, dan industri pengolahan, dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat.

Tabel 2.29 PDRB Per kapita ADHK (Juta Rupiah) Kota Bogor dan Wilayah Sekitar

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bogor	30,89	31,76	33,23	34,61	36,13
Kabupaten Bogor	28,48	29,10	30,23	31,40	32,71
Kota Bekasi	26,66	27,18	28,20	29,40	30,73
Kabupaten Bekasi	78,35	79,96	83,01	86,25	89,70
Kota Tangerang Selatan	61,02	64,50	69,73	75,01	80,18
Kabupaten Tangerang	41,96	44,30	48,22	51,54	54,73
Kota Depok	23,52	24,00	24,87	25,74	26,92

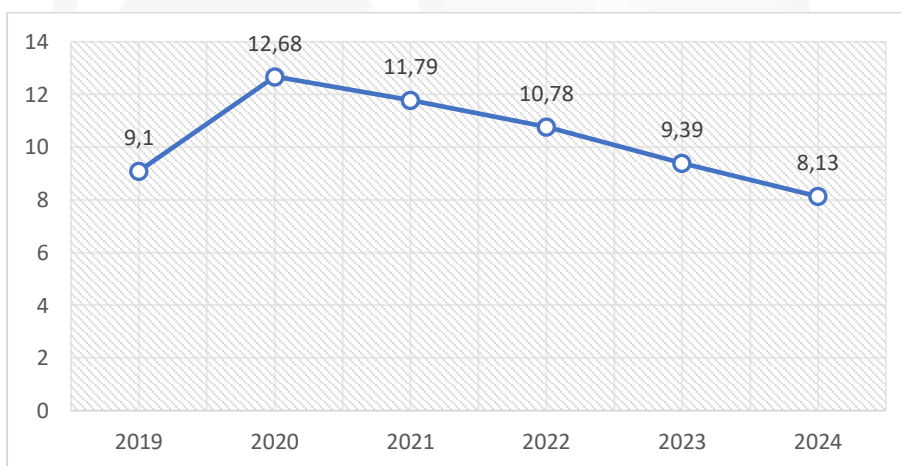
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Provinsi Banten

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan salah satu tantangan ekonomi yang signifikan mempengaruhi masyarakat di berbagai tingkatan, dari pusat hingga daerah. Tingginya tingkat pengangguran berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah. Berdasarkan teori klasik, masalah pengangguran dapat diatasi dengan market *clearing*, penyesuaian harga dan upah di pasar bebas, hingga kondisi *full employment* tercapai. Akan tetapi, pada kenyataannya upah dan harga cenderung lambat dalam melakukan penyesuaian akibat adanya guncangan ekonomi. Oleh karena itu, seringkali kondisi *full employment* tidak dapat tercapai. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja pada suatu daerah/wilayah tertentu. TPT menjadi indikator yang digunakan

untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya suplai tenaga kerja.

Berdasarkan data yang ada, bahwa perkembangan TPT Kota Bogor cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2024. Meskipun terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020, namun nilai TPT pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kondisi yang relatif baik karena semakin rendah angka TPT menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu menurunkan tingkat pengangguran di antara penduduk pada usia angkatan kerja. Pada tahun 2019, TPT berada di angka 9,1%, namun meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 12,68%. Lonjakan ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak usaha tutup, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta terbatasnya kesempatan kerja akibat perlambatan ekonomi. Pada tahun 2021, angka pengangguran sedikit menurun menjadi 11,79%, menunjukkan awal dari pemulihan ekonomi meskipun masih berada di tingkat yang cukup tinggi. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan TPT sebesar 10,78%, lalu semakin membaik pada tahun 2023 dengan 9,39%, hingga akhirnya mencapai 8,13% pada tahun 2024.



Sumber: BPS Kota Bogor

Grafik 2.19 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2019–2024

Penurunan angka pengangguran dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan mulai pulihnya sektor ekonomi di Kota Bogor.

Pemulihan ini didukung oleh peningkatan investasi, pertumbuhan sektor UMKM, serta berbagai program pemerintah untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru. Sektor pariwisata, perdagangan, dan industri kreatif yang menjadi tulang punggung ekonomi Bogor juga berangsur pulih, sehingga menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat. Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bogor juga berperan penting dalam upaya ini melalui penyelenggaraan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal, fasilitasi penempatan kerja, dan penyelenggaraan bursa kerja secara berkala. Melalui program sertifikasi kompetensi dan pendampingan wirausaha, BLK berkontribusi dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Meskipun telah menunjukkan kemajuan, upaya untuk terus menekan angka pengangguran tetap diperlukan, terutama dengan memperkuat pendidikan, mengembangkan ekosistem wirausaha, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang terus berubah.

Apabila dibandingkan dengan wilayah kota/kabupaten lain di sekitarnya (Tabel 2.30), TPT Kota Bogor menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas kebijakan daerah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja pasca pandemi COVID-19. TPT Kota Bogor pada tahun 2024 menempati urutan ke-3 tertinggi dari tujuh wilayah. Posisi tertinggi dicatat oleh Kabupaten Bogor sebesar 7,34 persen dan Kota Bekasi sebesar 7,82 persen, sementara Kabupaten Bekasi menunjukkan tingkat yang hampir setara dengan 8,82 persen. Di sisi lain, Kota Tangerang Selatan menjadi wilayah dengan TPT terendah sebesar 5,09 persen, diikuti oleh Kabupaten Tangerang (6,06 persen) dan Kota Depok (6,27 persen). Kota Bogor berhasil menurunkan angka pengangguran secara konsisten, namun tingkat pengangguran di wilayah ini masih berada di atas rata-rata beberapa wilayah sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa

tantangan di sektor ketenagakerjaan, khususnya dalam hal keterpaduan antara pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja, masih perlu mendapatkan perhatian.

Tabel 2.30 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor dan Wilayah Sekitar

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bogor	12,68	11,79	10,78	9,39	8,13
Kabupaten Bogor	14,29	12,22	10,64	8,47	7,34
Kota Bekasi	10,68	10,88	8,81	7,9	7,82
Kabupaten Bekasi	11,54	10,09	10,31	8,87	8,82
Kota Tangerang Selatan	8,48	8,6	6,59	5,81	5,09
Kabupaten Tangerang	13,06	9,06	7,88	6,94	6,06
Kota Depok	9,87	9,76	7,82	6,97	6,27

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Provinsi Banten

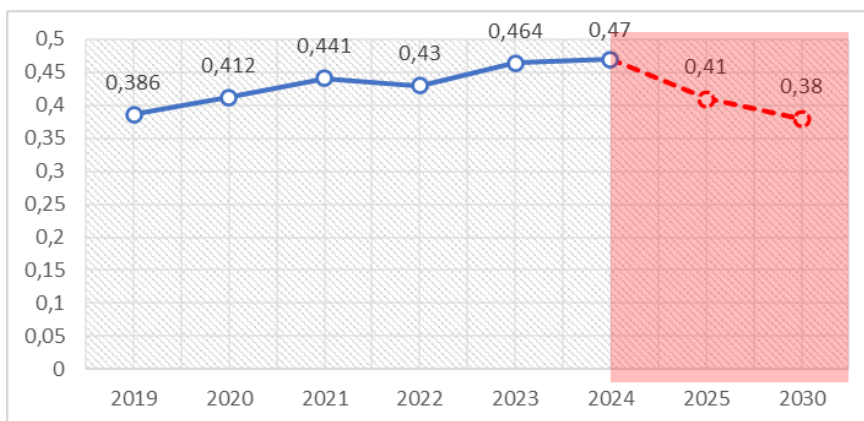
2.2.1.5. Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah secara keseluruhan, dengan skala antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi. Indeks Gini dengan nilai kurang dari 0,3 dikategorikan sebagai ketimpangan "rendah"; nilai antara 0,3 hingga 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan "moderat"; dan nilai di atas 0,5 dianggap sebagai ketimpangan "tinggi".

Berdasarkan data yang ada, bahwa Indeks Gini Kota Bogor selama tahun 2019-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2019 capaian Indeks Gini sebesar 0,386 dan di tahun 2024 mencapai 0,47. Peningkatan yang terus terjadi sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, mencerminkan semakin timpangnya perekonomian di Kota Bogor. Namun, penurunan nilai Indeks Gini terjadi pada tahun 2022 yaitu menjadi sebesar 0,43. Namun pada tahun 2023 hingga 2024, nilai Indeks Gini meningkat kembali.

Apabila dilihat dari tahun 2015-2022 yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor berhasil menurunkan ketimpangan dari 0,47 menjadi 0,43 bahkan dengan terendah di periode tersebut sebesar 0,39 pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini menjadi acuan bagi perhitungan

proyeksi Indeks Gini Kota Bogor hingga 2030 yang memungkinkan adanya penurunan nilai Indeks Gini menjadi sebesar 0,38 (lihat grafik 2.20).



Sumber: BPS Kota Bogor (diolah)

Grafik 2.20 Proyeksi Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2025-2030

Berdasarkan data yang didapat, bahwa Indeks Gini Kota Bogor menunjukkan tren peningkatan ketimpangan pendapatan antarpenduduk dari tahun ke tahun. Apabila dibandingkan dengan wilayah pembanding lainnya, Kota Bogor menempati urutan tertinggi (ke-1) pada tahun 2024, disusul oleh Kota Bekasi (0,414), Kabupaten Bekasi (0,397), Kota Depok (0,386), Kota Tangerang Selatan (0,379), Kabupaten Bogor (0,369), dan Kabupaten Tangerang (0,286).

Kota Bogor tidak hanya mencatatkan nilai tertinggi tetapi juga menunjukkan laju peningkatan ketimpangan yang cukup signifikan. Sebaliknya, Kabupaten Tangerang menunjukkan capaian terbaik dalam hal pemerataan pendapatan, dengan indeks terendah di antara wilayah lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Bogor mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, namun belum sepenuhnya diiringi oleh distribusi pendapatan yang merata. Pemerintah Kota Bogor harus dapat menurunkan Indeks Gini menjadi berada dalam ketimpangan yang rendah, bahkan hingga tidak terdapat lagi ketimpangan pendapatan di antara penduduknya, mengingat pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya dapat diiringi oleh peningkatan kesejahteraan yang merata.

Tabel 2.30 Indeks Gini Kota Bogor dan Wilayah Sekitar

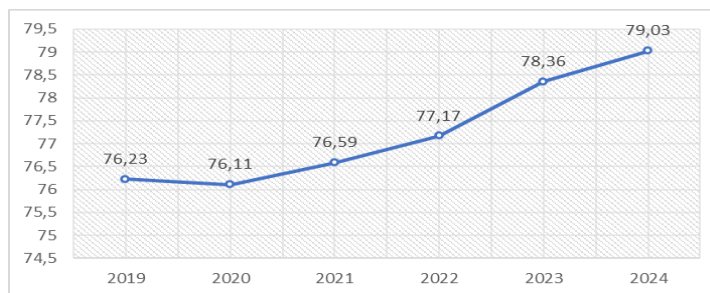
Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bogor	0,386	0,412	0,441	0,43	0,46
Kabupaten Bogor	0,404	0,381	0,396	0,4	0,369
Kota Bekasi	0,352	0,352	0,401	0,441	0,414
Kabupaten Bekasi	0,354	0,372	0,34	0,373	0,397
Kota Tangerang Selatan	0,328	0,339	0,343	0,383	0,379
Kabupaten Tangerang	0,325	0,285	0,294	0,282	0,286
Kota Depok	0,344	0,344	0,367	0,394	0,386

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Provinsi Banten

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non-fisik suatu area yang diwakili oleh tiga (tiga) dimensi, yaitu umur panjang dan kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM menjelaskan bagaimana masyarakat/penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa IPM Kota Bogor memiliki tren yang terus meningkat sejak tahun 2019-2024. IPM Kota Bogor mengalami fluktuasi kecil di awal, dengan sedikit penurunan dari 76,23 pada tahun 2019 menjadi 76,11 pada tahun 2020. Namun, tren meningkat cukup signifikan pada tahun 2021, mencapai 76,59. Tren kenaikan berlanjut menjadi 77,17 pada tahun 2022, 78,36 pada tahun 2023, dan akhirnya mencapai 79,03 pada tahun 2024 (lihat Grafik 2.21).



Sumber: BPS Kota Bogor

Grafik 2.21 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor Tahun 2019-2024

Semakin tingginya nilai IPM di Kota Bogor mencerminkan bahwa kualitas hidup masyarakat yang semakin baik. Kenaikan IPM ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tren di Kota Bogor ini dapat menunjukkan keberhasilan berbagai kebijakan pembangunan, seperti peningkatan akses layanan kesehatan, program pendidikan yang lebih baik, serta pertumbuhan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Lonjakan signifikan pada 2023 dan 2024 sebagai hasil dari kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan dan layanan kesehatan, serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Meskipun demikian, tantangan tetap ada terutama dalam memastikan pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan bagi seluruh warga. Oleh karena itu, keberlanjutan program pembangunan menjadi faktor penting agar IPM Kota Bogor terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

Apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya pada tahun 2024, Kota Bogor menempati urutan ke-4 dari enam wilayah lainnya dengan urutan tertinggi oleh Kota Tangerang Selatan (83,83), Kota Depok (83,02), Kota Bekasi (82,30), Kota Bogor (81,95), Kabupaten Bekasi (80,85), Kabupaten Tangerang (76,82), dan Kabupaten Bogor (75,03). Meskipun Kota Bogor masih tergolong tinggi secara umum dalam klasifikasi IPM, namun terdapat daerah yang mampu menunjukkan kinerja pembangunan manusia yang lebih unggul, seperti Kota Tangerang Selatan dan Kota Depok. Capaian IPM Kota Bogor yang terus meningkat menunjukkan bahwa pembangunan manusia berjalan secara konsisten, namun masih diperlukan berbagai upaya untuk memperkecil kesenjangan capaian antarwilayah. Perkembangan indeks pembangunan manusia Kota Bogor beserta wilayah pembandingnya dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor dan Wilayah Sekitar

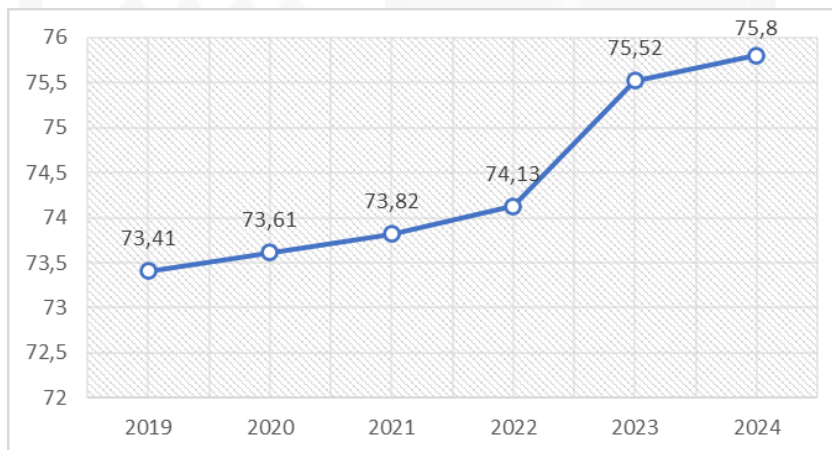
Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bogor	76,11	76,59	77,68	78,36	79,03
Kabupaten Bogor	70,4	70,6	72,45	73,02	73,63
Kota Bekasi	81,5	81,95	82,52	83,06	83,55
Kabupaten Bekasi	74,07	74,45	75,6	76,13	76,8
Kota Tangerang Selatan	82,73	82,98	83,28	83,57	84,16
Kabupaten Tangerang	74,09	74,47	75,15	75,56	76,19
Kota Depok	80,97	81,37	82,02	82,53	83,05

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Provinsi Banten

2.2.2. Kesehatan untuk Semua

2.2.2.1. Umur Harapan Hidup Saat Lahir

Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian (mortalitas) pada masa tertentu yang cenderung tidak berubah terlalu dinamis di masa mendatang. UHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Semakin tinggi UHH maka semakin baik kesempatan hidup di kota tersebut. UHH menjadi sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

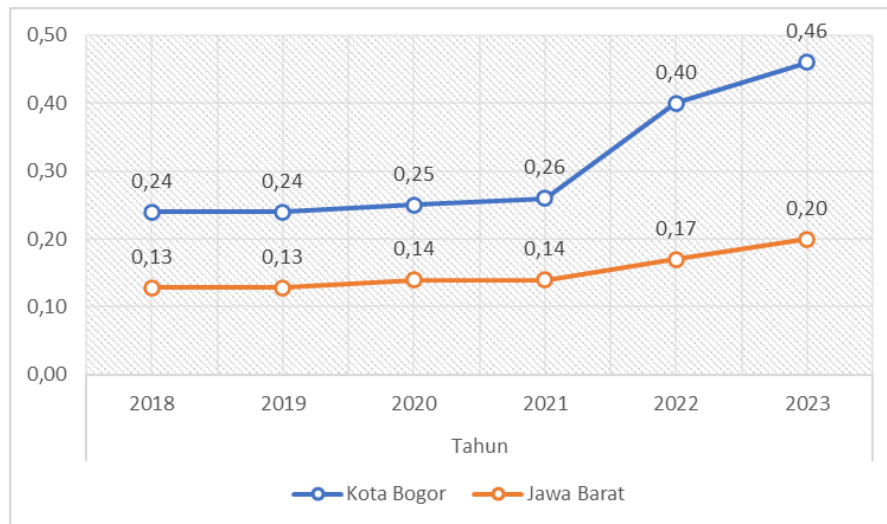
Grafik 2.22 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kota Bogor Tahun 2019-2024

Secara umum, Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan dari 73,41 tahun pada tahun 2019 menjadi 75,8 tahun pada tahun 2024 (Grafik 2.22).

Peningkatan ini cukup stabil dari 73,41 tahun pada tahun 2019 menjadi 73,61 tahun pada tahun 2020, lalu naik ke 73,82 tahun pada tahun 2021 dan 74,13 tahun pada tahun 2022. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023, menjadi 75,52 tahun, hingga 75,8 tahun pada tahun 2024. Tren tersebut mencerminkan peningkatan kualitas layanan kesehatan, kebersihan lingkungan, serta kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024 dapat didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan, program vaksinasi, serta peningkatan fasilitas medis. Selain itu, faktor seperti keberlanjutan program kesehatan masyarakat, edukasi gizi, dan kebijakan penanganan penyakit menular serta tidak menular juga turut berperan. Meskipun demikian, tantangan juga terjadi secara beriringan, seperti kesenjangan dalam akses layanan kesehatan antara masyarakat perkotaan dan pinggiran. Keberlanjutan kebijakan kesehatan dan perbaikan infrastruktur layanan kesehatan akan menjadi kunci utama dalam mempertahankan dan meningkatkan UHH Kota Bogor di masa depan.

2.2.2.2. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Kesehatan Masyarakat dimana pada IKS terdapat 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan keluarga. Dengan meningkatkan kualitas hidup dan praktik hidup sehat di keluarga, maka Kesehatan individu dan keluarga secara keseluruhan akan meningkat. Nilai IKS dikategorikan dalam 3 kelompok yaitu Keluarga Sehat jika nilai IKS $> 0,8$; Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS berada diantara $0,5 - 0,8$; dan Keluarga Tidak Sehat jika nilai IKS $< 0,5$ sebagaimana tersaji dalam Grafik 2.23.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor

Grafik 2.23 Indeks Keluarga Sehat Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2018-2023

Nilai IKS Kota Bogor dalam kurun waktu 2018 hingga 2023 terlihat terus mengalami peningkatan, sejalan dengan peningkatan di Jawa Barat. Adapun angka tahun 2024 belum rilis sampai dengan RPJMD ini disusun. IKS Kota Bogor tahun 2018 sebesar 0,24, terus meningkat menjadi 0,46 tahun 2023. Sementara di Jawa Barat dari 0,13 pada tahun 2018 menjadi 0,20 di tahun 2023. Nilai IKS ini meningkat namun jika dikelompokkan ke dalam kategori IKS maka kondisi rata-rata kesehatan keluarga di Kota Bogor berada dalam kategori Keluarga Tidak Sehat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah dalam penyediaan serta kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Kota Bogor. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan nilai IKS Provinsi Jawa Barat, maka nilai IKS Kota Bogor masih lebih tinggi. Pencapaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) didukung oleh 3 (tiga) program prioritas diantaranya yaitu:

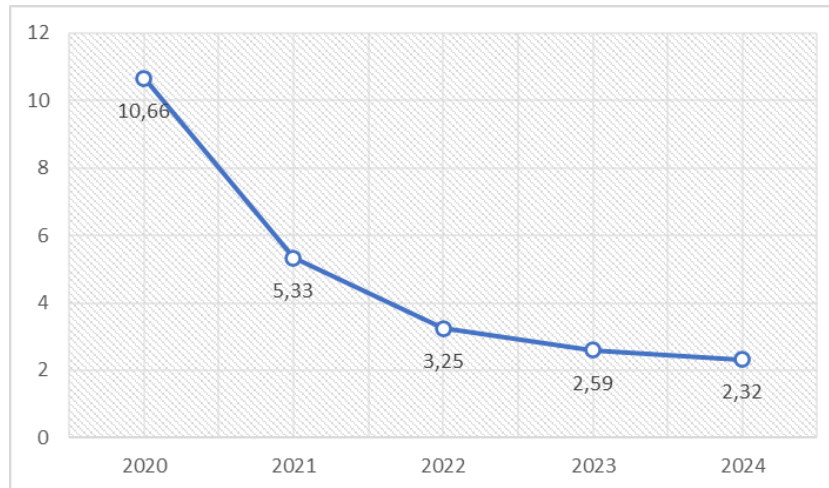
1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.

2.2.2.3. Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (*Stunting*)

Persentase balita yang sangat pendek dan pendek mencerminkan kondisi pertumbuhan anak yang mengalami gangguan, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti asupan gizi yang kurang optimal, pola asuh yang tidak tepat, serta faktor lingkungan. Pengurangan angka balita sangat pendek dan pendek menjadi salah satu prioritas utama guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Pemerintah Kota Bogor terus berupaya mengatasi permasalahan ini melalui berbagai program, seperti edukasi kesehatan kepada orang tua, peningkatan akses pangan bergizi, serta optimalisasi layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Dengan kebijakan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan angka balita sangat pendek dan pendek dapat terus menurun, sehingga anak-anak di Kota Bogor dapat tumbuh dengan sehat dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, persentase balita sangat pendek dan pendek di Kota Bogor menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam periode 2020-2024 (Grafik 2.24). Pada tahun 2020, angka ini tercatat sebesar 10,66%, kemudian turun drastis menjadi 5,33% pada tahun 2021. Penurunan terus berlanjut dengan angka 3,25% pada tahun 2022, 2,59% pada tahun 2023, hingga mencapai 2,32% pada tahun 2024. Tren penurunan ini menandakan bahwa program peningkatan kualitas gizi, layanan kesehatan anak, serta edukasi kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, seperti peningkatan cakupan imunisasi, penyuluhan pola makan sehat, serta penguatan akses terhadap fasilitas kesehatan ibu dan anak, turut berperan dalam menekan angka balita sangat pendek dan pendek.



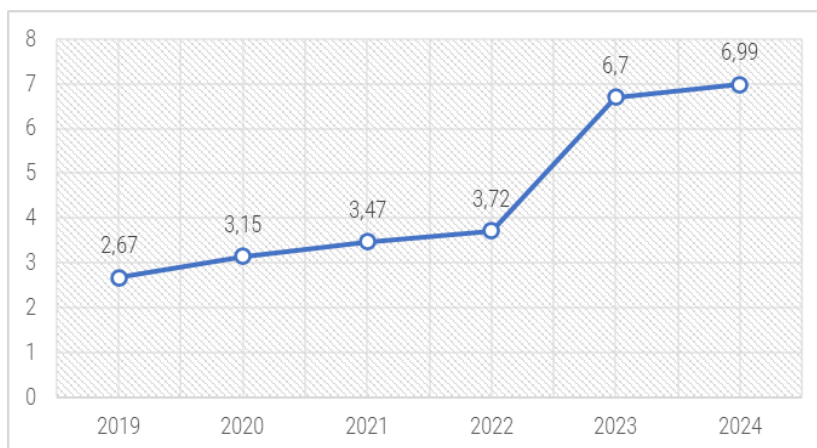
Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.24 Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) di Kota Bogor Tahun 2020-2024

2.2.2.4. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) merupakan indikator terhadap upaya pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan bayi baru lahir perinatal dan neonatal dan merupakan salah satu indikator utama derajat kesehatan masyarakat. AKB menggambarkan besarnya risiko kematian bayi (< 1 tahun) dalam 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Grafik 2.25 disajikan perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2024, terlihat adanya kenaikan angka dari 2,67 pada tahun 2019 menjadi 3,72 pada tahun 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, mencapai 6,7, dan sedikit meningkat lagi menjadi 6,99 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kualitas layanan, melainkan dipengaruhi oleh meningkatnya akurasi pelaporan kematian bayi melalui sistem MPDN. Dengan pelaporan yang lebih *real-time* dan berbasis domisili, kasus-kasus kematian bayi yang sebelumnya tidak tercatat kini teridentifikasi. Selain itu, dominasi kematian pada masa neonatal, khususnya karena kasus BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), juga menjadi penyebab utama

yang perlu ditangani melalui intervensi medis dan pelayanan neonatal yang lebih kuat.

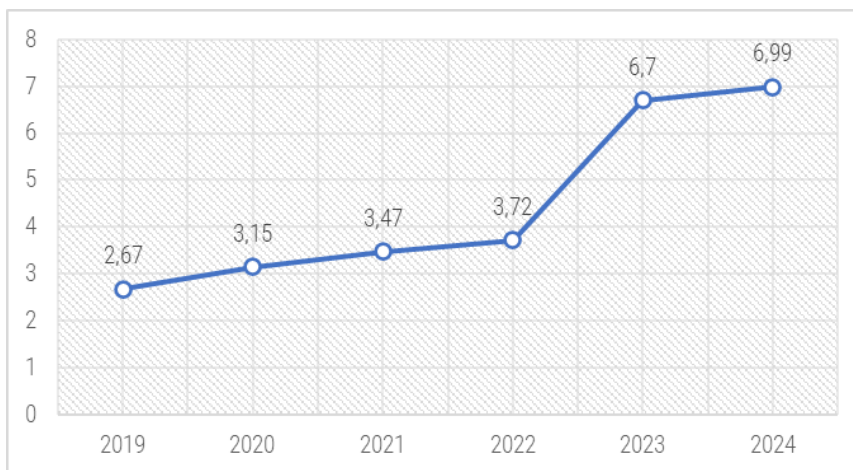


Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.25 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bogor Tahun 2019-2024

2.2.2.5. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) merupakan indikator yang meliputi jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan dan masa nifas pada 100.000 kelahiran hidup dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Angka Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan sewaktu ibu melahirkan dan masa nifas. Menurut definisi WHO, kematian ibu adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.26 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Bogor Tahun 2019-2024

Berdasarkan Grafik 2.26, terlihat bahwa perkembangan angka kematian ibu di Kota Bogor tahun 2019–2024, terlihat tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2019, tercatat angka kematian ibu sebesar 69 kasus. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 74 pada tahun 2020, lalu melonjak cukup tinggi hingga 96,7 pada tahun 2021. Setelah itu, terjadi penurunan bertahap, yaitu menjadi 73,26 pada tahun 2022 dan 59,89 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, angka kematian ibu kembali meningkat menjadi 92,01.

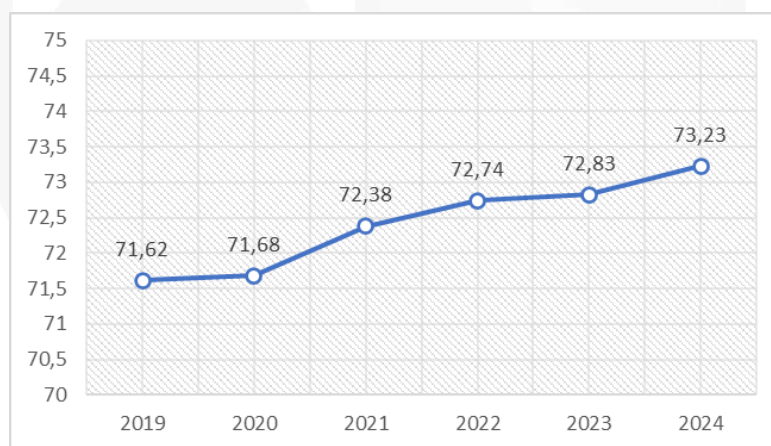
Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh pencatatan yang semakin lengkap dan menyeluruh melalui sistem MPDN, sehingga semua kasus kematian ibu, termasuk yang sebelumnya tidak terdokumentasi, kini tercatat dengan baik. Selain itu, seluruh kasus kematian ibu di tahun 2024 terjadi di rumah sakit, menunjukkan bahwa meskipun sistem rujukan berjalan, banyak ibu datang dalam kondisi komplikasi berat. Penyebab dominan masih didominasi oleh hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan obstetrik, yang memerlukan peningkatan deteksi dini dan manajemen risiko sejak fase antenatal.

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1. Indeks Pendidikan

Pendidikan memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang menjadi fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Indeks pendidikan mencerminkan hasil pembangunan dalam sektor pendidikan dan juga menunjukkan perkembangan manusia di suatu wilayah, yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Indikator yang digunakan untuk mengukur indeks pendidikan adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Indeks Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2019-2024 pada Grafik 2.27. menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2019, indeks berada di angka **71,62** dan naik perlahan menjadi 71,68 pada tahun 2020. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2021 menjadi 72,38, hal ini mencerminkan adaptasi pendidikan di masa pandemi. Indeks terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 72,74, tahun 2023 menjadi 72,83, hingga mencapai 73,23 di tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pendidikan Kota Bogor yang telah berjalan positif dan berkelanjutan.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

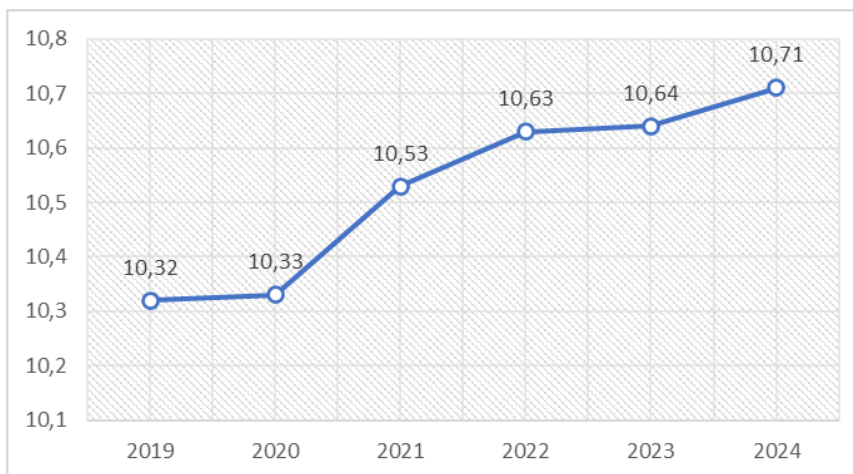
Grafik 2.27 Indeks Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2019-2024

Tren peningkatan indeks pendidikan dapat dioptimalkan dengan menerapkan beberapa strategi, baik melalui jalur pendidikan formal

maupun informal. Untuk jalur pendidikan formal, peningkatan dapat dicapai dengan memperbaiki infrastruktur pendidikan dan menyelesaikan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, untuk jalur pendidikan informal, dapat dilakukan dengan membangun jalur alternatif sebagai akselerator, yaitu dengan membuka program kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Selain itu, strategi lainnya adalah dengan meningkatkan anggaran belanja pemerintah untuk pendidikan, sehingga bisa meratakan dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik serta memberikan beasiswa kepada masyarakat yang tidak memiliki akses ke fasilitas pendidikan.

2.2.3.2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani suatu pendidikan formal. Dari data yang diperoleh, bahwa Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bogor tahun 2019–2024, dalam setiap tahunnya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2019, tercatat sebesar 10,32 tahun, dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2020 menjadi 10,33 tahun. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan angka mencapai 10,53 tahun, meningkat sebesar 0,20 tahun dari tahun sebelumnya. Tren kenaikan peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun 2022 mencapai 10,63 tahun, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 10,64 tahun pada tahun 2023. Pada tahun 2024, mencapai angka tertinggi sebesar 10,71 tahun, yang menunjukkan bahwa terdapat perbaikan dalam akses dan partisipasi pendidikan di Kota Bogor. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, termasuk program wajib belajar serta dukungan terhadap fasilitas pendidikan.



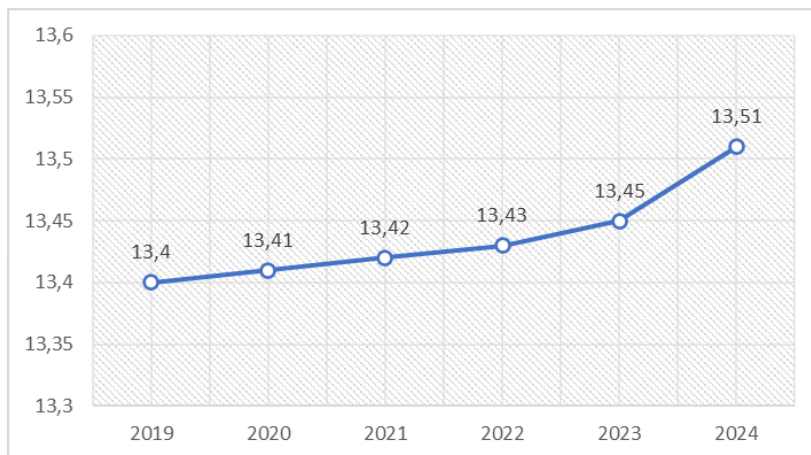
Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.28 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bogor Tahun 2019-2024

2.2.3.3. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Berdasarkan Grafik 2.29, Harapan Lama Sekolah di Kota Bogor tahun 2019–2024, terlihat tren peningkatan yang konsisten dalam periode tersebut. Pada tahun 2019, harapan lama sekolah tercatat sebesar 13,40 tahun dan mengalami kenaikan bertahap setiap tahunnya. Pada tahun 2020, angka ini meningkat sedikit menjadi 13,41 tahun, kemudian terus naik menjadi 13,42 tahun pada tahun 2021 dan 13,43 tahun pada tahun 2022. Peningkatan yang lebih signifikan mulai terlihat pada tahun 2023, di mana harapan lama sekolah mencapai 13,45 tahun, mengalami kenaikan sebesar 0,02 tahun dari tahun sebelumnya. Tren ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan kenaikan yang lebih tajam, mencapai angka tertinggi sebesar 13,51 tahun. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas pendidikan di Kota Bogor, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pendidikan, program bantuan sekolah, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Kota Bogor menunjukkan komitmen yang kuat dalam

meningkatkan harapan lama sekolah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di masa depan.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

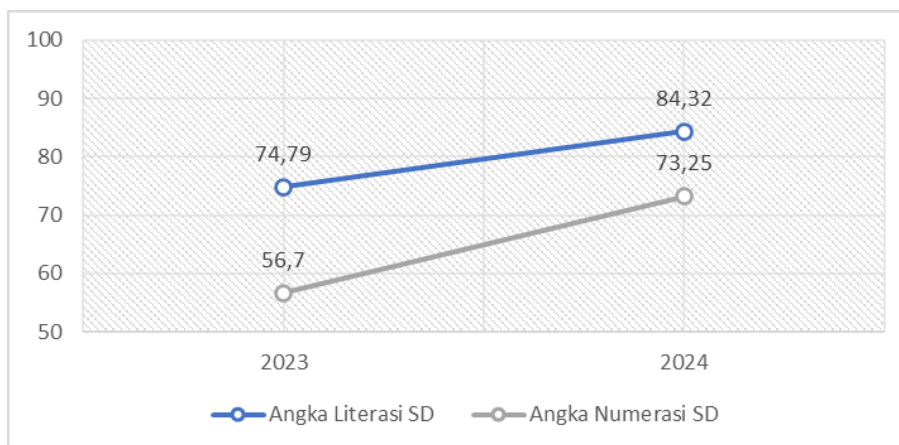
Grafik 2.29 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bogor Tahun 2019-2024

2.2.3.4. Angka Literasi dan Numerasi SD

Kemampuan literasi dan numerasi peserta didik tingkat SD merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas pendidikan dasar. Literasi, meliputi kemampuan membaca dan memahami informasi, serta numerasi, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep matematika dasar, menjadi prasyarat penguasaan kompetensi lanjutan. Sebagai hak dasar individu, literasi dan numerasi berperan penting dalam partisipasi sosial dan ekonomi, serta menjadi bagian dari target *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tujuan 4 "Pendidikan Berkualitas".

Di tingkat nasional, asesmen literasi dan numerasi diprioritaskan melalui Asesmen Nasional (AN) sejak tahun 2021, yang mendorong daerah untuk meningkatkan mutu pembelajaran berbasis kompetensi. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Bogor menjadikan penguatan literasi dan numerasi sebagai strategi peningkatan kualitas pendidikan dasar. Evaluasi perkembangan angka literasi dan numerasi SD tahun 2023 hingga tahun 2024 menjadi dasar penting untuk

menilai efektivitas program serta merumuskan kebijakan pendidikan ke depan.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

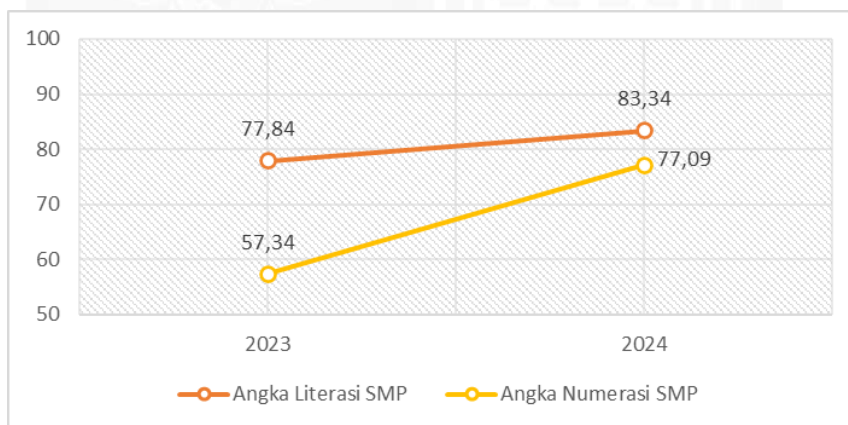
Grafik 2.30 Angka Literasi dan Numerasi SD Kota Bogor Tahun 2023-2024

Berdasarkan data yang ada, capaian angka literasi dan numerasi siswa Sekolah Dasar (SD) di Kota Bogor menunjukkan peningkatan antara tahun 2023 dan tahun 2024. Pada tahun 2023, angka literasi SD tercatat sebesar 74,79, sedangkan angka numerasi berada pada 56,7. Tahun 2024, angka literasi meningkat menjadi 84,32 dan angka numerasi juga mengalami lonjakan hingga mencapai 73,25. Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar memiliki peran strategis dalam membangun kesiapan peserta didik dalam memahami materi pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, kemajuan pada indikator ini turut memperkuat daya saing pendidikan Kota Bogor baik di tingkat regional maupun nasional.

Namun demikian, upaya peningkatan tersebut perlu diiringi dengan strategi yang berkelanjutan dan menyeluruh, untuk memastikan pemerataan kompetensi dasar di seluruh satuan pendidikan. Hal ini menjadi penting mengingat disparitas kualitas pendidikan antar wilayah masih merupakan tantangan yang harus diatasi secara sistematis.

2.2.3.5. Angka Literasi dan Numerasi SMP

Penguatan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi prioritas strategis untuk memastikan tercapainya kualitas pembelajaran yang relevan, adaptif, dan berdaya saing. Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan berbagai intervensi untuk meningkatkan capaian literasi dan numerasi. Kedua aspek ini merupakan prasyarat esensial bagi tumbuhnya kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher-order thinking skills*) yang diperlukan dalam menghadapi tantangan. Evaluasi terhadap perkembangan angka literasi dan numerasi dari tahun 2023 hingga tahun 2024 menjadi penting untuk mengukur efektivitas intervensi tersebut, sekaligus memberikan dasar ilmiah bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih terarah.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.31 Angka Literasi dan Numerasi SMP Kota Bogor Tahun 2023-2024

Berdasarkan Grafik 2.31 di atas, data tahun 2023 hingga tahun 2024, Angka Literasi SMP di Kota Bogor meningkat dari 77,84 menjadi 83,34, sedangkan Angka Numerasi SMP mengalami lonjakan signifikan dari 57,34 menjadi 77,09. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan substansial dalam kemampuan dasar siswa, khususnya pada aspek numerasi yang sebelumnya tertinggal jauh di bawah capaian literasi. Tren peningkatan ini menunjukkan arah yang positif menuju pencapaian tujuan pembangunan pendidikan dan keberhasilan

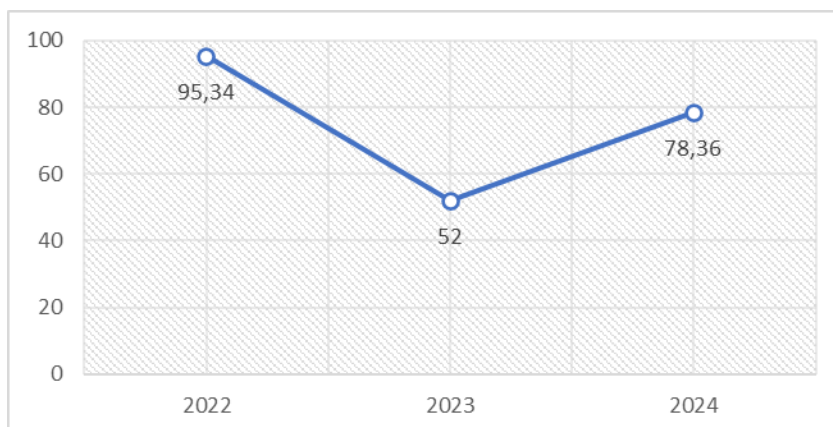
signifikan dari berbagai program penguatan numerasi, termasuk integrasi pendekatan pembelajaran berbasis konteks dan peningkatan kapasitas guru dalam pedagogi numerasi. Namun, upaya keberlanjutan hasil tersebut perlu ditingkatkan melalui program yang adaptif, berbasis data, dan inklusif, guna menjamin mutu pendidikan yang merata dan berkeadilan.

2.2.3.6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks pembangunan literasi masyarakat mengukur upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Dengan menggunakan IPLM, Pemerintah Daerah dapat memantau perkembangan literasi masyarakat dari waktu ke waktu, mengidentifikasi area di mana intervensi diperlukan, dan merancang kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan tingkat literasi secara keseluruhan. Terdapat tujuh unsur pembangunan literasi masyarakat yaitu: (1) Pemerataan layanan perpustakaan, (2) Ketercukupan koleksi perpustakaan, (3) Ketercukupan tenaga perpustakaan, (4) Tingkat kunjungan masyarakat per hari, (5) Jumlah perpustakaan ber-SNP (Standar Nasional Perpustakaan), (6) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi, dan (7) Anggota perpustakaan.

Berdasarkan Grafik 2.30, dapat terlihat bahwa indeks literasi masyarakat di Kota Bogor tahun 2022 sebesar 95,34, kemudian menurun pada tahun 2023 sebesar 52,00 yang berkategori rendah, kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi sebesar 78,36 yang berkategori sedang. Hal ini berarti literasi masyarakat di Kota Bogor masih relatif rendah. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan literasi ini terutama kepada para Gen Z. Adapun area pembangunan yang perlu diintervensi adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan terkait perpustakaan, dimana hal ini merujuk pada partisipasi dan interaksi aktif masyarakat dalam program-

program yang diselenggarakan oleh perpustakaan guna mempromosikan dan meningkatkan pemahaman serta apresiasi terhadap peran perpustakaan.



Sumber: Perpustakaan Nasional

Grafik 2.32 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bogor Tahun 2022-2024

2.2.4. Penyediaan dan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur

2.2.4.1. Sarana dan Prasarana Kota

a) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting dalam menunjang pelaksanaan proses pendidikan atau proses belajar dan mengajar untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dengan adanya fasilitas dalam pendidikan, maka dapat menunjang keberhasilan dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas.

Sesuai dengan Visi Kota Bogor yang dimuat dalam RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu menuju Kota Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan. Disamping itu berdasarkan arah dan kebijakan Kota Bogor untuk tahun 2025-2045, yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh dan Berdaya Saing. Selanjutnya di dalam Misi Kota Bogor sebagai Kota Cerdas menuntut adanya pemerataan akses pendidikan, pemberdayaan lembaga pendidikan, tata kelola pembangunan yang baik, aparatur cerdas, dan pelayanan publik yang prima. Dengan demikian maka ketersediaan sarana pendidikan menjadi tonggak dan kebutuhan yang mutlak diperhatikan dan dipenuhi ketersediaannya.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, bahwa sarana pendidikan yang ada di Kota Bogor sudah tersedia dan lengkap mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat hingga jenjang Perguruan Tinggi (PT). Ketersediaan sarana pendidikan untuk jenjang TK, SLTP hingga SLTA/SMK, bukan hanya melayani penduduk Kota Bogor, melainkan juga melayani penduduk yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Namun sarana pendidikan yang ada saat ini, terutama sekolah negeri belum merata ketersediaannya ke seluruh wilayah, sehingga banyak penduduk yang sulit menjangkau atau terbatas aksesnya ke sarana pendidikan, terutama untuk jenjang SLTP dan SLTA/SMK. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah sarana pendidikan yang ada saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32 Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Jumlah (unit)				
	TK	SD/Madrasah Ibtidaiyah	SLTP/Madrasah Tsanawiyah	SLA/Madrasah Aliyah	SMK
Jumlah	153	344	179	77	104

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka, 2024

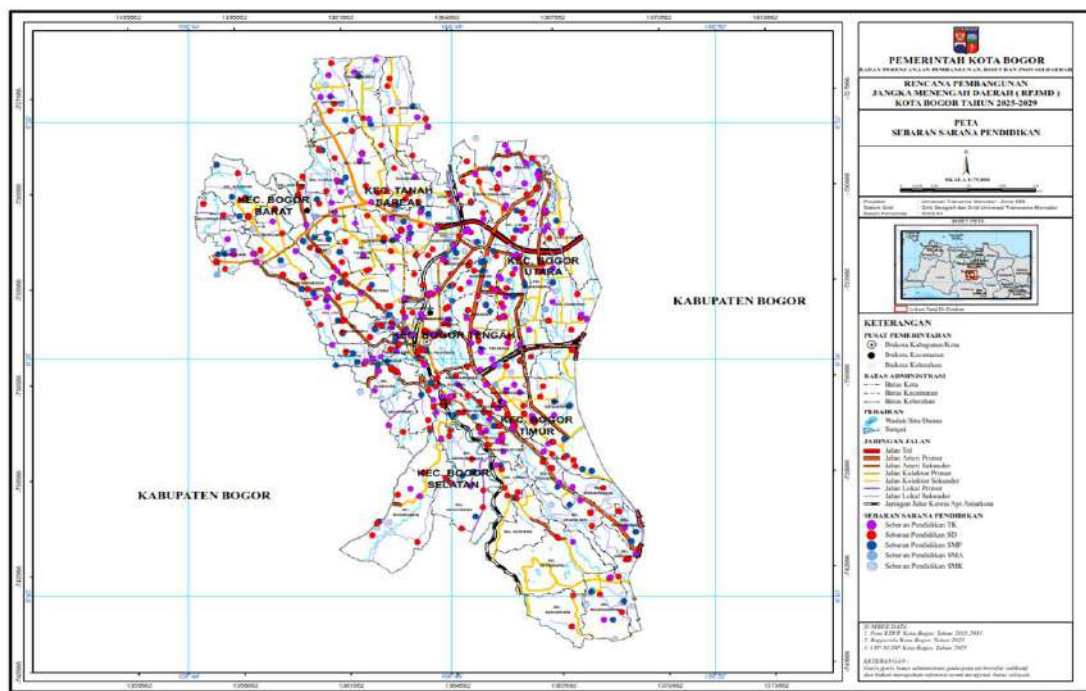
Penduduk yang mengalami kesulitan untuk mengakses sarana pendidikan, terutama penduduk yang berada di Kelurahan Mulyaharja, Bojongkerta, Kertamaya, dan Rancamaya di Kecamatan Bogor Selatan, dan Kelurahan Mekarwangi, Kayumanis, Kencana di Kecamatan Tanah Sareal, dan Kelurahan Bubulak, Margajaya, Balumbang Jaya, Situ Gede di Kecamatan Bogor Barat, sehingga penduduk menuntut ilmu di sekolah swasta yang memerlukan biaya yang cukup besar. Berikut ini gambaran perkembangan ketersediaan sarana pendidikan di Kota Bogor tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.33 Perkembangan Sarana Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sekolah Pendidikan SD/MI berkondisi baik (%)	94,50	96,00	98,00	98,73	99,12
2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs berkondisi baik (%)	95,00	95,80	96,00	98,00	99,00
3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	39	46	44	44	44
4	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah	20,25	33	24	31	32
5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	86,90	89,20	89,43	92,30	93,00

Sumber : Dinas Pendidikan, 2025

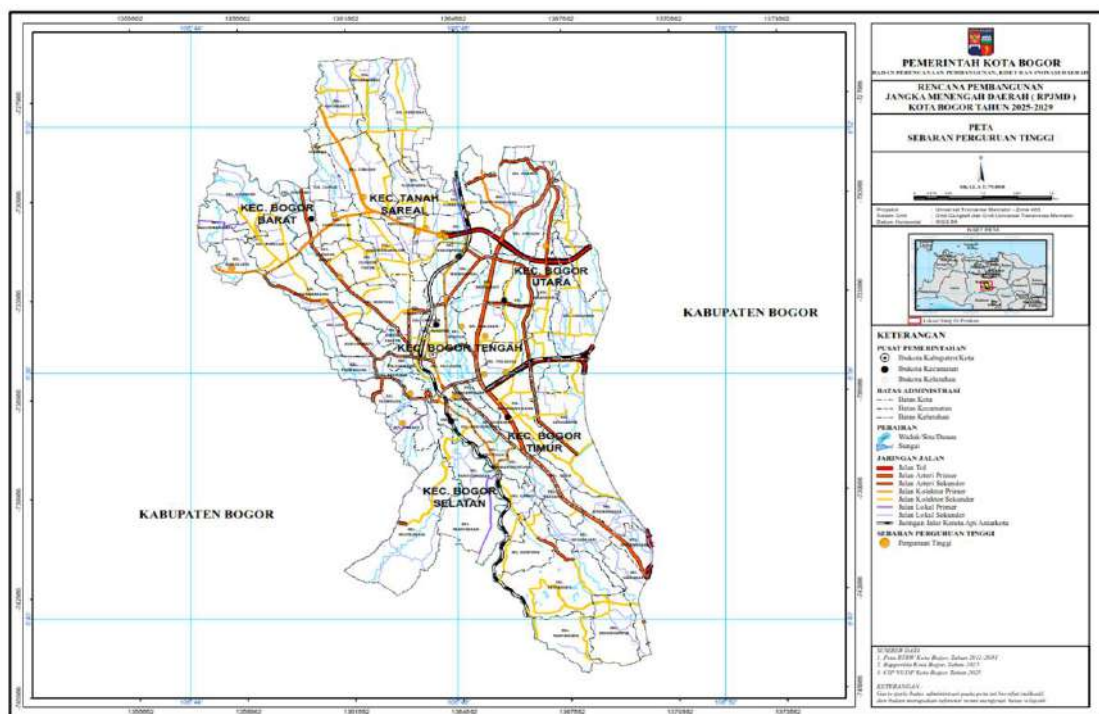
Adanya ketersediaan lahan yang terbatas dan sumber dana yang tersedia menjadi kendala untuk pembangunan sarana pendidikan tersebut. Oleh karena itu guna memenuhi ketersediaan sarana pendidikan bagi penduduknya perlu dilakukan dengan pembangunan Satu Atap (satap) antara pendidikan SD dengan SLTP, atau antara SLTP dengan SLTA/SMK. Untuk lebih jelasnya mengenai ketersediaan dan sebaran sarana pendidikan jenjang TK hingga SLTA/SMK di Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 2.23.



Gambar 2.23 Peta Sebaran Sarana Pendidikan

Sementara itu, sarana pendidikan untuk jenjang Perguruan Tinggi sudah tersedia dan tersebar di beberapa lokasi, dengan didukung Perguruan Tinggi skala internasional yaitu IPB University yang berada di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Sarana pendidikan untuk jenjang Perguruan Tinggi antara lain: Universitas Pakuan di Kecamatan Bogor Timur, Universitas Ibn Khaldun dan Universitas Nusa Bangsa di Kecamatan Tanah Sareal, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor di Kecamatan Bogor Selatan, STIKES Wijaya Husada, Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor di Kecamatan Bogor Barat, Politeknik AKA dan Universitas Bina Sarana Informatika di Kecamatan Bogor Tengah.

Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran sarana pendidikan untuk jenjang Perguruan tinggi di Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 2.25.



Gambar 2.24 Peta Sebaran Perguruan Tinggi

b) Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan untuk melayani kebutuhan dan memenuhi keperluan bagi masyarakat dalam usaha peningkatan derajat kesehatan serta perkembangan sumber daya manusianya telah tersedia dengan adanya ketersediaan sarana Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, serta Pos Yandu yang tersebar di beberapa Kelurahan. Ketersediaan sarana kesehatan ini sudah menyebar ke seluruh wilayah, yaitu di Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur, dan Kecamatan Bogor Barat, Bogor Utara, maupun Kecamatan Tanah Sareal, dan Kecamatan Bogor Selatan. Namun belum optimal dalam memenuhi pelayanannya karena masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau pelayanannya, yaitu di wilayah selatan dan barat, terutama di wilayah perbatasan Kota seperti Rancamaya, Ranggamekar, Mulyaharja, Balumbangjaya, Situ Gede. Dalam mendukung Misi Bogor Sehat maka sarana kesehatan menjadi salah satu prioritas

utama dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan fokus utama yaitu mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas. Dari data yang berhasil diperoleh dari Dinas Kesehatan, bahwa jumlah Rumah Sakit yang ada di Kota Bogor sebanyak 22 unit yang tersebar di enam Kecamatan dengan Kelas Rumah Sakit mulai dari Kelas A hingga Kelas D. Namun dari jumlah Rumah Sakit yang ada, belum melayani kebutuhan penduduk yang akan berobat karena keterbatasan dalam ruangan. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran Rumah Sakit dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34 Jumlah dan Sebaran Rumah Sakit di Kota Bogor Tahun 2025

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA RS	ALAMAT	KELAS RUMAH SAKIT	JENIS RUMAH SAKIT
1	Tanah Sareal	Tanah Sareal	RSIA Pasutri	Jl. Merak No. 3	C	RSKIA/Swasta
		Sukadamai	RSU Islam Bogor	Jl. Perdana Raya Bogor No. 22	C	RSU/Organisasi Sosial
		Cibadak	RSIA Bunda Suryatini	Jl. KH Sholeh Iskandar No. 21	C	RSKIA/Swasta
		Cibadak	RSU Islam Bogor	Jl. Perdana Raya No 22 Tanah Sareal Kota Bogor	C	RSU/Swasta
2	Bogor Tengah	Sempur	RSU Tk IV Salak Bogor	Jl. Jendral Sudirman No. 8	C	RSU/TNI AD
		Tegallega	RSU PMI Bogor	Jl. Raya Pajajaran No. 80 Bogor	B	RSU/Organisasi Sosial
		Babakan	Siloam Hospital Bogor	Jl. Pajajaran No. 27 RT 01 RW 04	C	RSU/Swasta
		Pabaton	RSKIA Sawojajar	Jl. Sawojajar No. 9 Rt 001 Rw 002	C	RSKIA/Swasta
		Paledang	RSU Bhayangkara Tl. IV	Jl. Kapten Muslihat No. 18	D	RSU/POLRI
3	Bogor Utara	Bantarjati	RSU Azra	Jl. Raya Pajajaran No. 219	C	RSU/Swasta
		Bantarjati	RSU Mulia Pajajaran	Jl. Raya Pajajaran No. 98 Rt 02 RW 03	C	RSU/Swasta
		Tegal Gundil	RSIA Nuraida	Jl. Bangbarung Raya No. 105, RT.01/RW 06. Tegal Gundil, Kec.. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152	C	RSKIA/Swasta
4	Bogor Barat	Margajaya	RSU Medika Dramaga	Jl. Raya Dramaga KM	C	RSU/Swasta

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA RS	ALAMAT	KELAS RUMAH SAKIT	JENIS RUMAH SAKIT
				7,3 RT 01 RW 06		
		Curugmekar	RSU Hermina Bogor	Jl. Ring Road I, Kav 23,25,27 Perum Taman Yasmin Bogor	B	RSU/Swasta
		Menteng	RSUD Kota Bogor	Jl. Dr. Semeru No. 120 RT 001 RW 020	B	RSU/Pemerintah Kota Bogor
		Semplak	RS Graha Medika	Jl. KH. R. Abdullah Bin Nuh No. 16114, RT.03/RW.12, Semplak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16113	C	RSU/Swasta
		Menteng	RS Jiwa Dr. H. Marzoeqi Mahdi	Jl. Dr. Semeru No. 114	A	RSU Khusus/Kementerian Kesehatan
5	Bogor Selatan	Bondongan	RSU Milenia	Jl. Pahlawan No. 91	C	RSU/Swasta
		Empang	RSU Umami	Jl. Empang II No. 2	C	RSU/Swasta
6	Bogor Timur	Baranangsiang	RSU BMC Mayapada Hospitals	Jl. Pajajaran Indah V No. 97	C	RSU/Swasta
		Tajur	RSU JULIANA	Jalan Raya Tajur No. 75	C	RSU/Swasta
		Sukasari	RSU Vania	Jl. Siliwangi No. 11	C	RSU/Swasta
		Tajur	Bogor Senior Hospitals	Jl. Raya Tajur No. 168, RT.03/RW.04, Muarasari Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat 16137	C	RSU/Swasta

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor

Selain itu, sarana kesehatan lainnya yang sudah ada berupa puskesmas sebanyak 25 unit dan puskesmas pembantu sebanyak 31 unit yang tersebar di enam kecamatan. untuk lebih jelasnya mengenai sebaran puskesmas dan puskesmas pembantu di Kota Bogor dapat dilihat pada tabel 2.35.

Tabel 2.35 Jumlah dan Sebaran Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2025

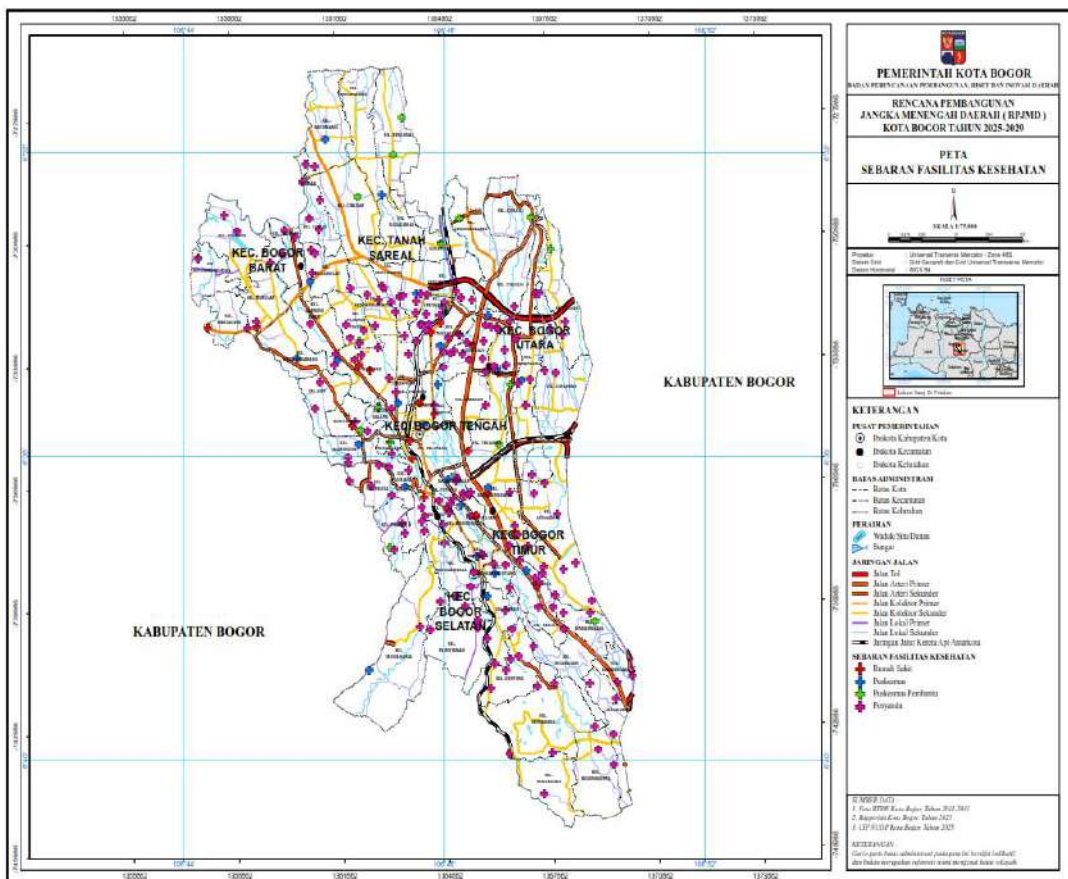
NO	Kecamatan/ Puskesmas	Kelurahan	No	Nama Puskesmas	No	Nama Puskesmas Pembantu
1	Kec. Tanah Sereal					
		Tanah Sereal	1	Tanah Sereal		-
		Kebon Pedes	2	Pondok Rumput		-
		Kedung Badak	3	Kedung Badak		-
		Kedung Jaya			1	Kedung Jaya
		Kedung Waringin			2	Kedung Waringin
		Kayu Manis	4	Kayu Manis		-

NO	Kecamatan/ Puskesmas	Kelurahan	No	Nama Puskesmas	No	Nama Puskesmas Pembantu
		Cibadak			3	Cibadak
		Kencana			4	Kencana
		Sukaesmi	5	Mekarwangi	5	Sukadamai
		Sukadamai			-	-
		Mekarwangi			6	Mekarwangi II
2	Kec. Bogor Utara					
		Cibuluh	6	Bogor Utara	7	Villaduta
		Cimahpar			8	Cimahpar
		Tanah Baru			-	-
		Tegal Gundil	7	Tegal Gundil	9	Ceger
		Bantar Jati			10	Bogor Baru
		Kedung Halang	8	Warung Jambu	11	Kedung Halang
		Ciparigi			12	Ciparigi
		Ciluar			13	Ciluar
3	Kec. Bogor Tengah					
		Pabaton	9	Bogor Tengah	-	-
		Cibogor			-	-
		Sempur	10	Sempur	-	-
		Tegal Laga			14	Tegal Lega
		Babakan			15	Babakan
		Ciwaringin	11	Merdeka	16	Cimanggu
		Panaragan			17	Panaragan
		Kebon Kepala			18	Sindang Sari
		Gudang	12	Gang Aut	-	-
		Paledang			-	-
		Babakan Pasar	13	Belong	-	-
4	Bogor Selatan					
		Batu Tulis	14	Bogor Selatan		
		Rangga Mekar			19	Rangga Mekar
		Pamayoran	15	Mulya Hrja		
		Mulya Harja				
		Bondongan	16	Bondongan		
		Empang				
		Cikaret			20	Cikaret
		Cipaku	17	Cipaku		
		Genteng			21	Genteng
		Rancamaya				
		Kertamaya				
		Bojongkerta			22	Bojongkerto
		Pakuan	18	Lawang Gintung		
		Lawang Gintung				
		Harjasari			23	Harjasari
		Muarasari			24	Muarasari
5	Bogor Timur					
		Baranangsiang	19	Bogor Timur	25	Bantar Kemang
		Katulampa			26	Katulampa
					-	-
		Tajur	20	Pulo Armyn	-	-
		Sindangsari				Sindangsari
		Sukasari				Sukamulya
6	Bogor Barat					
		Menteng	21	Gang Kelor	-	-
		Cilendek Timur			29	Cilendek Timur
		Cilendek Barat				
		Sindang Barang	22	Sindang Barang		
		Bubulak				
		Situgede				
		Margajaya				
		Balumbang Jaya			30	Balumbang Jaya
		Semplak	23	Semplak		
		Curug				

NO	Kecamatan/ Puskesmas	Kelurahan	No	Nama Puskesmas	No	Nama Puskesmas Pembantu
		Curug Mekar				
		Pasir Mulya	24	Pasir Mulya		
		Loji				
		Gunung Batu			31	Gunung batu
		Pasir Jaya	25	Pancasan		
		Pasir Kuda				

Sumber : Dinkes Kota Bogor, 2025

Sarana kesehatan yang berupa Posyandu sebanyak 983 Unit dan Pos Bindu sebanyak 707 unit yang menyebar hampir di setiap kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran sarana kesehatan berupa RS, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta Posyandu di Kota Bogor dapat dilihat pada gambar 2.25.



Gambar 2.25 Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan

c) Sarana Olahraga

Sarana Olahraga merupakan sarana bermain bagi keluarga, tempat main anak-anak dan sarana berolahraga untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, juga sebagai sarana hiburan. Pasa saat ini

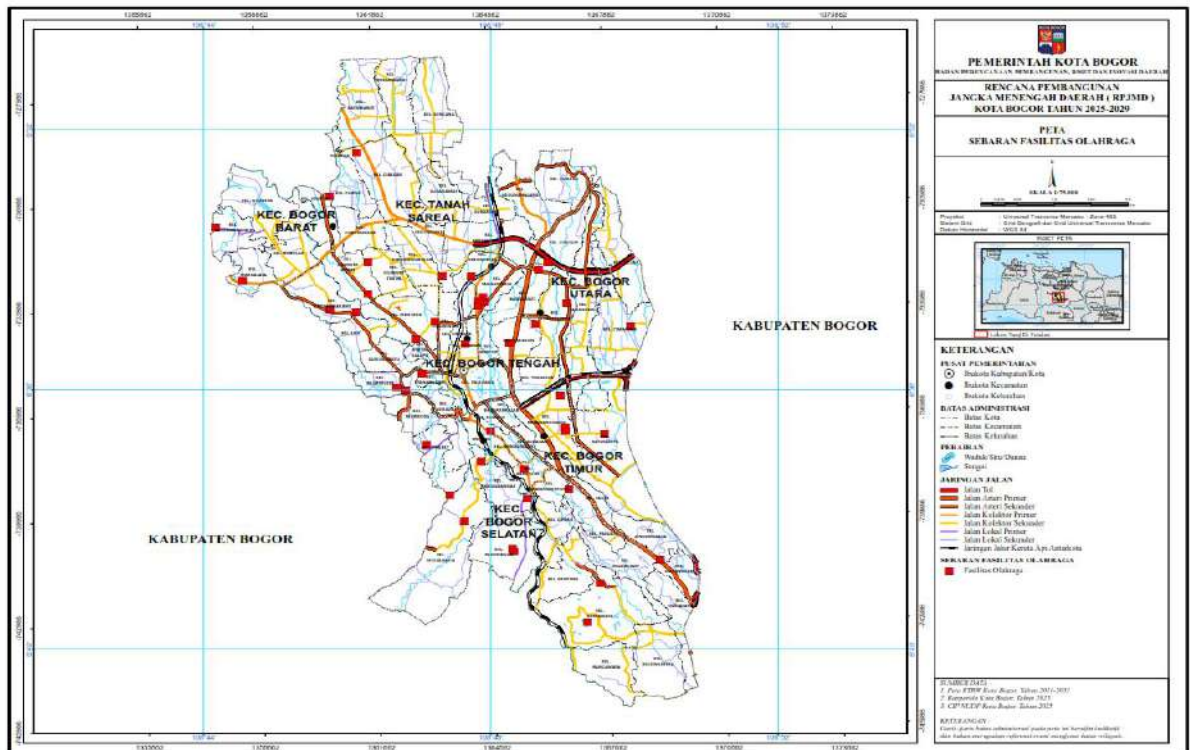
sarana Olahraga di Kota Bogor berupa Gedung Olahraga (GOR) Pajajaran, lapangan sepak bola , lapangan tenis, lapangan futsal , lapangan voli, lapangan basket dan sebagainya tersedia di beberapa lokasi. Dilihat dari jumlah dan ketersediaannya pada saat ini belum dapat melayani kebutuhan penduduk kota Bogor sepenuhnya. Kedepan perlu adanya pembangunan sarana olahraga seperti Gedung Olahraga Masyarakat (GOM) di beberapa wilayah. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran Sarana Olahraga dapat dilihat pada tabel 2.36 dan gambar 2.26

Tabel 2.36 Jumlah dan Sebaran Fasilitas Olah Raga Tahun 2025

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA
1	KEC. BOGOR BARAT	Balumbangjaya	Lapangan Futsal Hei's
2	KEC. BOGOR BARAT	Cilendek Barat	GOR Santana
3	KEC. BOGOR BARAT	Cilendek Timur	GOR Taman Yasmin
4	KEC. BOGOR BARAT	Margajaya	Lapangan Futsal Dramaga
5	KEC. BOGOR BARAT	Menteng	Bogor Golf
6	KEC. BOGOR BARAT	Menteng	Taman Manunggal
7	KEC. BOGOR BARAT	Pasirjaya	Lapangan Tenis Meranti
8	KEC. BOGOR BARAT	Pasirmulya	Lapangan Bulutangkis Landbouw
9	KEC. BOGOR BARAT	Semplak	Gedung Golden Futsal
10	KEC. BOGOR BARAT	Sindangbarang	Kolam Renang Sindangbarang
11	KEC. BOGOR BARAT	Sindangbarang	Lapangan Futsal Sindangbarang
12	KEC. BOGOR SELATAN	Batutulis	Pusat Kebugaran 87 Fitnes Club
13	KEC. BOGOR SELATAN	Bondongan	Lapangan Futsal My Futsal
14	KEC. BOGOR SELATAN	Cikaret	Kolam Renang-Arena Bermain Jb
15	KEC. BOGOR SELATAN	Cikaret	GOR Bulutangkis Mina Bhakti
16	KEC. BOGOR SELATAN	Kertamaya	Rancamaya Golf Country Club
17	KEC. BOGOR SELATAN	Kertamaya	GOM Bogor Selatan
18	KEC. BOGOR SELATAN	Mulyaharja	Bogor Bowling Center
19	KEC. BOGOR SELATAN	Pakuan	Lapangan Futsal GOR Pakuan 1
20	KEC. BOGOR SELATAN	Pamoyanan	Lapangan Futsal Pamoyanan Hijau
21	KEC. BOGOR SELATAN	Pamoyanan	Kolam Renang Tirtania
22	KEC. BOGOR SELATAN	Ranggamekar	Kolam Renang Sagara
23	KEC. BOGOR SELATAN	Ranggamekar	Kolam Renang Komplek Bogor Nirwana Residence
24	KEC. BOGOR TENGAH	Babakan	GOR INIRO Pusat Penelitian Karet
25	KEC. BOGOR TENGAH	Babakan	Kolam Renang Vila Indah Pajajaran
26	KEC. BOGOR TENGAH	Pabaton	Lapangan Bulutangkis-Sanggar Senam Melia
27	KEC. BOGOR TENGAH	Panaragan	GOR Panaragan
28	KEC. BOGOR TIMUR	Baranangsiang	GOR Villa Duta Sport
29	KEC. BOGOR TIMUR	Baranangsiang	Kolam Renang Villa Duta Sport
30	KEC. BOGOR TIMUR	Baranangsiang	GOR Ben Stadium
31	KEC. BOGOR TIMUR	Katulampa	GOR Padjadjaran Regency Sport Club
32	KEC. BOGOR TIMUR	Sindangrasa	GOR Raga Sejahtera
33	KEC. BOGOR UTARA	Bantarjati	Lapangan Bulutangkis Indraprasta
34	KEC. BOGOR UTARA	Cibuluh	Lapangan Futsal Bima
35	KEC. BOGOR UTARA	Cimahpar	GOM Bogor Utara
36	KEC. BOGOR UTARA	Tegal Gundil	Lapangan Futsal Pandu
37	KEC. TANAH SAREAL	Cibadak	Gedung Delima Futsal-Cafe
38	KEC. TANAH SAREAL	Kebonpedes	GOR Kridagiri

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA
39	KEC. TANAH SAREAL	Kedungjaya	GOR MJR
40	KEC. TANAH SAREAL	Tanahsareal	Lapangan Tenis GOR Pajajaran
41	KEC. TANAH SAREAL	Tanahsareal	Lapangan Basket GOR Pajajaran
42	KEC. TANAH SAREAL	Tanahsareal	Stadion Pajajaran Bogor
43	KEC. TANAH SAREAL	Tanahsareal	Gelanggang Olahraga dan Pemuda Pajajaran

Sumber : Dispora Kota Bogor, 2025



Gambar 2.26 Peta Fasilitas Sarana Olah Raga

d) Sarana Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika. Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi utama sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen dan penyerap air hujan.

Ruang terbuka hijau dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau private. Ruang

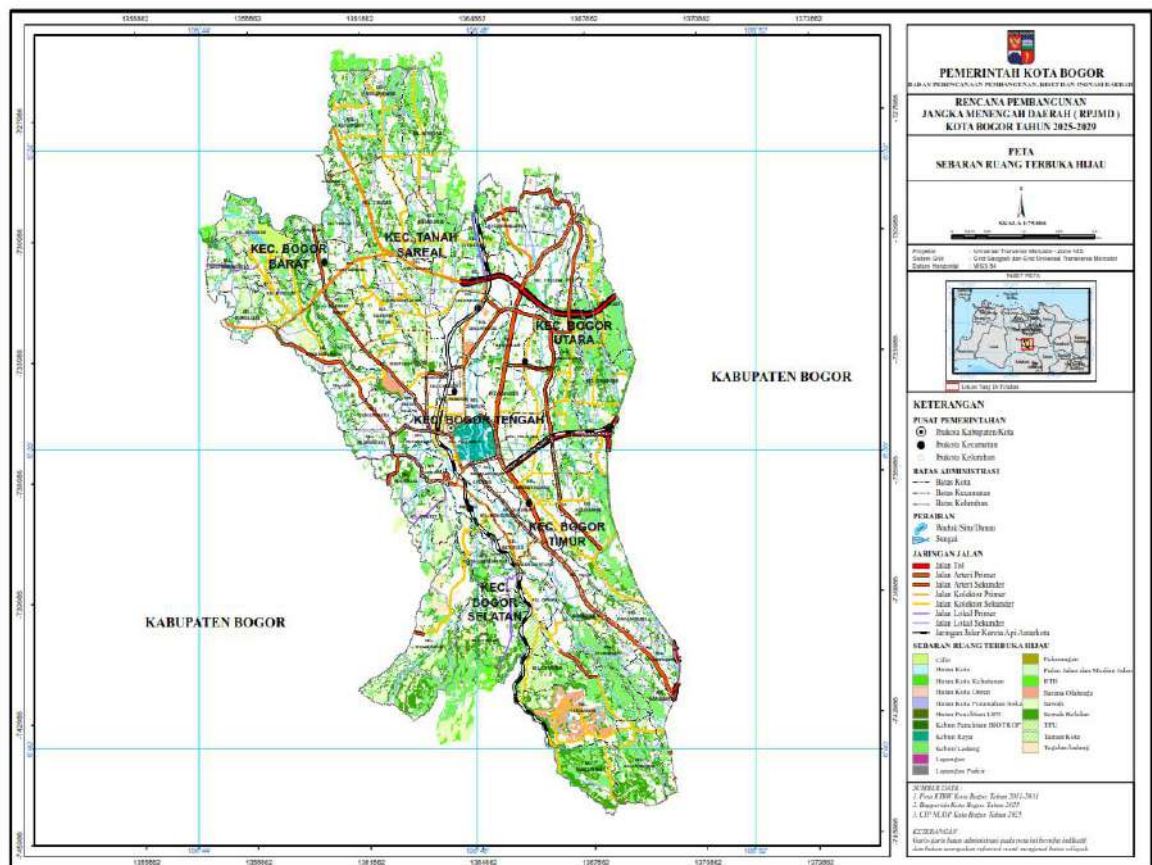
terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka yang terbentuk secara alami dan dirancang untuk fungsi lindung dan resapan air, guna menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungannya maupun untuk kepentingan umum.

Di Kota Bogor ruang terbuka hijau ada di Kebun Raya Bogor yang ditanami beraneka ragam vegetasi di dalamnya, Alun-alun Bogor, Taman Kencana, Cifor dan beberapa taman lain serta ruang terbuka lainnya. Jenis ruang terbuka hijau lainnya berupa lapangan olahraga atau ruang terbuka yang menyebar di beberapa kawasan permukiman.

Ruang terbuka hijau private merupakan ruang terbuka yang terbentuk dan dirancang untuk mewadahi suatu aktivitas penduduk tanpa mengurangi fungsinya sebagai ruang terbuka hijau yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungannya. Kondisi saat ini ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bogor belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan bagi suatu kota, yaitu 30 % dari luas kota yang terdiri dari RTH Publik sebesar 20% dan RTH Private sebesar 10% (UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Hal ini karena meningkatnya jumlah penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan akan perumahan, fasilitas perdagangan dan jasa serta sarana dan prasarana lainnya yang memerlukan lahan terbuka sementara lahan tersedia terbatas.

Permasalahan ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bogor kedepan untuk mencari solusi dalam penyediaan ruang terbuka hijau melalui pemanfaatan perkarangan atau halaman menjadi ruang terbuka hijau dan melibatkan komponen untuk penyediaan ruang terbuka hijau.

Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran ruang terbuka hijau (RTH) dapat dilihat pada gambar 2.27.



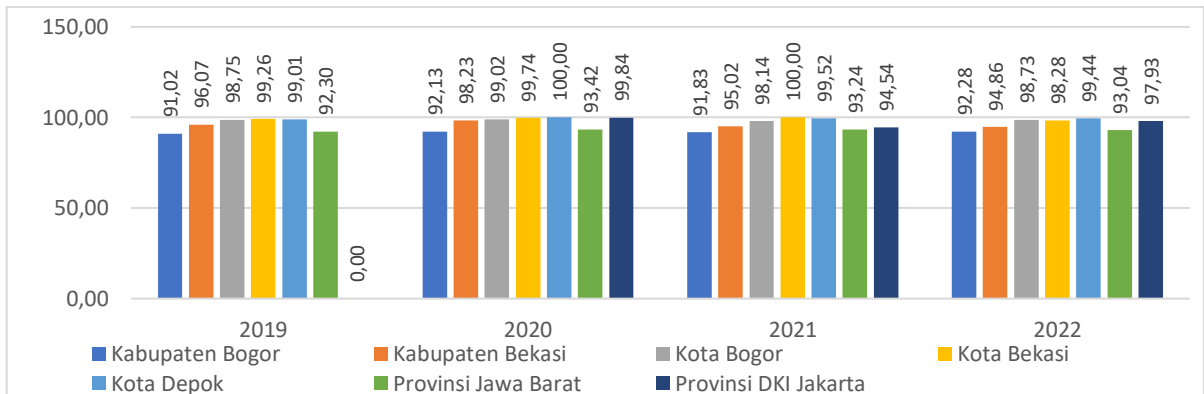
Gambar 2.27 Peta Sebaran Ruang Terbuka Hijau

e) Prasarana Air Minum

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum mulai dari pengambilan air baku, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi ke konsumen. Tujuannya adalah menyediakan pelayanan air minum yang aman, layak, berkualitas, terjangkau dan berkelanjutan untuk memenuhi hak rakyat atas air minum. Jenis SPAM dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu SPAM Jaringan Perpipaan (JP) menggunakan jaringan pipa untuk mendistribusikan air dan SPAM bukan Jaringan Perpipaan (BJP) bentuk penyediaan air non pipa (sumur Bor).

Berdasarkan hasil kajian dari RPJPD Kota Bogor tahun 2024, Kota Bogor telah memiliki akses sumber air yang layak dengan capaian Kota Bogor tahun 2022 sebesar 98,73 persen. Angka ini mampu bersaing dengan wilayah perkotaan lainnya seperti Kota Bekasi (98,28%) dan Kota Depok (99,44). Harapannya, Kota Bogor terus

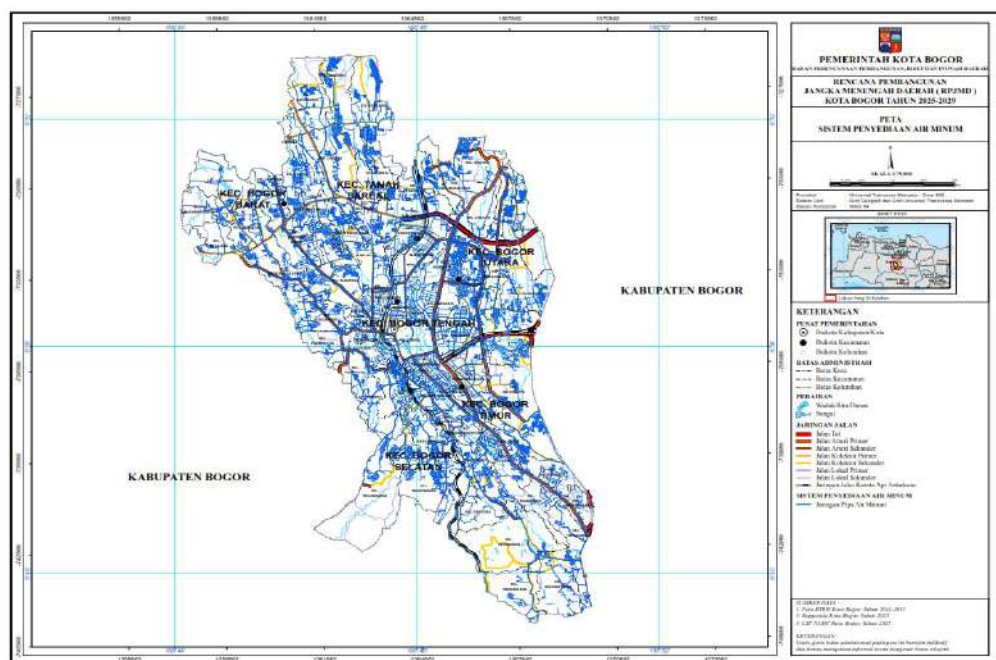
dapat meningkatkan persentase akses sumber air yang layak, aman, dan terjangkau sehingga dapat mencapai 100 persen seperti Kota Depok di tahun 2020 dan Kota Bekasi di tahun 2021. Untuk lebih jelasnya mengenai rumah tangga yang memiliki akses terhadap Sumber air minum layak dapat dilihat pada Grafik 2.33.



Sumber : RPJPD Kota Bogor

Grafik 2.33 Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum Layak (persen)

Selanjutnya mengenai sistem pelayanan jaringan air bersih yang dilayani oleh PDAM dengan menggunakan jaringan pipa air minum dapat dilihat pada Gambar 2.28.



Gambar 2.28 Peta Sistem Penyediaan Air Minum

f) Prasarana Air Limbah Domestik

Pemerintah Kota Bogor melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah (UPTD PAL) Dinas PUPR Kota Bogor telah mengembangkan sistem pengelolaan air limbah terpusat (*off-site*) dan septic tank komunal (*on-site*) di sejumlah wilayah prioritas. Hingga tahun 2024, tercatat sekitar 572 sambungan rumah (SR) telah terhubung ke jaringan layanan UPTD PAL, mencakup sebagian kawasan Bogor Tengah, Tanah Sareal, dan Bogor Timur. Selain itu, telah dibangun lebih dari 70 unit septic tank komunal di berbagai kelurahan melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sistem komunal ini meningkatkan akses sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas pembuangan limbah layak.

UPTD PAL juga menyediakan berbagai layanan sanitasi dasar publik yang mendukung kebersihan lingkungan perkotaan. Layanan tersebut mencakup sedot tinja, sambungan rumah air limbah domestik, dan bus toilet portable dengan tarif yang terjangkau bagi masyarakat, yaitu berkisar antara Rp 250.000 hingga Rp 600.000, tergantung jenis pengguna. Armada layanan sedot tinja memiliki kapasitas bervariasi antara 1 hingga 8 meter kubik, melayani 2.435 pelanggan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) serta 572 pelanggan sambungan rumah (SR). Sementara itu, bus toilet portable dilengkapi dengan empat kamar mandi, tangki air bersih dan buangan masing-masing 500 liter, pendingin udara, wastafel, serta fasilitas pendukung lainnya yang siap digunakan untuk kegiatan masyarakat maupun acara besar di Kota Bogor.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, cakupan layanan air limbah di Kota Bogor baru mencapai sekitar 20–25% dari total kebutuhan kota. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih cepat, terintegrasi, dan kolaboratif. Pemerintah terus berkomitmen

memperluas layanan sanitasi aman melalui optimalisasi IPLT Tegal Gundil, penambahan armada dan SDM UPTD PAL, serta pembangunan septic tank komunal di wilayah padat penduduk seperti Bogor Selatan, Tanah Sareal, dan Bogor Barat.

Peningkatan pengelolaan air limbah bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur, tetapi juga tentang pembangunan kultur — membentuk kebiasaan masyarakat untuk hidup bersih, sehat, dan peduli lingkungan. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Kota Bogor berpeluang besar menjadi contoh sukses pengelolaan sanitasi perkotaan di Indonesia. Mengelola air limbah bukan sekadar urusan teknis, melainkan investasi nyata untuk kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan kota yang lebih hijau serta berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya mengenai pengelolaan air limbah dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37 Profil Pengelolaan Air Limbah Kota Bogor

No	Aspek	Keterangan	Data / Capaian Utama	Keterangan
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (On-site)	Sebagian besar masyarakat menggunakan tangki septik sederhana yang belum memenuhi standar teknis.	±72% rumah tangga	Berisiko mencemari air tanah, terutama di kawasan resapan air.
2	Sistem Terpusat (Off-site)	Pengelolaan air limbah terhubung melalui jaringan pipa UPTD PAL Kota Bogor.	572 sambungan rumah (SR)	Melayani kawasan Bogor Tengah, Tanah Sareal, dan Bogor Timur.
3	Septic Tank Komunal (On-site Komunal)	Dibangun melalui program SANIMAS dan DAK untuk masyarakat berpenghasilan rendah.	>70 unit komunal	Meningkatkan akses sanitasi di wilayah padat penduduk.
4	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tegal Gundil	Fasilitas utama pengolahan lumpur tinja Kota Bogor.	Kapasitas 50 m ³ /hari	Berlokasi di Kelurahan Tegal Gundil, Bogor Utara.
5	Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)	Layanan penyedotan tinja terjadwal oleh UPTD PAL.	2.435 pelanggan	Dilayani dengan armada truk tangki kapasitas 1–8 m ³ .
6	Bus Toilet Portable	Fasilitas sanitasi keliling untuk acara dan kegiatan masyarakat.	1 unit	Dilengkapi 4 kamar mandi, tangki air 500 L, AC, dan wastafel.
7	Tarif Layanan UPTD PAL	Biaya layanan sanitasi dasar yang terjangkau bagi masyarakat.	Rp 250.000 – Rp 600.000	Disesuaikan dengan jenis pengguna dan layanan.

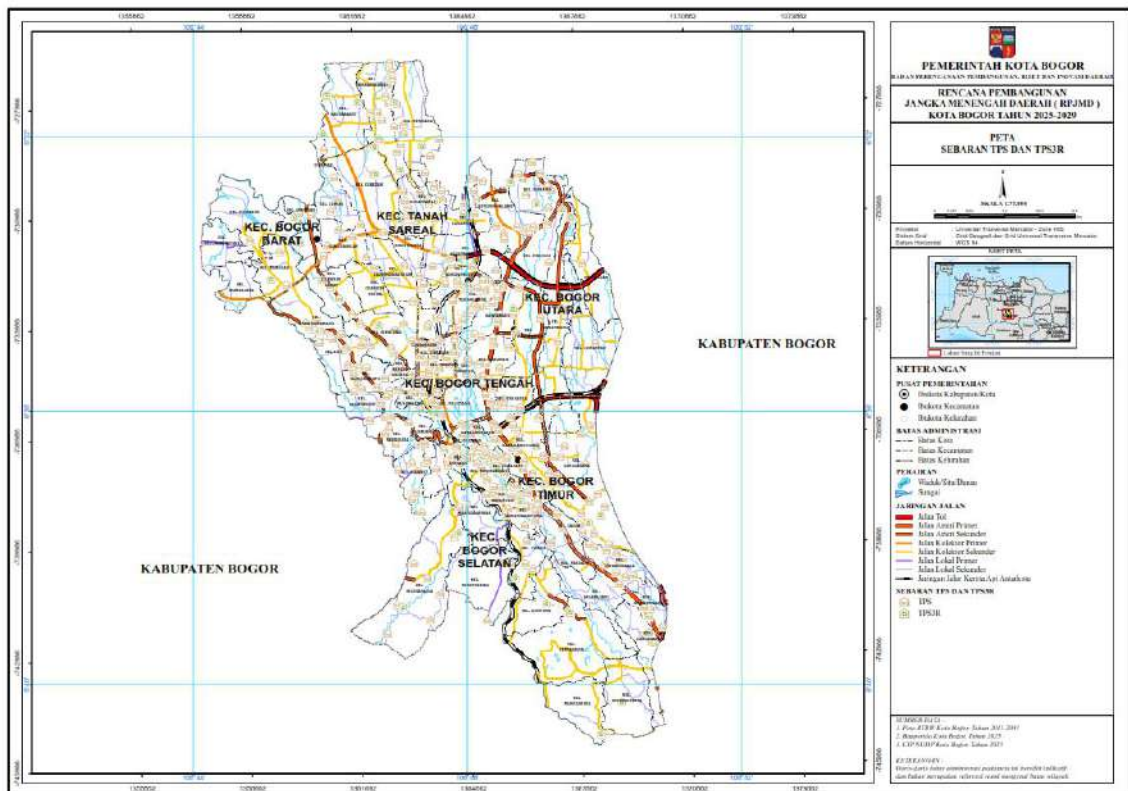
No	Aspek	Keterangan	Data / Capaian Utama	Keterangan
8	Cakupan Layanan Air Limbah Kota Bogor	Total jangkauan sistem pengelolaan air limbah terhadap kebutuhan kota.	20–25% dari total kebutuhan	Masih memerlukan perluasan dan optimalisasi layanan.
9	Upaya Pemerintah	Perluasan jaringan, optimalisasi IPLT, penambahan SDM dan armada.	—	Fokus pada wilayah padat penduduk (Bogor Selatan, Tanah Sareal, Bogor Barat).
10	Pendekatan Pembangunan	Sinergi antara infrastruktur dan perubahan perilaku (kultur).	—	Mendorong budaya hidup bersih dan peduli lingkungan.

Sumber: Dinas PUPR Kota Bogor dan UPDT PAL, 2022

g) Prasarana Sampah

Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat di daur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah dapat berbentuk sampah padat dan sampah cair. Pengelolaan sampah di Kota Bogor dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), namun ada juga yang dikelola secara individual dengan cara dibuang langsung ke tempatnya, dibakar, ditimbun dan bahkan ada penduduk membuang ke sungai atau tempat-tempat liar.

Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bisa menyebabkan masalah ketika volume sampah semakin meningkat. Apalagi Kota Bogor sangat bergantung kepada TPA yang berada di wilayah Kabupaten Bogor yaitu TPA Galuga dan Tempat Pengelolaan Pemrosesan Akhir Sampah Regional (TPPASR) Lulut Nambo (TPA Regional Nambo). Oleh karena itu upaya – upaya proaktif untuk mengurangi sampah dari sumbernya perlu terus dipertahankan. Keberadaan bank sampah, TPS3R dan berbagai program pengurangan sampah merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan di masa mendatang. Tahun 2025, jumlah bank sampah sebanyak 171 unit dan TPS3R sebanyak 32 unit. Untuk Sebaran TPS dan TPS3R dapat dilihat di gambar dibawah ini.



Gambar 2.29 Peta Sebaran TPS dan TPS 3R

Berdasarkan hasil analisa dalam dokumen RPJPD Kota Bogor tahun 2024, pada tahun 2045 prediksi timbulan sampah di Kota Bogor secara total mencapai 746.893 ton/tahun atau meningkat sebesar 180%. Kondisi ini tentu akan sangat mengkhawatirkan apabila penanganan sampah yang dilakukan masih belum ada inovasi dan masyarakat tidak diajak berperan aktif karena dengan pola pengelolaan TPA Galuga seperti sekarang jumlah sampah tersebut tidak akan tertampung.

Berdasarkan volume jumlah sampah yang ada saat ini, bahwa tingkat pelayanannya sampah yang dapat diangkut ke pembuangan akhir baru mencapai 89,38%. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber sampah yang diangkut menggunakan angkutan truk ke pembuangan akhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38 Sumber dan Tingkat Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kota Bogor
Tahun 2024

No.	Sumber Sampah	Peleyanan (%)
1	Sampah Rumah Tangga	62,44
2	Perniagaan	19,48
3	Fasilitas Publik	6,17
4	Pasar	4,89
5	Kawasan	2,84
6	Perkantoran	3,25
7	Lainnya	0,93

Sumber: Diolah dari RPJPD Kota Bogor, 2024

Ke depan pengelolaan sampah di Kota Bogor menggunakan sistem Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dan Kota Bogor menjadi salah satu lokasi Proyek Strategis Nasional. PSEL adalah sistem teknologi ramah lingkungan untuk mengubah sampah perkotaan yang tidak bisa di daur ulang menjadi energi listrik atau panas, mengurangi volume sampah di TPA, dan menciptakan energi terbarukan dengan memenuhi syarat minimal 1.000 Ton sampah/hari, lahan yang tersedia dan komitmen daerah, menggunakan teknologi seperti insinerasi, gasifikasi atau pirolisis untuk mengolah sampah menjadi listrik.

h) Prasarana Transportasi

1) Kondisi Jalan

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan hubungan perekonomian antar wilayah. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan jika terjadi kerusakan jalan akan berakibat bukan hanya terhalangnya kegiatan ekonomi dan sosial namun dapat terjadi kecelakaan.

Tabel 2.39 Panjang Jalan Menurut Kewenangan Tahun 2024

Tingkat Kewenangan	Panjang (km)
Nasional	28,56
Provinsi	12.196
Kabupaten/Kota	207.979
Jumlah	220.203,56

Sumber: Dinas PUPR Kota Bogor Tahun 2024

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa kondisi jalan di Kota Bogor dalam kategori sedang sebanyak 48,7 persen pada tahun 2022, akan tetapi masih terdapat jalan dengan kondisi rusak walaupun dalam persentase yang kecil yaitu 2,12 persen. Kondisi jalan yang masih rusak perlu untuk segera diperbaiki agar perjalanan menjadi lebih lancar. Selama periode tahun 2019 hingga 2022, tren kondisi jalan yang baik cenderung menurun dan hal ini perlu segera diperbaiki. Sementara itu, kondisi jalan yang sedang mengalami tren peningkatan setiap tahunnya sedangkan kondisi jalan rusak mengalami tren penurunan yang mengindikasikan semakin sedikitnya kondisi jalan yang rusak di Kota Bogor. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.40 berikut.

Tabel 2.40 Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kewenangan Kota di Kota Bogor Tahun 2019 – 2022

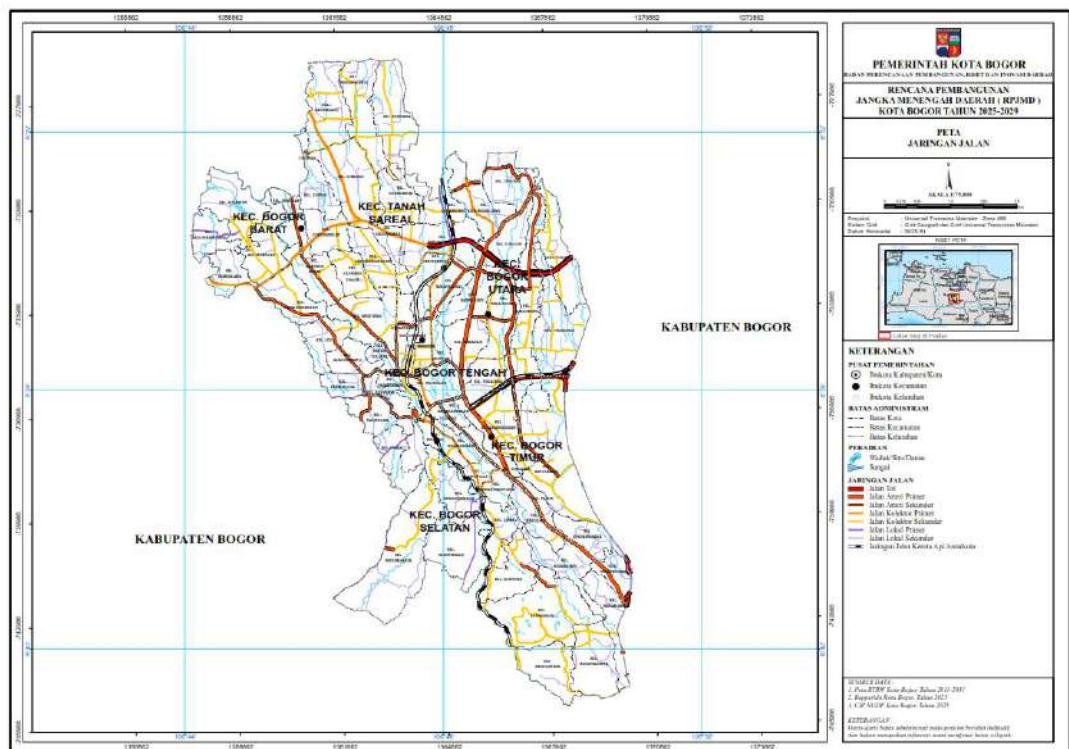
Kondisi Jalan	2024		2025	
	km	%	km	%
Baik	53,75	25,84	53,75	25,84
Sedang	133,49	64,18	133,24	64,06
Rusak	20,74	9,97	20,74	9,97
Rusak Ringan	0,00	0,00	0,25	0,12
	207,98		207,98	

Sumber: RPJPD Kota Bogor Tahun 2024

Saat ini jaringan jalan yang ada belum terkoneksi dengan baik dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal. Selain itu, belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan (panjang jalan, lebar jalan, kecepatan). Disamping itu, belum optimalnya kualitas

penataan transportasi perkotaan (layanan, aksesibilitas, kenyamanan, keamanan). Salah satu dampak yang terjadi adalah adanya kemacetan di beberapa lokasi, terutama pada perempatan jalan dan pusat-pusat kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka upaya perbaikan kualitas jalan menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Bogor, karena kualitas jalan sangat mempengaruhi waktu tempuh dan keselamatan bagi pengguna jalan.

Untuk lebih jelasnya mengenai jaringan jalan dapat dilihat pada Gambar 2.32.



Gambar 2.30 Peta Jaringan Jalan Kota Bogor

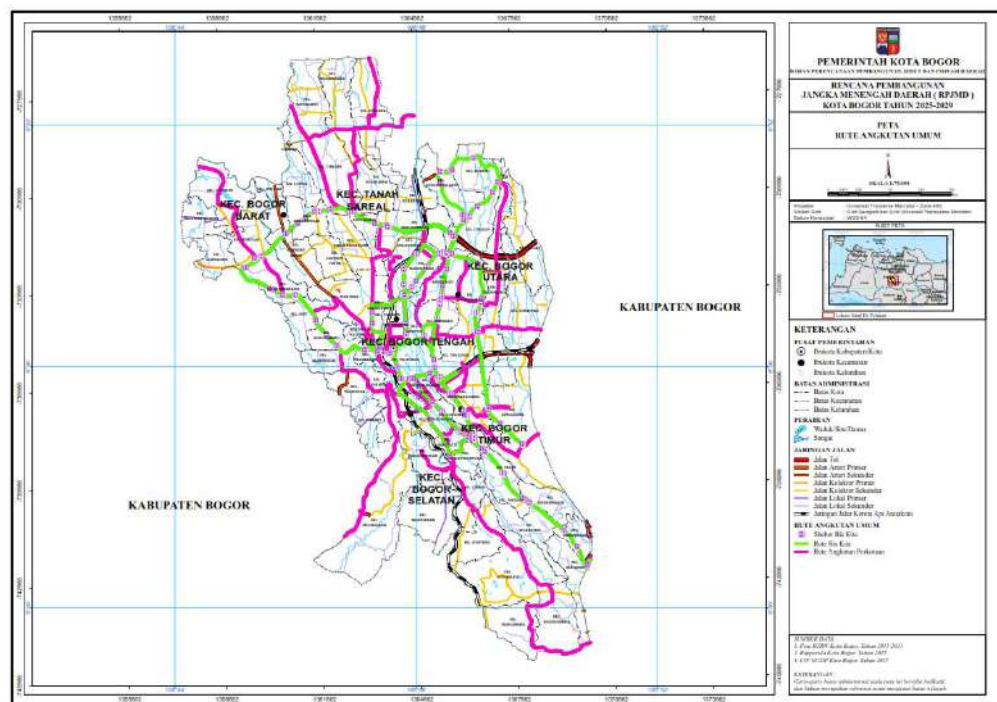
2) Angkutan Umum

Angkutan kota merupakan salah satu alternatif moda transportasi yang menjadi andalan masyarakat karena biayanya terjangkau serta dapat berhenti di setiap titik yang dilewatinya. Kota Bogor saat ini memiliki angkutan kota eksisting berjumlah 2746 kendaraan yang terbagi ke dalam 30 trayek Kota Bogor.

Mengacu kepada hasil Laporan Akhir Review Masterplan Transportasi Kota Bogor Tahun 2019, bahwa cakupan pelayanan angkutan umum perkotaan sudah mencapai 76,9 %. Dari hasil kajian tersebut dapat dikatakan, bahwa rute angkutan umum di Kota Bogor masih menumpuk ke arah pusat kota (Kebun Raya). Namun pengguna ruas jalan utama di Kota Bogor tidak sebatas menggunakan moda transportasi angkutan kota saja, tetapi ada pula penggunaan moda angkutan pribadi dan transportasi online. Penumpukan moda transportasi yang berbeda di suatu ruas jalan yang sama pada waktu yang sama dapat menjadi penyebab kemacetan, dimana kemacetan terjadi saat kapasitas jalannya tidak lagi bisa menampung volume lalu lintas yang ada. Kemacetan yang sering terjadi di wilayah pusat kota tersebut perlu segera diatasi supaya tingkat mobilitas pengguna jalan di dalam kota dapat menjadi tinggi.

Selain itu mengacu kepada data hasil survei BPTJ 2019, mode share kendaraan umum yang berlalu lintas di Kota Bogor adalah sebesar 33,05%. Jumlah kendaraan pribadi (mobil) menempati 16,1%, sisanya yaitu kendaraan motor sebesar 50,85% termasuk ojek online dan kendaraan pribadi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa angka pengguna kendaraan umum di Kota Bogor masih rendah dan jauh dari target yang dicantumkan Perpres No. 55 (RITJ 2018) yakni sebesar 60%.

Untuk lebih jelasnya mengenai trayek angkutan umum dapat dilihat pada Gambar 2.31.



Gambar 2.31 Peta Rute Angkutan Jalan

3) Angkutan Bus Trans Pakuan

Kota Bogor sudah memiliki angkutan masal yang berupa Bus Trans Pakuan atau lebih dikenal dengan Bis Kita Trans Pakuan sebagai salah satu alternatif untuk mengantisipasi melonjaknya angkutan umum dan mengurangi biaya angkutan bagi penggunaan angkutan umum. Bis Kita Trans Pakuan sudah melayani dari pagi hari hingga malam, yaitu dari jam 05.00 sampai dengan jam 21.00 WIB dengan rute layanan atau lintasan menjangkau 4 (empat) koridor yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.41 Rute Trayek Angkutan Bis Kita Trans Pakuan

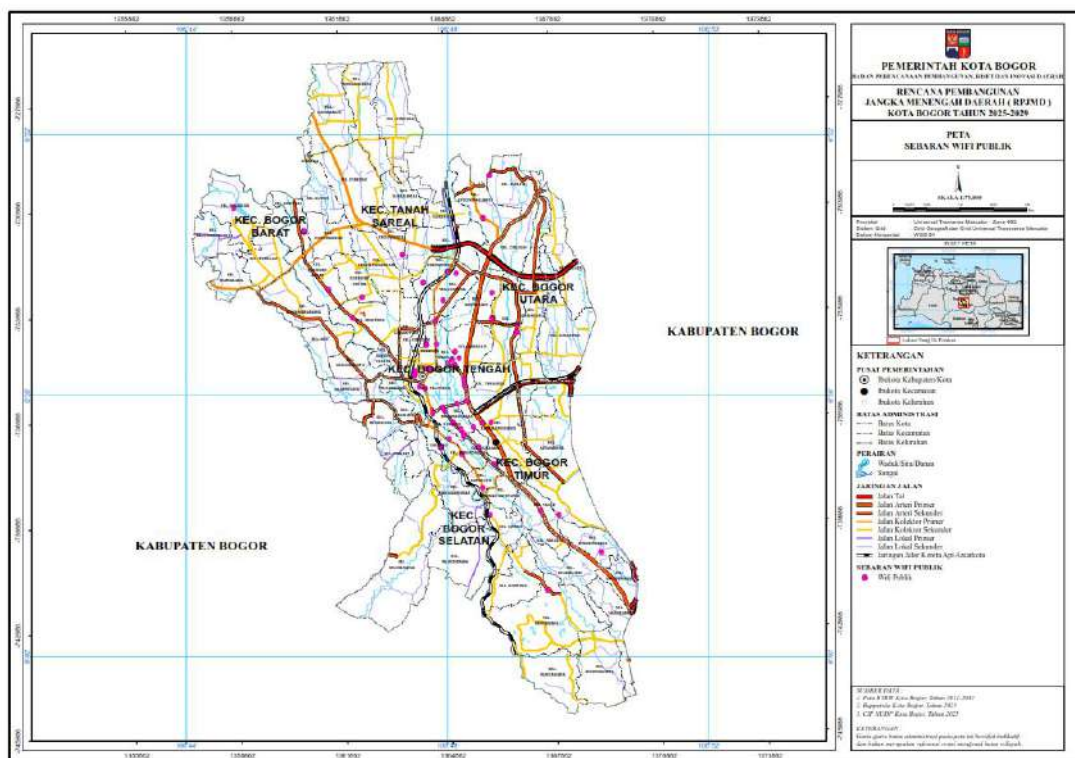
No.	Koridor	Layanan
1	Koridor 1	Terminal Bubulak - Cidangiang
2	Koridor 2	Terminal Bubulak via Cidangiang - Ciawi
3	Koridor 3	Ciparigi – Stasiun Bogor
4	Koridor 4	Parung Banteng – Stasiun Bogor

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

i) Prasarana Telekomunikasi

Berdasarkan data dari Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bogor Tahun 2025, bahwa jaringan internet yang di pasang melalui penyebaran Wifi Publik sudah dipasang di semua wilayah di enam Kecamatan yang ada pada titik-titik strategis. Hal ini ditujukan agar penduduk dapat mengakses jaringan internet tersebut guna mendapat informasi sesuai kebutuhan, keperluan untuk pendidikan, perkantoran games, atau keperluan lainnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran wifi publik di kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 2.32.



Gambar 2.32 Peta Sebaran Wifi Publik

2.2.4.2 Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai tempat tinggal untuk kehidupan dan penghidupan manusia serta tempat melakukan aktivitas sehari-hari. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai backlog kebutuhan rumah, rumah tidak layak huni, dan kawasan permukiman kumuh.

Backlog Kebutuhan Rumah.

Berdasarkan hasil analisis data backlog perumahan tahun 2022, Kota Bogor menghadapi kekurangan hunian yang cukup signifikan dengan total backlog mencapai ****109.502 unit rumah****. Dari total sekitar 351.246 kepala keluarga, hanya terdapat 242.443 unit rumah yang tersedia. Artinya, hampir sepertiga keluarga di Kota Bogor belum memiliki hunian layak. Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk penyediaan rumah baru, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang paling terdampak oleh keterbatasan lahan dan kenaikan harga properti di wilayah perkotaan.

Sebaran backlog tidak merata di seluruh kecamatan, dimana Kecamatan Bogor Barat mencatat kebutuhan rumah tertinggi dengan defisit 25.932 unit, diikuti oleh Bogor Selatan dengan 18.866 unit, serta Bogor Utara dan Tanah Sareal masing-masing mengalami kekurangan lebih dari 18.000 unit rumah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dan urbanisasi belum diimbangi dengan pembangunan perumahan yang merata. Kawasan dengan tingkat aktivitas ekonomi tinggi seperti Tanah Sareal dan Bogor Tengah semakin padat, sementara wilayah pinggiran belum optimal dikembangkan untuk hunian baru yang terjangkau.

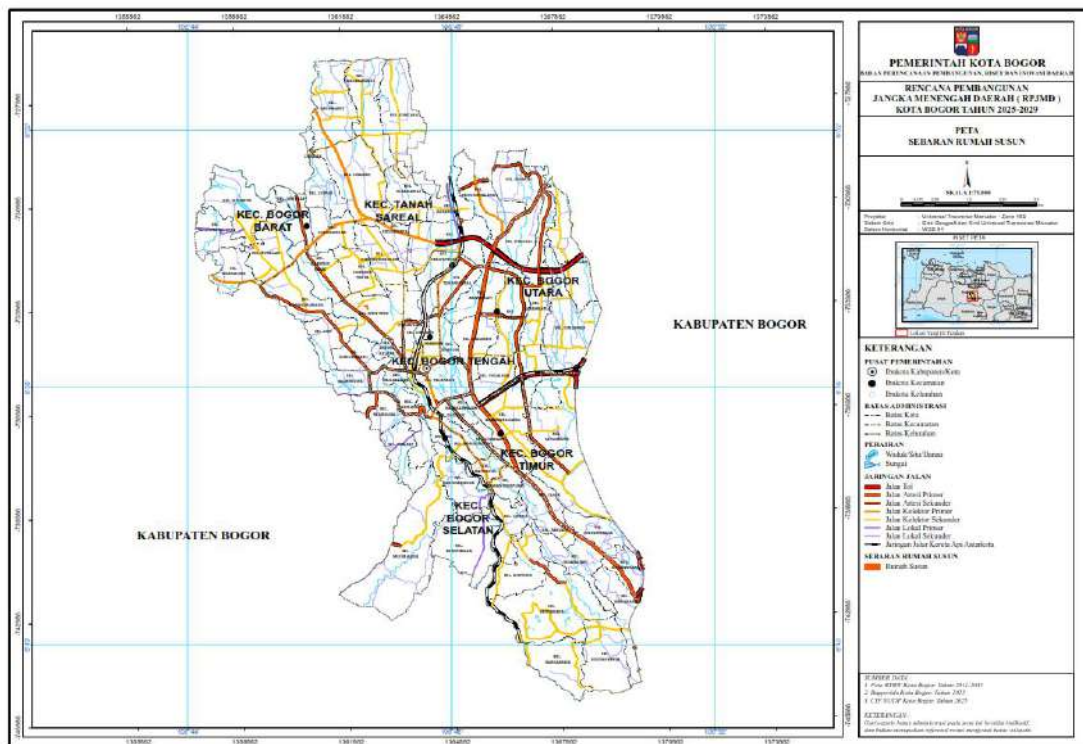
Tingginya angka backlog ini menuntut perhatian serius dari pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam penyediaan hunian layak dan berkelanjutan. Upaya strategis seperti pembangunan rumah susun, penyediaan lahan bersubsidi, dan program pembiayaan perumahan perlu dipercepat. Kota Bogor sebagai kota penyangga ibu kota memiliki peluang besar untuk mengembangkan konsep kota inklusif dan hijau, di mana setiap warga berhak atas tempat tinggal yang aman, sehat, dan terjangkau. Mengatasi backlog bukan sekadar memenuhi kebutuhan fisik akan rumah, tetapi juga menjadi langkah penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga Bogor.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk memenuhi kebutuhan rumah pemerintah Kota Bogor sudah membangun Rumah Susun (Rusun) di dua lokasi, yaitu Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat dan Kelurahan Cibuluh Kecamatan Bogor Utara, Untuk lebih jelasnya mengenai backlog kebutuhan rumah dapat dilihat pada tabel 2.42 dan Gambar 2.33.

Tabel 2.42 Profil Backlog Kebutuhan Rumah Kota Bogor Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Ketersediaan Rumah (Unit)	Backlog (Unit)	Keterangan
1	Bogor Selatan	65.859	46.993	18.866	Kecamatan dengan backlog tertinggi; pertumbuhan penduduk tinggi dan banyak kawasan permukiman padat.
2	Bogor Barat	79.627	53.695	25.932	Wilayah dengan urbanisasi cepat dan keterbatasan lahan perumahan baru.
3	Bogor Utara	61.788	43.422	18.366	Kepadatan tinggi, banyak rumah kontrakan dan kebutuhan hunian keluarga muda.
4	Bogor Tengah	36.244	25.678	10.566	Wilayah pusat kota, ruang terbatas untuk pengembangan perumahan baru.
5	Bogor Timur	34.209	25.050	9.159	Wilayah potensial untuk pengembangan perumahan vertikal.
6	Tanah Sareal	69.356	50.243	19.113	Kecamatan penyangga utama dengan kebutuhan rumah tinggi akibat aktivitas ekonomi yang padat.
Total		351.083	242.081	109.502	

Sumber: Dokumen RP3KP Kota Bogor



Gambar 2.33 Peta Sebaran Rumah Susun

Untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor tahun 2022, tercatat terdapat 22.991 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di seluruh kecamatan. Dari jumlah tersebut, baru 4.533 unit yang mendapatkan pengajuan penanganan untuk perbaikan fisik bangunan. Namun, tidak semua pengajuan dapat ditindaklanjuti karena berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, kelengkapan dokumen legalitas kepemilikan, status sosial ekonomi penghuni yang tidak memenuhi syarat penerima bantuan, hingga tingkat kerusakan bangunan yang belum tergolong parah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan peningkatan kualitas hunian di Kota Bogor masih sangat besar dan memerlukan perhatian lintas sektor.

Secara sebaran wilayah, Kecamatan Bogor Selatan menjadi daerah dengan jumlah RTLH tertinggi yaitu 10.559 unit, disusul Kecamatan Tanah Sareal dengan 9.198 unit, sementara Bogor Timur mencatat jumlah terendah yakni 745 unit. Kawasan dengan tingkat

urbanisasi tinggi seperti Tanah Sareal mengalami tekanan akibat kepadatan penduduk dan tingginya kebutuhan lahan, sedangkan wilayah selatan cenderung memiliki permukiman lama dengan kondisi fisik bangunan yang menurun dan minim perbaikan. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketimpangan kualitas hunian antar wilayah yang perlu diatasi melalui strategi pembangunan perumahan berkelanjutan dan inklusif.

Kehadiran rumah tidak layak huni tidak hanya merefleksikan persoalan fisik bangunan, tetapi juga menjadi indikator kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Bogor. Penanganan RTLH harus dilihat sebagai bagian integral dari upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup warga. Oleh karena itu, program rehabilitasi rumah perlu diperkuat melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif dan berkeadilan, Kota Bogor dapat mewujudkan lingkungan hunian yang lebih manusiawi, sehat, dan layak bagi seluruh warganya.

Tabel 2.43 Profil Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Bogor Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah RTLH (Unit)	Keterangan
1	Bogor Selatan	10.559	Kecamatan dengan jumlah RTLH tertinggi; banyak permukiman lama dan padat penduduk dengan bangunan semi permanen.
2	Tanah Sareal	9.198	Wilayah urban dengan tekanan kepadatan tinggi; keterbatasan lahan membuat banyak rumah tidak memenuhi standar kelayakan.
3	Bogor Barat	1.875	Permukiman padat di kawasan perbatasan, banyak rumah berusia tua dan kurang perawatan.
4	Bogor Tengah	614	Sebagian besar berada di kawasan padat penduduk dan bantaran sungai.
5	Bogor Utara	1.000	Beberapa wilayah memiliki masalah sanitasi dan drainase yang mempengaruhi kelayakan hunian.
6	Bogor Timur	745	Jumlah terendah; wilayah relatif tertata namun masih terdapat rumah berstruktur lemah di area tertentu.
	Total	22.991	—

Sumber: Dokumen RP3KP Kota Bogor

Untuk Kawasan Kumuh, pada tahun 2024 total luas kawasan kumuh di Kota Bogor mencapai 391,95 hektar yang tersebar di seluruh wilayah

kota. Dari jumlah tersebut, kewenangan Kota Bogor memegang porsi terbesar yaitu 274,75 hektar (70,10 %), menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan permukiman terjadi pada skala lokal yang membutuhkan intervensi langsung pemerintah daerah. Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pusat sebesar 94,91 hektar. Sementara itu, kewenangan Provinsi sebesar 22,29 hektar.

Sebaran kawasan kumuh di Kota Bogor dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipologi utama: permukiman kumuh di pusat kota, di kawasan transisi (*urban fringe*), dan di pinggiran kota. Permukiman di pusat kota umumnya memiliki kepadatan bangunan sangat tinggi dengan pola ruang tidak beraturan, sedangkan kawasan transisi menunjukkan pertumbuhan permukiman yang cepat namun belum diimbangi dengan infrastruktur dasar. Sementara di wilayah pinggiran, kondisi kumuh muncul akibat keterbatasan akses prasarana dan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam memperbaiki kualitas rumah dan lingkungan.

Tabel 2.44 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Bogor Berdasarkan SK Kumuh Nomor 600.2.1/KEP.216-disperumkim/2024

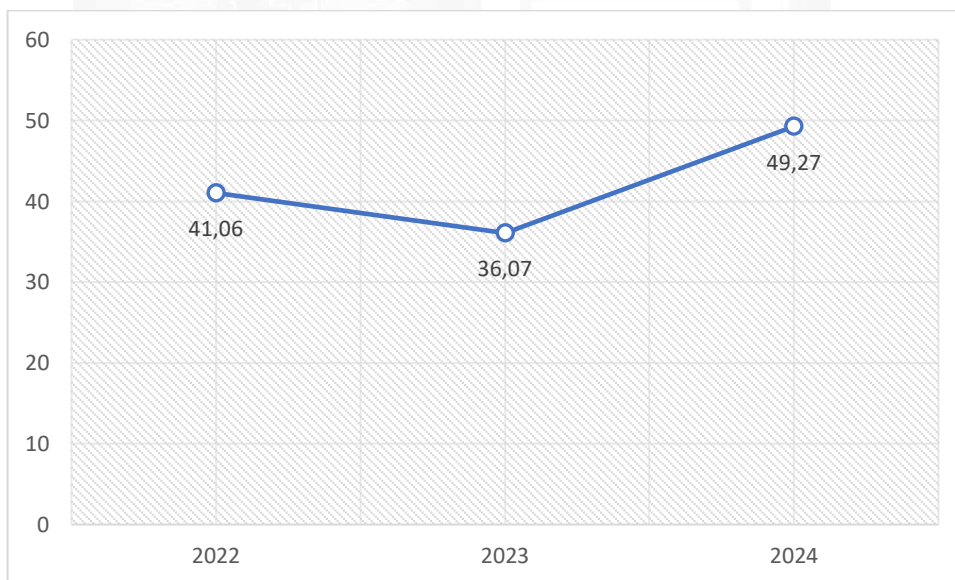
No	Kewenangan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Persentase (%)	Keterangan
1	Pusat	94,91	24,21	Terdapat di 4 (empat) kawasan yaitu kawasan pondok rumput, kawasan sindang rasa, kawasan kukupu, kawasan kampung kebon awi/indobaso
2	Provinsi	22,29	5,69	Terdapat di 2 (dua) kawasan yaitu kawasan gang mesjid di kelurahan Ciluar dan Kawasan Kampung Muara di Kelurahan Pasir Jaya
3	Kota	274,75	70,10	Terdapat di 97 kawasan yang tersebar di 6 Kecamatan dan 57 Kelurahan
	Total	391,95	10	

Sumber: SK Kumuh Nomor 600.2.1/KEP.216-disperumkim/2024

2.2.5. Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.5.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) meliputi seluruh pekerja yang memiliki hubungan kerja, baik formal maupun informal. Jamsostek menjangkau berbagai jenis pekerjaan, termasuk pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah (BPU) seperti pekerja informal dan pekerja sektor jasa konstruksi. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen perlindungan sosial yang adaptif, yang bertujuan memberikan perlindungan bagi pekerja. Pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dalam pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebagai upaya perluasan perlindungan sosial.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.34 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Bogor Tahun 2022-2024

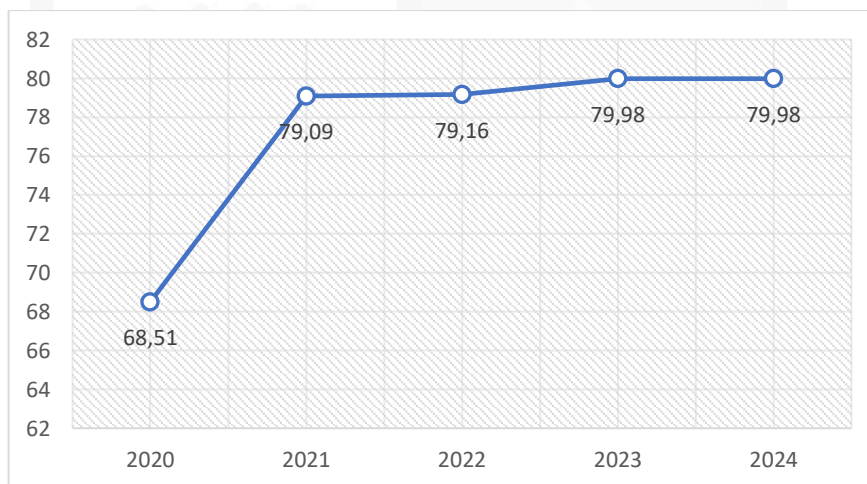
Grafik 2.34 menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bogor cukup fluktuatif, namun secara umum masih cukup rendah capaiannya dengan capaian tertinggi di tahun 2024 sebesar 49,27. Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bogor memerlukan pendekatan multi-

sektoral dan strategi yang terarah. Fokus utama adalah menysasar sektor-sektor yang cakupannya masih rendah, seperti pekerja informal dan UMKM, serta meningkatkan kesadaran dan kemudahan akses. Pemerintah Kota Bogor dapat menerbitkan Perda yang mewajibkan atau mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi UMKM dan pekerja informal di sektor-sektor tertentu. Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga dapat mengalokasikan dana subsidi iuran untuk kelompok pekerja rentan atau UMKM pemula sebagai stimulus awal kepesertaan.

2.2.6. Beragama Masalahat dan Berkebudayaan Maju

2.2.6.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei yang mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), juga dikenal sebagai Indeks Kerukunan Kota Bogor, menilai kerukunan, toleransi, dan kerja sama antar masyarakat di Kota Bogor. Survei ini diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan didasarkan pada tiga dimensi: kerja sama, toleransi, dan kesetaraan.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.35 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor Tahun 2020-2024

Secara umum, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Bogor dari tahun 2020 hingga 2024 (Grafik 2.35) menunjukkan peningkatan

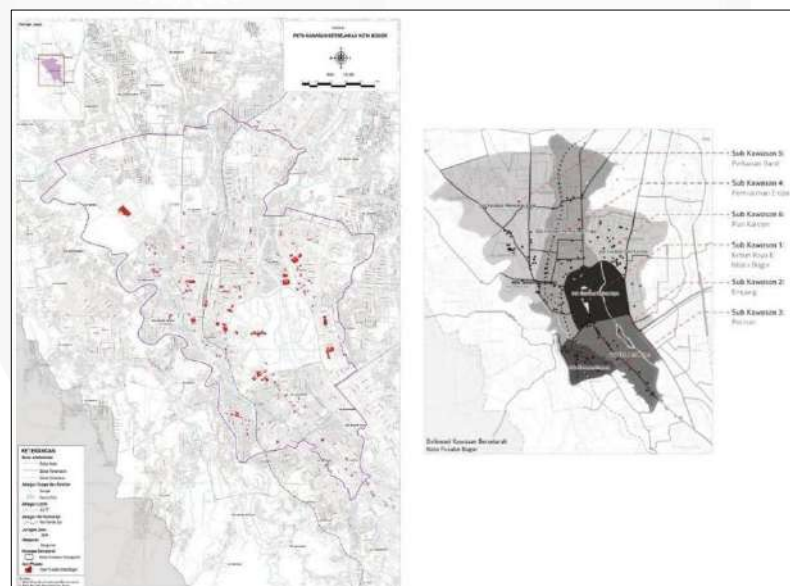
signifikan dari 68,51 pada tahun 2020 menjadi 79,09 pada tahun 2021. Setelah lonjakan tersebut, indeks tetap stabil dengan sedikit peningkatan ke 79,16 pada tahun 2022 dan 79,98 pada tahun 2023, yang kemudian bertahan hingga tahun 2024. Peningkatan drastis pada tahun 2021 mengindikasikan keberhasilan berbagai upaya dalam membangun toleransi dan keharmonisan antarumat beragama di Kota Bogor. Faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah daerah dalam membangun dialog lintas agama, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi, serta program sosial yang melibatkan berbagai komunitas keagamaan, kemungkinan besar menjadi pendorong utama tren positif.

Stabilitas indeks pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa Kota Bogor telah berhasil mempertahankan tingkat kerukunan yang tinggi. Namun, tantangan seperti potensi konflik sosial, penyebaran hoaks berbasis SARA, dan perbedaan pandangan keagamaan masih perlu terus dikelola dengan baik. Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat diharapkan terus bekerja sama dalam menjaga suasana harmonis demi menciptakan kehidupan sosial yang damai dan inklusif di Kota Bogor. Upaya menjaga Kota Bogor sebagai "Kota Toleran" diharapkan dapat terus dilanjutkan melalui kebijakan dan regulasi seperti Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Peraturan Daerah (Perda) yang berlandaskan kepemimpinan, toleransi, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama. Peningkatan nilai indeks kerukunan umat beragama menunjukkan semakin baiknya toleransi antar umat beragama di Kota Bogor.

2.2.6.2. Kebudayaan

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Cagar Budaya mengatur tentang pengelolaan cagar budaya di Kota Bogor yang terdiri dari Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya

karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Lebih spesifik Kota Bogor sebagai Kota Pusaka, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kota Bogor sebagai Kota Pusaka telah menjelaskan bahwa kepusakaan kota adalah perihal pusaka-pusaka kota dan hal-hal yang terkait yaitu karakter fisik ruang, kehidupan sosial budaya, serta kegiatan sosial ekonomi kota. Kota Pusaka adalah kota yang memiliki kualitas dan nilai budaya, kekentalan sejarah dan alam yang terkait erat dengan proses pembentukan kota atau bagian-bagian dari kota, berupa aset pusaka alam, budaya, saujana, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh yang berpijak kepada kearifan lokal yang mendorong kreativitas, inovasi, produktivitas, dan kualitas kotanya untuk kesejahteraan masyarakat. Kota Bogor sebagai Kota Pusaka dalam konteks ini meliputi Pusaka Alam, Pusaka Budaya dan Sejarah, serta Pusaka Saujana.



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Gambar 2.34 Peta Kawasan Bersejarah Kota Bogor

Pusaka alam (natural landscape) adalah bentukan alam yang memiliki karakter khas dan/atau unik yang harus dilihat sebagai

sumber daya alam tak tergantikan, baik menurut rupa/fisik serta fungsi ekologi, nilai dan maknanya dalam kehidupan sosial budaya dan/atau peran dalam kegiatan sosial ekonomi. Pusaka budaya (cultural heritage) adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang khas dan/atau unik dari lebih 500 (lima ratus) suku bangsa di Indonesia secara sendiri-sendiri sebagai kesatuan bangsa Indonesia dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya yang meliputi pusaka ragawi (berwujud) serta pusaka tak ragawi (tidak berwujud). Pusaka saujana (landscape heritage) adalah produk kreativitas manusia dalam mengubah bentang alam dalam waktu yang lama, sehingga didapatkan keseimbangan kehidupan antara alam dan manusia atau perpaduan antara pusaka alam berupa bentang alam dengan pusaka budaya yang menampilkan paduan serasi hubungan antara kegiatan manusia dengan proses alam yang terkait satu sama lainnya dan berlangsung sejak dulu hingga saat ini, sehingga membentuk sebuah panorama alam yang memuat nilai budaya serta bukti sejarah di dalamnya.

a) Pusaka Alam

Pusaka alam di Kota Bogor terdiri dari:

- 1) Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane, berikut sempadan dan kawasan sekitarnya

Kerajaan Pajajaran dikenal salah satunya yaitu dengan benteng alamnya berupa dua sungai besar Ciliwung dan Cisadane. Kedua sungai ini merupakan pusat peradaban ibukota kerajaan kala itu. Selain menjadi sumber kehidupan yang mensuplai air bagi kebutuhan sehari-hari, kedua sungai besar ini juga menjadi jalur transportasi yang menghubungkan Bogor dengan kawasan lainnya masa itu.



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Penataan Ruang
Gambar 2.35 Sungai Ciliwung yang melewati Kebun Raya Bogor

Daerah memiliki potensi Ruang Terbuka Hijau yang luas dengan adanya sempadan sungai Ciliwung dan Cisadane, namun pada kenyataannya sebagian sempadan ini telah beralih fungsi menjadi kawasan non hijau atau kawasan terbangun. Untuk mengembalikan fungsi sempadan yang seharusnya, maka ditetapkan kawasan sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane ini menjadi kawasan strategis. Penataan kawasan ini juga akan menjadi sumbangan besar bagi upaya meningkatkan luasan ruang terbuka hijau kota.

Kepentingan penetapan kawasan ini menjadi kawasan strategis lingkungan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. kawasan ini berfungsi sebagai kawasan lindung dengan jenis kawasan perlindungan setempat;
- b. kawasan ini berfungsi untuk perlindungan sumber daya air dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim mikro;
- d. kawasan rawan bencana alam longsor pada beberapa segmen tertentu.

Arahan pengembangan kawasan ini adalah penataan kawasan guna mengembalikan fungsi sempadan sungai dengan lebar dan

luasan sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengendalikan kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam dan di sekitar kawasan sempadan sungai.

- 2) Situ Gede dan Hutan Center for Foresty Researcch (CIFOR/Hutan Penelitian Dramaga) berikut kawasan sekitarnya

Kawasan Situ Gede dan Hutan CIFOR merupakan kawasan yang perlu dilindungi guna mempertahankan fungsi ekologis kawasannya. Penetapan kawasan ini sebagai kawasan strategis adalah upaya untuk mempertahankan fungsi ekologis dan keindahan kawasan dengan menyelaraskan pengembangan kawasan sekitarnya agar pembangunan yang berlangsung tidak merusak citra kawasan.



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Gambar 2.36 Kawasan Situ Gede

Kepentingan penetapan kawasan ini menjadi kawasan strategis lingkungan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. kawasan ini berfungsi sebagai kawasan lindung dengan jenis kawasan perlindungan setempat (sempadan situ) dan sebagai hutan kota (Hutan CIFOR);
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim mikro

Delineasi Situ Gede dan Hutan CIFOR serta kawasan sekitarnya yang secara administratif berada di sebagian Kelurahan Situgede Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.

Arahan pengembangan kawasan ini adalah penataan kawasan sekitar Situ Gede dan Hutan CIFOR agar selaras dengan fungsi dan tujuan keberadaan kedua obyek tersebut. Penataan lebih diarahkan kepada kepentingan konservasi lingkungan.

3) Pohon (Heritage Tree)

Pohon atau kelompok pohon tua yang memiliki nilai sejarah atau nilai penting yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, budaya, dan kepercayaan bagi masyarakat di suatu wilayah. Bogor memiliki banyak pohon yang dapat ditetapkan menjadi heritage tree di antaranya pohon-pohon cikal bakal yang memiliki nilai ilmu pengetahuan yang banyak terdapat di Kebun Raya Bogor, Pohon-pohon Kenari tepi jalan raya pos yang diintroduksi dan ditanam pada masa kolonial, Pohon Leci di Kebun Raya Bogor yang menjadi pohon pertama yang ditanam di sana. Pohon Sawit pertama di Kebun Raya Bogor yang pertama kali didatangkan di Asia kemudian disebarluaskan hingga saat ini menjadi komoditi yang penting, serta Pohon Aren, dan Pohon Tanjung yang menjadi ikon Kota Bogor.



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Gambar 2.37 Pohon (Heritage Tree) di area kebun raya

b) Pusaka Budaya Ragawi

Pusaka Budaya Ragawi meliputi Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. Bangunan Cagar Budaya berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan PM.26/PW.007/MKP/2007 tanggal 26 Maret 2007 dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011 - 2031 meliputi:

- 1) Istana Bogor di Jalan Ir. H. Juanda;
- 2) Istana Batu Tulis di Jalan Batu Tulis;
- 3) Gedung Karesidenan Bogor/Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 4;
- 4) Balai Kota Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10;
- 5) Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0606 Bogor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 33;
- 6) Markas Komando Resort Militer (Korem) 061/Surya Kencana di Jalan Merdeka Nomor 6;
- 7) Gedung Blenong/Badan Pertanahan Nasional Bogor di Jalan Jalak Harupat;
- 8) Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) Regional II Bogor di Jalan Pangrango Nomor 34;
- 9) Balai Penelitian Bio Teknologi Perkebunan Republik Indonesia di Jalan Taman Kencana;
- 10) Kantor Pos Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 5;
- 11) Museum Zoologi Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 9;
- 12) Monumen dan Museum Peta di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 35;
- 13) Makam Raden Saleh di Jalan Pahlawan Gang Raden Saleh;
- 14) Gereja Kathedral di Jalan Kapten Muslihat Nomor 22;
- 15) Gereja Zebaoth di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 3;

- 16) Kapel Regina Pacis Kompleks Sekolah Regina Pacis di Jalan Ir.H. Juanda;
- 17) Gedung SMA YZA 2 Bogor di Jalan Semeru Nomor 41;
- 18) Gedung SMP Negeri 2 Bogor di Jalan Gedong Sawah IV Nomor 9;
- 19) Gedung SMP-SMA Negeri 1 Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 16;
- 20) Stasiun Kereta Api Bogor di Jalan Nyi Raja Permas Nomor 1;
- 21) Rumah Sakit Salak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8;
- 22) Rumah Panti Asuhan Bina Harapan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7;
- 23) Hotel Salak di Jalan Ir. H. Juanda;
- 24) Mesjid Empang di Jalan Empang;
- 25) Kelenteng Dhanagun/Hok Tek Bio di Jalan Suryakencana Nomor 1;
- 26) Vihara Mahabrahma di Jalan Siliwangi;
- 27) Lembaga Pemasyarakatan Paledang di Jalan Paledang

Struktur Cagar Budaya meliputi:

- 1) Jembatan Merah;
- 2) Jembatan Sempur;
- 3) Jembatan M.A. Salmun;
- 4) Jembatan Otto Iskandardinata;
- 5) Prasasti Batu Tulis;
- 6) Benteng/Bunker Gumati;
- 7) Makam Raden Saleh S. Boestaman;
- 8) Taman Kencana (Baron van Imhoff Plein);
- 9) Taman Air Mancur (Witte Pall) ;
- 10) Alun-alun Empang.

Untuk Kawasan Cagar Budaya atau yang disebut Kawasan Pusaka yakni Kawasan Istana dan Kebun Raya Bogor, Kawasan Permukiman

Eropa, Kawasan Karsten-Plan, Kawasan Suryakencana, Kawasan Empang, dan Kawasan Peluasan Barat.

1) Kawasan Istana dan Kebun Raya Bogor

Kawasan kebun raya diketahui sebagai Samida atau Hutan Lindung pada masa Kerajaan Pakuan Pajajaran. Kemudian Kebun Raya Bogor pada dasarnya merupakan pusat dari Kota Bogor sejak zaman ditemukan kembali pada tahun 1687 hingga saat ini. Sejak tahun 1600-an, kawasan kebun raya selalu terpilih menjadi lokasi pusat pemerintahan. Bangunan yang berdiri di lokasi istana saat ini pun sudah mengalami renovasi beberapa kali. Awalnya berdiri istana pada tahun 1745, kemudian sebuah benteng militer di depan Istana. Bangunan tersebut kemudian mengalami kehancuran dan pembangunan kembali selama beberapa kali. Selain bangunan, kawasan hijau di sekelilingnya pun mempunyai nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Diawali dengan dibuatnya taman dengan style English Garden di sekeliling Istana oleh Letnan Jenderal Stamford Raffles.

Dengan adanya pusat pemerintahan di tengah area kebun raya, maka seiring dengan waktu banyak bangunan pemerintahan di masa kolonial dibangun mengelilingi di area Kebun Raya diantaranya adalah Istana Bogor, Gereja Zebaoth, kantor dan instalasi teknis Kebun Raya, Kantor Pos (eks Gereja Simultan), Museum Zoologi, Balai Besar Industri Kimia, Kantor Kehutanan, Lady Raffles Memorial, JJ. Smith Memorial, Treub Laboratory dan sebagainya.

Kebun raya merupakan aset daerah yang juga merupakan aset dunia sehingga perlu dipertahankan kelestarian lingkungannya dengan dukungan kawasan sekitarnya. Pengembangan kawasan sekitar akan mempengaruhi citra dan kondisi kebun raya secara tidak langsung, hal ini menjadi pertimbangan mengapa kawasan ini dijadikan salah satu kawasan strategis kota.

Kepentingan yang berada dalam penetapan kawasan ini menjadi kawasan strategis lingkungan yaitu sebagai:

- a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem dan flora/fauna yang perlu dilestarikan;
- c. perlindungan terhadap keseimbangan iklim mikro.

Delineasi kawasan strategis ini adalah sekitar Kebun Raya dan Istana Bogor, Balai Kota, Hotel Salak, Gedung Karesidenan Bogor, Sekolah Regina Pacis, SMA 1, SMP 1, Gedung Herbarium Bogoriense, Gedung Arsip ANRI, Klenteng Hok Tek Bio (Vihara Dhanagun) dan Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB).

Arahan pengelolaan kawasan ini adalah mempertahankan, melindungi, menata, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam dan sekitar kawasan tersebut. Secara administratif, kawasan Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor ini meliputi sebagian Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.

2) Kawasan Permukiman Eropa

Sub Kawasan Permukiman Eropa terdiri dari Kawasan Militer, Stasiun Kereta Api, Kawasan Bangunan Publik (Single Detached Building), dan Area Permukiman. Kawasan Militer/Kawasan Permukiman Eropa terletak di sepanjang Jalan Bataviaweg atau Jalan Jenderal Sudirman.

Kawasan militer ini ditandai dengan dibangunnya kamp militer pada tahun 1745. Bangunan militer saat ini masih digunakan sebagai kompleks Museum PETA. Kamp militer ini berperan sebagai penjaga perbatasan, mengingat Jalan Jenderal Sudirman atau Batavia Weg merupakan pintu masuk menuju kota. Di sepanjang Jalan Sudirman juga dibangun Rumah Sakit Militer yang sekarang menjadi R.S. Salak. Selain kedua bangunan

tersebut, di ujung Jalan Jenderal Sudirman, berhadapan dengan Pabaton, tepatnya di depan Istana Bogor pernah dibangun sebuah benteng pertahanan.

Secara administratif kawasan ini meliputi Kelurahan Pabaton, Kelurahan Cibogor, sebagian Kelurahan Paledang, sebagian Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, serta sebagian Kelurahan Tanah Sareal di Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

3) Kawasan Karsten Plan

Perluasan Kota ke arah Timur pada tahun 1917-an dirancang oleh Ir. Thomas Karsten. Pembangunan perumahan dimulai sekitar tahun 1920-an. Kawasan permukiman tersebut dibangun untuk dijadikan rumah-rumah peneliti Belanda, pegawai pemerintah atau rumah bagi penguasa kolonial.

Bangunan-bangunan di Kedung Halang diletakkan dalam suatu kompleks dengan pola jalan yang teratur, dengan taman di beberapa sudut permukiman. Salah satu ruang terbuka yang dikenal dengan nama Vontland dikenal juga dengan nama Plant Zone dan sekarang orang menyebutnya Taman Kencana. Pada masa pendudukan Jepang, perumahan Kedung Halang/Sempur ini menjadi penjara atau ruang tahanan tawanan Jepang, umumnya wanita dan anak-anak Indo Belanda, salah satunya sebuah rumah di Jalan Papandayan (Rumah Corrie). Saat itu pemerintah memiliki kebijakan untuk menyewakan rumah-rumah di sini pada siapa yang mampu membayar. Dari sinilah proses hak milik dilakukan. Salah satunya kebijakan wajib membeli rumah bagi para penyewa. Tak heran dari orang Belanda, Tionghoa, hingga orang lokal memiliki sejarah tinggal di tempat ini.

Keberadaan kawasan ini menjadi daya tarik daerah, di mana pada kawasan ini mulai berkembang aktivitas lain selain hunian yaitu jasa kuliner dan akomodasi. Kawasan ini menjadi salah satu daya tarik wisata daerah. Untuk mempertahankan dan mengendalikan

perkembangan kawasan, maka ditetapkan kawasan ini sebagai kawasan strategis.

Kepentingan penetapan kawasan ini menjadi kawasan strategis budaya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. pada kawasan ini terdapat bangunan yang merupakan cagar budaya yang perlu dilestarikan.
- b. kawasan ini merupakan lingkungan perumahan khas yang perlu dilestarikan dan dapat menjadi contoh pengembangan perumahan di wilayah kota lainnya.

Kawasan Karsten Plan ini secara administratif berada di Kelurahan Babakan sebagian Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah. Arah pengembangan kawasan ini adalah penataan dan pengendalian perkembangan, sehingga kawasan heritage ini dapat dipertahankan keberadaannya meskipun terjadi beberapa perubahan fungsi/aktivitas dalam bangunan.

4) Kawasan Suryakencana

Kawasan pecinan, terletak tegak lurus dengan Kebun Raya Bogor bersimpangan dengan Jalan Otto Iskandardinata dan Jalan Ir. H. Juanda di sepanjang jalan Grote Post Weg. Rumah-rumah pemukiman etnis Tionghoa berfungsi sebagai pusat perekonomian Buitenzorg/Bogor. Jalan ini dibuat oleh Gubernur Jendral Daendels pada tahun 1808 terkenal dengan Post Weg atau Jalan Pos. Jalan Pos dimulai dari Anyer jaraknya 1.000 (seribu) kilometer dan berakhir di Panarukan. Kemudian pada tahun 1905 Pemerintah Kota Bogor mengubah nama jalan ini menjadi Jalan Handelstraat, pada zaman kemerdekaan diubah menjadi Jalan Perniagaan, kemudian Jalan Suryakencana diresmikan Pemerintah Bogor pada tahun 1970-an.

Ruas jalan dan wilayah Jalan Suryakencana/Handel Straat sekitarnya merupakan basis kegiatan etnis Tionghoa yang juga menjadi pusat kegiatan ekonomi di Bogor sejak awal tahun 1800.

Rumah-rumah yang berderet di sepanjang Jalan Suryakencana merupakan rumah-rumah toko yang memiliki muka rumah relatif sempit, tapi memanjang ke bagian belakang. Arsitektur Cina yang banyak terdapat di sepanjang Jalan Suryakencana masih dapat terlihat jelas, meskipun sudah banyak pula yang rusak dan tidak terawat.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa, tingginya arus pergerakan kendaraan, serta munculnya aktivitas lain seperti PKL, tanpa disadari kawasan ini mengalami penurunan kualitas lingkungan. Di samping permasalahan kemacetan dan ketidakteraturan, juga kemunduran dalam hal kualitas bangunan lama yang tidak dijaga. Untuk mengembalikan kualitas lingkungan kawasan dan citra pusat kota lama, maka ditetapkan kawasan ini sebagai kawasan strategis kota.

Kepentingan penetapan kawasan ini menjadi kawasan strategis budaya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. kawasan yang memiliki nilai sejarah dan kawasan yang terdapat budaya dan adat istiadat yang perlu dilestarikan;
- b. terdapat beberapa aset yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Kawasan ini secara administratif berada di Kelurahan Babakan Pasar dan Kelurahan Gudang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Adapun arahan pengembangan kawasan ini adalah penataan lingkungan dan bangunan dengan mengembalikan kualitas lingkungan, citra kawasan, penataan fungsi bangunan, dan mempertahankan nilai heritage kawasan, serta mempertahankan fungsi kawasan sebagai pusat perekonomian dan kawasan wisata.

5) Kawasan Empang

Kawasan Empang/Soekahati pertama kali disebutkan sebagai alun-alun luar kerajaan Pakuan-Pajajaran. Kemudian pada masa kolonial awal wilayah ini menjadi rumah dari Demang Kabupaten

Kampung Baru. Warga keturunan arab mulai menempati empang sejak tahun 1800-an. Mesjid An-Nur atau Mesjid Keramat Empang dibangun pada tahun 1815, kemudian setelah adanya Wijkenstelsel yaitu pembagian zona sesuai dengan rasnya, wilayah Empang banyak ditempati oleh warga etnis Arab. Warga Arab yang datang ke Buitenzorg adalah keturunan Arab yang berasal dari Yamman Hadhramaut.

Habib Abdullah bin Mukhsin Alathas adalah tokoh Arab besar yang menjadi panutan dalam ilmu agama. Beliau tercatat sebagai keturunan Nabi yang ke-36. Setelah beliau meninggal , beliau dimakamkan di Mesjid Empang beserta keempat putranya. Sampai saat ini pun masih banyak orang yang berziarah ke makam beliau.

Selain peninggalan yang berupa aset ragawi, warga Kampung Arab Empang juga memiliki aset pusaka non ragawi, misalnya dengan kehidupan sosial budaya warga etnis Arab di Empang. Kebudayaan warga etnis Arab tersebut dapat terlihat pada saat diadakannya upacara-upacara keagamaan seperti peringatan tanggal-tanggal tertentu di Bulan Ramadhan dengan mengadakan buka puasa bersama. Pada saat itu, hampir semua pintu rumah warga dibuka dan siapa saja dipersilakan masuk untuk ikut berpuka puasa bersama di rumah mereka. Mereka juga menyediakan makanan-makanan khas Arab di rumah-rumah mereka. Yang dimaksud kawasan Empang meliputi wilayah administrasi Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.

6) Kawasan Perluasan Barat

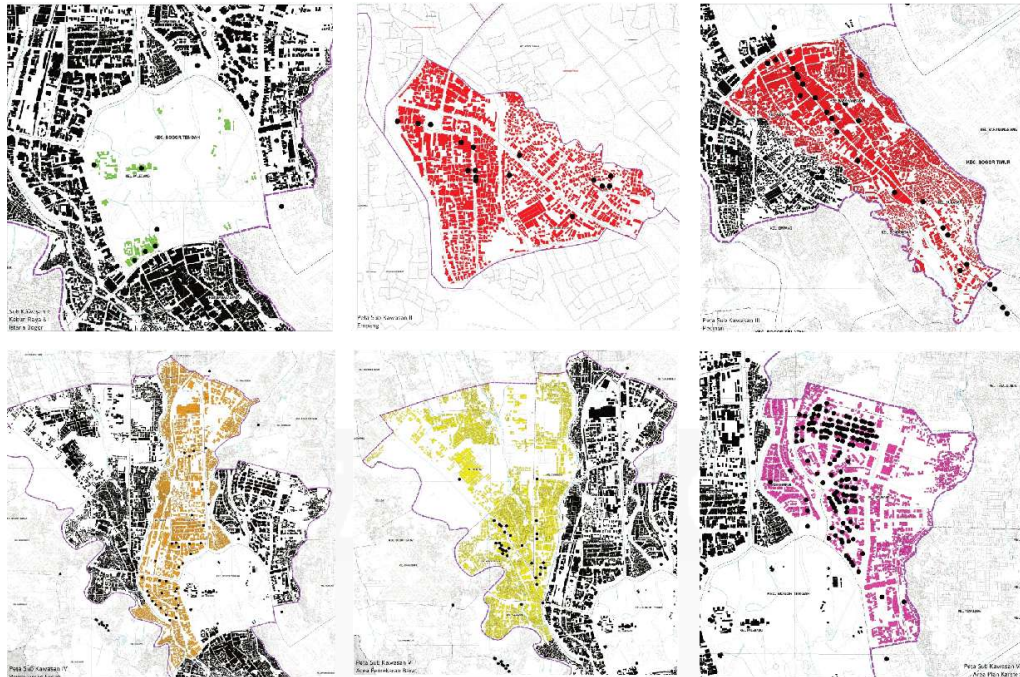
Perluasan Buitenzorg ke arah Barat dimulai sejak tahun 1800-an. Meskipun begitu, setelah jalur kereta api dibuka pada tahun 1873, perluasan area kota ke arah Barat menjadi lebih terlihat. Fasilitas publik dibangun di sepanjang Jalan utama seperti Jalan Kapten

Muslihat, Paledang. Perkembangan ke arah Barat Daya adalah pembukaan lahan untuk perkebunan.

Pada tahun 1845, pemukiman di jalan Tjikeumeuh Kota Paris diketahui sudah berdiri, meskipun begitu perluasan permukiman di sebelah barat hampir bersamaan dengan perluasan permukiman di sebelah timur (Kedoeng Halang/Sempur). Inisiasi kawasan ini kemudian diperluas pada tahun 1918 yang diperuntukan bagi kaum Eropa.

Perluasan area permukiman di sebelah barat bernama de Staate Van Paris atau Kota Paris, karena area perancangannya mengambil lokasi dengan struktur pemandangan alam yang indah, berkiblat pada pembangunan kota di Perancis. Awal pembangunannya hanya 48 (empat puluh delapan) rumah untuk pegawai dan militer Eropa, kemudian berkembang untuk semua pegawai bangsa Eropa. Pada masa pendudukan Jepang (1942) kawasan Kota Paris menjadi lokasi tahanan (Rumah Tahanan) tawanan Jepang khususnya wanita dan anak-anak.

Kawasan Perluasan Barat ini berada di kawasan administratif mencakup Kelurahan Panaragan, Kelurahan Kebon Kalapa Kelurahan Ciwaringin di Kecamatan Bogor Tengah, serta Kelurahan Menteng di Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Untuk jenis cagar budaya yang belum disebutkan akan ditetapkan oleh Keputusan Walikota Bogor.



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Gambar 2.38 Peta Sub Kawasan Kota Bogor

c) Pusaka Saujana

Pusaka saujana di daerah terdiri dari saujana yang berbentuk koridor jalan (*streetscape*), saujana yang berbentuk koridor sungai (*riverscape*), saujana yang berbentuk koridor kereta api (*trainscape*), saujana yang terbentuk karena proses dan pengaruh budaya dan/atau sejarah (*cultural and historic landscape*), dan saujana yang membentuk suatu tatanan kota (*urbanscape*). Pusaka saujana di daerah meliputi:

- 1) Kawasan sepanjang Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos (Groote Post Weg) merupakan jalan bersejarah yang menjadi saksi bisu meninggalnya ribuan orang Jawa yang melakukan kerja paksa dalam pembangunan jalan sepanjang sekitar 1000 (seribu) km yang memakan waktu hanya 1 (satu) tahun. Pembangunannya dipimpin oleh Herman Willem Daendels yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda merangkap sebagai panglima tertinggi angkatan darat dan laut ditujukan untuk membuka akses militer terutama dalam melakukan perpindahan

pasukan ketika menjaga serangan Inggris. Lintasan Groote Post Weg di Bogor melalui Jalan Raya Cibinong, menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Sudirman (Pabaton), Jalan Ir H. Juanda (*Groote Weg*) kemudian menuju Jalan Suryakencana (*Handels Straat*), diteruskan hingga Tajur dan Cipanas. Disepanjang Jalan Groote Post Weg berdiri bangunan-bangunan pusaka yang memiliki banyak cerita dan fungsi di masa lalu dan membentuk lanskap budaya yang dapat diceritakan secara runut.

- 2) Jalan Suryakencana-Siliwangi. Jalan yang dimasa lalu diberi nama *Handelstraat* ini sesuai dengan namanya merupakan jalan awal keberadaan kawasan perniagaan di Kota Bogor yang dibangun pada masa pendudukan Hindia Belanda. Kawasan ini berada di sekitar Pasar Bogor, Jalan Roda, Jalan Suryakencana, dan sekitarnya. Sejak awal perkembangan kawasan ini diperuntukan sebagai kawasan dagang bagi kaum pribumi dan etnis Tionghoa. Pada masanya kawasan ini menjadi identik sebagai permukiman etnis Tionghoa, masa itu tepatnya tahun 1835 berlaku kebijakan pembagian wilayah untuk setiap etnis yang berada di Bogor oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sampai sekarang kawasan ini tidak berubah, fungsinya masih menjadi kawasan perdagangan.
- 3) Jalan Semeru.
- 4) Koridor Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane.
- 5) Kompleks Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor. Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor seperti *dwi tunggal*. Meskipun kini pengelolaannya dilakukan oleh institusi yang berbeda, namun kedua monumen bersejarah ini memiliki kisah panjang yang tidak dapat berdiri sendiri dan saling terkait satu dengan lainnya. Embrio Kebun Raya Bogor lahir ketika Thomas Stamford Raffles menginisiasi taman luas di pekarangan Istana Bogor (*Buitenzorg* kala itu) yang didesain mirip dengan Kew Garden. Dari keduanya

lahir berbagai institusi, karya seni dan ilmiah, serta kebudayaan yang hingga kini hidup dan dilestarikan. Keduanya bagai ilmu pengetahuan dan seni yang diramu menjadi satu dengan lanskap budaya yang saling mengisi.

- 6) Panorama Gunung Salak dan Gunung Gede–Pangrango. Daerah memiliki gambar Gunung Salak sebagai salah satu pelengkap logo Kota. Hal ini sudah cukup menjelaskan bagaimana panorama Gunung Salak menjadi salah satu keunggulan. Panorama ini juga yang menjadikan Kota Bogor pernah dijuluki sebagai kota terindah di Jawa. Keindahan panorama Gunung Salak dan Gunung Pangrango telah diakui menjadi identitas daerah, di mana seluruh masyarakat yang tinggal dan yang berkunjung dapat menikmati panorama ini dari sudut manapun di pusat kota.
- 7) Jalur kereta api dengan stasiun utama dan stasiun kecil.
- 8) Permukiman Kolonial Sempur dan sekitarnya.
- 9) Permukiman Kota Paris dan sekitarnya.
- 10) Koridor Tanjakan Empang hingga Alun-alun Empang.
- 11) Kompleks Pemakaman Astana Gede.



Koridor Jalan
Sudirman 1870



Kawasan
Suryakencana



Koridor Sungai
Ciliwung dan
Sungai Cisadane



Gunung Salak

Peron Stasiun
Buitenzorg sebelum
Tahun 1904Kawasan Kebun
Raya dan
Perumahan Sempur
Tahun 1946

Kota Paris

Alun-Alun Empang
tahun 1880






Astana Gede







Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Penataan Ruang







Gambar 2.39 Pusaka Saujana Kota Bogor







Dalam konteks kebudayaan, Kota Bogor selain sebagai Kota Pusaka juga memiliki Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan. Berdasarkan data dari Bapperida Kota Bogor tahun 2025, Cagar Budaya yang sudah ditetapkan dan dilestarikan di Kota Bogor sejumlah 34 buah (Tabel 2.45) dari Objek Diduga Cagar Budaya di Kota Bogor yang ada sebanyak 485 buah. Sementara itu, untuk Warisan Budaya Tak Benda di Kota Bogor yang sudah ditetapkan dan dilestarikan ada sebanyak 2 buah dari usulan Kota Bogor sebanyak 25 buah (Tabel 2.46).







Tabel 2.45 Cagar Budaya di Kota Bogor yang Sudah Ditetapkan dan Dilestarikan






No	Kategori	Nama	Alamat			SK. Penetapan	SK. Bupati / Walikota	Dokumentasi
			Jalan, RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan			
1	BG	Balaikota Bogor	Jl. Ir. H. Juanda No.10 Bogor	Kelurahan Patabon	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	
2	BG	Gedung Karesidenan	Jl. Ir. H. Juanda Bogor	Kelurahan Patabon	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	
3	BG	Markas Kodim 0606	Jl. Jend. Sudirman No.33 Bogor	Kelurahan Patabon	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	
4	BG	Markas Korem 061 / Surya Kencana	Jl. Merdeka No.64, RT.04/RW.03	Kelurahan Ciwaringin	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	
5	BG	Gedung Blenong / Badan Pertanahan Nasional Bogor	Jalan Salak No. 2 Bogor Kecamatan Bogor Tengah	Kelurahan Sempur	Kelurahan Sempur	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	

No	Kategori	Nama	Alamat			SK. Penetapan	SK. Bupati / Walikota	Dokumentasi
			Jalan, RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan			
6	BG	Gedung RRI Regional II Bogor	Jalan Pangrango 34 Bogor	Kelurahan Sempur	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	
7	BG	Balai Penelitian Bio Teknologi Perkebunan Indonesia	Jalan Taman Kencana No. 1 Bogor	Kelurahan Sempur	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	
8	BG	Kantor Pos Bogor	Jalan Ir.H.Juanda No. 5 Bogor	Kelurahan Paledang	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	
9	BG	Lembaga Permayarakatan Paledang	Jalan Paledang No. 2 Bogor	Kelurahan Paledang	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	
10	BG	Museum Zoologi Bogor	Jl. Ir. H. Juanda No.9 Bogor	Kelurahan Paledang	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	
11	BG	Monumen dan Museum PETA	Jl. Jend. Sudirman No.35 Bogor	Kelurahan Pabaton	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	

No	Kategori	Nama	Alamat			SK. Penetapan	SK. Bupati / Walikota	Dokumentasi
			Jalan, RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan			
12	BG	Gedung SMA YZA / Sekolah YZA 2 Bogor	Jalan Dr. Semeru No. 59 Bogor	Kelurahan Kebon Kelapa	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	
13	BG	Gedung SMPN 2 Bogor	Jl. Gedong Sawah IV No. 9 Bogor	Kelurahan Pabaton	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	
14	BG	Gedung SMPN 1 Bogor	Jl. Ir. H. Juanda No.16	Kelurahan Paledang	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	
15	BG	Stasiun Kereta Api Bogor	Jl. Kapten Muslihat Bogor	Kelurahan Paledang	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	
16	BG	Rumah Sakit Salak	Jl. Jend. Sudirman No.8	Kelurahan Paledang	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	
17	BG	Rumah Panti Asuhan Bina Harapan	Jl. Jend. Sudirman No.7 Bogor	Kelurahan Pabaton	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	

No	Kategori	Nama	Alamat			SK. Penetapan	SK. Bupati / Walikota	Dokumentasi
			Jalan, RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan			
18	BG	Hotel Salak	Jl. Ir. H. Juanda No.8 Bogor	Kelurahan Pabaton	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	
19	ST	Makam Raden Saleh	Jalan Pahlawan, Gang Raden Saleh, Kampung Gede	Kelurahan Empang	Kecamatan Bogor Selatan	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	-	
20	BG	Gereja Kathedral	Jl. Kapten Muslihat No.22	Kelurahan Paledang	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	Keputusan Walikota Bogor No.430/45-177 Tahun 2020 (25 Februari 2024)	
21	BG	Gereja Zebaoth	Jl. Ir. H. Juanda No.3 Bogor	Kelurahan Pale dang	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)	Keputusan Walikota Bogor No.430/45-178 Tahun 2020 (25 Februari 2024)	
22	BG	Komplek Kapel Regina Pacis	Jl. Ir. H. Juanda No.2 Bogor	Kelurahan Pab aton	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemenbudpar No.26/PW.007/MKP/2007 (26 Maret 2007)		
23	BG	Vihara Mahacetya Dhanagun	Jl. Surya Kencana	Kel. Babakan Pasar	Kecamatan Bogor Tengah	Surat Penetapan Kemendikbud No. 133/M/1998 (16 Juni 1998)	-	

No	Kategori	Nama	Alamat			SK. Penetapan	SK. Bupati / Walikota	Dokumentasi
			Jalan, RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan			
24	SI	Prasasti Batutulis	Jl. Batutulis No.54	Kelurahan Batutulis	Kecamatan Bogor Selatan	Surat Penetapan Kemendikbud KM.08/PW.007/MKP/2004 (3 Maret 2004) Kemendikbud No. 236/C.1/S/ 1998 (1 April 1998)	Keputusan Walikota Bogor No.400.6/Kep.108-Disparbud/ 2024 Tahun 2024 (25 Maret 2024)	
25	ST	Purwakalih	Jl. Lawang Gintung No. 11 Bogor	Kelurahan Batutulis	Kecamatan Bogor Selatan	Surat Penetapan Kemendikbud KM.08/PW.007/MKP/2004 (3 Maret 2004)	Keputusan Walikota Bogor No.400.6/Kep.109-Disparbud/ 2024 Tahun 2024 (25 Maret 2024)	
26	BG	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor	Jl. Ir. H. Juanda No.64	Kelurahan Paledang	Kecamatan Bogor Tengah		Keputusan Walikota Bogor No.430.45-526 Tahun 2020 (24 Juli 2020)	
27	BG	Museum Tanah dan Pertanian (Balai Penelitian Tanah)	Jl. Ir. H. Juanda No.64 Bogor	KelurahanPale dang	Kecamatan Bogor Tengah		Keputusan Walikota Bogor No.430.45-526 Tahun 2020 (24 Juli 2020)	
28	BG	Bangunan Balai Besar Industri Agro	Jl. Ir. H. Juanda No.11 Bogor	Kelurahan Gudang	Kecamatan Bogor Tengah	-	Keputusan Walikota Bogor No.430/45-179 Tahun 2020 (25 Februari 2020)	
29	BG	Guest House Nusa Indah / Bangunan Bekas Rumah Dinas Direktur Kebun Raya Bogor / Hotel Merchior	Kebun Raya Bogor	Kelurahan Paledang	Kecamatan Bogor Tengah	-	Keputusan Walikota Bogor No.430/45-667 Tahun 2020 (10 September 2020)	

No	Kategori	Nama	Alamat			SK. Penetapan	SK. Bupati / Walikota	Dokumentasi
			Jalan, RT/RW	Desa / Kelurahan	Kecamatan			
30	BG	Bangunan Laboratorium Treub Kebun Raya Bogor	Kebun Raya Bogor	Kelurahan Paledang	Kecamatan Bogor Tengah	-	Keputusan Walikota Bogor No.430/45-668 Tahun 2020 (10 September 2020)	
31	ST	Komplek Makam Belanda (KERKHOF)	Kebun Raya Bogor	Kelurahan Paledang	Kecamatan Bogor Tengah	-	Keputusan Walikota Bogor No.430/45-669 Tahun 2020 (10 September 2020)	
32	KW	Penetapan satuan ruang geografi Kebun Raya Bogor sebagai Kawasan Cagar Budaya	Kebun Raya Bogor	Kelurahan Paledang	Kecamatan Bogor Tengah	-	Keputusan Walikota Bogor No.430/45-674 Tahun 2020 (11 September 2020)	
33	KW	Penetapan Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor Sebagai Bangunan Cagar Budaya	batu	Kelurahan Paledang	Kecamatan Bogor Tengah	-	Surat Penetapan Wali Kota Bogor No. 430/Kep.104-Disparbud/2023 (7 Maret 2023)	
34	BD	Tugu Lady Raffles Kecamatan Bogor Tengah	Jl. Ir. H. Juanda	Kelurahan Paledang	Kecamatan Bogor Tengah	-	-	

Tabel 2.46

Warisan Budaya Tak Benda di Kota Bogor yang Sudah Ditetapkan dan Dilestarikan serta yang Sedang Diusulkan

NO	NAMA KARYA BUDAYA	DOMAIN	LOKASI/ ALAMAT KARYA BUDAYA	MAESTRO/PELAKU KARYA BUDAYA	DESKRIPSI SINGKAT KARYA BUDAYA	KETERANGAN
1	Bir Kotjok	Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir/arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/minuman tradisional, mda transportasi tradisional	Jl. Surya Kencana – Kota Bogor		Bir Kotjok salah satu minuman tradisional khas bogor yang sudah jarang di jumpai, minuman ini terbuat dari olahan jahe, cengkeh, kayu manis, gula pasir, gula aren dan sudah terkenal sejak tahun 1965 Bir Kotjok ini berhasiat mengobati masuk angin, menghilangkan pegal-pegal dan menghangatkan badan	Sudah masuk daftar WBTB Tingkat Provinsi, sedang di ajukan ke Tingkat Nasional
2	Rengkong Hatong	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial, upacara tradisional	Bogor Selatan, Kelurahan Mulyaharja	Bapak Mahat (alm), Bapak Oma	Rengkong Hatong adalah sebagai sarana upacara pesta panen untuk menghormati Dewi Sri	
3	Kopi Liong	Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir/arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/minuman tradisional, mda transportasi tradisional	Empang			
4	Kopi bah sipit	Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir/arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional,	Empang		Kopi bah sipit adalah minuman yang berasal dari biji kopi asli yang ada di kota Bogor yang di rajik sedemikian rupa sehingga mempunyai ciri khas nya	

NO	NAMA KARYA BUDAYA	DOMAIN	LOKASI/ ALAMAT KARYA BUDAYA	MAESTRO/PELAKU KARYA BUDAYA	DESKRIPSI SINGKAT KARYA BUDAYA	KETERANGAN
		makanan/minuman tradisional, mda transportasi tradisional				
5	Perguruan Silat Pajajaran	Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir/arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/minuman tradisional, mda transportasi tradisional	Jl. Baru – Kota Bogor		Keterampilan Ilmu Bela diri	
6	Perguruan silat Sera	Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir/arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/minuman tradisional, mda transportasi tradisional	Kota Bogor	Abah Sera (ada ahli warisnya)	Keterampilan Ilmu Bela diri	
7	Laksa	Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir/arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/minuman tradisional, mda transportasi tradisional	Jl. Suryakencana Gg. Aut, Kota Bogor	mang wahyu	Makanan ciri khas Kota Bogor, Laksa bogor berbeda dengan laksa betawi, meskipun warna kuahnya sama-sama kuning menyolok.	
8	Doclang	Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir/arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/minuman tradisional, mda transportasi tradisional	Merdeka- Jembatan Merah, Kota Bogor	Pak Aos	Makanan khas bogor ini terdiri dari lontong yang dibungkus dari daun patat, tahu, telur rebus, dan kerupuk	sudah masuk menjadi WBTB tingkat Nasional tahun 2023 dari Kota Bogor
9	Mie Kocok	Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis,	Jl. Semeru - Mawar, Kota Bogor	Mie kocok mawar	Makanan khas Bogor yang terdiri dari mie dan kuah	

NO	NAMA KARYA BUDAYA	DOMAIN	LOKASI/ ALAMAT KARYA BUDAYA	MAESTRO/PELAKU KARYA BUDAYA	DESKRIPSI SINGKAT KARYA BUDAYA	KETERANGAN
		seni pahat/ukir/arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/minuman tradisional, mda transportasi tradisional			kaldu sapi, irisan kikil, taughe, bakso dan jeruk nipis	
10	Minuman Pala	Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir/arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/minuman tradisional, mda transportasi tradisional	Surya Kencana		Minuman Khas Bogor	
11	Cungkring	Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir/arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/minuman tradisional, mda transportasi tradisional	Surya kencana		Makanan Khas Bogor	
12	Sajak Pantun Pa cilog		Kota Bogor			
13	Naskah Tulisan Batu Tulis					
14	Upacara Sidekah Bumi	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial, upacara tradisional	Mulyaharja	Mulya harja	Upacara panen hasil bumi	
15	Soto kuning pak salam	Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir/arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional,	Surya kencana	Surya kencana	Makanan khas bogor	

NO	NAMA KARYA BUDAYA	DOMAIN	LOKASI/ ALAMAT KARYA BUDAYA	MAESTRO/PELAKU KARYA BUDAYA	DESKRIPSI SINGKAT KARYA BUDAYA	KETERANGAN
		makanan/minuman tradisional, mda transportasi tradisional				
16	Upacara Turun tanah (bayi)	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial, upacara tradisional	Bogor Selatan	Bogor Selatan	Upacara adat	
17	Oli jepret	Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir/arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/minuman tradisional, mda transportasi tradisional	Kota Bogor	Kota Bogor	Makanan khas bogor	
18	Kue balok	Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir/arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/minuman tradisional, mda transportasi tradisional	Sekitar jembatan merah Kota Bogor	Kota Bogor	Makanan khas bogor	
19	Martabak Encek	Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir/arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/minuman tradisional, mda transportasi tradisional	Kawasan Surya kencana	Kawasan Surya kencana	Makanan Khas Bogor	
20	Wayang Bambu	Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir/arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional,	Kota Bogor	Kota Bogor	Keterampilan tradisional	

NO	NAMA KARYA BUDAYA	DOMAIN	LOKASI/ ALAMAT KARYA BUDAYA	MAESTRO/PELAKU KARYA BUDAYA	DESKRIPSI SINGKAT KARYA BUDAYA	KETERANGAN
		makanan/minuman tradisional, mda transportasi tradisional				
21	Tari kandagan					
22	Pantun Beton	Tradisi Lisan	Kota Bogor	Kota Bogor	Tradisi lisan	
23	Asinan Bogor	Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir/arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/minuman tradisional, mda transportasi tradisional	Kota Bogor	Kota Bogor	Makanan Khas Bogor	
24	Maulidan Empang	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial, upacara tradisional	Empang – Kota Bogor	Kota Bogor	Perayaan- perayaan	
25	Haul Tanah Baru	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial, upacara tradisional	Kota Bogor	Kota Bogor	Perayaan-perayaan	

2.2.7. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.2.7.1. Indeks Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan berkualitas. Indeks ketahanan keluarga mencerminkan kemampuan keluarga dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta keberhasilan dalam membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anggota keluarga. Peningkatan ketahanan keluarga menjadi salah satu prioritas pembangunan guna menciptakan masyarakat yang tangguh, berdaya saing, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dengan kebijakan yang tepat, program berbasis komunitas, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kota Bogor dapat mempertahankan dan meningkatkan indeks ketahanan keluarga secara berkelanjutan. Indeks ketahanan keluarga di Kota Bogor dalam periode tahun 2020-2024 menunjukkan angka yang stabil, yakni 85,2 di setiap tahunnya (Tabel 2.47). Konsistensi angka ini mengindikasikan bahwa kondisi ketahanan keluarga di Kota Bogor berada pada tingkat yang baik dan terjaga dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun indeks ini cukup baik, tantangan di masa depan tetap harus diantisipasi, terutama dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, serta dinamika perkotaan yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan yang lebih efektif untuk memastikan ketahanan keluarga di Kota Bogor terus meningkat dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada.

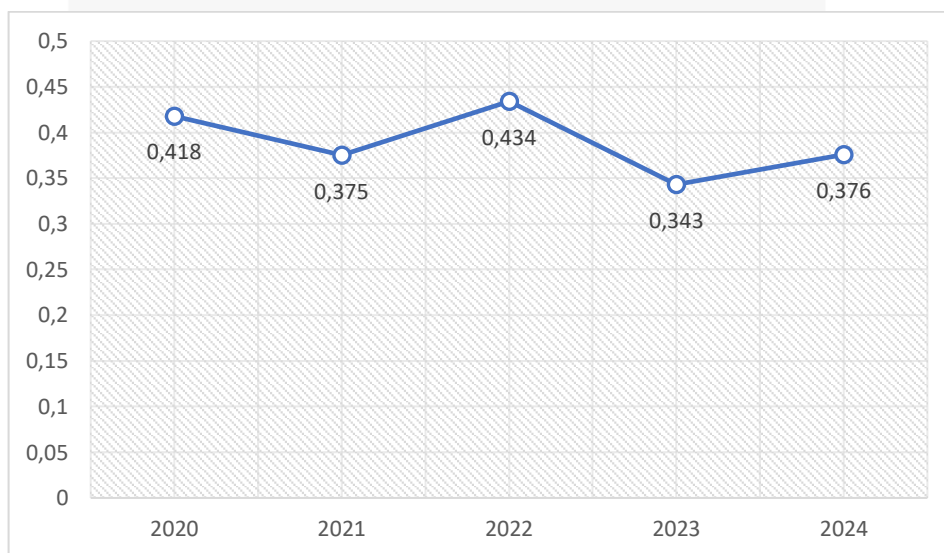
Tabel 2.47 Capaian Indeks Ketahanan Keluarga Kota Bogor Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Keluarga	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2

Sumber: Bapperida Kota Bogor

2.2.7.2. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesenjangan atau ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan dalam capaian pembangunan manusia. IKG memberikan gambaran tentang sejauh mana potensi pembangunan suatu wilayah atau negara "hilang" atau tidak optimal akibat adanya ketimpangan gender. Indeks ini mencakup tiga aspek utama: kesehatan, pendidikan, dan partisipasi di pasar kerja. IKG berkisar antara 0 hingga 1, dengan skor 0 menunjukkan ketimpangan gender yang sangat tinggi dan skor 1 menunjukkan kesetaraan yang sempurna. Grafik 2.36 menunjukkan bahwa IKG Kota Bogor mengalami fluktuasi, terlihat pada tahun 2022 meningkat dari 0,375 (2021) menjadi 0,434 di tahun 2022, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,343 pada tahun 2023 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 0,376. Peningkatan nilai indeks ketimpangan gender pada tahun 2024 menunjukkan ketimpangan gender di Kota Bogor menuju ke arah yang semakin membaik.

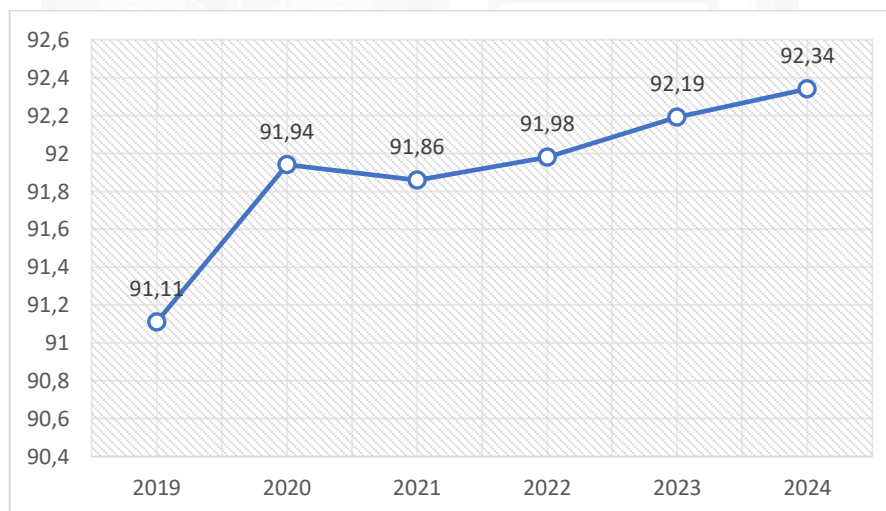


Sumber: BPS Kota Bogor

Grafik 2.36 Indeks Ketimpangan Gender di Kota Bogor Tahun 2020-2024

2.2.7.3. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menunjukkan perbandingan antara capaian IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. IPG ini mengukur tingkat ketidaksetaraan gender dalam pembangunan manusia. Semakin kecil jarak nilai IPG dari angka 100, semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki. IPG Kota Bogor pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 pada Grafik 2.37. menunjukkan tren positif yang menandakan kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin kecil. Pada tahun 2019, IPG berada di angka 91,11, meningkat signifikan menjadi 91,94 di tahun 2020. Meskipun terjadi sedikit penurunan menjadi 91,86 pada tahun 2021, tren kembali menguat di tahun berikutnya hingga mencapai 92,34 di tahun 2024.



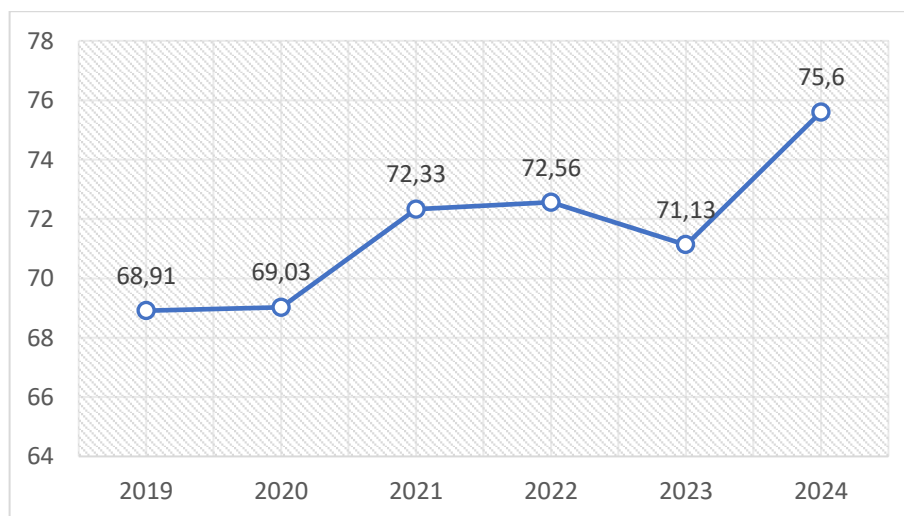
Sumber: Bappeda Kota Bogor

Grafik 2.37 Indeks Pembangunan Gender di Kota Bogor Tahun 2019-2024

2.2.7.4. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang mengukur keadilan dan kesetaraan gender serta pencapaian kapabilitas perempuan di berbagai bidang kehidupan. IDG membantu pemerintah merancang kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik, serta memantau kemajuan kesetaraan gender. IDG mencakup dimensi keterwakilan perempuan di parlemen,

pengambilan keputusan di sektor manajerial dan profesional, serta distribusi pendapatan berdasarkan upah buruh non-pertanian. Menurut BPS, status IDG dikategorikan menjadi rendah ($IDG < 50$), sedang ($50 \leq IDG < 60$), tinggi ($60 \leq IDG \leq 80$), dan sangat tinggi ($IDG > 80$).



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.38 Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Bogor Tahun 2019-2024

Data pada Grafik 2.38 menunjukkan bahwa, secara umum Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kota Bogor menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, IPG berada di angka 68,91 dan sedikit meningkat menjadi 69,02 pada tahun 2020. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan indeks mencapai 72,33, yang mencerminkan berbagai upaya pemberdayaan perempuan di Kota Bogor, seperti peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Angka tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 72,56, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 71,13. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan menjadi 75,6. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Kota Bogor, seperti pertumbuhan penduduk yang pesat, keterbatasan lahan, dan tekanan sosial-ekonomi, yang memengaruhi keberlanjutan program pemberdayaan gender. Upaya keberlanjutan dalam meningkatkan IPG di Kota Bogor perlu terus dilakukan, mengingat kondisi geografis yang mendukung sektor pertanian dan pariwisata,

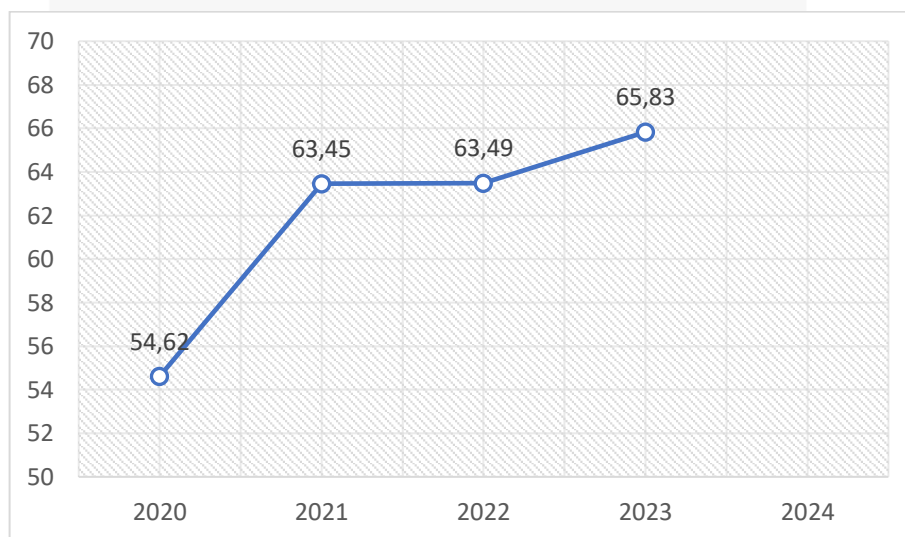
namun juga menghadapi tantangan infrastruktur dan urbanisasi yang dapat menghambat kesetaraan gender dan aksesibilitas bagi perempuan dalam berbagai sektor.

2.2.7.5. Indeks Pembangunan Pemuda

Pemuda merupakan kelompok strategis yang memainkan peran sentral dalam memastikan keberlanjutan, daya saing, dan inovasi pembangunan. Pembangunan pemuda bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi kebutuhan strategis dalam upaya menciptakan masyarakat Kota Bogor yang tangguh, inklusif, dan berkemajuan. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu alat ukur penting untuk menilai perkembangan dan kualitas hidup pemuda di Indonesia dalam berbagai aspek pembangunan. IPP memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana sejumlah aspek, seperti pendidikan formal dan informal, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi sosial dan inklusivitas beserta kesetaraan mempengaruhi kondisi pemuda. IPP memiliki lima domain, terdiri atas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan, dan inklusivitas dan kesetaraan gender.

Kota Bogor sebagai kota besar penyangga Ibu Kota, dengan kepadatan pemuda yang tinggi dan dinamika sosial yang cepat, menjadi salah satu wilayah yang sangat penting dalam pemantauan capaian IPP. Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Bogor pada Grafik 2.39 menunjukkan tren positif dan meningkat selama periode tahun 2020–2023. Pada tahun 2020, IPP tercatat sebesar 54,62, kemudian melonjak ke 63,45 pada tahun 2021, sedikit meningkat ke 63,49 di tahun 2022, dan mencapai 65,83 pada tahun 2023. Kenaikan IPP ini mencerminkan adanya peningkatan capaian pada domain-domain yang menunjukkan pertumbuhan positif, yang merefleksikan semakin aktifnya pemuda Kota Bogor dalam berbagai kegiatan. Program-program lintas sektor seperti pelatihan kewirausahaan, penguatan organisasi kepemudaan, digitalisasi pembelajaran, serta perluasan akses layanan kesehatan telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup

pemuda. Pemerintah Kota Bogor perlu terus memperkuat kebijakan yang berbasis data, intervensi lintas sektor, serta kolaborasi multipihak untuk memastikan bahwa pemuda sebagai modal pembangunan utamamendapatkan ruang tumbuh, aktualisasi, dan perlindungan yang adil dan berkelanjutan. IPP tidak hanya sebagai ukuran statistik, melainkan sebagai cermin arah kemajuan sosial dalam mewujudkan pemuda Bogor yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Grafik 2.39 Indeks Pembangunan Pemuda di Kota Bogor 2020-2023

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

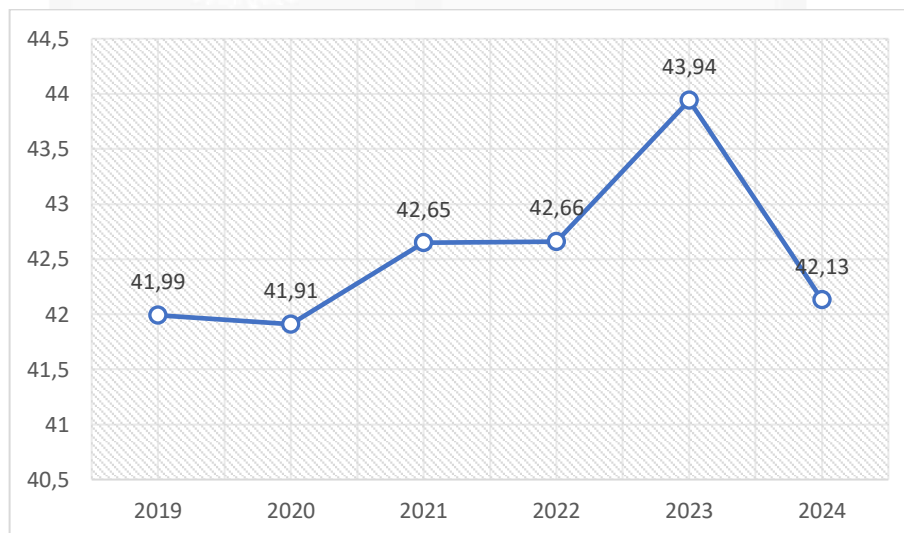
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Persentase angka ketergantungan yang semakin tinggi menunjukkan bahwa penduduk produktif harus menanggung beban yang lebih besar untuk membiayai penduduk non produktif. Sebaliknya,

jika persentase angka ketergantungan semakin rendah, maka beban penduduk produktif untuk menopang penduduk usia non produktif juga semakin kecil.

Grafik 2.40 menunjukkan angka Ketergantungan Kota Bogor tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dengan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019, angka ketergantungan tercatat sebesar 41,99, sedikit menurun menjadi 41,91 pada tahun 2020. Selanjutnya, terjadi kenaikan bertahap pada tahun 2021 (42,65) dan tahun 2022 (42,66), hingga mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan angka 43,94. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan menjadi 42,13. Peningkatan angka ketergantungan di tahun 2023 mengindikasikan meningkatnya jumlah penduduk usia non-produktif yang dapat menambah beban kelompok usia produktif. Penurunan angka pada tahun 2024 memberikan sinyal positif bahwa proporsi penduduk produktif mulai meningkat kembali, yang diharapkan dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.40 Angka Ketergantungan Kota Bogor Tahun 2019-2024

2.3.1.2. Kualitas dan Potensi Daya Saing

Peningkatan daya saing daerah pada dasarnya bertumpu pada penguatan kualitas dan potensi sumber daya manusia (SDM). Di Kota

Bogor, dinamika pertumbuhan penduduk yang pesat serta tingginya tingkat kepadatan wilayah perkotaan menghadirkan tantangan struktural terhadap kapasitas sistem pendidikan, ketenagakerjaan, dan layanan sosial dasar. Kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh capaian pendidikan formal, melainkan juga oleh kemampuan adaptif, penguasaan keterampilan vokasional, literasi digital, dan resiliensi sosial dalam menghadapi perubahan ekonomi dan transformasi teknologi.

Tingginya angka pengangguran terbuka, terutama pada kelompok usia produktif, mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan lembaga pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan riil pasar kerja. Ketimpangan ini semakin kompleks akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di wilayah-wilayah dengan kepadatan tinggi dan keterjangkauan infrastruktur pendidikan yang rendah, seperti kawasan pinggiran kota. Intervensi kebijakan yang terintegrasi dan kolaboratif lintas sektor sangat diperlukan, yang mencakup sektor pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, serta didukung oleh partisipasi aktif sektor swasta, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah Kota Bogor memiliki peran strategis untuk memfasilitasi sinergi multipihak melalui pembentukan forum koordinasi pengembangan SDM, penyusunan roadmap kebutuhan kompetensi masa depan, serta optimalisasi peran Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis industri.

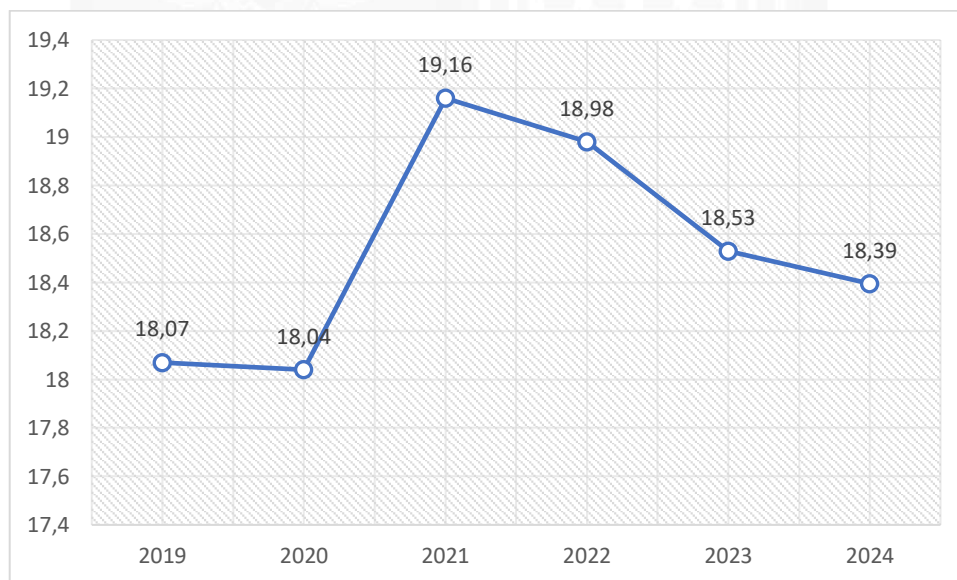
Di sisi lain, penguatan daya saing SDM juga memiliki keterkaitan erat dengan kualitas lingkungan hidup, derajat kesehatan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang secara langsung memengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja. Pembangunan daya saing daerah memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator kebijakan, sementara sektor dunia usaha dan institusi pendidikan tinggi bertindak sebagai motor inovasi dan penyedia teknologi. Masyarakat dan organisasi komunitas juga perlu diperkuat sebagai aktor sosial dalam

meningkatkan kesadaran pendidikan dan pelatihan. kolaborasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan menjadi prasyarat utama dalam menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang unggul, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung visi pembangunan Kota Bogor.

2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Selama tahun 2019 hingga tahun 2024 (Grafik 2.41), sub sektor industri pengolahan merupakan sub sektor penyumbang PDRB terbesar kedua di Kota Bogor, sehingga lapangan usaha industri pengolahan merupakan salah satu lapangan usaha yang menopang perekonomian Kota Bogor. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB digunakan untuk melihat performa kinerja dan nilai tambah lapangan usaha industri pengolahan dalam ekonomi wilayah Kota Bogor.



Sumber: BPS Kota Bogor

Grafik 2.41 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Bogor Tahun 2019-2024

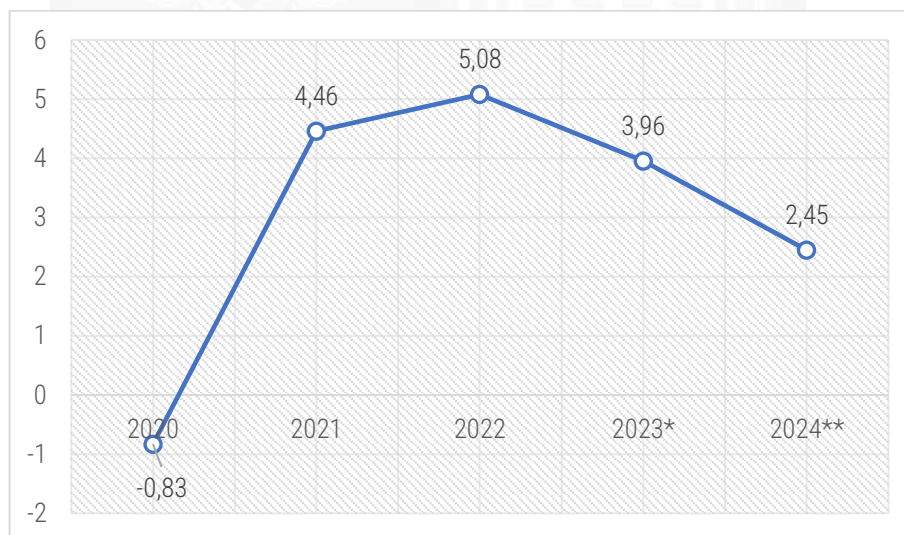
Berdasarkan Grafik 2.42, tren PDRB ADHB lapangan usaha Industri Pengolahan Kota Bogor memiliki cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2019, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 18,07%, sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi 18,04%. Namun, terjadi lonjakan signifikan

pada tahun 2021 dengan kontribusi mencapai 19,16%, mencerminkan adanya pemulihan dan peningkatan aktivitas industri pasca pandemi. Tren ini sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 18,98%, kemudian terus menurun hingga 18,53% pada tahun 2023 dan 18,39% di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan daya saing industri pengolahan di tengah perubahan struktur ekonomi kota. Penguatan sub sektor industri pengolahan terhadap penerimaan PDRB di Kota Bogor perlu terus diupayakan dengan membangun daya saing industri daerah pada *leading sector* industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan, dan lain lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, *packaging*, dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah) antara Kota Bogor dengan daerah sekitarnya yang saling bekerja sama.

Perubahan dalam nilai PDRB sektor industri pengolahan yang dihitung atas dasar harga konstan menggambarkan seberapa besar aktivitas manufaktur mengalami peningkatan secara riil. Industri pengolahan memiliki peranan penting dalam membentuk fondasi ekonomi yang berorientasi pada produksi dan nilai tambah. Sebagai salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam memperkuat basis produksi dan diversifikasi ekonomi, pertumbuhan industri pengolahan di tingkat daerah menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih produktif. Di Kota Bogor, perkembangan sektor ini memberikan sinyal tentang sejauh mana pelaku industri mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika permintaan pasar dan kondisi ekonomi makro, serta menunjukkan kapasitas daerah dalam memfasilitasi proses industrialisasi secara berkelanjutan.

Pada tahun 2020, sektor industri pengolahan di Kota Bogor menunjukkan nilai sebesar -0,83 persen, yang mencerminkan dampak negatif dari tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 terhadap aktivitas produksi manufaktur. Meskipun demikian, sektor ini

menunjukkan kemampuan pemulihan yang relatif cepat. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan positif sebesar 4,46 persen pada tahun 2021, yang kemudian meningkat lebih lanjut menjadi 5,08 persen pada tahun 2022. Namun, mulai tahun 2023, laju pertumbuhan menunjukkan kecenderungan melambat, yakni sebesar 3,96 persen, dan kembali menurun menjadi 2,45 persen pada tahun 2024. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor industri pengolahan berhasil keluar dari fase krisis, keberlanjutan ekspansi ekonomi di sektor ini menghadapi tantangan struktural. Kondisi tersebut menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang komprehensif, khususnya dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi, adopsi teknologi yang lebih efisien, serta penguatan rantai pasok dan nilai tambah industri lokal guna mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan di kawasan perkotaan seperti Kota Bogor.



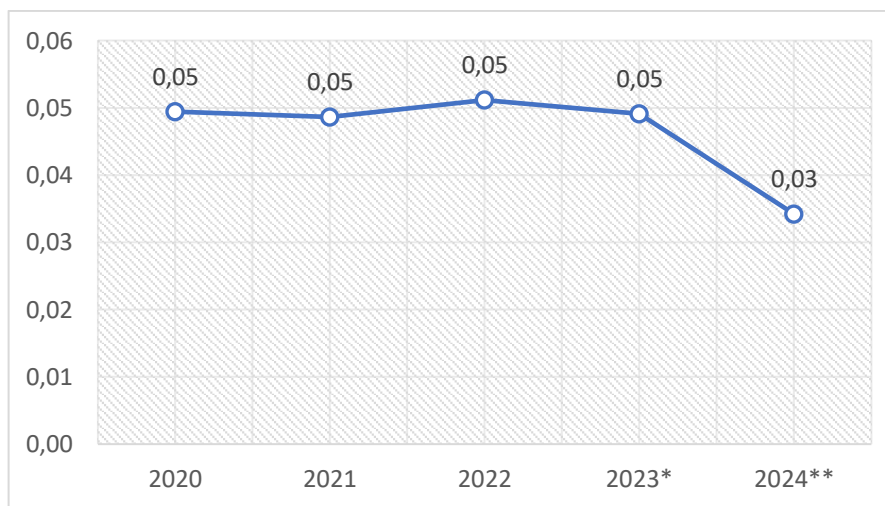
Sumber: BPS Kota Bogor

Grafik 2.42 Laju PDRB Industri Pengolahan Kota Bogor Tahun 2020-2024

2.3.2.2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Sektor akomodasi makanan dan minuman menyumbang 5,0 persen terhadap PDRB Kota Bogor pada tahun 2024. Rasio kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Bogor cenderung stabil, berkisar antara 3 hingga 5 persen setiap tahunnya (Grafik 2.43). Pada tahun 2023, rasio

ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2022. Dan kembali menurun menjadi 3 persen pada tahun 2024. Dengan banyaknya usaha makanan dan minuman yang berkembang di Kota Bogor, sektor ini memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mendorong sektor ini agar menjadi salah satu sektor unggulan pendapatan Kota Bogor.



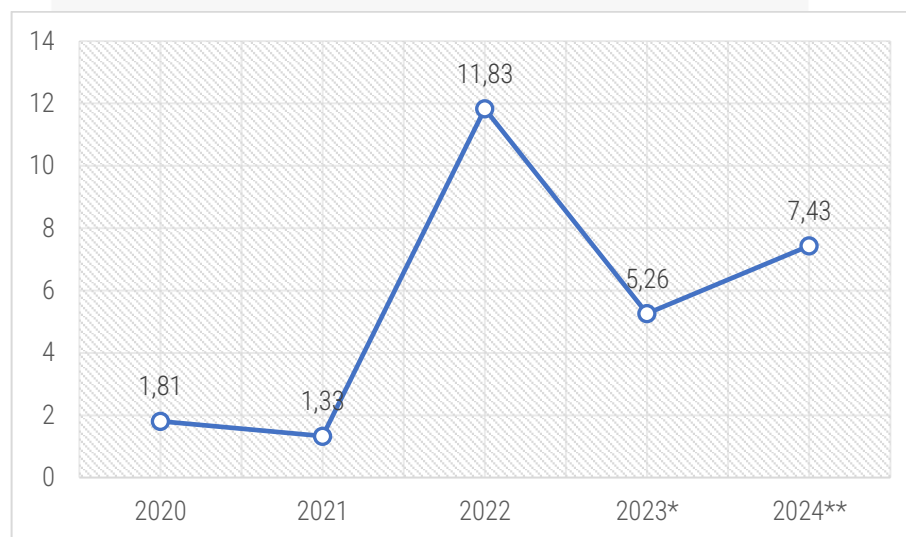
Sumber: BPS Kota Bogor

Grafik 2.43 Rasio PDRB Akomodasi Makanan dan Minuman Kota Bogor Tahun 2020-2024

Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi serta makan dan minum atas dasar harga konstan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan output riil dari kegiatan ekonomi di bidang penyediaan jasa penginapan dan konsumsi masyarakat. Indikator ini berfungsi untuk menggambarkan perubahan aktual dalam volume produksi tanpa dipengaruhi oleh variabel harga, sehingga mencerminkan kinerja sektor secara objektif. Sektor ini sangat dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, tingkat daya beli, serta kondisi sosial dan ekonomi secara umum. Oleh karena itu, fluktuasi dalam pertumbuhannya sering kali menjadi representasi langsung dari perkembangan sektor pariwisata dan perilaku konsumsi rumah tangga. Dalam konteks Kota Bogor, yang berfungsi sebagai destinasi wisata sekaligus wilayah penyangga metropolitan, pertumbuhan sektor ini tidak

hanya mencerminkan dinamika ekonomi jasa, tetapi juga menunjukkan kapasitas daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dari sektor pariwisata domestik dan aktivitas informal secara berkelanjutan.

Pada tahun 2020 dan tahun 2021, sektor akomodasi serta makan dan minum di Kota Bogor mengalami pertumbuhan yang relatif rendah, masing-masing sebesar 1,81 persen dan 1,33 persen, yang mencerminkan dampak pembatasan sosial terhadap mobilitas dan konsumsi. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 11,83 persen, seiring pulihnya aktivitas wisata dan relaksasi kebijakan mobilitas. Meskipun mengalami perlambatan menjadi 5,26 persen pada tahun 2023, tren kembali menguat pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 7,43 persen. Pola ini menunjukkan bahwa sektor ini mengalami pemulihan bertahap dengan respons elastis terhadap kondisi eksternal, serta mengindikasikan potensi yang besar untuk terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas layanan, promosi destinasi lokal, dan integrasi ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

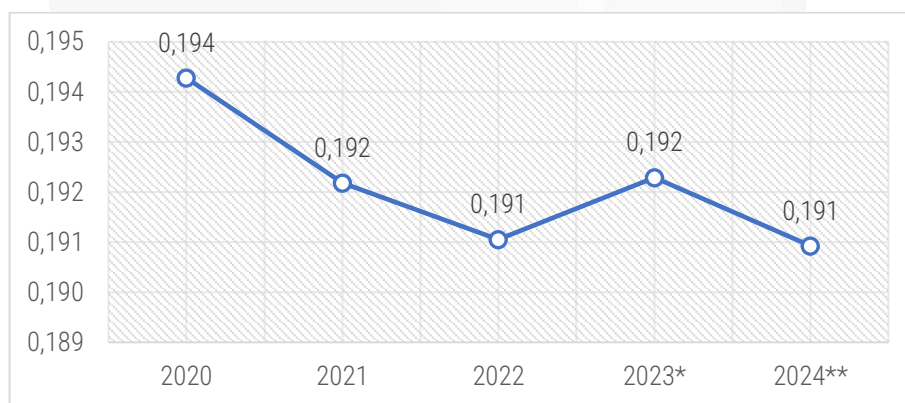


Sumber: BPS Kota Bogor

Grafik 2.44 Laju PDRB Akomodasi Makanan dan Minuman Kota Bogor Tahun 2020-2024

2.3.2.3. Rasio PDRB Perdagangan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perdagangan atas dasar harga berlaku merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi sektor perdagangan terhadap total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan peran relatif sektor perdagangan dalam struktur perekonomian daerah, dan dapat mencerminkan seberapa dominan aktivitas jual beli barang dan jasa dalam mendukung output ekonomi regional. Sebagai bagian dari sektor tersier, perdagangan berperan sebagai penggerak sirkulasi barang dan distribusi nilai produksi dari sektor-sektor lainnya, serta menjadi cerminan dari dinamika permintaan dan penawaran di tingkat lokal. Di Kota Bogor, sektor perdagangan menunjukkan peran yang konsisten dalam struktur PDRB atas dasar harga berlaku, dengan rasio yang stabil selama lima tahun terakhir. Stabilitas ini menunjukkan ketahanan sektor terhadap berbagai dinamika ekonomi dan menandakan pentingnya perdagangan sebagai simpul utama dalam aktivitas ekonomi kota, baik dalam mendukung mobilitas barang maupun dalam menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah. Dengan karakter Kota Bogor yang terintegrasi dalam kawasan penyangga ibu kota, performa sektor perdagangan tidak hanya mencerminkan kekuatan domestik, tetapi juga keterhubungan yang erat dengan dinamika ekonomi regional.

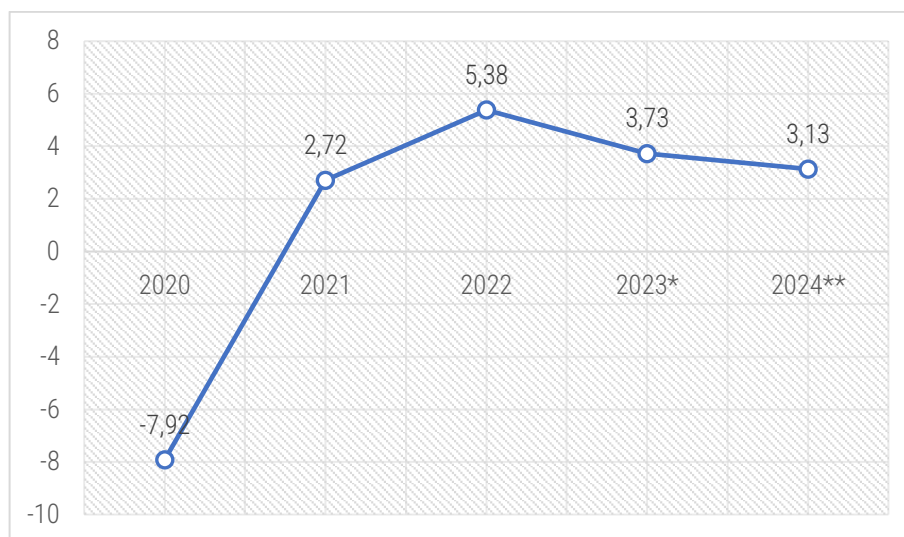


Sumber: BPS Kota Bogor

Grafik 2.45 Rasio PDRB Perdagangan Kota Bogor Tahun 2020-2024

Rasio PDRB sektor perdagangan atas dasar harga berlaku di Kota Bogor menunjukkan stabilitas struktural yang relatif kuat selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, sektor perdagangan berkontribusi sebesar 19,40 persen terhadap total PDRB, yang kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 19,24 persen pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi aktivitas ekonomi, khususnya di sektor perdagangan ritel dan jasa distribusi. Meskipun demikian, pada tahun 2022 kontribusi sektor ini terus menurun tipis menjadi 19,14 persen, sebelum mencatat sedikit pemulihan pada tahun 2023 sebesar 19,21 persen. Namun, angka tersebut kembali mengalami koreksi menjadi 19,13 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ringan yang terjadi selama lima tahun tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan tetap mempertahankan posisi pentingnya dalam struktur ekonomi Kota Bogor. Meskipun tidak mencatat peningkatan yang signifikan, kestabilan rasio ini mencerminkan keberlanjutan fungsi sektor perdagangan sebagai penghubung utama antara produsen dan konsumen serta sebagai penggerak utama sektor jasa lainnya. Oleh karena itu, diperlukan perlunya penguatan struktural agar kontribusinya terhadap PDRB dapat semakin optimal.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perdagangan atas dasar harga konstan merupakan indikator yang merefleksikan perubahan volume riil output ekonomi tanpa terdistorsi oleh fluktuasi harga. Indikator ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai dinamika kinerja sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dalam konteks Kota Bogor, yang secara struktural didominasi oleh sektor tersier, termasuk perdagangan, pengamatan terhadap laju pertumbuhan riil menjadi penting untuk memahami efektivitas transformasi ekonomi serta kapasitas sektor ini dalam merespons tekanan eksternal dan peluang pasar domestik.



Sumber: BPS Kota Bogor

Grafik 2.46 Laju PDRB Perdagangan Kota Bogor Tahun 2020-2024

Grafik 2.46 memperlihatkan dinamika laju pertumbuhan sektor perdagangan di Kota Bogor selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, sektor ini mengalami kontraksi signifikan sebesar -7,92 persen, yang merupakan dampak langsung dari pembatasan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Proses pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021 dengan tercatatnya pertumbuhan positif sebesar 2,72 persen, yang kemudian mengalami peningkatan lebih lanjut menjadi 5,38 persen pada tahun 2022. Meskipun demikian, tren pertumbuhan tersebut tidak berlangsung secara konsisten, sebagaimana tercermin dari perlambatan laju pertumbuhan menjadi 3,73 persen pada tahun 2023 dan kembali melambat menjadi 3,13 persen pada tahun 2024. Pola pertumbuhan ini mencerminkan adanya pemulihan yang relatif cepat pasca-pandemi, namun diikuti oleh fase stabilisasi yang menunjukkan perlunya intervensi strategis.

2.3.2.4. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas

asas kekeluargaan. Pembangunan ini bertujuan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.48 Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bogor, Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah koperasi aktif	558	581	607	627	200	215
Persentase koperasi aktif (%)	64,29	65,21	66,19	67,27	21,40	23,1
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	44	64	64	76	86	96
Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	70	40	-	44	65	175
Jumlah UMKM (wirausaha) baru	0	124	1088	260	370	536

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor

Berdasarkan Tabel 2.48, Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau melakukan kegiatan usaha. Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Secara umum persentase koperasi aktif di Kota Bogor pada tahun 2019–2022 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 tercatat sebesar 67,27 persen koperasi aktif atau terdapat sekitar 627 koperasi aktif dari sebanyak 932 koperasi. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 21,40 persen atau hanya terdapat 200 koperasi yang aktif. Sedikit peningkatan terjadi pada tahun 2024 menjadi 23,1 persen atau terdapat 215 koperasi yang aktif.

Pemerintah Kota Bogor tidak hanya memandu kegiatan RAT dan mendorong kemajuan dan perkembangan koperasi secara bertahap, namun juga terus membangun jaringan untuk menjadikan koperasi sebagai kekuatan penting. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi mempunyai prinsip-prinsip yang harus dijalankan antara lain kesukarelaan, demokrasi, transparansi, keadilan dan menjadi solusi

kesejahteraan. Panduan pelatihan digitalisasi pelaporan sehingga terbuka akses bagi seluruh anggota. Tantangan yang harus dihadapi koperasi ke depan adalah memasuki era digital. Guna menjawab tantangan era digital, Pemerintah Kota Bogor terus menjalin kerja sama dan percepatan pembangunan dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda), dengan memberikan bimbingan teknis atau pelatihan digital di bidang pembukuan, pemasaran produk, dan lain-lain. Sehingga tujuan koperasi dapat dicapai yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, secara tidak langsung dapat mendorong perekonomian di Kota Bogor dengan banyaknya koperasi aktif.

Selain koperasi, UMKM merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak. Data dari tahun 2019 hingga tahun 2024 menunjukkan tren dalam jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar dan jumlah UMKM (wirausaha) baru. Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar mengalami penurunan dari 70 pada tahun 2019 menjadi 40 pada tahun 2020, sedikit meningkat menjadi 44 pada tahun 2021, dan naik signifikan menjadi 175 pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah UMKM baru menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimulai dari nol pada tahun 2019, melonjak menjadi 124 pada tahun 2020, kemudian meningkat drastis menjadi 1.088 pada tahun 2021. Meskipun jumlah ini menurun ke 260 pada tahun 2022, namun perlahan mengalami peningkatan kembali menjadi 536 pada tahun 2024.

2.3.2.5. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan dihitung dengan menjumlahkan total penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu dengan status pekerjaan utama berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan kemudian dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Tabel berikut menunjukkan nilai rasio kewirausahaan Kota Bogor sejak tahun 2019 hingga 2023. Terlihat pada Tabel 2.36 bahwa rasio kewirausahaan Kota Bogor menunjukkan nilai yang berfluktuasi namun

cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 rasio kewirausahaan Kota Bogor yaitu 3,63 persen, di mana nilai tersebut menjadi nilai tertinggi sepanjang tahun 2019-2023. Kemudian data terakhir tahun 2023 menunjukkan rasio kewirausahaan Kota Bogor yaitu 1,92 persen dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 2,47 persen.

Penurunan rasio kewirausahaan di Kota Bogor perlu mendapat perhatian pemerintah, mengingat meningkatnya kebutuhan akan lapangan kerja seiring bertambahnya jumlah penduduk usia produktif dalam angkatan kerja. Salah satu cara untuk memperluas ketersediaan lapangan kerja adalah dengan meningkatkan rasio kewirausahaan di Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor dapat melakukan *benchmarking* terhadap langkah-langkah yang dilakukan di Kota Bandung, yang secara konsisten memiliki rasio kewirausahaan tertinggi dengan tren yang meningkat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan iklim wirausaha dan mempermudah pelaksanaan usaha di Kota Bogor.

Tabel 2.49 Rasio Kewirausahaan Kota Bogor Tahun 2020-2024

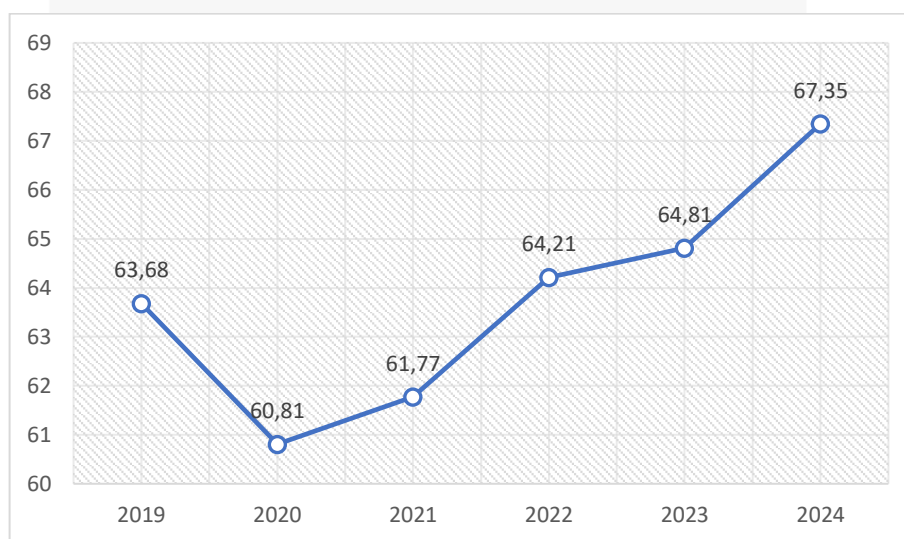
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pekerja yang Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	11261	16141	16228	10263	13909
Jumlah Angkatan Kerja	514323	529003	556541	534532	561986
Rasio Kewirausahaan	2,19	3,05	2,92	1,92	2,47

Sumber: BPS Kota Bogor (diolah)

2.3.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja dan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK Kota Bogor tahun 2019 sampai dengan tahun 2024

pada Grafik 2.47. menunjukkan tren berfluktuasi. TPAK Kota Bogor sempat menurun dari 63,68% pada tahun 2019 menjadi 60,81% di tahun 2020, akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia kerja. Namun, pada tahun 2021 hingga 2024 tren menjadi meningkat signifikan mencapai 67,35%. Kenaikan ini menunjukkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi serta peningkatan akses terhadap ketersediaan dan partisipasi tenaga kerja, sekaligus memperlihatkan efektivitas berbagai program penguatan ketenagakerjaan.



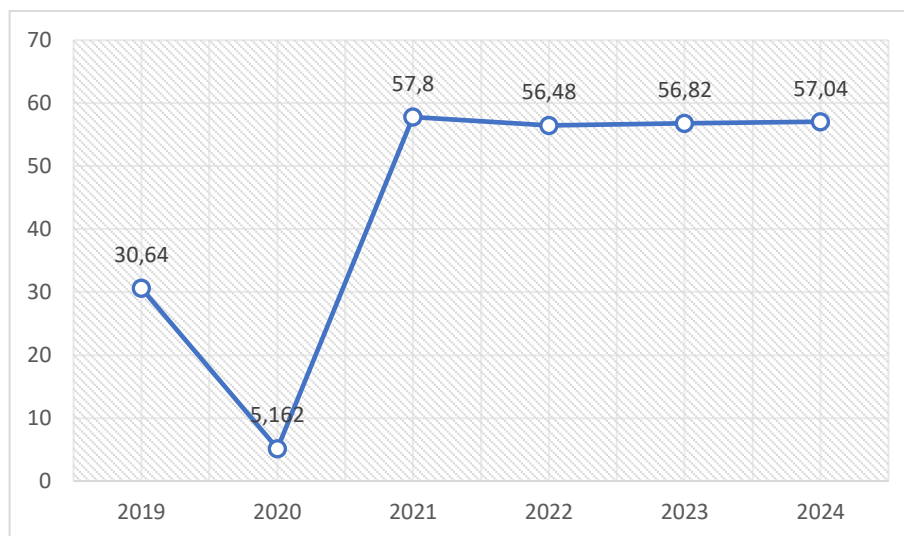
Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.47 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bogor Tahun 2019-2024

2.3.2.7. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks Inovasi Daerah Kota Bogor pada tahun 2019 sampai dengan 2024 pada Grafik 2.48. mengalami penurunan tajam dari 30,64 pada tahun 2019 menjadi 5,16 pada tahun 2020 akibat dampak pandemi yang menghambat pelaksanaan program inovatif. Namun, pemulihan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan lonjakan ke angka 57,8, dan relatif stabil hingga tahun 2024 di kisaran 56–57. Pemulihan tersebut mencerminkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan

keberhasilan dalam mendorong inovasi pemerintahan pasca-pandemi dan membuktikan komitmen dalam menjalankan prinsip reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih efisien.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.48 Indeks Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

2.3.2.8. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, dengan menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kemitraan dalam seluruh aspek transaksi ekonomi. Sistem ini menghindari unsur riba, gharar, dan maisir, serta mendorong aktivitas ekonomi yang produktif melalui skema pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Peran ekonomi syariah kini semakin penting dalam mendukung transformasi dan keberlanjutan ekonomi daerah. Ekonomi syariah dipandang sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu memperkuat struktur ekonomi lokal, meningkatkan daya saing, dan memperluas inklusi keuangan secara berkeadilan. Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan di Kota Bogor, yang tengah menghadapi tantangan urbanisasi, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses pembiayaan produktif, khususnya bagi pelaku UMKM. Kota Bogor sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan budaya di wilayah Jawa Barat

memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem ekonomi yang inklusif dan ramah terhadap keberlanjutan. Penguatan perbankan syariah di wilayah ini dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak hanya bertumpu pada sektor konvensional, tetapi juga mengadopsi nilai-nilai spiritual, sosial, dan etika yang menjadi fondasi utama ekonomi syariah.

Tabel 2.50 Kinerja Perbankan Syariah di Kota Bogor tahun 2024

Total Aset Gross, Total Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, FDR Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan Kota/Kabupaten - Desember 2024 (Miliar Rp)				
Wilayah	Aset Sebelum Set Off (Assets Gross)	Pembiayaan (Financing)	Dana Pihak Ketiga (Depositor Funds)	FDR dalam Persen (Percentage)
Kota Bogor	15.925	10.076	13.105	76.89

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Tabel 2.50 memperlihatkan kinerja perbankan syariah di Kota Bogor tahun 2024 yang memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung fungsi intermediasi keuangan berbasis prinsip syariah di tingkat daerah. Total aset bruto yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di wilayah Kota Bogor tercatat sebesar Rp15,93 triliun, yang mencerminkan kapasitas kelembagaan dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat. Dari total aset tersebut, nilai pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp10,08 triliun, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp13,11 triliun. Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*Financing to Deposit Ratio*/FDR) tercatat sebesar 76,89%, suatu capaian yang menunjukkan tingkat efektivitas intermediasi yang relatif sehat dan masih berada dalam rentang ideal menurut standar prudensial industri keuangan syariah nasional. Kinerja menandakan stabilitas dan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah di Kota Bogor dan merefleksikan peran strategis sektor keuangan syariah sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2.3.3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.3.1. Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto serta Ekspor Barang dan Jasa dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran

PDRB Pengeluaran mencerminkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi untuk memperoleh barang dan jasa yang diproduksi. Selain itu, melalui PDRB Pengeluaran, dapat diamati hubungan antara penyediaan barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri maupun dari impor. Berdasarkan data pada Tabel 2.38, tren PDRB menurut pengeluaran di Kota Bogor menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 yaitu 46.197.757 juta rupiah menjadi 61.051.690 juta rupiah pada tahun 2024. Besaran komponen PDRB pengeluaran terbesar ada pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu lebih dari 95 persen dari total PDRB menurut pengeluaran. Sementara komponen PDRB pengeluaran terendah dimiliki oleh komponen net ekspor barang dan jasa, di mana nilainya menunjukkan angka minus sejak tahun 2019-2024. Nilai minus dalam net ekspor dan jasa pada komponen PDRB Pengeluaran menunjukkan bahwa nilai impor barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan nilai eksportnya. Hal tersebut menandakan bahwa Kota Bogor lebih banyak barang dan jasa dari luar negeri daripada yang dijual ke luar negeri, yang berdampak pada pengurangan PDRB secara keseluruhan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.51 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bogor Tahun 2019-2024

Komponen PDRB Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	45.582.472	45.013.834	47.301.107	52.212.386	56.362.061	61.788.670
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	790.721	765.207	788.754	860.784	958.042	1.090.260

Komponen PDRB Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.972.036	4.952.118	4.943.910	4.996.676	5.521.009	5.607.490
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	15.722.784	14.605.098	16.435.042	17.441.679	19.739.334	21.076.370
Perubahan Inventori	2.135.032	855.786	10.208.013	-18.399	7.440	23.680
Net Ekspor Barang dan Jasa	-23.005.287	-20.280.179	-20.613.763	-22.578.527	-25.584.127	-28.534.780
Jumlah	46.197.757	45.911.864	48.325.645	52.914.598	57.003.758	61.051.690
Rasio Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (%)	34.03	31.81	27.83	32.96	34.63	34.52

Sumber: BPS Kota Bogor

2.3.4. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.4.1. Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi dan kualitas infrastruktur di wilayah. Penilaian terhadap infrastruktur menjadi hal penting karena infrastruktur yang baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan menarik investasi. Indeks infrastruktur berikut ini diperoleh dari bahan perhitungan IDSD Kota Bogor yang bersumber dari BRIN. Perhitungan indeks infrastruktur mencakup infrastruktur transportasi, infrastruktur utilitas kelistrikan, dan infrastruktur utilitas air minum. Pada tahun 2018 hingga 2023, nilai indeks infrastruktur Kota Bogor mengalami fluktuasi (Tabel 2.52). Semula, indeks infrastruktur Kota Bogor sebesar 5,00 pada tahun 2019 yang kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2022. Pada tahun 2023 nilainya meningkat kembali hingga mencapai 4,05 dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 4,71. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas infrastruktur di daerah tersebut

relatif tinggi. Semakin tinggi nilai indeks infrastruktur, semakin baik pula kualitas dan ketersediaan sarana serta prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat secara umum.

Tabel 2.52 Indeks Infrastruktur Kota Bogor Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur	5,00	3,33	N/A	2,15	4,05	4,71

Sumber: BRIN

2.3.4.2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau

Ketersediaan perumahan yang memenuhi standar kelayakan, baik dari segi struktur, sanitasi, maupun aksesibilitas terhadap layanan dasar, menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Kota Bogor menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan hunian layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Faktor seperti pertumbuhan penduduk, keterbatasan lahan, harga tanah yang terus meningkat, serta kesenjangan ekonomi dapat mempengaruhi ketersediaan hunian terjangkau. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor terus berupaya melalui kebijakan dan program perumahan untuk memastikan setiap rumah tangga memiliki akses terhadap tempat tinggal yang aman dan nyaman.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.49 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau di Kota Bogor Tahun 2019-2024

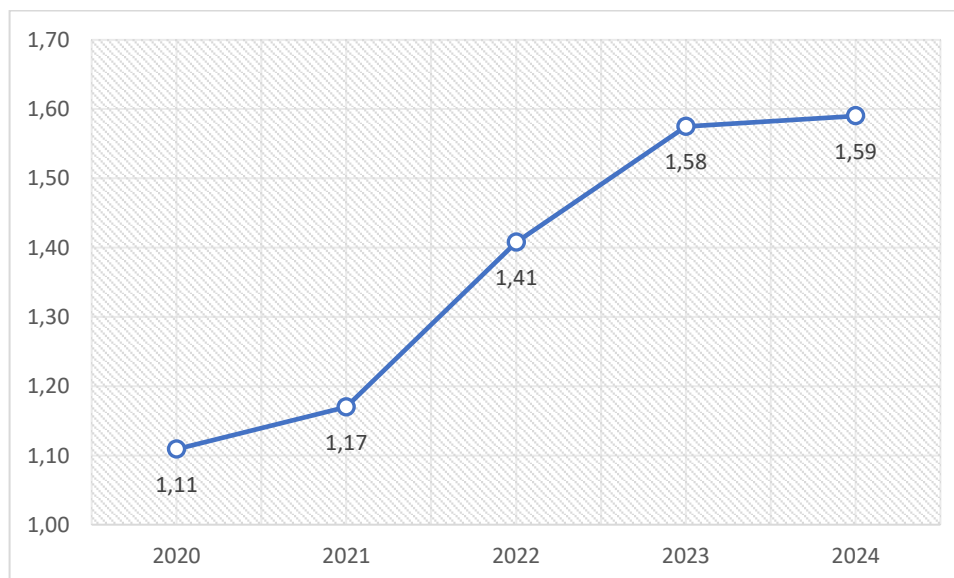
Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau di Kota Bogor mengalami tren yang fluktuatif sepanjang periode tahun 2019 hingga 2024 (Grafik 2.49). Pada Tahun 2019, angka ini berada di 45,75 persen, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 49,85 persen. Tren positif ini berlanjut hingga mencapai 55,57 persen pada tahun 2021, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022, di mana angka kembali turun menjadi 45,73 persen, hampir menyamai kondisi pada tahun 2019. Pada tahun 2023, terjadi sedikit peningkatan ke 49,3 persen hingga tahun 2024 menjadi 49,53 persen, namun masih belum mencapai level tertinggi yang pernah di capai pada tahun 2021. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam akses terhadap hunian layak, tantangan dalam penyediaan perumahan masih cukup besar. Peningkatan signifikan pada tahun 2021 kemungkinan besar disebabkan oleh program perumahan yang diperluas atau subsidi pemerintah yang efektif dalam membantu masyarakat memperoleh hunian. Namun, penurunan signifikan pada tahun 2022 dapat dikaitkan dengan kenaikan harga tanah dan properti, keterbatasan lahan, serta dampak ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Peningkatan kembali pada tahun 2024 mencerminkan adanya upaya pemulihan, baik melalui kebijakan pemerintah maupun peran sektor swasta dalam penyediaan hunian yang lebih terjangkau.

2.3.5. Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.5.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pendapatan pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dalam pembiayaan pembangunan di Kota Bogor. Pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator penting dalam

mengukur efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

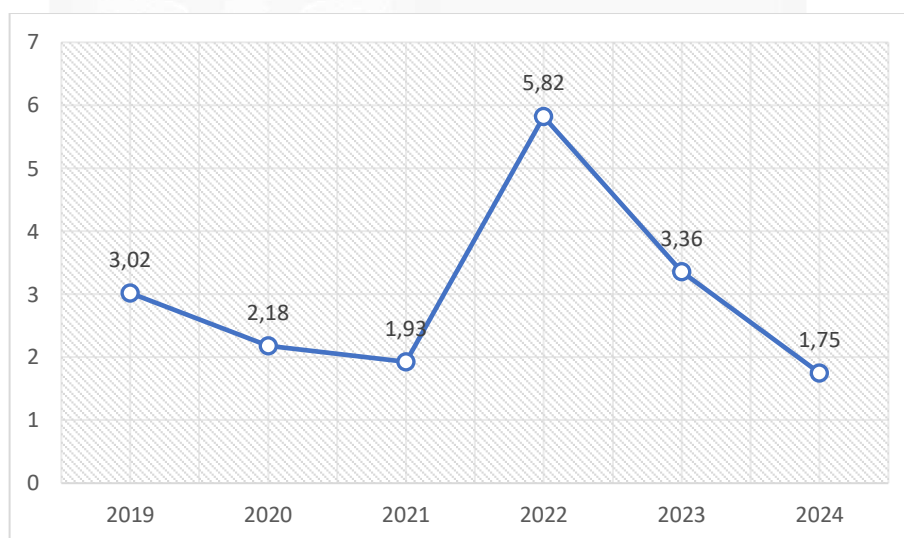
Grafik 2.50 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Bogor Tahun 2020-2024

Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Bogor mengalami pola fluktuatif selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 (Grafik 2.50). Fluktuasi tersebut mencerminkan dinamika perekonomian dan kebijakan fiskal daerah. Pemerintah Kota Bogor berupaya untuk meningkatkan rasio pajak daerah melalui optimalisasi sistem pemungutan pajak, peningkatan kesadaran wajib pajak, serta penguatan regulasi perpajakan yang lebih efektif dan adil. Pada tahun 2020, rasio pajak daerah terhadap PDRB berada di 1,11%, kemudian pada tahun 2021, rasio mulai mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,17%, menandakan adanya pemulihan ekonomi secara bertahap dari dampak pandemi COVID-19 yang menekan sektor ekonomi dan mengurangi penerimaan pajak daerah. Tren pemulihan semakin kuat pada tahun 2022, di mana rasio meningkat ke 1,41%, didorong oleh perbaikan aktivitas ekonomi serta kebijakan optimalisasi pajak daerah. Pada tahun 2023, rasio mencapai 1,58%, dan tahun 2024 mencapai 1,59 yang menjadikan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan

pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil di Kota Bogor selama lima tahun terakhir.

2.3.5.2. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mencerminkan stabilitas harga barang dan jasa dalam suatu wilayah. Tingkat inflasi yang terkendali sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada Kota Bogor, inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga bahan pokok, biaya transportasi, permintaan konsumen, serta kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.51 Tingkat Inflasi Kota Bogor Tahun 2019-2024

Tingkat inflasi di Kota Bogor menunjukkan pola fluktuatif selama periode tahun 2019 hingga tahun 2024 (Grafik 2.51). Pada tahun 2019, inflasi tercatat sebesar 3,02%. Namun, pada tahun 2020, inflasi mengalami penurunan menjadi 2,18%, yang kemungkinan disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang membatasi konsumsi masyarakat. Pada tahun 2021, inflasi kembali menurun menjadi 1,93%, menunjukkan dampak lanjutan dari

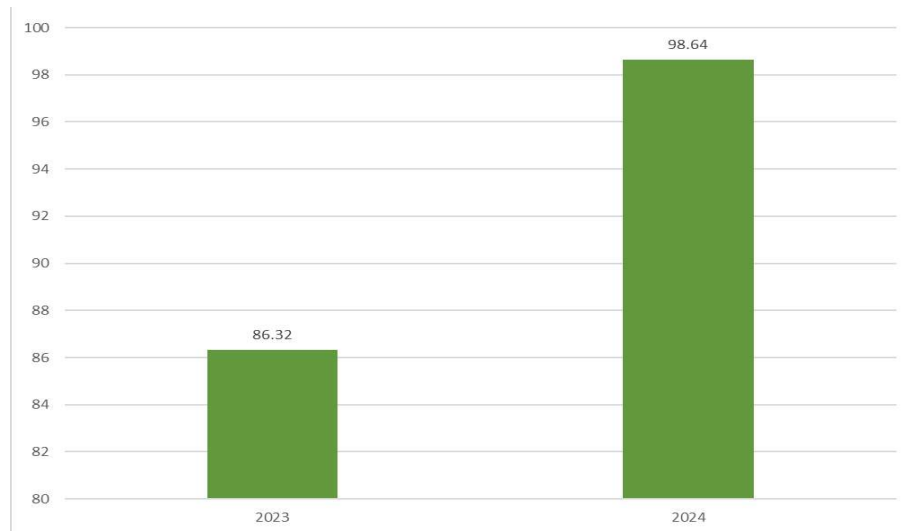
pemulihan ekonomi yang masih berjalan lambat. Tahun 2022 mencatat lonjakan inflasi yang sangat tinggi, mencapai 5,82% sebagai pengaruh dari pemulihan ekonomi pasca-pandemi, meningkatnya harga energi dan bahan pokok, serta gangguan rantai pasokan global yang berpengaruh terhadap harga barang dan jasa di tingkat lokal. Kemudian, pada tahun 2023, inflasi kembali turun menjadi 3,36%, yang menunjukkan adanya upaya pengendalian inflasi yang mulai membuahkan hasil. Hingga tahun 2024, inflasi terus menurun menjadi 1,75%, yang mengindikasikan stabilitas harga yang lebih baik dan keberhasilan kebijakan pengendalian inflasi oleh pemerintah Kota Bogor. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga melalui kebijakan yang tepat dalam mengelola inflasi yang sangat krusial untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor tetap terjaga dan perekonomian daerah dapat terus berkembang secara stabil dan berkelanjutan.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi hukum merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Indeks Reformasi Hukum menjadi indikator dalam menilai efektivitas kebijakan hukum, penegakan regulasi, serta kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kota Bogor sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Jawa Barat terus berupaya memperkuat sistem hukum melalui berbagai inovasi kebijakan, digitalisasi layanan hukum, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dengan reformasi hukum yang kuat, diharapkan Kota Bogor mampu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi, pembangunan berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat.



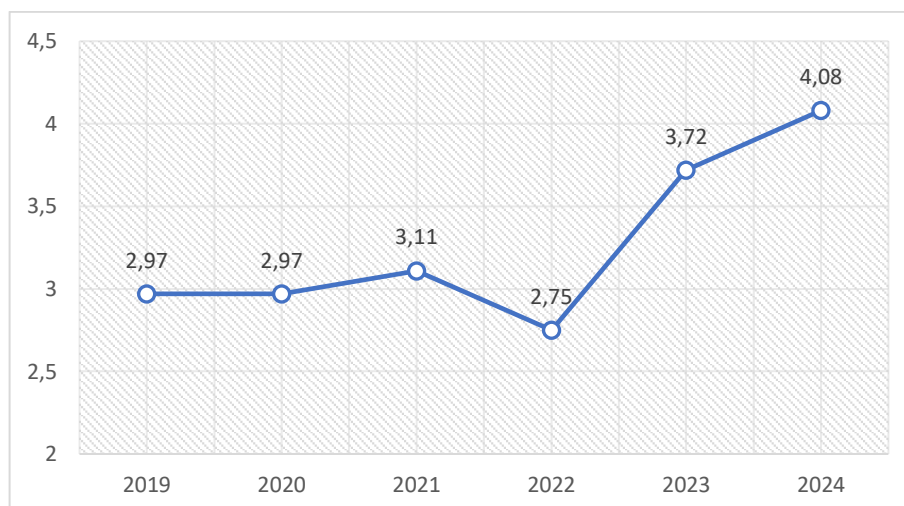
Sumber: Kemenpan-RB

Grafik 2.52 Indeks Reformasi Hukum Kota Bogor Tahun 2023 dan 2024

Indeks Reformasi Hukum di Kota Bogor menunjukkan peningkatan signifikan antara tahun 2023 dan tahun 2024 (Grafik 2.52). Pada tahun 2023, indeks berada di angka 86,32, mencerminkan upaya yang cukup baik dalam reformasi hukum. Namun, pada tahun 2024, indeks meningkat tajam menjadi 98,64, hampir mendekati angka maksimal. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Kota Bogor dalam memperbaiki aspek-aspek hukum yang sebelumnya masih menjadi tantangan, seperti efektivitas regulasi, kepastian hukum, serta kualitas layanan hukum yang lebih baik dan mudah diakses masyarakat. Aspek-aspek hukum yang meningkat lebih baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha, menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk investasi, serta mengurangi potensi konflik hukum di berbagai sektor. Keberhasilan ini perlu terus dijaga dengan memastikan bahwa reformasi hukum tidak hanya sebatas angka, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan di Kota Bogor.

2.4.1.2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan ke pengguna. SPBE bertujuan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, mengurangi birokrasi yang berbelit, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bogor mengalami fluktuasi selama periode tahun 2019-2024. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, indeks berada pada angka 2,97, menunjukkan stabilitas dalam implementasi digitalisasi pemerintahan. Tahun 2021, indeks meningkat menjadi 3,11, menandakan adanya perbaikan dalam penerapan layanan elektronik. Namun, pada tahun 2022, terjadi sedikit penurunan ke angka 2,75, yang kemungkinan besar disebabkan oleh kendala teknis atau tantangan dalam adaptasi sistem baru. Setelah penurunan tersebut, indeks SPBE Kota Bogor menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2023 dengan angka 3,72, dan terus meningkat menjadi 4,08 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bogor berhasil melakukan perbaikan signifikan dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Keberhasilan ini juga mendukung daya saing Kota Bogor sebagai kota yang berorientasi pada teknologi dan inovasi. Penguatan SPBE perlu terus dilakukan dengan memperluas cakupan layanan digital, meningkatkan keamanan sistem, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan layanan berbasis elektronik.

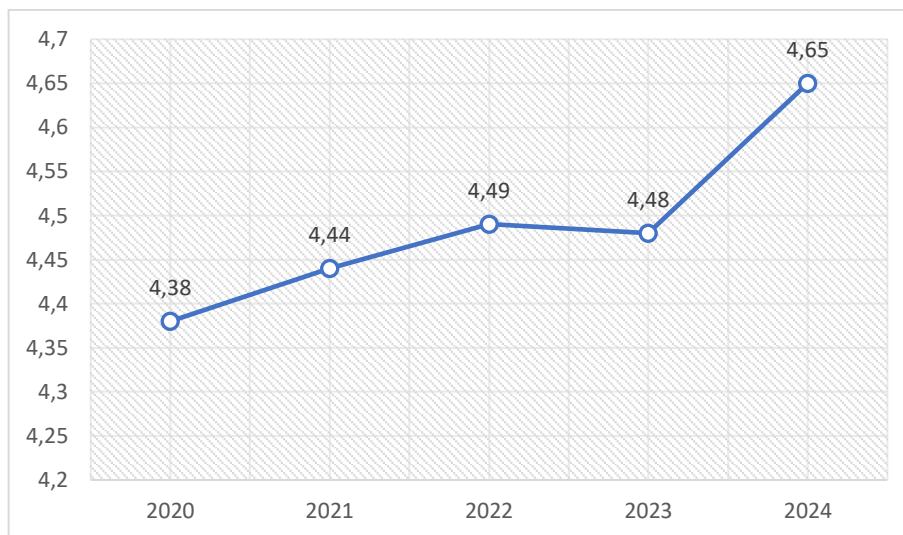


Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dan Kemenpan-RB

Grafik 2.53 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bogor Tahun 2019-2024

2.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah salah satu aspek yang kerap kali menjadi perhatian bagi para pimpinan daerah. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme sdm, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).



Sumber: Kemenpan-RB

Grafik 2.54 Indeks Pelayanan Publik Kota Bogor Tahun 2020-2024

Indeks pelayanan publik di Kota Bogor mengalami fluktuasi selama periode tahun 2020-2024 (Grafik 2.54). Pada tahun 2020, indeks pelayanan publik tercatat sebesar 4,38, menunjukkan kondisi pelayanan yang cukup baik dan terus meningkat pada tahun berikutnya. Namun, pada tahun 2023, indeks mengalami penurunan ke angka 4,48 dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2024, dimana indeks mencapai angka tertinggi selama periode ini, yaitu 4,65. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem pelayanan publik, baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. Tantangan utama yang perlu diatasi adalah menjaga konsistensi peningkatan kualitas layanan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, serta memastikan bahwa setiap inovasi yang diterapkan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.

2.4.1.4. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan

korupsi yang telah dilakukan. Survei melibatkan tiga sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, serta sumber ekspert atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dan lain lain. Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah tersebut. Terdapat tiga kategori nilai SPI, antara lain:

1. Rentan untuk nilai SPI yang berada di rentang 0 – 72,9;
2. Waspada untuk nilai SPI yang berada di rentang 73 – 77,9;
3. Terjaga untuk nilai SPI yang berada di rentang 78 – 100.

Berdasarkan Tabel 2.53, Kota Bogor di tahun 2024 memiliki nilai SPI sebesar 77,54 dan termasuk ke dalam kategori waspada. Bentuk tindakan pemerintah Kota Bogor dalam menindaklanjuti hasil SPI adalah sosialisasi anti korupsi, adanya rencana pendidikan anti korupsi yang berlangsung dari mulai usia dini sehingga kurikulum pelajaran bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, serta pembinaan dan pendampingan pemerintah Kota Bogor terhadap aparaturnya juga telah berlangsung sehingga dari tingkat terbawah hingga ke dinas dan instansi lainnya dapat bersama mencegah tindak pidana korupsi.

Tabel 2.53 Nilai Survei Penilaian Integritas Kota Bogor Tahun 2021-2024

Nilai/ Kategori	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Nilai	75,22	73,06	76,18	77,54
Kategori	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada

Sumber: Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) KPK

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.4.2.1. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan aspek fundamental dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Kota Bogor, sebagai salah satu kota metropolitan di Jawa Barat, menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan efektivitas implementasi perda guna menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Bogor dan instansi terkait berkomitmen untuk menjaga kualitas penegakan perda, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun administratif, demi terciptanya lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif bagi seluruh warganya. Tingkat penegakan perda di Kota Bogor dari tahun 2019 hingga tahun 2024 menunjukkan konsistensi di angka 100%. Hal ini menandakan bahwa seluruh perda yang berlaku telah ditegakkan dengan optimal setiap tahunnya tanpa adanya penurunan atau kendala signifikan dalam implementasinya. Stabilitas indeks penegakan perda ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah memiliki sistem yang kuat dalam mengawal pelaksanaan regulasi daerah. Upaya sosialisasi, penguatan kelembagaan, serta partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan perda perlu terus ditingkatkan agar kebijakan yang diterapkan semakin relevan dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Bogor.

2.4.2.2. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Ketenteraman dan ketertiban merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan masyarakat, investor atau pelaku usaha, dan pembangunan daerah. Indeks ini mencakup angka tingkat kriminalitas serta angka kriminalitas yang berhasil ditangani oleh aparat berwenang. Tingginya angka kriminalitas dapat berdampak negatif terhadap kenyamanan warga, aktivitas bisnis, serta citra Kota Bogor sebagai kota yang aman dan tertib. Sebaliknya,

semakin tinggi persentase kriminalitas yang tertangani, semakin baik efektivitas sistem penegakan hukum yang diterapkan. Diperlukan strategi yang komprehensif dalam menekan angka kriminalitas dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus kejahatan guna memperkuat ketahanan sosial dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Angka kriminalitas di Kota Bogor mengalami fluktuasi dengan tren meningkat dalam periode 2019-2024 (Tabel 2.54). Pada tahun 2019, jumlah kasus kriminal tercatat 919 kasus, kemudian sedikit menurun pada 2020 menjadi 909 kasus. Namun, mulai tahun 2021, angka kriminalitas mulai meningkat menjadi 978 kasus, lalu melonjak drastis pada tahun 2022 mencapai 1.479 kasus. Pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 1.366 kasus, sebelum akhirnya kembali meningkat tajam pada tahun 2024 dengan 1.717 kasus. Dampak dari meningkatnya angka kriminalitas dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk meningkatnya rasa ketidakamanan, gangguan terhadap aktivitas ekonomi, serta menurunnya kualitas hidup warga. Meskipun demikian, jumlah kasus kriminal yang berhasil ditangani di Kota Bogor mengalami peningkatan secara keseluruhan dalam periode 2019-2024. Pada tahun 2019, terdapat 589 kasus kriminal yang tertangani, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 644 kasus dan terus bertambah pada tahun 2021 menjadi 687 kasus. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022, mana angka kasus yang tertangani mencapai 905. Namun, pada tahun 2023, jumlahnya sedikit menurun menjadi 853 kasus, sebelum akhirnya kembali meningkat tajam pada tahun 2024 dengan 1.022 kasus yang berhasil ditangani. Peningkatan jumlah kasus yang tertangani menunjukkan adanya upaya yang lebih intensif dalam pemberantasan tindak kriminal di Kota Bogor. Namun, strategi pencegahan kejahatan harus terus diperkuat dengan pendekatan berbasis komunitas, peningkatan kesejahteraan sosial, serta penguatan regulasi yang dapat menekan angka kriminalitas secara lebih efektif.

Tabel 2.54 Angka Tingkat Kriminalitas di Kota Bogor Tahun 2019-2024 (kejadian)

Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka tingkat kriminalitas	919	909	978	1.479	1.366	1.717
Angka kriminalitas yang tertangani	589	644	687	905	853	1.022

Sumber: Reskrim Kota Bogor

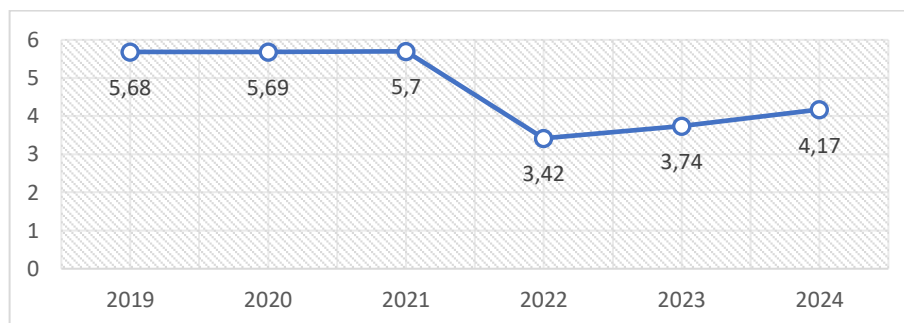
2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Indeks ini dibentuk dari empat (4) komponen yaitu Lingkungan Pendukung, SDM, Pasar dan Ekosistem Inovasi. Indeks Daya Saing Daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta daya tarik investasi.

Berdasarkan Grafik 2.55, Indeks Daya Saing Daerah Kota Bogor menunjukkan tren yang cukup stabil pada periode 2019-2021, dengan angka 5,68 pada tahun 2019, sedikit meningkat menjadi 5,69 pada tahun 2020, dan mencapai 5,7 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan drastis menjadi 3,42, sebelum mengalami sedikit pemulihan pada tahun 2023 dengan kenaikan menjadi 3,74 hingga akhirnya meningkat menjadi 4,17 pada tahun 2024. Penurunan signifikan pada tahun 2022 dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk dampak pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang masih terasa, perubahan regulasi investasi, serta permasalahan infrastruktur dan pelayanan publik yang mungkin mempengaruhi iklim usaha dan daya tarik investasi di Kota Bogor. Selain itu, meningkatnya urbanisasi dan konversi lahan yang tidak terkontrol juga dapat berdampak pada kualitas lingkungan dan produktivitas ekonomi daerah. Kenaikan indeks pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya pemulihan, yang kemungkinan besar didorong oleh kebijakan

pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta menarik kembali investasi ke Kota Bogor. Namun, angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan periode 2019-2021, sehingga menandakan perlunya strategi yang lebih komprehensif dalam meningkatkan daya saing daerah.



Sumber: Bapperida Kota Bogor

Grafik 2.55 Indeks Daya Saing Daerah di Kota Bogor Tahun 2019-2024

2.4.4. Kinerja setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja setiap urusan Pemerintah Kota Bogor yang tertuang dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Dengan adanya IKK, pemerintah daerah dapat mengetahui apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan hasil yang diharapkan. Secara detail, capaian kinerja IKK RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 ditampilkan pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55 Capaian Kinerja IKK pada RPJMD Kota Bogor 2019-2024

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
1	Laju Inflasi	%	3,69	1,5-3,5	2,18	1,5-3,5	1,93	1,5-3,5	5,82	1,5-3,5	3,36	1,5-3,5	1,75	1,75
2	PDRB per kapita	Juta Rp	37,99	40,36	40,36	42,73	45,92	45,10	49,76	47,47	53,24	49,84	56,62	56,62
3	Indeks gini	Point	0,41	0,4	0,412	0,38	0,441	0,37	0,430	0,35	0,464	0,34	0,47	0,47
4	Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	%	94,07	94,2	94,20	93,76	92,76	93,88	92,90	93,99	93,33	94,23	93,47	93,47
5	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Point	75,66	76,67	76,11	76,67	76,59	77,22	77,17	77,78	77,85	78,314	79,03	79,03
6	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.096.828	1.131.890	1.126.927	1.148.968	1.148.968	1.166.046	1.114.018	1.183.124	1.070.719	1.200.202	1.078.351	1.078.351
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,39	1,51	1,33	1,47	1,19	1,46	2,07	1,44	0,96	1,44	0,89	0,89
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,14*	6,66	-0,53	3,57	3,76	5,37	5,65	5,53	5,10	6,04	5,15	5,15
9	Angka melek huruf	Persen	99,98	99,98	99,98	99,98	99,68	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
10	Rata rata lama sekolah	Tahun	10,29	10,63	10,33	10,34	10,53	10,62	10,63	10,74	10,64	10,86	10,71	10,71
11	Harapan lama sekolah	Tahun	13,37	13,60	13,41	13,80	13,42	13,628	13,43	13,83	13,45	14,83	13,51	13,51
12	Angka usia harapan hidup	Tahun	73,37	73,69	73,61	73,87	73,82	74,14	74,13	74,42	75,52	74,57	75,8	75,8
13	Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs	Persen	4,8	4,75	10,66	10,20	5,33	10,10	3,25	10,00	2,59	9,90	2,32	2,32
14	Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)	Persen	4,53	4,31	3,74	4,2	4,77	4,09	4,82	3,98	4,16	3,98	2	2
15	Cakupan desa siaga aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	62,27	64,30	62,27	65,55	61,77	66,79	64,21	68,04	64,81	69,28	67,35	67,35
17	Tingkat pengangguran terbuka	opini	9,57	8,47	12,68	11,79	11,79	11,32	10,78	10,56	9,39	10,37	8,13	8,13
18	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	57,1	59,46	57,1	61,01	54,48	62,56	49,96	64,10	42,96	65,65	45,41	45,41
19	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	Persen	90,35	90,62	90,35	90,80	88,21	90,85	89,22	90,90	90,61	90,91	91,87	91,87
20	Keluarga pra sejahtera	Persen	7,38	7,00	7,00	6,50	5,12	6,00	NA	5,50	NA	5,00	NA	NA

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
21	Indeks kepuasan masyarakat	angka	3,39	3,32	3,34	3,35	3,40	3,40	3,50	3,40	3,57	3,55	3,64	3,64
22	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	42,83	43,00	35,92	43,50	56,67	44,00	42,00	44,50	45,09	45,00	46,01	46,01
23	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	poin	84,90	86,90	75,84	87,90	70,56	84,95	81,70	85,88	83,10	86,49	89,80	89,80
25	Penguatan cadangan pangan	Ton	5,40	30,00	8,18	26,72	0	10	0,829	10	27,40	10	22,24	22,24
26	Kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	0,730	0,696	0,69	0,681	0,70	0,666	0,706	0,651	0,678	0,636	0,68	0,68
27	Kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Konstan	persen	0,81	0,75	0,79	0,73	5,53	0,71	0,758	0,68	0,745	0,66	0,71	0,71
28	Produksi Pertanian (Padi)	ton	5439	5548	4186	2369,4	5496	2376	3378	2392,49	2831,90	2408,9	2966,40	2966,40
29	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	18,34	18,22	18,04	18,18	19,16	18,13	18,98	18,08	18,53	18,03	18,39	18,39
30	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	21,21	21,07	19,52	21,00	19,22	20,95	19,11	20,9	19,23	20,85	19,09	19,09
31	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	persen	18,35	18,28	18,56	18,26	19,16	18,23	18,98	18,21	18,53	18,19	18,39	18,39
32	Kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	0,212	0,211	19,52	0,21	19,22	0,209	19,11	0,209	19,23	0,208	19,09	19,09
33	Kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar konstan	persen	0,22	0,218	19,39	0,217	19,22	0,216	19,07	0,215	18,82	0,214	18,45	18,45

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
34	Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	12,04	12,31	12,55	12,42	11,88	12,53	12,36	12,64	13,38	12,75	14,04	14,04
35	Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar konstan	Persen	22	21,76	-1,86	21,66	2,90	21,56	12,34	12,64	12,80	12,36	13,66	13,66
II ASPEK DAYA SAING DAERAH														
1	Pengeluaran konsumsi perkapita	Ribu Rp.	10.940	11.396	11.564	11.413	11.716	11.534	12.058	11.657	12.656	11.825	11.716	11.716
2	Angka kriminalitas	Angka	0,00048	0,00047	0,00057	0,00046	0,00065	0,00045	0,00081	0,00044	0,0008	0,00043	NA	NA
3	Rasio ketergantungan	Persen	42,28	41,54	41,54	41,17	NA	40,8	42,60	40,44	43	10,07	43,5	43,5
4	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	67,37	69,50	69,03	70,50	72,33	71,50	72,56	72,50	71,13	73,50	75,60	75,60
5	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	62,27	64,30	60,68	65,55	61,77	66,79	64,21	68,04	64,81	69,28	67,35	67,35
III ASPEK PELAYANAN UMUM														
A FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR														
1 PENDIDIKAN														
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	49,06	50,00	49,06	50,55	50,20	51,00	48,80	51,50	38,00	52,00	53,80	53,80
2	Angka partisipasi sekolah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	98,75	100	99,23	99,23
3	Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Angka Partisipasi Murni													
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	108,05	108,06	98,06	108,07	104,89	98,30	106,63	100,00	90,00	100,00	97,50	97,50
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	94,14	94,15	88,01	76,00	82,54	77,00	96,27	78,00	90,00	78,00	80,00	80,00
5	Angka Partisipasi Kasar													
	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	112,60	113,00	107,27	113,05	105,98	113,08	103,35	114,00	95,50	114,30	108,60	108,60
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	104,10	104,30	107,80	104,80	106,40	105,00	105,40	105,50	95,50	106,00	127,40	127,40
6	Angka Partisipasi Sekolah													

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	Persen	115,27	115,28	99,91	100,00	103,00	100,00	101,58	100,00	91,92	100,00	99,98	99,98
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	Persen	30,93	30,94	95,32	96,00	89,00	97,00	93,26	98,00	89,48	99,00	91,66	91,66
7	Angka Putus Sekolah													
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0	0,06	0	0,05	0	0,04	0	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0	0,06	0	0,05	0	0,04	0	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
8	Angka kelulusan													
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Angka Melanjutkan (AM):													
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	111	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Fasilitas Pendidikan :													
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	93,70	94,50	94,50	94,80	96,00	95,00	98,00	95,50	98,73	96,00	99,12	99,12
	Sekolah pendidikan SMP/MTs	Persen	94,70	94,80	94,50	95,00	95,80	95,20	96,00	95,40	98,00	95,60	99,00	99,00
11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	33,14	33,15	39,00	33,16	46,00	33,17	44,00	33,18	44,00	33,19	44,00	44,00
12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	31,26	31,25	20,25	31,22	22,00	30,55	24,00	30,25	31,00	30,00	32,00	32,00
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	1 : 33	1 : 33	1 : 45	01 : 33	1:44	1 : 33	1: 44	1 : 32	0.06458333 3	1 : 32	01:33	1:33
14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP	Rasio	1 : 23	1 : 23	1 : 17	01 : 23	1:19	1 : 23	1:18	1 : 24	1:23	1 : 24	1:24	1:24
15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil	Persen	99,73	100,73	102,02	101,05	100	101,37	102,50	101,69	100,00	102,00	100,00	100,00

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	menamatkan sekolah dasar													
16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99,98	99,98	NA	99,98	NA	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
17	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (Tidak buta aksara)	Persen	99,98	98,15	NA	97,80	NA	97,46	97,46	97,11	97,50	96,77	98,00	98,00
18	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	87,87	88,00	86,90	88,10	89,20	88,20	89,43	88,30	92,30	88,40	93,00	93,00
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Angka	49,00	50,00	48,50	49,00	50,20	49,50	48,80	50,00	48,00	50,50	70,04	70,04
20	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Angka	109,80	108,60	107,50	107,60	103,00	107,70	101,58	107,80	91,92	107,90	99,98	99,98
21	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Angka	86,02	94,15	86,80	90,00	89,00	90,20	93,26	90,40	89,48	90,60	91,66	91,66
22	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Angka	1,42	1,43	1,43	1,44	4,40	1,45	74,50	75,00	75,30	1,47	81,80	81,80
2	KESEHATAN													
1	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	60 / 100.000 KH	55	74,50	70	96,7	65	73,26	60	59,89	55	92,02	92,02
2	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	2,95 / 1.000 KH	2,90	3,15	3,10	3,47	3,00	3,72	2,90	6,70	2,80	6,99	6,99

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	Angka	3,35/1.000 KH	3,35	3,36	3,30	3,58	3,20	3,89	3,10	7,08	3,00	7,73	7,73
4	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0,02	0,0185	0,02	0,20	0,20	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	0,74	0,80	1,33	0,84	1,35	0,88	1,53	0,92	2,97	0,96	1,67	1,67
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	96,10	97,00	93,10	98,00	94,90	99,00	96,10	100,00	97,50	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	Persen	80	85	87	86	90	90	92	95	99,26	100	100	100
8	Rasio Puskesmas Per 30.000 penduduk	Per 30.000 penduduk	0,68	0,66	0,67	0,67	0,67	0,70	0,71	0,71	0,67	0,72	0,67	0,67
9	Cakupan Keluruhan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	98,50	99,00	63,20	99,5	72,10	92	98,53	95	92,65	100	100	100
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	96,50	97,00	7,9	97,5	91,50	98,00	96,55	98,50	94,10	99,00	101,82	101,82
12	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	non polio AFP rate	7 Kasus Negatif	0	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	1 kasus	7 Kasus Negatif	2,77	7 Kasus Negatif	25,12	7 Kasus Negatif	17,54	17,54
13	Cakupan pneumonia balita yang ditangani	Persen	100	100	24,25	60	100	70	78,77	80	0,9831	100	100	100
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100	100	58,88	70	100	80	107,12	90	1,121	100	100	100
15	Prevalensi Hipertensi	%	9,67	9,30	6,40	6,509,00	6,62	7,20	7,25	7,90	9,66	8,40	10,27	10,27
16	Prevalensi Diabetes Militus	%	2,40	2,35	2,08	2,00	1,58	2,00	2,05	2	2,5	2	2,5	2,5
17	Persentase kesembuhan TB Paru	Persen	81,22	86,00	60,84	81,22	44,24	84,50	84,38	86,5	74,28	87,5	43,44	43,44
18	Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	66/100.000 Penduduk	65,00	19,78	62,50	50	62,00	135,07	61,50	128,17	60,00	276,47	276,47

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Angka bebas jentik nyamuk DBD	Persen	95,00	95,30	50,03	95,40	92,00	95,60	94,49	95,70	94,38	96,00	94,48	94,48
21	Persentase penemuan penderita diare pada balita	Persen	100	100	21	100	18,00	100	93,13	100	52,27	100	392,45	392,45
22	Persentase desa/kelurahan yang berpotensi mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	0,42	<0,5	0,42	<0,5	<0,5	<0,5	0,46	<0,5	0,47	<0,5	0,48	0,48
24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	97,2	100	100	100	96,11	100	102,46	100	109,9	100	100	100
25	Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)	%	68	80	72	85	85	90	92	95	96	100	100	100
26	Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	%	0	24	97,83	31	91,53	38	109,47	44	93,96	51	100	100
27	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	%	95,85	96	91,1	92	90,46	93	96,11	94	99,70	95	100,97	100,97
28	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	4	8 (2 puskesmas)	8	100	8	100,00	104,08	100	116	100	100	100
29	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil	Persen	97,60	100	93,61	100	96,70	100	97,36	100	100	100	100	100

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	sesuai standar *(SPM)*IKU													
30	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar*(SPM)*IKU	Persen	98	100	93,14	100	94,90	100	95,88	100	100	100	100	100
31	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*(SPM)	Persen	90,10	100	96,63	100	99,70	100	99,69	100	100	100	100	100
32	Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar *(SPM)	Persen	98	100	78,84	100	94,10	100	94,42	100	100	100	100	100
33	Persentase Komplikasi Kebidanan yang dideteksi dan ditangani	Persen	75	75	74,30	76	80,59	77	80,40	80,50	85,80	80	105,04	105,04
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100	100	84	100	93,80	100	100	100	100	100	100	100
36	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	131,3	100	165,4	100	100	100
37	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
38	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
39	Rasio daya tampung Rumah sakit terhadap jumlah penduduk	persen	2,40	0,19	0,19	0,19	0,28	0,19	0,29	0,29	0,29	0,19	0,3	0,3
40	Persentase Rumah sakit Rujukan tingkat Kabupaten / Kota yang terakreditasi	persen	85,71	90	85,71	95	82	100	95,45	100	100	100	100	100
41	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	persen	100,30	100	93,61	100	96,7	100	97,36	100	100	100	100,44	100,44
42	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan ibu bersalin	persen	99,10	100	93,14	100	94,9	100	95,88	100	100	100	100,66	100,66
43	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	persen	103,50	100	96,63	100	99,70	100	99,69	100	100	100	104,59	104,59
44	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	100	100	78,84	100	94,10	100	94,42	100	100	100	100	100
45	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	51,00	100	46,60	100	100	100	100	100	100	100
46	Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	78,67	100	18,78	100	65	100	104,26	100	100	100	100	100
47	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	100	100	60,20	100	100	100	100	100	100	100	100	100
48	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	69,80	100	68,80	100	101,90	100	103,63	100	100	100	100	100
49	Persentase penderita DM yang mendapatkan	persen	102,91	100	88,50	100	104,50	100	103,69	100	100	100	100	100

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	pelayanan kesehatan sesuai standar													
50	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	89,20	100	88,40	100	76,30	100	131,43	100	100	100	100	100
51	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	110,80	100	104,10	100	50,6	100	110,65	100	100	100	100	100
52	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	86,38	100	95,70	100	92,7	100	109,07	100	100	100	100	100
3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
PEKERJAAN UMUM														
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	88,59	89	83,47	89,25	84,20	89,50	88,23	88,75	88,95	90	90,05	90,05
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	0.0660997	0,0642509	0,576	0,0634	0,1203	0,0625	0,817	0,0617	0,197	0,0609	0,1942	0,1942
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	Persen	88,59	89,00	83,47	89,25	84,20	89,50	88,23	89,75	88,95	90,00	90,05	90,05
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 meter)	Meter	66,44	67,00	66,70	67,50	507,38	68,00	518,377	68,50	96,121	69,50	96,321	96,321
5	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	%	67,21	67,47	3,72	3,80	75,12	7,20	5,43	7,88	5,49	8,55	6,07	6,07
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	11,01	21,80	11,17	32,60	25,11	43,40	25,86	54,20	20,15	65,00	67,86	67,86

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
7	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	Persen	71,57	75	0,014	77,5	0,509	80	60,71	82,5	0,88	85	0,82	0,82
8	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya	Lokasi	745	865	863	985	921	1105	985	1225	1195	1345	1295	1295
9	persentase irigasi kota dalam kondisi baik	Persen	45,83	58,75	57,50	51,45	51,58	52,23	52,62	53,01	53,66	53,79	54,65	54,65
	Rasio jaringan irigasi	Point	0,2578	0,3304	0,2600	0,3374	0,415	0,3445	0,3450	0,3515	0,3600	0,3574	0,3720	0,3720
10	Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik	Persen	90	91,03	91,04	91,69	91,71	92,54	94,81	93,38	82,46	94,23	85,73	85,73
11	persentase penduduk berakses air minum	Persen	91,98	93,15	81,46	98,00	83,83	99,20	68,68	99,60	91,90	100	84,10	84,10
12	proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	persen	91,98	93,15	81,46	98,80	83,83	99,20	68,68	99,60	91,90	100	84,10	84,10
13	persentase areal kawasan kumuh kewenangan kota	Persen	2,62	2,44	2,44	2,27	2,11	2,12	2,02	1,94	2,02	1,77	1,72	1,72
14	tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	10,00	12,5	13,90	15	20,07	17,50	23,57	20,00	20,61	25,00	30,00	30,00
15	rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Persen	11,71	12,00	12,00	12,50	11,38	13,00	11,98	13,50	9,74	14,00	14,70	14,70
16	rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Persen	0,02	0,0190	1,03	1,03	1,57	1,0300	1,49	1,03	1,52	1,0300	1,54	1,54
PENATAAN RUANG														
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	persen	20	20	4,18	20	4,18	20	4,18	20	4,18	20	4,26	4,26
2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	35	37	0,0046	0,005	-	0,0055	0,323	0,0067	0,0035	0,0073	0,0055	0,0055
3	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	persen	80	82	82	84	90	86	95,18	88	86,90	90	88,59	88,59
4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1	rasio rumah layak huni	persen	17,28	16,17	18,37	16,36	17,36	16,54	18,52	16,73	21,16	16,91	21,41	21,41

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2	rasio pemukiman layak huni	persen	95,14	95,47	95,51	95,80	90,99	96,13	96,31	96,46	89,13	96,78	90,56	90,56
3	cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	70,59	74,80	75,00	76,79	80,02	78,77	82,19	80,76	92,82	82,74	94,57	94,57
4	persentase lingkungan pemukiman kumuh kewenangan kota	persen	2,62	2,44	3,99	2,27	2,12	2,12	2,02	1,94	2,02	1,77	1,72	1,72
5	persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (kewenangan kota, provinsi, pusat)	persen	4,31	3,77	9,78	3,37	3,90	2,82	3,78	2,27	5,68	1,73	3,05	3,05
6	proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	persen	1,09	1,07	0,64	1,05	1,05	1,03	-0,10	1,01	0,987	0,99	0,76	0,76
7	cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	persen	77,33	80,67	98,72	84	97,74	87,33	97,74	90,67	99,59	94,00	99,86	99,86
8	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota	Persen		100	100	80	84,85	85	100	90	100	95	100	100
9	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten / Kota	Persen		0	0	80	NA	85	100	90	100	95	100	100
10	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang ditangani	Persen	100	93,22	94,01	86,68	86,68	80,77	76,82	74,17	72,36	67,57	61,68	61,68
11	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni)	Persen	26,80	25,20	24,61	23,22	19,98	21,23	17,81	19,25	7,18	17,26	5,43	5,43
12	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	Persen	8,16	11,53	11,53	10,72	10,72	11,91	10,72	13,10	12,04	14,29	12,71	12,71
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT													

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	rasio (RT/linmas)	3739	3739	3739	3739	3739	3739	3739	3739	1049	3739	1049	1049
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	90	90	100	90	100	90	100	90	100	90	100	100
3	Persentase Penegakan PERDA	persen	90	90	100	90	100	90	100	90	100	90	100	100
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	persen	68	70	100	72,50	100	75	100	77,50	50,00	80	50	50
5	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana	persen	75	77,50	77,50	80,00	94,00	82,50	95,00	85	35,29	85	50	50
6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa	114.412	492.202	315.572	492.202	2.963	492.202	3.195	492.202	28.200	492.202	65.608	65.608
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jiwa	52.099	492.202	241.188	492.202	2.963	492.202	3.195	492.202	3.869	492.202	35.658	35.658
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	12889	3000	2727	3000	2963	3000	2730	3,000	13230	3,000	4830	4830
10	Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan	persen	71,70	100	91,70	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase pelayanan penyelamatan dan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	evakuasi korban kebakaran													
13	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	persen	75	75	87,10	90	100	90	95	91	82,14	100	95	95
6 SOSIAL														
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	91,45	92	92	93	95	94	96	95	100	96	100	100
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	91,45	92	92	93	95	94	98	95	100	96	100	100
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	91,45	92	92	93	94	94	100	95	100	96	100	100
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	8,90	12,80	32,00	15,50	40	35,00	100	40,00	100	43,07	38,00	38,00
5	Persentase pusat kesejahteraan sosial (puskesmas) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	NA	3	3	16	60,35	86	90	100	100	100	100	100
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	24,32	26	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak	Persen	24,32	26	100	100	59,41	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	potensial yang telah menerima jaminan sosial													
9	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	persen	$(534/1915 \times 100\%) = 27,88\%$	18,60	100	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase korban bencana alam dan sosial yg kebutuhan dasarnya terpenuhi pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota	persen	$(3523/3523 \times 100\%) = 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
B FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR														
1 TENAGA KERJA														
1	Tingkat Kesempatan kerja (%)	%	90,38	91,53	87,74	91,87	91,87	92,20	89,22	92,51	90,61	92,81	91,87	91,87
2	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja	Orang	2189	2500	965	2500	2440	2500	7005	2500	6729	2500	5632	5632
3	Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	Orang	109.416	120.358	279.361	293.329	293.329	307.995	198.301	323.395	303.941	339.564	303.941	303.941
4	Penetapan besaran UMK	Rupiah	3.557.146	4.149.797	4.169.806	4.481.780	4.330.249	4.840.322	4.634.429	5.227.547	4.813.988	5.645.750	5.126.897	5.126.897
5	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja (%)	Juta/Peke rja/Tahun	63,91	65,78	64,70	68,59	71,43	71,52	67,21	74,57	76,5	77,76	75,47	75,47
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Tenaga kerja	50	75	40	100	80	125	140	150	176	150	100	100
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan	Tenaga kerja	26	25	20	30	40	30	20	50	50	50	50	50

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	pelatihan kewirausahaan													
9	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	64,71	68,75	68,75	50	68,75	53,57	72,73	60,71	81,82	64,28	84,62	84,62
10	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	17,49	19,48	17,48	22,29	18,28	24,69	18,37	27,09	18,62	29,49	18,81	18,81
11	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Angka	66,24	65,78	64,70	64,89	71,43	65,54	67,21	66,2	76,5	66,86	75,47	75,47
12	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	Persen	100	100	79,96	100	50,60	100	56,60	100	72,05	100	73,62	73,62
13	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/ Kota	Persen	58,75	21,10	21,10	22,40	67,18	23,70	50,68	25,00	82,90	26,30	94,45	94,45
2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
1	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	2,2	2,30	1,87	2,40	52,3	2,50	NA	2,60	2,00	2,70	2,42	2,42
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Bogor	Persen	18,18	18,18	22	22	22	22	22	22	22	22	26	26
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	11,72	12,22	7,39	12,72	NA	13,22	NA	13,72	NA	14,22	NA	NA
4	Rasio KDRT	Persen	0,05	0,1	0,00019	0,0002	0,31	0,00021	0,00013	0,00022	0,00014977	0,00023	0,93	0,93
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	26,88	26,95	50,77	27,08	36,23	27,18	36,56	27,28	47,66	27,38	50,69	Data BPS belum rilis
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu													
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	8,9	7,1	9	5,3	6	3,5	15	1,7	48,48	1,7	25	25
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	1,70	3,50	3,50	5,30	6,30	7,10	0,00	8,90	100,00	10,70	1,16	1,16
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	47,16	56,60	55,31	66,03	68,15	75,47	80,00	84,9	100,00	94,33	100,00	100,00

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
13	rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	99,93	99,94	93,92	99,95	96,50	99,96	92,06	99,97	99,84	99,98	101,05	101,05
14	rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	92,48	92,58	100,68	92,73	96,2	92,82	92,34	92,97	95,94	93	80,6	80,6
15	rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	97,49	97,58	100,72	97,63	provinsi	97,77	provinsi	97,81	92,26	98,01	kewenangan provinsi	kewenangan provinsi
16	rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persen	PUSAT											
17	Persentase ARG pada Belanja langsung APBD	poin	31,0	NA	25,0	25,0	24,1	25,0	2,05	25,0	15,51	25,0	10,3	10,3
18	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten /kota	poin	0,0149	NA	0,0119	0,0112	0,0150	0,0107	0,0180	0,0102	0,0236	0,0098	0,0267	0,0267
19	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	poin	0,0104	NA	0,0155	0,0090	0,1500	0,0088	0,1180	0,0087	17,2700	0,0086	0,0116	0,0116
3 PANGAN														
1	Ketersediaan pangan utama	kg/kap/ta hun	230,61	246,61	231,20	254,87	156,18	242,72	164,92	247,04	151,47	251,81	152,49	152,49
2	Ketersediaan energi perkapita	kcal/kap/hr	2512,80	2400	2375	2400	2230	2445	2403	2475	2318,00	2510	2460	2460
3	Ketersediaan protein perkapita	gram/kap/hr	89,40	68	68	63	63,6	72,00	81,20	74	76,40	77	81,87	81,87
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	91,53	98,00	90,81	93,5	93,75	91,81	94,68	92,31	92,96	92,81	92,39	92,39
4 PERTANAHAN														
1	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	100	100	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	luas izin yang diterbitkan													
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	persen	77	70	73	75	75	80	80	85	85	90	90	90
5 LINGKUNGAN HIDUP														
1	Tersusunnya RPPLH kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Poin	49	40,36	56,33	49,7	64,72	49,80	51,39	49,90	46,67	50,00	50,89	50,89
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Poin	85,86	80,1	80,09	86	99,35	86,10	98,36	86,20	95,92	86,300	86,510	86,510
6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	50	50	50	30	67,55	34	54,55	38	57,14	39	58	58
7	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	pelatihan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah	Persen	50	60	60	100	70	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti.													
10	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	75,37	76	77,20	74,5	81	75,00	81,32	75,20	79,03	75,50	81,40	81,40
11	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	6,26	6,4	7,61	6,6	7,85	6,80	7,80	7,00	7,81	7,20	7,98	7,98
12	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	81,47	80,10	84,81	81,1	88,85	81,80	89,15	82,20	86,84	82,70	89,38	89,38
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten / Kota	Poin	55,29	50,396	55,45	51,371	58,597	52,346	64,29	53,439	58,400	54,532	59,340	54,340
14	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten / Kota	Poin	77,04	76	77,20	74,50	81,19	75	81,32	75,20	79,03	75,50	81,40	81,40
15	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan , ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Persen	26,11	26	37,37	30	38,13	34	54,55	38	57,14	39	58	58
6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Ketersediaan database kependudukan skala Kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	75	80	98	85	99,34	90	99,31	95	100	100	100	100
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	75	76	95	80	96,43	82	96,51	85	98	90	99	99
8	Kepemilikan KTP	Persen	98	99,50	98	97	99,34	98	99,31	98,50	100,00	99	100	100
9	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	94,07	95	95	96	96,43	97	96,51	98	98	100	100	100
10	Cakupan pasangan non muslim berakte kawin	Persen	51	25	31	34	53,82	35	52,49	40	55	45	62,34	62,34
7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	LPM	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB														
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,53	1,52	1,33	1,51	1,19	1,47	2,07	1,46	0,96	1,44	0,89	0,89
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,15	2,15	2,135	2,135	2,03	2,135	2,03	2,135	1,870	2,135	1,89	1,89
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan melalui Kampung KB	Persen	37,83	37,83	37,83	37,83	37,83	37,83	45,94	37,83	61,11	40,54	52,78	52,78
4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	35,14	2,7	44,44	2,7	50,00	50,00
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan	Jumlah	NA	5	5	5	5	5	13	5	13	5	15	15

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	program pembangunan													
6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan	Jumlah	NA	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2	2	1,37	2	1	1
8	Ratio Akseptor KB	Persen	77,41	77,42	77,42	77,5	78,64	77,51	78,66	77,52	64,70	77,53	63,59	63,59
9	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Persen	77,41	77,42	77,42	77,5	78,64	77,51	78,66	77,52	64,70	77,53	63,59	63,59
10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Persen	14,42	14,41	16,23	16	12,09	15,75	12,09	15,00	9,30	14,50	9,9	9,9
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,15	0,13	0,17	0,12	0,12	0,12
12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	11,43	11,42	13,30	11,41	12,44	11,40	12,45	11,39	15,94	11,38	13,88	13,88
13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	22,36	22,40	20,27	22,3	21,13	20,35	20,36	20,40	19,80	20,45	20,01	20,01
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	77,41	77,41	77,42	77,5	78,64	77,51	78,66	77,52	64,70	77,53	63,59	63,59
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	66	66,05	53,01	66,06	58,48	66,07	95,4	66,08	100	66,09	95,73	95,73
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	52,73	52,74	31,97	52,75	40,57	52,76	39,81	52,77	71,90	52,78	71,91	71,91

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	25,75	25,76	18,03	25,77	26,51	25,78	8,46	25,79	75,93	25,80	75,95	75,95
18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	40,68	42,18	49,18	43,48	50,00	44,59	50	45,56	114,71	46,42	87,34	87,34
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	persen	39,94	39,94	44,5	39,94	66,39	39,95	39,32	39,95	79,83	39,96	73,02	73,02
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	93,2	93,2	30	93,2	100	94,9	100	94,9	100	96,6	100	100
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	standarisasi pelayanan													
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	26,47	0	0	0
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	70	77	77	79	79	81	100	83	81,63	85	100	100
27	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	persen	35,13	35,30	35,30	35,47	35,47	35,64	35,47	35,81	49,89	36,00	58,09	58,09
28	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
29	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	Persen	77,41	77,41	77,42	77,5	78,64	77,51	78,66	77,52	64,37	77,53	63,59	63,59
30	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen	11,43	11,42	13,30	11,41	12,44	11,4	12,45	11,39	15,94	11,38	13,88	13,88
9 PERHUBUNGAN														
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	24.060.642	22.442.108	22.442.108	23.140.448	285.298	23.890.192	23.069.825	24.696.261	30.469.356	25.564.066	113.953.567	113.953.567
2	Rasio ijin trayek	rasio (/Jml Pddk)	0,000381	0,0021	0,0021	0,000309	0,000152	0,000435	0,000132	0,000309	0,0114894	0,000189	0,000189	0,000189
3	Jumlah uji kir angkutan umum	kendaraan	5,851	4,504	4,504	5526	5304	5586	2836	5620	2015	5662	5662	5662
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	unit terminal bis	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
5	Persentase layanan angkutan darat	persen	1,11	1,36	1,36	1,22	1,11	1,11	0,000137	1,02	0,04	0,94	0,94	0,94

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Pemasangan rambu-rambu	persen	25,64	14,91	14,91	90	15,07	95,00	83,33	100	100	100	100	100
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	1,31	1,25	1,25	1,19	0,0019	1,13	1,56	1,08	0,0018	1,03	1,64	1,64
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	penumpang	24.261.237	16.466.814	16.466.814	21.457.800	285.298	25.297.272	4.997.609	27.597.024	30.469.356	33.580.638	33.580.638	33.580.638
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga /bandara/terminal	penumpang	4.335.315	4.890.991	4.890.991	5.380.090	27.602	5.918.099	458.857	6.509.909	71.948	7.160.900	7.160.900	7.160.900
11	Rasio konektivitas Kabupaten / Kota	rasio	0,82	0,77	0,77	0,83	0,78	0,90	0,78	0,7	0,78	1	0,8	0,8
12	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota	rasio	0,62	0,76	0,62	0,61	0,61	0,62	0,60	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63
10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	57	66	59,1	74	40,5	81	90	88	94	100	94	94
2	Hasil Penilaian SPBE	Indeks	2,91	2,92	2,97	2,97	3,11	2,98	2,75	2,98	3,72	2,99	4,08	4,08
3	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	persen	7	14	14	21	26,67	28	30	34	37	41	43	43
4	Persentase Keterbukaan Informasi publik	persen	100	100	98	100	77,5	100	79,80	100	86,40	100	100	100
5	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran publik, untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	persen	71,81	71,81	72,69	73,57	70	74,45	81,49	75,33	86,07	76,21	100	100
11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH														
1	Persentase Koperasi Aktif	persen	62,26	65	65	6,88	66,2	10,33	18,75	13,77	21,40	17,21	23,1	23,1
2	Persentase Koperasi berkualitas	persen	8,30	8,70	8,70	9,20	7,00	9,80	8,96	10,20	10,14	10,90	10,73	10,73
3	Jumlah UMKM (wirausaha) baru	UMKM	0	180	124	180	1088	180	260	180	370	180	536	536
4	Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun	Milyar Rupiah	2,3 T	68 M	41 M	81 M	69,5 M	95	65,7	109	194	329	164	164
5	Jumlah PKL yang direlokasi	PKL	418	500	1127	500	0	500	593	500	682	500	689	689
6	Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM	PKL	418	150	50	150	223	150	31	150	87	150	175	175
7	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	Produk	70	75	40	80		85	44	85	65	90	175	175
8	Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	%	75	75	75	80	80	80	-	85	-	90	-	-
9	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Angka	44	64	64	84	64	104	76	124	86	144	96	96
10	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Angka	108	180	180	180	180	180	180	180	-	180	399	399
12 PENANAMAN MODAL														
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	trilyun rupiah	3,1	2,5	1,63	2,53	0,618	2,55	1,571	2,58	1,175	2,6	1.650.561.582.215 (s.d. Triw III)	1.650.561.582.215 (s.d. Triw III)
2	Kenaikan / penurunan Nilai	persen	0	1,2	0,6	0,79	0,36	1,2	1,54	1,20	-64,40	0,78	NA	NA

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Realisasi PMDN (milyar rupiah)													
3	Persentasi peningkatan investasi di Kabupaten / Kota	persen	100	100	46	85	85	90	154	95	-25	100	NA	NA
13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA														
1	Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras	Persen	NA	NA	NA	0	NA	5	NA	5	NA	5	NA	NA
	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	Persen	Jumlah pemuda pelopor yang aktif = 5	20	20	0	0	20	30	20	20	20	0	0
2	Wirausaha muda	orang	25	30	30	35	35	35	200	35	150	35	120	120
3	Persentase sarana prasarana Olahraga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal	Persen	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34	50,01	50	66,67	50	83,33	50	50
4	Rasio ketersediaan SDM Tenaga keolahragaan	Rasio	0,001511 : 2,08	0,001552 : 2,08	0,001552 : 2,08	0,001661 : 2,08	0,001661 : 2,08	0,001734 : 2,08	0,003264: 2,08	0,0011808 : 2,08	0,001773 : 2,08	0,001887: 2,08	0,00348:2,0 8	0,00348:2,0 8
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Poin	0,27	0,01	0,014	0,0148	1,4	0,0148	0,1128	0,0148	3,031	0,0148	2,895	2,895
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	24	25	4,33	4,55	4,33	5,01	2,29	5,51	21,17	6,06	30,22	30,22
7	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	18	0	0	0	60	13	241	12	9	15	141	141
14 STATISTIK														
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Data basis pembangunan daerah	ada/tidak	Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "Kota Bogor Dalam Angka"	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
4	Buku "PDRB"	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15 PERSANDIAN														
1	Persentase Unit Kerja melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi dengan email daerah	persen	NA	20	20	30	30	60	81	70	86	80	100	100
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	79	79	79	80	80	81	77	82	81	83	84,2	84,2
16 KEBUDAYAAN														
1	Presentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni/budaya	Persen	10	10	0	10		10	30,84	10	76,5	10	97,59	97,59
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	cagar budaya non bangunan	32	18	18	18	18	25	20	25	25	25	32	32
3	jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri/ Lomba/ Sayembara Karyaseni	buah	15	15	19	15	21	17	38	19	41	21	54	54
4	Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	Persen	2	2	0	2	0	2		2	1	2	0	0
17 PERPUSTAKAAN														
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	pemustakaan	25421	35000	28530	42000	1084	60000	5249	76000	99615	100000	105234	105234

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eks	67.999	77.370	77.684	79.870	77.684	82370	78354	84870	80834	87370	81584	81584
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	perpustakaan	6,60	7,50	8,40	7,70	7,3	8,00	8,96	8,20	0,43	8,40	0,57	0,57
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	pemustaka	25421	35000	28530	42000	42000	60000	5249	76000	99615	100000	105234	105234
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	37017	39517	38255	42017	38255	44517	38528	47017	39615	49517	40023	40023
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	4	7	6	9	8	11	12	13	20	15	33	33
18 KEARSIPAN														
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	OPD	NA	25	67	45	45,48	70	70	95	41,17	120	77,14	77,14
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	NA	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
C FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN														
1 PARIWISATA														
1	Kunjungan wisata	Orang	7.965.987	7.004.033	3.457.722	3803494	3.803.494	4.183.843	5.174.327	4.602.227	5.650.637	5.062.449	8.093.203	8.093.203
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	2-3 hari	1-2 hari	2-3 hari	1-2 hari	2-3 hari	1-2 hari	1-2 hari
3	PAD sektor pariwisata	Rupiah	239.350.000.000				185.661.140.961		287.860.632.150		328.823.584.610		361.077.093.168	361.077.093.168
2 PERTANIAN														
1	Produktivitas padi per hektar	ton/ha	7	7,14	7,18	7,21	7,28	7,20	7,28	7,25	7,28	7,30	7,20	7,20
2	Cakupan bina kelompok petani	persen	68,97	70,25	75,08	71,43	76,37	75,87	89,40	76,25	93,08	76,62	93,28	93,28
3	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-2,72	-	19,83	NA	NA	NA	2,14	NA	-0,93	-1,21	-3,14	-3,14
4	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	13,14	-	13,40	NA	NA	NA	12,92	NA	10,81	13,94	13	13
3 PERDAGANGAN														

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Ekspor	persen	99.283.771,63 USD	1,1	-0,09 (90.705.930.244)	1,35	0,59 (99.874.168,96)	1,60	15,16	1,85	8,70	2,10	-30,27	-30,27
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan (IUUP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko/ swalayan)	persen	7,21	10	21,06	21,50	21,50	22	26,92	22,5	76,20	23	79,78	79,78
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	persen	16,10	20	87,44	22	99,26	23	98,08	23	55,43	24	70,3	70,3
4	Persentase alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Bertanda terasah yang berlaku	persen	6,81	13,80	10,81	11,36	13,21	11,92	24,25	12,52	38,67	13,15	52,73	52,73
4 PERINDUSTRIAN														
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	75	77,5	77,5	80	80,2	82,5	86,66	85	93,25	85	100	100
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	persen	130,30	8,21	7,06	7,06		7,06	45,60	7,2	7,80	7,5	25,6	25,6
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	persen	0	-2,17	30	0		0	0	0	10	0	12,2	12,2
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	28,41	30	29,41	29,41		29,41	100	29,41	100	29,41	100	100
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan	persen	100%	100%	100	0		0	0	0	0	0	0	0

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait													
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan ijin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten / Kota	persen	100	100	100	0		0	0	0	0	0	0	0
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	persen	0	8	7,14	7,3		7,5	70	7,7	70	7,9	70	70
5 KELAUTAN DAN PERIKANAN														
1	Produksi Ikan Konsumsi	ton	4980	5129	5150,99	4040,00	5206	4182,00	5211	4223,00	3364,51	4264,00	1685,90	1685,90
2	Jumlah Konsumsi Ikan	kg	28.068.674,50	30.939.680	28.899.474	30.519.765	29.991.190	31.130.160	31.094.590	31.749.711	30.076.148	32.378.540	32.359.519	32.359.519
3	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) wilayah kabupaten/kota (sumber data: One data KKP)	Ton	5063,14	5.129	5150,99	NA	5205,69	NA	5211,14	NA	3364,51	4.264	1686	1686
D FOKUS PENUNJANG URUSAN														
1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN														
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	persen	100	100	95,61	100	91,97	100	91,97	100	99,27	100	93	93
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	100	100	97,28	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	100	100	100	100	100	64,66	100	58,85	100	64,69	64,69
8	Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
9	Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2
11	Jumlah dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	persen	100	100	95,61	100	91,97	100	91,97	100	99,27	100	93	93
13	Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD	persen	100	100	97,28	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	100	100	100	100	100	64,66	100	58,85	100	64,69	64,69
Inspektorat Daerah (Perencanaan dan Keuangan)														
15	Maturitas SPIP	predikat	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
16	Peningkatan kapabilitas APIP	predikat	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2 KEUANGAN														
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	persen	10,88	10	11,90	9,5	6	9	5,11	8,5	1,77	8	2,67	2,67
3	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	10,88	10	11,90	9,5	6	9	5,11	8,5	1,77	8	2,67	2,67
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	persen	23,49	≥20	21,15	≥20	24,14	≥20	20,04	≥20	21,67	≥20	23,85	23,85
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	persen	16,54	≥10	21,7	≥10	12,18	≥10	11,56	≥10	22,89	≥10	22,17	22,17
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
8	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	persen	0,05	0,15	0,21	0,17	74,58	0,18	78,39	0,19	80,61	0,20	80,14	80,14
9	Opini Laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Devisiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	persen	12	11	12	11	4	10	18,43	10	4,32	10	2	2
11	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD setahun sebelumnya	prersen	10	11	25	11	14	10	13,85	10	5,40	10	3	3
12	Devisiasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	4	0	6	0	11	0	3,32	0	0,99	0	1	1
13	Manajemen Aset													
14	Adanya Daftar Aset Tetap	predikat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
15	Penyusunan Manual daftar aset tetap	predikat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
16	Adanya proses inventarisasi aset tahunan	predikat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
17	Nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	predikat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3 KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT														
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	1	1	1	1	1	2	2	2	22	2	47	47
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	91,84	92	94,12	92,5	94,4	93	95,39	93,50	85,47	94	153,3	153,3
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	persen	68	75	52,72	77,5	69	80	51,50	82,50	35,31	85	36,68	36,68
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	34	34	35	34	35	34	35	34	35	34	31	31
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	150	150	157	150	150	150	150	150	150	150	142	142
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	3690	3700	3651	3710	3483	3720	4015	3730	4723	3740	5583	5583
7	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	101,53	103,73	103,73	105,16	115,73	105,42	132,78	109,97	58,83	114,73	60,34	60,34
8	Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	9,52	10,43	10,43	11,96	11,56	24,20	21,16	25,07	21,16	25,96	22,98	22,98
9	Rasio pegawai fungsional bersertifikat kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	57,76	100	57,76	100	56,28	56,28
4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	persen	100	100	100	83,3	100	83,30	100	83,30	100	83,30	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	persen	100	100	100	66,7	100	66,70	80	66,71	100	66,70	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	persen	73,68	75	78,30	55,56	97,6	58,33	97,60	61,11	100	63,89	100	100
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	persen	100	100	100	71,65	100	73	91,24	75	63	77	98,00	98,00
5 PENGAWASAN														
1	Persentase pelanggaran pegawai	persen	1,3	0,075	0,3359	0,350	0,016	0,320	0,225	0,300	0,006	0,290	0,004	0,004
2	Persentase tindak lanjut temuan internal	persen	100	100	100	80	55,5	90	93,81	90	94,10	90	87,74	87,74
3	Persentase tindak lanjut temuan eksternal	persen	100	100	100	75	94,39	80	91,63	85	90,20	90	88,99	88,99
4	Persentase peningkatan kapabilitas APIP	persen	70	72,5	72,5	75	75	77,50	84,50	80	84,31	82,50	90,00	90,00
6 SEKRETARIAT DPRD														
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, Bapperida Kota Bogor (2025)

2.5. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan yang menetapkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diterima setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM memiliki peran yang sangat penting, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai penerima layanan. Bagi pemerintah daerah, SPM berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan standar kualitas dan kuantitas layanan publik, serta menjadi indikator untuk menilai kinerja kepala daerah dalam meningkatkan mutu dan ragam pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, bagi masyarakat, SPM menjamin hak mereka untuk memperoleh layanan yang layak, yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk dipenuhi. Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021, penerapan Standar pelayanan Minimal pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kota Bogor ditampilkan pada Tabel 2.56 hingga Tabel 2.57.

Tabel 2.56 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pendidikan dasar	Jumlah warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dam numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang partisipasi dalam pendidikan kesetaan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan nilai Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (Sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Tabel 2.57 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM Bidang kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
6	Pelayanan kesehatan	Jumlah Warga Negara Usia produktif yang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber	100% (sesuai dengan jumlah	Setiap tahun	

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
	pada usia produktif	mendapatkan yang mendapatkan pelayan kesehatan			daya manusia dan tata cara pemenuhan	Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)		
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara Usia lanjut yang mendapatkan yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
10			100%	Setiap tahun			Setiap tahun	

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan			Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)		
11	Pelayan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendptakan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Tabel 2.58 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tabel 2.59 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Fasilitasi penyerdiaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Tabel 2.60 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumberdaya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumberdaya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumberdaya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumberdaya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
5	Perlindungan dan jaminan	Jumlah warga negara korban bencana yang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan	100% (sesuai dengan jumlah	Setiap Tahun	

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
	sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota			sumberdaya manusia	Warga Negara korban bencana yang akan dipenuhi)		

Tabel 2.61 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
2	Pelayan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi	Setiap tahun	

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						Keterangan
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
						rawan bencana yang akan dipenuhi)		
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

2.5.1. Capaian SPM Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan di Kota Bogor terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar;
3. Pendidikan Kesetaraan.

Tabel 2.62 Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan Kota Bogor

No	Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	51,09	50,20	100	100	92,60
2	Pendidikan Dasar	101,29	95,50	100	100	97,03
3	Pendidikan Kesetaraan	0,7	3,39	100	100	96,03

Sumber : Laporan SPM, Bag. Pemerintahan (2025)

2.5.2. Capaian SPM Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Tingkat Kabupaten/Kota ada 12 pelayanan dasar yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan kesehatan Balita;
5. Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif (15-59) Tahun;

7. Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut (>60) Tahun;
8. Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
11. Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberculosis (TBC);
12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Tabel 2.63 Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan Kota Bogor

No	Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	93,6	96,7	100	100	100
2	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	93,1	94,9	100	100	100
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	93,1	99,7	100	100	100
4	Pelayanan kesehatan Balita	78,8	94,1	100	99,28	99,9
5	Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51	46,6	100	96,76	99,82
6	Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif (15-59) Tahun	18,8	62,36	100	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut (>60) Tahun	60,2	100	100	97,91	100
8	Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	68,8	101,9	100	100	100
9	Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	88,5	104,5	100	100	100
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	88,4	76,3	100	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberculosis (TBC)	104,1	50,6	100	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia Human Immunodeficiency Virus (HIV)	95,7	92,7	100	100	100

Sumber : Laporan SPM, Bag. Pemerintahan (2025)

2.5.3. Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Tingkat Kota Bogor ada 2 pelayanan dasar yaitu sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 2.64 Hasil Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Bogor

No	Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	76,92	83,88	100	78,40	91,40
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	71,50	77,90	100	66,74	69,83

Sumber : Laporan SPM, Bag. Pemerintahan (2025)

2.5.4. Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Layanan Dasar yang

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor terdiri dari:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kota.

Tabel 2.65 Hasil Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Bogor

No	Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	84,85	100	100	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	-	100	100	100

Sumber : Laporan SPM, Bag. Pemerintahan (2025)

2.5.5. Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Trantibum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yaitu Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.

Tabel 2.66 Hasil Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Trantibum Kota Bogor

No	Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan SPM, Bag. Pemerintahan (2025)

2.5.6. Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Tingkat Kabupaten/Kota ada 3 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Tabel 2.67 Hasil Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Daerah Kota Bogor

No	Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	100	100	100	99,99
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	98,33
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100	100	84,47

Sumber : Laporan SPM, Bag. Pemerintahan (2025)

2.5.7. Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub

Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Layanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor yaitu Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Tabel 2.68 Hasil Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Pemadam Kebakaran Kota Bogor

No	Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan SPM, Bag. Pemerintahan (2025)

2.5.8. Capaian SPM Urusan Sosial

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di Kota Bogor terdiri atas:

1. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.69 Hasil Capaian SPM Urusan Sosial Kota Bogor

No	Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100	100	100	100	

No	Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100	100	100	100	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100	100	100	100	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100	100	100	100	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan SPM, Bag. Pemerintahan (2025)

2.6. Kerja Sama Daerah

Kerja sama Daerah dapat diartikan sebagai kesepakatan antara pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bersama. Kerja sama Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah. Implementasi Kerja sama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70 Implementasi Kerja sama Kota Bogor

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
1	KB	KB.06	SINERGI	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Fadjry Djufry, Balitbang Kementan	119/KK.6-Bag.Pem/2020	BAG.PEM	B-806/HK.220/H/08/2020	2020	25-08-2020	5	25-08-2025	Kerja Sama mewujudkan Kota Bogor sebagai Kawasan Inovasi Teknologi Pertanian
2	KB	KB.07	KSDD	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Herdiat Sunarya, Bupati Ciamis	119/KK.7-Bag.Pem/2020	BAG.PEM	119/19-Pem.3/2020	2020	14-09-2020	5	14-09-2025	Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah Kota Bogor dan Kabupaten Ciamis
3	KB	KB.08	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Henry Davied Kalangie, PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group)	119/KK.8-Dinkop.UKM/2020	DKUKMDAGIN	TFJ/BGR/210920/002/MOU	2020	21-09-2020	5	21-09-2025	Kerja Sama Penataan Kawasan Pedagang Kali Lima di Wilayah Kota Bogor
4	KB	KB.19	KSDD	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Harnojoyo, Walikota Palembang	119/KK.19-Bag.Pem/2020	BAG.PEM	415.4/25/KB/IV/2020	2020	02-12-2020	5	02-12-2025	Kerja Sama Pembangunan dan Teknologi Informasi antar Daerah Kota Bogor dan Kota Palembang
5	KB	KB.22	SINERGI	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Nenny Yulianry, Ka. Pengadilan negeri Bogor, Herry Hermanus Horo, Ka. Kejari Kota Bogor, Hendri Fuiser, Kapolresta Kota Bogor, Saefudin, Ka Balai Pemasyarakatan Bogor, Ilham Chaidir, Dir RSUD Kota Bogor, Fidiarsjah, Dirut RS MM Bogor, Dudih Syiaruddin, Ka. KPAID Kota Bogor	119/KK.22-DPMPPA/2020	DPMPPA	W.11.U2/2993/UM.05.10/XII/2020 B-2914/M.2.12/Es.2/12/2020 MOU/16/XII/RES.7.4/2020 W11.PAS.PAS.HM.05.02-3877 445/1306-KB/RSUD/XII/2020 HK.03.01/XXV.2/2020 08/MOU-KPAID/XI/2020	2020	05-12-2020	5	05-12-2025	Penanganan Kasus secara Terpadu bagi Perempuan dan Anak di Kota Bogor
6	PKS	PKS.122	KSDPK	Eko Prabowo, Ka. Dishub	Uun Aiunroffiq, PT Grab Teknologi Indonesia	119/Perj.122-Dishub/2020	DISHUB	026/Grab-Pemkotbgr/PKS-BD/XI/2020	2020	15-12-2020	5	15-12-2025	Pembangunan Grab Shelter di Kawasan Stasiun Bogor
7	PKS	PKS.140	KSDPK	Ade Yasin, Bupati Bogor	Bima Arya, Wali Kota Bogor	119/37/PKS/KS/XII/2020	DLH	658.1/Perj.140-DLH/2020	2020	30-12-2020	5	30-12-2025	Pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor
8	PKS	PKS.42	KSDPK	Ihsan Priyawibawa, Dirjen Pajak Kemenkeu Bhimantara Widyajala, Dirjen Peribangan Keuangan Kemenkeu	Bima Arya, Wali Kota Bogor	KEP-71/PJ.08/2020 KEP-42/PK.4/2020	BAPENDA	119/Perj.42-Bapenda/2020	2020	26-08-2020	5	26-08-2025	Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kota Bogor
9	PKS	PKS.45	KSDPK	Eko Prabowo, Ka. Dishub	Becquini Akbar, PT Alikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)	119/Perj.45-Dishub/2020	DISHUB	017/AKAB/GOVREL/JKT/PKS/VIII/2020	2020	01-09-2020	5	01-09-2025	Pembangunan Shelter di Kawasan Stasiun Bogor
10	PKS	PKS.48	KSDPK	Ade Sarip Hidayat, Sekretaris Daerah	Toto Marwoto, Pj. Sekda Kabupaten Ciamis	119/Perj.48-DISTANI/2020	DKPP	119/20-Pem.3/2020	2020	17-09-2020	5	17-09-2025	Penyediaan Pangan Strategis
11	PKS	PKS.50	KSDPK	Drs. Herry Karnadi, M.Si	Henry Davied Kalangie	426.21/Perj.50-Dispors/2020	DISPORA	TFJ/BGR/210920/001/PKS	2020	21-09-2020	5	30-09-2025	Pembangunan Kios PKL di Halaman Parkis Kolam Renang Mila Kencana dan Penataan Kantin dalam Kolam Renang Milakencana
12	KB	KB.02	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Pande Putu Yasa, Perum PPD	119/KB.2-Dishub/2021	DISHUB	03-1/SEKR/PKK/II/2021	2021	10-02-2021	5	10-02-2026	Kerja Sama Pelayanan serta Sarana dan Prasarana Angkutan
13	KB	KB.05	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Martino Wibowo, Ketua STIE GICI	119/KB.5-Bag. Pem/2021	BAG.PEM	021/KET.STIE/GICI/III/2021	2021	04-03-2021	5	04-03-2026	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
14	KB	KB.10	SINERGI	Polana B. Pramesti, Ka. BPTJ	Bima Arya, Wali Kota Bogor	SPJ.260 BPTJ Tahun 2021	DISHUB	119/KB.10-Dishub/2021	2021	21-04-2021	5	21-04-2026	sinergi Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan/Buy The Service (BTS) di Kota Bogor
15	KB	KB.11	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Mujahidin, Rektor UIKA Bogor	119/KB.11-Bag.Pem/2021	BAG.PEM	333/K.12/UIKA/2021	2021	20-02-2021	5	20-02-2026	Pembangunan Kota Bogor Bidang Pendidikan, penelitian, Pengabdian dan pengembangan Inovasi
16	KB	KB.13	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Yunus Arifien, Rektor UNB	119/KB.13-Bag.Pem2021	BAG.PEM	080/REK-UNB/F-MOU/IV/2021	2021	30-04-2021	5	30-04-2026	Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
17	KB	KB.18	KSDD	Aras Tammauni, Bupati Mamuju Tengah	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Bu.007.3/9/V/2021	DISNAKER	119/KB.18-DISNAKER/2021	2021	27-05-2021	5	27-05-2026	Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten mamuju Tengah
18	KB	KB.30	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Mochamad Wahyudi, rektor Universitas Bina Sarana Informatika	119/KB.30-Bag.Pem/2021	BAG.PEM	123/6.01/UBSI/VIII/2021	2021	23-08-2021	5	21-08-2026	Pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
19	KB	KB.39	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Amarulla Octavian, Rektor UNHAN	119/KB.39-Bag.Pem/2021	BAG.PEM	NK/120/VIII/UNHAN/2021	2021	03-08-2021	5	03-08-2026	Pendidikan, penelitian, Pelayanan dan pengabdian Masyarakat
20	KB	KB.41	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Tuty Rosyaty, Ketua STIA Menarasiswa	119.KB.41-Bag.Pem/2021	BAG.PEM	046.9/STIA.M/D/IX/2021	2021	20-09-2021	5	20-09-2026	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
21	KB	KB.42	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Tuty Rosyaty, Ketua STIA Menarasiswa	119.KB.42-Bag.Pem/2021	BAG.PEM	046.9/STIA.M/D/IX/2021	2021	20-09-2021	5	20-09-2026	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
22	KB	KB.47	KSDPK	Syarifah Sofiah (Sekda Kota Bogor)	Diyan Putranto (Dir. LSPP Nusantara)	119/KB.47-Disparbud/2021	DISPARBUD	005/Lsp/SPK/X/2021	2021	2021-10-19	5	2026-10-19	Pengembangan Kepariwisataan melalui Uji Kompetensi bagi Tenaga Kerja Industri Pariwisata di Kota Bogor
23	KB	KB.57	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Almer Faiq Rusyadi, Ketua Kadin	119/KB.57-Bappeda/	BAPPERIDA	21.053/KB/XII/DP-K	2021	13-12-2021	5	13-12-2026	Kerja Sama Pengembangan usaha di Kota Bogor
24	PKS	PKS.01	KSDPK	Syarifah Sofiah (Kota Bogor)	DR. H. Agus Suparman, MM (PT Divaintan Putripratama)	119/Perj.1-Dishub/2021	DISHUB	003/M-DIPP/PKS-JPO/1/2021	2021	2021-01-06	-	2026-01-06	Pembangunan Jembatan penyebrangan Orang (JPO) dan Penyelenggaraan Reklame pada Jembatan penyebrangan Orang (JPO)
25	PKS	PKS.26	KSDPK	Bima Arya	Eka Sari Lorena Soebakti	119/Perj.26-Bag.Ekon/2021	BAG.EKON	001/MOU/Bogorhitz/II/2021	2021	2021-05-19	-	2026-05-19	Sinergi Pengembangan UMKM Kota Bogor melalui Aplikasi Bogor Hitz
26	PKS	PKS.26	KSDPK	Bima Arya (Wali Kota Bogor)	Eka Sari Lorena Soebakti	119/Perj.26-Bag.Ekon/2021	BAG.EKON	001/MoOU/BogorHitz/II/2021	2021	2021-05-19	-	2026-05-19	Sinergi Pengembangan UMKM Kota Bogor melalui Aplikasi Bogor Hitz
27	PKS	PKS.35	KSDPK	Syarifah Sofiah (Sekda Kota Bogor)	Sandi Noorzaman (Ketua LPPM STIE GICI)	119/Perj.35-Bag.Ekon/2021	BAG.EKON	021/KET.STIE/GICI/VI/2021	2021	2021-06-17	-	2026-06-17	Pemberdayaan UMKM di Kota Bogor
28	PKS	PKS.37	KSDPK	Syarifah Sofiah (Sekda Kota Bogor)	Apriyadi Malik (Dirut PT Ragta Dea)	119/Perj.37-Dishub/2021	DISHUB	21-105/RGT/PKS JPO/VI/2021	2021	2021-06-21	-	2026-06-21	Pembangunan Jembatan penyebrangan Orang

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
													(JPO) dan penyelenggaraan reklame pada jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Pajajaran
29	PKS	PKS.40	SINERGI	Ibrahim (Dirut Perumda BPR Bank Kota Bogor)	Syarifah Sofiah D (Sekda Kota Bogor)	119/Perj.40-Bag.Pem/2021	BAG.PEM	119-320/BKB	2021	2021-07-06	-	2026-07-06	Pemberian Fasilitas Kredit bagi ASN dan Pegawai Kontrak Waktu Tertantu (PKWT) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
30	PKS	PKS.41	KSDPK	Saptandri Widiyanto, Plt Dir angkutan BPTJ	Eko Prabowo, ka Dishub	SPJ-BPTJ 262 Tahun 2021	DISHUB	119/Perj.41-Dishub/2021	2021	19-07-2021	5	19-07-2026	Penyelenggaraan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan/Buy The Service (BTS) di Kota Bogor
31	PKS	PKS.45	KSDPK	Syarifah Sofiah (Sekda Kota Bogor)	Gito Wahyudi (Dir PT Cartenz Tekno Lab)	119/Perj.45-Diskominfo/2021	DISKOMINFO	038-PKS/CTI-KOTABOGOR/CITIGOV/X/2021	2021	2021-08-02	-	2026-08-02	Penyediaan dan pemanfaatan Aplikasi CITIGOV sebagai Kanal Pelayanan Publik Online
32	PKS	PKS.47	KSDPK	Syarifah Sofiah (Sekda Kota Bogor)	Diyan Putranto (Dir. LSPP Nusantara)	119/Perj.47-Disparbud/2021	DISPARBUD	055/Lsp/SPK/X/2021	2021	19/10/2021	5	19/10/2026	Pengembangan kepariwisataan melalui uji kompetensi bagi tenaga kerja industri pariwisata di kota Bogor
33	PKS	PKS.49	KSDPK	Bima Arya (Wali Kota Bogor)	Alexander S. Rusli (Ketuan Badan Pengurus Yayasan WWF Indonesia)	119/Perj.49-DLH/2021	DLH	051/WWF-ID/IGL-PJJ/VIII/FY22/2021	2021	2021-08-26	-	2024-08-26	Aksi Bersama untuk Kota Bogor sebagai Bagian Plastic Smart Cities
34	PKS	PKS.56	KSDPK	Syarifah Sofiah (Sekda Kota Bogor)	Edwin Aryas (Direktur PT Indonesia Outdoor)	119/Perj.56-Dishub/2021	DISHUB	008/M-DIPP/PKS-JPO/X/2021	2021	2021-10-13	-	2027-01-03	Revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Penyelenggaraan Reklame pada JPO di Jalan Pajajaran, Baranangsiang
35	PKS	PKS.58	KSDPK	Henny Rochaeny, M.Pd (Dir Poltek AKA)	Ganjar Gunawan, AP (Ka. Disperdagin)	119/Perj.58-Disperdagin/2021	DKUKMDAGIN	B.5769/BPSDMI/AKA/HK/XI/2021	2021	2021-11-17	-	2024-11-17	Pelaksanaan Kegiatan Inkubator Bisnis dan Pengabdian Kepada Masyarakat
36	PKS	PKS.62	KSDD	Yusmada Faizal (ka SDA Prov DKI Jakarta)	Chusnul Rozaqi (ka DPUPR)	119/Perj.62-DPUPR/2021	DPUPR	10141/073-7	2021	2021-11-25	-	2026-11-25	Penyediaan dan Pengelolaan Alat Ukur Curah Hujan Otomatis di Wilayah Kota Bogor
37	PKS	PKS.64	KSDPK	Sujatmiko Baliarto, Ka. Disdukcapil	Andi Tatat, Dirut RS Ummi Bogor	477/Perj.64-Disdukcapil/2021	DISDUKCAPIL	062/09/RSUMMI/PKS/XI/2021	2021	26-11-2021	5	26-11-2026	Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga, akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak di RS ummi Bogor
38	PKS	PKS.65	KSDPK	Sujatmiko Baliarto, Ka. Disdukcapil	Rizasyah Daud, Dirut RS Azra	477/Perj.65-Disdukcapil/2021	DISDUKCAPIL	748/RSAZRA/XI/2021-SPK	2021	26-11-2021	5	26-11-2026	Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga, akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak di RS AZRA
39	PKS	PKS.66	KSDPK	Sujatmiko Baliarto, Ka. Disdukcapil	Emma Ratnawati, Dirut RS Hermina	477/Perj.66-Disdukcapil/2021	DISDUKCAPIL	257/PKS/MKT-RSHBGR/XI/2021	2021	26-11-2021	5	26-11-2026	Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga, akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak di RS Hermina Bogor

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
40	PKS	PKS.67	KSDPK	Sujatmiko Baliarto, Ka. Disdukcapil	RD Yunina Endangsari, Dirut RSKIA Sawojajar	477/Perj.67-Disdukcapil/2021	DISDUKCAPIL	022/PKS-P/RSKIA SAWOJAJAR/XI/2021	2021	26-11-2021	5	26-11-2026	Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga, akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak di RSKIA Sawojajar
41	PKS	PKS.68	KSDPK	Sujatmiko Baliarto, Ka. Disdukcapil	Ilham Chaidir, Dir RSUD Kota Bogor	477/Perj.68-Disdukcapil/2021	DISDUKCAPIL	119/826-PKS/RSUD/XI/2021	2021	26-11-2021	5	26-11-2026	Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga, akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak di RSUD Kota Bogor
42	PKS	PKS.69	KSDPK	Sujatmiko Baliarto, Ka. Disdukcapil	Handi Wijaya, Dirut RS Vania	477/Perj.69-Disdukcapil/2021	DISDUKCAPIL	953/SKE/DIR/RSV/XII/2021	2021	26-11-2021	5	26-11-2026	Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga, akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak di RS Vania
43	PKS	PKS.70	KSDPK	Sujatmiko Baliarto, Ka. Disdukcapil	M. Djunaidi Ilyas, Dir RS Islam Bogor	477/Perj.70-Disdukcapil/2021	DISDUKCAPIL	1411.1/Sekre.RSIB/J/XI/2021	2021	26-11-2021	5	26-11-2026	Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga, akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak di RS Islam Bogor
44	PKS	PKS.71	KSDPK	Sujatmiko Baliarto, Ka. Disdukcapil	Djoko Setionegoro, Dirut RS PMI Bogor	477/Perj.71-Disdukcapil/2021	DISDUKCAPIL	E.01015/MOU/XI/2021	2021	26-11-2021	5	26-11-2026	Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga, akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak di RS PMI Bogor
45	PKS	PKS.72	KSDPK	Sujatmiko Baliarto, Ka. Disdukcapil	Oktavia Nurdiani, Dir RS Melania	477/Perj.72-Disdukcapil/2021	DISDUKCAPIL	022/PKS-P/RS MELANIA/XI/2021	2021	26-11-2021	5	26-11-2026	Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga, akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak di RS Melania
46	PKS	PKS.73	KSDPK	Sujatmiko Baliarto, Ka. Disdukcapil	Alfathdry, Dir RSIA Bunda Suryatni	477/Perj.73-Disdukcapil/2021	DISDUKCAPIL	54/PKS/RSIA.BS/XI/2021	2021	26-11-2021	5	26-11-2026	Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga, akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak di RSIA Bunda Suryatni
47	PKS	PKS.74	KSDPK	Sujatmiko Baliarto, Ka. Disdukcapil	Yusrahma Nurina, Dir RS BMC Mayapada Hospital	477/Perj.74-Disdukcapil/2021	DISDUKCAPIL	115/PKS/BMC-MH/XI/2021	2021	26-11-2021	5	26-11-2026	Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga, akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak di RS BMC Mayapada Hospital
48	PKS	PKS.75	KSDPK	Sujatmiko Baliarto, Ka. Disdukcapil	Eva Erawati, Dir RS Mulia Pajajaran	477/Perj.75-Disdukcapil/2021	DISDUKCAPIL	069/PKS-DIR/RSMP/XI/2021	2021	26-11-2021	5	26-11-2026	Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga, akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak di RS Mulia Pajajaran
49	PKS	PKS.80	KSDPK	Samson Purba, Ka. DisKUKM	Iko Suryanti, Dirut CV Roemah Sakola Kopi	119/Perj.80-Dinkop UKM/2021	DKUKMDAGIN	001/PKS/RSK/X/21	2021	23-10-2021	5	23-10-2026	Pengelolaan Kawasan Kuliner Bogor
50	PKS	PKS.84	KSDPK	Gunawan, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bogor	Bima Arya, Wali Kota Bogor	0233.Pj/STH.01.01/C02 030000/2021	BAPENDA	119/Perj.84-Bapenda/2021	2021	27-12-2021	5	27-12-2026	Pemungutan dan Penyetoran Pajak penerangan jalanan Pembayaran Rekening Listrik pemerintah Daerah Kota Bogor
51	PKS	PKS.86	KSDPK	Ujang Suwarnan, Dekan FEMA IPB	Rudy Mashudi, ka. Bappeda	2856.IT3F9/PK.02.01/2 021	BAPPERIDA	119/Perj.86-Bappeda/2021	2021	28-12-2021	5	28-12-2021	Program pendidikan, Penelitian, pengabdian kepada Masyarakat dan pembangunan Manusia di Kota Bogor
52	KB	KB.02	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Dede Kardaya, rektor UNIDA	119.KB.2-Bag.Pem/2022	BAG.PEM	67/01/NK-X/1/2022	2022	11-01-2022	5	11-01-2027	Pengembangan Sumber daya Manusia, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
53	KB	KB.04	KSDPK	Ngadino Surip, Rektor UMB	Bima Arya, Wali Kota Bogor	07.A/053/MoU/1/2022	BAG.PEM	119/KB.04-Bag.Pem/2022	2022	18-01-2022	5	18-01-2027	Program Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
54	KB	KB.05	SINERGI	Jumeri, Dirjen PAUD Diknasmen Kemendikbudristek	Bima Arya, Wali Kota Bogor	1571/C/HK.02.06/2022	DISDIK	119/KB.05-DISDIK/2022	2022	20/01/2022	5	20/01/2027	PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
55	KB	KB.10	SINERGI	Dedi Sopandi, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov Jabar	Bima Arya, Wali Kota Bogor	MOU-2/WPB.13/2022	BAG.EKON	119/KB.10-BAG.EKON/2022	2022	07/02/2022	5	07/02/2027	KERJASAMA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM
56	KB	KB.18	KSDPK	Bima Arya	Bibin Rubini	119/KB.18-DisKUMKDagin/2022	DKUKMDAGIN	16/Rektor/Unpak/III/2022, 023/P/III/DEKOPINDA Kota Bogor/2022, 14.001/PRM-SBU1/III/2022	2022	24/03/2022	5	24/03/2027	Kemitraan Koperasi dalam Pengembangan Alternatif Sumber Daya Pangan
57	KB	KB.20	KSDPK	Bima Arya	Ari Kuncoro	119/KB.20-Bag.pem/2022	BAG.PEM	28/NKB/R/UI/2022	2022	01/04/2022	5	01/04/2027	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
58	KB	KB.27	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Yuno Abeta Lahay (Ka. PHRI)	119/KB.27-Dinkes/2022	DINKES	11/BPC PHRI KOTA BOGOR/V/2022	2022	31-05-2022	5	31-5-2027	Kerja Sama Dukungan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor
59	KB	KB.29	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Murniati Mukhlisin, Rektor IAI Tazkia	119/KB.29-BAG.PEM/2022	BAG.PEM	035/KB/DN/INSTITUT-TAZKIA/6/2022	2022	14/06/2022	5	14/06/2027	TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI PENINGKATAN SDM
60	KB	KB.31	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Seruni Dinitri, Ketua STP Bogor	119/KB.31-Disparbud/2022	DISPARBUD	020/MOU/STPB-KET/VI/2022	2022	29-06-2022	5	29-06-2027	Tridharma Perguruan Tinggi
61	KB	KB.41	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Dedie A. Rachim, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bogor	119/KB.41-Disdik/2022	DISDIK	559/0917-E	2022	02-09-2022	4	02-09-2026	Sinergi dan Optimalisasi Peran gerakan Pramuka untuk Mengurai Masalah Prioritas di Kota Bogor
62	KB	KB.46	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Detia Tri Yunandar, Dir Polbangtan	119/KB.46-Bag.Pem/2022	BAG.PEM	945/SM.210/I.7/09/2022	2022	13-09-2022	5	13-09-2027	Pengembangan Sumber daya Manusia, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
63	KB	KB.48	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Ady Muzadi, PT beam Mobility Indonesia	119/KB.48-Dishub/2022	DISHUB	001/BMI/09/2022	2022	23-09-2022	5	23-09-2027	Layanan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Bogor
64	KB	KB.52	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Mangadar Situmorang, Rektor Unpar	119/KB.52-BAPPEDA/2022	BAPPERIDA	III/R/2022-09/096-MoU	2022	10-10-2022	5	10-10-2027	Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat
65	KB	KB.53	KSDPK	Erna Hernawati, Rektor UPN "Veteran" Jakarta	Bima Arya, Wali Kota Bogor	520/UN61.0/HK.07.00/2022	BAG.PEM	119/KB.53-BagPem/2022	2022	13-10-2022	5	13-10-2027	Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
66	KB	KB.56	SINERGI	Heru pambudi, Seljen Kemenkeu	Bima Arya, Wali Kota Bogor	NK-44/MK.1/2022	BKPSDM	119/KB.56-BKPSDM/2022	2022	24/10/2022	5	24/10/2027	Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN pada Instansi Pemerintah Daerah
67	KB	KB.63	KSDPK	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Fahrurrozi (Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bogor)	119/KB.63-DINKES/2022	DINKES	68/KTR/IV-07/1122	2022	22/11/2022	5	22/11/2027	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kota Bogor Dalam Rangka universal health Coverage
68	KB	KB.66	KSDD	Bima Arya, Wali Kota Bogor	Herman Suherman, Bupati Cianjur	119/KB.66-Bag.Pem/2022	BAG.PEM	134.1/MoU.32/Pem/2022	2022	01-12-2022	5	01-12-2027	Kerja Sama pembangunan Antar Daerah
69	KB	KB.67	KSDPK	Putu Moda Arsana, Ketua KKI	Bima Arya, Wali Kota Bogor	HK.03.05.64.2022	DINKES	119/KB.67-Dinkes/2022	2022	05/12/2022	5	05/12/2027	Pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
													Dokter Gigi Dalam Rangka Percepatan Pelayanan Publik di Kota Bogor
70	NK	NK.02	SINERGI	Dedi Sopandi, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Prov Jabar	Bima Arya, Wali Kota Bogor	MOU-2/WPB.13/2022	BAG.EKON	119/KB.10-Bag.Ekon/2022	2022	07-02-2022	5	07-02-2027	Kerja Sama Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program
71	NK	NK.03	SINERGI	Putu Moda Arsana, Ketua KKI	Bima Arya, Wali Kota Bogor	HK.03.05.64.2022	DINKES	119/KB.67-Dinkes/2022	2022	05-12-2022	5	05-12-2027	Pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi Dalam Rangka Percepatan Pelayanan Publik di Kota Bogor
72	NK	NK.05	SINERGI	Jumeri, Dirjen PAUD Diknasmen Kemendikbudristek	Bima Arya, Wali Kota Bogor	1571/C/HK.02.06/2022	DISDIK	119/KB.5-Disdik/2022	2022	20-01-2022	5	20-01-2027	Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak
73	NK	NK.44	SINERGI	Heru pambudi, Sekjen Kemenkeu	Bima Arya, Wali Kota Bogor	NK-44/MK.1/2022	BKPSDM	119/KB.56-BKPSDM/2022	2022	24-10-2022	5	24-10-2027	Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN pada Instansi Pemerintah Daerah
74	PKS	PKS.01	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Ka. Disdukcapil)	Fidiansjah (Dirut RSJ MM)	119/Perj.01-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	HK.03.01/XXV.2/132/2022	2022	2022-01-03	-	2027-01-03	pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak bagi warga Kota Bogor yang melahirkan serta pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kematian dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi warga Kota Bogor yang meninggal di Rumah Sakit Jiwa DR. H. Marzoei Mahdi Bogor
75	PKS	PKS.02	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Ka. Disdukcapil)	Srie Sofia Herawati	119/Perj.02-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	001/PMB/1/2022	2022	2022-01-03	-	2027-01-03	pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak bagi warga Kota Bogor yang melahirkan di Pimpinan Praktek Mandiri Bidan "Srie Dody"
76	PKS	PKS.04	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Ka. Disdukcapil)	Dhima Paramitha Oktacynara	119/Perj.04-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	001-S/PKS-RSIAP/1/2022	2022	2022-01-03	-	2027-01-03	pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak bagi warga Kota Bogor yang melahirkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pasutri Bogor
77	PKS	PKS.05	KSDPK	Asep Denih (Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pakuan)	Sri Nowo Retno (Ka. Dinkes)	119/Perj.05-Dinkes/2022	DINKES	170/D/FMIPA/1/2022	2022	2022-01-13	5	2027-01-13	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan Praktek Kerja Profesi Apoteker
78	PKS	PKS.06	KSDPK	Sri Nowo Retno (Ka. Dinkes)	Agus Setiawan (Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan)	119/Perj.06-Dinkes/2022	DINKES	83/PKS/FIK/UI/2022	2022	2022-01-14	-	2027-01-14	Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
79	PKS	PKS.10	KSDPK	Sri Nowo Retno (Ka. Dinkes)	Dr. Amroussy DT Marsis, MARS.	440/Perj.10-Dinkes/2022	DINKES	001/PKS - RSGMS/1/ 2022	2022	26/01/2022	4	26/01/2026	Masyarakat di Kota Bogor PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) SEBAGAI BAGIAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
80	PKS	PKS.11	SINERGI	Sri Nowo Retno (Ka. Dinkes)	Dr. Amroussy DT Marsis, MARS.	440/Perj.11-Dinkes/2022	DINKES	002/PKS RSGM/1/2022	2022	26/01/2022	4	26/01/2026	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DI KOTA BOGOR
81	PKS	PKS.15	KSDPK	Syarifah Sofiah D, Sekda Kota Bogor	Hanneke Oudkrekk, Childfund Internasional	119/Perj.15-Bappeda/2022	BAPPERIDA	2102/CFI/PKS-BOG/2022	2022	21-02-2022	5	21-02-2027	Perlindungan Anak dan Penyisipan Generasi Muda Berkualitas di Kota Bogor
82	PKS	PKS.17	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Ka. Disdukcapil)	Saprudin (Ketua LPPM Mensis)	119/Perj.17-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	08.02/PKS/LPPM-STIA.M/III/2022	2022	2022-03-01	-	2027-03-01	Kajian dan Survei Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bogor
83	PKS	PKS.18	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Ka. Disdukcapil)	Arie Patramanda (Dirut RSIA Nuraida)	119/Perj.18-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	003/PKS/MKT-RSIAN/II/2022	2022	2022-03-01	-	2027-03-01	Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak di Rumah Sakit Ibu dan Anak Nuraida
84	PKS	PKS.26	KSDPK	Syarifah Sofiah (Sekda Kota Bogor)	Ilham Chaidir (Dir RSUD Kota Bogor), Fauziah Rihani (Ka. RS Bhayangkara TK IV)	119/Perj.26-DP3A/2022	DP3A	119/185-PKS/RSUD/III/2022, B/08/2022/RSBB	2022	2022-03-21	-	2027-01-25	Pelayanan Medikolegal dan Pelayanan Kesehatan lainnya secara gratis untuk korban tindak kekerasan perempuan dan anak masyarakat Kota Bogor
85	PKS	PKS.27	KSDPK	Rahmawati (Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Universitas Sahid)	Sri Nowo Retno (Ka. Dinkes)	119/Perj.27-Dinkes/2022	DINKES	30/USJ.17/N.26/2022	2022	2022-03-22	-	2027-03-22	Implementasi tri dharma perguruan tinggi a. pendidikan berupa praktik belajar lapangan b. penelitian bersama c. pengabdian kepada masyarakat
86	PKS	PKS.28	KSDPK	Ade Jubaedah (Ketua STIKES Pelita Ilmu Depok)	Sri Nowo Retno (Ka. Dinkes)	119/Perj.28-Dinkes/2022	DINKES	009/STIKes-PID/DPK/MOU/III/2022	2022	2022-03-22	-	2027-03-22	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
87	PKS	PKS.29	KSDPK	Yudi Wahyudin (Dekan Fakultas Pertanian Universitas Djuanda Bogor)	Helmi Haris (Dekan Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Djuanda Bogor)	119/Perj.29-DKPP/2022	DKPP	73/01/FAPERTA-B/MOA/III/2022, 23.5/01/FTIPH-E/III/2022	2022	2022-03-24	-	2027-03-24	Implementasi Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
88	PKS	PKS.31	KSDPK	Iceu Pujiati (Ka. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor)	Saprudin (Ketua Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STIA Menarasiswa yang berkedudukan	119/Perj.31-DP3A/2022	DP3A	07.02/PKS/LPPM-STIA.M/II/2022	2022	2022-03-28	-	2027-03-28	Kajian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bogor
89	PKS	PKS.33	KSDPK	Deni Hendana (Ka. Bapenda)	Muhamad Aditya Wiradharma (Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Bogor)	119/Perj.33-Bapenda/2022	BAPENDA	005/BOG-PKS/2022	2022	2022-04-01	-	2027-04-01	Pengelolaan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah
90	PKS	PKS.35	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Ka. Dinas)	Torang P. Panjaitan (Pimpinan Jemaat HKBP Bincarung Bogor)	477/Perj.35-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	01/HKBP/28.21/06.2/IV/2022	2022	2022-04-05	-	2027-04-05	Percepatan Peningkatan Cakupan

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
				Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)									Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bincarung Bogor
91	PKS	PKS.37	KSDPK	Meti Kusmiati (Pimp. AKBID PRIMA HUSADA BOGOR)	Sri Nowo Retno (Ka Dinkes Kota Bogor)	119/Perj.37-Dinkes/2022	DINKES	019/MOU/AKBID-PHB/III/2022	2022	2022-04-08	-	2027-04-08	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
92	PKS	PKS.38	KSDPK	Cecep Hamzah (Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra Pena Bogor)	Sri Nowo Retno (Ka. Dinas Kesehatan Kota Bogor)	119/Perj.38-Dinkes/2022	DINKES	421.5/065/PKS/SMK-PP/IV/2022	2022	2022-04-08	-	2027-04-08	Praktik Klinik dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
93	PKS	PKS.42	KSDPK	Syarifah Sofiah (Sekretaris Daerah Kota Bogor)	Agus Suparman (Direktur Utama PT Divaintan Putripratama)	119/Perj.42-Dishub/2022	DISHUB	003-Add/M-Dipp/PKS-JPO/IV/2022	2022	2022-04-22	4	2026-04-22	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Penyelenggaraan Reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
94	PKS	PKS.46	KSDD	Muhammadiyah (Ka Distransnaker Kabupaten Mamuju Tengah)	Elia Buntang (Ka. Disnaker)	119/Perj.46-Disnaker/2022	DISNAKER	469.1/41/V/2022/DTT	2022	2022-05-12	-	2027-05-12	Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi/Kawasan Transmigrasi Salulisu Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
95	PKS	PKS.49	SINERGI	Firdaus (Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Ramlan Rustandi (Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Bogor)	119/Perj.49-DPMPTSP/2022	DPMPTSP	2.206/KK.10.17/VI/PW.00/05/2022	2022	2022-05-18	-	2027-05-18	Pelayanan Non Perizinan di Mal Pelayanan Publik Kota Bogor
96	PKS	PKS.50	SINERGI	Firdaus (Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Nasrul (Ka. Pengadilan Agama Bogor)	119/Perj.50-DPMPTSP/2022	DPMPTSP	W10-A18/1405/HM.00/V/2022	2022	2022-05-18	-	2027-05-18	Pelayanan Non Perizinan Di Mal Pelayanan Publik Kota Bogor
97	PKS	PKS.52	KSDPK	Zainal Muttaqin (Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusa Bangsa)	Rudy Mashudi (Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor)	119/Perj.52-Bappeda/2022	BAPPERIDA	004/LPPM-UNB/PKS/VI/2022	2022	2022-06-13	-	2027-06-13	Kolaborasi Penelitian, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
98	PKS	PKS.55	SINERGI	Sujatmiko Baliarto (Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Y. Waskito (Ka. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bogor)	119/Perj.55/Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	W11.PAS.PAS4.UM.01.01-1296	2022	2022-06-20	-	2027-06-20	Pemenuhan Hak Identitas Bagi Warga Binaan Pemasarakatan
99	PKS	PKS.56	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	R. Gioseffi Purnawirawan, Dir RS Medika Dramaga	119/Perj.56-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	221/PKS/DIR-RSMD/VI/2022	2022	20-06-2022	5	20-06-2027	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Rumah Sakit Medika Dramaga
100	PKS	PKS.57	KSDPK	Syarifah Sofiah D (Sekretaris Daerah Kota Bogor)	Apriyadi Malik (Direktur Utama PT. Ragta Dea)	119/Perj.57/Dishub/2022	DISHUB	22-123/RGT/PKS JPO/VI/2022	2022	2022-06-22	-	2026-06-21	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Penyelenggaraan Reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
101	PKS	PKS.58	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Ka. Disdukcapil)	Yadi Nuryadi (Ketua Yayasan Penyandang Disabilitas Kota Bogor)	119/Perj.58/Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	012/YPD-KB/VI/2022	2022	2022-06-23	-	2027-06-23	(JPO) di Jalan Padjajaran Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Yayasan Penyandang Disabilitas Kota Bogor
102	PKS	PKS.59	KSDPK	apt. ANNA USWATUN HASANAH R., M.Farm	dr. SRI NOWO RETNO, M.A.R.S	020/MOU-SBH/V1/2022	DINKES	119/Perj.59-Dinkes/2022	2022	30/06/2022	3	30/06/2025	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
103	PKS	PKS.60	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Umayah (Kepala Panti/ Pengurus Yayasan Akbar Alqi Kota Bogor)	119/Perj.60/Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	087/PSAA.ALQI/2022	2022	2022-07-01	-	2027-07-01	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di LKSA Akbar Alqi Kota Bogor
104	PKS	PKS.61	KSDPK	Sujatmiko Baliarto, Atd, M.M.	Pdt. Ruben Marihot Tua Hutagalung	119/Perj.61/Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	211/MGKB-06/2022	2022	2022-07-01	-	2027-07-01	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Gereja Kristus Kota Bogor
105	PKS	PKS.64	KSDPK	Sujatmiko Baliarto, Atd, M.M.	Milandari Khrisnawati	119/Perj.64/Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	11/RCP/VII/2022	2022	2022-07-08	-	2027-07-08	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Yayasan Ramah Cerebral Palsy Bogor
106	PKS	PKS.65	KSDPK	Sujatmiko Baliarto, Atd, M.M.	Drs. H. Fauzie Yasin	119/Perj.65/Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	035/DPC-PPDI-KB/VII/2022	2022	2022-07-08	-	2027-07-08	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yayasan Pesantren Al-Atiqiyah Kota Bogor
107	PKS	PKS.67	KSDPK	Sujatmiko Baliarto, Atd, M.M.	Angga Johan Saputra	119/Perj.67-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	010/TYV/VII/2022	2022	2022-07-22	-	2027-07-22	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Yayasan Abulyatama the Yatim Village Bogor
108	PKS	PKS.68	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Ka. Disdukcapil)	Rohaeti (Ka. SLB-C Tunas Kasih 2 Kota Bogor)	119/Perj.68-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	035/DPC-PPDI-KB/VII/2022	2022	2022-07-22	-	2027-07-22	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di SLB-C Tunas Kasih 2 Kota Bogor
109	PKS	PKS.69	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Dadang Sutisna (Ka. SLB-B Tunas Kasih 2 Kota Bogor)	119/Perj.69-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	032/K/SLB-B/TK2/VII/2022	2022	2022-07-22	5	2027-07-22	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di SLB-B Tunas Kasih 2 Kota Bogor
110	PKS	PKS.70	KSDD	Yerry yanmar, Ka BKD Prov Jabar	Taufik, Ka. BKPSDM	1291/HM.03/BANGTUR	BKPSDM	119/Perj.70-BKPSDM/2022	2022	26-07-2022	2	26-07-2024	Pelaksanaan Asesment Preferensi Kompetensi dan Potensi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
111	PKS	PKS.71	KSDPK	Mondastris Korib Sudaryo, Sekan FK UI	Syarifah Sofiah D. (Sekretaris Daerah Kota Bogor)	282/PKS/FKM/UI/2022	BAPPERIDA	119/Perj.71-Bappeda/2022	2022	01-08-2022	5	01-08-2027	Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Inovasi di Bidang Kesehatan Masyarakat
112	PKS	PKS.73	KSDPK	Eri Sarimanah, Warek Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan UNPAK	Ganjar Gunawan, Ka. DisKUKMDagin	74.2/Warek3/VIII/2022	DKUKMDAGIN	119/Perj.73-DKUKMDAGIN/2022	2022	02-08-2022	3	02-08-2025	Pelaksanaan Kegiatan Inkubasi Bisnis dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
113	PKS	PKS.75	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Henny Haeriny (Ka. SLB-C Dharma Wanita Kota Bogor)	119/Perj.75-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	001/SLB-C.DW/Kot.Bgr/VII/2022	2022	2022-08-08	-	2027-08-08	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di SLB-C Dharma Wanita Kota Bogor
114	PKS	PKS.76	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Hafizh Fakhruddin (Ketua Panti Asuhan Putri dan Balita Darushsholihat Kota Bogor)	119/Perj.76-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	035/DPC-PPDI-KB/VI/2022	2022	2022-08-08	-	2027-08-08	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Panti Asuhan Puteri dan Balita Darushsholihat Kota Bogor
115	PKS	PKS.78	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Suherdy Arno, Ketua Pengurus Yayasan Dhanagun	119/Perj.78-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	015/DHTB/PNGRS/MOU-Ekstrnl/VIII/2022	2022	19-08-2022	5	19-08-2027	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Yayasan Dhanagun Kota Bogor
116	PKS	PKS.89	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Wawan Sudrajat (Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat)	119/Perj.89-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	867/HM.03.01-P3DW.BGR	2022	2022-08-26	-	2025-08-26	Rumah Data Kependudukan Terintegrasi Berbasis NIK
117	PKS	PKS.90	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Fahrurrozi (Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bogor)	119/Perj.90-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	56/KTR/IV-07/0822	2022	2022-08-26	-	2025-08-26	Rumah Data Kependudukan Terintegrasi Berbasis NIK
118	PKS	PKS.91	SINERGI	Firdaus (Ka. DPMTSP)	Agung Nugroho (Ketua Pengadilan Negeri Bogor Kelas 1A)	119/Perj.91-DPMTSP/2022	DPMTSP	W11-U2/2282/UM.01.1/VIII/2022	2022	2022-08-26	5	2027-08-26	Pelayanan Non Perizinan di Mal Pelayanan Publik
119	PKS	PKS.94	KSDPK	Herqutanto (Plh. Dekan FK UNHANRI)	Dri Nowo Retno (Ka. Dinkes)	119/Perj.94-Dinkes/2022	DINKES	PKS/142/IX/2022/UNHANRI	2022	2022-09-07	5	2027-09-07	Pendidikan, Penelitian, Pelayanan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Rangka Academic Health System
120	PKS	PKS.96	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	dr. Ratna Dyah Mutiarani, M.Kes (Direktur Rumah Sakit Graha Medika)	119/Perj.96-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	063/SADM/DIR/RSGM/IX/2022	2022	2022-09-12	-	2027-09-12	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Rumah Sakit Graha Medika
121	PKS	PKS.97	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Deni Hamdani, M.Pd (Kepala SLB Negeri 1 Kota Bogor)	119/Perj.97-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	101/SLBN 1/Kot.Bgr/VIII/2022	2022	2022-09-12	-	2027-09-12	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di SLB Negeri 1 Kota Bogor
122	PKS	PKS.99	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	dr. Andi Tatat, MKM (Direktur Utama Rumah Sakit UMMI Bogor)	119/Perj.99-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	045/09/RSUMMI/IX/2022	2022	2022-08-21	5	2027-08-21	Percepatan Peningkatan Cakupan

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
				Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)									Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Rumah Sakit UMMI Bogor
123	PKS	PKS.102	KSDPK	Harini (Branch Manager PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Bogor	Syarifah Sofiah D. (Sekretaris Daerah Kota Bogor)	119/Perj.102/BKPSDM/2022	BKPSDM	JAN-16/C.3.1/092022	2022	2022-09-26	-	2027-07-31	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Web Aparatur Sipil Negara
124	PKS	PKS.104	KSDPK	Atep Budiman (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor)	Padang Wicaksono (Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia)	119/Perj.104-Disparbud/2022	DISPARBUD	650/PKS/VOKASI/UI/2022	2022	2022-10-05	5	2027-10-05	Kegiatan Magang dan Pengembangan Kampung Wisata Kota Bogor
125	PKS	PKS.105	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	dr. Fauziah Rihani (Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Bogor)	119/Perj.105-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	B/111/X/2022/RSBB	2022	2022-10-10	-	2027-10-10	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Bogor
126	PKS	PKS.109	KSDPK	Syarifah Sofiah D (Sekda Kota Bogor)	Asep Denih (Dekan FMIPA UNPAK)	119/Perj.109-Bappeda/2022	BAPPERIDA	3760/D/FMIPA/X/2022	2022	2022-10-27	5	2027-10-27	Penelitian dan Pengembangan Inovasi Lingkungan Hidup
127	PKS	PKS.110	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	drg. Aisyah Wan Granie, M.Sc (Penanggung Jawab Klinik Dyanza)	119/Perj.110-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	05/PKS-DYZ/X/2022	2022	2022-10-28	-	2027-10-28	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
128	PKS	PKS.119	SINERGI	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Agung Nugroho (Ketua Pengadilan Negeri Bogor Kelas I A)	119/Perj.119-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	W11-U2/3288/UM.04.10/II/2022	2022	2022-11-17	-	2027-11-17	Layanan Administrasi Kependudukan dan Layanan Lingkup Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Bogor Kelas I A
129	PKS	PKS.120	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Ka. Disdukcapil)	Melisa Agustina (Pimpinan Praktek Mandiri Bidan Melisa)	119/Perj.120-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	02/PMB/MA/XI/2022	2022	2022-11-21	-	2027-11-21	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Bidan Melisa Agustina
130	PKS	PKS.120	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Melisa Agustina (Pimpinan Praktek Mandiri Bidan "Melisa Agustina, AMD.KEB)	119/Perj.120-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	02/PMB/MA/XI/2022	2022	2022-11-21	-	2027-11-21	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Bidan Melisa Agustina
131	PKS	PKS.121	SINERGI	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Muzakkrir (Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor)	119/Perj.121/Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	470/PKS.200-PPJ/2022	2022	2022-11-21	-	2027-11-21	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lingkungan Pasar Kota Bogor
132	PKS	PKS.122	SINERGI	Sujatmiko Baliarto (Kepala)	Muzakkrir (Direktur Utama)	119/perj.122-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	470/PKS.201-PPJ/2022	2022	2022-11-21	3	2025-11-21	Rumah Data Kependudukan Terintegrasi Berbasis NIK
133	PKS	PKS.123	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Eva Triana (Kepala SDIT Al - Yasmin Bogor)	119/Perj.123-Disdukcapil/2022	DISDUKCAPIL	009/SDIT-AY/XI/2022	2022	2022-11-21	-	2027-11-21	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Yasmin Bogor

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
134	PKS	PKS.124	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Iis Ismawati (Ketua PATBM GARUDA (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Gerakan Ruang Perlindungan Anak) Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor)	119/Perj.124/Disdukcap il/2022	DISDUKCAPIL	002/Mou.Klaster I/XI/2022	2022	2022-11-21	-	2027-11-21	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor
135	KB	KB.02	KSDPK	Walikota Bogor/ Bima Arya	Wanda Leonardo Fitres HP (Direktur PT. Nyala Masadepan Indonesia)	119/KB.02-DISDIK/2023	DISDIK	P/101/PTNMI/NK.02/I/2023	2023	12-01-23	5	12-01-28	Pengembangan Program Literasi Sekolah di Kota Bogor
136	KB	KB.04	KSDPK	Walikota Madiun/ Maidi	Walikota Bogor/ Bima Arya	130/01/401.011/2023	BAG.PEM	119/KB.04-Bag.Pem/2023	2023	24-01-23	5	24-01-28	Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah
137	KB	KB.06	KSDPK	Walikota Bogor/ Bima Arya	Ketua Daerah Kota Bogor Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi/Pajar Muhammad Nur	119/KB.06-DISKOMINFO/2023	DISKOMINFO	001/S.Kep.Apjatel/Kota Bogor/I/2023	2023	27-01-23	5	27-01-28	Pengawasan, Penataan dan Perapihan Infrastruktur Telekomunikasi di Kota Bogor
138	KB	KB.08	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Direktur Utama PT. Olympic Bangun Persada	119/KB.08-DUPUR/2023	DPUPR	010HK/LEGAL/PEMKOT-OBP/II/2023	2023	06-02-23	5	06-02-28	Peningkatan Kapasitas Simpang Jalan Raya Bogor-Jalan Sholeh Iskandar-Jalan Tol Bogor Ring Road Pada On Ramp Kedung Halang
139	KB	KB.11	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Ilham Chaidir (Ketua Ikatan Dokter Cabang Kota Bogor)	119/KB-11-DPPKB/2023	DPPKB	260/IDI.Cab.Kota.Bo/MOU/III/2023	2023	10-03-23	5	10-03-28	Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kota Bogor
140	KB	KB.11	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Perwakilan Wilayah Bogor Depok Sukabumi/ Agung Indra Darmawan	119/KB-11-DPPKB/2023	DPPKB	026/IDAI Perwil Bgr/III/2023	2023	10-03-23	5	10-03-28	Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kota Bogor
141	KB	KB.11	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Wilayah I Jawa Barat/R.Giossefi Purnawarman	119/KB-11-DPPKB/2023	DPPKB	0545/PKS/POGI KOM-BOCIMI/III/2023	2023	10-03-23	5	10-03-28	Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kota Bogor
142	KB	KB.11	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Canang Kota Bogor/Sulistiyawati	119/KB-11-DPPKB/2023	DPPKB	102/MOU/PC.IBI KOTA BOGOR/III/2023	2023	10-03-23	5	10-03-28	Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kota Bogor
143	KB	KB.11	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Ahli Gizi Indonesia Bogor/Agus Triwinarto	119/KB-11-DPPKB/2023	DPPKB	045/PERSAGI PC Bogor/III/2023	2023	10-03-23	5	10-03-28	Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kota Bogor
144	KB	KB.11	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Bogor/Yoyo Haryono	119/KB-11-DPPKB/2023	DPPKB	388/DPD.PPNI/MOU/K/III/2023	2023	10-03-23	5	10-03-28	Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kota Bogor
145	KB	KB.11	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Cabang Kota Bogor/Bai Kusnadi	119/KB-11-DPPKB/2023	DPPKB	023/MOU/HAKLIKOTABOGOR/III/2023	2023	10-03-23	5	10-03-28	Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kota Bogor
146	KB	KB.11	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia Kota Bogor	119/KB-11-DPPKB/2023	DPPKB	006/MOU/PPKMI-Kota Bogor/III/2023	2023	10-03-23	5	10-03-28	Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kota Bogor
147	KB	KB.13	KSDPK	Bima Arya (Walikota Bogor)	Sumaryoto (Rektor Universitas Indraprasta PGRI)	119/KB.13-BAPPEDA/2023	BAPPERIDA	51/R/PKS/UNINDRA/III/2023	2023	20-03-23	3	20-03-26	Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
148	KB	KB.20	KSDPK	Walikota Bogor/ Bima Arya	Direktur PT Digiasia Bios/Hermansjah Haryono	119/KB.20-DISKOMINFO/2023	DISKOMINFO	27022/LGL-DAB/PKS/V/2023	2023	05-05-23	5	05-05-28	Implementasi Solusi Teknologi Finansial Dalam Pembangunan Ekosistem Elektronifikasi Pembayaran dan Transaksi Daerah di Kota Bogor
149	KB	KB.26	KSDPK	Penjabat Bupati Simeulue/Ahmadl yah	Walikota Bogor/ Bima Arya	005/003/2023	BAG.PEM	119/KB.26a-Bag.Pem/2023	2023	16-06-23	5	16-06-28	Kerja Sama Pengembangan dan Pembangunan Potensi Daerah

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
150	KB	KB.29	KSDPK	Bima Arya (Walikota Bogor)	Susetyo (Head of Sales Operations Region West Java)	119/KB.29-Bappeda/2023	BAPPERIDA	194/TIV/AG/Pemkot Bogor/VI/2023	2023	27-06-23	5	27-06-28	Kerja Sama Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Bogor
151	KB	KB.30	KSDPK	Bima Arya (Walikota Bogor)	Jeny Husin (Direktur PT Aneka Mitra Wira Bangun Mas)	119/KB.30-Bappeda/2023	BAPPERIDA	099/AMW/PEMKOTBGR/VI/2023	2023	27-06-23	5	27-06-28	Kerja Sama Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Bogor
152	KB	KB.31	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Direktur Utama PT Esteh Indonesia	119/KB.31-Bag. Umum/2023	BAG.UMUM	001/EKS-SODA/VI/2023	2023	27 06 2023	5	27-06-27	Kerja Sama Pelayanan Publik di Kota Bogor
153	KB	KB.32	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Direktur Utama CV. Arbor Media/Alfie Radhitya Ferdian	119/KB.32-Disperumkim/2023	DISPERUMKIM	001/SK/CVAM/23	2023	06-07-23	5	06-07-28	Pengelolaan Penyelenggaraan reklame Pada Ruang Terbuka Hijau
154	KB	KB.37	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Sonny Rahmawan Abdi (General Manager, Sales and Operatiob Region II, PT Perusahaan gas Negara Tbk)	119.KB.37-DKUKMDAGIN/2023	DKUKMDAGIN	051900.PK/HK.02/SOR2/2023	2023	08-08-23	5	08-08-28	Peningkatan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Gas Bumi PGN di Kota Bogor
155	KB	KB.38	KSDD	Gubernur Jawa Barat/Mochamad Ridwan Kamil	Walikota Bogor/Bima Arya Sugiarto	44/DG.02.02.01/PEMO TDA	BAG.PEM	119/KB.38-Bag.Pe./2023	2023	09-08-23	5	09-08-28	Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
156	KB	KB.39	KSDPK	Bima Arya (Walikota Bogor)	Widodo (Rektor Universitas Brawijaya)	119/KB.39-Bappeda/2023	BAPPERIDA	91/UN10/KS/2023	2023	10-08-23	5	10-08-28	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
157	KB	KB.44	SINERGI	Walikota Bogor/Bima Arya	Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat/Finari Manan	119/KB.44-DPMPTSP/2023	DPMPTSP	MOU-01/WBC.09/2023	2023	28-08-23	5	28-08-28	Kerja Sama Perizinan dan Non Perizinan di Mall Pelayanan Publik Kota Bogor
158	KB	KB.44	SINERGI	Walikota Bogor/Bima Arya	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III Kementerian Keuangan Republik Indonesia/Lucia Widiharsanti	119/KB.44-DPMPTSP/2023	DPMPTSP	NK-2/WJP.33/2023	2023	28-08-23	5	28-08-28	Kerja Sama Perizinan dan Non Perizinan di Mall Pelayanan Publik Kota Bogor
159	KB	KB.44	SINERGI	Walikota Bogor/Bima Arya	Kepala Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA/Iman Luqmanul Hakim	119/KB.44-DPMPTSP/2023	DPMPTSP	2238/KPN.W11-U2/HM2.1/VIII/2023	2023	28-08-23	5	28-08-28	Kerja Sama Perizinan dan Non Perizinan di Mall Pelayanan Publik Kota Bogor
160	KB	KB.44	SINERGI	Walikota Bogor/Bima Arya	Kepala Pengadilan Agama Bogor Kelas IA/Habib Rasyidi Daulay	119/KB.44-DPMPTSP/2023	DPMPTSP	3745/KPA.W10-18/MoU.HM2.1.1/VIII/2023	2023	28-08-23	5	28-08-28	Kerja Sama Perizinan dan Non Perizinan di Mall Pelayanan Publik Kota Bogor
161	KB	KB.44	SINERGI	Walikota Bogor/Bima Arya	Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Kota/Bismi teguh Prakoso	119/KB.44-DPMPTSP/2023	DPMPTSP	MOU/25/VIII/2023	2023	28-08-23	5	28-08-28	Kerja Sama Perizinan dan Non Perizinan di Mall Pelayanan Publik Kota Bogor
162	KB	KB.44	SINERGI	Walikota Bogor/Bima Arya	kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor/Waito Wongateleng	119/KB.44-DPMPTSP/2023	DPMPTSP	B-1368/M.2.12/Cs.1/08/2023	2023	28-08-23	5	28-08-28	Kerja Sama Perizinan dan Non Perizinan di Mall Pelayanan Publik Kota Bogor
163	KB	KB.44	SINERGI	Walikota Bogor/Bima Arya	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor/Ruhayat M Tholib	119/KB.44-DPMPTSP/2023	DPMPTSP	W.II.IMI.IMI.3.HH.04.02.2610	2023	28-08-23	5	28-08-28	Kerja Sama Perizinan dan Non Perizinan di Mall Pelayanan Publik Kota Bogor
164	KB	KB.44	SINERGI	Walikota Bogor/Bima Arya	Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor/Budi Jaya	119/KB.44-DPMPTSP/2023	DPMPTSP	04/MOU-32.71.03.01/VIII/2023	2023	28-08-23	5	28-08-28	Kerja Sama Perizinan dan Non Perizinan di Mall Pelayanan Publik Kota Bogor
165	KB	KB.44	SINERGI	Walikota Bogor/Bima Arya	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor/Dede Supriatna	119/KB.44-DPMPTSP/2023	DPMPTSP	4684/Kk.10.17/VI/BA.00/08/2023	2023	28-08-23	5	28-08-28	Kerja Sama Perizinan dan Non Perizinan di Mall Pelayanan Publik Kota Bogor
166	KB	KB.44	SINERGI	Walikota Bogor/Bima Arya	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota bogor/Idham Kholid	119/KB.44-DPMPTSP/2023	DPMPTSP	211/KTR/V-04/0823	2023	28-08-23	5	28-08-28	Kerja Sama Perizinan dan Non Perizinan di Mall Pelayanan Publik Kota Bogor

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
167	KB	KB.44	SINERGI	Walikota Bogor/Bima Arya	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Bogor/Dolik Yulianto	119/KB.44-DPMPTSP/2023	DPMPTSP	PKS/50/082023	2023	28-08-23	5	28-08-28	Kerja Sama Perizinan dan Non Perizinan di Mali Pelayanan Publik Kota Bogor
168	KB	KB.44	SINERGI	Walikota Bogor/Bima Arya	Pimpinan Kantor Cabang Bogor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat/Muhamad Aditya Wiradharma	119/KB.44-DPMPTSP/2023	DPMPTSP	023/BOG-PKS/2023	2023	28-08-23	5	28-08-28	Kerja Sama Perizinan dan Non Perizinan di Mali Pelayanan Publik Kota Bogor
169	KB	KB.44	SINERGI	Walikota Bogor/Bima Arya	Kepala PT. Jasa Raharja Perwakilan Bogor/Baskara	119/KB.44-DPMPTSP/2023	DPMPTSP	P/44/SP/2023	2023	28-08-23	5	28-08-28	Kerja Sama Perizinan dan Non Perizinan di Mali Pelayanan Publik Kota Bogor
170	KB	KB.44	SINERGI	Walikota Bogor/Bima Arya	Branch Manager PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Bogor/Dadang Suhartono	119/KB.44-DPMPTSP/2023	DPMPTSP	MOU-1/C.3.1/2023	2023	28-08-23	5	28-08-28	Kerja Sama Perizinan dan Non Perizinan di Mali Pelayanan Publik Kota Bogor
171	KB	KB.44	SINERGI	Walikota Bogor/Bima Arya	Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (perumda) Tirta pakuhan Kota Bogor/Rino Indira Gusniawan	119/KB.44-DPMPTSP/2023	DPMPTSP	690/SP.84-PERUMDA.TPKB/2023	2023	28-08-23	5	28-08-28	Kerja Sama Perizinan dan Non Perizinan di Mali Pelayanan Publik Kota Bogor
172	KB	KB.48	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Rektor Institut Pertanian Bogor/Anif Satria	110/KB.48/Bag.Pem/2023	BAG.PEM	106/IT3/HK.07.00-2/P/B/2023	2023	04 09 2023	5	04-09-28	Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat
173	KB	KB.49	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Direktur Utama PT Tiranyx/Fahmi Ghani	119/KB.49-Disperumkim/2023	DISPERUMKIM	SK/TRX/003/IX/2023	2023	04-09-23	5	Sep-28	Kerja Sama Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Bogor
174	KB	KB.56	KSDD	Bupati Bogor/Iwan Setiawan	Walikota Bogor/Bima Arya	100.3.7.1/31/KB/Ks-Banhuk/VI/2023	BAG.PEM	119/KB.56-Bag.Pem/2023	2023	02 10 2023	5	04-10-28	Kerja Sama Daerah Dalam Pelayanan Publik
175	KB	KB.57	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Rektor Universitas Nurtanio Bandung/Sukmo Gunardi	119/KB.57-Bag.Pem/2023	BAG.PEM	UNNUR/21/KSB/X/2023	2023	04 10 2023	5	04-10-28	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tridharma Perguruan Tinggi
176	KB	KB.58	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Chief Executive Officer PT Talenta Digital Berkarya/Christian Jonathan	119/KB.58-Disparbud/2023	DISPARBUD	037/PKS/TID/VIII/2023	2023	13-10-23	5	13-10-28	Pengembangan dan Pelatihan Kecerdasan Buatan di Kota Bogor(Bogor Artificial Intellegence)
177	KB	KB.59	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Komisaris PT. Agronesia Raya/Rizka Wahyu Romadhona	119/KB.59-Bag.Pereko/2023	BAG.EKON	38/AR/BGR/MKT/PJ/X/2023	2023	20 10 2923	5	20-10-28	Pengembangan Perekonomian Sektor Pariwisata dan usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Bogor
178	KB	KB.60	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Co-Founder Yayasan Udara Anak Bangsa	119/KB.60-DLH/2023	DLH	01/YUAB/PRE/X/2023	2023	20-10-23	3	20-10-26	Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Bogor
179	KB	KB.61	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Rektor Universitas Terbuka/Ojat Darajat	119/KB.61-Bag.Pem/2023	BAG.PEM	2898/UN31/HK.08.00/2023	2023	25 10 2023	5	25-10-28	Tridharma Perguruan Tinggi
180	KB	KB.62	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Direktur PT Pustik Maju Bersama/Teuku Reza Hasnifanda	119/KB.62-DLH/2023	DLH	028/PUSTIK/X/2023	2023	30-10-23	5	30-10-28	Pengelolaan Sampah
181	KB	KB.63	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Rektor Universitas Kristen Indonesia/Dhaniswara K. Harjono	119/KB.63-Bag.Pem/2023	BAG.PEM	87/MoU/UKI.r/HKP.06.00/2023	2023	06 11 2023	5	06-11-28	Pendidikan, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat
182	KB	KB.65	SINERGI	Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/M.Samsuri	Walikota Bogor/Bima Arya	15640/LL4/KB/2023	BAG.PEM	119/KB.65-Bag.Pem/2023	2023	16 11 2023	3	16-11-26	Peningkatan Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Kota Bogor
183	KB	KB.68	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Direktur PT aghist Promosindo/Husdi Karyono	119/KB.68-Disperumkim/2023	DISPERUMKIM	053/ADM-APRO/MOU/XI/2023	2023	17-11-23	5	17-11-28	Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame Pada Ruang Terbuka Hijau

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
184	KB	KB.69	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Direktur Utama PT. Pilarr Hijau Madani/Mulyadi	119/KB.69-Disperumkim/2023	DISPERUMKIM	01/PHM-ADV/XI/2023	2023	17-11-23	5	17-11-28	Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame Pada Ruang Terbuka Hijau
185	KB	KB.70	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Direktur Politeknik Sahid Jakarta/Derinta Entas	119/KB.70-Disparbud/2023	DISPARBUD	035/MOU/PoltekSahid/XI/2023	2023	17-11-23	5	17-11-28	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
186	KB	KB.72	KSDDD	Walikota Bogor/Bima Arya	Bupati Garur/Rudy Gunawan	119/KB.72-Bag.Pem/2023	BAG.PEM	400.9.9.4/5904/KSM	2023	29 11 2023	5	29-11-28	Penyelenggaraan Pemerintahan, perekonomian dan Pengembangan Potensi Daerah
187	KB	KB.73	KSDPK	Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang/Dedi Mulyadi	Walikota Bogor/Bima Arya	062/MOU/KS-DN/UBP/XI/2023	BAG.PEM	119/KB.73-Bagp.Pem/2023	2023	29 11 2023	5	29-11-28	Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
188	KB	KB.76	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Direktur PT Maxima Citra Prima/Andi Mulia	119/KB.76-Disperumkim/2023	DISPERUMKIM	016/SP-MCP/XII/2023	2023	06-12-23	5	06-12-28	Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame Pada Ruang Terbuka Hijau
189	KB	KB.78	KSDPK	Bima Arya (Walikota Bogor)	Radianto Kusumo (Direktur PT Rejeki karunia Makmur)	119/KB.78-Bapeda/2023	BAPPERIDA	002/TOYA/XII/2023	2023	13-12-23	2	13-12-25	Pengembangan Infrastruktur Persampahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) GALUGA
190	KB	KB.80	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Direktur PT. Reggy Pratama Advertising/Rhendie Arinda Ferdian	119/KB.80-Disperumkim/2023	DISPERUMKIM	133/RPA/XII/2023	2023	18-12-23	5	18-12-28	Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame Pada Ruang Terbuka Hijau
191	KB	KB.81	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Direktur PT Maina Nauli Propertinda/Izhari Mawardi	119/KB.81-Disperumkim/2023	DISPERUMKIM	560/MNM/PKS/XII/2023	2023	18-12-23	5	18-12-28	Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame Pada Ruang Terbuka Hijau
192	KB	KB.85	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Direktur Utama PT Raih Sukses Bersama/Hasanuddin Tisi	119/KB.85-DKPP/2023	DKPP	DR/107/XII-2023	2023	20-12-23	3	20-12-26	Penggunaan Smart Halal Food Distribution
193	KB	KB.87	SINERGI	Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Divison Senior general Manager PT Jasa Marga (persero) Tbk/Widiyatmiko Nursejati	Walikota Bogor/Bima Arya	FC.HK.01.02.1176	DISPERUMKIM	119/KB.87-Disperumkim/2023	2023	27-12-23	5	27-12-28	Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Toll (Rumija) Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi Sampai Dengan KM 43+600 (A dan B) Untuk Peningkatan Kualitas Jalan toll dan Taman Jalur Hijau
194	KB	KB.90	KSDPK	Walikota Bogor/Bima Arya	Direktur PT EAZT Indonesia/Ariksa Handoko	119/KB.90/DKPP/2023	DKPP	014/KB/EAZT-DKPP/XII/2023	2023	29-12-23	1	29-12-24	Kerja Sama Pengendalian Inflasi Kota Bogor
195	PKS	PKS.02	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Tuti Asmawati S (Pimpinan Praktek Mandiri Bidang TUTI ASMAWATI S, A.Md. Keb)	119/Perj.02-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	1/1-2023	2023	2023-01-17	5	2028-02-17	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Bidang Tuti Asmawati S, A.Md. Keb
196	PKS	PKS.03	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Dhana Noer Kurniawan, S.I.K, M.M	119/Perj.03-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	B/04/1/KES.3/2023/Yon D	2023	2023-01-17	5	2028-01-17	Pemenuhan Hak Identitas Bagi Anggota Brimob Batalyon D Resimen II Pasukan Pelopor
197	PKS	PKS.04	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Thomas Oloan Siregar, SH, MM	119/Perj.04/Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	0002-1/NT/KS-KWB/2023	2023	2023-01-17	5	2028-02-17	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
198	PKS	PKS.05	KSDPK	Denny Mulyadi (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor)	Muhamad Aditya Wiradharma (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Bogor)	119/Perj.05-BKAD/2023	BKAD	002/BOG-PKS/2023	2023	2023-01-18	5	2028-01-18	Pencatatan Sipil di Warga Kota Bogor
199	PKS	PKS.06	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Yenny Irawati Adam, A.Md, Keb	119/Perj.06-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	01/sur.perjadin/disdukcapil/2/2023	2023	2023-01-20	5	2028-01-20	Layanan Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Melalui Rekening Bank BJB
200	PKS	PKS.07	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Elma Vyana S, Tr.Keb	119/Perj.07-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	III/1/PMBE/2023	2023	2023-01-20	5	2028-01-20	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Bidang Yenny Irawaty Adam, A.md.Keb
201	PKS	PKS.08	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Wrestiani Rahayu A.Md.Keb	119/Perj.08-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	02/PMB.WR/SP/1/2023	2023	2023-01-20	5	2028-02-02	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Bidang Wrestiani Rahayu,A.md.Keb
202	PKS	PKS.09	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	F Ashri N, M.Keb	119/Perj.09-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	002/1/MoU/2023	2023	2023-01-20	5	2028-01-20	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Bidang F.Ashri N.M.Keb
203	PKS	PKS.10	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Eli Liawati, S.ST, Bdn	119/Perj.10-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	25/1/TPMB-e/2023	2023	2023-01-20	5	2028-01-20	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Bidang Eli Liawati, S.ST,Bdn
204	PKS	PKS.11	KSDPK	Rudy Mashudi (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor)	Berry Juliandi	119/Perj.11-Bapeeda/2023	BAPPERIDA	780/IT3.F7/HK.07.00/P/B/2023	2023	2023-01-26	5	2028-01-26	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Melalui Pendidikan, penelitian, inovasi dan pengabdian masyarakat
205	PKS	PKS.12	KSDPK	Ganjar Gunawan (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Bogor)	Saprudin (Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STIA Menarasiswa)	119/Perj.12-DKUKMDAGIN/2023	DKUKMDAGIN	079/STIA.M/PAKS/D/1/2023	2023	2023-01-26	3	2026-01-26	Pemberdayaan dan Penelitian Urusan Koperasi,Usaha Mikro,Kecil dan menengah di Kota Bogor
206	PKS	PKS.15	KSDPK	Rahmat Hidayat (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor)	Suwandi (Direktur PT Indonesia Cable Network)	119/Perj.15-Diskominfo/2023	DISKOMINFO	2250/PAKS-ICN/02/2023	2023	2023-02-02	5	2028-02-02	Pemanfaatan Saluran Khusus Televisi (TV) Kabel dan Jaringan Fiber Optik
207	PKS	PKS.17	KSDPK	dr. SRI NOWO RETNO, M.A.R.S. (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor)	GIOSEFFI PURNAWARMAN (Direktur Rumah Sakit Medika Dramaga Kota Bogor)	119 /Perj.17-Dinkes/2023	DINKES	251.2/PAKS/DIR-RSMD/111/2023	2023	02/02/2023	5	02/02/2028	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DI KOTA BOGOR
208	PKS	PKS.18	KSDPK	Ganjar Gunawan (Kepala Dinas)	Army Restu Ayu Amd.Keb	119/Perj.18-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	IV/PMB/2023	2023	2023-02-20	5	2028-02-20	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
				Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)									Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Bidang Amry Restu Ayu,A.Md.Keb
209	PKS	PKS.20	KSDPK	Siti Mariam, M.Farm, Apt	dr. SRI NOWO RETNO, M.A.R.S	119/Perj.20-Dinkes/2023	DINKES	354/KET.STTIF/MoU/II/2023	2023	2023-02-22	3	2026-02-22	Penelitian, Praktik Kerja Lapang, Praktik Kerja dan Profesi Apoteker
210	PKS	PKS.21	KSDPK	Ganjar Gunawan (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Nevi Novita Nuraisah, A.Md.Keb	119/Perj.21-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	011/II/MoU/2023	2023	2023-02-27	5	2028-02-27	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Bidang "Nevi Novita Nuraisah A.Md, Keb.
211	PKS	PKS.22	KSDPK	dr. SRI NOWO RETNO, M.A.R.S. (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor)	dr. NANIK PRASETYONINGSIH, Sp.PK, M.H., M.A.R.S. (Kepala RUMAH SAKIT TK. III 03.06.02 SALAK)	119/Perj.22 - Dinkes/2023	DINKES	SPK/02/1/2023	2023	27/02/2023	5	27/02/2028	PENGLOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) SEBAGAI BAGIAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
212	PKS	PKS.23	KSDPK	dr. SRI NOWO RETNO, M.A.R.S. (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor)	dr. NANIK PRASETYONINGSIH, Sp.PK, M.H., M.A.R.S. (Kepala RUMAH SAKIT TK. III 03.06.02 SALAK)	119/Perj.23-Dinkes/2023	DINKES	SPK/03/1/2023	2023	27/02/2023	5	27/02/2028	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DI KOTA BOGOR
213	PKS	PKS.29	KSDPK	Ganjar Gunawan (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	dr. G.A Kusmiati, Mars (Direktur Rumah Sakit EMC Sentul)	119/Perj.29-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	136/SKL-EMCST/III/2023	2023	2023-03-17	5	2028-02-17	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Rumah Sakit EMC Sentul
214	PKS	PKS.37	KSDPK	Dr. Ir. Hj. Syarifah Sofiah D. M.SI (Sekretaris Daerah Kota Bogor)	Dr.H. Agus Suparman, MM	119/Perj.37-Dishub/2023	DISHUB	055-Add/M.DIPP/PKS-JPO/v/2023	2023	2023-05-10	5	2028-05-10	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Penyelenggaraan Reklame
215	PKS	PKS.40	KSDPK	Ganjar Gunawan (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Muhamad Aditya Wiradharma (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Bogor))	119/Perj.40-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	010/BOG-PKS/2023	2023	2023-05-16	5	2028-05-16	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bank BJB Cabang Bogor
216	PKS	PKS.42	KSDPK	Rahmat Hidayat (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor)	Jonathan Gerhard Tarigan (Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara)	119/Perj.42-Diskominfo/2023	DISKOMINFO	PERJ.219/BSSN/SU/HK.07.02/05/2023	2023	2023-05-17	4	2027-05-17	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
217	PKS	PKS.45	KSDD	BAMBANG RIANTO (Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang)	RAHMAT HIDAYAT (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor)	105/KI.03.01/V/2023	DISKOMINFO	119/Perj.45-Diskominfo/2023	2023	2023-05-30	3	30/05/2026	IMPLEMENTASI APLIKASI SIMPATI (SISTEM INFORMASI PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI) DAN APLIKASI e- OFFICE DI PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
218	PKS	PKS.47	KSDPK	Ganjar Gunawan (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Atty Somaddikarya (Ketua Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri Kota Bogor)	119/Perj.47/Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	001/KSU/KM/05/2023	2023	2023-05-31	5	2028-05-31	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri Kota Bogor
219	PKS	PKS.49	SINERGI	Ganjar Gunawan (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	H. DEDE SUPRIATNA (Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor)	119/Perj.49-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	3818/kk.10.17/VI/BA.00/06/2023	2023	05/06/2023	5	05/06/2028	PELAYANAN ADMINDUK DAN SAMAWA SECARA PRIMA DI KOTA BOGOR
220	PKS	PKS.50	KSDPK	Ganjar Gunawan (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Dyan Shinto Ekopuri (Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk)	119/Perj.50-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	036/GOTO/PKS/JKT/VI/2023	2023	2023-06-10	5	2028-06-10	Pelayanan Pengiriman Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Masyarakat Kota Bogor Melalui Pemanfaatan Aplikasi Gojek
221	PKS	PKS.51	KSDPK	Sri Nowo Retno (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor)	Yupi Supartini (Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III)	119/Perj.51-Dinkes/2023	DINKES	HK.03.01/1/05771/2023	2023	2023-06-12	3	2026-06-12	Praktik Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
222	PKS	PKS.67	KSDPK	Rr. Juniarti Estiningsih (Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor)	Alfie Radhitya Ferdian (Direktur Utama CV. Arbor Media)	119/Perj.67-Disperumkim/2023	DISPERUMKIM	002/SK/CVAM/23	2023	2023-07-06	5	2028-02-17	Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame Pada Ruang Terbuka Hijau Taman Samping Gerbang Masuk Terminal Baranangsiang Jalan Pajajaran Kota Bogor
223	PKS	PKS.68	KSDPK	Rr. Juniarti Estiningsih (Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor)	Alfie Radhitya Ferdian (Direktur Utama CV. Arbor Media)	119/Perj.68-Disperumkim/2023	DISPERUMKIM	003/SK/CVAM/23	2023	2023-07-06	5	2028-03-20	Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame Pada Ruang Terbuka Hijau Taman Pulau di Sempang Jalan Ir. H. Juanda dan Jalan Raden Salah Syarif Bustaman Kota Bogor
224	PKS	PKS.69	KSDPK	Ganjar Gunawan (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Pepen Firdaus (Ketua Umum Relawan Dulur Pepen (RDP) Kota Bogor)	119/Perj.69/Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	001/Perj./RDP/CAPIL/2023	2023	2023-07-07	5	2028-07-07	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Relawan Dulur Pepen (RDP)
225	PKS	PKS.70	KSDPK	Ganjar Gunawan (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Donny Raditya Yoga Kusuma (Pimpinan Asrama Yayasan Panti Asuhan Candra Naya Kota Bogor)	119/Perj.70-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	09/PACN/VI-23	2023	2023-07-07	5	2028-07-07	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Panti Asuhan Candra Naya Kota Bogor
226	PKS	PKS.71	KSDPK	Ganjar Gunawan (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Helena Sundari (Pimpinan Praktek Mandiri Bidan Helena Sundari Amd. Keb)	119/Perj.71-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	BPM RB/06/110474/2023	2023	2023-07-07	5	2028-07-07	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Bidan Helena Sundari Amd. Keb
227	PKS	PKS.72	KSDPK	Ganjar Gunawan (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	NANI HANDAYANI	119/Perj.72-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	017/BDN/PKS/VII/2023	2023	07/07/2023	5	07/07/2028	PELAYANAN PEMBUATAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
228	PKS	PKS.73	KSDPK	Garjar Gunawan (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	DEWI ROSILAWATI (Pimpinan Twin Tulipware Cabang Bogor, Bogor Utara, Kota Bogor)	119/Perj.73-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	108/2023	2023	07/07/2023	2	07/07/2025	PRAKTEK MANDIRI RUMAH BIDAN NANI PEMANFAATAN PRODUK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (ADMINDUK) DALAM RANGKA GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (GISA)
229	PKS	PKS.74	KSDPK	Garjar Gunawan (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Wiwik Widiastuti (Direktur Rumah Sakit Juliana)	119/Perj.74-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	015/MOU/DIR/RS-J/VI/2023	2023	2023-07-07	5	2028-07-07	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Rumah Sakit Juliana
230	PKS	PKS.76	KSDPK	Garjar Gunawan (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Uswatun Hasanah (Pimpinan Praktek Mandiri Rumah Bidan Uswatun Hasanah, Amd. Keb)	119/Perj.76-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	XXVI/BDN/PKS/VII/2023	2023	2023-07-14	5	2028-07-07	Pelayanan Pembuatan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Praktek Mandiri Rumah Bidan Uswatun Hasanah, Amd. Keb
231	PKS	PKS.77	KSDPK	Garjar Gunawan (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	Lindawati (Pimpinan DIVA'S BEAUTY CLINIC)	119/Perj.77-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	05/07/2023	2023	2023-07-14	2	2025-07-14	Pemanfaatan Produk Administrasi Kependudukan (Adminduk) Dalam Rangka Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)
232	PKS	PKS.78	KSDPK	Deni Noviana (Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor)	Sri Nowo Retno (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor)	119/Perj.78-Dinkes/2023	DINKES	52/IT3/HK.07.00-4/P/B/2023	2023	2023-07-14	5	2028-07-14	Pendidikan, Penelitian, Pelayanan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka <i>Academic Health System</i>
233	PKS	PKS.79	SINERGI	Atep Budiman (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor)	Rino Indira Gusniawan (Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor)	119/Perj.79-DKUKMDAGIN/2023	DKUKMDAGIN	690/SP.79-PERUMDA.TPKB/2023	2023	2023-07-25	2	2025-07-25	Penataan Kawasan Kuliner di Jalan Pajajaran Kota Bogor
234	PKS	PKS.82	KSDPK	Taufik (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor)	Muhamad Aditya Wiradharma (Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Bogor)	119/Perj.82-BKPSDM/2023	BKPSDM	022/BOG-PKS/2023	2023	2023-08-01	3	2026-08-01	Integrasi Data Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
235	PKS	PKS.83	KSDPK	Taufik (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor)	Muhamad Aditya Wiradharma (Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Bogor)	119/Perj.83-BKPSDM/2023	BKPSDM	023/BOG-PKS/2023	2023	2023-08-01	3	2026-08-01	Pemanfaatan Fasilitas Kartu ATM dan Debet <i>Co- Branding</i>
236	PKS	PKS.84	KSDPK	Syarifah Sofiah (Sekretaris Daerah Kota Bogor)	Haidhar Hibatullah Wurjanto (Direktur Utama PT Esteh Indonesia Makmur)	119/Perj.84-Bag.Umum/2023	BAG.UMUM	002/PKS-LGL/EIM/VIII/2023	2023	2023-08-01	4	2027-08-01	Penataan Kawasan Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor
237	PKS	PKS.86	SINERGI	Rena Da Frina (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor)	Waito Wongateleng (Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor)	119/Perj.86-DPUPR/2023	DPUPR	06/M.2.12/Gs/08/2023	2023	2023-08-07	2	2025-08-06	Penyelesaian Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
238	PKS	PKS.87	KSDPK	Atep Budiman (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor)	Sonny Rahmawan Abdi (General Manager, Sales and Operation Region II, PT Perusahaan Gas Negara Tbk)	119/Perj.87-DKUKMDAGIN/2023	DKUKMDAGIN	052000.PK/HK.02/SOR2/2023	2023	2023-08-08	5	2028-08-08	Penataan Ruang Kota Bogor Pengganaan Instalasi Standar Uji Meter Gas Untuk Pelaksanaan Tera dan/atau Tera Ulang Meter Gas Diafragma
239	PKS	PKS.93	KSDPK	Rr. Juniarti Estiningsih (Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor)	Dyan Shinto Ekopuri (Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk)	119/Perj.93-Disperumkim/2023	DISPERUMKIM	007/GOTO/Govred/PKS/BGR/IX/2023	2023	2023-09-08	5	2028-09-08	Revitalisasi Taman Lansia Malabar dan Pembangunan Shelter di Alun-Alun Kota Bogor
240	PKS	PKS.94	KSDPK	Syarifah Sofiah (Sekda Kota Bogor)	Haidhar Hibatullah Wurjanto (Direktur Utama PT Esteh Indonesia Makmur)	119/Per.94-BAG.UMUM/2023	BAG.UMUM	005/PKS-ADD/EIM/IX/2023	2023	08/09/2023	5	08/09/2028	PENATAAN KAWASAN PERPUSTAKAAN DAN GALERI KOTA BOGOR
241	PKS	PKS.96	KSDPK	Firdaus (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Finari Manan (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat)	119/Perj.96-DPMPTSP/2023	DPMTPTSP	PKS-1/WBC.09/2023	2023	2023-09-26	5	2028-09-26	Pelayanan Perizinan/Non Perizinan di Mall Pelayanan Publik Kota Bogor
242	PKS	PKS.97	KSDPK	Firdaus (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Bismo Teguh Prakoso (Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Kota)	119/Perj.97-DPMPTSP/2023	DPMTPTSP	PKS/29/IX/KKA/2023/Polresta Bogor Kota	2023	2023-09-26	5	2028-09-26	Pelayanan Non Perizinan di Mall Pelayanan Publik Kota Bogor
243	PKS	PKS.98	SINERGI	Firdaus (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Waito Wongateleng (Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor)	119/Perj.98-DPMPTSP/2023	DPMTPTSP	B-2378/M.2.12/Gs.1/09/2023	2023	2023-09-26	5	2028-09-26	Pelayanan Non Perizinan di Mal Pelayanan Publik Kota Bogor
244	PKS	PKS.99	SINERGI	Firdaus (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Budi Jaya (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor)	119/Perj.99-DPMPTSP/2023	DPMTPTSP	05/PKS-32.71.UP.01.01/IX/2023	2023	2023-09-26	5	2028-09-26	Pelayanan Non Perizinan di Mal Pelayanan Publik Kota Bogor
245	PKS	PKS.100	KSDPK	FIRDAUS (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Bogor)	IDHAM KHOLID (Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Bogor, Kota Bogor)	119/Perj.100-DPMPTSP/2023	DPMTPTSP	220/KTR/V-04/0923	2023	26/09/2023	5	26/09/2028	PELAYANAN NON PERIZINAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BOGOR
246	PKS	PKS.101	KSDPK	Firdaus (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Heru Baharudin (Pemimpin Kantor Cabang Bogor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Cabang Bogor)	119/Perj.101-DPMPTSP/2023	DPMTPTSP	024/BOG-PKS/2023	2023	2023-09-26	5	2028-09-26	Pelayanan Non Perizinan di Mal Pelayanan Publik Kota Bogor
247	PKS	PKS.103	SINERGI	Deni Hendana (Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor)	Waito Wongateleng (Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor)	119/Perj.103-Bapenda/2023	BAPENDA	B-07/M.2.12/Gs/10/2023	2023	2023-10-11	2	2025-10-11	Penyelesaian Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
248	PKS	PKS.104	SINERGI	Iceu Pujiati (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor)	Waito Wongateleng (Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor)	119/Perj.104-Disparbud/2023	DISPARBUD	B-09/M.2.12/Gs/10/2023	2023	2023-10-11	2	2025-10-11	Penyelesaian Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor
249	PKS	PKS.105	SINERGI	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas)	Waito Wongateleng (Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor)	119/Perj.105-Disdik/2023	DISDIK	B-10/M.2.12/Gs/10/2023	2023	2023-10-11	2	2025-10-11	Penyelesaian Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
				Pendidikan Kota Bogor)									di Dinas Pendidikan Kota Bogor
250	PKS	PKS.106	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor)	DENI NOVIANA (Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor, Kabupaten Bogor)	119/Perj.106-Disdik/2023	DISDIK	100/IT3/HK.07.00-4/P/B/2023	2023	12/10/2023	5	12/10/2028	PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU
251	PKS	PKS.107	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor)	ABDUL HARIS (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat)	119/Perj.107-Disdik/2023	DISDIK	803/PKS/WR 1/UI/2023	2023	12/10/2023	5	12/10/2028	PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU
252	PKS	PKS.108	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor)	DIDIK NOTOSUDJONO (Rektor Universitas Pakuan, Jalan Pakuan, Tegallega Kota Bogor)	119/Perj.108-DISDIK/2023	DISDIK	08/PKS/Rektor/Unpak/X/2023	2023	12/10/2023	5	12/10/2028	PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU
253	PKS	PKS.109	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor)	RATIH PUSPTASARI (Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Jalan Rangga Gading Nomor 1 Kota Bogor)	119/Perj.109-DISDIK/2023	DISDIK	2411.1/WAREK III/IBIK/X/2023	2023	12/10/2023	5	12/10/2028	PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU
254	PKS	PKS.110	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor)	LENY MUNIROH (Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumberdaya Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jalan Sholeh Iskandar Kedung Badak Kota Bogor)	119/Perj.110-DISDIK/2023	DISDIK	2652/K.21/UIKA/2023	2023	12/10/2023	5	12/10/2028	PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU
255	PKS	PKS.111	KSDPK	Sujatmiko Baliarto (Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor)	ENANG RUSYANA (Direktur Universitas Terbuka Bogor, Tanah Sareal Kota Bogor)	119/Perj.111-Disdik/2023	DISDIK	T/497/UN31.UT14/HK.08.00/2023	2023	30/10/2023	5	30/10/2028	PEMBERIAN BEASISWA KULIAH STRATA SATU BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOTA BOGOR
256	PKS	PKS.112	KSDPK	DENNI WISMANTO (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Jalan Paledang Nomor 43 Kota Bogor)	TEUKU REZA HASFINANDA (Direktur PT Plustik Maju Bersama, Kampung Cihideung Ilir Nomor 88 Ciampea Kabupaten Bogor)	119/Perj.112-DLH/2023	DLH	029/PLUSTIK/X/2023	2023	30/10/2023	2	30/10/2025	PENGOLAHAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) GALUGA
257	PKS	PKS.115	KSDPK	Garjar Gunawan (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)	SITI FARIDA (Pimpinan PT. ANDHIKA MANGGALA PUTRA PERMATASARI (FARADINA SHOES), Kp. Dampit , Bogor - Jawa Barat)	119/Perj.115-Disdukcapil/2023	DISDUKCAPIL	002/Faradina Shoes/X1/2023	2023	06/11/2023	2	06/11/2025	PEMANFAATAN PRODUK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (ADMINDUK) DALAM RANGKA GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (GISA)

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
258	PKS	PKS.117	KSDPK	Rr. JUNIARTI ESTININGSIH	HUSNI KARYONO	119/Perj.117-Disperumkim/2023	DISPERUMKIM	055/ADM-APRO/PKS/XI/2023	2023	17/11/2023	5	17/11/2028	PENGLOLAAN PENYELENGGARAAN REKLAME
259	PKS	PKS.118	KSDPK	Rr. JUNIARTI ESTININGSIH (Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor)	MULYADI (Direktur Utama PT. Pilar Hijau Madani, Jalan KH. Sholeh Iskandar KM. 6,6 Ruko Bogor Indah Raya Blok B11 Tanah Sareal Kota Bogor)	119/Perj.118-Disperumkim/2023	DISPERUMKIM	02/PHM-ADV/XI/2023	2023	17/11/2023	5	17/11/2028	PENGLOLAAN PENYELENGGARAAN REKLAME PADA TAMAN PULAU SEBERANG LIPPO PLAZA KEOEN RAYA YANG TERLEKAT DI JALAN PAJAJARAN KOTA BOGOR
260	PKS	PKS.119	KSDPK	ROKENLY (Kepala SMK Taruna Terpadu 3 Kabupaten Bogor, Jalan Raya Semplak, Salabenda Kota Bogor)	SRI NOWO RETNO (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jalan R.M Tirta Adhi Saerjo, Tanah Sareal Kota Bogor)	421.5/089/MoU/XI/2023	DINKES	119/Perj.119-Dinkes/2023	2023	21/11/2023	5	21/11/2028	PRAKTIK KERJA LAPANG (PKL)
261	PKS	PKS.120	KSDPK	RIANA ULFAH (Kepala Sekolah SMK Kesehatan Bhakti Mandiri, Jalan Raya Pemda Kaum Pandak RT. 02 RW. 12 Cibinong Kabupaten Bogor)	SRI NOWO RETNO (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jalan R.M Tirta Adhi Saerjo, Tanah Sareal Kota Bogor)	E.001/MOU/XI/2023	DINKES	119/Perj.120-Dinkes/2023	2023	21/11/2023	3	21/11/2026	KEGIATAN PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN SISWA
262	PKS	PKS.122	KSDPK	ICEU PUJIATI (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, Jalan Pandu Raya Nomor 45 Kota Bogor)	SERUNI DINITRI (Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor, Jalan Curug mekar Nomor 17 Yasmin Kota Bogor)	119/Perj.122-Disparbud/2023	DISPARBUD	038/MoU/STPB-KET/XII/2023	2023	01/12/2023	5	01/12/2028	PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KOTA BOGOR
263	PKS	PKS.124	KSDPK	Rr. JUNIARTI ESTININGSIH (Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Jalan Pengadilan Nomor 8A Kota Bogor)	ANDI MULIA (Direktur PT. Maxima Citra Prima, Jalan H. Abdullah Nomor 9 Kayu Manis Tanah Sareal Kota Bogor)	119/Perj.124-Disperumkim/2023	DISPERUMKIM	017/SP-MCP/XII/2023	2023	06/12/2023	5	06/12/2028	PENGLOLAAN PENYELENGGARAAN REKLAME PADA RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN PULAU WARUNG JAMBU YANG TERLEKAT DI SIMPANG JALAN PAJAJARAN, JALAN K.S TUBUN, JALAN AHMAD YANI DAN JALAN AHMAD ADNAWIJAYA KOTA BOGOR
264	PKS	PKS.126	KSDPK	Rr. JUNIARTI ESTININGSIH (Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Jalan Pengadilan Nomor 8a Pabaton Kota Bogor)	TYAS APSARI WIDYASTUTI (Kuasa Direksi PT Grab Teknologi Indonesia, South Quarter Tower C Lantai 7 dan Mezzanine Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Kota Administratif Jakarta Selatan)	119/Perj.126-Disperumkim/2023	DISPERUMKIM	006/GTI-BOGOR/LET-CITY-JABO/XII/2023	2023	13/12/2023	5	13/12/2028	PENYEDIAAN FASILITAS PENDUKUNG TAMAN DAN PEMBANGUNAN
265	PKS	PKS.129	KSDPK	Rr. JUNIARTI ESTININGSIH (Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Jalan Pengadilan Nomor 8A Kota Bogor)	IZHARI MAWARDI (Direktur PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, STC Senayan Lantai 2 Ruang 89, Jalan Asia Afrika Pintu IX Jakarta Pusat)	119/Perj.129-Disperumkim/2023	DISPERUMKIM	561/MNN/PKS/XII/2023	2023	18/12/2023	5	18/12/2028	PENGLOLAAN PENYELENGGARAAN REKLAME PADA RUANG TERBUKA HIJAU DI TAMAN MANUNGAL JALAN MANUNGAL

NO	JENIS DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	NOMOR PIHAK KESATU	SKPD	NOMOR PIHAK KEDUA	TAHUN	TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (TAHUN)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
266	PKS	PKS.132	SINERGI	CECEP IMAM NAGARASID : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor	AGUSTIAN SYAH : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	100.3.7.1/64/ PKs/KS- Banhuk/XII/2023	SATPOL PP	119/Perj.132-SatpolPP/2023	2023	19/12/2023	5	19/12/2028	KELURAHAN MENTENG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH, PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN
267	PKS	PKS.134	KSDPK	ICEU PUJIATI (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Jalan Panduraya Nomor 45 Tegal Gundil Kota Bogor)	NANANG SISWANTO (Direktur Marketing PT Agrinesia Raya, Kawasan Industri Sentul Olympic CBD, Jalan Cahaya Raya Blok L, Leuwintug, Citeureup, Kabupaten Bogor)	119 /Perj.134- Disparbud/2023	DISPARBUD	34/AR/BGR/MKT/NONPJ/XII/2023	2023	28/12/2023	5	28/12/2028	PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN BERSAMA LAPIS BOGOR SANGKURIANG
268	PKS	PKS.136	KSDPK	DENNY MULYADI (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, Jalan Pemuda Nomor 3 Kota Bogor)	HERU BAHARUDIN (Pemimpin Kantor Cabang Bogor, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Jalan Kapen Muslihat Nomor 11-13 Kota Bogor)	119/Perj.136- BKAD/2023	BKAD	032/BOG-PKS/2023	2023	29/12/2023	5	29/12/2028	PENGLOLAAN REKENING KAS UMUM DAERAH KOTA BOGOR
269	PKS	PKS.139	KSDPK	Sri Nowo Retno (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor)	Eva Erawati, Dir RS Mulia Pajajaran	119/Perj.139- DINKES/2023	DINKES	018/PKS-DIR/RSMP/XII/2023	2023	29/12/2023	3	29/12/2026	PENGLOLAAN JAMKESDA
270	PKS	PKS.140	KSDPK	Sri Nowo Retno (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor)	Eva Erawati, Dir RS Mulia Pajajaran	119/Perj.140- DINKES/2023	DINKES	019/PKS-DIR/RSMP/VIII/2023	2023	29/12/2023	3	29/12/2026	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DI KOTA BOGOR
271	PKS	PKS.141	KSDPK	Sri Nowo Retno (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor)	LUGINA JANIANITA, Dir. RSIA BUNDA SURYATNI	119/Perj.141- DINKES/2023	DINKES	106/PKS/RSIA.BS/XII/2023	2023	29/12/2023	3	29/12/2026	PENGLOLAAN JAMKESDA
272	PKS	PKS.142	KSDPK	Sri Nowo Retno (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor)	LUGINA JANIANITA, Dir. RSIA BUNDA SURYATNI	119/Perj.142- DINKES/2023	DINKES	107/PKS/RSIA.BS/XII/2023	2023	29/12/2023	3	29/12/2026	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DI KOTA BOGOR
273	PKS	PKS.143	KSDPK	Sri Nowo Retno (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor)	Dhima Paramitha Oktacynara, Dir. RSIA Pasutri Bogor	119/Perj.143- DINKES/2023	DINKES	018-S/PKS-MITRA/DIR/XI/2023	2023	29/12/2023	3	29/12/2026	PENGLOLAAN JAMKESDA
274	PKS	PKS.144	KSDPK	Sri Nowo Retno (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor)	Dhima Paramitha Oktacynara, Dir. RSIA Pasutri Bogor	119/Perj.144- DINKES/2023	DINKES	016-S/PKS-MITRA/DIR/XI/2023	2023	29/12/2023	3	29/12/2026	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DI KOTA BOGOR
275	PKS	PKS.145	KSDPK	Sri Nowo Retno (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor)	Arie Patramanda (Dirut RSIA Nuraida)	119/Perj.145- DINKES/2023	DINKES	006/SDM-PKS/RS NURAIIDA/XII/2023	2023	29/12/2023	3	29/12/2026	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DI KOTA BOGOR
276	PKS	PKS.146	KSDPK	Sri Nowo Retno (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor)	Wiwik Widiastuti (Direktur Rumah Sakit Juliana)	119/Perj.146- DINKES/2023	DINKES	005/MOU/DIR/RS-J/XII/2023	2023	29/12/2023	3	29/12/2026	PENGLOLAAN JAMKESDA
277	PKS	PKS.147	KSDPK	Sri Nowo Retno (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor)	Wiwik Widiastuti (Direktur Rumah Sakit Juliana)	119/Perj.147- DINKES/2023	DINKES	006/MOU/DIR/RS-J/XII/2023	2023	29/12/2023	3	29/12/2026	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DI KOTA BOGOR
278	PKS	PKS.148	KSDPK	Sri Nowo Retno (Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor)	Oktavia Nurdiani, Dir RS Melania	119/Perj.148- DINKES/2023	DINKES	033/PKS/RS.MELANIA/XII/2023	2023	29/12/2023	3	29/12/2026	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DI KOTA BOGOR

2.7. Kinerja BUMD Kota Bogor

Kota Bogor memiliki empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan penting dalam menyediakan layanan publik dan mendukung perekonomian daerah. Perumda Tirta Pakuan adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas penyediaan air bersih, memastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi dengan baik. Bank Kota Bogor, sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik daerah, memberikan layanan perbankan yang mendukung perekonomian lokal, meskipun sempat mengalami penurunan laba pasca pandemi Covid-19 akibat memberikan keringanan kepada nasabah. Selain itu, Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) mengelola pasar tradisional, berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan penyediaan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Perumda Transportasi Pakuan adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang bergerak di bidang transportasi milik Pemerintah Kota Bogor. Perusahaan ini memiliki peran dalam penyelenggaraan sistem transportasi di Kota Bogor.

Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor pada tahun 2019 menunjukkan variasi tingkat kesehatan yang mencerminkan perbedaan kapasitas pengelolaan dan pencapaian antar entitas. Berdasarkan data yang tersedia, Bank Kota Bogor dan Perumda Tirta Pakuan berhasil mempertahankan status “Sehat”, yang menunjukkan bahwa kedua BUMD tersebut telah memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dari sisi keuangan, operasional, maupun administrasi. Capaian ini menandakan adanya efektivitas dalam tata kelola serta stabilitas usaha yang kuat di tengah dinamika ekonomi daerah.

Sebaliknya, Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor hanya meraih klasifikasi “Kurang Sehat” (BBB). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) yang cukup signifikan dibandingkan dengan BUMD lain yang telah mencapai kategori “Sehat”. Gap ini dapat diasumsikan sebagai indikasi lemahnya efisiensi operasional, tata kelola, atau pendapatan usaha yang belum optimal. Dalam konteks pengembangan

kelembagaan BUMD, hasil ini menuntut adanya intervensi strategis, seperti restrukturisasi manajemen, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan pelayanan pasar sebagai unit bisnis utama yang dikelola.

Sementara itu, Perumda Transportasi Pakuan tidak tercatat memiliki data penilaian kinerja pada tahun 2019 (Na). Ketidakhadiran data tersebut menjadi celah informasi yang mengindikasikan adanya kendala dalam pelaporan atau belum efektifnya pengukuran kinerja pada periode tersebut. Dalam perspektif akademis, ketidakterdataan kinerja ini menunjukkan kelemahan pada sistem monitoring dan evaluasi BUMD secara menyeluruh, yang dapat berdampak pada keterlambatan pengambilan kebijakan strategis. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja secara berkala agar setiap BUMD dapat diukur dan dimonitor secara akuntabel dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022, menunjukkan bahwa pada Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor mencatatkan kinerja yang cukup baik dengan memperoleh skor 87,7 dan masuk dalam klasifikasi AA dengan status kesehatan “Sehat”. Skor ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja perusahaan stabil, namun masih perlu ditingkatkan agar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih optimal, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal. Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat sedikit penurunan skor sebesar -0,3 poin, dengan peningkatan pada aspek keuangan sebesar 3,5 poin yang dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah pelanggan. Di sisi lain, aspek operasional mengalami penurunan sebesar -3,8 poin yang disebabkan adanya penyesuaian metode pengukuran baru berdasarkan modul Kepmendagri, khususnya terkait rasio kehilangan air yang mempengaruhi hasil kinerja.

Bank Kota Bogor juga menunjukkan hasil kinerja yang tergolong baik. Berdasarkan Modul Penilaian Kinerja BUMD dari Kementerian Dalam Negeri, Bank Kota Bogor mencatat total skor kinerja sebesar

86,20 dengan predikat kesehatan “AA” atau “Sehat”. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat penurunan skor sebesar 4,80 poin dari sebelumnya 91,00. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja aspek keuangan, yang salah satunya dipicu oleh peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL). Selain itu, aspek administrasi juga mengalami penurunan nilai. Meski demikian, sebagian besar indikator dalam realisasi RKA perubahan tahun 2022 tercapai, kecuali beberapa rasio seperti cash ratio yang hanya mencapai 88,10%, rasio kredit UMKM 82,46%, serta beberapa rasio terkait dana pendidikan dan pelatihan yang belum sepenuhnya memenuhi target.

Sementara itu, Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor mendapatkan skor kinerja sebesar 60,49 dan masuk dalam kategori “BBB” atau “Kurang Sehat” menurut evaluasi menggunakan Modul Penilaian Kinerja BUMD dari Kemendagri. Meskipun demikian, terdapat capaian positif pada aspek operasional dengan nilai 13,49 dari total maksimal 15. Salah satu indikator terbaik adalah rasio pelatihan pegawai yang mencapai 100% dan memperoleh skor maksimal pada subindikator tersebut. Ini menunjukkan adanya upaya serius dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Aspek administrasi Perumda Pasar Pakuan Jaya mencatat hasil yang sangat baik dengan nilai sempurna yaitu 15,00. Penilaian ini terdiri dari dua indikator utama, yakni capaian laporan tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), yang keduanya mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Kinerja administrasi yang optimal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang cukup baik dari sisi pelaporan dan perencanaan, meskipun aspek lain masih memerlukan pembenahan untuk meningkatkan skor keseluruhan.

Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor menjadi BUMD dengan skor terendah di antara BUMD lainnya di Kota Bogor, dengan perolehan nilai sebesar 35,33. Skor ini menempatkan Perumda Transportasi Pakuan dalam klasifikasi B dengan tingkat kesehatan “Kurang Sehat”. Salah satu penyebab utama rendahnya kinerja adalah penurunan

pendapatan yang cukup signifikan, yang dipengaruhi oleh berakhirnya kerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam skema layanan angkutan “*buy the service*”.

Meskipun demikian, terdapat harapan untuk perbaikan dan pertumbuhan Perumda Transportasi Pakuan di masa mendatang. Hal ini didasarkan pada adanya tren peningkatan jumlah penumpang serta strategi perusahaan untuk menambah armada dan memperluas jangkauan layanan dengan menambah koridor bus. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan serta memperbaiki kinerja operasional secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.

Secara keseluruhan, kinerja BUMD Kota Bogor menunjukkan variasi capaian yang mencerminkan tantangan dan potensi di masing-masing sektor. BUMD seperti Perumda Tirta Pakuan dan Bank Kota Bogor mampu mempertahankan status sehat meskipun mengalami penurunan nilai. Sementara itu, Perumda Pasar dan Perumda Transportasi masih menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama dalam aspek keuangan dan operasional.

Peningkatan kinerja BUMD menjadi hal yang penting tidak hanya untuk memperkuat kontribusi terhadap PAD, tetapi juga dalam memberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Evaluasi menyeluruh ini dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Bogor dalam merumuskan kebijakan strategis, termasuk dukungan penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, serta sinergi lintas sektor untuk mendorong kinerja BUMD ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.71 Kinerja BUMD Kota Bogor Tahun 2019-2022

No.	BUMD	2019	2020	2021	2022
1	Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor	Kurang Sehat (BBB)	NA	Kurang Sehat (BBB)	Kurang Sehat (BBB)
2	Bank Kota Bogor	Sehat	NA	NA	Sehat (AA)
3	Perumda Tirta Pakuan	Sehat	NA	NA	Sehat (AA)
4	Perumda Transportasi Pakuan	NA	NA	NA	Kurang Sehat (B)

Sumber: Laporan Penyusunan Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor 2020-2022

2.8. Gambaran Keuangan Daerah

2.8.1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Ketersediaan dan pengelolaan sumber daya keuangan adalah komponen penting yang mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Ketersediaan sumber daya membuat daerah lebih leluasa untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan. Keuangan daerah dikelola dengan cara yang tertib, peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta realisasi APBD tersebut. Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah beberapa waktu ke belakang dan potensi keuangan beberapa tahun ke depan. Gambaran APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, sehingga dalam proses analisis pengelolaan keuangan daerah terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Potensi keuangan masa depan perlu dilakukan dengan menyusun proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat dengan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi yang baik tentu saja dilakukan dengan melihat kinerja keuangan daerah beberapa tahun ke belakang, minimal dalam satu periode RPJM Daerah. Analisis ini diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa mendatang, dengan mempertimbangkan peluang dan kendala yang ada saat ini.

2.8.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

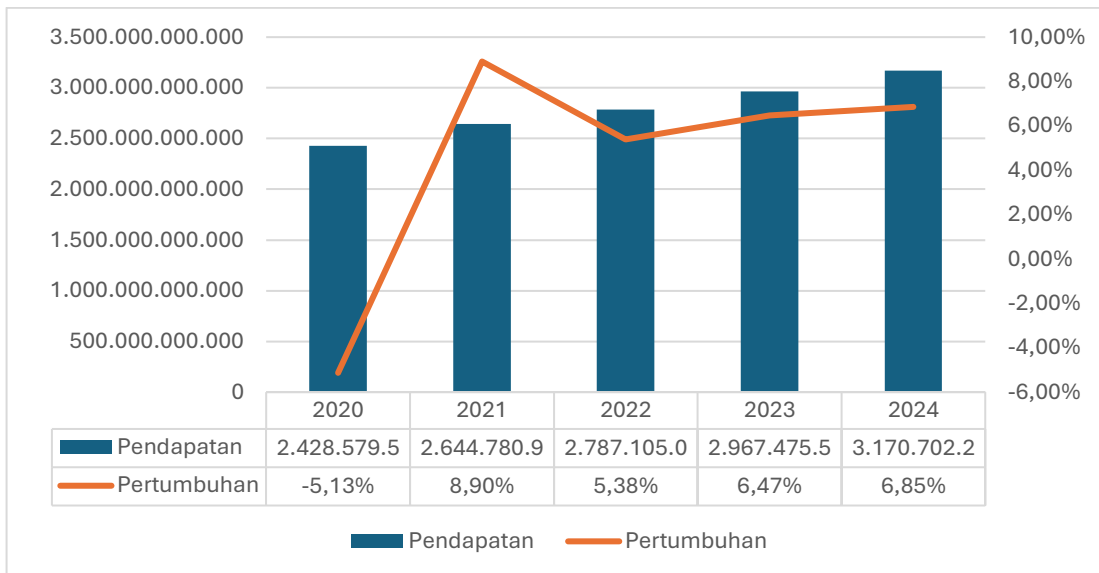
Kinerja pelaksanaan APBD Kota Bogor dapat diketahui dari realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang komponennya dijelaskan sebagai berikut.

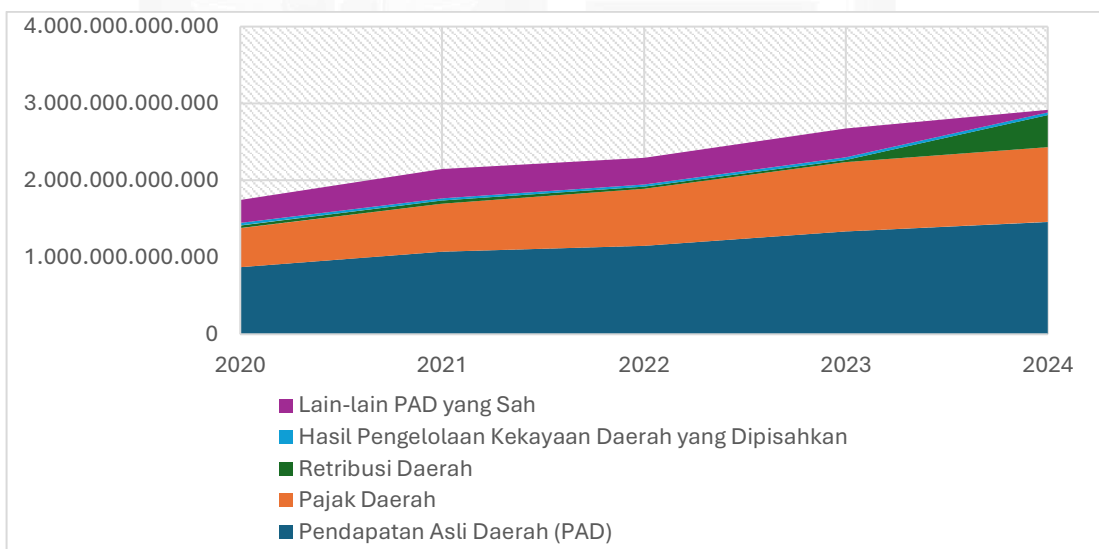
- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 1. Penerimaan pajak daerah.
 2. Penerimaan retribusi daerah.
 3. Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan.
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Pendapatan Transfer, terdiri dari
 1. Transfer pemerintah pusat.
 2. Transfer antar daerah.
- c. Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari:
 1. Hibah.
 2. Dana darurat.
 3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambaran umum tentang Pendapatan Daerah Kota Bogor menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020-2024 (Grafik 2.56)



Sumber: LRA Kota Bogor 2020-2024

Grafik 2.56 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor 2020-2024



Sumber: LRA Kota Bogor 2020-2024

Grafik 2.57 Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Bogor 2020-2024

Tabel 2.72 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuh an
1	PENDAPATAN DAERAH	2.428.579.503.649,12	2.644.780.935.777,11	2.787.105.058.802,92	2.967.475.570.539,80	3.170.497.628.555,24	6,90%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	872.017.242.152,12	1.075.240.926.213,11	1.147.623.045.708,92	1.338.618.268.168,80	1.458.619.452.757,24	13,91%
1.1.1	Pajak Daerah	509.039.468.746,00	624.784.886.145,00	744.960.592.537,00	897.753.380.910,00	973.768.860.850,00	17,74%
1.1.2	Retribusi Daerah	35.010.375.259,00	36.033.010.539,00	23.942.828.414,00	31.081.390.548,00	417.445.452.990,24	310,56%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.927.293.792,00	32.420.552.150,00	32.170.048.280,00	33.960.776.435,00	34.287.163.763,00	1,82%
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	296.040.104.355,12	382.002.477.379,11	346.549.576.477,92	375.822.720.275,80	33.117.975.154,00	-15,75%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.415.498.666.396,00	1.463.000.794.326,00	1.639.426.533.844,00	1.628.857.302.371,00	1.711.878.175.798,00	4,97%
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.083.171.964.899,00	1.070.122.263.566,00	1.217.686.039.277,00	1.243.743.075.523,00	1.341.380.091.442,00	5,64%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	125.014.721.701,00	148.091.697.195,00	116.419.589.771,00	102.205.851.687,00	114.423.344.000,00	-0,80%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	762.556.115.000,00	751.862.545.000,00	745.659.353.200,00	792.504.632.043,00	853.803.503.264,00	2,95%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	195.601.128.198,00	170.168.021.371,00	355.607.096.306,00	349.032.591.793,00	373.153.244.178,00	25,26%
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	28.928.586.000,00	57.017.287.000,00	32.306.424.000,00	5.912.254.000,00	28.047.664.000,00	86,61%
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0	0	0	0,00	

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuh an
1.2.2.2	Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah)	28.928.586.000,00	57.017.287.000,00	32.306.424.000,00	5.912.254.000,00	28.047.664.000,00	86,61%
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pemerintah Provinsi)	303.398.115.497,00	335.861.243.760,00	389.434.070.567,00	379.201.972.848,00	342.450.420.356,00	3,58%
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	222.967.276.647,00	238.649.379.020,00	295.657.846.999,00	301.185.316.222,00	303.076.793.631,00	8,35%
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0	0	0	0,00	
1.2.4	Bantuan Keuangan	80.430.838.850,00	97.211.864.740,00	93.776.223.568,00	78.016.656.626,00	39.373.626.725,00	-12,25%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	141.063.595.101,00	106.539.215.238,00	55.479.250,00	0	0,00	-62,21%
1.3.1	Hibah	141.063.595.101,00	106.324.704.000,00	0,00	0	0,00	-62,31%
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	214.511.238,00	55.479.250,00	0	0,00	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.72, diketahui bahwa komponen pendapatan Kota Bogor yang mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah PAD (13,91%) dan pendapatan transfer (4,97%), sedangkan lain-lain pendapatan yang sah mengalami pertumbuhan negatif (-62,21%). Dilihat dari komponen PAD, pajak daerah dan retribusi daerah sama-sama mencapai perolehan terendah pada tahun 2020, di mana wabah COVID-19 pertama kali merebak. Namun, jika pertumbuhan dihitung tanpa tahun 2020 maka pertumbuhan yang terjadi akan lebih besar dengan pertumbuhan PAD sebesar 15,56% dan pendapatan transfer sebesar 4,92%. Kemudian seiring dengan pemulihan dari dampak pandemi, perolehan pajak daerah tumbuh positif sebesar 22,74% di tahun 2021, 19,23% di tahun 2022, dan 20,51% di tahun 2023. Selama kurun tahun 2019-2023, rata-rata pertumbuhan pajak daerah per tahun sebesar 9,08%.

Namun tren pertumbuhan positif tidak dialami oleh retribusi daerah, yang hingga tahun 2023 rerata pertumbuhannya mencapai -8,16%. Berdasarkan laporan di RPD Kota Bogor tahun 2023, penyebab pertumbuhan negatif pada retribusi daerah disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Piutang dari retribusi penyewaan tanah dan bangunan, terutama pada sewa rumah tinggal. Terdapat 1.102 kode bayar piutang, di mana 1.050 di antaranya adalah piutang sewa rumah tinggal. Upaya penagihan telah dilakukan setiap bulannya, namun terhambat oleh kesadaran penyewa rumah tinggal yang merasa telah memiliki aset rumah tinggal yang disewakan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
2. Belum optimalnya realisasi pendapatan dari retribusi penyewaan tanah dan bangunan, khususnya rusunawa, di mana biaya pengeluaran masih lebih besar dari pendapatan. Rusunawa Kota Bogor diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 34 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa. Hingga tahun 2023, terdapat 57 unit kamar yang digunakan sesuai perwali tersebut

dan 49 unit kamar yang digunakan sebagai cadangan bagi korban bencana alam. Terdapat pula 26 unit kios yang baru terisi sebanyak 10 unit.

3. Izin mendirikan bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan pada tanggal 2 November 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. Undang-undang ini mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perihal Retribusi Perizinan Tertentu dan mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur tentang PBG paling lama 6 bulan sejak PP berlaku (bulan Agustus 2021). Dengan berlakunya ketentuan tersebut, sementara peraturan daerah yang mengatur pemungutan retribusi belum ada, terdapat jeda atau penghentian pemungutan terhadap retribusi IMB/PBG. Pemungutan baru dapat dilaksanakan kembali setelah ada surat edaran bersama 4 menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tanggal 25 Februari 2022. Adapun Peraturan Daerah Kota Bogor yang mengatur Perizinan Tertentu, baru ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 November 2022 yaitu Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dilakukan penyesuaian nomenklatur dan perhitungan IMB menjadi PBG yang berdampak kepada penurunan pendapatan PBG sebesar 30% dikarenakan penyesuaian indeks sebagai dasar perhitungan nilai retribusi.
4. Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal yang menurun dari tahun 2019 sebesar Rp 732.533.000,00 menjadi Rp 110.918.500,00 di tahun 2022. Ini disebabkan oleh adanya kebijakan menghentikan pemungutan Retribusi Angkutan

Umum di beberapa ruas jalan (TPR) sejak tanggal 14 Februari 2020 melalui Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor nomor: 552.22/213-UPTD tanggal 21 Februari 2020.

5. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir yang menurun dari tahun 2019 sebesar Rp 150.281.000,00 menjadi Rp 55.200.000,00 di tahun 2022. Ini disebabkan oleh hilangnya lahan Tempat Khusus Parkir Taman Topi sejak Januari 2020, karena ditutup untuk proses pembongkaran dan pembangunan Alun-Alun Kota Bogor
6. Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum yang menurun dari tahun 2019 sebesar Rp 318.137.500,00 menjadi Rp 86.250.000,00 di tahun 2022. Ini disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Kota dalam program penataan angkutan umum melalui Konversi 3:1, Reduksi 2:1, Kompensasi dan Penghapusan Angkutan Perkotaan.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang menurun dari tahun 2019 sebesar Rp 9.129.454.647,00 menjadi Rp 39.730.000,00 di tahun 2022. Pada tahun 2020, perolehan retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya melampaui target, namun kemudian menurun pada tahun 2021 karena beberapa kendala, di antaranya:
 - Pandemi COVID-19 yang berdampak pada ditiadakannya pemagangan mahasiswa dan pembinaan sarana produksi/survei tatap muka.
 - 26 UPTD Puskesmas dan Labkesda sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD, sehingga siswa/mahasiswa magang di UPTD dikenakan tarif BLUD yang langsung masuk ke rekening BLUD dan tidak masuk ke pos retribusi lagi. Sejak tahun 2021, sertifikasi PIRT/Laik Sehat menggunakan Sistem OSS (Online Single Submission) sehingga masyarakat dapat langsung mengakses dan menerbitkan sertifikat tanpa melalui Dinkes.

Tabel 2.73 Persentase Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Kota Bogor 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	2.362.959.267.805,00	2.482.148.757.721,00	2.824.140.344.471,00	3.059.704.221.734,00	3.192.710.048.074,00	2.428.579.503.649,12	2.644.780.935.777,11	2.787.105.058.802,92	2.967.475.570.539,80	3.170.497.628.555,24	102,78	106,55	98,69	96,99	99,30
Pendapatan Asli Daerah	741.531.123.201,00	914.550.650.320,00	1.150.887.225.486,00	1.403.260.832.834,00	1.461.100.063.862,00	872.017.242.152,12	1.075.240.926.213,11	1.147.623.045.708,92	1.338.618.268.168,80	1.458.619.452.757,24	117,60	117,57	99,72	95,39	99,83
Pajak Daerah	440.000.000.000,00	565.600.000.000,00	754.175.900.000,00	973.102.231.105,00	984.800.000.000,00	509.039.468.746,00	624.784.886.145,00	744.960.592.537,00	897.753.380.910,00	973.768.80.850,00	115,69	110,46	98,78	92,26	98,88
Retribusi Daerah	36.691.027.400,00	31.609.433.495,00	37.834.007.000,00	54.039.453.685,00	417.231.785.419,00	35.010.375.259,00	36.033.010.539,00	23.942.828.414,00	31.081.390.548,00	417.445.452.990,24	95,42	113,99	63,28	57,52	100,05
Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	33.520.905.570,00	32.420.552.150,00	32.169.497.964,00	33.539.076.644,00	34.537.163.762,00	31.927.293.792,00	32.420.552.150,00	32.170.048.280,00	33.960.776.435,00	34.287.163.763,00	95,25	100,00	100,00	101,26	99,28
Lain-lain PAD yang sah	231.319.190.231,00	284.920.664.675,00	326.707.820.522,00	342.580.071.400,00	24.531.114.681,00	296.040.104.355,12	382.002.477.379,11	346.549.576.477,92	375.822.720.275,80	33.117.975.154,00	127,98	134,07	106,07	109,70	135,00
Pendapatan Transfer	1.453.476.644.604,00	1.461.272.579.401,00	1.673.248.217.735,00	1.656.443.388.900,00	1.731.609.984.212,00	1.415.498.666.396,00	1.463.000.794.326,00	1.639.426.533.844,00	1.628.857.302.371,00	1.711.878.175.798,00	97,39	100,12	97,98	98,33	98,86
Transfer Pemerintah Pusat	1.115.223.734.560,00	1.117.385.616.482,00	1.277.870.323.115,00	1.257.214.575.777,00	1.380.642.513.566,00	1.112.100.550.899,00	1.127.139.550.566,00	1.249.992.463.277,00	1.249.655.329.523,00	1.369.427.755.442,00	99,72	100,87	97,82	99,40	99,19
Transfer antar - daerah	338.252.910.044,00	343.886.962.919,00	395.377.894.620,00	399.228.813.123,00	350.967.470.646,00	303.398.115.497,00	335.861.243.760,00	389.434.070.567,00	379.201.972.848,00	342.450.420.356,00	89,70	97,67	98,50	94,98	97,57
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	167.951.500.000,00	106.325.528.000,00	4.901.250,00	0,00	0,00	141.063.595.101,00	106.539.215.238,00	55.479.250,00			83,99	100,20	1131,94		
Hibah	167.951.500.000,00	106.325.528.000,00	0,00	0,00	0,00	141.063.595.101,00	106.324.704.000,00	0,00	0,00	0,00	83,99	100,00			
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00		4.901.250,00	0,00	0,00		214.511.238,00	55.479.250,00	0,00				1131,94		

Sumber: APBD dan LRA Kota Bogor 2020-2024

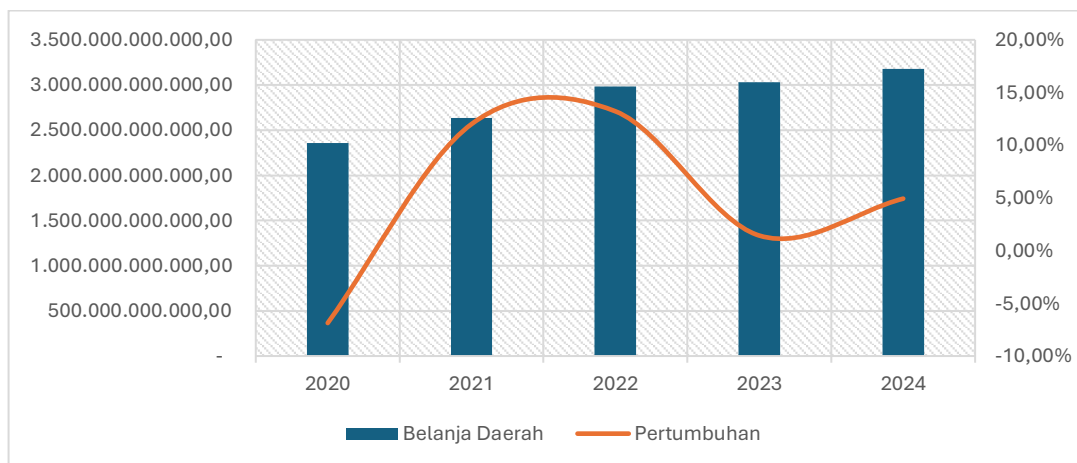
B. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2020-2024 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kota Bogor memiliki kebijakan *mandatory spending* untuk beberapa urusan, di antaranya:

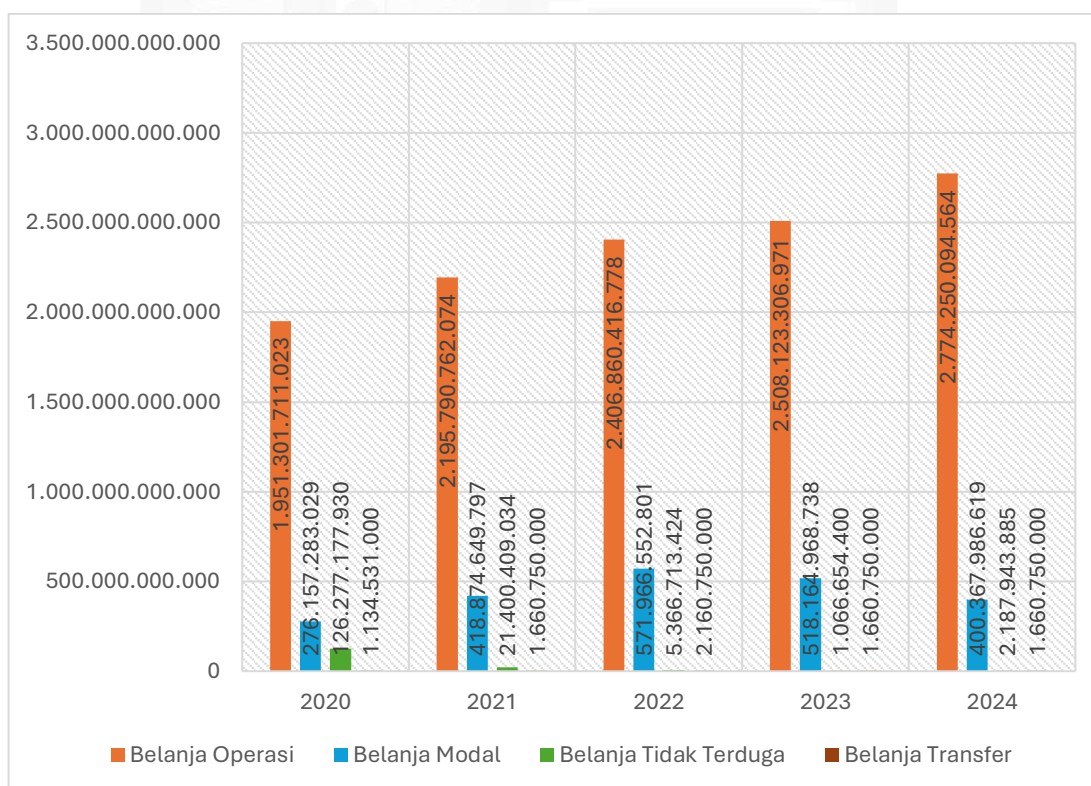
- a. Belanja Pegawai 30% dari APBD di luar tunjangan guru yang berasal dari transfer ke daerah (Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).
- b. Belanja Infrastruktur 40% dari APBD di luar belanja transfer ke daerah (Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).
- c. Belanja peningkatan kapabilitas APIP 0,5 % dari Belanja Daerah tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada Inspektorat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Pedoman Umum APBD 2024).
- d. Belanja peningkatan kompetensi ASN: 0,16% dari total Belanja Daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Pedoman Umum APBD 2024).
- e. Dana kewilayahan untuk peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan 5% dari APBD-DAK (Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018)
- f. Belanja pendidikan 20% dari APBD (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).

Realisasi belanja daerah Kota Bogor tahun 2020-2024 disajikan pada Grafik 2.58.



Sumber: LRA Kota Bogor 2020-2024

Grafik 2.58 Realisasi Belanja Daerah Kota Bogor 2020-2024



Sumber: LRA Kota Bogor 2020-2024

Grafik 2.59 Realisasi Komponen Belanja Daerah Kota Bogor 2020-2024

Realisasi pertumbuhan anggaran belanja Kota Bogor dalam kurun waktu lima tahun didominasi oleh proporsi belanja operasi.

Pertumbuhan belanja operasi meningkat dari tahun 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,90%. Sementara itu, belanja bunga bergantung pada jumlah tagihan yang dikenakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pos-pos lain dalam belanja operasi yang mengalami pertumbuhan positif adalah belanja barang dan jasa dengan rerata pertumbuhan 13,06% dan belanja hibah 15,16%. Sedangkan belanja bantuan sosial mengalami rata-rata pertumbuhan negatif yakni -0,08%. Berdasarkan RPD Kota Bogor tahun 2023, kenaikan belanja barang dan jasa utamanya disebabkan oleh peningkatan jumlah upah dan jumlah non-ASN dalam belanja jasa kantor, diantaranya belanja jasa tenaga pendidikan, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga kebersihan, dan belanja jasa tenaga kesehatan. Untuk kenaikan belanja hibah dipengaruhi oleh belanja hibah dana BOS yang ditransfer langsung oleh pemerintah pusat kepada satuan pendidikan swasta. Sedangkan kenaikan belanja bantuan sosial dipengaruhi oleh peningkatan bantuan sosial untuk individu pada bantuan rumah tidak layak huni.

Selain belanja operasi, komponen realisasi belanja terhadap anggaran tertinggi kedua yaitu belanja modal. Berbeda dengan belanja operasi biasa yang bersifat rutin dan untuk keperluan sehari-hari, belanja modal lebih berfokus pada pengeluaran yang memiliki nilai investasi dan kontribusi terhadap pembangunan dengan masa manfaat lebih dari satu tahun dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi pemerintah dan meningkatkan layanan publik dalam jangka panjang. Contoh pengeluaran yang termasuk dalam kategori belanja modal yaitu pembangunan infrastruktur, pembelian tanah, gedung, peralatan, dan aset lain. Data menunjukkan bahwa persentase belanja modal di Kota Bogor telah mengalami tren yang fluktuatif selama beberapa tahun terakhir, yaitu dari Rp 500 miliar pada tahun 2019, turun hingga Rp 276 miliar pada tahun 2020, hingga akhirnya meningkat kembali menjadi Rp 518 miliar pada tahun 2023 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 yakni menjadi Rp 400 miliar.

Tabel 2.74 Realisasi Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	BELANJA DAERAH	2.354.870.702.982,00	2.637.726.570.905,00	2.986.354.433.003,00	3.029.015.680.109,00	3.178.466.734.133,00	7,90%
2,1	BELANJA OPERASI	1.951.301.711.023,00	2.195.790.762.074,00	2.406.860.416.778,00	2.508.123.306.971,00	2.774.250.053.629,00	9,24%
2.1.1	Belanja Pegawai	1.010.111.841.189,00	1.091.969.595.660,00	1.128.093.224.058,00	1.063.654.426.888,00	1.242.957.964.907,00	5,64%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	798.841.580.650,00	981.671.384.413,00	1.066.553.405.102,00	1.236.457.277.949,00	1.304.164.987.240,00	13,23%
2.1.3	Bunga	5.427.749.091,00	4.047.853.424,00	4.282.366.790,00	6.191.682.700,00	7.027.746.595,00	9,61%
2.1.4	Subsidi	0,00					
2.1.5	Belanja Hibah	93.233.837.587,00	68.284.278.577,00	146.302.919.328,00	147.381.004.434,00	176.519.335.387,00	27,00%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	43.686.702.506,00	49.817.650.000,00	61.628.501.500,00	54.438.915.000,00	43.580.019.500,00	1,53%
2,2	BELANJA MODAL	276.157.283.029,00	418.874.649.797,00	571.966.552.801,00	518.164.968.738,00	400.367.986.619,00	14,02%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	2.772.077.406,00	456.222.600,00	17.328.944.627,00	1.287.152.960,00	2.477.717.100,00	903,68%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.790.481.108,00	134.821.926.424,00	93.283.801.959,00	97.928.993.032,00	133.226.642.367,00	3,52%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.694.955.339,00	75.413.812.539,00	188.457.698.905,00	178.951.840.395,00	141.166.601.172,00	67,36%
2.2.4	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	109.784.631.171,00	206.667.544.227,00	271.189.473.185,00	238.985.747.391,00	112.729.496.656,00	13,69%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.789.184.630,00	1.037.371.248,00	708.136.673,00	911.157.960,00	10.693.173.754,00	257,12%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.325.953.375,00	477.772.759,00	998.497.452,00	100.077.000,00	74.355.570,00	-17,66%

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	126.277.177.930,00	21.400.409.034,00	5.366.713.424,00	1.066.654.400,00	2.187.943.885,00	-33,24%
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	126.277.177.930,00	21.400.409.034,00	5.366.713.424,00	1.066.654.400,00	2.187.943.885,00	-33,24%
2,4	BELANJA TRANSFER	1.134.531.000,00	1.660.750.000,00	2.160.750.000,00	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	13,34%
2,4,1	Belanja Bantuan Keuangan	1.134.531.000,00	1.660.750.000,00	2.160.750.000,00	1.660.750.000,00	1.660.750.000,00	13,34%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2020-2024 (diolah)

Belanja modal Kota Bogor mengalami rata-rata pertumbuhan dari tahun 2020-2024 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 14,02%. Dalam kurun waktu 2020-2024 belanja modal ini paling banyak dialokasikan pada belanja modal jaringan jalan dan irigasi dengan rerata pertumbuhan 13,69%, belanja modal gedung dan bangunan 67,36%, belanja modal peralatan dan mesin 3,52%, serta belanja modal tanah dengan rerata pertumbuhan sebesar 903,68%. Sisanya berupa belanja aset tetap lainnya dengan rerata pertumbuhan 257,12% dan belanja aset lainnya -17,66%. Selain itu, pengeluaran untuk peralatan dan mesin terbatas oleh kebijakan PAD. Belanja irigasi jalan dan jalanan meningkat secara signifikan pada tahun 2022 karena adanya peningkatan kebutuhan terhadap peningkatan jalan dan pelaksanaan pembangunan jembatan, namun menurun pada tahun 2024.

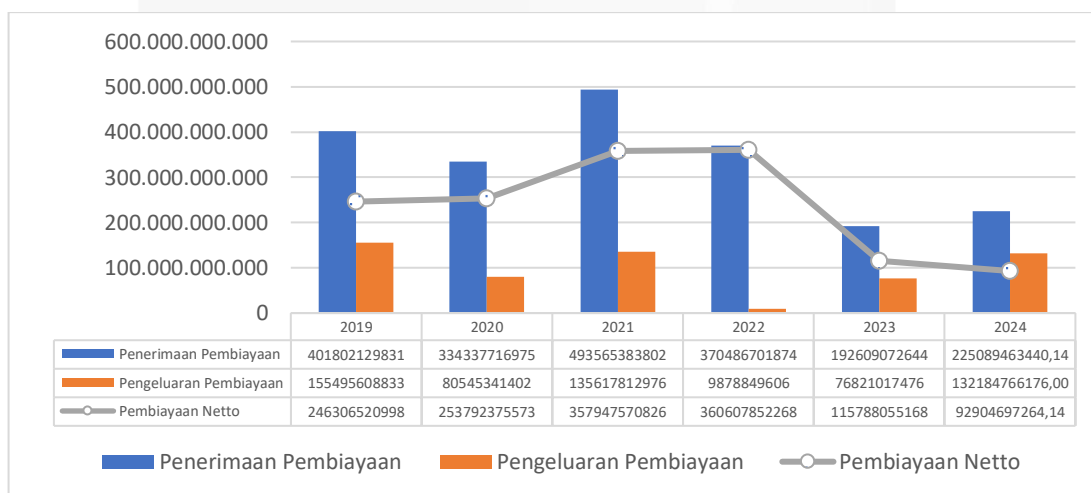
Komponen realisasi belanja terhadap anggaran berikutnya yaitu belanja tidak terduga dan belanja transfer. Persentase belanja tidak terduga di Kota Bogor menunjukkan nilai yang semakin menurun tiap tahunnya. Lonjakan terjadi pada tahun 2020 dengan nominal tertinggi mencapai Rp 126 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 sehingga anggaran untuk belanja tidak terduga meningkat dan menurun di tahun 2021 sebesar Rp 21 miliar dan akhirnya hanya Rp 1 miliar pada tahun 2023. Sementara Komponen belanja transfer Kota Bogor hanya terdiri dari transfer bantuan keuangan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,55%, yang mana dialokasikan pada desa terdampak musibah TPA Galuga dan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk penanganan bencana alam gempa bumi tahun 2022.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah mencakup semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang berjalan maupun di tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi sisa lebih

perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan umumnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, sedangkan komponen lainnya seperti pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan hanya terjadi secara berkala. Sementara itu komponen pengeluaran pembiayaan, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan investasi non permanen hanya terjadi secara berkala dan dengan nilai yang tidak terlalu besar. Sehingga secara netto pembiayaan mayoritas mengalami nilai positif. Nilai pembiayaan netto yang cukup besar mampu menutup defisit realisasi anggaran, sehingga realisasi anggaran tahun 2019-2024 cenderung memberikan SiLPA positif. Realisasi komponen pembiayaan daerah kota bogor disajikan pada Grafik 2.60.



Sumber: LRA Kota Bogor 2019-2024

Grafik 2.60 Realisasi Komponen Pembiayaan Daerah Kota Bogor 2019-2024

Tabel 2.75 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
PEMBIAYAAN DAERAH	246.306.520.997,52	253.792.375.573,19	357.947.570.826,31	360.607.852.268,42	115.790.555.168,34	92.904.697.264,14	-5,77%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	401.802.129.830,52	334.337.716.975,19	493.565.383.802,31	370.486.701.874,42	192.611.572.644,34	225.089.463.440,14	-10,53%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	256.564.582.703,52	277.640.687.080,19	327.542.156.075,31	365.001.935.698,42	161.360.978.068,34	54.255.954.664,14	-4,54%
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	25.765.828.400,00	38.648.742.600,00	
Pinjaman Dalam Negeri (Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB))	139.752.780.949,00	32.159.096.032,00	160.538.461.551,00	0,00	0,00	126.700.000.000,00	
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	5.484.766.178,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	0%
Penerimaan kembali piutang daerah	0,00	19.053.167.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	155.495.608.833,00	80.545.341.402,00	135.617.812.976,00	9.878.849.606,00	76.821.017.476,00	132.184.766.176,00	151,27%
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	71.336.251.300,00	0,00	
Penyertaan Modal Daerah	16.000.000.000,00	24.300.000.000,00	0,00	4.394.083.430,00	0,00	0,00	
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo (Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat)	139.495.608.833,00	56.245.341.402,00	135.617.812.976,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	-3,63%
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		0,00				126.700.000.000,00	

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00				0,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	277.662.925.853,19	327.501.176.240,31	365.001.935.698,42	161.358.478.068,34	54.250.445.599,14	84.935.591.686,38	-23,19%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2019-2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.75, diketahui bahwa Kota Bogor memperoleh pembiayaan netto positif selama empat tahun terakhir (2019-2022), dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,9%. Pembiayaan netto kemudian turun pada tahun 2023 karena adanya pembentukan dana cadangan. Pembiayaan netto diperoleh dari pengurangan penerimaan pembiayaan oleh pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Kota Bogor mengalami fluktuasi setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar -11%. Pengeluaran pembiayaan Kota Bogor juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 menjadi Rp 76 Miliar. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya pembentukan dana cadangan sebesar Rp 71 Miliar.

Penerimaan pembiayaan Kota Bogor terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. SiLPA Kota Bogor menunjukkan penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -5%, setelah pada tahun 2019-2022 terus meningkat. Untuk SiLPA, pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh besaran realisasi pendapatan dan belanja pada tahun $n-1$, di mana pada kurun tahun 2019-2022 terus meningkat, kecuali pada tahun pandemi 2020. Untuk realisasi penerimaan pinjaman daerah terhitung fluktuatif, dipengaruhi oleh *supply chain financing* pada RSUD Kota Bogor. Sedangkan pos penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah tetap konstan sebesar Rp 5.484.766.176,00, sesuai tagihan dari pemerintah pusat.

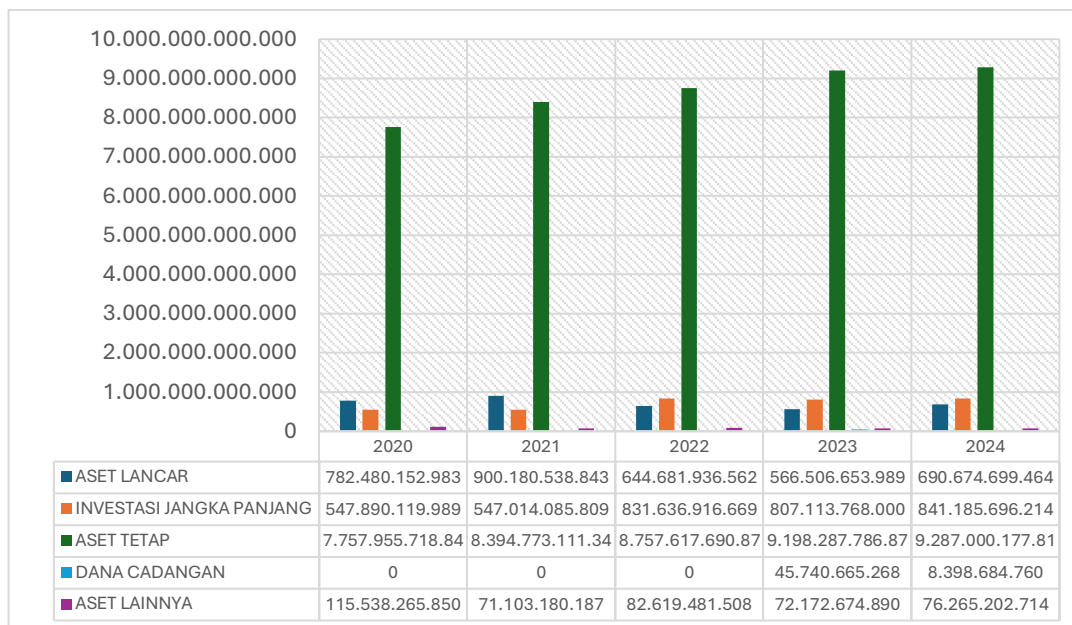
Pengeluaran pembiayaan Kota Bogor terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Pembentukan dana cadangan terjadi pada tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp 71,336 Miliar. Penyertaan modal daerah yang dilakukan Kota Bogor terhitung negatif, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -24,06%. Kota Bogor telah menyertakan modal daerah tertinggi senilai Rp 24,3 miliar, yang kemudian tidak menyertakan modal daerah sama sekali di tahun 2021. Penyertaan

modal daerah yang telah dilakukan Kota Bogor dialokasikan pada BUMD Kota Bogor.

Dengan adanya dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi pendapatan dan belanja, serta besaran pembiayaan yang fluktuatif, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kota Bogor juga mengalami naik-turun dengan rerata pertumbuhan negatif -23%. Jika dilihat dari tiga tabel sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kota Bogor masih mampu menutup defisit anggaran dengan pembiayaan dan mencapai SILPA terendah pada tahun 2023 sebesar Rp 54.247.945.598.

2.8.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Grafik 2.61 berikut merupakan kondisi Neraca Daerah Kota Bogor Periode tahun 2020-2024.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2020-2024

Grafik 2.61 Neraca Daerah Kota Bogor Tahun 2020-2024

Neraca Pemerintah Kota Bogor terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Rata-rata pertumbuhan total aset Kota Bogor selama lima tahun terakhir yaitu 4,35%, dengan komponen aset tetap sebagai komponen yang mendominasi total aset Kota Bogor. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa aset tetap di kota Bogor dialokasikan secara dominan untuk tanah; jalan, irigasi dan jaringan; serta gedung dan bangunan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,91%, 7,28%, dan 11,50%. Secara keseluruhan, pos dalam aset tetap Kota Bogor mengalami rata-rata pertumbuhan positif.

Komponen lainnya yaitu aset lancar mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,89% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tren pertumbuhan aset lancar yaitu: Kas di bendahara pengeluaran SKPD, kas di bendahara FKTP, dan kas lainnya, mengalami fluktuasi setiap tahun. Kas BLUD juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 133,58% sebagai akibat dari peningkatan pendapatan BLUD. Di sisi lain, kas pada kas daerah mengalami fluktuasi dengan rerata positif 1,64% sebagai akibat dari peningkatan realisasi belanja.

Untuk kas lainnya berasal dari kas yang dibatasi penggunaannya, sehingga perolehannya fluktuatif setiap tahun. Kas di bendahara FKTP menjadi 0 perolehannya pada tahun 2021-2022 meskipun jika dihitung pertumbuhannya dari tahun 2020 dan 2024 pertumbuhannya sebesar 88%.

Kas di bendahara BOS pusat diperoleh dari penyaluran dana dari pemerintah pusat ke rekening sekolah yang memperhitungkan sisa kas tahun sebelumnya, yang mana mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 dan terus menurun pada tahun 2024 karena optimalisasi belanja serta sisa kas tahun sebelumnya diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS oleh Pemerintah Pusat pada tahun berikutnya. Komponen lain yaitu piutang pendapatan meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan 14,76%. Piutang lainnya, tumbuh negatif dengan rata-rata -16,00%, disebabkan oleh adanya reklasifikasi piutang BLUD dari piutang lainnya menjadi piutang pendapatan, serta adanya pembayaran piutang lain. Penyisihan piutang tumbuh positif dengan rata-rata 13,17% seiring dengan penambahan umur piutang. Beban dibayar di muka tumbuh positif dengan rata-rata 8,76%, berkaitan dengan masa pertanggungan asuransi atas barang milik daerah. Persediaan tumbuh positif dengan rata-rata 3,55% disebabkan oleh adanya persediaan yang berasal dari hibah Pemerintah Pusat/Provinsi.

Investasi jangka panjang Kota Bogor mengalami pertumbuhan dengan rerata 13,29%. Investasi permanen mendominasi besaran total investasi jangka panjang di Kota Bogor. Terdapat penambahan penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp.831.636.916.668,80 pada tahun 2022, menjadikannya penyertaan modal tertinggi dalam kurun lima tahun terakhir. Hal ini karena adanya koreksi atas pencatatan penyertaan modal pada Perumda Pasar Pakuan Jaya dan Perumda Tirta Pakuan, serta penambahan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk. Pencatatannya menggunakan metode ekuitas, kecuali pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk. yang menggunakan metode biaya. Di samping

itu, terdapat pula perolehan dana bergulir senilai Rp.63.742.100,00 setiap tahun yang juga selalu disisihkan mulai dari tahun 2020 hingga 2022. Namun pada tahun 2023 tidak ada lagi perolehan dan penyesihan dana bergulir.

Aset lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Bogor mengalami rata-rata penurunan sebesar -7,31%. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya akumulasi amortisasi aset tak berwujud dan akumulasi penyusutan aset lainnya, yang mana masing-masing memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,03% dan 3,02%. Selain itu, kemitraan dengan pihak ketiga juga mengalami pertumbuhan negatif dengan rata-rata sebesar -19,76%, yang disebabkan oleh yang disebabkan oleh koreksi pencatatan dari kemitraan dengan pihak ketiga menjadi aset tetap tanah. Tagihan jangka panjang terbilang cukup stabil hingga tahun 2022 dengan rerata -0,26%, namun pada tahun 2023 tidak terdapat tagihan jangka panjang. *Treasury Deposit Facility* (TDF) hanya diperoleh pada tahun 2022 sebesar Rp.12.400.188.687,00, sedangkan tahun 2023 tidak ada TDF.

Tabel 2.76 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bogor 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET	9.203.864.257.664,83	9.913.070.916.181,37	10.316.556.025.616,40	10.792.438.087.151,00	10.903.524.460.966,00	4,35%
1.1.	ASET LANCAR	782.480.152.983,31	900.180.538.843,03	644.681.936.562,07	602.391.815.144,08	699.758.089.985,05	-0,93%
1.1.1	Kas di Kas Daerah	305.390.350.678,00	299.917.646.333,00	130.401.482.495,00	33.520.359.707,00	79.503.327.898,00	1,14%
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	922.000,00	0,00	
1.1.4	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.200.525,00	-	-	1.810.000,00	0,00	
1.1.5	Kas di BLUD	8.109.372.432,31	58.709.937.450,42	29.011.343.370,34	17.674.780.233,14	2.153.130.596,38	111,62%
1.1.7	Kas Lainnya	25.000,00	-	204.120.800,00	1.108.045.406,00	1.012.808.839,00	
1.1.8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	8.356.906.451,00	-	-	-	-	
1.1.9	Kas Dana Bos	5.903.901.729,00	6.420.223.207,00	1.990.834.186,00	1.649.723.756,00	947.597.794,00	-29,99%
1.1.10	Setara Kas	-	-	0,00	0,00	-	
1.1.12	Piutang Pendapatan	520.862.986.236,00	660.421.877.975,00	649.127.643.510,86	750.326.016.471,70	896.477.454.131,70	15,04%
1.1.15	Piutang Lainnya	127.973.208.139,00	76.051.221.804,00	70.566.455.628,00	59.596.923.188,00	59.596.923.188,00	-15,83%
1.1.16	Penyisihan Piutang	-239.164.821.612,00	-246.794.451.502,85	-279.787.959.764,01	-327.357.002.657,22	-389.964.184.114,24	13,17%
1.1.18	Beban dibayar dimuka	857.645.340,00	557.238.076,72	281.653.702,54	515.022.118,72	505.228.167,24	-0,88%
1.1.19	Persediaan	44.188.378.065,00	44.896.845.499,74	42.886.362.633,34	59.870.448.656,74	49.525.803.484,97	4,86%
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	547.890.119.989,00	547.014.085.809,35	831.636.916.668,80	835.123.845.482,75	1.002.293.416.444,24	18,08%
1.2.1.	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	0,00	
1.2.1.4	Dana Bergulir	63.742.100,00	63.742.100,00	63.742.100,00	63.742.100,00	51.753.390,00	-4,70%
1.2.1.5	Penyisihan Dana Bergulir	-63.742.100,00	-63.742.100,00	-63.742.100,00	-63.742.100,00	-51.753.390,00	-4,70%

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.2.2	Investasi Permanen	547.890.119.989,00	547.014.085.809,35	831.636.916.668,80	835.123.845.482,75	1.002.293.416.444,24	18,08%
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	547.890.119.989,00	547.014.085.809,35	831.636.916.668,80	835.123.845.482,75	1.002.293.416.444,24	18,08%
1.2.2.2	Investasi Permanen lainnya	-					
1.3	ASET TETAP	7.757.955.718.842,85	8.394.773.111.342,09	8.757.617.690.877,45	9.214.910.044.241,79	9.038.092.125.327,88	3,96%
1.3.1	Tanah	4.977.048.911.208,63	5.517.251.620.522,63	5.675.827.547.827,63	5.938.980.428.024,63	5.796.161.596.908,69	3,99%
1.3.2	Peralatan dan mesin	878.774.080.881,95	968.486.651.160,86	1.041.697.508.364,03	1.136.877.015.590,06	1.256.136.708.584,89	9,35%
1.3.3	Gedung dan bangunan	1.233.596.418.612,15	1.258.734.833.812,17	1.357.632.385.067,17	1.582.373.719.962,85	1.888.200.567.932,12	11,44%
1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	2.734.857.301.296,41	2.943.360.774.448,42	3.204.080.524.732,92	3.483.468.228.932,92	3.588.464.657.486,93	7,05%
1.3.5	Aset tetap lainnya	10.771.560.023,70	8.810.740.200,87	10.425.280.533,84	11.314.989.293,84	15.088.820.384,99	10,50%
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	58.350.074.015,93	142.128.833.375,25	256.117.091.612,52	224.422.793.771,34	15.583.780.825,00	29,59%
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-2.135.442.627.195,92	-2.444.000.342.178,11	-2.788.162.647.260,66	-3.162.527.131.333,85	-3.521.544.006.794,74	13,33%
1.4.	DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	46.125.787.358,00	8.398.684.760,00	
1.5	ASET LAINNYA	115.538.265.849,67	71.103.180.186,90	82.619.481.508,11	93.886.594.924,42	76.403.789.787,11	-6,81%
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	3.271.317.337,00	3.254.915.012,00	3.241.564.412,00	0,00	0,00	
1.5.2	Tagihan Penjualan Angsuran				873.259.125,00	770.678.122,00	
1.5.3	Tuntutan Ganti Rugi				334.362.178,57	351.103.844,90	
1.5.4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	52.526.184.310,00	11.014.184.310,00	11.014.184.310,00	11.014.184.310,00	11.014.184.310,00	-19,76%
1.5.5	Aset tak berwujud	14.765.690.156,80	15.209.471.381,80	16.120.188.183,80	16.945.217.083,00	16.970.742.403,80	3,57%

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.5.6	Aset Lain-lain	176.686.747.836,78	170.118.925.126,05	189.420.063.755,95	199.888.450.262,74	187.940.474.139,24	1,79%
1.5.7	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-13.057.680.075,53	-14.010.403.525,57	-14.857.922.126,05	-16.066.792.926,55	-16.493.115.025,80	6,03%
1.5.8	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-118.653.993.715,38	-114.483.912.117,38	-134.718.785.714,59	-142.870.965.109,14	-131.320.042.007,03	3,03%
1.5.9	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)			12.400.188.687,00	23.768.880.000,00	7.169.764.000,00	
	Properti Investasi Tanah					213.767.403.459,00	
	Properti Investasi Gedung dan Bangunan					4.408.486.403,00	
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi					-977.705.908,52	
2	KEWAJIBAN	106.162.570.863,00	161.721.270.045,45	142.091.662.936,48	179.323.414.216,07	172.758.274.730,79	15,68%
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	40.345.376.740,00	70.983.427.347,45	59.260.840.035,48	106.374.711.749,07	110.091.452.175,79	35,61%
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	258.325.090,00	45.871.292,00	249.302.783,00	260.050.896,00	158.277.901,00	81,60%
2.1.2	Utang Bunga	-				543.668.056,00	
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	6.284.285.132,00	10.281.879.912,00	10.281.879.912,00	19,55%
2.1.5	Pendapatan diterima dimuka	1.350.712.398,00	940.091.752,45	278.229.328,39	413.113.467,00	2.569.064.213,13	117,39%
2.1.6	Utang Belanja	31.020.107.885,00	64.449.665.375,00	52.449.022.792,09	95.418.767.474,00	96.531.896.093,66	43,06%

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.231.465.191,00	63.032.752,00	-		0,00	
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	65.817.194.123,00	90.737.842.698,00	82.830.822.901,00	72.948.702.467,00	62.666.822.555,00	0,78%
2.2.1	Utang Dalam Negeri	65.817.194.123,00	90.737.842.698,00	82.830.822.901,00	72.948.702.467,00	62.666.822.555,00	0,78%
2.2.6	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0`	
3	EKUITAS	9.097.701.686.801,83	9.751.349.646.135,92	10.174.464.362.679,90	10.613.114.672.934,90	10.869.386.015.526,90	4,56%
3.1.	Ekuitas	9.097.701.686.801,83	9.751.349.646.135,92	10.174.464.362.679,90	10.613.114.672.934,90	10.869.386.015.526,90	4,56%
	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan						
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9.203.864.257.664,83	9.913.070.916.181,37	10.316.556.025.616,40	10.792.438.087.151,00	11.042.144.290.257,70	4,68%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2020-2024

Kewajiban jangka pendek Kota Bogor mengalami pertumbuhan positif yaitu 35,61%. Kewajiban jangka pendek tertinggi diperoleh pada tahun 2024 sebesar Rp 110.091.452.175,79, yang mana dipengaruhi oleh utang beban sebesar Rp 966.615.023.34,66. Pos Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tumbuh positif, diperoleh dari utang PFK pada RSUD Kota Bogor. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang terhitung stabil sebelum tahun 2022, kemudian bertambah pada tahun 2022-2023 karena adanya bagian lancar dari penambahan kewajiban jangka panjang, yaitu pinjaman kepada PT SMI untuk pembangunan kawasan Suryakencana. Selain itu, pendapatan diterima di muka meningkat drastis dengan rerata 117,39%. Sementara, utang jangka pendek lainnya menurun dengan rerata -93,05%. Bagian lancar utang jangka panjang Kota Bogor memiliki rerata pertumbuhan 19,55%. Hal ini disebabkan oleh nilai bagian lancar utang jangka panjang yang meningkat secara signifikan pada tahun 2022 dan 2023.

Secara umum, Kota Bogor telah banyak melakukan belanja pada aset tetap, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekuitas dana Kota Bogor masih lebih besar dibanding kewajibannya, dengan rerata pertumbuhan masing-masing 4,56% dan 15,68%. Ini menjadikan rerata pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar 4,68%, sejalan dengan rerata pertumbuhan jumlah aset yang juga 4,68%.

2.8.1.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Belanja daerah sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Kebijakan Pengelolaan Keuangan kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 diuraikan ke dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran untuk melihat proporsi

belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu Analisis Pembiayaan yang diuraikan ke dalam analisis Sumber Penutup Defisit Riil, analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

2.8.1.4. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terdiri dari sejumlah item, Tidak hanya dari pemenuhan gaji dan tunjangan saja, namun juga meliputi peningkatan kapasitas aparatur, pakaian, hingga pemenuhan peralatan penunjang kerja. Setelah diketahui besaran realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Bogor, data tersebut kemudian dimasukkan pada analisis proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur. Hasil analisisnya tersaji pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bogor

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2019	2.394.024.192.422	2.683.996.411.771	89,20%
2	2020	2.085.110.704.868	2.435.416.044.384	85,62%
3	2021	2.492.515.629.870	2.773.344.383.881	89,87%
4	2022	2.766.613.181.961	2.996.233.282.609	92,34%
5	2023	2.818.276.673.575	3.105.836.697.585	90,74%
6	2024	2.947.490.938.766	3.310.651.500.309	89,03%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2020-2024

Proporsi belanja aparatur dibandingkan total pengeluaran menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2019, proporsi belanja aparatur adalah sebesar 89,20%, sementara pada tahun 2020 meningkat menjadi 85,02%. Angka ini sedikit turun menjadi 89,87% pada tahun 2021, dan meningkat menjadi 92,34% pada tahun 2022. Secara rata-rata, proporsi antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total pengeluaran sebesar 89,47%. Jadi,

dapat dikatakan bahwa hampir separuh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

2.8.1.5. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Pembiayaan Daerah untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit, dalam penganggaran. Selain itu juga semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 2.78 Defisit Riil Anggaran Kota Bogor Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.428.579.503.649,12	2.644.780.935.777,11	2.787.105.058.802,92	2.967.475.570.539,80	3.170.497.628.555,24
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2.354.870.702.982,00	2.637.726.570.905,00	2.986.354.433.003,00	3.029.015.680.109,00	3.178.466.734.133,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	80.545.341.402,00	135.617.812.976,00	9.878.849.606,00	76.821.017.476,00	132.184.766.176,00
	Defisit riil	-6.836.540.734,88	-128.563.448.103,89	-209.128.223.806,08	-138.361.127.045,20	-140.153.871.753,76

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2020-2024 (diolah)

Tabel 2.78 menunjukkan bahwa besaran defisit riil Kota Bogor tahun 2019 hingga 2024 cenderung mengalami fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah yang meningkat setiap tahun, disertai dengan pengeluaran pembiayaan daerah yang cukup fluktuatif. Perubahan signifikan dalam defisit anggaran ini mencerminkan dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun defisit masih ada pada tahun 2024, angkanya menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2022, yang mungkin mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan lebih efisien. Pada sisi realisasi penerimaan pembiayaan daerah, milik Kota Bogor dapat dikatakan cukup fluktuatif. Hal ini akan memengaruhi kemampuan Kota Bogor untuk menutup defisit riil sebagaimana disajikan pada Tabel 2.79.

Secara umum, dapat dilihat bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya menjadi sumber utama dalam menutup defisit anggaran Kota Bogor selama periode tersebut. SILPA merupakan sisa anggaran yang tidak terpakai pada tahun sebelumnya dan dapat digunakan untuk membiayai anggaran pada tahun berikutnya. Namun, tren nilai SILPA yang digunakan untuk menutup defisit cenderung menurun dari tahun ke tahun. Selain SILPA, sumber lain yang cukup signifikan adalah penerimaan pinjaman daerah, meskipun nilainya juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah menunjukkan angka yang relatif stabil sepanjang periode 2020-2024.

Setelah mengurangi atau menambah realisasi penerimaan pembiayaan daerah dengan defisit/surplus riil, maka diketahui bahwa Kota Bogor masih memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA). Ini berarti dengan kondisi defisit riil, Kota Bogor masih mampu mendanai kebutuhan dan menutupi kekurangannya dengan penerimaan pembiayaan daerah. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bogor tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.80.

Tabel 2.79 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	277.640.687.080,19	327.542.156.075,31	365.001.935.698,42	161.360.978.068,34	54.255.954.664,14
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	25.765.828.400,00	38.648.742.600,00
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	32.159.096.032,00	160.538.461.551,00	0,00	0,00	126.700.000.000,00
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00	5.484.766.176,00
5	Penerimaan Piutang Daerah	19.053.167.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	334.337.716.975,19	493.565.383.802,31	370.486.701.874,42	192.611.572.644,34	225.089.463.440,14

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor 2020-2024 (diolah)

Tabel 2.80 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bogor tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA Tahun Berkenaan	327.501.176.240,31		365.001.935.698,42		161.358.478.068,34		54.250.445.599,14		84.935.591.686,38	
2	Pelampauan penerimaan PAD	133.760.382.870,12	40,84%	69.471.113.858,00	19,03%	20.749.833.097,00	12,86%	8.992.606.054,00	16,57%	38.648.742.600,00	71,50%
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	10.072.550.501,00		79.320.583.698,00		18.136.087.871,00	11,24%	25.944.345.517,00	47,82%	12670000000,00	234,41%

No.	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah					50.578.000,00	0,03%			5.484.766.176,00	10,15%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	181.764.688.466,19	55,50%	202.570.306.459,00	55,50%	122.421.979.100,00	75,87%	19.313.494.028,00	35,60%	224.884.877.823,14	416,06%
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	1.903.554.403,00	0,58%	13.639.931.683,00	3,74%						
7	Kegiatan Lanjutan										

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor

2.8.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat krusial dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui pengelolaan keuangan yang efektif, pemerintah daerah dapat menentukan arah kebijakan pembangunan secara berkelanjutan dan berdaya guna. Oleh karena itu, diperlukan analisis proyeksi keuangan daerah sebagai instrumen penting untuk menilai kapasitas fiskal dan kemampuan pendanaan daerah dalam menjawab berbagai kebutuhan pembangunan selama lima tahun ke depan. Analisis ini juga memberikan dasar perencanaan yang realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Proyeksi keuangan daerah menjadi penting untuk memastikan kesinambungan program-program pembangunan strategis. Melalui proyeksi yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dapat dihitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, belanja prioritas, serta program unggulan daerah. Proyeksi ini tidak hanya mencerminkan kemampuan fiskal Kota Bogor, tetapi juga menjadi dasar dalam menetapkan skala prioritas pembangunan agar sesuai dengan target dan arah pembangunan jangka menengah tahun 2026 hingga 2030.

Seiring dengan kebutuhan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, pemerintah pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Inpres ini menjadi pedoman penting bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Kota Bogor, untuk mengefisienkan belanja melalui optimalisasi anggaran yang berbasis kinerja dan hasil. Kebijakan ini menekankan perlunya pengendalian belanja operasional, rasionalisasi program yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat, serta penguatan tata kelola

keuangan agar setiap rupiah yang dibelanjakan membawa manfaat maksimal.

Namun, Kota Bogor juga menghadapi sejumlah tantangan keuangan dalam lima tahun ke depan. Peningkatan kebutuhan akan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup, hingga digitalisasi layanan pemerintahan menuntut alokasi anggaran yang signifikan. Di sisi lain, potensi pendapatan asli daerah (PAD) masih menghadapi kendala seperti keterbatasan basis pajak, kepatuhan wajib pajak, serta fluktuasi ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah. Oleh karena itu, strategi peningkatan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta peningkatan kualitas belanja menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan fiskal. Dengan proyeksi keuangan yang akurat dan berbasis pada kebijakan nasional serta realitas lokal, Kota Bogor diharapkan mampu mengelola tantangan dan mengoptimalkan peluang untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 2.81 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 Kota Bogor

No.	Uraian	Pagu Murni 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN DAERAH	2.935.449.836.400,0 0	2.930.214.136.998,0 0	2.998.856.096.299,0 0	3.069.629.964.533,0 0	3.143.760.470.062,0 0	3.220.988.687.001,0 0
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.666.675.706.831,0 0	1.661.440.007.429,0 0	1.730.081.966.730,0 0	1.800.855.834.964,0 0	1.874.986.340.493,0 0	1.952.214.557.432,0 0
1.1.1	Pajak Daerah	1.224.732.427.374,00	1.215.681.246.495,00	1.275.915.308.819,00	1.339.161.074.260,00	1.405.569.127.973,00	1.475.297.584.372,00
1.1.2	Retribusi Daerah	395.084.298.949,00	396.974.657.213,00	403.348.220.579,00	408.699.964.512,00	414.250.548.277,00	419.375.718.563,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.118.899.553,00	38.044.022.766,00	40.078.356.377,00	42.254.715.237,00	44.426.583.288,00	46.801.173.542,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	10.740.080.955,00	10.740.080.955,00	10.740.080.955,00	10.740.080.955,00	10.740.080.955,00	10.740.080.955,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.268.774.129.569,0 0	1.268.774.129.569,0 0	1.268.774.129.569,0 0	1.268.774.129.569,0 0	1.268.774.129.569,0 0	1.268.774.129.569,0 0
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.138.956.711.000,00	1.138.956.711.000,00	1.138.956.711.000,00	1.138.956.711.000,00	1.138.956.711.000,00	1.138.956.711.000,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.817.418.569,00	129.817.418.569,00	129.817.418.569,00	129.817.418.569,00	129.817.418.569,00	129.817.418.569,00
2	BELANJA	2.944.652.722.664,0 0	2.993.160.881.255,0 0	3.052.249.871.380,0 0	3.112.520.641.308,0 0	3.173.996.826.633,0 0	3.236.702.535.668,0 0
2.1	BELANJA OPERASI	2.648.220.926.885,0 0	2.701.045.345.423,0 0	2.754.926.252.331,0 0	2.809.884.777.379,0 0	2.865.942.472.925,0 0	2.923.121.322.385,0 0
2.1.1	Belanja Pegawai	1.287.751.556.492,00	1.313.506.587.622,00	931.538.099.038,00	931.538.099.038,00	953.777.250.697,00	976.945.715.778,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.242.562.064.430,00	1.267.413.305.719,00	1.701.000.192.169,00	1.753.650.957.994,00	1.785.115.587.475,00	1.816.724.979.158,00
2.1.3	Belanja Bunga	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00

No.	Uraian	Pagu Murni 2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.4	Belanja Hibah	80.285.702.124,00	81.891.416.166,00	83.529.244.490,00	85.199.829.380,00	86.903.825.967,00	88.641.902.487,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	30.621.603.839,00	31.234.035.916,00	31.858.716.634,00	32.495.890.967,00	33.145.808.786,00	33.808.724.962,00
2.2	BELANJA MODAL	255.298.196.894,00	260.404.160.832,00	265.612.244.049,00	270.924.488.929,00	276.342.978.708,00	281.869.838.283,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	17.463.744.493,00	17.813.019.383,00	18.169.279.771,00	18.532.665.366,00	18.903.318.673,00	19.281.385.047,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.415.147.352,00	53.463.450.299,00	54.532.719.305,00	55.623.373.691,00	56.735.841.165,00	57.870.557.988,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.293.527.662,00	122.699.398.215,00	125.153.386.180,00	127.656.453.903,00	130.209.582.981,00	132.813.774.641,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	64.766.232.787,00	66.061.557.443,00	67.382.788.592,00	68.730.444.363,00	70.105.053.251,00	71.507.154.316,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	259.741.200,00	264.936.024,00	270.234.744,00	275.639.439,00	281.152.228,00	286.775.273,00
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	99.803.400,00	101.799.468,00	103.835.457,00	105.912.167,00	108.030.410,00	110.191.018,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	39.422.223.885,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	39.422.223.885,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	1.711.375.000,00	1.711.375.000,00	1.711.375.000,00	1.711.375.000,00	1.711.375.000,00	1.711.375.000,00
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	1.711.375.000,00	1.711.375.000,00	1.711.375.000,00	1.711.375.000,00	1.711.375.000,00	1.711.375.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	-9.202.886.264,00	-62.946.744.257,00	-53.393.775.081,00	-42.890.676.775,00	-30.236.356.571,00	-15.713.848.667,00
3	PEMBIAYAAN						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.497.032.260,00	35.497.032.260,00	35.497.032.260,00	35.497.032.260,00	35.497.032.260,00	35.497.032.260,00

No.	Uraian	Pagu Murni 2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032.260,00	5.497.032.260,00	5.497.032.260,00	5.497.032.260,00	5.497.032.260,00	5.497.032.260,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.294.145.996,00	25.294.145.996,00	25.294.145.996,00	25.294.145.996,00	25.294.145.996,00	25.294.145.996,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah) Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.294.145.996,00	10.294.145.996,00	10.294.145.996,00	10.294.145.996,00	10.294.145.996,00	10.294.145.996,00
	Pembiayaan Netto	9.202.886.264,00	10.202.886.264,00	10.202.886.264,00	10.202.886.264,00	10.202.886.264,00	10.202.886.264,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan	0,00	-52.743.857.993,00	-43.190.888.817,00	-32.687.790.511,00	-20.033.470.307,00	-5.510.962.403,00
	APBD	2.970.946.868.660,00	2.965.711.169.258,00	3.034.353.128.559,00	3.105.126.996.793,00	3.179.257.502.322,00	3.256.485.719.261,00

Sumber: Hasil Olahan Bapperida Kota Bogor, 2025

2.8.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 adalah tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Daerah Kota Bogor 2025-2029 diproyeksikan tumbuh sekitar 3,7-3,9 persen per tahun. Hal didasarkan pada potensi komponen penyusun pendapatan daerah terutama PAD dan Pendapatan Dana Transfer, serta tren rata-rata pendapatan pada periode sebelumnya. Pendapatan Daerah tahun 2025 diproyeksikan sekitar Rp 2,935 trilyun dan sekitar Rp 3,220 trilyun pada tahun 2030.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang HKPD), disebutkan ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023, jenis pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bogor, serta Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah secara disajikan pada Tabel 2.82.

Tabel 2.82 Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bogor

No.	PAD	Jenis PAD
1	Pajak Daerah	Pajak Hotel
		Pajak Restoran
		Pajak Hiburan
		Pajak Reklame
		Pajak Penerangan Jalan
		Pajak Parkir
		Pajak Air Tanah
		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2	Retribusi Daerah	Retribusi Jasa Umum (sampah, parkir, kesehatan, dll)
		Retribusi Jasa Usaha (RPH, rekreasi, olahraga, dll)
		Retribusi Perizinan Tertentu (bangunan gedung, tenaga kerja asing)
3	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	Deviden atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan)
		Deviden atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha)
		Deviden atas penyertaan modal pada BUMD (air minum)
4	Lain-lain PAD yang sah	Jasa giro
		Pendapatan bunga
		Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan

Sumber : Hasil Analisis Bapperida (2025)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan tumbuh sekitar 5-6 persen per tahun selama periode 2025-2029. PAD Kota Bogor diproyeksikan sebesar Rp 1,666 triliun di tahun 2025 hingga Rp 1,952 triliun di tahun 2030. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah sekitar 48,9 persen lebih tinggi dibanding periode sebelumnya 2019-2024 yaitu rata-rata sekitar 41,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi terhadap potensi atau sumber-sumber pendapatan daerah menjadi sangat penting untuk terus dagali dan ditingkatkan. PAD terbesar disumbang oleh pajak daerah, oleh karena itu Kota Bogor

memberikan perhatian khusus terhadap upaya peningkatan PAD khususnya dari BPHTB, pajak restoran, dan hotel.

Kebijakan yang perlu ditempuh untuk mendorong pencapaian target proyeksi PAD dalam lima tahun ke depan antara lain:

- a) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- b) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
- c) Penguatan dan perbaikan sistem pencatatan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang potensial untuk mengurangi potensi kehilangan pajak dan retribusi daerah.
- d) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- e) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan instansi terkait;
- f) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
- g) Optimalisasi belanja daerah diarahkan untuk mengungkit pendapatan seperti mendorong pembangunan venue berskala internasional;
- h) Revaluasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- i) Optimalisasi creative finance melalui skema KPBU, CSR, dana umat, hibah, obligasi, dan sukuk; diversifikasi ekonomi lokal yang mengungkit perekonomian daerah; dan
- j) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

B. Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat adalah pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan

kepada suatu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID). Sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil (pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, dll) dan Bantuan Keuangan. Selanjutnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendapatan Transfer diproyeksikan tumbuh sekitar 2 (dua) persen per tahun selama periode 2025-2029. Pendapatan Transfer Kota Bogor diproyeksikan sebesar Rp 1,268 triliun di tahun 2025 hingga Rp 1,268 triliun di tahun 2030. Proporsi Pendapatan Transfer terhadap total pendapatan daerah selama 2025-2029 sekitar 51,1 persen. Artinya pendapatan daerah Kota Bogor untuk lima tahun ke depan diproyeksikan sebagian besar masih bergantung pada sumber pembiayaan pemerintah pusat. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (2019-2024) proporsi terhadap pendapatan daerah sekitar 55,8 persen.

Terjadinya proporsi penurunan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer menunjukkan adanya peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan Kota Bogor yang bersumber dari PAD. Sementara itu, pendapatan hibah diproyeksikan 0 setiap tahun dengan mempertimbangkan sifat dana hibah tersebut yang insidental. Begitu pula dengan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diproyeksikan 0 (nol) karena sifatnya yang tidak menentu.

Kebijakan yang perlu ditempuh untuk mendorong pencapaian target proyeksi Pendapatan Dana Transfer dalam lima tahun ke depan antara lain:

- a) Meningkatkan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Bogor untuk setiap obyek dari pendapatan

transfer sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b) Mengintensifkan komunikasi dengan lembaga di tingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan pendapatan transfer bagi kabupaten/kota;
- c) Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kota Bogor sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2.8.2.2. Proyeksi Belanja Daerah

UU No. 1 Tahun 2022 adalah tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

Komponen Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sebagai komponen APBD, keempat pos belanja daerah ini diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi daerah. Belanja daerah dimaksudkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan yang langsung memberikan manfaat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, komponen Belanja Daerah, khususnya Belanja Operasi dan Belanja Modal secara rinci disajikan pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83 Komponen Belanja Operasi dan Belanja Modal

No	Pengelompokan Belanja	Jenis Belanja
1	Belanja Operasi	Belanja Pegawai
		Belanja Barang dan Jasa
		Belanja Bunga
		Belanja Hibah
		Belanja Bantuan Sosial
2	Belanja Modal	Belanja Modal Tanah
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
		Belanja Modal Aset Lainnya

Sumber : Hasil Analisis Bapperida (2025)

Belanja Daerah Kota Bogor 2025-2029 diproyeksikan tumbuh flat sekitar 4,5 persen per tahun. Hal didasarkan pada proyeksi komponen penyusun belanja daerah terutama Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal untuk Jaringan Jalan dan Irigasi. Belanja Daerah tahun 2025 diproyeksikan sekitar Rp 2,944 triliun dan sekitar Rp 3,236 triliun pada tahun 2030.

Selanjutnya pada pos belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp.2,648 trilyun di tahun 2025 hingga Rp.2,923 trilyun di tahun 2030. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah sekitar 73-74 persen. Proporsi Belanja Operasi 2025-2029 lebih kecil jika dibandingkan dengan periode 2019-2024 yaitu sekitar 82-83 persen, meskipun secara absolut mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena re-alokasi anggaran untuk peningkatan Belanja Modal terutama untuk memenuhi pembiayaan program-program prioritas daerah dalam rangka mendukung pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pos belanja operasi terbesar untuk Belanja Barang dan Jasa (sekitar 37 persen dari total belanja daerah) dan Belanja Pegawai (sekitar 30 persen dari total belanja daerah). Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan sekitar Rp.1,242 trilyun di tahun 2025 dan Rp.1,816

trilyun di tahun 2030. Sementara itu Belanja Pegawai diproyeksikan sekitar Rp.1,287 milyar di tahun 2025 dan Rp.2,923 trilyun di tahun 2030.

Selanjutnya pos Belanja Modal di tahun 2025 diproyeksikan sekitar Rp.255 milyar dan Rp.281 milyar di tahun 2030. Secara proporsi, pos Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah mengalami peningkatan, yaitu dari 15,7 persen selama 2019-2024 menjadi sekitar 25 persen selama periode 2025-2029. Sementara itu, pos belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer relatif sama sepanjang tahun yaitu sekitar Rp 30-40 milyar per tahun (Belanja Tidak Terduga) dan sekitar Rp 2 milyar per tahun (Belanja Transfer).

Belanja Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja harus menerapkan prinsip efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan. Efektifitas dan efisiensi dimaksudkan dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya transparan dan akuntabel yaitu setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pengelolaan belanja daerah lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a) Belanja dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat sesuai ketentuan perundangan;
- b) Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit ataupun memiliki *multiplier effects* dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- c) Belanja dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan OPD sesuai tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran OPD dan sasaran daerah;
- d) Penghematan dan rasionalisasi terhadap belanja personil pada belanja langsung secara selektif;
- e) Memperhatikan belanja wajib atau *mandatory spending* antara lain:
 - 1) Anggaran bidang Urusan Pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 49 ayat (1);
 - 2) Belanja Pegawai yang diperkenankan maksimal 30 persen dari APBD (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).
 - 3) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (Undang-Undang APBN).

2.8.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan Anggaran tahun lalu (SILPA), penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan serta penerimaan piutang. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Pembiayaan Daerah selama 2025-2030 diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya atau rata-rata sebesar Rp 35 milyar per tahun. Peningkatan Pembiayaan Daerah ini untuk menutupi Defisit Anggaran yang meningkat setiap tahunnya. Sumber pembiayaan daerah terbesar diperoleh dari SILPA tahun sebelumnya yang nilainya berfluktuasi atau rata-rata sekitar 40 milyar per tahun selama 2025-2030. Sementara itu, rencana pengeluaran pembiayaan daerah selama lima tahun ke depan diarahkan terutama untuk membiayai cicilan pokok utang, penyertaan modal daerah seperti penyertaan modal untuk PDAM, dan pembiayaan untuk penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat 2026 yang berlangsung di Kota Bogor.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan Pembiayaan Daerah untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a) Efisiensi dan penghematan pada pelaksanaan program kegiatan dengan sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa secara ketat, dengan tetap memperhatikan *output* dan *outcome*;
- b) Mengupayakan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban daerah, dan penguatan kemampuan keuangan daerah;
- c) Pembentukan dana cadangan pendanaan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Bogor;
- d) Penyertaan modal daerah untuk PDAM.
- e) Mengupayakan raihan SiLPA sekecil mungkin untuk mencapai penyerapan anggaran yang efektif dan efisien dengan prinsip yaitu:
 1. Menutupi defisit anggaran;
 2. Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
 3. Membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 4. Melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

5. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
6. Mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya.

2.9. Permasalahan dan Isu Strategis

2.9.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dibandingkan secara komparatif dengan wilayah secara lebih luas (dalam hal ini Provinsi Jawa Barat) maupun dengan yang direncanakan/menjadi target atau standar minimal yang secara umum dipakai. Permasalahan merupakan sintesis dari Bab 2, tanpa ada pembahasan yang mengulang dan tidak menampilkan angka secara berlebihan. Selain itu, permasalahan juga merupakan sintesis dari berbagai bentuk konsultasi publik dan penjaringan aspirasi masyarakat pada berbagai tema/aspek.

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Terdapat 4 (empat) aspek/kelompok permasalahan utama yang dibagi berdasarkan keempat aspek gambaran umum kondisi daerah, yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan Umum yang disajikan pada bagian berikutnya. Berbagai rumusan permasalahan pembangunan daerah tersebut dihasilkan dari Kertas Kerja Masalah-Akar Masalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.84.

Tabel 2.84 Kertas Kerja Masalah dan Akar Masalah dalam Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
Aspek Geografi dan Demografi			
Kualitas lingkungan hidup menurun dan kualitas hidup masyarakat belum memenuhi standar pelayanan minimal	Kota Bogor memiliki daya dukung dan daya tampung terbatas karena Luas Wilayah yang sangat terbatas tidak sebanding dengan laju peningkatan jumlah penduduk setiap tahun terutama karena migrasi dan mobilisasi penduduk non permanen serta adanya keterbatasan Infrastruktur dan Prasarana dan Sarana Utilitas Penyelenggaraan Perkotaan (jaringan jalan, jaringan transportasi, akses air minum aman, akses air limbah aman, PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta sarana prasarana pelayanan publik lainnya yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan hidup.	Masih cukup tingginya migrasi penduduk masuk ke Kota Bogor dan mobilisasi penduduk non permanen	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
		Terbatasnya konektivitas jaringan jalan yang menghubungkan wilayah pusat kegiatan lingkungan (perumahan dan permukiman) dan pusat wilayah pelayanan/pusat kegiatan perekonomian	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Belum optimalnya kualitas jaringan jalan dan kelengkapannya serta manajemen lalu lintas yang handal untuk mendukung kelancaran aksesibilitas kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Perhubungan
		Belum optimalnya penyediaan sarana transportasi publik yang aman, murah, dan ramah lingkungan	Urusan Perhubungan
		masih tingginya backlog pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Urusan Perumahan dan Kawasan permukiman
		Terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap pembiayaan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Belum optimalnya kualitas PSU di kawasan perumahan permukiman	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		belum optimalnya penyediaan air minum/air bersih secara kuantitas, kualitas, kontinuitas, maupun keterjangkauan yang dikelola BUMD SPAM	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
		karena keterbatasan ketersediaan air baku, belum optimalnya cakupan pelayanan air minum, masih diatasnya batas toleransi maksimal tingkat kebocoran/kehilangan air, dan belum optimalnya kontinuitas/ jam pelayanan	
		Belum optimalnya penyelenggaraan SPAM Non BUMD SPAM dikarenakan kapasitas/ debit air yang berasal dari sumber mata air sudah berkurang/kering, penampungan air dan Sambungan Rumah (SR) yang mengalami kerusakan, dan kualitas dari sumber air yang mengandung zat besi yang cukup tinggi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Belum optimalnya kolaborasi dan sinergi serta kerjasama lintas sektor dalam penyediaan infrastruktur dan prasarana sarana utilitas penyelenggaraan perkotaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan Hidup, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag Adpem),
		Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Penanaman Modal, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Lingkungan Hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
		Kepedulian masyarakat dan penegakan hukum lingkungan masih belum optimal	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Masih belum optimalnya konservasi kawasan lindung berupa sempadan Sumber Daya Air dan kawasan perlindungan plasma nutfah serta penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan budi daya sesuai dengan rencana tata ruang kota	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perumahan dan Kawasan permukiman, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Masih belum optimalnya kualitas pengelolaan persampahan	Urusan Lingkungan Hidup
		Pemanfaatan energi terbarukan belum optimal karena sarana prasarana belum terjangkau oleh masyarakat	Urusan Lingkungan Hidup
Resiko, kerentanan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim masih perlu perhatian dan pengelolaan risiko yang terukur	Masih belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan (mitigasi bencana) serta penanganan pasca bencana	Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan yang berkualitas dalam rangka pencegahan dan pengendalian resiko bencana dan antisipasi dampak perubahan iklim	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan
		belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan beresiko bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Penanaman Modal serta Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
		Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		belum optimalnya kecepatan respon penanganan bencana dan penanganan kondisi tanggap darurat bencana oleh aparat dan pemangku kepentingan lainnya	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Sosial
		belum optimalnya kualitas layanan pemulihan pasca bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Dinas Lingkungan Hidup, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan (Pengelolaan BMD)
	Belum optimalnya mitigasi terhadap perubahan iklim akibat dari peningkatan gas rumah kaca karena aktivitas masyarakat	penggunaan energi pada berbagai sektor, termasuk industri dan transportasi yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perhubungan dan Urusan Perindustrian
		Tidak terkendalinya Perubahan fungsi lahan dari ruang terbuka menjadi area terbangun	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Penanaman Modal, Urusan Pertanian dan Urusan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Masih adanya penggunaan pupuk non organik pada kegiatan pertanian	Urusan Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
		Belum terkelolanya limbah padat dan limbah cair yang memadai, seperti penimbunan di tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa pengelolaan yang baik, menghasilkan emisi metana, gas rumah kaca	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai dampak perubahan iklim dan pentingnya mengurangi emisi GRK dapat menghambat adopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.	Urusan Lingkungan Hidup
		Implementasi kebijakan yang mendukung upaya penurunan emisi GRK, seperti insentif untuk energi terbarukan, regulasi efisiensi energi, penyediaan infrastruktur dan bangunan gedung hijau, penggunaan pupuk dan varietas organik, serta pengelolaan limbah yang baik, masih belum optimal.	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perhubungan, dan Urusan Pertanian
	Belum optimalnya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim	Penyediaan infrastruktur belum sepenuhnya adaptif untuk menghadapi dampak perubahan iklim/cuaca ekstrem	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Urusan Perumahan dan Permukiman, Urusan Lingkungan Hhidup
		pengelolaan sumberdaya air masih belum berkelanjutan	Urusan Pekerjaan umum dan Penataan ruang
		penyediaan sistem peringatan dini belum memadai	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Permukiman, dan Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
		pemahaman pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait perubahan iklim dan dampaknya masih belum memadai	Urusan Lingkungan Hidup
Masih adanya potensi kerentanan pangan	Tingkat ketergantungan pangan dari daerah produsen cukup tinggi	Lahan penghasil pangan yang terus menurun karena dikonversi menjadi lahan pemukiman	Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Pertanian, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Penanaman Modal dan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (POU) masih tinggi	Keterbatasan akses pangan pada kelompok rentan karena daya beli masyarakat kelompok rentan yang masih rendah	Urusan Ketahanan Pangan dan Urusan pertanian
Ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat	Tingkat ketergantungan kelompok non produktif (anak dan lansia) masih tinggi	Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		belum optimalnya akses dan kualitas layanan serta jaminan kesehatan pada anak dan kelompok lansia	Urusan Kesehatan
		belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan sosial pada kelompok lansia	Urusan Sosial
	Bonus demografi yang tidak terkelola dengan baik berdampak pada penurunan daya saing dan produktivitas masyarakat pada kelompok usia produktif	Belum meratanya akses dan mutu pendidikan	Urusan Pendidikan
		Belum meratanya akses dan mutu layanan kesehatan	Urusan Kesehatan
		Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja dan produktivitas kerja	Urusan Tenaga Kerja
		Masih adanya ketimpangan gender	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, dan inovasi	Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Pariwisata, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
		generasi muda/kelompok usia produktif untuk peningkatan kesejahteraan	Bidang Penelitian dan Pengembangan
		partisipasi perempuan dan pemuda dalam mengisi pembangunan dan meraih prestasi di segala bidang masih belum optimal	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
Ketimpangan dan kemiskinan yang masih relatif tinggi	Intervensi kebijakan dan program yang sudah dilaksanakan pemerintah belum mampu menekan angka kemiskinan	Ketidaktepatan sasaran dalam intervensi perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin dalam rangka menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan miskin yang disebabkan akurasi data sasaran	Urusan Sosial, Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pangan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)
		Belum efektifnya upaya peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah terutama pada kelompok miskin dan rentan miskin	Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pangan, Urusan Pertanian, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Tenaga Kerja
		Kantong kantong kemiskinan (kawasan permukiman kumuh padat penduduk) yang belum tertangani dan dilakukan penataan	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Tata Kelola Implementasi Kebijakan dan Program Percepatan Pengentasan kemiskinan belum efektif dan efisien	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Kesra)
Tingkat pengangguran masih tinggi	Intervensi kebijakan dan program yang sudah	Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan permintaan pasar kerja,	Urusan Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
	dilaksanakan pemerintah belum mampu menekan angka pengangguran	Ketidaksesuaian penyediaan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya dengan kebutuhan pasar kerja	Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pariwisata, Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Kualitas lulusan sekolah yang belum sepenuhnya memenuhi pasar kerja	Urusan Pendidikan, Urusan Tenaga Kerja
		Belum optimalnya peluang Usaha Mikro Kecil Menengah menyerap tenaga kerja	Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Tenaga Kerja
		Masih terbatasnya penyediaan informasi ketenagakerjaan dan kerjasama serta kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga Masyarakat tidak dapat secara optimal mengakses lapangan kerja secara komprehensif	Urusan Tenaga Kerja, Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Penanaman Modal, Urusan Perindustrian, Urusan Pariwisata
		Belum optimalnya penanganan tenaga kerja informal	Urusan Tenaga Kerja, Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
		Peningkatan kompetensi pencari kerja melalui kegiatan pelatihan keterampilan kerja belum disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja	Urusan Tenaga Kerja
		Laju kenaikan UMK yang cukup tinggi berpotensi terjadinya penurunan/pemindahan investasi dari Kota Bogor ke wilayah lainnya yang memiliki UMK lebih rendah	Urusan Tenaga Kerja
		Rendahnya daya saing wilayah dalam menyerap investasi yang menghasilkan tenaga kerja di Kota Bogor	Urusan Penanaman Modal
		Terbatasnya kompetensi dan ketrampilan tenaga kerja	Urusan Tenaga Kerja
	Belum optimalnya hubungan industrial pekerja	Terbatasnya kompetensi dan ketrampilan tenaga kerja	Urusan Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja		Belum optimalnya perlindungan hak-hak pekerja termasuk jaminan sosial, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja	Urusan Tenaga Kerja
		Belum optimalnya penyelesaian kasus sengketa pekerja	Urusan Tenaga Kerja
		masih terjadi kesenjangan tingkat kesejahteraan tenaga kerja	Urusan Tenaga Kerja
Belum optimalnya daya saing sumberdaya manusia	Belum meratanya akses dan mutu kesehatan masyarakat	Masih terjadinya ketimpangan pelayanan kesehatan (tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan, SDM tenaga kesehatan, kemampuan finansial masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan yang layak)	Urusan Kesehatan
		Masih belum optimalnya pembiasaan pola hidup bersih dan sehat masyarakat (status mutu gizi keluarga dan pengendalian terhadap penyakit menular dan tidak menular/degeneratif, akses masyarakat terhadap air minum, air limbah, persampahan, rumah layak huni, kebiasaan merokok, cuci tangan dengan sabun, kebersihan lingkungan, olahraga)	Urusan Kesehatan
		Masih belum optimalnya penguatan sistem kesehatan dalam penanganan wabah	Urusan Kesehatan
		Partisipasi masyarakat dalam olahraga masih belum optimal	Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Kesehatan
		Masih adanya produk pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang tidak aman dan layak konsumsi sehingga berbahaya untuk kesehatan	Urusan Ketahanan Pangan dan Urusan Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
	Masih tingginya prevalensi stunting	Ketidakcukupan konsumsi kalori dan protein sesuai standar terutama pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran 40% ke bawah	Urusan Pangan dan Urusan Pertanian
		Asupan gizi yang tidak memadai pada ibu hamil pada anak balita (0-58 bulan) dan keluarga rawan stunting	Urusan Kesehatan dan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		Layanan kesehatan ibu dan anak masih terbatas karena tenaga medis, fasilitas kesehatan yang belum memadai dan pemberian makanan tambahan yang bergizi untuk kelompok rentan belum merata	Urusan Kesehatan
		Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi dan kesehatan reproduksi pada pasangan pra nikah, pasangan usia subur, dan ibu hamil	Urusan Kesehatan dan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		masih banyaknya kasus anemia pada remaja putri yang menyebabkan resiko tinggi mengalami stunting	Urusan Kesehatan
		Sanitasi dan akses air bersih yang belum memadai yang dapat meningkatkan resiko infeksi pada ibu dan anak	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Kesehatan
		Tata Kelola Implementasi Kebijakan dan Program Percepatan Penurunan Stunting belum efektif dan efisien	Urusan Kesehatan, Urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Kesra)
	Belum meratanya akses dan mutu pendidikan	Masih terjadinya ketimpangan layanan pendidikan (tingkat ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidikan dan	Urusan pendidikan dan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Kesra)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
		kependidikan, kemampuan finansial siswa untuk mendapat pendidikan yang layak)	
		Penanganan anak putus sekolah masih belum optimal	Urusan Pendidikan
		keterbatasan akses pendidikan non formal bagi masyarakat kelompok rentan akibat masih minimnya jumlah dan persebaran PKBM yang tidak merata	Urusan Pendidikan
		Kurikulum dan pembelajaran belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan kebutuhan saat ini, terutama terkait kurikulum muatan lokal yang belum sepenuhnya memperhatikan muatan muatan pembelajaran yang menggambarkan aspek identitas dan keunikan daerah, aspek lingkungan, aspek kewirausahaan, ekonomi kreatif, cara berfikir kreatif dan inovatif, serta adopsi pemanfaatan teknologi informasi.	Urusan Pendidikan
		Makin maraknya kasus perundungan, kekerasan seksual, tawuran antar pelajar di lingkungan satuan pendidikan yang disebabkan pengaruh negatif media sosial dan lingkungan	Urusan Pendidikan, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Komunikasi dan Informatika
		Belum optimalnya kerjasama pendidikan karakter antara guru, orangtua dan lingkungan	Urusan Pendidikan
		Belum optimalnya peran satuan tugas pendidikan dalam melaksanakan pengawasan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan	Urusan Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
		baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah	
		Rerata capaian pembelajaran dari aspek literasi dan numerasi masih belum optimal	Urusan Pendidikan dan Urusan Perpustakaan
		Belum optimalnya kualitas literasi masyarakat	Urusan Perpustakaan
		Kesejahteraan guru khususnya guru honorer masih belum terselesaikan sepenuhnya yang berdampak kepada motivasi dan kinerja guru	Urusan Pendidikan
	Belum optimal layanan pendidikan Inklusif	Masih belum adanya kesiapan tenaga pendidik baik dari kuantitas maupun kompetensi guru untuk yang khusus menangani ABK	Urusan Pendidikan
		Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana pendukung pendidikan inklusi, serta belum sepenuhnya tersedia kurikulum dan metode evaluasi penilaian hasil pembelajaran yang adaptif	Urusan Pendidikan
		Kurangnya metode dan model pembelajaran serta sarana prasarana untuk pendidikan inklusif	Urusan Pendidikan
		Stigma dan diskriminasi di lingkungan berpotensi terjadinya perundungan	Urusan Pendidikan
	Tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang belum sepenuhnya akuntabel dan transparan	Kualitas data pokok pendidikan yang masih belum akurat	Urusan Pendidikan
		Pengelolaan anggaran mandatory pendidikan belum sepenuhnya efektif dan efisien	Urusan Pendidikan
		Belum optimalnya kerjasama kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan pendidikan	Urusan Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
	Memudarnya Identitas dan karakteristik masyarakat Kota Bogor yang arif dan berbudaya dan Identitas Kota Bogor sebagai Kota Pusaka	Lunturnya budaya tradisional karena pengaruh globalisasi dan pergeseran gaya hidup	Urusan Kebudayaan
		Kurangnya apresiasi terhadap warisan budaya dan pelestarian serta perlindungan terhadap object cagar budaya dan warisan budaya tak benda	Urusan Kebudayaan
	Masih adanya ketimpangan gender dan kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap kelompok rentan	Masih belum optimalnya pemberdayaan perempuan, lansia dan kelompok disabilitas	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Sosial, Urusan Tenaga Kerja
		Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Masih adanya diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan kelompok disabilitas baik di tempat kerja maupun lingkungan masyarakat	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Sosial, Urusan Tenaga Kerja
		Masih adanya kekerasan dan eksploitasi dan pengabaian hak-hak anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Masih rentan terjadi diskriminasi kepada perempuan, kelompok penyandang disabilitas dan lansia dalam mengakses pelayanan publik	Seluruh Perangkat Daerah
		Belum sepenuhnya tersedia sarana prasarana dan fasilitas umum yang ramah bagi disabilitas dan lansia di seluruh wilayah	Seluruh Perangkat Daerah
	Belum terpenuhinya secara optimal aspek kualitas hidup keluarga	Masih belum meratanya pemenuhan aspek legalitas keluarga	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
		Masih tingginya KDRT, tingkat perceraian dalam rumah tangga	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
		Belum meratanya kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa pendidikan, kesehatan, pangan, dan hunian yang layak	Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pangan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Kesra) dan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Masih kurangnya kemampuan resiliensi keluarga dalam menghadapi perubahan lingkungan sekitarnya	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		Masih adanya pernikahan usia dini	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		Masih maraknya kejadian kekerasan dalam rumah tangga	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Belum optimalnya kualitas tumbuh kembang anak	Kualitas pendidikan dan kesehatan anak belum merata	Urusan Pendidikan dan Urusan Kesehatan
		Hak Hak Anak belum terpenuhi seluruhnya sesuai dengan standar pemenuhan hak anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Masih terjadinya kekerasan fisik dan non fisik pada anak serta eksploitasi anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Belum optimalnya perlindungan khusus berupa layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, serta upaya rehabilitasi dan pemulihan terhadap anak-anak terlantar, anak korban kekerasan dan anak-anak berkebutuhan khusus	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Sosial, Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan,
	Belum optimalnya kualitas dan daya saing pemuda	Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam mengikuti kegiatan dan organisasi kepemudaan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
		Meningkatnya intensitas gangguan kesehatan mental pemuda (krisis identitas, stress, bullying, kecanduan gawai, dan penyalangunaan narkoba)	Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Permasalahan sosial dan perilaku pada pemuda (pergaulan bebas, tawuran, dan kekerasan, perilaku menyimpang, judi)	Urusan Pemuda dan Olah Raga, Urusan Pendidikan, Urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Urusan Ketrentaman dan Ketertiban Umum
		Masih rendahnya kreativitas, inovasi dan jiwa kewirausahaan pemuda	Urusan Kepemudaan dan Olahraga Unsur Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
Masih lemahnya daya saing ekonomi daerah	Kurangnya inovasi pada berbagai sektor ekonomi yang menghambat kemampuan daerah untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif.	Belum terbangunnya ekosistem inovasi di daerah yang kuat untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
		Belum adanya pemetaan kebutuhan dan karakteristik iptek dan inovasi daerah yang sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
		Budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat masih rendah sehingga inovasi belum menjadi bagian dari upaya alternatif solusi dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
		Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi serta kerjasama antar pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
		dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk percepatan pembangunan	
		Keterbatasan akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi menghambat produktivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
		Belum optimalnya investasi dalam kegiatan R&D menghambat pengembangan produk dan layanan baru yang inovatif.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Perindustrian, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian
		Keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang mendukung pelaksanaan riset dan inovasi sesuai kebutuhan daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan, Urusan Komunikasi dan Informatika
		Hak kekayaan intelektual inovasi masih belum seluruhnya dimiliki oleh para inovator sehingga berpotensi terhadap pembajakan produk hasil inovasi daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
		Masih kurangnya insentif dan penghargaan pada para periset dan inovator di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat yang berdampak pada menurunnya motivasi untuk berpikir kreatif dan inovatif	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
	Belum optimalnya pemanfaatan riset dan inovasi daerah untuk	Keterbatasan literasi digital masyarakat dalam pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
	mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah	Banyaknya hasil riset dan inovasi yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
		Hilirisasi hasil riset dan inovasi belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara luas untuk percepatan pembangunan ekonomi	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
		Upaya promosi untuk menarik investasi pihak swasta dalam rangka hilirisasi produk inovasi daerah masih belum sepenuhnya digerakkan secara masif	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
	Pengembangan ekonomi Kota Bogor berbasis potensi wilayah belum optimal	Perkembangan yang pesat di wilayah sekitar Kota Bogor (seperti Sentul, Cibinong), belum mampu dimanfaatkan untuk menjadi pasar dalam mempercepat pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, ekonomi kreatif serta MICE yang menjadi sektor basis Kota Bogor. Apabila Kota Bogor tidak mampu memanfaatkan potensi pertumbuhan pusat-pusat baru di sekitar maka hal ini akan menjadi ancaman untuk menurunkan fungsi Kota Bogor sebagai gateway untuk wilayah sekitar (Kabupaten Bogor).	Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Perdagangan, Urusan Industri, Urusan Pariwisata, Urusan Penanaman Modal, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)
		Terjadinya trend penurunan PDRB sektor Industri Pengolahan sebagai salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi Kota Bogor	Urusan Perindustrian
		Belum optimalnya peran sektor jasa (tersier) dalam struktur perekonomian kota	Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Perdagangan, Urusan Industri, Urusan Pariwisata, Urusan Penanaman Modal, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
			Bidang Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)
		Kurangnya daya saing wilayah dalam menyerap investasi yang menghasilkan tenaga kerja di Kota Bogor antara lain karena keterbatasan luas wilayah, SDM, infrastruktur, dsb	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Perdagangan, Urusan Industri, Urusan Pariwisata, Urusan Penanaman Modal, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bag. perekonomian)
		Masih belum optimalnya penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM lokal	Urusan Perdagangan
		Pasar tradisional masih belum berjalan secara optimal	Urusan Perdagangan
		Masih rendahnya daya saing produk dan akses pemasaran produk untuk perdagangan ekspor	Urusan Perdagangan
	Perlindungan konsumen belum berjalan optimal	Masyarakat masih belum memahami tertib ukur	Urusan Perdagangan
		Pengawasan tertib ukur masih lemah	Urusan Perdagangan
	Panjangnya birokrasi perizinan dan ekonomi berbiaya tinggi menghambat masuknya investasi daerah	Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang kurang adaptif terhadap penciptaan iklim investasi di daerah	Urusan Penanaman Modal
	Produktivitas dan daya saing UMKM, pelaku ekonomi kreatif dan IKM masih rendah	lambatnya pertumbuhan perusahaan startup di Kota Bogor yang disebabkan karena produk/layanan yang dihasilkan belum memenuhi kebutuhan/preferensi pasar, kurangnya kreatifitas/inovasi, dan masih lemahnya kolaborasi/kemitraan dengan jaringan usaha lainnya	Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Pariwisata, Urusan Perindustrian, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
		Belum optimalnya pengembangan, pemberdayaan, dan pendampingan bagi UMKM dan IKM	Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Pariwisata, Urusan Perindustrian, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
		Belum meratanya pemanfaatan IT & digital economy di lingkup UMKM, industri kreatif dan IKM	Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Pariwisata, Urusan Perindustrian, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian)
		Belum optimalnya manajemen pengelolaan UMKM dan IKM	Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Pariwisata, Urusan perindustrian, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian)
		Keterbatasan akses ke sumber pembiayaan, baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan, dapat menghambat investasi dan pertumbuhan usaha.	Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Pariwisata, Urusan Perindustrian, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian)
		Keterbatasan pemasaran produk	Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Pariwisata, Urusan perindustrian, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian)
		Peran inkubasi bisnis belum optimal disebabkan karena keterbatasan pendanaan,	Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Pariwisata, Urusan Perindustrian,

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
	Pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor ekonomi potensial masih belum optimal	kurangnya mentor berpengalaman, infrastruktur yang tidak memadai, serta jaringan yang terbatas untuk akses sumber daya dan pasar	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian)
		Konektivitas infrastruktur menuju destinasi wisata masih belum memadai	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perhubungan
		Terbatasnya atraksi wisata sehingga belum mampu mendorong lama tinggal/ lama kunjungan wisatawan	Urusan Pariwisata dan Urusan Kebudayaan
		Kualitas sarana prasarana destinasi wisata masih belum memadai	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pariwisata
		Kesiapan SDM Sektor Pariwisata dan nilai-nilai hospitality dari masyarakat belum optimal	Urusan Pariwisata dan Urusan Kebudayaan
		Belum terstruktur data potensi wisata yang dapat mendorong masuknya investasi	Urusan Pariwisata dan Urusan Kebudayaan
		Pemasaran wisata dan ekonomi kreatif masih belum terintegrasi	Urusan Pariwisata
		Belum tersedianya sarana prasarana multifungsi sebagai destinasi wisata baru	Urusan Pariwisata, Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Koperasi dan UKM
		Banyak pelaku ekonomi kreatif kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan, termasuk perbankan, karena karakteristik industri kreatif yang dianggap berisiko tinggi dan aset yang bersifat intangible (tidak berwujud)	Urusan Pariwisata, Urusan Koperasi dan UKM, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
		Sebagian besar pelaku ekonomi kreatif masih belajar secara otodidak, sehingga kualitasnya belum merata dan daya saing produk rendah.	Urusan Pariwisata, Urusan Koperasi dan UKM, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian)
		Keterbatasan infrastruktur digital, seperti akses internet yang lambat dan biaya yang mahal, menjadi hambatan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memasarkan produk dan jasa mereka secara online.	Urusan Pariwisata, Urusan Koperasi dan UKM, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian), Urusan Komunikasi dan Informatika
		Pelaku ekonomi kreatif seringkali kesulitan dalam memasarkan produk mereka, baik di pasar domestik maupun internasional karena kurangnya informasi dan jaringan pasar	Urusan Pariwisata, Urusan Koperasi dan UKM, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian)
		Industri kreatif kalah bersaing dengan produk-produk dari negara lain yang memiliki keunggulan dalam berbagai aspek, seperti teknologi dan pemasaran	Urusan Pariwisata, Urusan Perindustrian, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian)
		Belum adanya insentif dan kemudahan bagi pelaku ekonomi kreatif serta belum tersedianya regulasi yang mendorong/mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif	Urusan Pariwisata, Urusan Perindustrian, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian)
		Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat belum optimal dalam pengembangan ekonomi kreatif	Urusan Pariwisata, Urusan Perindustrian, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
			Sekretariat Daerah (bagian perekonomian)
	Pembajakan dan plagiarisme masih menjadi masalah serius di berbagai subsektor ekonomi kreatif, seperti film, musik, dan desain.	Kurangnya kesadaran dan penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran HKI menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif	Urusan Pariwisata, Urusan Perindustrian, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian)
	Belum optimalnya integrasi program pengembangan ekonomi inklusif	Belum ada grand design pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian)
		Belum meratanya kapasitas/ pemahaman aparatur dalam pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian)
		Masih rendahnya integrasi UMKM sebagai bagian dari <i>Value Chain</i> industri yg lebih besar	Urusan Koperasi dan UKM dan Urusan Perindustrian
	Belum optimalnya peran koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah	Daya saing koperasi yang masih lemah	Urusan Koperasi dan UKM
		belum optimalnya partisipasi anggota dalam berkontribusi untuk pengembangan usaha koperasi	Urusan Koperasi dan UKM
		Pengelolaan koperasi seringkali kurang profesional dan transparan, sehingga menghambat efisiensi dan daya saing	Urusan Koperasi dan UKM
		Keterbatasan modal menghambat ekspansi usaha dan pengembangan produk/layanan.	Urusan Koperasi dan UKM

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau	Masih banyak aktivitas ekonomi yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan (udara, air dan tanah)	Aktivitas ekonomi masih bergantung pada bahan bakar fosil sehingga menghambat transisi energi bersih	Urusan Lingkungan Hidup
		Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ekonomi hijau	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Perindustrian, Urusan Pariwisata, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian), Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
		Keterbatasan investasi dan pembiayaan untuk proyek yang memanfaatkan teknologi hijau	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Perindustrian, Urusan Pariwisata, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian), Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
		Ketidakpastian insentif dan regulasi pemanfaatan ekonomi hijau	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Perindustrian, Urusan Pariwisata, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian), Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
		Kurangnya daya saing produk hijau domestik dibandingkan dengan produk impor, terutama dari negara berteknologi maju	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Perindustrian, Urusan Pariwisata, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian), Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
Transformasi digital pada sektor pelayanan publik masih belum memadai dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi	Kesenjangan Akses Teknologi	Penyediaan infrastruktur teknologi digital yang belum merata	Urusan Komunikasi dan Informatika
	Keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan teknologi digital yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi	Terbatasnya aparatur pemerintah daerah yang memiliki keahlian teknologi digital	Urusan Komunikasi dan Informatika
		Belum meratanya literasi digital masyarakat sehingga menghambat adopsi teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi	Urusan Komunikasi dan Informatika
		Rendahnya keamanan jaringan, perangkat dan kerentanan pada aplikasi dan sistem informasi dapat berpotensi terjadinya peretasan data	Urusan Komunikasi dan Informatika
		Arsitektur sistem layanan berbasis digital belum berjalan dengan optimal	Urusan Komunikasi dan Informatika
Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang	Belum terciptanya konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan (panjang jalan, lebar jalan, kecepatan)	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur telekomunikasi dan jaringan penerangan jalan umum	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
mampu menunjang daya saing ekonomi daerah		Belum optimalnya kualitas penataan transportasi perkotaan (layanan, aksesibilitas, kenyamanan, keamanan)	Urusan Perhubungan
	Belum optimalnya kualitas penataan ruang	Belum terwujudnya struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW)	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian tata ruang kota	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Penanaman Modal
Terhambatnya realisasi percepatan program prioritas pembangunan daerah karena kapasitas fiskal yang belum memadai dan masih terbatasnya akses keuangan daerah	Sumber pendapatan asli daerah belum tergali dan dikelola secara optimal	Banyak wajib pajak dan retribusi yang belum sepenuhnya menyadari kewajiban mereka dan kurang patuh dalam membayar.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
		Database wajib pajak dan wajib retribusi yang belum akurat serta lemahnya pengawasan menyebabkan potensi pajak belum dapat dikelola secara maksimal	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
		Sistem penagihan pajak dan retribusi yang belum optimal karena keterbatasan sarana prasarana dan SDM	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
		Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
		Masih belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai salah satu sumber PAD	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
		Sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah yang belum efektif menghambat proses pemungutan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
	Belum optimalnya pelaksanaan pembiayaan alternatif (creative financing)	Belum tersedianya data yang akurat dan perencanaan yang matang terkait project yang akan diusulkan untuk pembiayaan alternatif	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (kerjasama daerah), Urusan Penanaman Modal dan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perhubungan
		Belum siapnya tata kelola untuk pelaksanaan pembiayaan alternatif	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (kerjasama daerah), Urusan Penanaman Modal dan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perhubungan
		Masih terbatasnya akses informasi pemerintah daerah terhadap pemanfaatan instrumen pendanaan alternatif	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (kerjasama daerah), Urusan Penanaman Modal dan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
Stabilitas perekonomian daerah masih belum terjaga	BUMD masih belum terkelola secara optimal	Belum optimalnya pembinaan & pengawasan rutin akuntabilitas kinerja dan keuangan BUMD	Ruang, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perhubungan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian)
	Belum terkendalinya tingkat inflasi daerah akibat naiknya sebagian kelompok pengeluaran	Belum optimalnya operasi pasar	Urusan Perdagangan, Urusan Petahanan pangan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian)
		Belum efisiennya sistem distribusi	Urusan Perdagangan, Urusan Pangan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bagian perekonomian)
	Belum sepenuhnya terjamin kondusifitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Masih seringnya terjadi pelanggaran peraturan daerah, gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta masih adanya potensi konflik di tengah masyarakat	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Unsur Pemerintahan Umum (kesatuan bangsa dan politik), Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bag Kesra) dan Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
	Partisipasi masyarakat dalam pemilu menurun		
Aspek Pelayanan Umum			
Belum optimalnya kualitas pelayanan pemerintah yang inklusif sesuai dengan kebutuhan masyarakat	tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya akuntabel, efektif, efisien, transparan, lincah, transformatif dan adaptif terhadap dinamika	Perumusan kebijakan belum sepenuhnya berkualitas dimana prosesnya belum sepenuhnya berdasarkan data informasi yang valid, kajian yang memadai, melibatkan partisipasi seluruh stakeholder dalam	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag. Hukum

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
	permasalahan politik, sosial, budaya, dan ekonomi serta keberlanjutan pembangunan	perumusannya dan berorientasi pada dampak yang diharapkan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	dan HAM), Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD
		Penetapan kebijakan berupa peraturan perundangan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kaidah kaidah reformasi hukum	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag. Hukum dan HAM), Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD
		Kebijakan Daerah yang telah ditetapkan belum diimplementasikan secara optimal dan dievaluasi keberlanjutan dan dampaknya secara berkala	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag. Hukum dan HAM), Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD
		Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah belum sepenuhnya akuntabel , berbasis data dan informasi yang berkualitas, melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, memperhatikan analisis resiko dan analisis dampak pada peningkatan kesejahteraan seluruh komponen masyarakat	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD
		Belum optimalnya partisipasi, kolaborasi, sinergi, dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
			Daerah (bagian adpem), Unsur Kewilayahan
		Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi publik dan keterbukaan informasi publik untuk membangun transparansi kinerja pembangunan daerah	Urusan Komunikasi dan Informatika
		Belum optimalnya tatakelola pelaksanaan unsur penunjang pemerintahan , termasuk tatakelola perencanaan dan penganggaran, tata kelola barang milik daerah dan tata kelola pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, dan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag PBJ)
		Pengendalian, Pengawasan dan pelaporan kinerja pemerintahan baik dari sisi kinerja fisik maupun kinerja keuangan, termasuk pencapaian kinerja SPM dan kinerja pembangunan lainnya yang telah diamanatkan sesuai peraturan perundangan belum sepenuhnya optimal	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (bag. Adpem, bagAdbang, bag organisasi), Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
		Inovasi dan kreatif thinking dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan daerah belum sepenuhnya menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
		Belum optimalnya pengembangan budaya kreatif dan inovatif dalam setiap aktivitas pembangunan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
		Agen agen perubahan belum sepenuhnya mampu mempengaruhi perubahan kinerja organisasi	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan
		Budaya kerja belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan prima dan belum sepenuhnya adaptif menghadapi perubahan dan kondisi ketidakpastian	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan
		Belum optimalnya kematangan kelembagaan pemerintah daerah dan profesionalisme SDM aparatur pemerintahnya sebagai pilar penggerak roda pembangunan daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan
	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Keterbatasan sarana prasarana yang berkualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Seluruh Urusan pemerintahan
		Belum optimalnya profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur pelayan publik	Seluruh Urusan pemerintahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterkaitan Urusan
		Standar pelayanan, prosedur dan proses bisnis pelayanan publik yang belum akuntabel, efektif, efisien dan transparan serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat	Seluruh Urusan pemerintahan
		Pengelolaan pengaduan masyarakat masih belum optimal	Seluruh Urusan pemerintahan
		Kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah belum optimal karena keterbatasan SDM dan sarana prasana serta tata kelola pelayanannya	Unsur Kewilayahan
		Integritas lembaga dan SDM aparatur pelayanan publik belum sepenuhnya terbangun dengan baik	Seluruh Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
	Belum optimalnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan	Regulasi yang mendorong digitalisasi belum sepenuhnya tersedia, dan koordinasi kebijakan antar-lembaga untuk membangun pemerintahan digital belum sepenuhnya terbangun dengan baik	Urusan Komunikasi dan Informatika
		Masih adanya kesenjangan dalam penyediaan infrastruktur digital	Urusan Komunikasi dan Informatika
		Keterbatasan Ketersediaan SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Urusan Komunikasi dan Informatika
		Integrasi sistem dan data antar-instansi yang masih parsial dan terfragmentasi, sehingga menyebabkan rendahnya validitas dan efisiensi pertukaran data	Urusan Statistik, Urusan Komunikasi dan Informatika
		Risiko kebocoran data dan serangan siber yang semakin meningkat	Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian

Sumber : Hasil Analisis, Bapperida (2025)

2.9.2. Isu Strategis Daerah

Isu dapat diartikan sebagai pertanyaan yang belum terselesaikan dan membutuhkan keputusan atau klarifikasi di masa depan. Adapun strategis dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki dampak besar. Dengan demikian, isu strategis dalam konteks RPJMD Kota Bogor 2025-2029 adalah keadaan atau kondisi yang perlu mendapatkan perhatian secara fundamental atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah, khususnya di jangka menengah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kota Bogor dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah seperti yang telah dibahas di bagian atas, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan, yang meliputi aspek fisik dan lingkungan, sosial dan budaya, ekonomi dan keuangan, serta kelembagaan dan legal. Isu strategis RPJMD Kota Bogor 2025-2029 menjadi landasan awal dalam rangka pencapaian bagi visi dan rencana pembangunan Kota Bogor yang telah tersusun dalam RPJPD Kota Bogor 2025-2045.

Isu-isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber di level yang berbeda, antara lain: (1) isu strategis dinamika global yang berpengaruh terhadap Kota Bogor, (2) Isu strategis dari RPJMN 2025-2029, (3) Isu strategis dari Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029, (4) Isu strategis dari RPJPD Kota Bogor 2025-2045, (5) isu strategis dari KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029, dan (6) isu strategis dari RTRW Kota Bogor 2011-2031. Secara lebih detail, perumusan dan sintesis isu strategis pada RPJMD Kota Bogor 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 2.85.

Tabel 2.85 Sintesis Isu Strategis

Potensi Daerah	Permasalahan Kota Bogor 2025-2029	Isu KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis				Isu Strategis Kota Bogor 2025-2029
			Isu Global	Isu Nasional dalam RPJMN 2025-2029	Isu Regional dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029	Isu Regional dalam RPJPD Kota Bogor 2025-2045	
Kualitas sumber daya manusia yang relatif tinggi	Daya saing manusia (pendidikan dan Kesehatan)	Perlunya peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan berdaya saing	Perubahan demografi: urbanisasi, aging population, kenaikan kelas ekonomi menengah di Amerika Latin dan Asia		Perkembangan penduduk menciptakan potensi SDM yang perlu dipersiapkan untuk dapat berdaya saing dalam menghadapi peluang dan tantangan global dan regional dengan mempersiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan norma sosial-budaya masyarakat	Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	Pengaruh lingkungan sekolah terhadap tumbuh kembang siswa						
	Pemerataan kualitas pendidikan						
	Inklusi dan pengetahuan kesehatan						
	Inklusi kelompok rentan						
Kuatnya kesejarahan kota dalam aspek budaya, bangunan, dan sains	Pembangunan tabula rasa dan ancaman terhadap karakter Kota Bogor					Identitas Bogor sebagai kota pusaka dan sains	Identitas Kota Bogor dari Aspek Sains dan Sejarah
<ul style="list-style-type: none"> Sebagai konstelasi dari aglomerasi metropolitan utama yang terkoneksi global Potensi MICE, horeka, dan 	<ul style="list-style-type: none"> Pergeseran ekonomi Kota Bogor Belum optimalnya pengembangan ekonomi baru Belum optimalnya 	Masih minimnya optimalisasi terhadap sektor-sektor ekonomi potensial dan berkelanjutan guna mewujudkan	Geopolitik dan geoeкономи di Indopacific dengan pemain baru muncul di negara berkembang (Tiongkok) serta	Produktivitas ekonomi perkotaan rendah	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam bentuk ekonomi inklusif yang memperhatikan batasan-batasan lingkungan, tantangan global dan regional, pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> Transformasi ekonomi melalui pengembangan sektor ekonomi potensial Sistem ekonomi sirkuler perkotaan 	Transformasi Ekonomi dan Masyarakat

Potensi Daerah	Permasalahan Kota Bogor 2025-2029	Isu KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis				Isu Strategis Kota Bogor 2025-2029
			Isu Global	Isu Nasional dalam RPJMN 2025-2029	Isu Regional dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029	Isu Regional dalam RPJPD Kota Bogor 2025-2045	
ekonomi kreatif	pengembangan UMKM dan pasar	masyarakat Kota Bogor yang sejahtera	perdagangan internasional dengan axis baru di negara berkembang		teknologi, serta produktivitas ekonomi lokal		
	Ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan kota			Rendahnya kesempatan kerja, penanganan sektor ekonomi informal yang belum optimal, serta tingginya kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kriminalitas masih menjadi tantangan utama perkotaan pada bidang sosial-ekonomi			
	Laju pertumbuhan penduduk yang berimplikasi terhadap tekanan penyediaan perumahan, pelayanan dasar, dan kebutuhan lainnya		Urbanisasi di dunia	Pemanfaatan lahan perkotaan yang belum efisien dan pengendalian ruang yang kurang efektif telah	Kesenjangan pembangunan dan belum optimalnya konektivitas wilayah akibat kurang meratanya penyediaan maupun kualitas infrastruktur pelayanan dasar		Sistem Permukiman yang Nyaman dengan Penataan Ruang yang Berkelanjutan

Potensi Daerah	Permasalahan Kota Bogor 2025-2029	Isu KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis				Isu Strategis Kota Bogor 2025-2029
			Isu Global	Isu Nasional dalam RPJMN 2025-2029	Isu Regional dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029	Isu Regional dalam RPJPD Kota Bogor 2025-2045	
Daya tarik Kota Bogor sebagai kota hunian	Permukiman yang belum sepenuhnya nyaman	Akses terhadap infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan yang belum memadai		mendorong laju urbanisasi lebih tinggi di pinggiran kota yang menyebabkan permukiman tumbuh menyerak dan keluar dari kontrol		Optimalisasi penataan ruang dan sistem permukiman yang cerdas dan berkelanjutan	
	Pemerataan infrastruktur kota			Ketersediaan dan akses layanan perkotaan masih terbatas serta belum inklusif dan memadai			
	Kinerja utilitas belum optimal	Belum terpenuhi dan meratanya akses terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi secara menyeluruh					
Adanya inisiatif transportasi publik	Kinerja sistem transportasi belum optimal	Akses terhadap infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan yang belum memadai		Pembangunan dan penyediaan infrastruktur khusus di wilayah metropolitan belum merata, memiliki kualitas yang terbatas, serta tidak		Infrastruktur dan sistem transportasi yang terintegrasi	Infrastruktur dan Sistem Transportasi yang Terintegrasi

Potensi Daerah	Permasalahan Kota Bogor 2025-2029	Isu KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis				Isu Strategis Kota Bogor 2025-2029
			Isu Global	Isu Nasional dalam RPJMN 2025-2029	Isu Regional dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029	Isu Regional dalam RPJPD Kota Bogor 2025-2045	
				terintegrasi secara kewilayahan			
Keberadaan kebun raya sebagai salah satu identitas ekologis kota	Tekanan kualitas lingkungan hidup dan produksi polusi	Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Perubahan iklim, cuaca ekstrem, hilangnya Kehati, dan persaingan atas sumber daya alam	Tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan yang semakin tinggi di perkotaan, ditambah dengan rendahnya ketangguhan perkotaan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan penduduk dan kebutuhan pembangunan fisik memerlukan pengaturan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan ruang budidaya sekaligus melindungi ruang berfungsi lindung guna menjamin penyediaan jasa ekosistem lingkungan yang berkelanjutan Perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem wilayah untuk memperkuat fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan menghadapi tekanan pembangunan, risiko dampak perubahan iklim, dan kerawanan bencana 	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim global	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Global
	Penanganan sampah masih perlu dioptimalkan						
	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana						
	Ketahanan pangan						
Inisiasi smart city selama beberapa tahun terakhir	Penyelenggaraan pemerintah berbasis sistem informasi masih belum optimal	Belum optimalnya kinerja dan kolaborasi kelambagaan		Belum ada regulasi yang mengatur perkotaan secara terpadu,	Dinamika penyelenggaraan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan berintegritas	Tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif berorientasi pelayanan publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif

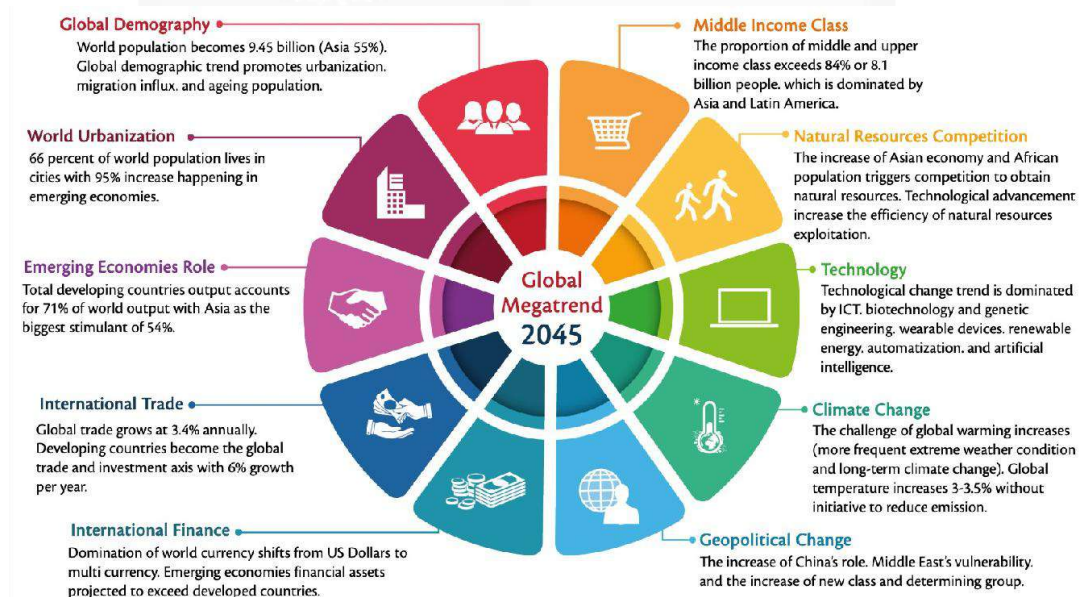
Potensi Daerah	Permasalahan Kota Bogor 2025-2029	Isu KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis				Isu Strategis Kota Bogor 2025-2029
	Kinerja inovasi daerah yang belum optimal Pendapatan daerah yang belum optimal		Isu Global	Isu Nasional dalam RPJMN 2025-2029	Isu Regional dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029	Isu Regional dalam RPJPD Kota Bogor 2025-2045	
		pemerintah dan nonpemerintah di Kota Bogor		kurang dinamisnya kelembagaan, serta belum inovatifnya pembiayaan pengelolaan perkotaan untuk mengatasi kompleksitas perkotaan	memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan didukung peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan		

Sumber : Hasil Analisis Bapperida (2025)

2.9.2.1. Isu Global

Upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah akan menghadapi isu dan tantangan yang dinamis. Tantang global cukup relevan sebagai salah satu pertimbangan dalam merumuskan isu strategis RPJMD Kota Bogor sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan di masa mendatang. Isu dan tantangan pembangunan perlu dimitigasi dan dioptimalisasi menjadi peluang untuk mencapai sasaran jangka menengah serta trajektori pembangunan jangka panjang.

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Megatren global yang dapat mempengaruhi perkembangan Kota Bogor.

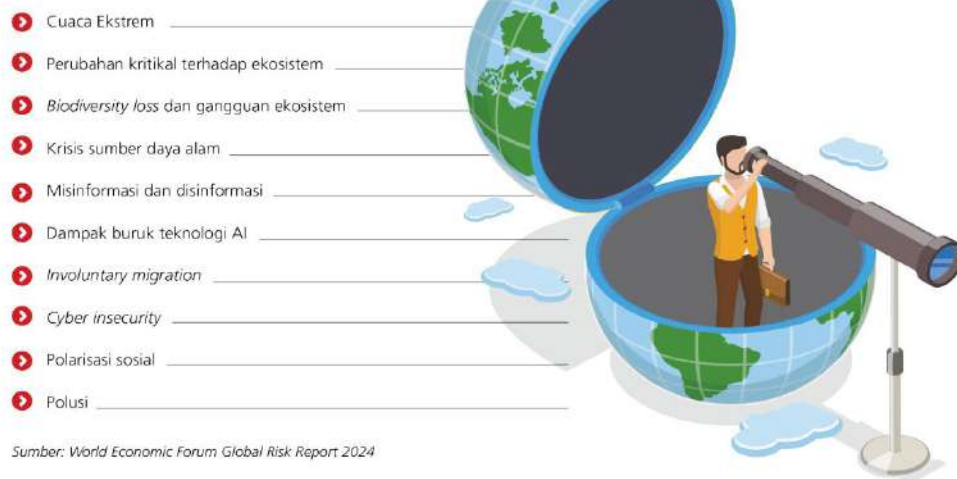


Gambar 2.40 Isu Megatren Global 2045

World economic forum global risk report 2024 mengemukakan sejumlah risiko global yang perlu diantisipasi dalam kerangka pembangunan jangka menengah. Diantara risiko tersebut adalah cuaca

ekstrem, perubahan kritikal ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati dan gangguan ekosistem, krisis SDA, misinformasi dan disinformasi, dampak buruk AI, involuntary migrasi, keamanan cyber, polarisasi sosial dan polusi.

Risiko Global Jangka Menengah



Gambar 2.41 Risiko Global Jangka Menengah

2.9.2.2. Isu Nasional

Pembangunan jangka menengah dalam RPJMD 2025-2029 berperan penting sebagai fondasi awal untuk mencapai visi jangka panjang Kota Bogor. Upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah akan menghadapi isu dan tantangan yang dinamis tidak hanya pada konstelasi regional, melainkan juga nasional. Berikut ini merupakan sejumlah tantangan dalam pembangunan jangka menengah nasional yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2025-2029:

- 1) Rendahnya Produktivitas
- 2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
- 3) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat
- 4) Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif
- 5) Krisis Lingkungan
- 6) Geopolitik dan Geoekonomi
- 7) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Terdapat isu pada RPJMN 2025-2029 dalam sasaran Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang tertuang pada Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Berikut ini merupakan sejumlah isu perkotaan dalam pembangunan jangka menengah nasional yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2025-2029:

- 1) Setiap 1 persen pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia hanya meningkatkan 1,4 persen PDB perkapita, kontribusi ekonomi yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan Cina dan rata-rata negara Asia Timur dan Pasifik (Bank Dunia, 2019).
- 2) Pemanfaatan lahan perkotaan yang belum efisien dan pengendalian ruang yang kurang efektif telah mendorong laju urbanisasi lebih tinggi di pinggiran kota yang menyebabkan permukiman tumbuh menyerak dan keluar dari kontrol.
- 3) Ketersediaan dan akses layanan perkotaan berupa rumah layak huni, layanan air minum, sanitasi, dan infrastruktur perkotaan masih terbatas, sementara pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, serta sarana pendidikan dan kesehatan belum inklusif dan memadai.
- 4) Pembangunan dan penyediaan infrastruktur khusus di wilayah metropolitan belum merata, memiliki kualitas yang terbatas, serta tidak terintegrasi secara kewilayahan.
- 5) Rendahnya kesempatan kerja, penanganan sektor ekonomi informal yang belum optimal, serta tingginya kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kriminalitas masih menjadi tantangan utama perkotaan pada bidang sosial-ekonomi.
- 6) Tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan yang semakin tinggi di perkotaan, ditambah dengan rendahnya ketangguhan perkotaan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim,

menciptakan tantangan besar bagi keberlanjutan hidup di perkotaan.

- 7) Belum ada regulasi yang mengatur perkotaan secara terpadu, kurang dinamisnya kelembagaan, serta belum inovatifnya pembiayaan pengelolaan perkotaan untuk mengatasi kompleksitas perkotaan di 2045.
- 8) Tingginya konsentrasi penduduk Indonesia di Pulau Jawa (sebesar 56,10 persen) utamanya di Wilayah Metropolitan Jakarta menyebabkan beban Jakarta dan daerah sekitarnya meningkat, sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan peningkatan dampak kerugian ekonomi.

Terdapat isu pada RPJMN 2025-2029 dalam Arah Pembangunan Wilayah Jawa. Berikut ini merupakan sejumlah isu Wilayah Jawa dalam pembangunan jangka menengah nasional yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2025-2029:

- 1) Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, dibuktikan dengan rata-rata nilai Metropolitan Performance Index di Pulau Jawa masih berada di bawah 50 persen.
- 2) Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah (industri di Jawa masih memiliki rasio *robot density* 5:10.000, dibandingkan dengan Malaysia 55:10.000 dan Korea Selatan 1.000:10.000).
- 3) Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa bagian selatan.
- 4) Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa.

- 5) Kesenjangan keterampilan dan mismatch pendidikan-industri terlihat dari perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan dan kebutuhan industri, dengan tingkat pengangguran lulusan SMK dan SMA pada 2023 masing-masing sebesar 9,31 persen dan 8,15 persen.
- 6) Prevalensi *stunting*, *wasting*, dan *underweight* masih relatif tinggi, rata-rata untuk Wilayah Jawa mencapai 20 persen (2023).
- 7) Beban kasus TBC tertinggi ada pada wilayah padat penduduk.
- 8) Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11 persen (2023), dengan yang tertinggi Provinsi DIY mencapai sekitar 11 persen. Program pengurangan kemiskinan belum terpadu dengan potensi sektor ekonomi unggul dan inovasi pemberdayaan ekonomi pada daerah kantong-kantong kemiskinan tinggi.

2.9.2.3. Isu Regional

Isu strategis pembangunan antara tingkat provinsi dan kota yang terintegrasi merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan. Ketika kedua tingkat pemerintahan ini bekerja sama secara sinergis, maka akan tercipta kebijakan dan program yang lebih komprehensif, efektif, dan efisien. Dalam konstelasi regional, isu strategis yang tertuang pada Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029, RPJPD Kota Bogor 2025-2045, KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029, serta RTRW Kota Bogor 2011-2031 yang perlu disintesis dan dilakukan integrasi. Isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029 yang perlu disintesis dan diintegrasikan ke dalam isu strategis jangka menengah Kota Bogor adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam bentuk ekonomi inklusif yang memperhatikan batasan-batasan lingkungan, tantangan global dan regional, pemanfaatan teknologi, serta produktivitas ekonomi lokal.

- 2) Perkembangan penduduk menciptakan potensi SDM yang perlu dipersiapkan untuk dapat berdaya saing dalam menghadapi peluang dan tantangan global dan regional dengan mempersiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan norma sosial-budaya masyarakat.
- 3) Kesenjangan pembangunan dan belum optimalnya konektivitas wilayah akibat kurang meratanya penyediaan maupun kualitas infrastruktur pelayanan dasar.
- 4) Perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem wilayah untuk memperkuat fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan menghadapi tekanan pembangunan, risiko dampak perubahan iklim, dan kerawanan bencana.
- 5) Perkembangan penduduk dan kebutuhan pembangunan fisik memerlukan pengaturan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan ruang budidaya sekaligus melindungi ruang berfungsi lindung guna menjamin penyediaan jasa ekosistem lingkungan yang berkelanjutan.
- 6) Dinamika penyelenggaraan pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, dan berintegritas memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan didukung peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan.

Isu-isu strategis pembangunan jangka panjang di Kota Bogor 2025-2045 dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. Isu strategis RPJPD Kota Bogor 2025-2045 yang perlu disintesis dan diintegrasikan ke dalam isu strategis jangka menengah Kota Bogor adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

- 2) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Global.
- 3) Optimalisasi Penataan Ruang dan Sistem Permukiman yang Cerdas dan Berkelanjutan.
- 4) Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Inovatif Berorientasi Pelayanan Publik.
- 5) Sistem Ekonomi Sirkuler Perkotaan.
- 6) Menuju Transformasi Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Potensial.
- 7) Infrastruktur dan Sistem Transportasi yang Terintegrasi.

Perumusan dan sintesis isu strategis jangka menengah Kota Bogor dalam RPJMD Kota Bogor 2025-2029 juga perlu memperhatikan dokumen KLHS Kota Bogor 2025-2029 untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kota Bogor. Rekomendasi isu pembangunan berkelanjutan dalam KLHS yang perlu disintesis dan diintegrasikan ke dalam isu strategis jangka menengah Kota Bogor adalah sebagai berikut:

- 1) Masih minimnya optimalisasi terhadap sektor-sektor ekonomi potensial dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang Sejahtera.
- 2) Perlunya peningkatan terhadap kualitas sumberdaya manusia yang sehat dan berdaya saing.
- 3) Akses terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang belum memadai.
- 4) Belum terpenuhi dan meratanya terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi secara menyeluruh.
- 5) Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 6) Belum optimalnya kinerja dan kolaborasi kelambagaan pemerintah dan nonpemerintah di Kota Bogor.

Perumusan dan sintesis isu strategis jangka menengah Kota Bogor dalam RPJMD Kota Bogor 2025-2029 juga perlu memperhatikan dokumen RTRW Kota Bogor 2011-2031 untuk memastikan bahwa tata ruang yang telah direncanakan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kota Bogor. Dokumen RTRW tidak mengenal adanya konteks terkait isu strategis dalam muatannya, namun terdapat muatan terkait Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota, sehingga rekomendasi isu penataan ruang dalam RTRW yang perlu disintesis dan diintegrasikan ke dalam isu strategis jangka menengah Kota Bogor adalah terkait dengan Strategi Penataan Ruang Kota Bogor sebagai berikut:

- 1) Strategi pemantapan peran Daerah Kota sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi meliputi:
 - a. meningkatkan peran Daerah Kota sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa skala nasional dan regional, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan barang skala regional. pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya;
 - b. menyediakan infrastruktur yang terintegrasi dengan kawasan sekitar;
 - c. menetapkan dan memantapkan kawasan lindung; dan
 - d. mengembangkan kegiatan budi daya secara terpadu serasi, dan selaras sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 2) strategi mempertahankan PPK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan meliputi:
 - a. mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan sekitar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor; dan

- b. merevitalisasi PPK dengan tetap memperhatikan fungsi, identitas dan karakter Daerah Kota sebagai Kota Pusaka;
- 3) strategi pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu meliputi:
 - a. mewujudkan pusat pertumbuhan baru sub PPK Pasima melalui pengembangan kawasan campuran;
 - b. mewujudkan Sub PPK Utara sebagai kawasan perkotaan baru melalui pengembangan koridor pusat yang terpadu;
 - c. mewujudkan Sub PPK Purwa sebagai salah satu gerbang kota melalui pengembangan kawasan campuran; dan
 - d. mewujudkan sub PPK Daksina sebagai pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kawasan campuran;
- 4) strategi pengembangan PL untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan melalui mengembangkan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya;
- 5) strategi mengembangkan 4 (empat) WP sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta kawasan wisata pada WP Pasima sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang serta keberadaan Hutan Penelitian Dramaga dan kawasan lindung lainnya;
 - b. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Utara;
 - c. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Purwa; dan

- d. mengembangkan kegiatan agribisnis, perumahan, serta kegiatan jasa sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Daksina;
- 6) strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam Daerah Kota dan Wilayah Kabupaten Bogor meliputi:
 - a. sinergitas sistem jaringan jalan antara Daerah Kota dengan Kabupaten Bogor;
 - b. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar PPK, Sub PPK, dan PL;
 - c. mengembangkan jalan lingkar dan jalan tembus;
 - d. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya PPK, Sub PPK, dan PL;
 - e. mengembangkan sistem transportasi massal berbasis rel dan berbasis jalan;
 - f. mengembangkan sistem pengelolaan lalu lintas;
 - g. mengembangkan sistem jaringan lintas barang dari dan keluar Daerah Kota;
 - h. mengembangkan terminal penumpang dan angkutan barang;
 - i. mengembangkan konsep TOD pada titik pertemuan antar moda; dan
 - j. mengembangkan sistem jaringan pejalan kaki dan sistem jaringan perkotaan lainnya;
- 7) strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum lainnya meliputi:
 - a. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 - b. melengkapi perumahan eksisting dengan prasarana dan sarana pendukung sesuai standar minimal yang ditetapkan;

- c. mengembangkan jaringan energi listrik dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. mengembangkan jaringan gas;
 - e. mengembangkan jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih belum terjangkau;
 - f. mengembangkan jaringan sumber daya air;
 - g. mengembangkan sistem jaringan air minum;
 - h. meningkatkan sistem pengelolaan air limbah;
 - i. meningkatkan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - j. meningkatkan sistem jaringan persampahan Daerah Kota;
 - k. meningkatkan dan mengembangkan sistem drainase; dan
 - l. mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana;
- 8) strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung meliputi:
- a. menetapkan kawasan berfungsi lindung;
 - b. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah;
 - c. merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi; dan
 - d. meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung;
- 9) strategi pelestarian kawasan cagar budaya meliputi:
- a. menetapkan kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya;
 - b. meningkatkan nilai kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya; dan
 - c. mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah;
- 10) strategi peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah Daerah Kota meliputi:
- a. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada;
 - b. mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi;

- c. meningkatkan ketersediaan RTH melalui bank tanah (*landbanking*); dan
 - d. mengembangkan kemitraan atau kerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH;
- 11) strategi pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
- a. mengarahkan kawasan terbangun dengan intensitas kepadatan rendah, sedang, tinggi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. mengendalikan pengembangan kawasan PPK;
 - c. mengoptimalkan pengembangan Sub PPK; dan
 - d. membatasi pengembangan kawasan industri;
- 12) strategi pengembangan ruang Daerah Kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan meliputi:
- a. menetapkan delineasi pengembangan kawasan dan/atau fungsi khusus, antara lain kawasan TOD, kawasan wisata ilmu pengetahuan, dan kawasan khusus lainnya;
 - b. mengembangkan kawasan budi daya terbangun secara vertikal pada sebagian PPK dan Sub PPK, kawasan atau bangunan fungsi campuran, superblok dan kawasan TOD; dan
 - c. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak, efisien, dan berkelanjutan;
- 13) strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan adalah:
- a. mempertahankan, melindungi, menata, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan lingkungan; dan
 - b. menata kawasan KSK dalam rangka perlindungan terhadap kelestarian lingkungan;
- 14) strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya adalah:

- a. mempertahankan, melindungi, dan menata kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan sosial budaya;
- b. mempertahankan nilai sejarah kawasan;
- c. menata kawasan dalam rangka perlindungan peninggalan budaya; dan
- d. mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata;

15) strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi adalah:

- a. mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan ekonomi;
- b. menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong masuknya investasi;
- c. mengembangkan kawasan tematik; dan
- d. mengintegrasikan konsep guna campuran, superblok dan TOD dengan kegiatan ekonomi.

2.9.2.4. Isu Strategis Kota Bogor 2025-2029

Isu-isu strategis yang telah diidentifikasi pada Tabel 2.74 kemudian dikombinasikan dengan permasalahan di Kota Bogor yang telah disampaikan pada SubBab 2.10.1 serta modalitas Kota Bogor untuk menghasilkan isu-isu strategis RPJMD Kota Bogor 2025-2029. Modalitas Kota Bogor ini terutama menyangkut posisi strategisnya sebagai bagian kawasan aglomerasi Jabodetabekpunjur, sejarah panjang Kota Bogor, serta potensi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia Kota Bogor. Pembahasan modalitas ini tidak disampaikan secara spesifik, tetapi diuraikan lebih lanjut secara elaboratif dalam 7 (tujuh) isu strategis RPJMD Kota Bogor 2025-2029 yang telah mengintegrasikan dan menyintesis berbagai isu global, nasional dan regional sebagai berikut.

1.1.1.1.1 1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam pembangunan berkelanjutan yakni sebagai modalitas utama pembangunan daerah. Kota Bogor telah mendapatkan bonus demografi di mana penduduk Kota Bogor didominasi oleh usia produktif. Situasi bonus demografi dapat memberikan dampak yang positif khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Tetapi, bonus ini tidak serta merta mewujudkan pada manfaat riil yang diterima melainkan membutuhkan upaya sehingga bonus ini dapat benar-benar berbuah positif seperti pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Terlebih dengan semakin pesatnya perkembangan zaman yang semakin modern saat ini, menuntut sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi.

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM sesuai tuntutan zaman akan mendorong keberhasilan dalam berbagai aspek pembangunan. Di masa depan, dunia akan menghadapi perubahan yang jauh lebih cepat daripada yang pernah dialami sebelumnya, terutama dipicu oleh megatren global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi. Perubahan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan budaya, ekonomi, serta menuntut adaptasi dan inovasi yang cepat dari individu, masyarakat, dan daerah untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang muncul.

Fase-fase dalam kerangka bonus demografi penting untuk diidentifikasi karena masing-masing fase membutuhkan kebijakan yang tepat guna dapat merealisasikan secara maksimal manfaat positif yang ditawarkan oleh bonus demografi. Seberapa jauh negara dan daerah dapat memanfaatkan bonus demografi akan sangat ditentukan oleh kebijakan yang diterapkan (Chen et al., 2023). Intervensi Kota Bogor dalam menyiapkan dan memanfaatkan secara optimal potensi bonus demografi diperlukan sehingga dapat berdampak terhadap pembangunan secara keseluruhan di Kota Bogor. Intervensi ini tidak hanya terkait dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh tuntutan kekinian

(seperti penguasaan beragam teknologi digital), tetapi juga hal dasar seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, bahkan asupan makanan bergizi.

Keberadaan sumber daya manusia ini menjadi penting untuk mendukung transformasi ekonomi dan masyarakat yang akan diuraikan di isu strategis lainnya. Selain itu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kesadaran, pemahaman, dan kapasitas terkait isu iklim dan lingkungan hidup. Diharapkan sumber daya manusia ini dapat berperan aktif untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau maupun transformasi lingkungan secara lebih luas.

1.1.1.1.2 2. Identitas Kota Bogor dari Aspek Sains dan Sejarah

Kota Bogor mempunyai aspek kesejarahan cukup kental dan turut mewarnai pembangunannya hingga kini. Salah satu karakter Kota Bogor yang tak lekang oleh zaman adalah sebagai pusat sains. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu simbol perkembangan sains di Kota Bogor. Reputasi sejarah dari Kebun Raya Bogor, yang didirikan pada 18 Mei 1817, melahirkan banyak lembaga penelitian dan menjadi pusat penelitian biologi tropis kelas dunia, termasuk suatu institusi pendidikan di bidang pertanian yang sekarang bernama Institut Pertanian Bogor.

Sejarah Kebun Raya Bogor tidak terlepas dari sejarah kolonial Kota Bogor yang awalnya dirancang sebagai kota perumahan dan peristirahatan. Sejarah kolonial telah meninggalkan beragam situs warisan atau pusaka, khususnya berupa bangunan, yang sampai sekarang beberapa masih difungsikan. Dalam sejarah modern Indonesia, fungsi awal Kota Bogor yang dirancang oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menjadi salah satu fondasi penting terkait perkembangan pembangunan Kota Bogor saat ini di mana masih berfungsi sebagai tempat hunian.

Aspek kesejarahan lainnya tentu terkait dengan sejarah pra-kolonial dan unsur budaya lokal yang tetap mewarnai Kota Bogor

kontemporer. Warisan budaya baik fisik maupun non fisik menjadi karakteristik yang khas di tengah perkembangan kota yang menjadi semakin modern dan seragam. Secara umum, aspek kesejarahan dan kebudayaan akan tetap memegang peranan penting dalam Identitas Kota Bogor selama 5 tahun mendatang.

Sains dan sejarah merupakan unsur penting pembentuk karakteristik Kota Bogor dari sisi sosial dan kebudayaan. Namun, dimensi ini juga mempunyai nilai ekonomi, salah satunya adalah melalui pengembangan pariwisata. Pariwisata yang mengedepankan edukasi akan sangat terkait dengan potensi sains dan sejarah Kota Bogor. Selain itu, jika sains dan pembangunan Kota Bogor dapat terkoneksi dengan baik, potensi untuk mengembangkan riset dan inovasi sebagai basis pembangunan kota akan semakin tumbuh.

1.1.1.1.3 3. Transformasi Ekonomi dan Masyarakat

Secara umum, kota cenderung bertumpu pada sektor jasa, meskipun beberapa kota juga mempunyai basis manufaktur yang cukup kuat. Dalam tinjauan aspek sejarah, keberadaan sektor industri pengolahan yang awalnya menjadi tumpuan ekonomi perkotaan mulai digeser oleh sektor jasa. Hal ini dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain, ketersediaan lahan yang semakin sempit dan mahal, upah minimum yang semakin meningkat, dan tuntutan akan kualitas lingkungan hidup yang baik. Di Indonesia, tren perpindahan industri manufaktur juga terjadi: awalnya tumbuh di Jakarta (Utara dan Timur), kemudian bergeser keluar ke arah Bekasi, lanjut ke Karawang dan Purwakarta, dan terkini sudah tumbuh di pantai utara Jawa Tengah. Dalam 5 tahun ke depan, sektor industri manufaktur tetap berperan penting dalam perekonomian Kota Bogor, meskipun kontribusinya akan semakin menurun jika dibiarkan dalam kondisi yang saat ini terjadi. Sebagian dari sektor industri pengolahan akan mengikuti transformasi ekonomi kota Bogor yang secara gradual semakin menguat di sektor jasa, termasuk dalam hal ini adalah pariwisata dan ekonomi kreatif.

Peletakan awal fondasi transformasi ekonomi ini perlu mengedepankan kombinasi antara daya saing dengan inklusivitas, termasuk inklusif gender. Daya saing menandakan tingkatan kualitas adapun inklusivitas memberikan makna pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dari beragam potensi yang ada. Kedua hal ini dapat terwujud dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik secara pengetahuan maupun keahlian. Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah dampak perpindahan ibukota terhadap penurunan permintaan akomodasi dan restoran. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu pembentuk permintaan akan sektor tersebut adalah aktivitas pegawai Pemerintah Pusat di Kota Bogor. Jika IKN Nusantara sudah berfungsi, maka ada sebagian permintaan ini yang hilang.

Adanya tantangan pembangunan keberlanjutan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Dengan kondisi lingkungan global yang semakin tertekan dan diiringi komitmen Pemerintah Pusat dan Kota Bogor dalam penanganan perubahan iklim, ekonomi hijau menjadi bagian penting arah pembangunan ekonomi Kota Bogor ke depan. Sebagai bagian penting pembangunan fondasi, salah satu pendekatan yang perlu diperkuat adalah pengembangan ekonomi sirkular di sektor persampahan yang telah lama menjadi permasalahan dan beban Kota Bogor. Namun, di sisi lain ada peluang ekonomi yang dapat dioptimalkan. Dalam hal ini, tata kelola sampah perlu juga menekankan partisipasi masyarakat yang diiringi dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat serta penyediaan sarana prasarana maupun teknologi pendukung.

1.1.1.1.4 4. Sistem Permukiman yang Nyaman dengan Penataan Ruang yang Berkelanjutan

Sebagai kota yang awalnya berfungsi sebagai hunian, Kota Bogor telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan metropolitan Jabodetabek. Namun, pertumbuhan penduduk (termasuk migrasi

masuk) yang pesat, diiringi dengan pertumbuhan beragam aktivitas ekonomi sebagai dampak turunan langsung dan tidak langsung, telah menimbulkan perkembangan perkotaan yang tidak terkendali, tidak optimalnya pelayanan infrastruktur yang tersedia, dan ketidakteraturan dalam ruang. Kesemuanya berkontribusi terhadap penurunan kenyamanan hidup.

Kenyamanan dalam konteks ruang, dan dalam rangka mendukung transisi ekonomi yang lebih hijau, juga perlu diupayakan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini tidak hanya berfungsi untuk membantu menurunkan suhu lokal di Kota Bogor, tetapi juga akan memberikan ruang untuk masyarakat berinteraksi. Tidak semua masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap ruang ketiga, termasuk rumah terbuka hijau karena kondisi rumah yang tidak memadai. Oleh karena itu, ketersediaan ruang terbuka hijau ini menjadi elemen penting bagi publik secara lebih luas untuk dapat mendapatkan akses terhadap kenyamanan dalam berkota.

Persoalan permukiman kumuh merupakan salah satu isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian selain perbaikan kondisi permukiman secara umum. Permukiman ini meliputi perumahan beserta sarana dan prasarana dasar, seperti sanitasi, air bersih, listrik, dan persampahan. Penataan ruang dalam hal ini perlu menjadi rujukan bersama sehingga perkembangan Kota Bogor dapat mendukung upaya penciptaan ruang yang lebih nyaman serta pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai rujukan bersama, peningkatan partisipasi masyarakat serta proses pemantauan dan evaluasi penataan ruang perlu semakin didorong. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemantapan *smart city*, utamanya bagaimana penggunaan teknologi informasi komunikasi yang didukung oleh data raksasa secara *real time* menjadi bagian tidak terpisahkan dari implementasi penataan ruang. Semua sektor pemerintah terkait beserta kalangan masyarakat dapat

memanfaatkannya untuk mengajukan perizinan hingga proses pemantauan pembangunan (potensi pelanggaran tata ruang) dan kinerja sarana dan prasarana.

Secara lebih umum, *smart city* dapat dimanfaatkan untuk pemantauan permasalahan yang mungkin muncul secara *real time* dengan respons yang cepat, antara lain genangan air dan banjir, kemacetan, kriminalitas, dan hal lainnya. Dalam hal ini, teknologi dijadikan sebagai sarana, bukan tujuan, untuk membantu pembuatan kebijakan yang lebih cepat dan terukur. Dengan demikian, *smart city* yang baik tidak hanya dilihat dari sisi teknologi yang digunakan, tetapi proses tata kelola yang turut melibatkan masyarakat dengan dukungan kualitas aparatur yang semakin baik. Adanya proses 2 arah antara pemerintah kota dan warganya akan mendukung perwujudan kota yang lebih nyaman.

1.1.1.1.5 5. Infrastruktur dan Sistem Transportasi yang Terintegrasi

Mobilitas menjadi aspek penting dalam produktivitas masyarakat dan kota. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem dan infrastruktur transportasi yang mampu mendorong mobilitas yang cepat dan nyaman. Kemacetan dalam hal ini menjadi permasalahan di Kota Bogor dan dapat berekskalasi jika tidak ditangani dengan baik. Kemacetan ini tidak hanya ditimbulkan oleh pergerakan kendaraan dari dalam kota, tetapi juga interaksi dengan wilayah sekitarnya. Di akhir pekan, tingkat kemacetan ini menjadi semakin parah dengan banyaknya kendaraan yang masuk untuk berwisata di Kota Bogor.

Kemacetan mempunyai implikasi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Secara ekonomi, meskipun mencerminkan pertumbuhan, tetapi di lain sisi meningkatkan biaya transportasi dan biaya lainnya bagi para pelaku usaha maupun masyarakat umum. Secara sosial, kemacetan dapat menimbulkan stres yang tentunya berdampak terhadap kesehatan. Aspek kesehatan lainnya yang terganggu disebabkan implikasi lingkungan dari kemacetan. Lebih tepatnya, polusi yang

dilepaskan akan menurunkan kualitas udara yang pada akhirnya meningkatkan risiko penyakit pernafasan.

Kemacetan tidak hanya terkait dengan kepadatan lalu lintas atau tingkat volume kendaraan, tetapi juga menyangkut integrasi sistem transportasi secara umum, termasuk perilaku dalam berkendara. Selain itu, semangat untuk mendorong transisi menjadi ekonomi hijau tentunya mendapatkan sektor transportasi menjadi salah satu pendorongnya. Dalam hal ini, pengurangan emisi yang dihasilkan dari kendaraan menjadi kunci akan transisi yang dijalankan. Diperlukan upaya bersama dari multi-pihak untuk membangun solusi yang efektif dalam penciptaan sistem transportasi yang terintegrasi dan lebih hijau, antara lain melalui peningkatan jaringan transportasi umum, pengembangan jalur sepeda, dan penerapan *smart city* untuk mengelola arus lalu lintas dengan lebih efisien.

1.1.1.1.6 6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Global

Isu strategis ini secara bagian per bagian terkait dan sudah dibahas di isu-isu strategis sebelumnya. Namun, secara umum pada level agregat (sistem perkotaan), Kota Bogor perlu meningkatkan resiliensi-nya terhadap potensi bencana serta guncangan dan tekanan yang mungkin timbul akibat perubahan iklim. Dalam konteks perkotaan, salah satu dampak perubahan iklim yang akan semakin terasa adalah fenomena *urban heat island*. Hawa panas ini akan menimbulkan ketidaknyamanan, menurunkan produktivitas, dan menyebabkan beragam penyakit. Di kasus paling ekstrem, khususnya di negara sub-tropis, hawa panas juga menyebabkan kematian, khususnya ke kelompok rentan. Aspek kebencanaan yang mungkin timbul akibat cuaca ekstrem dan perkembangan perkotaan yang tidak terkendali adalah banjir, pohon tumbang, tanah longsor, rumah ambruk, dan lainnya.

Resiliensi dalam level perkotaan diwujudkan dalam penguatan sistem perkotaan. Salah satu perwujudan dari sistem ini adalah dengan

penataan ruang yang mempertimbangkan ketahanan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim. Kepatuhan dalam pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang menjadi satu hal kunci yang perlu didorong, selain membangun sistem resiliensi di masyarakat. Begitu pun dengan pemanfaatan *smart city* untuk menguatkan *early warning system* untuk mengurangi risiko bencana.

Dalam konteks mitigasi perubahan iklim, upaya yang perlu dilakukan adalah mengurangi produksi emisi karbon dengan transisi ekonomi dan transformasi lingkungan terbangun dan sosial. Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dan lebih ramah lingkungan, dan perluasan *low emission zone* dalam hal ini menjadi salah komponen penting dari transformasi lingkungan terbangun. Dalam konteks perkotaan di Indonesia, pengelolaan persampahan menjadi bagian penting dari upaya mitigasi iklim dan membangun resiliensi. Sampah organik (makanan dan pohon-tumbuhan) dalam hal ini menjadi sumber utama sampah perkotaan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Upaya lainnya perlu diinisiasi untuk membangun fondasi resiliensi sistem perkotaan yang lebih tangguh.

Komponen resiliensi penting lainnya bagi Kota Bogor adalah pangan. Posisi Kota Bogor sebagai non-produsen pangan dan dampak perubahan iklim terhadap disrupsi produksi pertanian pangan tentu membuat kerentanan tersendiri terhadap ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan ketahanan ini tentunya juga perlu dilakukan dengan alternatif penyediaan sebagian pasokan secara internal dan diversifikasi pangan, yang dapat dikoneksikan dengan berbagai upaya pengembangan transisi ekonomi dan transformasi lingkungan.

1.1.1.1.7 7. Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif

Tata kelola pemerintahan menyangkut sistem, aparatur, dan masyarakat. Dalam sistem perkotaan yang lebih kompleks, pemanfaatan

smart city akan dapat membantu dalam penatakelolaan yang lebih baik melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah berbasis sistem informasi. Salah satu indikator terkait adalah pencapaian SPBE Kota Bogor tahun 2024 sebesar 4,8 dari skala 5 (baik), lebih tinggi dibanding capaian nasional sebesar 2,34 (cukup). Namun, jika dibandingkan dengan daerah sekitar, Kota Bogor masih lebih rendah. Hal ini menjadi indikasi jika Kota Bogor tetap perlu meningkatkan tata kelola yang lebih baik, termasuk dalam penggunaan sistem informasi dan penguatan *smart city*.

Penguatan proses bisnis di pemerintah menjadi satu hal yang terus diperkuat. Dalam hal ini, pengembangan sistem merit dan manajemen talenta akan menjadi kunci bagi kualitas aparatur yang lebih baik. Dengan kompleksitas yang dihadapi, perlu menempatkan personil pada bidang yang tepat dengan sistem insentif dan insentif yang juga mendukung. Di sisi struktur, koordinasi antar instansi akan menjadi semakin penting karena permasalahan yang dihadapi sering kali bersifat lintas sektor.

Tata kelola pemerintah juga memerlukan kolaborasi multi-pihak. Keterbatasan sumber daya, informasi asimetris, dan iklim demokrasi/partisipasi menjadi faktor-faktor penting mengapa kerja kolaboratif dalam pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah tidak sepenuhnya perlu menjadi aktor utama pelaksanaan dalam beberapa kelompok isu/bidang, tetapi lebih menjadi fasilitator dan *enabler*. Tentu peran ini dapat diambil, seiring tingkat kematangan dari aktor masyarakat sipil. Kolaborasi multi-pihak ini juga diperlukan dalam konteks pembangunan, terutama karena adanya keterbatasan fiskal daerah serta kebijakan nasional terkait dengan efisiensi anggaran.

BAB 3

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi dan Misi

3.1.1. Visi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi kota, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Adapun visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“BOGOR BERES – BOGOR MAJU”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Berakar dari keinginan kuat untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang tertata dan berdaya saing tinggi di berbagai aspek kehidupan. Fokus pada perbaikan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Kota Bogor dapat tumbuh menjadi kota maju yang berkelanjutan.

- **Bogor Beres** artinya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun Kota Bogor sampai beres. Beres tidak

hanya bermakna menata secara fisik, tetapi menata kualitas secara keseluruhan, termasuk beres pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga kota. Beres juga mengandung makna bahwa untuk bergerak kedepan, permasalahan (lama) yang masih ada perlu diselesaikan (dibereskan) segera. Tidak mungkin kota bergerak maju kedepan jika permasalahan dasar masih belum terurai.

- **Bogor Maju** artinya membangun kemajuan Kota Bogor. Kemajuan sering kali ditandai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi (atau inovasi). Hal ini juga menjadi salah satu pilar dari kemajuan Kota Bogor. Namun, kemajuan ini perlu juga disokong dengan pilar-pilar lainnya, termasuk kota yang memiliki kebudayaan dan karakter masyarakat yang kuat, manusia yang berkualitas, serta infrastruktur yang memadai.

3.1.2. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Misi pertama BOGOR CERDAS, mencerminkan perwujudan kualitas intelektualitas manusia, tata kelola pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, misi ini memastikan ketersediaan fasilitas dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat, serta memperdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal. Selain itu, misi ini juga memastikan pengelolaan pembangunan yang baik, disertai dengan aparatur

- yang cerdas dan pelayanan publik yang semakin prima dan inovatif.
2. Misi kedua BOGOR SEHAT, mencerminkan perwujudan kualitas warga dan lingkungan yang sehat. Dengan demikian, misi ini memastikan setiap warga Kota Bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Selain itu, misi ini juga memastikan penciptaan kualitas lingkungan binaan dan hidup yang menopang kesehatan dan kualitas hidup warganya dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
 3. Misi ketiga BOGOR SEJAHTERA, mencerminkan perwujudan peningkatan kualitas ekonomi kota yang berkeadilan. Dengan demikian, misi ini memastikan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif yang inovatif, dan peningkatan pendapatan daerah.
 4. Misi keempat BOGOR LANCAR, mencerminkan perwujudan peningkatan kualitas mobilitas dan tata ruang. Dengan demikian, misi ini berupaya untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan transportasi publik, memperluas aksesibilitas dan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas publik.

Pembangunan Kota Bogor dalam periode 2025-2030 tidak terlepas dari perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 serta perencanaan jangka panjang daerah sebagaimana diatur dalam RPJPD Kota Bogor 2025-2045. Keselarasan antara ketiga dokumen perencanaan ini memastikan bahwa pembangunan Kota Bogor dapat berjalan searah dengan Visi Nasional menuju Indonesia Emas 2045. Setiap aspek dalam RPJMD Kota Bogor disusun dengan mempertimbangkan arahan strategis dari kebijakan nasional maupun regional agar tercipta kesinambungan dalam pembangunan.

Visi RPJMN 2025-2029, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, peningkatan kesejahteraan sosial, serta pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Sejalan dengan itu, RPJPD Kota Bogor 2025-2045 menetapkan visi “Kota Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan”, yang mencerminkan arah pembangunan Kota Bogor sebagai pusat inovasi berbasis ilmu pengetahuan, pertumbuhan ekonomi yang progresif, serta keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, RPJMD Kota Bogor 2025-2029 mengusung visi “Bogor Beres, Bogor Maju”, yang menunjukkan komitmen kota dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta mempercepat pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Keterkaitan antara ketiga visi ini menggambarkan kesinambungan antara kebijakan daerah dan nasional dalam mewujudkan pembangunan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

RPJMD Kota Bogor 2025-2029 pada dasarnya merupakan suatu kesatuan rangkaian yang terkait dengan upaya pencapaian pembangunan jangka panjang kota serta pembangunan jangka menengah nasional. Di setiap dokumen, jumlah butir misi yang disampaikan (maupun fokus yang tertulis di setiap butir) tidak sepenuhnya sama (Gambar 3.1). Namun, misi-misi tersebut sesungguhnya mengandung makna substansial yang sama, yaitu terkait dengan upaya pembangunan beragam aspek.



Gambar 3.1 Uraian Misi RPJMD Kota Bogor 2025-2029, Misi RPJPD Kota Bogor 2025-2045, dan Misi RPJM Nasional 2025-2029

Keterkaitan Misi RPJMD Kota Bogor 2025-2029 dengan Misi RPJPD Kota Bogor 2025-2045 dan Misi RPJM Nasional 2025-2029 merupakan kombinasi dan persilangan antar butir misi. Setiap butir misi dari keempat misi RPJMD Kota Bogor 2025-2029 terkait dengan lebih dari satu butir misi, baik RPJPD Kota Bogor 2025-2045 maupun RPJM Nasional 2025-2029. Pada dasarnya, misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor 2025-2029 menggambarkan secara garis besar apa yang menjadi prioritas pembangunan untuk 5 tahun ke depan. Namun, prioritas ini tetap mempunyai keterkaitan dengan 2 dokumen lainnya. Secara lebih detail, keterkaitan antar misi ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

- 1) Misi pertama, Bogor Cerdas, utamanya menggambarkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama pendidikan dan literasi, kebudayaan, keluarga, dan tata kelola pemerintahan beserta sumber daya aparturnya. Oleh karena itu, misi ini terkait erat dengan misi ke-1, -3, -4, dan -5 dari RPJPD Kota Bogor 2025-2045 dan misi ke-1, -4, -7, dan -8 dari RPJM Nasional 2025-2029.

- 2) Misi kedua, Bogor Sehat, utamanya menggambarkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama kesehatan, perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam, penurunan risiko bencana, serta akses yang lebih baik kepada utilitas dasar. Oleh karena itu, misi ini terkait erat dengan misi ke-1, -5, -6, -7, dan -8 dari RPJPD Kota Bogor 2025-2045 dan misi ke-2, -4, -6, dan -8 dari RPJM Nasional 2025-2029.
- 3) Misi ketiga, Bogor Sejahtera, utamanya menggambarkan upaya peningkatan kualitas ekonomi kota dan masyarakat serta perwujudan ketahanan pangan. Oleh karena itu, misi ini terkait erat dengan misi ke-1, -2, dan -4 dari RPJPD Kota Bogor 2025-2045 dan misi ke-2, -5, dan -6 dari RPJM Nasional 2025-2029.
- 4) Misi keempat, Bogor Lancar, utamanya menggambarkan upaya peningkatan kualitas transportasi dan mobilitas serta perwujudan kualitas penataan ruang yang lebih baik. Oleh karena itu, misi ini terkait erat dengan misi ke-2, -5, -6, dan -8 dari RPJPD Kota Bogor 2025-2045 dan misi ke-2, -3, dan -6 dari RPJM Nasional 2025-2029.

Tabel 3.1 Keterkaitan Misi RPJMD Kota Bogor 2025-2029 dengan Misi RPJPD Kota Bogor 2025-2045 dan Misi RPJM Nasional 2025-2029

MISI RPJMN 2025-2029	MISI RPJMD KOTA BOGOR 2025-2029	MISI RPJPD KOTA BOGOR 2025-2045
ASTA CITA 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia ASTA CITA 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan	Misi 1: BOGOR CERDAS	Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing Misi 3: Memperkuat Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif Misi 4: Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Misi 5: Mewujudkan

MISI RPJMN 2025-2029	MISI RPJMD KOTA BOGOR 2025-2029	MISI RPJPD KOTA BOGOR 2025-2045
<p>Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</p> <p>ASTA CITA 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan</p> <p>ASTA CITA 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur</p>		ketahanan sosial, budaya dan ekologi
<p>ASTA CITA 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru</p> <p>ASTA CITA 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</p> <p>ASTA CITA 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan</p>	Misi 2: BOGOR SEHAT	<p>Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing</p> <p>Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi</p> <p>Misi 6: Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif</p> <p>Misi 7: Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas</p> <p>Misi 8: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan</p>

MISI RPJMN 2025-2029	MISI RPJMD KOTA BOGOR 2025-2029	MISI RPJPD KOTA BOGOR 2025-2045
<p>Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan</p> <p>ASTA CITA 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur</p>		
<p>ASTA CITA 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru</p> <p>ASTA CITA 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri</p> <p>ASTA CITA 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan</p>	<p>Misi 3: BOGOR SEJAHTERA</p>	<p>Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing</p> <p>Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang produktif dan inklusif</p> <p>Misi 4: Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi</p>
<p>ASTA CITA 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan</p>	<p>Misi 4: BOGOR LANCAR</p>	<p>Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang produktif dan inklusif</p> <p>Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi</p> <p>Misi 6: Meningkatkan</p>

MISI RPJMN 2025-2029	MISI RPJMD KOTA BOGOR 2025-2029	MISI RPJPD KOTA BOGOR 2025-2045
<p>Ekonomi Biru</p> <p>ASTA CITA 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi</p> <p>ASTA CITA 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan</p>		<p>Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif</p> <p>Misi 8: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan</p>

Sumber : Hasil Analisis Bapperida (2025)

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Bogor 2025-2029 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun secara detail ditampilkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Visi/Misi dan Tujuan RPJMD Kota Bogor

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 1: BOGOR CERDAS	Terwujudnya sumberdaya manusia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi (Smart People)		Indeks Pendidikan	73,28	73,35	73,43	73,49	73,59	73,64
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	54,70 - 54,73	55,29 - 55,33	55,89 - 55,95	56,49 - 56,56	57,09 - 57,18	57,69 - 57,79
			Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan	58,87	58,92	58,97	59,02	59,07	59,12
		Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui Wajib Belajar 13 tahun	Harapan lama Sekolah	13,53	13,54	13,56	13,57	13,59	13,6
			Rerata Capaian Pembelajaran (Average Harmonized Test Scores)	74,28	74,35	74,41	74,475	74,54	74,63
		Meningkatnya pemajuan Kebudayaan Bangsa	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	7,85	8,63	9,41	10,2	10,98	11,76
		Meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan Keluarga sebagai pilar utama penggerak pembangunan SDM Unggul	Indeks Pembangunan Keluarga	61,98	62,08	62,10	62,50	62,55	62,58

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif (Smart Government)	Meningkatnya kualitas dan daya saing generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda	65,83	65,83	65,84	65,84	65,85	65,85
			Indeks reformasi Birokrasi	90,38	90,4	90,5	90,75	91	91,01
		Terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,08	diganti menjadi Indeks Pemerintahan Digital				
			Indeks Pemerintahan Digital	NA	1,87	1,87	1,90	1,90	1,92
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	70	71	72	75	77	80
		Terwujudnya ASN yang memiliki integritas tinggi berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif	Nilai hasil survey penilaian integritas	77,83	78,12	78,41	78,7	78,99	79,28
			Indeks Berakhlak	74,6	76,1	77,6	78,5	79	80
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,65	4,66	4,67	4,68	4,69	4,7
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			SAKIP Tingkat Kota	BB (79,6)	A (80.1)	A (80.65)	A (81.15)	A (81.5)	A (82)

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		keuangan serta menguatnya sistem pengendalian internal pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,330)	Level 3 (3,335)	Level 3 (3,340)	Level 3 (3,345)	Level 3 (3,350)	Level 3 (3,355)
MISI 2: BOGOR SEHAT	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, nyaman, efisien dan layak huni (Smart Living)		Predikat Kota Sehat	Wiwerda	Wiwerda	Wiwerda	Wiwerda	Wiwerda	Wistara
		Meningkatnya kualitas hunian masyarakat	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	52,4	53,62	54,84	56,06	57,27	59,94
		Meningkatnya Akses masyarakat terhadap layanan Utilitas Dasar	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	73,30	73,80	74,30	74,80	75,30	74,80
			Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	6,27	7,77	9,27	10,77	10,8	11,02

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Menurunnya resiko bencana di seluruh wilayah	Indeks Resiko Bencana	58,03	58,02	58,02	58,01	58,01	58,00
	Terwujudnya layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas (Smart Health)		Indeks Kesehatan	86,05	86,37	86,69	87,01	87,34	87,66
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup Saat Lahir	75,93	76,14	76,35	76,56	76,77	76,98
			Prevalensi Stunting	19,1	17,31	15,76	14,43	13,28	12,28
	Terwujudnya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan (Smart Environment)		Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2Eq/Miliar)	0,38	0,71	1,05	1,48	2,07	2,51
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,84	58,09	58,34	58,6	58,85	58,85
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO2Eq)	21.798,45	35.147,05	53.794,32	82.180,71	130.547,42	191.425,41
		Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks kualitas udara	55,63	56,03	56,43	56,83	57,23	57,23
			Indeks Kualitas Air	71,3	71,5	71,7	71,9	72,1	72,1
			Indeks kualitas lahan	38,81	38,88	38,95	39,02	39,09	39,09
			Gini Rasio	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 3: BOGOR SEJAHTERA	Terwujudnya ekosistem perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah (Smart Economy)		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,21	5,3	5,35	5,38	5,56	5,61
			Indeks Ekonomi Hijau	54,36	56,47	58,02	59,77	61,72	63,54
			Indeks akses keuangan daerah (IKAD)	5,99	6,01	6,03	6,05	6,08	6,11
		Terciptanya akselerasi penanggulangan kemiskinan & peningkatan kesejahteraan Sosial	Tingkat Kemiskinan	6,05	5,95	5,38	4,64	3,85	3,65
		Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,11	7,99	7,98	7,94	7,91	7,86
			Laju PDRB sektor Jasa akomodasi dan Makan Minum (ADHB)	7,43	7,54	7,64	7,71	7,75	7,77
			Laju PDRB Sektor Perdagangan	3,26	3,28	3,28	3,29	3,34	3,38
			Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	2,74	2,9	2,99	3,23	3,34	3,56

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen PDRB)	34,7	34,76	34,82	34,88	34,94	34,99
			Indeks Ketahanan Pangan	69,14	71,65	74,26	76,96	79,75	82,63
		Menguatnya Stabilitas Daerah	Tingkat Inflasi (%)	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
			Kapasitas fiskal daerah	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8	1,85
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	80,9	81,21	81,51	81,82	82,13	82,13
MISI 4: BOGOR LANCAR	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah		IDSD (Pilar Infrastruktur)	4,73	4,75	4,77	4,79	4,8	4,8
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55
		Meningkatnya kualitas ruang kota	Persentase ketercapaian rencana struktur ruang	59	60	61	62	63	64

Sumber : Hasil Analisis Bapperida (2025)

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Fokus pembangunan pada tahapan awal RPJMD Kota Bogor 2025–2029 Tabel 3.3 merupakan tahap penguatan fondasi dalam kerangka pembangunan jangka panjang menuju Kota Sains Kreatif 2045. Pada tahapan yang pertama, pembangunan sumber daya manusia berkualitas menjadi elemen strategis, dengan fokus pada peningkatan kapasitas individu maupun institusi. Tahapan selanjutnya, arah kebijakan ditujukan pada pembentukan ekosistem tata kelola pemerintahan yang solid. Tahap ini juga menjadi momentum untuk membangun infrastruktur kebijakan dan kelembagaan yang mampu menopang transisi menuju ekonomi dan masyarakat berbasis pengetahuan. Dengan membangun kapasitas manusia dan tata kelola kelembagaan secara simultan, Kota Bogor menyiapkan pijakan yang kokoh untuk melangkah ke tahapan selanjutnya, yaitu transformasi ekonomi kreatif yang inklusif, inovasi untuk keberlanjutan, hingga konsolidasi capaian dan fondasi yang menempatkan Kota Bogor sebagai pusat sains kreatif nasional pada 2045.

Untuk lebih jelasnya mengenai pentahapan pembangunan RPJMD dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Penahapan Pembangunan RPJMD Kota Bogor 2026-2030

Tahun	2026	2027	2028	2029	2030
Tahapan	Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Menopang Daya Saing Daerah	Pengembangan Kapasitas dan Transformasi Digital Pemerintahan	Transformasi Ekonomi Kreatif Menuju Inovasi Inklusif	Inovasi untuk Keberlanjutan dan Ketahanan Perkotaan	Konsolidasi Capaian dan Fondasi Menuju Kota Sains Kreatif
Fokus Utama	Fokus pembangunan diarahkan pada akselerasi pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, mengakselerasi intervensi penanggulangan kemiskinan, menurunkan stunting dan ODF, meningkatkan prestasi olahraga, meningkatkan kualitas pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta meningkatkan prestasi olahraga pada Porprov 2026. Selain itu, perlu untuk memperkuat daya saing pariwisata, produk UMKM dan ekonomi kreatif, memperkuat pendidikan vokasi ekonomi kreatif, meningkatkan kesempatan kerja yang inklusif dan melanjutkan pengembangan sarana prasarana perekonomian.	Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi melalui integrasi pendidikan vokasional, penguatan literasi sains dan digital, serta pengembangan sistem pendidikan berbasis kebutuhan masa depan. Di sektor publik, transformasi digital dilaksanakan melalui implementasi e-government, integrasi sistem informasi daerah, serta penerapan prinsip data-driven policy making menuju tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap perubahan.	Fokus diarahkan pada penguatan struktur ekonomi daerah melalui pengembangan subsektor ekonomi kreatif yang berbasis pada inovasi dan keunggulan lokal. Pemerintah Kota memfasilitasi inkubasi bisnis kreatif, penyediaan infrastruktur pendukung (<i>creative space, co-working</i>), serta pelibatan komunitas dan pelaku usaha dalam penciptaan nilai tambah ekonomi. Kebijakan ekonomi daerah difokuskan untuk mendorong integrasi antara kreativitas, teknologi, dan identitas kultural Kota Bogor.	Fokus pembangunan mencakup pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam rangka mendukung paripurnanya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal. Hal ini mencakup pengelolaan lingkungan berbasis teknologi, efisiensi energi, serta penguatan sistem transportasi dan infrastruktur hijau. Inovasi sosial juga dikembangkan untuk memperkuat kohesi sosial dan memperluas partisipasi masyarakat dalam agenda pembangunan berkelanjutan.	Tahun terakhir RPJMD difokuskan pada proses konsolidasi hasil pembangunan dan perumusan strategi akselerasi menuju fase penguatan pada periode perencanaan berikutnya sebagai fondasi menuju kota sains kreatif. Pemerintah Kota Bogor melakukan evaluasi komprehensif atas pencapaian indikator pembangunan, memperkuat jejaring kemitraan nasional dan internasional, serta mempersiapkan model replikasi praktik baik sebagai warisan institusional. Memperkuat positioning Kota Bogor sebagai pusat sains kreatif nasional. Kota Bogor menyiapkan kerangka lanjutan untuk memasuki fase penguatan ekosistem dan ekspansi global dalam RPJMD berikutnya.

RPJMD harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Strategi dan arah kebijakan dapat membantu menerjemahkan visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih ke dalam program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Strategi dan arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Sementara itu, Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Strategi dan arah kebijakan pada RPJMD Kota Bogor 2025-2029 secara detail dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
Misi 1 : Bogor Cerdas			
Tujuan 1.1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi (Smart People)			
Sasaran 1.1.1. Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui Wajib Belajar 13 tahun			
	Peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah)	Memeratakan dan meningkatkan akses pendidikan di semua jenjang dengan memberikan subsidi biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu di SD/Mi dan SMP/MTs dan penanganan anak putus sekolah	Urusan Pendidikan dan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Kesra)
		Memperluas akses pendidikan secara merata bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan siswa dari keluarga kurang mampu, melalui kebijakan afirmatif dan dukungan fasilitas inklusif, serta mendukung program Sekolah Rakyat	Urusan Pendidikan dan Urusan Sosial
		Menguatkan Sistem Penjaminan Mutu dan Tata Kelola Pendidikan Daerah dengan memastikan setiap siswa yang lulus pendidikan formal dan non-formal (SD, SMP) mendapatkan ijazah serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.	Urusan Pendidikan
		meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sekolah swasta dalam rangka meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan	Urusan Pendidikan
		Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi Melalui Beasiswa dan Kerja Sama Akademik dengan memperluas beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu serta membangun kerja sama dengan perguruan tinggi nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas lulusan.	Urusan Pendidikan

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan inklusif pada jenjang PAUD, SD dan SMP yang berkualitas sesuai dengan standar nasional dan yang dapat mendukung pengembangan budaya inovasi dan kreativitas siswa didik	Meningkatkan kualitas pendidikan dengan membangun kemitraan strategis bersama lembaga pendidikan luar negeri, dalam rangka transfer pengetahuan, peningkatan standar akademik, dan integrasi praktik pendidikan global.	Urusan Pendidikan
		Meningkatkan kualitas dan daya tampung sarana dan prasarana pendidikan Berstandar Nasional dengan upaya menambah unit sekolah dan ruang kelas baru serta optimalisasi jumlah siswa dalam satu rombongan belajar dalam rangka meningkatkan daya tampung.	Urusan Pendidikan
		Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP yang memenuhi standar aman bencana dan ramah disabilitas	Urusan Pendidikan
		Mengembangkan Fasilitas Sekolah yang mendukung penguatan budaya inovatif dan kreatif melalui penyediaan laboratorium dan ruang inovasi/ruang kreasi untuk kegiatan siswa.	Urusan Pendidikan
		Mengembangkan infrastruktur/sarana prasarana sekolah yang mendorong integrasi teknologi dan metode pembelajaran interaktif dalam proses pengajaran	Urusan Pendidikan
		Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang kreativitas dan keterampilan lunak (<i>soft skills</i>) peserta didik melalui pengadaan laboratorium, perangkat lunak, aplikasi pembelajaran, serta ruang inovasi berbasis teknologi dan sains kreatif	Urusan Pendidikan

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
	Transformasi kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang berbasis pada penguatan literasi digital, penguatan budi pekerti/karakter dengan tetap menonjolkan unsur kebhinekaan/keberagaman, dan penguatan budaya inovatif dan kreatiivitas serta penguatan kepedulian terhadap lingkungan	yang mendorong metode pembelajaran interaktif.	
		Meningkatkan literasi dan edukasi melalui inovasi kurikulum berbasis TIK serta mengintegrasikan model pembelajaran hybrid dan digital untuk memperluas akses pendidikan.	Urusan Pendidikan
		Pengembangan Kurikulum Berbasis Sains Kreatif dan Design Thinking dengan merancang kurikulum pada muatan lokal yang menekankan kreativitas, pemecahan masalah, dan inovasi serta memastikan materi ajar sesuai dengan standar industri dan perkembangan ilmu pengetahuan global.	Urusan Pendidikan
		Pengembangan Kurikulum pada muatan lokal yang berbasis ekologi, adiwiyata, kewirausahaan, dan karakteristik budaya.	Urusan Pendidikan dan Urusan Lingkungan Hidup
		Meningkatkan kemampuan numerasi dan literasi siswa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan dan daya saing siswa didik	Urusan Pendidikan, Urusan Perpustakaan
		Meningkatkan kualitas kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang dapat mendorong peningkatan prestasi siswa didik baik prestasi akademis maupun non akademis	Urusan Pendidikan
		Mengembangkan kurikulum adaptif yang terintegrasi dengan perkembangan teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan (<i>artificial intelligence</i>), untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global di masa depan	Urusan Pendidikan

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		Menguatkan karakter, kreativitas, inovasi dan prestasi siswa untuk menguatkan daya saing siswa pada jenjang yang lebih tinggi	Urusan Pendidikan
		Menguatkan kurikulum kewirausahaan dengan menyediakan fasilitas praktik lapangan yang sistematis, guna menumbuhkan jiwa wirausaha yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi dunia kerja.	Urusan Pendidikan, Urusan Tenaga Kerja
	Peningkatan akses dan mutu pendidikan non formal	Mengembangkan kerja sama dengan lembaga/organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi lain yang dapat menjangkau masyarakat, dalam rangka pemberantasan buta aksara	Urusan Pendidikan dan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Kesra)
		Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan yang diarahkan untuk mendukung suksesnya Wajib Belajar 13 Tahun (setara SMA/SMK)	Urusan Pendidikan dan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Kesra)
		Meningkatkan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang berorientasi pada pasar kerja	Urusan Pendidikan dan Urusan Tenaga Kerja
		Meningkatkan pembinaan kursus dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat di berbagai bidang keterampilan yang berorientasi	Urusan Pendidikan
	Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik pada jenjang PAUD, SD , SMP dan sekolah non formal sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas	Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sesuai dengan standar kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan	Urusan Pendidikan
		Meningkatkan akses pada tenaga pendidik untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran digital dan inovatif.	Urusan Pendidikan dan Urusan Komunikasi dan Informatika

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		menguatkan kompetensi pendidik khususnya lembaga pendidikan swasta yang adaptif dan modern dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran digital dan inovatif.	Urusan Pendidikan dan Urusan Komunikasi dan Informatika
		Mengembangkan sistem dan mekanisme rekrutmen dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata secara geografis, tepat jumlah, tepat kualifikasi/keahlian, dan gender dalam rangka pemerataan mutu pendidikan dasar 9 tahun.	Urusan Pendidikan
		Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik terutama kesejahteraan guru honorer	Urusan Pendidikan
	Peningkatan minat baca dan literasi digital bagi seluruh warga masyarakat khususnya generasi muda untuk mendorong kreatifitas dan inovasi generasi muda melalui peningkatan kualitas perpustakaan tingkat kota dan wilayah	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Perpustakaan ber standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Urusan Perpustakaan
		Menyediakan perpustakaan/ taman bacaan/ pojok baca secara lebih merata di setiap wilayah dan di ruang ruang publik	Urusan Perpustakaan
		Meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan perpustakaan baik di tingkat Kota, taman bacaan di wilayah maupun perpustakaan di sekolah.	Urusan Perpustakaan dan Urusan Pendidikan
		Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam peningkatan literasi masyarakat dengan memperluas akses terhadap perpustakaan, meningkatkan koleksi buku, serta mendorong program literasi berbasis komunitas.	Urusan Perpustakaan
	Sasaran 1.1.2. Meningkatkan pemajuan kebudayaan bangsa		
	Peningkatan peran pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat untuk	Meningkatkan penyelenggaraan pengembangan kebudayaan melalui festival budaya, pertunjukan seni, dan program edukasi	Urusan Kebudayaan

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
	menjaga dan melestarikan cagar budaya dan warisan budaya tak benda	berbasis kearifan lokal berskala internasional guna memperluas jangkauan, daya saing, dan pengakuan budaya lokal di kancah global	
		Meningkatkan jumlah pelaku dan lembaga kesenian tradisional dalam pelestarian seni dan budaya dengan memberikan pelatihan, fasilitasi akses panggung, dukungan finansial dan sertifikasi bagi seniman tradisional.	Urusan Kebudayaan
		Meningkatkan pembinaan sejarah melalui edukasi sejarah bagi masyarakat, peningkatan dokumentasi sejarah lokal, serta penguatan kurikulum sejarah di lembaga pendidikan.	Urusan Kebudayaan, Urusan Pendidikan
		Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan revitalisasi situs bersejarah, perlindungan dari ancaman kerusakan, serta promosi nilai budaya kepada masyarakat luas.	Urusan Kebudayaan
		Melestarikan warisan budaya tak benda melalui penetapan WBTB Kota Bogor dan promosi pelestarian WBTB kepada masyarakat luas	Urusan Kebudayaan
		Aktualisasi nilai-nilai budaya bangsa pada generasi muda	Urusan Kebudayaan, Urusan Pendidikan
		Mendorong pengembangan museum sebagai pusat pengetahuan dan sejarah peradaban di Kota Bogor	Urusan Kebudayaan
		Peningkatan kunjungan ke museum melalui modernisasi museum, peningkatan koleksi dan daya tarik wisata edukatif, serta program edukasi berbasis pengalaman bagi pengunjung.	Urusan Kebudayaan

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
Sasaran 1.1.3. Meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan Keluarga sebagai pilar utama penggerak pembangunan SDM Unggul			
	Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga melalui penguatan legalitas struktur, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya dalam keluarga	Meningkatkan layanan administrasi kependudukan yang menjamin seluruh warga masyarakat terlayani administrasi legalitas perkawinan dan legalitas kelahirannya	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
		Memastikan adanya kemitraan gender dalam kehidupan berkeluarga	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		Menjamin kecukupan pangan dalam setiap keluarga	Urusan Pangan, Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		Memastikan kecukupan gizi seluruh anggota keluarga mulai bayi, balita, remaja, ibu, dan lansia	Urusan Kesehatan, Urusan Pangan
		Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga	Urusan Kesehatan
		Meningkatkan kualitas rumah tinggal dan lingkungannya yang layak huni bagi keluarga	Urusan Perumahan dan Permukiman, Urusan Penanaman Modal, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatkan pendapatan per kapita keluarga melalui Pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar terjadi peningkatan pendapatan keluarga	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi pembiayaan pendidikan anak sampai ke jenjang wajib belajar menuju 12 tahun	Urusan Pendidikan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
			Bidang Sekretariat Daerah (Kesra)
		Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh jaminan kesehatan masyarakat berbasis keluarga	Urusan Kesehatan
		Mengembangkan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitas yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera	Urusan Sosial
		Pengembangan program/kegiatan dalam upaya mengurangi kemiskinan bagi keluarga pra sejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga	Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatkan partisipasi seluruh anggota keluarga dalam pembangunan daerah	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan perlindungan keluarga agar tidak terpapar promosi dan perilaku sosial dan seksual menyimpang	Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		Meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan keluarga melalui penyuluhan keluarga, program parenting berbasis riset, serta layanan konseling bagi keluarga yang menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi.	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kesehatan
		Pengendalian jumlah penduduk dengan mengoptimalkan program Keluarga Berencana (KB), edukasi kesehatan reproduksi, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang mendukung keseimbangan pertumbuhan penduduk.	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

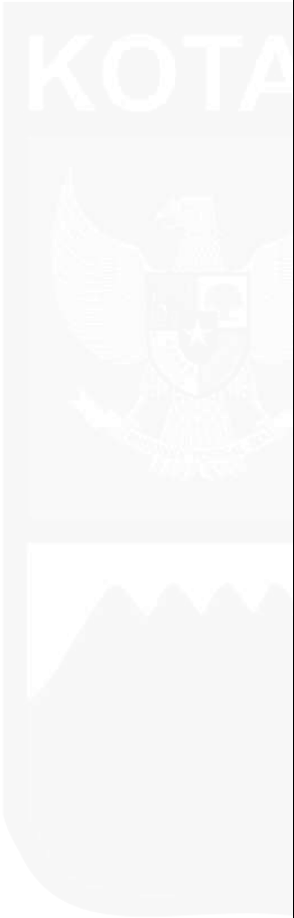
Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		Peningkatan kualitas keluarga melalui program edukasi keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta penguatan ketahanan keluarga berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai sosial.	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		Meningkatkan penyuluhan dan pengawasan terpadu terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, praktik perjudian daring (judi online), dan penyalahgunaan pinjaman daring (pinjol) guna melindungi masyarakat dari ancaman sosial dan ekonomi.	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Memberdayakan dan menguatkan peran perempuan dalam setiap kegiatan pembangunan (penguatan/pengarusutamaan gender)	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan terhadap setiap bentuk kekerasan baik fisik maupun mental	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan kualitas Tumbuh Kembang Anak	Pemenuhan hak anak dengan memastikan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lingkungan yang aman, serta program perlindungan sosial untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatkan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual, perundungan (bullying), serta kenakalan remaja seperti tawuran, dilakukan melalui penguatan regulasi, penyediaan layanan rehabilitasi bagi korban, dan pelaksanaan kampanye pencegahan kekerasan yang berbasis komunitas secara berkelanjutan.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
Sasaran 1.1.4. Meningkatkan kualitas dan daya saing generasi muda			
	Peningkatan kualitas dan prestasi pemuda	Memperkuat karakter generasi muda dengan pembekalan pendidikan agama dan budi pekerti.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan dengan memperluas akses beasiswa, pelatihan vokasi, dan program magang di sektor industri kreatif dan teknologi.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Pendidikan, Urusan Tenaga Kerja
		Menguatkan kepemimpinan dan karakter pemuda melalui program mentorship, pelatihan kepemimpinan, serta fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan untuk membentuk pemimpin muda yang berintegritas dan inovatif.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatkan prestasi pemuda dalam bidang olahraga, seni, dan sains dengan menyediakan pembinaan dan pelatihan intensif, dukungan fasilitas, serta kompetisi berjenjang dari tingkat lokal hingga internasional.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga,
		Mengembangkan ekosistem inovasi dan kewirausahaan pemuda melalui inkubasi bisnis, startup hub, serta akses pendanaan bagi pemuda berbakat di bidang teknologi, ekonomi kreatif, dan bisnis berkelanjutan.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Penanaman Modal
		Merevitalisasi GOR Pajajaran menjadi pusat olahraga dan gedung kreatif terpadu untuk mendukung pengembangan bakat pemuda dalam bidang olahraga, seni, dan budaya dengan fasilitas yang modern dan kompetitif.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Membangun dan mengembangkan sarana prasarana olahraga yang representatif dan memenuhi standar untuk mendukung	Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		pelaksanaan event-event olah raga tingkat regional jawa barat, nasional maupun internasional	
		Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah dan nasional dengan memperluas keterlibatan pemuda dalam perumusan kebijakan, program pembangunan berkelanjutan, serta partisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi bagi pemuda dengan membangun platform digital untuk pengembangan keterampilan, kolaborasi kreatif, dan jejaring global dalam bidang akademik, bisnis, serta inovasi sosial.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tujuan 1.2. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif (Smart Government)			
Sasaran 1.2.1. Terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik			
	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju <i>smart government</i> dengan memperkuat sistem digitalisasi layanan, memperluas akses <i>e-government</i> , serta membangun sistem terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.	Urusan Komunikasi dan Informatika
		Mengakselerasi digitalisasi layanan publik dan penguatan pemerintahan digital melalui audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), optimalisasi platform layanan terpadu, serta peningkatan responsivitas terhadap laporan masyarakat.	Urusan Komunikasi dan Informatika
		Penguatan infrastruktur dan literasi digital untuk mendukung transformasi digital di	Urusan Komunikasi dan Informatika

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		berbagai sektor prioritas dengan membangun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang merata, meningkatkan pemanfaatan teknologi di sektor strategis, serta memperluas edukasi digital bagi masyarakat.	
		Pengembangan <i>smart city</i> yang inklusif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan <i>Internet of Things (IoT)</i> , menerapkan konsep ekonomi sirkular, memperluas jaringan internet di area blankspot, serta membangun command center, CCTV di lokasi strategis, dan Wi-Fi gratis di fasilitas publik untuk meningkatkan keamanan dan aksesibilitas layanan masyarakat.	Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perhubungan
		Mengembangkan layanan publik digital terintegrasi serta menyederhanakan regulasi dan perizinan untuk mempercepat layanan dan mendukung kemudahan berusaha.	Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Penanaman Modal
	Peningkatan Kualitas Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi	Optimalisasi sistem keamanan digital dalam pemerintahan berbasis elektronik melalui enkripsi data, penguatan firewall, serta penerapan teknologi blockchain	Urusan Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan penerapan keamanan informasi di pemerintah kota dengan memperkuat sistem proteksi data, implementasi standar keamanan siber, serta membangun pusat keamanan informasi	Urusan Persandian
		Penguatan regulasi dan kebijakan tata kelola keamanan informasi	Urusan Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik	Urusan Komunikasi dan Informatika

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
	Peningkatan kualitas penyelenggaraan data statistik sektoral	Peningkatan pengelolaan satu data Indonesia dan statistik sektoral	Urusan Statistik
Sasaran 1.2.2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan			
	Peningkatan kualitas perencanaan dan pemanfaatan produk hukum daerah serta kualitas layanan bantuan hukum	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan produk hukum daerah melalui penyusunan, pengawasan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan agar adil, memiliki kepastian, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan daerah	Unsur Pendukung Urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah (Bag. Hukum dan HAM)
		Meningkatkan partisipasi publik dalam perumusan setiap kebijakan pemerintah daerah melalui pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya pada proses konsultasi dan dialog publik dalam rangka perumusan kebijakan/produk hukum daerah.	Unsur Pendukung Urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah (Bag. Hukum dan HAM)
		Meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum khususnya untuk masyarakat tidak mampu	Unsur Pendukung Urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah (Bag. Hukum dan HAM)
	Peningkatan Pemanfaatan hasil litbang jirap, serta invensi dan inovasi sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan daerah	Meletakkan fondasi penataan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman	Unsur Pendukung Urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah (Bag. Hukum dan HAM)
		Penyusunan roadmap sains kreatif	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan, Urusan

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
			Pendidikan, Urusan Koperasi dan UMKM, Urusan Pariwisata
		Pembentukan design council dan forum sains kreatif	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pemerintah daerah	Unsur Pendukung Urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah (Bag. Hukum dan HAM)
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penelitian terapan melalui modernisasi laboratorium, penyediaan fasilitas riset yang memadai, serta penguatan infrastruktur teknologi untuk menunjang inovasi ekonomi berbasis sains.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan,
		Meningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM peneliti dengan mendorong peningkatan kapasitas akademik, memberikan insentif bagi peneliti dan inovator, serta memperkuat ekosistem riset berbasis kolaborasi lintas sektor.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan,
		Mengembangkan platform diseminasi produk penelitian dan inovasi terapan melalui digitalisasi hasil riset, peningkatan akses bagi industri dan UMKM terhadap inovasi teknologi, serta membangun ekosistem transfer teknologi yang lebih inklusif.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan, Urusan Koperasi dan UKM
		Menginisiasi terbangunnya "Innovation Valley Kota Bogor" dan menguatkan kolaborasi dalam	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		ekosistem sains kreatif dengan menjadikan Kota Bogor sebagai University Town yang mendorong sinergi antara lembaga penelitian, universitas, komunitas sains kreatif, serta sektor industri guna mempercepat penerapan hasil riset dalam dunia usaha.	Bidang Penelitian dan Pengembangan, Urusan Perindustrian, Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Pariwisata
Sasaran 1.2.3. Terwujudnya ASN yang memiliki integritas tinggi, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif			
	Peningkatan kualitas tata kelola/manajemen ASN berbasis merit system	Mendorong implementasi Kebijakan terkait sistem merit secara jelas, terukur, dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendidikan pelatihan
		Menguatkan Sistem informasi kepegawaian dalam rangka mendukung penerapan sistem merit, termasuk penyediaan database kepegawaian yang akurat dan mudah diakses secara digital .	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendidikan pelatihan
		Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Aparatur	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendidikan pelatihan
		Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan sistem merit secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
	Pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada setiap unit kerja pelayanan publik		dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendidikan pelatihan
		Membangun komitmen dan keterlibatan secara aktif pimpinan dan seluruh aparatur sipil negara dalam pelaksanaan ZI, melalui perubahan mekanisme kerja, pola pikir (mindset), dan budaya kerja	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
		Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat penerima layanan	Unsur Pendukung Urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
		Mengembangkan program dan kebijakan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan unit kerja	Unsur Pendukung Urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah (Bag.Organisasi)
		Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan untuk menilai efektivitas program dan kebijakan yang telah diterapkan serta menyelesaikan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat	Unsur Pendukung Urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah (Bag. Administrasi Pembangunan)
Sasaran 1.2.4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
	Peningkatan budaya inovasi dan pola pikir kreatif (<i>creative thinking</i>) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	Menciptakan lingkungan yang mendukung bertumbuhnya inovasi baik di lingkungan Pemerintah maupun di lingkungan masyarakat	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendidikan pelatihan, Unsur Pendukung Urusan

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
			pemerintahan bidang Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi), Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan,
		Mendorong iklim kepemimpinan yang visioner dan mendukung bertumbuhnya gagasan ide kreatifitas dan inovasi dari seluruh ASN selaku pelayan publik	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendidikan pelatihan, Unsur Pendukung Urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi), Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan,
		Membangun kolaborasi, sinergi dan kerjasama pemerintah, sektor swasta, akademisi dan media serta masyarakat untuk percepatan implementasi inovasi yang berkelanjutan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendidikan pelatihan, Unsur Pendukung Urusan pemerintahan bidang Sekretariat Daerah (Bag.

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
			Organisasi), Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan,
	Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD	Optimalisasi Peran Sekretariat DPRD dalam Fasilitas Komunikasi Politik dan Hubungan Kelembagaan, Penguatan Kemitraan antara DPRD, Eksekutif, dan Masyarakat Sipil	Unsur Pendukung Urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD
	Peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat/penerima layanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan melalui Pelayanan jemput bola administrasi kependudukan, Pelayanan jemput bola perizinan, Penguatan sarana prasarana pelayanan publik	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
		Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai.	Seluruh Urusan
		Mengembangkan layanan publik digital terintegrasi serta menyederhanakan regulasi dan perizinan untuk mempercepat layanan dan mendukung kemudahan berusaha.	Urusan Penanaman Modal
	Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah daerah	Seluruh Urusan
	Meningkatkan kinerja pelayanan publik di wilayah Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan Kantor Kecamatan, Kelurahan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik.	Unsur Kewilayahan

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
Sasaran 1.2.5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta menguatnya sistem pengendalian internal pemerintah			
	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
		Meningkatkan keterpaduan perencanaan lingkup bidang Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
		Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring evaluasi dan pengendalian pencapaian kinerja seluruh sektor pembangunan daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
		Memastikan sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
		Meningkatkan kinerja pencapaian pembangunan daerah lintas sektor di Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, infrastruktur dan kewilayahan serta perekonomian dan SDA	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
	Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Melaksanakan penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Adaptif dan Responsif, Reformasi Birokrasi Berbasis Digital dan Inovasi Pelayanan Publik, Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan kerjasama daerah	Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan kerjasama daerah	Mengoptimalkan pencapaian pelaksanaan program dan SPM di setiap urusan pemerintahan	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan)
	Meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berkualitas	Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi pengadaan barang dan jasa dan penguatan SDM dan kelembagaan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag. PBJ)
	Terwujudnya Percepatan pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag. Adbang)
	Meningkatkan kualitas pengelolaan Arsip Daerah	Mengoptimalkan Pengelolaan Arsip Daerah dan Arsip Perangkat Daerah	Urusan Kearsipan
		Meningkatkan kualitas penyelamatan dan pelestarian arsip	Urusan Kearsipan
		Peningkatan kualitas pemanfaatan Arsip	Urusan Kearsipan
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada peningkatan prestasi kerja pemerintah melalui penerapan transparansi anggaran, penguatan sistem akuntabilitas keuangan daerah, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan


Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		Peningkatan penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah dengan pendekatan digitalisasi manajemen aset, inventarisasi dan legalisasi aset strategis, serta optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan efisiensi dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
	Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melalui peningkatan literasi kebijakan publik, keterlibatan dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif, serta penguatan mekanisme kontrol sosial terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kematangan SPIP Perangkat Daerah	Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Integrasi dan Sinergi Pengawasan Intern dengan Manajemen Risiko.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Misi 2 : Bogor Sehat			
Tujuan 2.1. Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, nyaman, efisien dan layak huni (Smart Living)			
Sasaran 2.1.1. Meningkatnya kualitas hunian masyarakat			
	Meningkatkan Rumah Layak Huni	Pengurangan jumlah rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh melalui program rehabilitasi permukiman, peningkatan akses sanitasi, penyediaan infrastruktur permukiman, serta pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas hunian.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Penanaman Modal
		Optimalisasi pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dengan penyediaan skema bantuan hunian berbasis kebutuhan korban, percepatan rehabilitasi pascabencana, serta penguatan	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

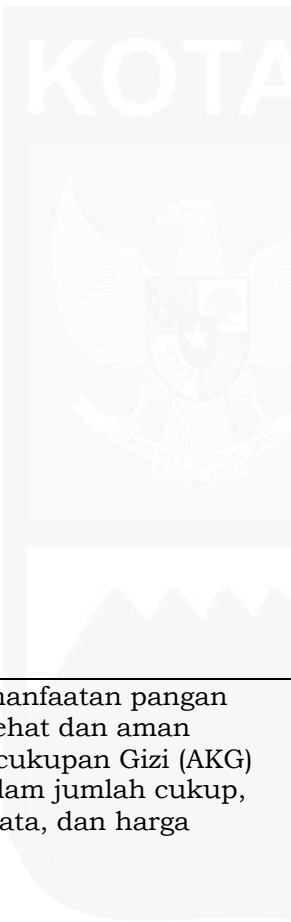
Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
	Berkurangnya luasan kawasan kumuh kewenangan Kota	sistem mitigasi dan kesiapsiagaan permukiman terhadap risiko bencana.	serta Perlindungan Masyarakat
		Meningkatkan ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) guna mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memastikan penyediaan infrastruktur dasar, optimalisasi tata ruang, serta pemenuhan aksesibilitas bagi masyarakat.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Penanaman Modal
		Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni dan berkurangnya luas kawasan kumuh dengan program rehabilitasi rumah bagi warga berpenghasilan rendah, percepatan program Kota Tanpa Kumuh serta penataan kawasan padat penduduk dengan pendekatan berbasis partisipasi dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 2.1.2. Meningkatkan Akses masyarakat terhadap layanan Utilitas Dasar			
	Peningkatan pemenuhan akses air minum aman	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bogor melalui peningkatan kapasitas produksi dan distribusi air bersih oleh PDAM Tirta Pakuan, perluasan jaringan perpipaan, optimalisasi sumber air baku, serta penerapan teknologi pengolahan air ramah lingkungan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Menyediakan alternatif sumber air minum yang aman bagi masyarakat di kawasan yang tidak terjangkau oleh pelayanan air minum perpipaan;	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan cakupan layanan air limbah yang aman dan berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dengan memperluas jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dan Instalasi Pengelolaan Lumpur	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		Tinja (IPLT) serta memperkuat sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALDT) dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALDS)	
		Mengembangkan kebijakan pengelolaan air limbah berbasis kawasan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		meningkatkan efektivitas regulasi dan kelembagaan layanan air limbah	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan terhadap pembuangan limbah rumah tangga dan industri kecil di Kota Bogor.	Urusan Lingkungan Hidup
		Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Lingkungan Hidup
	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air di Kota Bogor dengan konservasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, Cisadane, dan sungai-sungai lainnya	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Melaksanakan penguatan sistem peringatan dini terhadap risiko banjir dan krisis air	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatkan kolaborasi antar-institusi dalam pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan air di Kota Bogor.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Melaksanakan Konservasi sumberdaya air secara berkelanjutan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Lingkungan Hidup

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dan konservasi SDA	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Lingkungan Hidup
		Menjalin Kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Bogor, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan DAS dan konservasi sumberdaya air	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Lingkungan Hidup
		Sasaran 2.1.3. Menurunnya resiko bencana di seluruh wilayah	
	Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana	Optimalisasi upaya pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas mitigasi bencana berbasis komunitas di daerah rawan longsor dan banjir, membangun infrastruktur tahan bencana, serta memperkuat sistem peringatan dini untuk bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Kota Bogor.	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Meningkatkan respons time penanganan kebakaran serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Optimalisasi pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran serta non-kebakaran melalui peningkatan kapasitas dan jumlah pos pemadam kebakaran di kecamatan yang memiliki permukiman padat seperti Bogor Tengah dan Bogor Utara, modernisasi armada dan peralatan pemadam kebakaran, serta penguatan edukasi masyarakat terkait pencegahan kebakaran dan respons cepat terhadap keadaan darurat.	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
Tujuan 2.2. Terwujudnya layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas (Smart Health)			
Sasaran 2.2.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			
	Peningkatan pembudayaan Olah raga dan peningkatan kapasitas serta daya saing olahraga	Meningkatkan fasilitas olahraga yang sesuai standar, aman, dan inklusif yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan terjangkau	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dengan rutin mengagendakan event event olahraga sebagai sarana pembudayaan olahraga masyarakat dan menunjang promosi pariwisata dan ekonomi lokal.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Pariwisata
	Peningkatan kualitas kesehatan keluarga	Memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan baik secara kuantitas maupun kualitas di puskesmas dan fasyankes lainnya serta di posyandu untuk memberikan layanan kesehatan Unggul	Urusan Kesehatan
		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana kefarmasian, alat kesehatan dan produk makanan minuman yang memenuhi standar kesehatan	Urusan Kesehatan
		Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat melalui pencapaian Universal Health coverage (UHC)	Urusan Kesehatan
		Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan pada fasilitas Kesehatan dasar dan rujukan;	Urusan Kesehatan
		Meningkatkan upaya pencegahan, deteksi dini dan pengendalian penyakit tidak menular antara lain melalui skrining dan cek kesehatan gratis	Urusan Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya TBC, HIV Aids dan Malaria	Urusan Kesehatan
		Meningkatkan kualitas layanan pendampingan dan konsultasi yang fokus pada kesehatan mental	Urusan Kesehatan
		Memastikan standarisasi kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Urusan Kesehatan
		Meningkatkan ketersediaan sumberdaya kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumber daya manusia (SDM) kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai dengan standar;	Urusan Kesehatan
		Meningkatkan kualitas pelayanan kegawatdaruratan dengan melengkapi sarana prasarana penunjang kesiapsiagaan di puskesmas kecamatan yang terhubung dengan kesiapsiagaan bencana	Urusan Kesehatan
		Menguatkan Kolaborasi pembiayaan kesehatan masyarakat dan kerjasama pelayanan kesehatan	Urusan Kesehatan
		Menyediakan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dan menguatkan pelayanan telemedicine;	Urusan Kesehatan
		Meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat melalui kegiatan pendampingan dan pemicuan serta promosi kesehatan dan penyehatan lingkungan	Urusan Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		Mendorong tumbuh kembangnya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan peningkatan upaya penyehatan lingkungan	Urusan Kesehatan
		Mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menggiatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui program kemitraan dan advokasi kesehatan masyarakat	Urusan Kesehatan
		Meningkatkan sinergi, kolaborasi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif	Urusan Kesehatan
		mengedukasi dan memantau kualitas konsumsi pangan dan Gizi Ibu Hamil, Bayi dan Balita dalam rangka mencegah dan mempercepat penurunan angka stunting	Urusan Kesehatan
		Melaksanakan upaya upaya penuntasan stunting, dan kelebihan gizi melalui peningkatan pola konsumsi pangan yang beragam, pengayaan zat gizi, dan jaminan gizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan	Urusan Kesehatan
	Peningkatan pemanfaatan pangan yang beragam, sehat dan aman sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) serta tersedia dalam jumlah cukup, terdistribusi merata, dan harga terjangkau	Meningkatkan Kualitas pangan masyarakat sesuai dengan standar kebutuhan energi, protein dan zat gizi lainnya salah satunya melalui dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).	Urusan Pangan, Urusan Kesehatan
		Meningkatkan kualitas pangan segar asal tumbuhan dan asal hewan	Urusan Pangan
		Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan maupun lahan tidur untuk digunakan sebagai urban farming dengan tanaman cepat panen/hidroponik, organik, yang dipadukan	Urusan Pangan

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		dengan kegiatan peternakan/perikanan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi dan protein (pangan keluarga)	
		Meningkatkan kualitas pasar tradisional menjadi Pasar ASUH Bogor (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) yang menjual produk lokal, organik, dan bebas bahan pengawet, serta memperkuat UMKM pangan dengan sertifikasi BPOM dan PIRT	Urusan Pangan, Urusan Kesehatan, Urusan Koperasi dan UKM
		Memberikan informasi dan pengetahuan untuk memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal.	Urusan Pangan, Urusan Kesehatan
		Menetapkan standar keamanan, regulasi ketat, dan pengawasan intensif di seluruh rantai pasok dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan segar	Urusan Pangan, Urusan Kesehatan
	Peningkatan akses pangan masyarakat	Menyediakan cadangan pangan daerah sesuai dengan kebutuhan	Urusan Pangan
		Mendorong masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada beras, tetapi juga mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, sagu, dan umbi-umbian (diversifikasi pangan)	Urusan Pangan
		Menjaga keterjangkauan pangan masyarakat dan mengantisipasi kebutuhan cadangan pangan untuk kondisi darurat bencana	Urusan Pangan
	Peningkatan kesehatan reproduksi pasangan usia subur	meningkatkan kesertaan ber-KB terutama kesertaan KB-MKJP pada pasangan usia subur	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		memberikan edukasi dan advokasi untuk kelompok remaja putri tentang kesehatan	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		reproduksi dan untuk mencegah kelahiran pada usia remaja	
Tujuan 2.3. terwujudnya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan (Smart Environment)			
Sasaran 2.3.1. Menurunnya emisi gas rumah kaca			
	Peningkatan Reduksi Sampah di sumber	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui optimalisasi program bank sampah, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R), bank sampah di setiap kecamatan, pengembangan ekonomi sirkular dari sampah serta penguatan peran masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.	Urusan Lingkungan Hidup
	Peningkatan Kualitas Pengolahan Sampah	Penyediaan fasilitas dan armada angkutan sampah yang layak dan memadai dengan penambahan unit truk sampah, peningkatan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga dengan pendekatan sanitary landfill, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di TPPASR Lulut Nambo sesuai dengan kesepakatan kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat, pengembangan teknologi pengolahan sampah modern seperti RDF (Refuse-Derived Fuel), pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) untuk mengurangi ketergantungan pada lahan pembuangan sampah.	Urusan Lingkungan Hidup
		Menetapkan kawasan-kawasan prioritas (RT/RW, kelurahan, kawasan komersial, perumahan, dan perkantoran) sebagai lokasi pilot project pengelolaan sampah berbasis kawasan	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Kewilayahan

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
	Penguatan kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah berbasis kawasan	Meningkatkan kapasitas aparat pengawas lapangan (SatpolPP, DLH, lurah/camat) dalam melakukan pembinaan dan penindakan	Urusan Lingkungan, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Kewilayahan
		Mengembangkan sistem peringatan (teguran tertulis) secara bertahap untuk pelanggaran, sebelum pemberian sanksi denda atau pembekuan izin	Urusan Lingkungan, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Kewilayahan
		Mendorong penerapan insentif-disinsentif: penghargaan bagi kawasan patuh dan sanksi bagi kawasan lalai.	Urusan Lingkungan, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Kewilayahan
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan komunitas dalam 3R	Menguatkan Kapasitas dan Kelembagaan Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Urusan Lingkungan Hidup
		Mendorong pelaksanaan program Edukasi Lingkungan Berbasis RW secara berkelanjutan	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Kewilayahan
		Penerapan Insentif, Penghargaan, dan Kolaborasi	Urusan Lingkungan Hidup
	Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Pengembangan transportasi berkelanjutan dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca dan meminimalisir potensi sumber pencemar udara	Urusan Perhubungan
		Perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan ekspos perubahan iklim dan risiko bencana dengan penerapan konsep kota	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		hijau (green city), penataan kawasan sempadan sungai dan daerah rawan bencana seperti Bogor Selatan dan Bogor Barat, serta integrasi strategi mitigasi perubahan iklim dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor.	
		Mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perhubungan
	Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang	Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang yang berkualitas, ramah keluarga dan ramah disabilitas	Urusan Lingkungan Hidup
		Pengelolaan area pemakaman umum yang berorientasi pada Tempat Pemakaman Umum Hijau	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sasaran 2.3.2. Meningkatkan kualitas air, udara dan lahan		
	Terkendalinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Urusan Lingkungan Hidup
		Meningkatkan responsivitas penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup
		Peningkatan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada setiap kegiatan/usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air, udara dan tanah	Urusan Lingkungan Hidup
		melaksanakan penegakan sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari lingkungan	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Kewilayahan

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		Meningkatkan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Urusan Lingkungan Hidup
		Peningkatan Pemahaman Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga/ Kegiatan/ Usaha Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga yang melakukan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup
		Peningkatan kualitas kebijakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup	Urusan Lingkungan Hidup
		menjalin Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran lingkungan	Urusan Lingkungan Hidup
		Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Kota Bogor	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang	Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang yang berkualitas, ramah keluarga dan ramah disabilitas	Urusan Lingkungan Hidup
	Meningkatkan konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung	Pengelolaan area pemakaman umum yang berorientasi pada Tempat Pemakaman Umum Hijau	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Peningkatan kualitas pengelolaan Ruang terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung	Urusan Lingkungan Hidup
		Pelestarian dan konservasi kawasan lindung yang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana serta kawasan yang ditetapkan	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan amanat rencana tata ruang wilayah.	
Misi 3 : Bogor Sejahtera			
Tujuan 3.1. Terwujudnya ekosistem perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah (Smart Economy)			
Sasaran 3.1.1. Terciptanya akselerasi penanggulangan kemiskinan & peningkatan kesejahteraan Sosial			
	Meningkatkan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Penguatan Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang Berbasis Data dan Evidence-Based Policy	Urusan Sosial, Urusan Statistik
		Memastikan adanya keterpaduan dan ketepatan sasaran seluruh intervensi program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan lintas sektor dengan pemanfaatan basis data terpadu	Urusan Sosial, Urusan Statistik
		Meningkatkan kerjasama, kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan secara pentahelix dalam mempercepat penurunan tingkat kemiskinan kota Bogor	Urusan Sosial
	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Memastikan pemberian jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, bantuan biaya pendidikan, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan subsidi transportasi, bantuan pangan dan bantuan sosial lainnya secara tepat sasaran untuk masyarakat miskin sebagaimana telah terdata pada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai ketentuan perundangan	Urusan Kesehatan, Urusan Pendidikan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag. Kesra), Urusan Sosial, Urusan Pangan
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi masyarakat pemerlu Kesejahteraan Sosial	Urusan Sosial

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		Memberikan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat pemerlu kesejahteraan sosial dan masyarakat korban bencana	Urusan Sosial
	Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin	Memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat miskin, seperti melalui program padat karya atau pelatihan kewirausahaan.	Urusan Tenaga Kerja, Urusan Koperasi dan UKM
		Memfasilitasi akses terhadap modal melalui lembaga keuangan mikro	Urusan Koperasi dan UKM
		Mengembangkan dan memberdayakan Usaha ultra mikro dan usaha Mikro serta industri rumah tangga dengan memberikan dukungan dalam hal perizinan, standardisasi produk, dan pemanfaatan infrastruktur perekonomian	Urusan Koperasi dan UKM
		Melaksanakan pemberdayaan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan jejaring kemitraan lembaga sosial masyarakat	Urusan Sosial
		Mengembangkan komoditas unggulan yang sesuai dengan karakteristik wilayah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut	Urusan Koperasi dan UKM
	Mengurangi kantong kantong kemiskinan	Pembangunan dan perbaikan infrastruktur di wilayah pemukiman warga, termasuk sanitasi dan akses air bersih.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		melaksanakan penataan kawasan permukiman kumuh dalam rangka menciptakan lingkungan	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Lingkungan

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		yang sehat dan aman bagi masyarakat di kawasan kumuh	Hidup, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		melaksanakan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui Program bedah rumah atau pembangunan rumah baru bagi keluarga miskin dan melalui program bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatkan pemerataan akses infrastruktur dan sarana prasarana utilitas dasar pendidikan dan kesehatan yang terjangkau untuk warga masyarakat miskin	Urusan Kesehatan, Urusan Pendidikan
		Sasaran 3.1.2. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan	
	Peningkatan Kualitas Kebijakan di sektor pembangunan ekonomi	Merumuskan kebijakan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis data dan informasi, termasuk peningkatan inklusifitas keuangan.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)
		Peningkatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap implementasi kebijakan sektor UMKM	Urusan Koperasi dan UKM
	Mempercepat pengembangan potensi ekonomi lokal	Peningkatan produktivitas di berbagai sektor perekonomian melalui investasi di bidang teknologi, inovasi, dan infrastruktur dengan mendorong penerapan teknologi dalam sektor industri, pertanian, dan jasa, serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital dan smart economy.	Urusan Penanaman Modal, Urusan Komunikasi dan Informatika
	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Membangun dan mengembangkan Kerjasama hubungan industrial dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja	Urusan Tenaga Kerja

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		Memperkuat program magang serta program pelatihan dan kejuruan bagi pemuda dan atau kelompok masyarakat usia produktif yang mempunyai keterampilan rendah	Urusan Tenaga Kerja
		Meningkatkan kompetensi Para Pencari Kerja melalui pelatihan kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja	Urusan Tenaga Kerja
		Mendorong pelaksanaan program padat karya yang disinergikan dengan kebutuhan tenaga kerja untuk pelaksanaan program program pembangunan daerah	Urusan Tenaga Kerja
		menguatkan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pelibatan tenaga kerja lokal kota Bogor dalam setiap kegiatan usaha maupun project project pembangunan infrastruktur di kota Bogor	Urusan Tenaga Kerja
		Memastikan adanya jaminan perlindungan tenaga kerja melalui penguatan monitoring dan evaluasi ketenagakerjaan serta jaminan sosial ketenagakerjaan (universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan)	Urusan Tenaga Kerja
		Mengembangkan kerjasama inkubator bisnis	Urusan Penanaman Modal, Urusan Perindustrian
	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Tenaga Kerja
		Meningkatkan Kualitas Kebijakan dan kualitas layanan penyelesaian kasus di Sektor Ketenagakerjaan	Urusan Tenaga Kerja
		Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berorientasi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja	Urusan Tenaga Kerja

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif	Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan sebagai pusat ekonomi lokal berbasis wisata kuliner dengan melibatkan komunitas setempat serta mendukung produk khas daerah.	Urusan Koperasi dan UKM
		Menggali kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya sehingga berdaya guna dan bernilai ekonomis	Urusan Koperasi dan UKM
		Mengembangkan dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya tarik wisata berbasis budaya lokal, dengan menata infrastruktur, meningkatkan branding wisata, serta menjadikannya sebagai ruang kreatif bagi masyarakat untuk menampilkan seni dan budaya.	Urusan Pariwisata, Urusan Kebudayaan, Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Penguatan basis ekonomi kreatif yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreatifitas	Urusan Pariwisata, Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Penanaman Modal
		Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam akses permodalan dan pemasaran melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) di setiap kelurahan, regulasi yang mendorong ASN membeli produk UMKM, serta kemitraan dengan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar.	Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Komunikasi dan Informatika
		Meningkatkan kualitas SDM pelaku ekonomi kreatif, terutama dalam hal membangun dan mengembangkan ide, kreatifitas, inovasi, dan penguasaan teknologi.	Urusan Koperasi dan UMKM
		Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk mendorong pelaku usaha baru naik kelas	Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
Optimalisasi Potensi Koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah		dengan menyediakan pelatihan, mentoring bisnis, serta akses ke jaringan investor dan pasar global.	
		Penyediaan portal akses promosi dan pemasaran bagi UMKM dan industri kreatif dengan membangun platform digital yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen serta meningkatkan literasi digital bagi UMKM agar mampu bersaing di era e-commerce.	Urusan Koperasi dan UMKM, Urusan Pariwisata
		Revitalisasi GOR Pajajaran menjadi pusat olahraga dan gedung kreatif serta seni budaya dengan konsep multi-fungsi, termasuk ruang pameran seni, coworking space bagi pelaku industri kreatif, serta fasilitas olahraga yang lebih modern dan inklusif.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Peningkatan kualitas usaha dan pendapatan UMKM	Urusan Koperasi dan UMKM
		Peningkatan pemberdayaan usaha mikro dan usaha ultra mikro	Urusan Koperasi dan UMKM
		Peningkatan pelayanan Izin Usaha simpan pinjam	Urusan Koperasi dan UMKM
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Urusan Koperasi dan UMKM
		Peningkatan kualitas pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Urusan Koperasi dan UMKM
		Peningkatan penilaian kesehatan Koperasi	Urusan Koperasi dan UMKM
		Meningkatkan daya saing koperasi, UMKM, IKM dan pelaku ekraf melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan dan fasilitasi	Urusan Koperasi dan UMKM

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		permodalan/ pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi)	
		Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi melalui pembentukan koperasi merah putih.	Urusan Koperasi dan UMKM
	Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan Pemasaran Produk Dalam negeri	Urusan Perdagangan
	Optimalisasi pembinaan pada sektor perdagangan	Memperkuat sistem dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional	Urusan Perdagangan
		Revitalisasi dan penguatan tata kelola pasar tradisional	Urusan Perdagangan
		Peningkatan nilai penjualan produk ke Luar negeri (Ekspor)	Urusan Perdagangan
		Peningkatan peningkatan sarana distribusi perdagangan	Urusan Perdagangan
		Optimalisasi pengawasan dan pengendalian perizinan serta pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan	Urusan Perdagangan
		Peningkatan pengawasan terhadap standarisasi sarana perdagangan	Urusan Perdagangan
		Meningkatkan tertib ukur dan perlindungan konsumen	Urusan Perdagangan
	Meningkatkan IKM Berdayasaing	meningkatkan pembinaan, pendampingan dan pendaftaran perusahaan industri dalam sistem informasi industri nasional (SIINas)	Urusan Perindustrian
		Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industri terutama bagi industri kecil dan menengah	Urusan Perindustrian
		Peningkatan pengembangan Industri Kecil Menengah	Urusan Perindustrian

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
	Meningkatkan fasilitasi penanaman modal	Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal	Urusan Penanaman Modal
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan dan Non perizinan	Urusan Penanaman Modal
	Membangun ekosistem halal terintegrasi	Peningkatan realisasi Halal Food Center, peningkatan sertifikasi produk UMKM, penguatan literasi halal, dan pengembangan pariwisata syariah, dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Bogor sebagai destinasi halal unggulan.	Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Pariwisata, Urusan Penanaman Modal
Sasaran 3.1.3. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah			
	Meningkatkan akses pangan masyarakat	Penurunan jumlah penduduk rawan pangan melalui optimalisasi program ketahanan pangan berbasis urban farming, penguatan distribusi pangan murah, serta pengembangan sistem data dan informasi ketahanan pangan yang terintegrasi dengan program kesejahteraan sosial.	Urusan Pangan, Urusan Pertanian
		Peningkatan Pemberdayaan pembudidaya ikan	Urusan Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan	Urusan Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Urusan Pertanian
		Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Urusan Pertanian
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Urusan Pertanian
		Peningkatan Penyuluhan Pertanian	Urusan Pertanian
		Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pangan Masyarakat	Urusan Pangan

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		Peningkatan kualitas pangan segar asal tumbuhan	Urusan Pangan
		Peningkatan kualitas pangan asal hewan	Urusan Pangan
		Sasaran 3.1.4. Menguatnya Stabilitas Daerah	
	Terkendalnya Inflasi Daerah	Optimalisasi Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian), Urusan Pangan, Urusan Perdagangan
	Terkendalnya harga kebutuhan pokok dan barang penting	Peningkatan pengawasan terhadap stabilitas harga bahan pokok dan barang penting	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian), Urusan Pangan, Urusan Perdagangan
	Meningkatkan realisasi PAD	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
	Optimalisasi Kinerja BUMD	Peningkatan kinerja BUMD dan kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan BUMD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)
	Meningkatkan kepatuhan masyarakat pada perda/Perkada	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Peningkatan kompetensi anggota satpol pp dan Linmas	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
			serta Perlindungan Masyarakat
		Peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Meningkatkan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Optimalisasi ketepatan sasaran intervensi program kesejahteraan rakyat di bidang pelayanan dasar dan pelayanan non dasar	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bag. Kesra)
	Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial	Unsur Pemerintahan Umum
		Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	Unsur Pemerintahan Umum
		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Unsur Pemerintahan Umum
		Peningkatan peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Unsur Pemerintahan Umum
		Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Unsur Pemerintahan Umum
Menumbuhkembangkan kerukunan, toleransi dan perdamaian dalam keberagaman masyarakat		Unsur Pemerintahan Umum	
Misi 4 : Bogor Lancar			
Tujuan 4.1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah			
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya konektivitas transportasi publik yang berkelanjutan			
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan	Peningkatan upaya rekayasa lalulintas, mengurangi hambatan samping, meningkatkan pengelolaan parkir, penggunaan teknologi untuk memantau dan mengendalikan lalulintas	Urusan Perhubungan

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		dan edukasi tertib lalu lintas kepada masyarakat.	
		Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan transportasi hijau dengan membangun kawasan berbasis TOD yang terintegrasi dengan pusat bisnis dan permukiman, serta mendorong pemanfaatan kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya.	Urusan Perhubungan, Urusan Penanaman Modal, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan yang berkualitas untuk meningkatkan kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan.	Urusan Perhubungan
		Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik masal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan dengan peningkatan layanan angkutan umum yang terjangkau, ramah lingkungan, dan terkoneksi dengan moda transportasi lainnya untuk mengurangi kemacetan dan emisi karbon dalam rangka penurunan emisi GRK.	Urusan Perhubungan
Sasaran 4.1.2. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan			
	Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang optimal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui rehabilitasi, pembangunan (Jalan R3, Jalan R2, Inner Ringroad persimpangan tidak sebidang, jalur pedestrian dan kelengkapan jalan), dan pemeliharaan rutin/berkala jalan, jembatan dan pedestrian.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi/Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
		Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi jaringan produksi dan distribusi dengan memperbaiki konektivitas antarwilayah, optimalisasi logistic hub, dan modernisasi sistem distribusi barang untuk mendukung daya saing ekonomi lokal dan global.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan kualitas drainase	Peningkatan kualitas drainase, Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Drainase secara Teknis dan Fungsional khususnya kawasan rawan banjir.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Terwujudnya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkualitas	Peningkatan penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 4.1.3. Meningkatkan kualitas tata ruang wilayah kota			
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang wilayah	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah yang berkelanjutan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan pengembangan bangunan gedung hijau baik dalam pembangunan gedung pemerintahan maupun bangunan masyarakat melalui pengendalian perizinan dalam rangka penurunan emisi GRK	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Peningkatan kualitas penataan bangunan dan lingkungan dengan memperhatikan standar rancang bangun kota	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber : Hasil Analisis Bapperida (2025)

3.4. Program - Program Prioritas Daerah

3.4.1. Program Prioritas Sesuai dengan Agenda Pembangunan Daerah

Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Program prioritas dapat memastikan bahwa pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sehingga dapat mencapai target-target pembangunan yang diinginkan dalam jangka menengah.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih di Kota Bogor tahun 2025-2030 memiliki program dan program hasil terbaik cepat. Berbagai program dan program hasil terbaik cepat tersebut telah dijabarkan per misi. Secara detail, program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih di Kota Bogor dijabarkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Program Kepala Daerah di Kota Bogor Tahun 2025-2030

Misi	Program Prioritas Kepala Daerah
Misi 1: BOGOR CERDAS	Menambah unit sekolah dan ruang kelas baru.
	Subsidi biaya Pendidikan bagi siswa kurang mampu.
	Memberikan insentif bagi guru ngaji secara terukur.
	Meningkatkan gaji dan fasilitas guru honorer.
	Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu.
	Memastikan setiap siswa mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal.
	Mengembangkan command center
	Pengembangan CCTV di lokasi strategis
	Pemasangan Wifi gratis di seluruh Fasilitas publik
	Penyuluhan bahaya judi online dan pinjaman online berkolaborasi dengan aparaturnya penegak hukum dan wilayah
	Memberikan bantuan hukum gratis kepada Masyarakat yang Berhadapan dengan Hukum
	Pelayanan jemput bola administrasi kependudukan
	Pelayanan jemput bola perizinan
	Penguatan sarana prasarana pelayanan publik (Kantor kecamatan dan kelurahan)
Misi 2: BOGOR SEHAT	Pelayanan Kesehatan Prima:
	Pemeriksaan kesehatan gratis.
	Menambah fasilitas ruang ICU, Alat-alat Kesehatan, Dokter spesialis dan sub spesialis di Rumah sakit milik pemerintah Kota Bogor, Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas Kesehatan lainnya.
	Penyediaan layanan rawat inap di setiap Puskesmas.

Misi	Program Prioritas Kepala Daerah
	Bogor Quick Respon dalam penanganan pasien darurat dan bencana alam
	Membuat system pelayanan rujukan yang terpusat dan terintegrasi kesuluruh Rumah sakit di dalam dan di luar Kota Bogor.
	Menambah Kuota kepesertaan BPJS PBI APBD untuk masyarakat miskin
	Menyediakan layanan armada ambulan gratis disetiap kecamatan yang dapat di akses 24 jam oleh masyarakat beserta dengan layanan fasilitas dokter keliling.
	Memberikan Fasilitas bantuan dan Layanan khusus kelompok rentan (Disabilitas & lansia) dengan memfasilitasi layanan dokter keliling.
	Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran posyandu, penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur
	Pelayanan Kebersihan:
	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan motede 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
	Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah domestik dan air minum)
	Perencanaan tata ruang yang mempertimbangan eksese perubahan iklim dan risiko bencana
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan.
	Ketahanan Keluarga:
	Penyediaan tempat tinggal yang layak melalui program bedah rumah, bantuan RTLH serta pemberian subsidi rusunawa bagi masyarakat kurang mampu
	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
	Pembangunan Gedung Olahraga Masyarakat di 4 kecamatan
	Revitalisasi Gor Pajajaran Menjadi Pusat Olahraga dan Gedung kreatif dan seni terpadu
Misi 3: BOGOR SEJAHTERA	Pengangguran: Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & Profesional. Memaksimalkan peran balai latihan kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan berdasarkan kebutuhan kesempatan kerja di Kota Bogor Memberikan santunan kematian bagi masyarakat miskin Ekonomi Kreatif: Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan. Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya Tarik bagi wisatawan sekaligus wadah mempromosikan seni budaya lokal Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan akses bantuan permodalan dan system pemasaran produk (Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat disetiap kelurahan, membuat regulasi yang mewajibkan setiap ASN untuk membeli produk UMKM) Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif

Misi	Program Prioritas Kepala Daerah
	Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk menciptakan pelaku usaha muda pemula naik kelas
Misi 4: BOGOR LANCAR	Penambahan Armada Transportasi umum baru yang ramah lingkungan dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti Wi-Fi, AC, dan sistem pembayaran elektronik.
	Integrasi Moda Transportasi: Membangun sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan bus, angkot, dan layanan transportasi lainnya untuk memastikan konektivitas antar moda.
	Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
	Promosi Penggunaan Transportasi Umum: Melakukan kampanye besar-besaran untuk mendorong warga menggunakan transportasi umum dengan memperkenalkan program-program insentif seperti tarif terjangkau atau diskon untuk pelajar dan pekerja.
	Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang Kebon Pedes
	Pembangunan akses Jalan Pemuda Menuju Jalan Sukaresmi
	Pembangunan lanjutan R3
	Pembangunan lanjutan R2
	Proses persiapan dokumen perencanaan pembangunan Jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR)
	Pemasangan CCTV di lokasi-lokasi strategis untuk keamanan dan 5 pemantauan arus lalu lintas.
	Pembangunan gedung pemerintahan terpadu

Sumber : Hasil Analisis Bapperida (2025)

Berbagai program Kepala Daerah tersebut kemudian terdapat Program Hasil Terbaik Cepat. Secara detail, program hasil terbaik cepat Kepala Daerah terpilih di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan dan Profesional
- 2) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
- 3) Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
- 4) Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran posyandu, penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur

- 5) Menyediakan layanan armada ambulan gratis disetiap kecamatan yang dapat di akses 24 jam oleh masyarakat beserta dengan layanan fasilitas dokter keliling serta Layanan khusus kelompok rentan (Disabilitas & lansia)
- 6) Memastikan setiap siswa dapat sekolah dengan fasilitas yang layak dan mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal

Untuk program infrastruktur prioritas, selain program prioritas kepala daerah, terdapat program prioritas daerah lainnya seperti pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Program Infrastruktur Prioritas Kota Bogor

No	Program Prioritas	Kecamatan
A	Prioritas Kepala Daerah	
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru/Unit Sekolah Baru SD-SMP	Bogor Tengah, Tanah Sareal, Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Selatan
2	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA	Tanah Sareal, Bogor Selatan, Bogor Timur
3	Pembangunan Kantor Pemerintahan Terpadu	Bogor Timur
4	Penyediaan wifi publik	Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Barat, Tanah Sareal, Bagor Barat, Bogor Timur, Bogor Utara
5	Pembangunan Integrated Command and Control Center	Bogor Tengah
6	Penanganan RTLH melalui Bedah Rumah	Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Barat, Tanah Sareal, Bagor Barat, Bogor Timur, Bogor Utara
7	Pembangunan Septik Tank Komunal	Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Barat, Tanah Sareal, Bagor Barat, Bogor Timur, Bogor Utara
8	Pembangunan Puskesmas Situ Gede	Bogor Barat
9	Pengembangan Posyandu Sepanjang Hayat	Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Barat, Tanah Sareal, Bagor Barat, Bogor Timur, Bogor Utara
10	Pembangunan Sentra Kuliner Kelurahan	Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Barat, Tanah Sareal, Bagor Barat, Bogor Timur, Bogor Utara
11	Pembangunan TOD Bubulak	Bogor Barat
12	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan (Bus Rapid Transit)	Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Barat, Tanah Sareal, Bagor Barat, Bogor Timur, Bogor Utara
13	Pembangunan GOM (Gelangang Olahraga Mini)	Bogor Barat, Bogor Timur
14	Pembangunan Underpass Jalan Kebon Pedes	Tanah Sareal
15	Revitalisasi GOR Pajajaran Tahap 2 (lanjutan)	Tanah Sareal
16	Pembangunan Jalan Akses Dadali - Sholeh Iskandar	Bogor Utara
17	Pembangunan Jalan Frontage R2	Bogor Utara
18	Pembangunan Jalan R3	Bogor Timur
19	Pembangunan Jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR)	Bogor Selatan

No	Program Prioritas	Kecamatan
20	Pembangunan Jalan Akses Kantor Pemerintahan Terpadu	Bogor Timur
B	Prioritas Daerah Lainnya	
21	Pembangunan Rumah Susun	Bogor Barat, Bogor Selatan
22	Peingkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kebon Pedes	Tanah Sareal
23	Pembangunan IPAL Skala Kota Kayu Manis	Tanah Sareal
24	Peningkatan Kapasitas IPLT Tegal Gundil	Bogor Utara
25	Pengembangan RSUD Kota Bogor	Bogor Barat
26	Revitalisasi Gedung Kemuning Gading	Bogor Tengah
27	Revitalisasi Museum Bumi Ageung Batu Tulis sebagai Pusat Edukasi Sejarah Sunda	Bogor Selatan
28	Revitalisasi Pasar Bogor	Bogor Tengah
29	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan (Tram) Koridor 1	Bogor Tengah
30	Pembangunan Terminal Terpadu Sukaresmi (TOD Sukaresmi)	Bogor Utara
31	Pembangunan TOD Baranangsiang	Bogor Timur
32	Pembangunan Jembatan Tematik Pamoyanan - Genteng	Bogor Selatan
33	Pembangunan Infrastruktur CCTV	Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Barat, Tanah Sareal, Bagor Barat, Bogor Timur, Bogor Utara
34	Pembangunan Jalan Akses IPAL Kayu Manis	Tanah Sareal
35	Pelebaran Jalan Akses Pasar Jambu Dua	Bogor Utara
36	Pembangunan Bogor Interchange	Bogor Utara, Bogor Timur
37	Pembangunan Jalan Tembus R3 - Kp Pasir	Bogor Timur
38	Pembangunan Jalan Tembus Jalan Pakuan Indah-Permata	Bogor Timur
39	Pelebaran Jalan Cifor s.d Batas Kota	Bogor Barat
40	Pengembangan PSEL	TPA Galuga, Tanah Sareal

Sumber : Analisis Bapperida (2025)

Apabila program prioritas tersebut dikelompokkan dalam tiap kecamatan di Kota Bogor maka akan menghasilkan program kewilayahan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Program Prioritas Infrastruktur Berdasarkan Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Program Prioritas Infrastruktur Daerah	Misi RPJMD
1	Bogor Selatan	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2. Pembangunan Ruang Kelas Baru 3. Penyediaan wifi publik 4. Pembangunan Rumah Susun 5. Penanganan RTLH melalui Bedah Rumah 6. Pembangunan Septik Tank Komunal 7. Pengembangan Posyandu Sepanjang Hayat dan SPM 8. Pembangunan TPS-3R 9. Revitalisasi Museum Bumi Ageung Batu Tulis sebagai Pusat Edukasi Sejarah Sunda 10. Pembangunan Sentra Kuliner	Bogor Cerdas/Bogor Sehat/Bogor Sejahtera /Bogor Lancar

No	Kecamatan	Program Prioritas Infrastruktur Daerah	Misi RPJMD
		11. Pengembangan Angkutan Umum Massal (BRT) 12. Pembangunan Jembatan Tematik Pamoyanan-Genteng – 13. Pembangunan Infrastruktur CCTV 14. Pembangunan Jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR)	
2	Bogor Tengah	1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2) Pembangunan Ruang Kelas Baru 3) Penyediaan wifi publik 4) Pembangunan Integrated Command and Control Center Fase 2 5) Penanganan RTLH melalui Bedah Rumah - Pembangunan Septik Tank Komunal 6) Pengembangan Posyandu Sepanjang Hayat dan SPM 7) Pembangunan TPS-3R 8) Revitalisasi Gedung Pusat Sains Kreatif 9) Pembangunan Sentra Kuliner 10) Revitalisasi Pasar Bogor 11) Pengembangan Angkutan Umum Massal (BRT & Tram) 12) Pembangunan Infrastruktur CCTV	Bogor Cerdas/Bogor Sehat/Bogor Sejahtera/Bogor Lancar
3	Bogor Timur	1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2) Pembangunan Ruang Kelas Baru 3) Pembangunan Kantor Pemerintahan Terpadu 4) Penyediaan wifi publik 5) Pembangunan Integrated Command and Control Center Fase 2 6) Penanganan RTLH melalui Bedah Rumah 7) Pembangunan Septik Tank Komunal 8) Pengembangan Posyandu Sepanjang Hayat dan SPM 9) Pembangunan TPS-3R 10) Pembangunan Sentra Kuliner 11) Pengembangan Angkutan Umum Massal (BRT) 12) Pembangunan TOD Baranangsiang 13) Pembangunan GOM (Gelanggang Olahraga Mini) – 14) Pembangunan Jalan R3 15) Pembangunan Jalan Akses Kantor Pemerintahan Terpadu – 16) Pembangunan Bogor Interchange 17) Pembangunan Jalan Tembus R3-Kp. Pasir 18) Pembangunan Jalan Tembus Jl. Pakuan Indah-Permata	Bogor Cerdas/Bogor Sehat/Bogor Lancar
4	Bogor Barat	1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2) Pembangunan Ruang Kelas Baru 3) Penyediaan wifi publik 4) Pembangunan Rumah Susun 5) Penanganan RTLH melalui Bedah Rumah 6) Pembangunan Septik Tank Komunal 7) Pembangunan Puskesmas Situ Gede 8) Pengembangan RSUD Kota Bogor	Bogor Sehat/Bogor Sejahtera/Bogor Lancar

No	Kecamatan	Program Prioritas Infrastruktur Daerah	Misi RPJMD
		9) Pengembangan Posyandu Sepanjang Hayat dan SPM 10) Pembangunan TPS-3R 11) Pembangunan Sentra Kuliner 12) Pengembangan Angkutan Umum Massal (BRT) 13) Pembangunan Infrastruktur CCTV 14) Pembangunan GOM (Gelanggang Olahraga Masyarakat) 15) Pembangunan TOD Bubulak 16) Pelebaran Jalan Cifor s.d. Batas Kota	
5	Bogor Utara	1) Pembangunan Ruang Kelas Baru 2) Penyediaan wifi publik 3) Penanganan RTLH melalui Bedah Rumah 4) Pembangunan Septik Tank Komunal 5) Peningkatan Kapasitas IPLT Tegalgundil 6) Pengembangan Posyandu Sepanjang Hayat dan SPM 7) Pembangunan TPS-3R 8) Pembangunan Sentra Kuliner 9) Pembangunan Gedung sains dan kreatif 10) Pengembangan Angkutan Umum Massal (BRT) 11) Pembangunan Terminal Terpadu Sukaresmi (TOD Sukaresmi) 12) Pembangunan Infrastruktur CCTV 13) Pembangunan Jalan Akses Dadali-Sholeh Iskandar 14) Pembangunan Jalan Frontage R2 15) Pelebaran Jalan Akses Pasar Jambu Dua 16) Pembangunan Bogor Interchange	Bogor Cerdas/Bogor Sehat/Bogor Sejahtera/Bogor Lancar
6	Tanah Sareal	1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2) Pembangunan Ruang Kelas Baru 3) Penyediaan wifi publik 4) Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kebon Pedes 5) Penanganan RTLH melalui Bedah Rumah 6) Pembangunan IPAL Skala Kota Kayu Manis 7) Pembangunan Septik Tank Komunal 8) Pengembangan Posyandu Sepanjang Hayat dan SPM 9) Pembangunan TPS-3R 10) Pembangunan Sentra Kuliner 11) Pengembangan Angkutan Umum Massal (BRT) 12) Pembangunan Infrastruktur CCTV 13) Pembangunan Underpass Jalan Kebon Pedes 14) Revitalisasi GOR Pajajaran Tahap 2 – 15) Pembangunan Jalan Akses IPAL Kayu Manis	Bogor Cerdas/Bogor Sehat/Bogor Sejahtera/Bogor Lancar

Sumber : Hasil Olahan dari RTRW Kota Bogor dan Misi Wali Kota Tahun 2025-2030, Analisis Tim CIP Kota Bogor

Provinsi Jawa Barat memiliki langkah strategis pembangunan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah dalam bentuk 9 Langkah Ngawangun Jabar (Sembilan Langkah Membangun Jabar). Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor tahun 2025-2030 kemudian perlu diselaraskan dengan program prioritas Provinsi Jawa Barat untuk menggambarkan keterpaduan program prioritas. Penyelarasan program prioritas tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Penyelarasan Program Prioritas Kepala Daerah Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat

Misi	Program Prioritas Wali Kota Bogor	Program Prioritas Gubernur Provinsi Jawa Barat
Misi 1: BOGOR CERDAS	Menambah unit sekolah dan ruang kelas baru.	Langkah ke-3. Pengembangan Pendidikan Berkarakter dan Penambahan Ruang Kelas Baru
	Subsidi biaya Pendidikan bagi siswa kurang mampu.	
	Memberikan insentif bagi guru ngaji secara terukur.	
	Meningkatkan gaji dan fasilitas guru honorer.	
	Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu.	
	Memastikan setiap siswa mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal.	
	Mengembangkan command center	Langkah ke-9. Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan dan Transformasi Birokrasi
	Pengembangan CCTV di lokasi strategis	
	Pemasangan Wifi gratis di seluruh Fasilitas publik	
	Pembangunan gedung pemerintahan terpadu	
	Penyuluhan bahaya judi online dan pinjaman online berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dan wilayah	
	Memberikan bantuan hukum gratis kepada Masyarakat yang Berhadapan dengan Hukum	
	Pelayanan jemput bola administrasi kependudukan	
	Pelayanan jemput bola perizinan	
	Penguatan sarana prasarana pelayanan publik	
Misi 2: BOGOR SEHAT	Pelayanan Kesehatan Prima:	
	Pemeriksaan kesehatan gratis.	

Misi	Program Prioritas Wali Kota Bogor	Program Prioritas Gubernur Provinsi Jawa Barat
	Menambah fasilitas ruang ICU, Alat-alat Kesehatan, Dokter spesialis dan sub spesialis di Rumah sakit milik pemerintah Kota Bogor, Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas Kesehatan lainnya.	Langkah ke-5. Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan Penambahan Layanan
	Penyediaan layanan rawat inap di setiap Puskesmas.	
	Bogor Quick Respon dalam penanganan pasien darurat dan bencana alam	
	Membuat system pelayanan rujukan yang terpusat dan terintegrasi kesuluruh Rumah sakit di dalam dan di luar Kota Bogor.	
	Menambah Kuota kepesertaan BPJS PBI APBD untuk masyarakat miskin	
	Menyediakan layanan armada ambulan gratis disetiap kecamatan yang dapat di akses 24 jam oleh masyarakat beserta dengan layanan fasilitas dokter keliling.	
	Memberikan Fasilitas bantuan dan Layanan khusus kelompok rentan (Disabilitas & lansia) dengan memfasilitasi layanan dokter keliling.	
	Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran posyandu, penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur	Langkah ke-6. Penanganan Stunting dan Gizi Buruk
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan.	
	Pelayanan Kebersihan:	
	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Langkah ke-8. Pengembangan Pengelolaan Sampah Mandiri
	Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah domestik dan air minum)	Langkah ke-7. Pemulihan Kondisi Lingkungan Jawa Barat
	Perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan ekspos perubahan iklim dan risiko bencana	
	Ketahanan Keluarga:	
	Penyediaan tempat tinggal yang layak melalui program bedah rumah, bantuan RTLH serta pemberian subsidi rusunawa bagi masyarakat kurang mampu	
	Memberikan santunan kematian bagi masyarakat miskin	
	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	Langkah ke-6. Penanganan Stunting dan Gizi Buruk
	Pembangunan Gedung Olahraga Masyarakat di 4 kecamatan	
	Revitalisasi Gor Pajajaran Menjadi Pusat Olahraga dan Gedung kreatif dan seni terpadu	

Misi	Program Prioritas Wali Kota Bogor	Program Prioritas Gubernur Provinsi Jawa Barat
Misi 3: BOGOR SEJAHTERA	Pengangguran:	Langkah ke-4. Pengembangan Lapangan Kerja Baru
	Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & Profesional.	
	Memaksimalkan peran balai latihan kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan berdasarkan kebutuhan kesempatan kerja di Kota Bogor	
	Ekonomi Kreatif:	
	Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan.	
	Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya Tarik bagi wisatawan sekaligus wadah mempromosikan seni budaya lokal	
	Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan akses bantuan permodalan dan system pemasaran produk (Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat disetiap kelurahan, membuat regulasi yang mewajibkan setiap ASN untuk membeli produk UMKM)	
	Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif	
	Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk menciptakan pelaku usaha muda pemula naik kelas	
Misi 4: BOGOR LANCAR	Penambahan Armada Transportasi umum baru yang ramah lingkungan dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti Wi-Fi, AC, dan sistem pembayaran elektronik.	Langkah ke-1. Pembangunan Infrastruktur Jalan sampai ke Pelosok Desa dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan
	Integrasi Moda Transportasi: Membangun sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan bus, angkot, dan layanan transportasi lainnya untuk memastikan konektivitas antar moda.	
	Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.	
	Promosi Penggunaan Transportasi Umum: Melakukan kampanye besar-besaran untuk mendorong warga menggunakan transportasi umum dengan memperkenalkan program-program insentif seperti tarif terjangkau atau diskon untuk pelajar dan pekerja.	
	Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang Kebon Pedes	
	Pembangunan akses Jalan Pemuda Menuju Jalan Sukaresmi	

Misi	Program Prioritas Wali Kota Bogor	Program Prioritas Gubernur Provinsi Jawa Barat
	Pembangunan lanjutan R3	
	Pembangunan lanjutan R2	
	Proses persiapan dokumen perencanaan pembangunan Jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR)	
	Pemasangan CCTV di lokasi-lokasi strategis untuk keamanan dan 5 pemantauan arus lalu lintas.	

Sumber : Program Kampanye Wali-Wakil Wali Kota Bogor (2024)

Adapun pemetaan program prioritas terhadap program yang disusun mengacu pada ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Bogor 2025-2029, maka ditetapkan *outcome* dan program prioritas Kota Bogor yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang secara detail ditampilkan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Program Prioritas RPJMD Kota Bogor 2025-2029

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan		
1	MISI 1 : Terwujudnya BOGOR CERDAS								
1.1	Terwujudnya sumberdaya manusia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi (Smart People)	Terwujudnya pemerataan akses layanan pendidikan melalui Wajib Belajar 13 tahun			Indeks Pendidikan				
					Indeks Pembangunan Kebudayaan				
					Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan				
1.1.1					Program Pengelolaan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah		Urusan Pendidikan	
						Rerata Capaian Pembelajaran (Average Harmonized Test Scores)			
						APS 5-6 Tahun			Menambah unit sekolah dan ruang kelas baru,
						APS 7-15 Tahun			Subsidi biaya Pendidikan bagi siswa kurang mampu (SD, SMP)
						Persentase Anak Putus sekolah yang lulus paket A, Paket B, dan Paket C			Meningkatkan gaji dan fasilitas guru honorer
						Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Inklusivitas Pendidikan PAUD			Memastikan setiap siswa mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal (SD, SMP)

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Inklusivitas Pendidikan SD		Capaian Rapor Pendidikan SD aspek Kualitas Pembelajaran SD	Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu,	
			Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Inklusivitas Pendidikan SMP		Capaian rapor pendidikan SD aspek Iklim Inklusivitas	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren	
			optimalisasi ketepatan sasaran intervensi program kesejahteraan rakyat di bidang pelayanan dasar	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (<i>cross cutting</i>)	Capaian rapor pendidikan aspek Kualitas Pembelajaran SMP	Subsidi biaya Pendidikan bagi siswa kurang mampu (MI, MTS, MA, SMA, SMK)	Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
					Capaian rapor pendidikan SMP aspek Iklim Inklusivitas	Memastikan setiap siswa mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal (MI, MTS, MA, SMA, SMK),	
						mendukung pengoordinasian kebijakan Sekolah Rakyat dari pemerintah Pusat	
1.1.2		Meningkatnya pemajuan Kebudayaan Bangsa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Perpustakaan dan Keterlibatan Masyarakat dalam peningkatan literasi masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	IPLM Dimensi Kepatuhan IPLM Dimensi Kinerja		Urusan perpustakaan
					Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan		
			terwujudnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Program Pelestarian Koleksi	Persentase naskah kuno yang diinventarisasi		Urusan Perpustakaan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
				Nasional dan Naskah Kuno			
			Meningkatnya penyelenggaraan pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	jumlah event seni budaya di Kota Bogor		Urusan Kebudayaan
			Meningkatnya jumlah pelaku dan lembaga kesenian tradisional dalam pelestarian seni dan budaya	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase lembaga seni tradisional yang dibina		
			Meningkatnya Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pelaku pelestari sejarah yang ditingkatkan kompetensinya		
			Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Persentase status ODCB menjadi CB		
			Meningkatnya kunjungan ke Museum	Program Pengelolaan Permuseuman	jumlah kunjungan ke museum		
1.1.3		Meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan Keluarga sebagai pilar			Indeks Pembangunan Keluarga		
			Tersedianya layanan konseling/konsultasi oleh PUSPAGA	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase layanan konseling /konsultasi yang terlayani PUSPAGA		Urusan Pemberdayaan Perempuan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
		utama penggerak pembangunan SDM Unggul	Terpenuhinya Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	<p>Skor pada Klaster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan) KLA</p> <p>Skor pada Klaster2 (Perlindungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) KLA</p> <p>Skor pada klaster 3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan) KLA</p> <p>Skor pada Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) KLA</p>		Perlindungan Anak
			Terlindungnya Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Skor pada Klaster V (Perlindungan Khusus Anak)		
			Optimalisasi pengarusutamaan gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender		
			Optimalisasi dan integrasi pengelolaan data gender dan anak	Program Pengelola Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak		
			Optimalisasi penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100000 penduduk perempuan)		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pendampingan keluarga	Program: Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL PIK-R dan UPPKA yang aktif		Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya kebijakan pembangunan berbasis kependudukan	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Realisasi Rencana Kebijakan Pengendalian Kependudukan		
			Meningkatnya Kesertaan Ber-KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS)		
			Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Pelayanan jemput bola administrasi kependudukan	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase kepemilikan Akta Perkawinan bagi penduduk yang menikah Persentase kepemilikan Akta Perceraian bagi penduduk yang bercerai		
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan Persentase pengelolaan profil kependudukan		
1.1.4 .		Meningkatnya kualitas dan			Indeks Pembangunan Pemuda		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
		daya saing generasi muda	Meningkatnya kapasitas dan daya saing pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Dan Daya Saing Pemuda	persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif Persentase pemuda yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan Persentase Pemuda Pelopor Yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional	Revitalisasi Gor Pajajaran Menjadi Pusat Olahraga dan Gedung kreatif dan seni terpadu Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk menciptakan pelaku usaha muda pemula naik kelas	Urusan Pemuda dan Olah Raga
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina		
			Meningkatnya partisipasi dan prestasi masyarakat dalam berolahraga	Program Pengembangan Daya Saing Kapasitas Keolahragaan	Persentase Atlet Berprestasi dari Keseluruhan Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan Persentase Perolehan Medali dengan Jumlah Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	Pembangunan Gedung Olahraga Masyarakat di 4 kecamatan Revitalisasi Gor Pajajaran Menjadi Pusat Olahraga dan Gedung kreatif dan seni terpadu	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Optimalisasi pengarusutamaan gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (cross cutting)	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender		
			Optimalisasi dan integrasi pengelolaan data gender dan anak	Program Pengelola Sistem Data Gender dan Anak (cross cutting)	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Optimalisasi penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan (cross cutting)	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100000 penduduk perempuan)		
			Meningkatnya Partisipasi Sekolah pada anak usia 5-6 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan (cross cutting)	APS 5-6 Tahun		Urusan Pendidikan
			Meningkatnya Partisipasi Sekolah pada anak usia 7-15 tahun		APS 7-15 Tahun		
			Menurunnya angka putus sekolah		Persentase Anak Putus sekolah yang lulus paket A, Paket B, dan Paket C		
			Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Inklusivitas Pendidikan PAUD		Capaian Rapor Pendidikan PAUD aspek inklusifitas dan kebinekaan Capaian Rapor Pendidikan PAUD aspek pembelajaran yang membangun kemampuan pondasi		
			Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Inklusivitas Pendidikan SD		Capaian Rapor Pendidikan SD aspek Kualitas Pembelajaran SD Capaian rapor pendidikan SD aspek Iklim Inklusivitas		
			Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Inklusivitas Pendidikan SMP		Capaian rapor pendidikan aspek Kualitas Pembelajaran SMP Capaian rapor pendidikan SMP aspek Iklim Inklusivitas		
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Jumlah Kematian Ibu		Urusan Kesehatan
					Jumlah Kematian Balita		
					Prevalensi Penderita Hipertensi		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (cross cutting)	Prevalensi Diabetes Melitus		
					Prevalensi ODGJ		
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar		
					Angka Keberhasilan Pengobatan TB		
					Insiden rate HIV		
					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		
					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		
					Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)		
					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna		
					Persentase keluarga yang di intervensi kesehatan melalui kunjungan rumah		
					Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat		
					Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional		
					Capaian SPM RSUD Kota Bogor		
					Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
					Persentase lanjut usia yang mandiri		
					Persentase merokok penduduk 10-21 tahun		
					Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis		
					Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pendampingan keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) <i>(cross cutting)</i>	Persentase kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL PIK-R dan UPPKA yang aktif		Urusan Pengendalian penduduk
			Meningkatnya keterbukaan kesempatan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja <i>(cross cutting)</i>	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & Profesional.	Urusan Tenaga Kerja
			Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja <i>(cross cutting)</i>	Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi	Memaksimalkan peran balai latihan kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan berdasarkan kebutuhan kesempatan kerja di Kota Bogor	
			Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentasi Jumlah Perusahaan yang Terfasilitasi Tenaga Kerja yang Produktif		
			menguatnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya <i>(cross cutting)</i>	Persentase Kelurahan Bersih narkoba (bersinar)		Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
1.2	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital				Indeks reformasi Birokrasi		
1.2.1	yang efektif, lincah dan kolaboratif (Smart Government)	Terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik			Indeks Pemerintahan Digital		
			Meningkatnya kebijakan, tata kelola dan manajemen Pemerintahan Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Dan Informatika	Nilai Aspek Tata kelola dan Manajemen Nilai Aspek Teknologi digital Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Pengembangan command center Pengembangan CCTV di lokasi strategis Pemasangan Wifi gratis di seluruh Fasilitas publik	Urusan Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya penerapan keamanan informasi di pemerintah kota	Program Penyelenggara n Persandian Untuk Keamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan keamanan informasi		Urusan Persandian
			Meningkatnya pengelolaan satu data Indonesia dan statistik sektoral	Program Penyelenggara n Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik		Urusan Statistik
			Meningkatnya respon dan penyebarluasan informasi publik	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi	Penyuluhan bahaya judi online dan pinjaman online Sosialisasi program prioritas kota : penanganan stunting, ATM, pelatihan kerja, perizinan, pengembangan UMKM, pariwisata, pajak dan retribusi daerah	Urusan Komunikasi dan Informatika

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
						Promosi Penggunaan Transportasi Umum: Melakukan kampanye besar-besaran untuk mendorong warga menggunakan transportasi umum dengan memperkenalkan program-program insentif seperti tarif terjangkau atau diskon untuk pelajar dan pekerja.	
1.2.2		Meningkatnya Kualitas Kebijakan			Indeks Kualitas Kebijakan		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian/hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan yang lebih berkualitas	Program Penelitian dan pengembangan	<p>Persentase dokumen rekomendasi kebijakan yang diusulkan menjadi kebijakan</p> <p>Nilai rata-rata IKK Perangkat Daerah dimensi Perencanaan, transparansi dan keterlibatan AK dalam perumusan Kebijakan</p> <p>Nilai rata-rata IKK Perangkat Daerah dimensi Implementasi dan evaluasi kemanfaatan Kebijakan</p>		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya penyelenggaraan penataan produk hukum daerah dan bantuan hukum daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Aspek harmonisasi produk hukum daerah Nilai Aspek kompetensi SDM perancang produk hukum daerah Nilai Aspek deregulasi produk hukum daerah Nilai Aspek penataan data base per-UU Daerah Persentase terfasilitasinya layanan bantuan hukum litigasi Persentase terfasilitasinya layanan bantuan hukum non litigasi		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan HAM)
			Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Rencana Kerja DPRD yang di fasilitasi sesuai fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD
1.2.3		Terwujudnya ASN yang memiliki integritas tinggi, berorientasi pada pelayanan,			Nilai hasil survey penilaian integritas (SPI)		
					Indeks Berakhlak		
			Meningkatnya unit kerja yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pembangunan ZI dengan nilai ≥ 75		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
		akuntable, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif	Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Aparatur	Program Kepegawaian Daerah	Indek Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan. Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
			Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat		
1.2.4		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik		
			Meningkatnya kematangan inovasi daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Inovasi dengan tingkat Kematangan > 100 pada tahun ke n		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan pengembangan
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai kematangan organisasi lebih dari 50 poin Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM diatas sama dengan 3.5 Rata Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah aspek Pelaporan Kinerja		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi Setda)

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya kualitas pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan protokol dan komunikasi pimpinan		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian Protokol Kepemimpinan)
			Meningkatnya kualitas administrasi pertahanan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah yang difasilitasi sesuai SOP		
			Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Rencana Kerja DPRD yang di fasilitasi sesuai fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Penguatan sarana prasarana pelayanan publik	Seluruh Urusan pemerintahan
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Kewilayahan (Kecamatan dan kelurahan)
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kecamatan Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SP Dan SOP	Penguatan sarana prasarana pelayanan publik di wilayah melalui pemeliharaan, peningkatan/rehabilitasi dan Pembangunan kantor kecamatan dan kelurahan	

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan Persentase rencana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di wilayah kelurahan yang terealisasi sesuai target		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Kewilayahan (Kelurahan)
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat kelurahan yang aktif		
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rata-rata Nilai Skor EPDESKEK Rata-rata Nilai skor PRODESKEK		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan)
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan kelurahan yang aktif		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan dan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
							Kesejahteraan Rakyat)
			Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung (<i>cross cutting</i>)	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin	Pembangunan gedung pemerintahan terpadu	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	Program Pelayanan Penanaman Modal (<i>cross cutting</i>)	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	Pelayanan jemput bola perizinan	Urusan Penanaman Modal
			Meningkatnya Kualitas layanan Pendaftaran Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk (<i>cross cutting</i>)	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Pelayanan jemput bola administrasi kependudukan	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Program Pencatatan Sipil (<i>cross cutting</i>)	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
1.2.5		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta menguatnya sistem pengendalian internal pemerintah			Opini BPK		
			Meningkatnya kepatuhan PD terhadap peraturan yang berlaku	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Persentase PD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Aspek Evaluasi Kinerja Internal minimal 20		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan
			Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran pada APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai IPKD Dimensi 1 (Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran) Nilai IPKD Dimensi 2 (Kesesuaian pengelokasian anggaran belanja dalam APBD) Nilai IPKD Dimensi 3 (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah)		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan
			Meningkatnya kepatuhan PD terhadap standar pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai IPKD Dimensi 4 (Penyerapan Anggaran) Nilai IPKD Dimensi 5 (Kondisi keuangan daerah) Nilai IPKD Dimensi 6 (Opini BPK atas LKPD)		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam pengelolaan BMD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	<p>Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif</p> <p>Kepatuhan Pengelolan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Pengawasan dan Pengendalian BMD yang efektif</p> <p>Administrasi BMD yang andal</p>		
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Penguatan sarana prasarana pelayanan publik	Seluruh Urusan pemerintahan
					SAKIP Tingkat Kota		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<p>Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Aspek Perencanaan Kinerja minimal 25.50</p> <p>Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Aspek Pengukuran Kinerja minimal 25.50</p>		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja lingkup bidang Perekonomian dan SDA serta bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah Aspek Perencanaan Kinerja lingkup bidang Perekonomian dan SDA serta bidang Infrastruktur dan kewilayahan Rata-Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja pada Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA serta bidang Infrastruktur dan kewilayahan		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai kematangan organisasi lebih dari 50 poin Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM diatas sama dengan 3.5 Rata Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah aspek Pelaporan Kinerja		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi Setda)

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penguatan sarana prasarana pelayanan publik	Seluruh Urusan pemerintahan
			Optimalisasi pencapaian pelaksanaan program dan SPM di setiap urusan pemerintahan dan penguatan kerjasama daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	<p>Persentase capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penyelenggaraan Pemerintahan/ Persentase peningkatan capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>Persentase capaian SPM (Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal)</p> <p>Persentase Kebijakan di Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kewilayah Yang ditindaklanjuti</p> <p>Persentase kerjasama yang diimplementasikan</p>		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Setda)
			Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi pengadaan barang dan jasa, menguatnya SDM dan kelembagaan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Program Perekonomian Dan Pembangunan	<p>Tingkat Pemanfaatan Sistem Informasi PBJ</p> <p>Persentase Pemenuhan Kebutuhan JF PPBJ</p> <p>Tingkat Kematangan UKPBJ</p>		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian PBJ Setda)

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Realisasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Strategis Persentase Ketepatan Waktu pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan sesuai perencanaan		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
			Meningkatnya jumlah Perangkat Daerah yang bernilai baik pada audit kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang hasil audit kearsipan bernilai minimal Baik		Urusan Arsip
			Meningkatnya kualitas penyelamatan dan pelestarian arsip	Program Penyelamatan dan pelestarian Arsip daerah	Persentase arsip yang diselamatkan, dilestarikan dan dimanfaatkan		
					Tingkat Maturitas SPIP		
			Meningkatnya Fungsi APIP dalam Pembinaan dan Pengawasan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Komponen Struktur dan Proses SPIP berdasarkan hasil penjaminan kualitas APIP Nilai Capaian MCP KPK Pada Komponen Pengawasan APIP		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (<i>cross cutting</i>)	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Aspek Perencanaan Kinerja minimal 25.50 Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Aspek Pengukuran Kinerja minimal 25.50		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran pada APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah(<i>cross cutting</i>)	Nilai IPKD Dimensi 1 (Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran) Nilai IPKD Dimensi 2 (Kesesuaian pengelokasian anggaran belanja dalam APBD) Nilai IPKD Dimensi 3 (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah)		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan
			Meningkatnya kepatuhan PD terhadap standar pengelolaan keuangan daerah dan menguatnya kondisi keuangan daerah		Nilai IPKD Dimensi 4 (Penyerapan Anggaran) Nilai IPKD Dimensi 5 (Kondisi keuangan daerah) Nilai IPKD Dimensi 6 (Opini BPK atas LKPD)		
			Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam pengelolaan BMD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (<i>cross cutting</i>)	Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif Kepatuhan Pengelolan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang efektif Administrasi BMD yang andal		
2	MISI 2 : Terwujudnya BOGOR SEHAT						

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
2.1	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, nyaman, efisien dan layak huni (Smart Living)	Meningkatnya kualitas hunian masyarakat			Predikat Kota Sehat		
2.1.1					Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)		
			Meningkatnya ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase panjang jalan perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara Persentase drainase perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara Persentase Luas Makam siap pakai yang di kelola Pemerintah		Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni dan berkurangnya luas kawasan kumuh	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di dalam kawasan kumuh kewenangan kota yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah Persentase panjang jalan di kawasan kumuh kewenangan Kota yang dibangun / ditingkatkan / dipelihara Persentase drainase di kawasan kumuh kewenangan Kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	Penyediaan tempat tinggal yang layak melalui program bantuan RTLH dan penanganan kumuh di kawasan kumuh kewenangan kota	
			Optimalisasi pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang menghuni rumah layak huni	Pemberian subsidi rusunawa bagi masyarakat kurang mampu	

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
						Mendukung Implementasi Kebijakan Program 3 juta Rumah dari pemerintah pusat	
			korban bencana dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)		Persentase warga negara yang terkena relokasi program pemerintah yang difasilitasi untuk menghuni rumah layak huni Persentase tingkat hunian rusunawa oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		
			Meningkatnya akses terhadap hunian layak huni di kawasan pencegahan kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di luar kawasan kumuh kewenangan kota yang mendapat bantuan perbaikan rumah	Penyediaan Tempat tinggal yang layak melalui program bantuan RTLH dan program bedah rumah	
2.1.2		Meningkatnya Akses masyarakat terhadap layanan Utilitas Dasar			Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (%)		
					Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)		
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang telayanai sistem pengelolaan air minum		Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang telayanai sistem pengelolaan air limbah domestik	Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah domestik dan air minum)	

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
2.1.3		Menurunnya resiko bencana di seluruh wilayah			Indeks Resiko Bencana		
			Meningkatnya kuliatas sungai	Program Pengelolaan Sumberdaya Air	Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)		Urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang
			Meningkatnya saluran irigasi yang berfungsi optimal		Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)		
			Meningkatnya kualitas drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (<i>cross cutting</i>)	Persentase panjang drainase yang ditangani sesuai dengan SK Jalan		
			Optimalisasi Upaya Pengelolaan Resiko Bencana	Program Penanggulanga n Bencana	Persentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana Persentase masyarakat tangguh bencana Persentase SPAB Persentase ketersediaan datra kelurahan yang berada di kawasan resiko bencana tinggi		Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum
			Optimalisasi pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulanga n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran Persentase SDM Aparatur Damkar dan Penyelamatan yang ditingkatkan Kompetensinya Rata Rata respon time penanganan kebakaran		Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum
2,2					Indeks Kesehatan		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
2.2.1	Terwujudnya layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas (<i>smart health</i>)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			Umur Harapan Hidup Saat Lahir		
.			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan yang sesuai dengan Kualifikasi yang dibutuhkan Persentase pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar		Urusan Kesehatan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di pemerintah daerah	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	<p>Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP IRT sesuai standar</p> <p>Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu</p> <p>Persentase sarana IRTTP yang memenuhi ketentuan</p> <p>Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan</p> <p>Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditinjaulanjuti oleh Pemerintah Daerah</p> <p>Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu yang memenuhi standar kesehatan</p> <p>Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat</p>		
			Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	<p>Jumlah Kematian Ibu</p> <p>Jumlah Kematian Balita</p>	<p>Pemeriksaan kesehatan gratis</p> <p>Menambah fasilitas ruang ICU di RSUD</p>	

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Penderita Hipertensi	Alat-alat Kesehatan, Dokter spesialis dan sub spesialis di Rumah sakit milik pemerintah Kota Bogor, Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas Kesehatan lainnya.	
					Prevalensi Diabetes Melitus	Penyediaan layanan rawat inap di setiap Puskesmas.	
					Prevalensi ODGJ	Bogor Quick Respon dalam penanganan pasien darurat dan bencana alam	
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Membuat system pelayanan rujukan yang terpusat dan terintegrasi ke seluruh Rumah sakit di dalam dan diluar Kota Bogor.	
					Angka Keberhasilan Pengobatan TB	Menambah Kuota kepesertaan BPJS PBI APBD untuk masyarakat miskin	
					Insiden rate HIV	Menyediakan layanan armada ambulan gratis di setiap kecamatan yang dapat di akses 24 jam oleh masyarakat beserta dengan layanan fasilitas dokter keliling (AMBULAN LENGKAP)	
					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	Memberikan Fasilitas bantuan dan Layanan khusus kelompok rentan (Disabilitas &	
					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
					Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)		
					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	lansia) dengan memfasilitasi layanan dokter keliling.	
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna		
					Persentase keluarga yang di intervensi kesehatan melalui kunjungan rumah		
					Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat		
					Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional		
					Capaian SPM RSUD Kota Bogor		
					Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun		
					Persentase lanjut usia yang mandiri		
					Persentase merokok penduduk 10-21 tahun		
					Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis		
					Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup		
			Meningkatnya perilaku hidup sehat dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber PHBS		
					Persentase kelurahan siaga aktif mandiri		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Program Pengembangan Daya Saing Kapasitas Keolahragaan	Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR berstandar Nasional atau Internasional	Pembangunan Gedung Olahraga Masyarakat di 4 kecamatan	Urusan Pemuda dan Olah Raga
					Persentase Peningkatan Masyarakat yang menggunakan sarana prasarana Olahraga dikelola Dispora	Revitalisasi Gor Pajajaran Menjadi Pusat Olahraga dan Gedung kreatif dan seni terpadu	
			Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (<i>cross cutting</i>)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Ketersediaan energi Ketersediaan Protein	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan.	Urusan Ketahanan Pangan
			Meningkatnya kualitas pangan segar asal tumbuhan	Program Pengawasan Keamanan Pangan (<i>cross cutting</i>)	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi (%)		
			Meningkatnya kualitas pangan asal hewan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (<i>cross cutting</i>)	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular (%) Persentase produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (%)		
			Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan (<i>cross cutting</i>)	Prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) (%)		
					Prevalensi Stunting		
			Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Jumlah Kematian Ibu	Memberi bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil (PMT untuk ibu hamil dan anak balita)	Urusan kesehatan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau	Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (<i>cross cutting</i>)	Jumlah Kematian Balita Prevalensi Penderita Hipertensi Prevalensi Diabetes Melitus Prevalensi ODGJ Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Angka Keberhasilan Pengobatan TB Insiden rate HIV Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna Persentase keluarga yang di intervensi kesehatan melalui kunjungan rumah Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran posyandu, penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur	

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
					Capaian SPM RSUD Kota Bogor		
					Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun		
					Persentase lanjut usia yang mandiri		
					Persentase merokok penduduk 10-21 tahun		
					Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis		
					Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup		
			Meningkatnya perilaku hidup sehat dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (cross cutting)	Persentase Rumah Tangga ber PHBS Persentase kelurahan siaga aktif mandiri	Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah domestik dan air minum)	
			Meningkatnya kesertaan ber-KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (cross cutting)	Persentase Peserta KB Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS)		Urusan Pengendalian penduduk dan KB
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pendampingan keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (cross cutting)	Persentase kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL PIK-R dan UPPKA yang aktif		
			Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (cross cutting)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Ketersediaan energi Ketersediaan Protein	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren	Urusan Pangan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya Partisipasi Sekolah pada anak usia 5-6 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan (cross cutting)	APS 5-6 Tahun		Urusan Pendidikan
			Meningkatnya Partisipasi Sekolah pada anak usia 7-15 tahun		APS 7-15 Tahun		
			Menurunnya angka putus sekolah		Persentase Anak Putus sekolah yang lulus paket A, Paket B, dan Paket C		
			Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Inklusivitas Pendidikan PAUD		Capaian Rapor Pendidikan PAUD aspek inklusifitas dan kebinekaan Capaian Rapor Pendidikan PAUD aspek pembelajaran yang membangun kemampuan pondasi		
			Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Inklusivitas Pendidikan SD		Capaian Rapor Pendidikan SD aspek Kualitas Pembelajaran SD Capaian rapor pendidikan SD aspek Iklim Inklusivitas		
			Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Inklusivitas Pendidikan SMP		Capaian rapor pendidikan aspek Kualitas Pembelajaran SMP Capaian rapor pendidikan SMP aspek Iklim Inklusivitas		
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Kota Bogor	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (cross cutting)	Persentase rumah tangga yang telayanai sistem pengelolaan air limbah domestik	Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah domestik dan air minum)	Urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
2,3	Terwujudnya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan (smart environment)				Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO ₂ Eq/Miliar)		
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
2.3.1		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca			Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO ₂ Eq)		
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pengolahan sampah di sumber	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola di TPS-3R dan Bank Sampah	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Urusan Lingkungan Hidup
			Terbangunnya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah		
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi, manajemen lalu lintas dan pelayanan angkutan umum	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (cross cutting)	Persentase tingkat keselamatan jalan Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik Persentase angkutan umum yang laik jalan dan beroperasi	Penambahan Armada Transportasi umum baru yang ramah lingkungan dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti Wi-Fi, AC, dan sistem pembayaran elektronik. Integrasi Moda Transportasi: Membangun sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan bus, angkot, dan layanan transportasi lainnya untuk memastikan konektivitas antar moda.	Urusan Perhubungan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
						Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.	
			Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung (<i>cross cutting</i>)	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin		Urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang
			Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (<i>cross cutting</i>)	Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dibangun Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dikelola dengan baik		Urusan Lingkungan Hidup
2.3.2		Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan			Indeks kualitas udara		
					Indeks Kualitas Air		
					Indeks kualitas lahan		
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		Urusan Lingkungan Hidup

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
				Lingkungan Hidup (PPLH)			
			Meningkatnya responsivitas penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti		
			Meningkatnya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi		
			Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dibangun Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dikelola dengan baik		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (<i>cross cutting</i>)	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi		
			Meningkatnya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah yang terkelola		
			Meningkatnya Pemahaman Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga/Kegiatan/Usaha Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga yang melakukan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah		
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi, manajemen lalu lintas dan pelayanan angkutan umum	Program Penyelenggara n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (<i>cross cutting</i>)	Persentase tingkat keselamatan jalan Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik Persentase angkutan umum yang laik jalan dan beroperasi	1. Penambahan Armada Transportasi umum baru yang ramah lingkungan dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti Wi-Fi, AC, dan sistem pembayaran elektronik. 2. Integrasi Moda Transportasi: Membangun sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan bus, angkot, dan layanan transportasi lainnya untuk memastikan konektivitas antar moda. 3. Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.	Urusan Perhubungan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Kota Bogor	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (cross cutting)	Persentase rumah tangga yang telayanai sistem pengelolaan air limbah domestik	Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah domestik dan air minum)	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang (cross cutting)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	Perencanaan tata ruang yang mempertimbangan ekses perubahan iklim dan risiko bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung (cross cutting)	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin		
			Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya (cross cutting)	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RTR (RTRWK/RDTRK)	Perencanaan tata ruang yang mempertimbangan ekses perubahan iklim dan risiko bencana	
3	MISI 3 : Terwujudnya BOGOR SEJAHTERA						
3.1	Terwujudnya ekosistem perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat				Gini Rasio		
					Laju Pertumbuhan Ekonomi		
					Indeks Ekonomi Hijau		
					Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		
3.1.1		Terciptanya akselerasi penanggulang an kemiskinan & peningkatan			Angka Kemiskinan		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
	yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah (Smart Economy)	kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi masyarakat pemerlu Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Persentase penyandang lansia terlantar, disabilitas dan korban tindak kekerasan yg direhabilitasi		Urusan Sosial
			Optimalisasi perlindungan sosial bagi Anak Terlantar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penanganan perlindungan sosial bagi Anak Terlantar		
			Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat pemerlu kesejahteraan sosial		Persentase Penurunan PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial		
			Meningkatnya keterpaduan dan ketepatan sasaran intervensi program pengentasan kemiskinan		Persentase data Kemiskinan yang tervalidasi Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan		
			Optimalisasi perlindungan sosial bagi masyarakat korban bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tagana Aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya pemberdayaan sosial masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS kelembagaan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase PSKS Perseorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		
		Optimalisasi ketepatan sasaran intervensi program kesejahteraan rakyat di bidang pelayanan dasar		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penduduk miskin yang bersekolah di MA, SMA/SMK dan Mahasiswa yang mendapat bantuan sosial siswa Miskin	Subsidi biaya Pendidikan bagi siswa kurang mampu (MI, MTS, MA, SMA, SMK) Memastikan setiap siswa mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal (MI, MTS, MA, SMA, SMK), mendukung pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Sekolah Rakyat dari Pemerintah Pusat	Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian Kesra Setda)
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (<i>cross cutting</i>)	Jumlah Kematian Ibu Jumlah Kematian Balita Prevalensi Penderita Hipertensi Prevalensi Diabetes Melitus Prevalensi ODGJ Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar Angka Keberhasilan Pengobatan TB	Menambah Kuota kepesertaan BPJS PBI APBD untuk masyarakat miskin	Urusan Kesehatan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
					Insiden rate HIV		
					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		
					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		
					Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)		
					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna		
					Persentase keluarga yang di intervensi kesehatan melalui kunjungan rumah		
					Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat		
					Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional		
					Capaian SPM RSUD Kota Bogor		
					Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun		
					Persentase lanjut usia yang mandiri		
					Persentase merokok penduduk 10-21 tahun		
					Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis		
					Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya Partisipasi Sekolah pada anak usia 5-6 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan (cross cutting)	APS 5-6 Tahun	a. Subsidi biaya Pendidikan bagi siswa kurang mampu (SD, SMP)	Urusan Pendidikan
			Meningkatnya Partisipasi Sekolah pada anak usia 7-15 tahun		APS 7-15 Tahun	b. Memastikan setiap siswa mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal (SD, SMP)	
			Menurunnya angka putus sekolah		Persentase Anak Putus sekolah yang lulus paket A, Paket B, dan Paket C	c. Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu	
			Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Inklusivitas Pendidikan PAUD		Capaian Rapor Pendidikan PAUD aspek inklusifitas dan kebinekaan Capaian Rapor Pendidikan PAUD aspek pembelajaran yang membangun kemampuan pondasi	d. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren	
			Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Inklusivitas Pendidikan SD		Capaian Rapor Pendidikan SD aspek Kualitas Pembelajaran SD Capaian rapor pendidikan SD aspek Iklim Inklusivitas		
			Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Inklusivitas Pendidikan SMP		Capaian rapor pendidikan aspek Kualitas Pembelajaran SMP Capaian rapor pendidikan SMP aspek Iklim Inklusivitas		
			Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan (cross cutting)	Prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) (%)		Urusan Pangan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya penyelenggaraan penataan produk hukum daerah dan bantuan hukum daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (<i>cross cutting</i>)	Nilai aspek harmonisasi produk hukum daerah Nilai Aspek kompetensi SDM perancang produk hukum daerah Nilai Aspek deregulasi produk hukum daerah Nilai Aspek penataan data base per-UU Daerah Persentase terfasilitasinya layanan bantuan hukum litigasi Persentase terfasilitasinya layanan bantuan hukum non litigasi	Memberikan bantuan hukum gratis kepada Masyarakat yang Berhadapan dengan Hukum	Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan HAM Setda)
			Meningkatnya Keterbukaan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja (<i>cross cutting</i>)	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & Profesional.	Urusan Tenaga Kerja
			Meningkatnya kompetensi Para Pencari Kerja	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja (<i>cross cutting</i>)	Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi	Memaksimalkan peran balai latihan kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan berdasarkan kebutuhan kesempatan kerja di Kota Bogor	

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan kualitas layanan penyelesaian kasus di Sektor Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial <i>(cross cutting)</i>	Persentase rekomendasi LKS Tripartit yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi	Memberikan santunan kematian bagi masyarakat miskin	
			Meningkatnya kualitas usaha dan pendapatan UMKM	Program Pengembangan UMKM <i>(cross cutting)</i>	Persentase peningkatan Jumlah wirausaha baru (UMKM start up) Persentase produk UMKM Binaan yang meningkat omzet penjualannya Persentase pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital	Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & Profesional. Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan. Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk menciptakan pelaku usaha muda pemula naik kelas	Urusan Koperasi dan UMKM

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro dan usaha ultra mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (<i>cross cutting</i>)	Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai kelompok usaha Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi kemitraan dan penguatan kelembagaan Persentase rata rata peningkatan omzet usaha mikro per orang per tahun	Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan akses bantuan permodalan dan system pemasaran produk (Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat disetiap kelurahan, membuat regulasi yang mewajibkan setiap ASN untuk membeli produk UMKM)	
			Meningkatnya pelayanan Izin Usaha simpan pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (<i>cross cutting</i>)	Persentase Koperasi USP yang mematuhi ketentuan perijinan	Penguatan dan Pengembangan Koperasi merah Putih	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (<i>cross cutting</i>)	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal		
			Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (<i>cross cutting</i>)	Persentase Koperasi Aktif		
			Meningkatnya Pemberdayaan pembudidaya ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (<i>cross cutting</i>)	Persentase peningkatan produksi perikanan (Ikan Konsumsi) (%) Persentase peningkatan produksi perikanan (Ikan Hias) (%)		Urusan Perikanan dan Kelautan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (cross cutting)	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan		
			Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan pertanian (cross cutting)	Cakupan Bina Kelompok Tani (%) Persentase peningkatan jumlah kelompok urban farming (%)		
			Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni dan berkurangnya luas kawasan kumuh	Program Kawasan Permukiman (cross cutting)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di dalam kawasan kumuh kewenangan kota yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah Persentase panjang jalan di kawasan kumuh kewenangan Kota yang dibangun / ditingkatkan / dipelihara Persentase drainase di kawasan kumuh kewenangan Kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	Penyediaan tempat tinggal yang layak melalui program bantuan RTLH dan penanganan kumuh di kawasan kumuh kewenangan kota	

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Optimalisasi pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Program Pengembangan Perumahan (<i>cross cutting</i>)	<p>Persentase warga negara korban bencana yang menghuni rumah layak huni</p> <p>Persentase warga negara yang terkena relokasi program pemerintah yang difasilitasi untuk menghuni rumah layak huni</p> <p>Persentase tingkat hunian rusunawa oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)</p>	Pemberian subsidi rusunawa bagi masyarakat kurang mampu	
			Meningkatnya akses terhadap hunian layak huni di kawasan pencegahan kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (<i>cross cutting</i>)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di luar kawasan kumuh kewenangan kota yang mendapat bantuan perbaikan rumah	Penyediaan Tempat tinggal yang layak melalui program bantuan RTLH dan program bedah rumah	
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (<i>cross cutting</i>)	Persentase rumah tangga yang telayanai sistem pengelolaan air limbah domestik	Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah domestik dan air minum)	Urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang
			Optimalisasi Upaya Pengelolaan Resiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana (<i>cross cutting</i>)	<p>Persentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana</p> <p>Persentase kelurahan tangguh bencana</p> <p>Persentase SPAB</p> <p>Persentase ketersediaan datra kelurahan yang berada di kawasan resiko bencana tinggi</p>		Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Optimalisasi pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran (<i>cross cutting</i>)	Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran		
3.1.2		Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan			Tingkat Pengangguran Terbuka		
			Meningkatnya Keterbukaan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & Profesional.	Urusan tenaga Kerja
			Meningkatnya kompetensi Para Pencari Kerja	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi	Memaksimalkan peran balai latihan kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan berdasarkan kebutuhan kesempatan kerja di Kota Bogor	
			Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Jumlah Perusahaan yang Terfasilitasi Tenaga Kerja yang Produktif		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan kualitas layanan penyelesaian kasus di Sektor Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial	Persentase rekomendasi LKS Tripartit yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi		
			Meningkatnya kualitas usaha dan pendapatan UMKM	Program Pengembangan UMKM (<i>cross cutting</i>)	Persentase peningkatan Jumlah wirausaha baru (UMKM start up) Persentase produk UMKM Binaan yang meningkat omzet	Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM,	Urusan Koperasi dan UMKM

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
					penjualannya Persentase pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital	Perbankan & Profesional.	
						Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan.	
						Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif	
						Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk menciptakan pelaku usaha muda pemula naik kelas	
			Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro dan usaha ultra mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (<i>cross cutting</i>)	Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai kelompok usaha Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi kemitraan dan penguatan kelembagaan Persentase rata rata peningkatan omzet usaha mikro per orang per tahun	Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan akses bantuan permodalan dan system pemasaran produk (Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat disetiap kelurahan, membuat regulasi yang mewajibkan setiap ASN untuk membeli produk UMKM)	
			Meningkatnya Pemberdayaan pembudidaya ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (<i>cross cutting</i>)	Persentase peningkatan produksi perikanan (Ikan Konsumsi) (%) Persentase peningkatan produksi perikanan (Ikan Hias) (%)		Urusan Perikanan dan Kelautan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan <i>(cross cutting)</i>	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan		
			Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan pertanian <i>(cross cutting)</i>	Cakupan Bina Kelompok Tani (%) Persentase peningkatan jumlah kelompok urban farming (%)		Urusan Pertanian
			Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif <i>(cross cutting)</i>	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif	Urusan Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas dan daya saing pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Dan Daya Saing Kepemudaan <i>(cross cutting)</i>	Persentase pemuda yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan		Urusan Pemuda dan Olahraga
					Laju Pertumbuhan PDRB sektor Jasa akomodasi dan Makan Minum (ADHK)		
			Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan Jumlah Event Skala Internasional/ Nasional/ Provinsi/ regional yang terselenggara di Kota Bogor		Urusan Pariwisata
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya Tarik bagi wisatawan sekaligus wadah mempromosikan seni budaya lokal	
					Lama Tinggal Wisatawan		
					Tingkat Hunian Kamar Hotel		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif	Urusan Koperasi dan UMKM
			Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual	Persentase produk ekonomi kreatif binaan yang mendapat HAKI		
			Meningkatnya kualitas usaha dan pendapatan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan Jumlah wirausaha baru (UMKM start up)	Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & Profesional.	
					Persentase produk UMKM Binaan yang meningkat omzet penjualannya	Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan.	
					Persentase pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital	Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk menciptakan pelaku usaha muda pemula naik kelas	
			Meningkatnya pemberdayaan usaha	Program Pemberdayaan Usaha	Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai kelompok usaha	Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk	

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			mikro dan usaha ultra mikro	Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi kemitraan dan penguatan kelembagaan Persentase rata rata peningkatan omzet usaha mikro per orang per tahun	mendapatkan askes bantuan permodalan dan system pemasaran produk (Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat disetiap kelurahan, membuat regulasi yang mewajibkan setiap ASN untuk membeli produk UMKM)	
			Meningkatnya pelayanan Izin Usaha simpan pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi USP yang mematuhi ketentuan perijinan	Penguatan dan Pengembangan Koperasi Merah Putih	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal		
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas		
			Meningkatnya penilaian kesehatan Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang Sehat		
			Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif		
			Meningkatnya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap implementasi kebijakan sektor UMKM	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase realisasi rencana kebijakan sektor perekonomian Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Memperoleh KUR (Data SIKP)		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan Perekonomian Setda)
			Meningkatnya kematangan inovasi daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan (<i>cross cutting</i>)	<p>Persentase dokumen rekomendasi kebijakan yang diusulkan menjadi kebijakan</p> <p>Nilai rata-rata IKK Perangkat Daerah dimensi Perencanaan, transparansi dan keterlibatan AK dalam perumusan Kebijakan</p> <p>Nilai rata-rata IKK Perangkat Daerah dimensi Implementasi dan evaluasi kemanfaatan Kebijakan</p>	<p>Penguatan kapasitas riset dan inovasi terapan berbasis sains dibidang ekonomi fokus pada :</p> <p>i) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung penelitian terapan,</p> <p>II) peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM peneliti,</p> <p>iii) pengembangan platform diseminasi produk penelitian dan inovasi terapan,</p> <p>iv) inisiasi innovation valley Kota Bogor, dan</p> <p>v) penguatan linkages dan kolaborasi lembaga-lembaga penelitian, lembaga pendidikan tinggi, komunitas sains kreatif beserta seluruh elemen pendukung sains kreatif di Kota Bogoruniversity town</p>	Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan
					Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan		
			Meningkatnya Pemasaran Produk Dalam negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM yang difasilitasi pemasarannya dari data UMKM yang terverifikasi dalam aplikasi SOLUSI		Urusan Perdagangan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya nilai penjualan produk ke Luar negeri (Ekspor)	Program Pengembangan Ekspor	Nilai realisasi ekspor		
			Meningkatnya peningkatan sarana distribusi perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan Sarana Distribusi Perdagangan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)		
			Optimalisasi pengawasan dan pengendalian perizinan serta pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin		
			Meningkatnya pengawasan terhadap standarisasi sarana perdagangan	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase sarana perdagangan yang dilakukan standarisasi ukuran (tera dan tera ulang)		
					Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri		
			Meningkatnya perusahaan industri yang terdaftar dalam sistem informasi industri nasional (SIINas)	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Industri Kecil Menengah yang teregistrasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Urusan Perindustrian
			Meningkatnya pengembangan Industri Kecil Menengah	Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah yang produktif		
					Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)		
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap laporan kegiatan penanaman modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal para Pelaku Usaha		Urusan penanaman modal

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Tersedianya Data dan Informasi Potensi dan Peluang Investasi sebagai upaya pencapaian target realisasi investasi di Kota Bogor	Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi		
			Meningkatnya Jumlah Kebijakan dan Program Kerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terimplementasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Kebijakan atau Regulasi Penanaman Modal yang Terimplementasi		
			Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi		
			Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP		
			Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (<i>cross cutting</i>)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang		Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
3.1.3		Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah			Indeks Ketahanan Pangan		
			Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		Urusan Pangan
					Ketersediaan energi		
					Ketersediaan Protein		
			Meningkatnya kualitas pangan segar asal tumbuhan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi (%)		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan	
			Meningkatnya kualitas pangan asal hewan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)			
					Persentase produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (%)			
			Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) (%)			
			Meningkatnya Pemberdayaan pembudidaya ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan (Ikan Konsumsi) (%)		Urusan Perikanan dan Kelautan	
					Persentase peningkatan produksi perikanan (Ikan Hias) (%)			
			Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan			
			Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura (26 item)		Urusan Pertanian	
					persentase pemenuhan sarana peternakan (3 item)			
			Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas pertanian (padi) di kawasan LP2B			
					Persentase peningkatan jumlah pemotongan hewan yang dilayani RPH (%)			
			Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)			
					Persentase peningkatan jumlah kelompok urban farming (%)			

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya Partisipasi Sekolah pada anak usia 5-6 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan (cross cutting)	APS 5-6 Tahun		Urusan Pendidikan
		Meningkatnya Partisipasi Sekolah pada anak usia 7-15 tahun			APS 7-15 Tahun		
		Menurunnya angka putus sekolah			Persentase Anak Putus sekolah yang lulus paket A, Paket B, dan Paket C		
		Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Inklusivitas Pendidikan PAUD			Capaian Rapor Pendidikan PAUD aspek inklusifitas dan kebinekaan Capaian Rapor Pendidikan PAUD aspek pembelajaran yang membangun kemampuan pondasi		
		Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Inklusivitas Pendidikan SD			Capaian Rapor Pendidikan SD aspek Kualitas Pembelajaran SD Capaian rapor pendidikan SD aspek Iklim Inklusivitas		
		Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Inklusivitas Pendidikan SMP			Capaian rapor pendidikan aspek Kualitas Pembelajaran SMP Capaian rapor pendidikan SMP aspek Iklim Inklusivitas		
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (cross cutting)	Persentase rumah tangga yang telayanai sistem pengelolaan air minum	Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah domestik dan air minum)	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Tercapainya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (cross cutting)	Jumlah Kematian Ibu	Memberi bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	Urusan Kesehatan
					Jumlah Kematian Balita		
					Prevalensi Penderita Hipertensi		
					Prevalensi Diabetes Melitus		
					Prevalensi ODGJ		
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran posyandu, penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur	
					Angka Keberhasilan Pengobatan TB		
					Insiden rate HIV		
					Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana		
					Persentase Balita Berstatus Gizi Normal		
					Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)		
					Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk		
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna		
					Persentase keluarga yang di intervensi kesehatan melalui kunjungan rumah		
					Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
					Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Capaian SPM RSUD Kota Bogor Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun Persentase lanjut usia yang mandiri Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup		
			Menurunnya angka kelahiran pada usia remaja	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) ((cross cutting))	Persentase kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL PIK-R dan UPPKA yang aktif		Urusan Pengendalian penduduk dan KB
			Terjaganya tingkat kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok di koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu $\leq 9.00\%$	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (cross cutting)	Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu		Urusan Perdagangan
			Optimalisasi perlindungan sosial bagi Anak Terlantar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penanganan perlindungan sosial bagi Anak Terlantar		Urusan Sosial
3.1.4		Menguatnya Stabilitas Daerah			Tingkat Inflasi (%)		
			Optimalisasi Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Rencana Aksi pengendalian Inflasi Daerah		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
							Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian Setda)
			meningkatnya pengawasan terhadap stabilitas harga bahan pokok dan barang penting	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu		Urusan Perdagangan
			Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (cross cutting)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Ketersediaan energi Ketersediaan protein		Urusan Pangan
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi, manajemen lalu lintas dan pelayanan angkutan umum	Program Penyelenggaraan n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (cross cutting)	Persentase tingkat keselamatan jalan Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik Persentase angkutan umum yang laik jalan dan beroperasi		Urusan Perhubungan
					Kapasitas fiskal daerah		
			Meningkatnya Tata Kelola penyelenggaraan Pajak Daerah	Program pengelolaan pendapatan daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan
			Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah		Target Penerimaan Retribusi Daerah		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya kinerja BUMD dan kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan BUMD	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kontribusi Deviden BUMD pada PAD Rata Rata skor capaian kinerja BUMD		Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian Setda)
			Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata (cross cutting)	Persentase peningkatan Jumlah Event Skala Internasional/ Nasional/ Provinsi/ regional yang terselenggara di Kota Bogor		Urusan Pariwisata
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (cross cutting)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara Lama Tinggal Wisatawan Tingkat Hunian Kamar Hotel		urusan Pariwisata
			Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang (cross cutting)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang		Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi, manajemen lalu lintas dan pelayanan angkutan umum	Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (cross cutting)	Persentase tingkat keselamatan jalan Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik Persentase angkutan umum yang laik jalan dan beroperasi		Urusan Perhubungan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	Program Pelayanan Penanaman Modal (<i>cross cutting</i>)	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	Pelayanan jemput bola perizinan	Urusan Penanaman Modal
					Indeks Kerukunan Umat Beragama		
			Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertarikan, keindahan)		Urusan Ketertarikan dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya kompetensi anggota Satpol PP dan Linmas		Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan		
			Meningkatnya kualitas penegakan produk hukum daerah		Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		
			optimalisasi ketepatan sasaran intervensi program kesejahteraan rakyat di bidang pelayanan dasar dan pelayanan non dasar	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi capaian kinerja pemberian hibah untuk lembaga keagamaan	Memberikan insentif bagi guru ngaji secara terukur.	Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Bagian Kesra Setda)
			Meningkatnya kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik Sara yang Tertangani		Urusan Kesatuan bangsa dan Politik
			Menguatnya ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan	Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
				Karakter Kebangsaan			
			menguatnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kelurahan Bersih narkoba (bersinar)		
			Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Persentase Partisipasi Perempuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bogor Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada		
			Menguatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang ada pada strata Dewasa		
4	MISI 4 : Terwujudnya BOGOR LANCAR						
4,1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan				IDSD (Pilar Infrastruktur)		
4.1.1	·	Meningkatnya Konektivitas Transportasi			Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)		

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
	penataan ruang yang berkualitas yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi, manajemen lalu lintas dan pelayanan angkutan umum	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat keselamatan jalan Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik Persentase angkutan umum yang laik jalan dan beroperasi	Penambahan Armada Transportasi umum baru yang ramah lingkungan dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti Wi-Fi, AC, dan sistem pembayaran elektronik. Integrasi Moda Transportasi: Membangun sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan bus, angkot, dan layanan transportasi lainnya untuk memastikan konektivitas antar moda. Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pemasangan CCTV di lokasi-lokasi strategis untuk keamanan dan 5 pemantauan arus lalu lintas.	Urusan Perhubungan

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya kualitas Pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraa n Jalan	Persentase Panjang jalan yang ditangani sesuai dengan SK Jalan	Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang Kebon Pedes	Urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang
						Pembangunan akses Jalan Pemuda Menuju Jalan Sukaresmi	
						Pembangunan lanjutan R3	
						Pembangunan lanjutan R2	
						Proses persiapan dokumen perencanaan pembangunan Jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR)	
			Meningkatnya kualitas drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang jalan yang ditangani sesuai dengan SK Jalan		
			Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik Persentase pekerjaan konstruksi yanga bernilai baik		
					Persentase ketercapaian rencana struktur ruang		
4.1.2 .		Meningkatnya kualitas ruang kota					
			Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang		Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Kode	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program	Indikator Kinerja	Program Prioritas (Janji Politik)	Urusan
			Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin	Pembangunan gedung pemerintahan terpadu	
			Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan	Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RTR (RTRWK/RDTRK)	Perencanaan tata ruang yang mempertimbangan ekspos perubahan iklim dan risiko bencana	

Sumber : Hasil Analisis Bapperida (2025)

Masing-masing Misi Pembangunan Kota Bogor dikelompokkan menjadi Prioritas Kota dalam rangka sinkronisasi prioritas pusat daerah, seperti pada gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Pengelompokan Misi Pembangunan dengan Prioritas Kota

3.4.2. Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Sesuai amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa Program Prioritas Nasional harus didukung oleh program daerah. Begitu pula Program-program pada RPJMD Kota Bogor telah mendukung Program Prioritas Nasional seperti berikut ini.

Tabel 3.10 Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan
Sasaran Prioritas RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Sasaran Prioritas Nasional RPJMN

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor
PN1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		P4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance		P1: Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	
S1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	1. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kebebasan 2. Indeks Aktualisasi Pancasila Aspek Rumah Tangga 3. Indeks Kemerdekaan Pers 4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik 5. Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik 6. Persentase kader yang menempati Jabatan Strategis 7. Indeks Demokrasi Indonesia 8. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi 9. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan 10. Indeks Hak Asasi Manusia 11. Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 12. Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik	S15. Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	Indeks Demokrasi Indonesia	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor
	13. Indeks Akses terhadap Keadilan				
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif		P2: Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	
		P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		P3: Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	
S2. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	1. Asia Power Index (Military Capability)	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Menguatnya Stabilitas Daerah	Indeks Kerukunan Umat Beragama
	2. Asia Power Index (Diplomatic Influence)				
	3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-
	4. Global Cybersecurity Index				
	5. Indeks Keamanan Laut Nasional				
S3. Terbangunnya Eco-region Sistem Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal	6. Indeks Ketahanan Pangan	S8. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan
	7. Prevalensi Ketidacukupan Pangan				
	8. Meningkatkan Produksi Pangan				
	9. Berkurangnya Impor Pangan				
	10. Nilai Tukar Petani Indeks Kesejahteraan Petani		Nilai Tukar Petani	-	-
S4. Meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan	11. Indeks Ketahanan Energi	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif Tahunan	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO2Eq)
	12. Pasokan Energi Primer				
	13. Konsumsi Energi Final per Kapita				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor
jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih	14. Porsi EBT dalam Bauran Energi	Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap layanan Utilitas Dasar	
	15. Intensitas Energi Primer				
	16. Kapasitas Tampung Air per Kapita				Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan
	17. Meningkatnya Air Minum Jaringan Perpipaan				-
	18. Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Aman				-
	19. Menurunnya luas lahan kritis				Persentase Rumah tangga Dengan Akses Sanitasi Aman
	20. Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Akses Sanitasi Aman				-
	21. Mengentaskan perilaku BABS di tempat terbuka				
S5. Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi	22. Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (Peringkat GIEI)	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Inklusi Keuangan	Menguatnya Stabilitas Daerah	Tingkat Inflasi (%)
	23. Kontribusi PDB Syariah				
S6. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	24. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	S6. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing			
	25. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)				
S7. Meningkatnya Indeks Ekonomi Hijau untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	26. Indeks Ekonomi Hijau	S8. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor
	27. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks kualitas udara Indeks kualitas air Indeks kualitas lahan
	28. Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)		Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif Tahunan	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO2Eq)
	29. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				
	30. Proporsi Tenaga Kerja Hijau				
	31. Tingkat Input Material Sirkular				
S8. Pengembangan Ekonomi Biru sebagai sumber Pertumbuhan Baru	32. Nilai Tambah Sektor Ekonomi Biru	S8. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-
	33. Perlindungan Kawasan Perairan				
	34. Kapasitas Sumber Daya Manusia Sektor Ekonomi Biru				
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif		P3: Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	
		P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		P4: Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	
S9. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	1. Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya konektivitas transportasi Meningkatnya kualitas ruang kota	Volume Capacity Ratio Persentase ketercapaian rencana Struktur ruang
	2. Waktu Tempuh pada Lintas Utama (Jam/ 100 Km)				
	3. Peningkatan Kinerja Bongkar Muat Pelabuhan (%)				
	4. On Time Performance Udara (%)				
	5. Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Jalan (%)				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor
	6. Kondisi Jalur KA sesuai Standar (TQI) Kategori 1 dan 2 (%)				
	7. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan (Juta Penumpang)				
	8. Indeks Pembangunan TIK Nasional				
	9. Konsumsi Listrik per Kapita (kwh)				
S10. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	10. Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi	Menguatnya Stabilitas Daerah	Tingkat Inflasi (%)
	11. Aset Perbankan/PDB (%)		Kapasitas Fiskal Daerah		Kapasitas fiskal daerah
	12. Aset Dana Pensiun/PDB (%)				
	13. Aset Asuransi/PDB (%)				
	14. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)		Total Kredit/PDRB		
	15. Total Kredit/PDB (%)		Inklusi Keuangan		
	16. Inklusi Keuangan (%)				
S11. Meningkatnya nilai tambah pariwisata	17. Rasio PDB Pariwisata (%)	S11. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Laju PDRB sektor Jasa akomodasi dan Makan Minum (ADHB)
	18. Devisa Pariwisata (Miliar USD)		Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum		
S12. Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas	19. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	S9. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta aktivitas usaha ekonomi kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	Pembentukan modal tetap bruto	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen PDRB)
	20. Rasio Volume usaha Koperasi terhadap PDB (%)		Rasio Kewirausahaan daerah		Tingkat Pengangguran Terbuka
	21. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor
	22. Rasio Kewirausahaan (%)				
S13. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	23. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	S11. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Laju PDRB sektor Jasa akomodasi dan Makan Minum (ADHB)
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul		P1: Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	
		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif		P3: Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	
		P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		P4: Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	
S14. Pendidikan Berkualitas yang Merata	1. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun keatas (tahun)	S4. Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Rata-rata Lama Sekolah diatas 15 Tahun	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui Wajib Belajar 13 tahun	Rerata Capaian Pembelajaran (Average harmonize test scores)
	2. Harapan Lama Sekolah (tahun)		Harapan Lama Sekolah		Harapan Lama Sekolah
	3. Rata-rata nilai PISA Membaca Matematika Sains		-		-
	4. Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional 17.03 Literasi Membaca Numerasi		-		-
	5. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)		-		-
	6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)		-		-

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor
	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)			-	-
	8. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran		-	-	-
S15. Kesehatan untuk Semua	9. Usia Harapan Hidup (tahun)	S1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup Saat Lahir
	10. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun)				
	11. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)				
	12. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita		Prevalensi Stunting
	13. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)				
	14. Prevalensi obesitas >18 tahun				
	15. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)				
S16. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	16. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	S5. Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
	17. Indeks Perlindungan Anak		Indeks Perlindungan Anak		-
	18. Indeks Pembangunan Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Meningkatnya kualitas dan daya saing generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda
	19. Indeks Ketimpangan Gender		Indeks Ketimpangan Gender		-

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor
	20. Indeks Pembangunan Gender		-		-
	21. Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	S13. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	Terciptanya akselerasi penanggulangan kemiskinan & peningkatan kesejahteraan Sosial	Angka Kemiskinan
	22. Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)				
S17. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	23. Peringkat Indeks Inovasi Global	S9. Meningkatnya Nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta aktivitas usaha ekonomi kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	Pembentukan modal tetap bruto	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan	Tingkat Pengangguran Terbuka
	24. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Rasio kewirausahaan daerah		
	25. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	S14. Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik
	26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan				
S18. Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga	27. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games	S5. Terbentuknya individu Kreatif dan Cekatan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Meningkatnya kualitas dan daya saing generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda
	28. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games				
	29. Peringkat pada Asian Games				
	30. Peringkat pada Asian Para Games				
	31. Peringkat pada SEA Games				
	32. Peringkat pada ASEAN Para Games				
	33. Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang aktif berolahraga (%)				
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif		P3: Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	
S19. Meningkatnya Nilai Tambah,	1. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	S6. Meningkatkan Produktivitas Sektor	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor
Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	2. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	Industri pengolahan yang berdaya saing		yang Inklusif & Berkelanjutan	Laju PDRB Sektor Industri Pengelolaan (ADHK)
	3. Nilai Tambah Industri Pengolahan (MVA) per Kapita (Rp Juta)				
	4. Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan (%)				
S20. Menguatnya Kinerja layanan konektivitas backbone dan Sistem Logistik Nasional untuk Mendukung Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	5. Biaya Logistik (%PDB)	S6. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan	Laju PDRB Sektor Perdagangan
	6. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB (%)				
S21. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDB)	S9. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta aktivitas usaha ekonomi kerakyatan dan tenaga kerja kompeten	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto
	8. Ekspor Barang dan Jasa (%PDB)				
	9. Nilai PMA dan PMDN (Rp. Triliun)				
	10. Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia (%)				
	11. Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (%)				
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		P2 : Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan P3: Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi		

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor
S22. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	1. Tingkat Kemiskinan 2. Proporsi penduduk kelas menengah 3. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal 4. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	S13. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Terciptanya akselerasi penanggulangan kemiskinan & peningkatan kesejahteraan Sosial	Angka Kemiskinan
S23. Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	5. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas hunian masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
S24. Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	6. Persentase desa mandiri (%)		Indeks Desa		
S25. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	7. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional		-		
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul		P1: Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	
		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif			
		P4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance		P3: Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	
S26. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan	1. Indeks Integritas Partai Politik 2. Indeks Pembangunan Hukum 3. Indeks Materi Hukum 4. Indeks Persepsi Korupsi 5. Indeks Integritas Nasional	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	-	-

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor
hukum dan sistem antikorupsi					
S27. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	6. Indeks Pelayanan Publik	S16. Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Persentase capaian reformasi birokrasi general (RB General)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik
	7. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	8. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri				
S28. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	9. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan taat Hukum	Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	-
S29. Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan	10. Clearance rate tindak pidana judi				
	11. Clearance rate tindak pidana penyelundupan				
S30. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan	12. Return on Asset (ROA) BUMN (%)	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Kapasitas fiskal daerah	Menguatnya Stabilitas Daerah	Kapasitas fiskal daerah
S31. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi	13. Rasio pendapatan negara terhadap PDB (%)				
	14. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor
S32. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	15. Tingkat Inflasi (%)	S10. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro	Tingkat Inflasi	Menguatnya Stabilitas Daerah	Tingkat Inflasi
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul		P1: Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	
		P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		P2: Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	
S33. Beragama Masalah dan Berkebudayaan Maju	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	S2. Terbentuknya Individu Beretika dan Berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Menguatnya Stabilitas Daerah	Indeks Kerukunan Umat Beragama
	2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)				
	3. Indeks Layanan Keagamaan		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya pemajuan Kebudayaan Bangsa	Indeks Pembangunan Kebudayaan
	4. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)				
	5. Nilai Dimensi Kohesi Sosial IPMas				
S34. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	6. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	S12. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Risiko Bencana	Menurunnya risiko bencana di seluruh wilayah	Indeks Risiko Bencana
	7. Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB pada empat sektor prioritas (kelautan & pesisir, air, pertanian dan kesehatan)				
	8. Penurunan Nilai Indeks Risiko				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor
	Bencana				

Tabel 3.11 Dukungan Prioritas Pembangunan Kota Bogor Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Program Prioritas Nasional RPJMN

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
PN.01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia					
1	Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S).	P4. Mewujudkan Masyarakat Dan Birokrasi Yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan Sesuai Dengan Prinsip Good And Clean Governance	P1 Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah 2. Persentase Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi
PN.02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru					
1	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	P2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	P2 Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang telayanai sistem pengelolaan air limbah domestik
		Pengembangan SPAM terintegrasi Hulu ke Hilir	P2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	P2 Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang telayanai sistem pengelolaan air minum

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
		Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	P2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	P2 Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Program pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang terkelola di TPS-3R dan Bank Sampah
		Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	P2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	P2 Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah
2	Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	Pengembangan Pangan lokal dan Nabati	P2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	P3 Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan PPH) Konsumsi 2. Ketersediaan energi 3. Ketersediaan Protein
PN.03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi					
1	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya demi keadilan ekonomi	Pengembangan Kopcrasi Sektor Produksi	P2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	P3 Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif
			P2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	P3 Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Program Hubungan Industrial	1. Persentase rekomendasi LKS Tripartit yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan 2. Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi
PN.04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas					

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	P1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1 Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program pengelolaan pendidikan	
		Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	P1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1 Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program pengelolaan pendidikan	1. Capaian Rapor Pendidikan PAUD aspek inklusifitas dan kebhinekaan 2. Capaian Rapor Pendidikan PAUD aspek pembelajaran yang membangun kemampuan pondasi
		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	P1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1 Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program pengelolaan pendidikan	
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	P1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1 Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Anak Putus sekolah yang lulus paket A, Paket B, dan Paket C
2	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	1. Pencegahan dan Penurunan Stunting 2. Penurunan Kematian Ibu dan Anak	P1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1 Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL PIK-R dan UPPKA yang aktif
					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Balita Berstatus Gizi Normal

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	P1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1 Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis
		1. Penuntasan TBC 2. Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	P1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1 Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Keberhasilan Pengobatan TB
		Investasi pelayanan kesehatan primer puskesmas, posyandu)	P1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1 Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar
		Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	P1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1 Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Capaian SPM RSUD Kota Bogor
		Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	P1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1 Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	1. Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan yang sesuai dengan Kualifikasi yang dibutuhkan 2. Persentase pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 3. Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi
		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan	P1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1 Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Persentase dokumen rekomendasi kebijakan yang diusulkan menjadi kebijakan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
		pemanfaatan iptek dan inovasi		pelayanan publik yang bersih dan melayani		2. Nilai rata-rata IKK Perangkat Daerah dimensi Perencanaan, transparansi dan keterlibatan AK dalam perumusan Kebijakan 3. Nilai rata-rata IKK Perangkat Daerah dimensi Implementasi dan evaluasi kemanfaatan Kebijakan
					Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Inovasi dengan tingkat Kematangan > 100 pada tahun ke n
3	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional MTN) Olahraga	P1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1 Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	1. Persentase Atlet Berprestasi dari Keseluruhan Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan 2. Persentase Perolehan Medali dengan Jumlah Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan
PN.05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri					
	-	-	-	-	-	-
PN. 06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan					
1	Pemberantasan Kemiskinan	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	P3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P3 Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase PSKS kelembagaan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2. Persentase PSKS Perseorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
			P3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P3 Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Pelayanan PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. 2. Persentase penyandang lansia terlantar, disabilitas dan korban tindak kekerasan yg direhabilitasi
		Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	P3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P3 Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Persentase Penurunan PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial 2. Persentase data Kemiskinan yang tervalidasi 3. Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan
2	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	P3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P2 Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Program Pengembangan Perumahan	1. Persentase warga negara korban bencana yang menghuni rumah layak huni 2. Persentase warga negara yang terkena relokasi program pemerintah yang di fasilitasi untuk menghuni rumah layak huni 3. Persentase tingkat hunian rusunawa oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
3	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing	P3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah	P3 Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,	1. Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai kelompok usaha

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
		bagii masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah	Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro UMKM)	2. Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi kemitraan dan penguatan kelembagaan 3. Persentase rata rata peningkatan omzet usaha mikro per orang per tahun
					Program Pengembangan UMKM	1. Persentase peningkatan Jumlah wirausaha baru UMKM start up) 2. Persentase produk UMKM Binaan yang meningkat omzet penjualannya 3. Persentase pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital
					Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
PN. 07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan					

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	P4. Mewujudkan Masyarakat Dan Birokrasi Yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan Sesuai Dengan Prinsip Good And Clean Governance	P1 Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program kepegawaian daerah	1. Indek Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, Sistem 1. Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan. 2. Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan 3. Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian
		Transformasi Digital layanan publik	P4. Mewujudkan Masyarakat Dan Birokrasi Yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan Sesuai Dengan Prinsip Good And Clean Governance	P1 Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Nilai Aspek Tata Kelola dan Manajemen 2. Nilai Aspek Teknologi Digital 3. Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah
PN.08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur					
1	Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah	1. Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	P1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1 Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi capaian kinerja pemberian hibah untuk lembaga keagamaan
		2. Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	P1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P1 Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase status ODCB menjadi CB

Sumber : Hasil Analisis Bapperida (2025)

3.5. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kota Bogor

3.5.1. Rencana Pembangunan Infrastruktur berdasarkan RPJMN 2025-2029

Lampiran 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 mengatur mengenai Arah Pembangunan Kewilayahan. Pada “Bab 2.1 Provinsi DKI Jakarta dan Kawasan Aglomerasi Jakarta” dan “Bab 2.2 Provinsi Jawa Barat”, disebutkan bahwa terdapat lokasi prioritas dan highlight indikasi intervensi terkait dengan Kota Bogor. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Lokasi Prioritas dan Highlight Indikasi Intervensi RPJMN 2025-2029 yang terkait dengan Kota Bogor

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
Kawasan Aglomerasi Jakarta/WM Jakarta: • Provinsi Jawa Barat: Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Cianjur	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Greater Jakarta Integrated Transit Based Living Area, antara lain melalui: Pembangunan Jalan Tol Bogor-Serpong (via Parung) • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di Kawasan Aglomerasi Jakarta (termasuk Tangerang Raya, Bekasi Raya, Depok, dan Bogor Raya), termasuk penerapan SIH3 dan FEWS
Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor Sukabumi-Cianjur: • Kota Bogor	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bogor-Sukabumi, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan Potensi dan masalah Perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Bogor-Sukabumi (PHTC) • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kota Bogor (PHTC) • Pembangunan Jalan tol Bogor Ring Road • Pembangunan Jalan Tol Bogor-Serpong (via Parung) • Pembangunan TPST Regional Bogor-Sukabumi • Pengembangan SPAM Bogor Raya

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan World Class Research University Berbasis Potensi Wilayah pada Institut Pertanian Bogor • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Bogor • Urban Renewal pada kota-kota wisata, antara lain: Bogor dan Sukabumi • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense pada RS Tk. III Salak dr. H. Sadjiman (Kota Bogor)

Dukungan Pemerintah Kota Bogor terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Asta Cita RPJMN 2025-2029 meliputi :

a. Makan Bergizi Gratis

Tujuan Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak sekolah dan ibu hamil. Secara umum, tujuannya mencakup:

- 1) Mengurangi stunting dan masalah gizi
- 2) Meningkatkan kemampuan belajar
- 3) Mendukung ketahanan pangan keluarga
- 4) Mendorong pemerataan kesejahteraan
- 5) Membantu pertumbuhan ekonomi lokal
- 6) Mempercepat pembangunan SDM unggul

Peran Pemerintah Kota Bogor dalam program Makan Bergizi Gratis ini adalah :

- 1) Perencanaan dan Penetapan Sasaran, seperti mengidentifikasi target penerima (misalnya siswa PAUD, SD, SMP, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya), serta mengintegrasikan program MBG dalam dokumen perencanaan.
- 2) Koordinasi dan Kelembagaan, dengan menetapkan tim pelaksana daerah lintas sektor, serta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk pedoman teknis, pendanaan, dan monitoring, termasuk perizinan.

- 3) Monitoring Kualitas Gizi dan Keamanan Pangan melalui pengawasan kualitas gizi, dan standar keamanan pangan dan higienitas.
- 4) Pembinaan dan Edukasi Gizi kepada peserta didik, orang tua, dan sekolah, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.
- 5) Penguatan Ekonomi Lokal, bahan pangan diperoleh dari petani lokal, kelompok tani, UMKM, dan pasar daerah sehingga multiplier effect terasa di daerah.
- 6) Pelaporan, Evaluasi, dan Akuntabilitas, perkembangan dan capaian kepada provinsi dan pusat, dan evaluasi berkala serta rekomendasi penyempurnaan program.
- 7) Penanganan Risiko dan Keluhan termasuk menangani insiden seperti keracunan, keterlambatan distribusi, atau masalah administrasi.
- 8) Advokasi dan Kemitraan, melalui penggalangan kerjasam CSR, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan PKK untuk mendukung pelaksanaan dan inovasi.

b. Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat bertujuan untuk meningkatkan akses Pendidikan bagi kelompok rentan dengan materi pembelajaran yang dirancang tidak hanya kemampuan dasar, tetapi juga ditambah dengan Pendidikan karakter, keterampilan hidup, pengetahuan sosial dan budaya lokal. Sekolah Rakyat merupakan Sekolah Terintegrasi dari Tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Adapun rencana sekolah Rakyat di Kota Bogor :

- 1) Sentra Terpadu Inten Soeweno, Kementerian Sosial di Cibinong Kabupaten Bogor untuk jenjang SMP
- 2) Kawasan Rancamaya, Kota Bogor. dengan kontribusi Pemerintah Kota Bogor berupa lahan dan penyiapan lahannya.

c. Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih ini merupakan Program Nasional melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih serta Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Adapun dukungan Pemerintah Kota yaitu :

- 1) Tahap Persiapan dan Sosialisasi, melalui sosialisasi pembentukan, potensi permasalahan, Musyawarah Kelurahan, menyampaikan informasi secara terbuka pembentukan Koperasi Merah Putih
- 2) Tahap Pembentukan dan Legalitas Koperasi, melalui fasilitasi pembentukan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan, fasilitasi proses legalitas usaha, dan administrasi pendirian.
- 3) Penguatan Kapasitas dan Digitalisasi, melalui edukasi, pelatihan dan pendampingan sumberdaya manusia, digitalisasi tata Kelola
- 4) Integrasi dalam Perencanaan dan Anggaran, melalui penyelarasan program dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dan dukungan penganggaran
- 5) Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Lokal, melalui fasilitasi penguatan bidang usaha, sinergi dengan Lembaga ekonomi lainnya di kelurahan serta pembinaan usaha berkelanjutan, pemasaran dan jejaring usaha.

c. Kesehatan Gratis

Program pemerintah yang menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Program ini dirancang untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, mencegah penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini merupakan inisiatif Kementerian Kesehatan melalui SE Kemenkes No. HK.02.01/MENKES/2002/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang persiapan dan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di hari ulang tahun, sebagai bagian Program Hasil Terbaik Cepat. Pemeriksaan Kesehatan Gratis dilaksanakan di Fasilitas yang melayani persalinan, puskesmas, BPM, klinik, rumah sakit, posyandu, sekolah, perkantoran.

Dukungan Pemerintah Kota Bogor meliputi :

- 1) Koordinasi dan penyiapan data
- 2) Advokasi pimpinan daerah
- 3) Penyiapan fasilitas Kesehatan
- 4) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jenis Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) :

- 1) PKG Hari Ulang Tahun untuk kelompok bayi dan anak hingga usia 6 tahun serta dewasa (18-59 tahun) dan lansia (≥ 60 tahun). Pelaksanaan pada hari ulang tahun atau paling lambat H+30. Khusus untuk bayi baru lahir dilakukan 2 hari setelah lahir
- 2) PKG Sekolah, untuk anak usia 7-17 tahun (sekolah dan remaja). Dilaksanakan setiap tahun ajaran baru
- 3) PKG Khusus ditujukan bagi ibu hamil, bayi dan anak hingga 6 tahun. Dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Jenis layanan :

- 1) Bayi baru lahir : skrining hormon tiroid, G6OD, adrenal, jantung bawaan, pertumbuhan

- 2) Balita dan anak pra sekolah (1-6 tahun) : pertumbuhan dan perkembangan, TBC, pendengaran, penglihatan, gigi, talasemia dan DM
- 3) Sekolah dan remaja (7-17 tahun) : gizi, perkembangan, skrining kesehatan umum sesuai kebutuhan sekolah
- 4) Dewasan (18-59 tahun) : vascular, jantung, kanker, Indera, jiwa, fungsi ginjal dan hati
- 5) Lansia (≥ 60 tahun) : Indera, geriatric, kardiovaskular, paru, kanker, ginjal, jiwa

d. Program 3 Juta Rumah

Program ini merupakan salah satu Program Strategis Nasional pada Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Tujuan program ini Adalah adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisi. Selain itu program ini dirancang untuk mengatasi backlog perumahan yaitu menjawab kebutuhan 9,9 juta keluarga yang tidak memiliki rumah serta merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni.

Dukungan pemerintah daerah berupa :

- 1) Perbaikan rumah tidak layak huni, baik di Kawasan kumuh kewenangan kota
- 2) Perbaikan rumah tidak layak huni di luar Kawasan kumuh
- 3) Pembangunan/perbaikan PSU baik di Kawasan kumuh maupun di luar Kawasan kumuh
- 4) Penyediaan rumah susun sederhana
- 5) Penyediaan hunian relokasi pasca bencana

Adapun arahan pembangunan infrastruktur strategis program/proyek strategis provinsi yang terkait dengan Kota Bogor seperti pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Program/Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang terkait dengan Kota Bogor

Agenda Prioritas Provinsi	Program/Proyek Strategis Provinsi
Langkah 1	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Underpass Kebon Pedes • Perbaikan RTLH Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi • Perbaikan RTLH Kawasan Kumuh di luar Kewenangan Provinsi • Perbaikan RTLH di luar Kawasan Kumuh • Penataan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi • Pembangunan Toilet dan Septictank individual • Pembangunan SPALD Regional • Pembangunan IPLT
Langkah 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Irigasi • Irigasi perpompaan bertenaga surya berbasis sentra • Penerapan pertanian presisi
Langkah 3	<ul style="list-style-type: none"> • BOPD • BPMU • Penyelesaian lahan dan bangunan • Pembangunan USB SMA/SMK/SLB • Pembangunan SMK Istimewa • Pembangunan RKB R. Kelas berdasarkan Rombel • Pembangunan RKB Optimalisasi Rombel SMA/SMK/SLB • Pembangunan RKB R Kelas berdasarkan Rombel SD/SMP • Pembangunan RKPD Pemenuhan Optimalisasi Rombil SD/SMP • Rehabilitasi/Revitalisasi Ruang Ke;as • Pendidikan karakter pancawaluya
Langkah 4	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan usaha koperasi merah putih • UMKM naik kelas • Penguatan iklim investasi melalui kemudahan berusaha dan peningkatan kepatuhan
Langkah 5	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan mobil ambulance ICU • Pengadaan ambulance transport • Pengembangan puskesmas rawat inap
Langkah 8	<ul style="list-style-type: none"> • TPPAS Lulut Nambo • Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah
Langkah 9	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejatheraan kepala desa, perangkat desa, RT, RW, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, Guru Agama, Ajengan

3.5.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur berdasarkan RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki suatu program prioritas yang merupakan upaya konkret yang dirancang untuk mencapai tujuan penataan ruang yang ditetapkan dalam dokumen RTRW. Program-program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan fungsi kawasan, serta untuk mengatasi berbagai isu dan tantangan yang dihadapi. Tabel 2.14 menyajikan program prioritas yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031.

Tabel 3.14 Indikasi Program Utama Struktur Ruang RTRW Kota Bogor 2026-2031

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
A. PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KOTA			
I. WP Samida			
1	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Samida (WP A)	Pusat Kota Bogor / PPK Kota Bogor	DPUPR
2	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota / Regional	TOD Stasiun Bogor, TOD Baranangsiang	DPUPR
3	Penataan kawasan TOD Kota Bogor	TOD Baranangsiang	Kem PUPR, Kem Perhubungan, PT KAI DISHUB, DPUPR, BAPPERIDA, DISPERUMKIM,
4	Pengembangan RTNH skala kota	PPK WP Samida (WP A)	DISPERUMKIM
6	Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur	Kel Panaragan, Kel Paledang, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegallega dan Kel Sempur	Kem PUPR, Diskimrum Jabar, DISPERUMKIM, DPUPR
7	Penataan Pusat Lingkungan	Kelurahan Kebon Kalapa, Sukasari	DPUPR, DPMPSTP, DISHUB
II. WP Pasima			
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Pasima (WP B) dan proses legalisasi	WP Pasima (WP B)	DPUPR
2	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Pasima (WP B)	Sub PPK WP Pasima (WP B)	DPUPR
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Pasima (WP B)	Sub Pusat WP Pasima (WP B)	DPUPR
4	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK)	Kawasan TOD Skala Sub Kota	DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
	Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota		
5	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Pasima (WP B) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Pasima (WP B) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang	DPUPR ,DISPERUMKIM
6	Pembangunan RTH skala WP	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang	DLH, DISPERUMKIM
7	Pembangunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Pasima (WP B)	DISPERUMKIM
8	Pembangunan Pusat Lingkungan	Kelurahan Balungbang Jaya	DPUPR, DPMPTSP, DISHUB
III. WP Utara			
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Utara (WP C) dan proses legalisasi	WP Utara (WP C)	DPUPR
2	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Utara (WP C)	Yasmin – Pasar TU Kemang	DPUPR
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Utara (WP C)	Sub Pusat WP Utara (WP C)	DPUPR
2	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota	DPUPR
3	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Utara (WP C) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Utara (WP C) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK Utara 9WP C) : Yasmin – Pasar TU Kemang	DPUPR, DISPERUMKIM
4	Pembangunan RTH skala WP	WP Utara (WP C)	DLH, DISPERUMKIM
5	Pembangunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Utara (WP C)	DISPERUMKIM
IV. WP Purwa			
1	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Purwa (WP D)	Sub PPK D, Warung Jambu – Jalan Adnawijaya	DPUPR
2	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Purwa (WP D)	Sub Pusat WP Purwa (WP D)	DPUPR
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota	DPUPR
4	Penyusunan RTBL / Panduan Rancang Kota (PRK) koridor Jalan Raya Bogor-Jakarta	Koridor Bogor-Jakarta	DPUPR
5	Pembangunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Purwa (WP D)	DISPERUMKIM
V. WP Daksina			
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Daksina (WP E) dan proses legalisasi	WP Daksina (WP E)	DPUPR
2	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Daksina (WP E)	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – Sukabumi – Inner Ring Road	DPUPR
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Daksina (WP E)	Sub Pusat WP Daksina (WP E)	DPUPR
4	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK)	Kawasan TOD Skala Sub Kota	DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
	Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota		
5	Penataan kawasan perbatasan Simpang Jalan Tajur – Jalan Raya Ciawi Sukabumi	Simpang Jalan Tajur – Jalan Raya Ciawi Sukabumi	DPUPR, DISHUB
6	Penyusunan RTBL / Panduan Rancang Kota (PRK) Koridor <i>Inner Ring Road</i>	Koridor <i>Inner Ring Road</i>	DPUPR, DISPERUMKIM
7	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Daksina (WP E) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Daksina (WP E) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – Sukabumi – <i>Inner Ring Road</i>	DPUPR, DISPERUMKIM
8	Pembangunan RTH skala WP	WP Daksina	DLH, DISPERUMKIM
9	Pembangunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Daksina (WP E)	DISPERUMKIM
10	Pembangunan Pusat Lingkungan	Kelurahan Katulampa, Cipaku, Kertamaya, Mulyaharja	DPUPR, DPMPTSP, DISHUB
B. SISTEM JARINGAN PRASARANA			
B.1 SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI			
I.	Studi dan Kajian		
1	Penyusunan data base jaringan jalan	Kota Bogor	DPUPR
2	Sistem Informasi sarana dan prasarana angkutan umum	Kota Bogor	DISHUB
II	Jaringan Jalan		
1	Jalan Lokal	Tersebar di Kota Bogor	DPUPR
2	Pembangunan persimpangan tidak sebidang	Simpang Jalan R. Saleh Bustaman – Jalan Pahlawan	DPUPR
		Simpang Ahmad Syam – Cimahpar	DPUPR
		Simpang Jalan Ahmad Syam – Jalan Tol Jagorawi (Kampung Sawah)	DPUPR
		Jalan arteri, kolektor dan lokal lainnya	DPUPR
3	Peningkatan Jembatan	Jembatan Satu Duit di Jalan Ahmad Yani	DPUPR
		Jembatan sungai Ciliwung di Jalan KH Sholeh Iskandar	DPUPR
		Jembatan sungai Ciliwung Jalan Jalak Harupat	DPUPR
		Jembatan jalan MA Salmun	DPUPR
		Jembatan Jalan Veteran	DPUPR
		Jembatan ruas jalan lainnya	DPUPR
3	Pembangunan akses konektivitas ke jalan tol	Akses konektivitas dari jalan R3 (Kolonel Ahmad Syam) ke Jalan Jagorawi (Baranangsiang)	Kementerian PUPR, DPUPR, BUMN, swasta
		Akses konektivitas dari rencana jalan Bogor Inner Ring Road ke Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi)	Kementerian PUPR, DPUPR, BUMN, swasta
4	Pembangunan jalan non tol		
a	Pembangunan jalan arteri primer	Jalan arteri paralel dengan jalan tol Bogor Ring Road / Frontage R2	DPUPR
b	Pembangunan jalan kolektor primer	Jalan Lingkar Dalam (Bogor Inner Ring Road)	DPUPR
c	Pembangunan jalan arteri sekunder	Pembukaan akses jalan poros barat timur dan utara selatan di WP Utara dan WP Purwa	DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
		Jalan R3 segmen Parung Banteng – Wangun/ Tajur	DPUPR
d.	Pembangunan jalan kolektor sekunder	Pembangunan jalan di sisi jalan tol Jagorawi di WP Daksina;	DPUPR
		Jalan tembus Ahmad Sobana – Ahmad Yani	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Pertigaan Salabenda- kel Kayumanis - Kel Mekarwangi – Jalan Cilebut (Cilebut Barat, Kab Bogor)	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Jalan KH Sholeh Iskandar – Bukit Cimanggu Villa – Jalan Cilebut Raya	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Stasiun Sukaresmi – Jalan Raya Pemda (Kedung Halang)	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar) – Perum Pondok Aren – Jalan P Aoghiri	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Jalan Adnawijaya – Jalan P Asogiri – Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar);	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Jalan Ahmad Sobana – Jalan P Shogiri – samping jalan Toll Jagorawi	DPUPR
		Rencana ruas jalan: Jalan R3 – Kampung Cokondang – samping jalan Toll Jagorawi – Jalan Parung Banteng	DPUPR
		Rencana ruas jalan frontage Bogor Inner Ring Road ke Lingkar Luar Bogor (kelurahan mulyaharja)	DPUPR
		Rencana ruas jalan alternatif Situ Gede	DPUPR
		Rencana ruas jalan dibawah jalur listrik tegangan tinggi	DPUPR
3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Tersebar di Kota Bogor	DPUPR
4	Optimalisasi fungsi bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), dan ruang pengawasan jalan (ruwasja)	Semua WP	DPUPR
5	Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan)	Semua WP	DPUPR
II	Terminal		
1	Revitalisasi terminal penumpang Baranangsiang sebagai terminal penumpang Tipe A	Terminal Baranangsiang	KEMENHUB
2		Tanah Baru	DISHUB

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
	Pembangunan terminal di Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, Kertamaya yang terintegrasi dengan Stasiun kereta ringan	Bubulak Mulyaharja Kertamaya	
3	Pembangunan terminal di Kelurahan Sukaresmi yang terintegrasi dengan Stasiun kereta api dan stasiun kereta ringan	Kelurahan Sukaresmi	DPUPR, DISHUB
4	Pembangunan fasilitas integrasi antar moda di Kawasan TOD	Kawasan TOD	DPUPR, DISHUB
5	Peningkatan sarana pendukung terminal	Seluruh Terminal	DPUPR, DISHUB
6	Pembangunan terminal barang	Kelurahan Tanah Baru	DPUPR, DISHUB
III	Parkir		
1	Pembangunan gedung parkir dan atau pelataran parkir	Kawasan Istana Bogor/Kebun Raya Bogor Kawasan pasar Bogor Kawasan perbatasan/pintu masuk kota Kawasan pengembangan TOD Terminal Penumpang	BUMD/SWASTA BUMD/SWASTA BUMD/SWASTA BUMD/SWASTA DISHUB
2	Pembangunan prasarana “park and ride”	Kawasan Pengembangan TOD Kawasan Suryakencana Kawasan Perbatasan/pintu masuk kota	SWASTA/PT KAI/BUMD BUMD BUMD/SWASTA
3	Pembatasan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan	Seluruh jalan	DISHUB
4	Perluasan fasilitas parkir yang sudah tidak memadai baik perluasan secara vertikal maupun horizontal	Pusat-pusat kegiatan dan fasilitas umum lainnya	DISHUB
5	Penetapan ketentuan penyediaan parkir serta rasio ruas parkir bagi semua kegiatan yang menimbulkan bangkitan kegiatan	Kota Bogor	DISHUB
IV	Angkutan Umum Massal		
1	Pengembangan angkutan umum massal dalam kota	Koridor angkutan umum massal	DISHUB/BUMD
2	Pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan wilayah Kabupaten Bogor	Koridor angkutan umum massal	DISHUB
3	Pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan DKI Jakarta	Bogor – Jabodetabek dan Bandara Soekarno Hatta	DISHUB/KEMENHUB/PEMROV DKI
4	Program pengaturan kembali (re-routing) angkutan umum	Route angkutan perkotaan	DISHUB
5	Peningkatan manajemen operasional dan kinerja pelayanan angkutan	Kota Bogor	DISHUB
6	Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan	Kota Bogor	DISHUB
7	Penggunaan angkutan umum berbahan bakar gas	Kota Bogor	DISHUB
8	Penggunaan angkutan umum tenaga listrik	Kota Bogor	DISHUB
V	Jaringan Lintas		
1	Penetapan rute jaringan lintas	Kota Bogor	DISHUB
2	Peningkatan kualitas jaringan lintas	Kota Bogor	DISHUB
3	Pembatasan beban sumbu maksimal	Kota Bogor	DISHUB

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
VI	Pelayanan Angkutan Wisata dalam Kota		
1	Penetapan rute angkutan wisata	Kota Bogor	DISHUB
2	Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan wisata dalam kota sebagai bagian pelayanan penunjang promosi pariwisata yang menghubungkan lokasi wisata dan kawasan pusaka	Kota Bogor	DISHUB
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada lokasi transit angkutan wisata	Kota Bogor	DISHUB
VII	Pelayanan Angkutan Sekolah Dalam Kota		
1	Penetapan rute angkutan sekolah	Kota Bogor	DISHUB
2	Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan sekolah sebagai bagian penerapan rute aman selamat sekolah dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa dari/ke sekolah	Kota Bogor	DISHUB
3	Penataan koridor/rute pelayanan secara efektif yang mengintegrasikan sekolah-sekolah yang berdampak kemacetan	Kota Bogor	DISHUB
VIII	Jaringan Kereta Api		
1	Peningkatan jalur kereta api commuter line Bogor - Jakarta	Jalur KA Bogor – Jakarta	KEMENHUB/PT KAI
2	Pembangunan jalur angkutan umum massal berbasis rel dalam kota	Kota Bogor (Trase berdasarkan hasil kajian)	KEMENHUB, DISHUB
2	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala kota/regional	TOD Stasiun Bogor, TOD Baranangsiang	KEMENHUB, DISHUB
3	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala sub kota	Tanah Baru	KEMENHUB, DISHUB
		Sukaesmi	KEMENHUB, DISHUB
		Bubulak	KEMENHUB, DISHUB
		Kertamaya	KEMENHUB, DISHUB
		Mulyaharja	KEMENHUB, DISHUB
4	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala lingkungan	Kota Bogor	KEMENHUB, DISHUB
5	Pembangunan Stasiun Kereta Api penunjang jalur kereta api Bogor Sukabumi	Berdasarkan hasil kajian lebih lanjut	KEMENHUB/ PT KAI
B.2	SISTEM JARINGAN ENERGI		
I	Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan		
1	Pengembangan sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan jaringan dan gardu listrik	Seluruh kota	PLN
2	Peningkatan pelayanan jaringan listrik ke seluruh wilayah kota		
a	Peningkatan kapasitas listrik di daerah yang sudah terlayani	Seluruh kota	PLN
b	Peningkatan jangkauan pelayanan ke wilayah-wilayah baru yang belum terlayani.	Seluruh kota	PLN
3	Peningkatan instalasi jaringan listrik	Seluruh kota	PLN

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
4	Pengembangan sistem pengamanan untuk mengurangi jumlah kehilangan energi listrik	Seluruh kota	PLN
5	Pengembangan sistem jaringan/transmisi tenaga listrik bawah tanah	Kawasan pembangunan baru yang tersebar di seluruh kota	PLN
6	Peningkatan jumlah cadangan penyediaan energi listrik	Seluruh kota	PLN
7	Pengembangan energi alternatif yang berasal dari hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, biogas, maupun sumber energi terbarukan lainnya untuk mengantisipasi kendala pasokan energi listrik	Seluruh kota	PLN
II Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Gas			
1	Peningkatan pelayanan sambungan rumah tangga maupun sambungan untuk kawasan fungsional kota lainnya	Seluruh kota	PT. PGN
2	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas untuk kendaraan bermotor	Seluruh kota	PT. PGN
3	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji	Seluruh kota	PT. PGN
4	Pengembangan sistem keamanan jaringan gas	Seluruh kota	PT. PGN
B.3 SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI			
1	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sistem kabel dan sistem nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	DISKOMINFO PT TELKOM
2	Pengembangan dan perluasan jaringan internet	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	DISKOMINFO, PT TELKOM
3	Pengembangan jaringan teknologi informasi bagi lembaga-lembaga pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	DISKOMINFO PT TELKOM
4	Penetapan dan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama oleh para operator layanan telekomunikasi untuk sistem nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	DISKOMINFO
5	Pengembangan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan utilitas kota lainnya	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	DPUPR
6	Membangun tower bersama	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	DISKOMINFO
7	WIFI Publik	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	DISKOMINFO
8	Pengembangan micro cell	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	DISKOMINFO
9	Pengembangan jaringan internet pemerintah daerah	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	DISKOMINFO
B.4 SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR			
1	Kerjasama pengelolaan sumberdaya air Lintas Provinsi	Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane	PSDA prop, BBWS CILCIS
2	Kerjasama pengelolaan sumberdaya air lintas kabupaten/kota	Sungai Cipakancilan	PSDA prop, BBWS CILCIS
		Sungai Cibalok	PSDA prop, BBWS CILCIS
		Sungai Ciangke	PSDA prop, BBWS CILCIS

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
		Sungai Ciomas	PSDA prop, BBWS CILCIS
		Sungai Cigede	PSDA prop, BBWS CILCIS
		Sungai Cisindangbarang	PSDA prop, BBWS CILCIS
		Sungai Ciapus	PSDA prop, BBWS CILCIS
		Sungai Cibalok	PSDA prop, BBWS CILCIS
3	Peningkatan pengelolaan wilayah sungai di wilayah kota	Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane	BBWS CILCIS
4	Pemeliharaan jaringan irigasi	WP Pasima, WP Purwa, WP Daksina	DPUPR, PSDA prop
5	Normalisasi sungai	Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane	BBWS CILCIS
6	Pembangunan sumur resapan di perumahan	Sesuai hasil kajian	DPUPR, DISPERUMKIM, DLH
7	Pembangunan kolam retensi pada lokasi yang memiliki potensi genangan	Sesuai hasil kajian	DPUPR
8	Perlindungan/pelestarian sumber air baku (sungai, situ, danau, air tanah, dan mata air)	Kota Bogor	DPUPR, DINAS LH
9	Peningkatan kualitas air	Kota Bogor	DPUPR, DINAS LH
10	Pencegahan pencemaran air	Kota Bogor	DPUPR, DINAS LH
B.5 INFRASTRUKTUR PERKOTAAN			
I. Sistem Jaringan Air Minum			
A Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Perpipaan			
1	Pengembangan SPAM Zona 1 : a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air · Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)	Zona 1	Perumda Tirta Pakuan
2	Pengembangan SPAM Zona 2 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air · Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)	Zona 2	Perumda Tirta Pakuan
3	Pengembangan SPAM Zona 3 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)	Zona 3	Perumda Tirta Pakuan
4	Pengembangan SPAM Zona 4	Zona 4	Perumda Tirta Pakuan

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
	a. Pembangunan Intake		
	b. pembangunan IPA		
	c. pembangunan reservoir		
	d. pengembangan jaringan perpipaan		
	e. Program penurunan kehilangan air		
	Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)		
5	Pengembangan SPAM Zona 5	Zona 5	Perumda Tirta Pakuan
	a. Pembangunan Intake		
	b. pembangunan IPA		
	c. pembangunan reservoir		
	d. pengembangan jaringan perpipaan		
	e. Program penurunan kehilangan air		
	Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)		
6	Pengembangan SPAM Zona 6	Zona 6	Perumda Tirta Pakuan
	a. Pembangunan Intake		
	b. pembangunan IPA		
	c. pembangunan reservoir		
	d. pengembangan jaringan perpipaan		
	e. program penurunan kehilangan air		
	Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)		
7	Pengembangan SPAM Zona 7	Zona 7	Perumda Tirta Pakuan
	a. Pembangunan Intake		
	b. pembangunan IPA		
	c. pembangunan reservoir		
	d. pengembangan jaringan perpipaan		
	e. Program penurunan kehilangan air		
	Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)		
8	Pengembangan SPAM Zona baru	Kota Bogor	Perumda Tirta Pakuan
	a. Pembangunan Intake		
	b. pembangunan IPA		
	c. pembangunan reservoir		
	d. pengembangan jaringan perpipaan		
	e. Program penurunan kehilangan air		
	Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)		
B	Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Bukan Perpipaan		
1	Pemanfaatan mata air dengan debit kecil, sumur dalam dan sumur dangkal kolektif pada daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM Tirta Pakuan	Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tanah Sareal, dan Kecamatan Bogor Barat	DPUPR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
2	Perluasan pelayanan sistem jaringan bukan perpipaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air minum	Kota Bogor	DPUPR
3	Pengembangan fasilitas penampungan air skala lingkungan	Kota Bogor	DPUPR
4	Membangun SPAM bukan jaringan pipa di daerah yang memiliki potensi air tanah dan tidak terlayani jaringan perpipaan	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak mendapatkan layanan jaringan perpipaan. Prioritas Daerah Pelayanan bukan jaringan pipa	DPUPR
5	Konservasi dan pengembangan area sumber air baku secara berkelanjutan	Kota Bogor	DLH
6	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air minum terutama pada sumber-sumber mata air	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak/belum mendapatkan Layanan PDAM	DPUPR
II. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
1	Optimalisasi dan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik komunal beserta jaringannya pada kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan	Di kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan	DPUPR
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Kota dan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Kota	Kelurahan Kayumanis	DPUPR
3	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan/ WP Daksina	DPUPR
4	Optimalisasi dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Permukiman menjadi Skala Kota dan IPLT	Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara	DPUPR
5	Pengembangan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	Kota Bogor	DPUPR
6	Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS)	Seluruh Kota Bogor	DPUPR
7	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran	Seluruh Kota Bogor	DPUPR, DINKES
8	Pembuatan Rencana Induk Air Limbah Domestik yang dilengkapi dengan rencana detil (DED)	Seluruh kota Bogor	DPUPR
9	Penyusunan regulasi terkait air limbah domestik	Seluruh Kota Bogor	DPUPR
III. Persampahan			
1	Optimalisasi dan pemeliharaan fungsi TPA	TPA Galuga	DLH
2	Pemanfaatan TPA Regional Nambo sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu	TPA Regional Nambo	DLH
3	Peningkatan kualitas pengelolaan serta sarana dan prasarana pendukung pemanfaatan TPA Regional Nambo	Kota Bogor	DLH

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
4	Pembangunan dan optimalisasi SPA pada kawasan sarana prasarana umum terpadu Ciluar	Ciluar	DLH
5	Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode 3R (<i>Reuse, Reduce, Recycle</i>) melalui pembangunan TPS 3R	Kota Bogor	DLH
6	Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode bank sampah	Kota Bogor	DLH
7	Pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan	Diutamakan disetiap kawasan perumahan baru	DLH
8	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan persampahan kota	Kota Bogor	DLH, DINKES, DPMPPA
9	Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya (rumah tangga) dan terintegrasi dengan sistem pengangkutannya	Masing-masing kelurahan	DLH
10	Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	Kota Bogor	DLH, swasta
IV Pengembangan Sistem Jaringan Drainase			
1	Penanganan drainase primer	S. Cisindangbarang, S. Carampulang, S.Ciomas dan anak sungainya, S. Cidepit, S.Cipinanggading, S.Cibeureum, S.Cinangka, S.Cisadane Hulu, Jl.Cipaku, S.Ciawi, S.Cipaku, S.Ciliwung, S.Ciseuseupan, S.Ciluar, S.Cibeuleut, S.Cimahpar, S. Cikerti, S.Cibuluh, S.Ciparigi, S.Ciliwung, Jl. Pajajaran, Jl. Otista, S.Cipakancilan, S.Cibuluh, Jl.Raya Baru, Kali Kayang, S.Cigede kulon, S.Cimanggis.	Kementerian PUPR, DPUPR
2	Penanganan drainase sekunder	Anak sungai cisindangbarang, Jalan Jakarta - Bogor, Jalan lingkaran luar, Jl.raya Bogor Jakarta, S.Cikaret, Jl.Dr.Semeru, Cikubang, Jl.Cibeureum, Rancamaya, Jl. Durian raya, Jl.Rd.Hanafiah, Jl.Rd.Konyong, Jl.Tanah Baru, Jl.Pangeran Sugiri, Jl. Sudirman, Jl.Sawojajar, Jl.Surya Somantri, Jl.Pengadilan, Cibuluh, Jl.A.Adnawijaya, Jl.Martadinata, Jl. Kedung Badak, Jl.Parung, Jl.Kemang, Mekarsari.	Kementerian PUPR, DPUPR
3	Penanganan drainase tersier	Kel. Balumbang, Semplak, Situ Gede, Kel.Loji, Jl.Gunung Batu, Jel.Menteng, Cilendek, Pabuaran, Ranggamekar, Rancamaya, Cipaku, Bojongkerta, Katulampa, Desa Cibuluh, Tanah Baru, Bantarsari, Jl. roda, Tegal gundil, baranangsiang, sukaresmi, Kedung Badak, Parung, Kel.Kencana, drainase lokal.	Kementerian PUPR, DPUPR
4	Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase makro dari kegiatan pembangunan	Kawasan sempadan sungai	DPUPR, BBWS

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
5	Menata ulang fungsi jaringan irigasi yang telah berubah fungsi menjadi saluran drainase	Kota Bogor	DPUPR
6	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase	Kota Bogor	DPUPR
7	Normalisasi sungai dan saluran	Kota Bogor	DPUPR
8	Revitalisasi sempadan sungai sesuai dengan fungsinya	Kawasan Sempadan Sungai	DPUPR, BBWS, DLH, DISPERUMKIM
9	Mengamankan embung – embung dan situ yang telah ada dari pendangkalan dan pembangunan fisik	Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor	DPUPR, BBWSCC, PSDA Prov
10	Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan dan rawan banjir	Kecamatan Bogor Utara; dan Kecamatan Tanah Sareal	DPUPR, DISPERUMKIM
11	Pembangunan sumur resapan, kolam retensi dan/atau detensi dengan konsep <i>zero run off</i> , <i>eco drainage</i> , dan <i>Low impact development</i>	Kota Bogor	DPUPR
V	Ruang dan Jalur Evakuasi Bencana		
1	Identifikasi lokasi rawan bencana, potensi ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor	BPBD
2	Pendataan dan pemetaan ruang dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor	BPBD
3	Penyusunan rencana induk proteksi kebakaran	Kota Bogor	DPKP
4	Penetapan dan peningkatan standar fasilitas minimum kelaikan bangunan dan kelengkapan peralatan	Kota Bogor	BPBD
5	Penyediaan jalur evakuasi bencana yang terjangkau oleh kendaraan roda empat pada wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi	Kota Bogor	BPBD
6	Penyediaan prasarana sarana penunjang proses evakuasi bencana	Kota Bogor	BPBD
7	Sosialisasi ruang dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor	BPBD
8	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana	Kota Bogor	BPBD
9	Penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana secara rinci	Kota Bogor	BPBD
10	Penanganan kawasan rawan bencana banjir	Kawasan Pacilong Kelurahan Kebon Pedes, Kampung Situ Asem Kelurahan Mekarwangi, Kampung Kramat Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Kayumanis, Kelurahan Katulampa, Kelurahan Cibadak, Kelurahan Cibuluh	BPBD, DPUPR, DISPERUMKIM
11	Penanganan kawasan rawan bencana longsor	Di sepanjang sungai Cisadane, sungai Ciomas, saluran Cisadane Empang, saluran Cidepit, saluran Cibalok, sepanjang sungai Ciliwung, dan lokasi-lokasi yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) terutama di Kecamatan Bogor Selatan	BPBD, DPUPR, DISPERUMKIM

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Instansi Pelaksana
12	Penanganan kawasan rawan bencana kebakaran	Perumahan tidak teratur berkepadatan tinggi di Kecamatan Bogor Tengah.	DPKP
13	Sosialisasi program mitigasi bencana	Kota Bogor	BPBD
14	Peningkatan kesiagaan terhadap bencana	Kota Bogor	BPBD
VI	Pedestrian/ Jalur pejalan kaki		
1	Kajian pengembangan prasarana pejalan kaki	Kota Bogor	DISHUB
2	Kajian pengembangan jalur khusus sepeda	Kota Bogor	DISHUB
3	Pembuatan DED prasarana pejalan kaki	Tersebar di Kota Bogor	DPUPR
4	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki yang ada	Menyebarkan di Kota Bogor	DPUPR
5	Pembangunan sarana dan prasarana kendaraan tidak bermotor	Jalan Dadali	DPUPR
		Jalan Jalak Harupat	DPUPR
		Jalan Pemuda	DPUPR
		Jalan Suryakencana	DPUPR
		Jalan Siliwangi	DPUPR
		Jalan Pajajaran	DPUPR
		Jalan Otto Iskandardinata	DPUPR
		Jalan Adnawijaya	DPUPR
		Jalan Ahmad Sobana	DPUPR
		Jalan Ahmad Syam	DPUPR
		Jalan-jalan lainnya	DPUPR
		Stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, lokasi menuju angkutan umum	DPUPR
		Lokasi menuju dan dari halte angkutan umum	DPUPR
6	Pembangunan perlintasan tidak sebidang untuk pejalan kaki		
a	Jembatan penyeberangan orang	Jalan arteri dan kolektor	DPUPR/SWASTA/KEMENPU
b	Underpass penyeberangan orang	Sekitar Kebun Raya Bogor, TOD	DPUPR/KEMENPU
7	Fasilitas integrasi yang menghubungkan TOD	Kawasan TOD	DPUPR
VII	Jaringan Prasarana Kota Terpadu		
1	Mengembangkan jaringan prasarana bawah tanah terpadu	Kota Bogor	DPUPR

Sumber : Hasil Analisis Bapperida (2025)

3.6. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan di Kota Bogor dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong pemerintah Kota Bogor untuk mencari alternatif pembiayaan. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan

pembangunan diantaranya : APBN (Dana Transfer), APBD Provinsi, Creative Financing diantaranya melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Sumber Pendanaan Lainnya (PHLN & Obligasi).

3.6.1. APBN (Dana Transfer).

APBN (Dana Transfer). Dana APBN yang masuk ke Pemerintah daerah terdiri dari dana Transfer ke Daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Insentif Daerah (DID), serta Tambahan DAU untuk dana Kelurahan. Beberapa kebijakan utama yang akan ditempuh oleh pemerintah Kota Bogor agar pemanfaatan Dana Transfer di daerah dapat terwujud di antaranya :

- a. Pertama, Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) diarahkan penggunaannya, yaitu sekurang-kurangnya-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.
- b. Kedua, DAK fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik (pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, irigasi dan pertanian, perumahan, dan jalan) serta afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. "Sedangkan DAK non-fisik diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), dan bantuan operasional kesehatan untuk Puskesmas.
- c. Ketiga adalah pemberian dana insentif kepada daerah untuk memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, dan pelayanan pemerintahan umum.

- d. Keempat, Tambahan DAK untuk dana kelurahan diarahkan untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

3.6.2. Pendanaan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pendanaan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya bersumber dari pendanaan Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Daerah Lainnya.

- a. Dana APBD Provinsi yang masuk ke Pemerintah Daerah terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat.
- b. Dana dari Provinsi DKI Jakarta yang masuk ke Pemerintah Daerah terdiri dari dana Bantuan Keuangan dan atau hibah dari Provinsi DKI Jakarta.

3.6.3. Pendanaan melalui Creative Financing

Selama ini Pemerintah Daerah mengandalkan dana pemerintah berupa APBN, APBD I dan APBD II untuk membiayai pembangunan daerah. Perolehan sumber pembiayaan yang bersifat konvensional tersebut menyebabkan daerah memiliki kapasitas fiskal yang terbatas dalam penyediaan infrastruktur. Perlu adanya upaya mendapatkan alternatif pembiayaan lainnya melalui creative financing. Creative financing adalah paradigma baru dalam membiayai kebutuhan pembangunan, sehingga pembiayaan infrastruktur tidak hanya dibebankan APBN dan APBD, beberapa jenis creative financing adalah:

- a. Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)
- b. Pinjaman Daerah
Pinjaman daerah bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah Lain, Institusi Perbankan dan Non Perbankan.
- c. Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

Obligasi Daerah adalah pinjaman yang bersumber dari masyarakat untuk pembiayaan infrastruktur yang berpotensi menghasilkan pendapatan untuk APBD dan atau memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024, penerbitan obligasi dan/atau sukuk daerah dilakukan dalam rangka:

- a. pembiayaan pembangunan Infrastruktur Daerah;
- b. pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
- c. penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
- d. PINA (pembiayaan Infrastruktur non anggaran Pemerintah)
Pembiayaan infrastruktur strategis yang memiliki nilai komersil untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
- e. Wakaf
Wakaf adalah memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda dari seseorang untuk dimanfaatkan selamanya dan atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- f. Dana Sosial Umat
Dana sosial umat adalah dana yang dikumpulkan dari anggota suatu komunitas yang biasanya berlandaskan agama atau kepercayaan untuk tujuan membantu sesama anggota komunitas yang membutuhkan atau untuk kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas meliputi zakat, infaq dan sodaqoh, wakaf, sumbangan sukarela, kolekte, persembahan khusus, atau hasil pengumpulan dana lainnya.

g. KPBU

Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Karakteristik proyek KPBU meliputi:

- 1) Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha.
- 2) Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
- 3) Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
- 4) Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
- 5) Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

h. Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah

Kerjasama pemanfaatan aset daerah adalah perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak lain (swasta, BUMN, BUMD, atau pihak lain) untuk memanfaatkan aset daerah, seperti tanah dan bangunan, dalam jangka waktu tertentu untuk kepentingan bersama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, optimalisasi aset, serta mendukung kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.

Bentuk-bentuk Pemanfaatan Aset Daerah:

- 1) Sewa adalah pihak lain menyewa aset daerah dengan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah.

- 2) Pinjam Pakai adalah aset daerah dipinjamkan kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu tanpa adanya pembayaran.
- 3) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pihak lain memanfaatkan aset daerah untuk kegiatan tertentu, dan hasilnya dibagi antara pemerintah daerah dan pihak tersebut.
- 4) Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG) adalah pihak lain membangun di atas lahan aset daerah, kemudian bangunan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah setelah selesai dibangun, dan pihak lain dapat memanfaatkan bangunan tersebut untuk jangka waktu tertentu.
- 5) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), adalah pemanfaatan aset daerah untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat

Terdapat beberapa rencana pembangunan Infrastruktur strategis Kota Bogor 5 (lima) tahun ke depan yang sangat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Bogor, serta sekaligus berdampak pada peningkatan penerimaan bagi APBD Kota Bogor yang dapat di danai melalui berbagai pola Creative financing, sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15 Rencana Pembangunan Infrastruktur Melalui Skema Creative Financing

No	Pembangunan Infrastruktur	Lokasi	Rencana Anggaran (Rp)
1	Pembangunan stadion pajajaran	Kota Bogor	Rp 110.000.000.000
2	Pembangunan transportasi berbasis rel	Kota Bogor	Rp1.600.000.000.000
3	IPAL Kayu Manis	Kota Bogor	Rp1.700.000.000.000
4	Pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kota Bogor	Kota Bogor	Rp 640.000.000.000
5	Pengembangan TOD Bubulak	Kota Bogor	Menyesuaikan dengan dokumen perencanaan
6	Pengembangan moda, sarana dan prasarana transportasi umum masal berbasis jalan	Kota Bogor	Menyesuaikan dengan dokumen perencanaan
7	Pengembangan kawasan pusat bisnis dan wisata di Jl. Suryakencana	Kota Bogor	Menyesuaikan dengan dokumen perencanaan

Sumber : Hasil Analisis Bapperida (2025)

BAB 4

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur substansi yang harus disampaikan dalam dokumen RPJMD. Bagian Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Secara detail, program perangkat daerah dalam RPJMD Kota Bogor 2025-2029 ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					175.991.19 1.694,00		184.994.97 9.788,00		188.930.35 6.319,00				
Meningkatnya Partisipasi Sekolah pada anak usia 5-6 tahun	APS 5-6 Tahun	Persen	66,75	74,00	175.991.19 1.694,00	74,95	184.994.97 9.788,00	75,20	188.930.35 6.319,00	75,40	198.580.67 8.092,00	75,50	198.581.57 8.092,00
Meningkatnya Partisipasi Sekolah pada anak usia 7-15 tahun	APS 7-15 Tahun	Persen	98,45	97,57		97,67		97,70		97,73		97,75	
Menurunnya angka putus sekolah	Persentase Anak Putus sekolah yang lulus paket A, Paket B, dan Paket C	Persen	NA	65,00		70,00		75,00		80,00		85,00	
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Inklusivitas Pendidikan PAUD	Capaian Rapor Pendidikan PAUD aspek inklusifitas dan kebinekaan	Persen	77,96	76,12		76,30		76,38		76,46		76,52	
	Capaian Rapor Pendidikan PAUD aspek pembelajaran yang membangun kemampuan pondasi	Persen	79,25	72,35		72,35		72,45		72,55		72,65	
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Inklusivitas Pendidikan SD	Capaian Rapor Pendidikan SD aspek Kualitas Pembelajaran SD	Persen	63,6	63,49		63,59		63,69		63,79		63,89	
	Capaian rapor pendidikan SD aspek Iklim Inklusivitas	Persen	58,85	61,36		63,86		66,36		68,86		71,36	
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Inklusivitas Pendidikan SMP	Capaian rapor pendidikan aspek Kualitas Pembelajaran SMP	Persen	83,34	84,95		85,05		85,15		85,25		85,35	
	Capaian rapor pendidikan SMP aspek Iklim Inklusivitas	Persen	59,02	61,42		63,82		66,22		68,62		71,02	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					453.096.43 9.247,00		13.596.269. 974,00		14.807.266. 407,00		16.508.862. 406,00		18.092.428. 375,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorintasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80,20	80,55	453.096.43 9.247,00	80,60	13.596.269. 974,00	80,65	14.807.266. 407,00	80,70	16.508.862. 406,00	80,75	18.092.428. 375,00
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00			
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	87,11	89,87		90,00		90,10		90,20		90,30	
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	inovasi	NA	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					527.699.57 5.318,00		525.687.82 6.466,00		515.779.12 4.614,00		539.723.73 1.432,00		561.221.46 1.646,00
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Jumlah Kematian Ibu	Orang	15,00	17,00	527.699.57 5.318,00	16,00	525.687.82 6.466,00	14,00	515.779.12 4.614,00	13,00	539.723.73 1.432,00	12,00	561.221.46 1.646,00
	Jumlah Kematian Balita	Orang	138,00	136,00		135,00		134,00		133,00		132,00	
	Prevalensi Penderita Hipertensi	Persen	10,27	8,70		9,00		9,30		9,60		9,90	
	Prevalensi Diabetes Melitus	Persen	2,50	2,08		2,13		2,16		2,19		2,20	
	Prevalensi ODGJ	Persen	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan keschatan sesuai standar	Persen	96,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Angka Keberhasilan Pengobatan TB	Persen	79,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
	Insiden rate HIV	Angka	0,17	0,17		0,17		0,17		0,17		0,16	
	Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	Persen	87,10	87,20		87,20		87,25		87,30		87,35	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	Persen	80,00	80,60		80,80		81,00		83,50		84,00	
	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	Rasio	0,67	0,67		0,68		0,68		0,68		0,68	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	NA	60,00		64,00		68,00		72,00		76,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen	95,60	95,80		95,90		96,00		96,10		96,20	
	Persentase keluarga yang di intervensi kesehatan melalui kunjungan rumah	Persen	90,00	94,50		95,00		95,50		96,00		96,50	
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Persen	24,00	54,00		59,00		74,00		89,00		100,00	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Capaian SPM RSUD Kota Bogor	Persen	93,30	94,28		94,29		94,30		94,31		94,32	
	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	Persen	0,06	≤ 3,3		≤ 3,3		≤ 3,3		≤ 3,3		≤ 3,3	
	Persentase lanjut usia yang mandiri	Persen	NA	75,00		80,00		85,00		90,00		90,00	
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Persen	NA	18.3		16.7		15.1		13.5		13.5	
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persen	NA	46,00		55,00		61,00		70,00		70,00	
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen	NA	66.1		67.9		69.7		80,00		81,00	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					3.893.604.808,00		4.116.718.823,00		4.363.616.540,00		4.636.897.177,00		4.920.359.828,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan yang sesuai dengan Kualifikasi yang dibutuhkan	Persen	NA	86,00		87,00		88,00		89,00		90,00	
	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Persen	95,50	95,60		95,70		95,80		95,90		96,00	
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Rasio	NA	7,18	3.893.604.808,00	7,19	4.116.718.823,00	7,20	4.363.616.540,00	7,21	4.636.897.177,00	7,22	4.920.359.828,00
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	Persen	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		4,00	
	Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					878.712.000,00		879.212.000,00		888.382.000,00		882.882.000,00		887.982.000,00
Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP IRT sesuai standar	Persen	11,66	27,00		34,67		42,33		50,00		51,00	
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	Persen	84,00	87,00		90,00		92,00		94,00		95,00	
	Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan	Persen	25,00	50,00		60,00		65,00		70,00		75,00	
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan persyaratan perizinan	Persen	100,00	100,00	878.712.000,00	100,00	879.212.000,00	100,00	888.382.000,00	100,00	882.882.000,00	100,00	887.982.000,00
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditinjaulanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu yang memenuhi standar kesehatan	Persen	55,00	65,00		65,00		68,00		70,00		72,00	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Persen	70,98	72,00		73,00		74,00		75,00		76,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					18.162.152.912,00		20.174.379.512,00		20.126.592.312,00		20.205.229.512,00		20.161.092.312,00
Meningkatnya perilaku hidup sehat dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	Persen	73,11	74,11		74,61		75,11		75,61		76,11	
	Persentase kelurahan siaga aktif mandiri	Persen	14,70	17,65	18.162.152.912,00	19,12	20.174.379.512,00	20,59	20.126.592.312,00	22,06	20.205.229.512,00	23,53	20.161.092.312,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					206.866.130.361,00		220.957.860.560,00		232.780.951.823,00		245.536.944.722,00		259.454.425.398,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	93,35	93,36		93,37		93,38		93,39		93,40	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	95,25	95,45	206.866.130.361,00	95,55	220.957.860.560,00	95,65	232.780.951.823,00	96,50	245.536.944.722,00	96,75	259.454.425.398,00
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	inovasi	NA	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM					1.050.000.000,00		1.000.000.000,00		1.250.000.000,00		1.200.000.000,00		1.450.000.000,00
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase rumah tangga yang telayanai sistem pengelolaan air minum	Persen	72,33	98,40	1.050.000.000,00	98,60	1.000.000.000,00	98,80	1.250.000.000,00	99,00	1.200.000.000,00	99,05	1.450.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					29.620.000.000,00		17.292.000.000,00		18.506.200.000,00		19.766.820.000,00		21.078.502.000,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga yang telayanai sistem pengelolaan air limbah domestik	Persen	79,43	81,00	29.620.000.000,00	81,66	17.292.000.000,00	82,49	18.506.200.000,00	83,31	19.766.820.000,00	84,00	21.078.502.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					41.334.779.200,00		43.800.000.000,00		46.900.000.000,00		50.110.000.000,00		54.441.000.000,00
Meningkatnya kuliatis sungai	Persentase Sungai yang berkondisi baik	Persen	85,73	86,65	41.334.779.200,00	87,10	43.800.000.000,00	87,65	46.900.000.000,00	88,10	50.110.000.000,00	88,65	54.441.000.000,00
Meningkatnya saluran irigasi yang berfungsi optimal	Persentase Irigasi yang berkondisi baik	Persen	54,65	56,65		57,65		58,65		59,65		60,65	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					244.949.365.210,40		365.695.897.780,91		286.739.315.210,40		196.684.540.210,40		301.376.047.933,40
Meningkatnya kualitas pembangunan, peningkatan dan preveservasi Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan yang ditangani sesuai dengan SK Jalan	Persen	90,03	90,05	244.949.365.210,40	90,06	365.695.897.780,91	90,07	286.739.315.210,40	90,08	196.684.540.210,40	90,09	301.376.047.933,40
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					14.531.685.600,00		16.700.000.000,00		18.200.000.000,00		18.700.000.000,00		19.200.000.000,00
Meningkatnya kualitas drainase	Persentase panjang drainase yang ditangani sesuai dengan SK Jalan	Persen	67,86	70,00	14.531.685.600,00	72,00	16.700.000.000,00	75,00	18.200.000.000,00	78,00	18.700.000.000,00	80,00	19.200.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		435.000.000,00		435.000.000,00
Meningkatnya kualitas penyelenggara n jasa konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	Persen	48,00	48,50	200.000.000,00	48,75	300.000.000,00	49,00	300.000.000,00	49,25	435.000.000,00	49,50	435.000.000,00
	Persentase pekerjaan konstruksi yang bernilai baik	Persen	83,94	84,04		84,08		84,13		84,18		84,23	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					950.000.000,00		1.600.000.000,00		800.000.000,00		900.000.000,00		700.000.000,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	Persen	58,70	60,00	950.000.00 0,00	61,00	1.600.000.0 00,00	62,00	800.000.00 0,00	63,00	900.000.00 0,00	64,00	700.000.00 0,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					20.610.364. 000,00		36.512.546. 000,00		38.410.364. 000,00		182.106.00 0.000,00		181.910.36 4.000,00
Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan gedung	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung	Persen	n/A	30,00		30,00		30,00		32,50		35,00	
	Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin	Persen		45,00	20.610.364. 000,00	50,00	36.512.546. 000,00	55,00	38.410.364. 000,00	60,00	182.106.00 0.000,00	65,00	181.910.36 4.000,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					500.000.00 0,00		850.000.00 0,00		500.000.00 0,00		850.000.00 0,00		500.000.00 0,00
Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RTR (RTRWK/RDTRK)	Persen	n/A	33,33	500.000.00 0,00	55,56	850.000.00 0,00	66,67	500.000.00 0,00	88,89	850.000.00 0,00	100,00	500.000.00 0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.805.000. 000,00		20.340.000. 000,00		21.375.000. 000,00		22.400.000. 000,00		39.055.000. 000,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,10	86,50		87,00		87,50		88,00		88,50	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85,00	86,00	19.805.000. 000,00	87,00	20.340.000. 000,00	88,00	21.375.000. 000,00	89,00	22.400.000. 000,00	90,00	39.055.000. 000,00
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	inovasi	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					9.226.606.5 38,00		13.380.000. 000,00		10.930.000. 000,00		11.980.000. 000,00		13.000.000. 000,00
Terbangunnya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan	Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah	Persen	58,33	66,67	9.226.606.5 38,00	75,00	13.380.000. 000,00	75,26	10.930.000. 000,00	83,25	11.980.000. 000,00	83,33	13.000.000. 000,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					91.353.948. 000,00		100.584.53 8.400,00		110.548.87 8.400,00		121.584.07 8.400,00		83.728.638. 400,00
Meningkatnya ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase panjang jalan perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatk an/dipelihara	Persen	NA	20,00	91.353.948. 000,00	35,00	100.584.53 8.400,00	55,00	110.548.87 8.400,00	75,00	121.584.07 8.400,00	100,00	83.728.638. 400,00
	Persentase drainase perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatk an/dipelihara	Persen	NA	20,00		35,00		55,00		75,00		100,00	
	Persentase Luas Makam siap pakai yang di kelola Pemerintah	Persen	NA	21,92		22,51		23,10		23,70		24,29	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					11.813.252. 055,00		22.214.711. 608,00		23.895.182. 769,00		24.968.701. 046,00		15.415.671. 150,00
Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni dan berkurangnya luas kawasan kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di dalam kawasan kumuh kewenangan kota yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah	Persen	20,00	52,00	11.813.252. 055,00	67,00	22.214.711. 608,00	82,00	23.895.182. 769,00	98,00	24.968.701. 046,00	100,00	15.415.671. 150,00
	Persentase panjang jalan di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatk an/dipelihara	Persen	15,85	18,41		24,31		30,22		36,12		42,03	
	Persentase drainase di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatk an/dipelihara	Persen	16,58	11,39		15,65		19,91		24,8		28,44	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					9.481.394.0 74.00		10.529.006. 972.00		11.121.908. 007.00		12.094.099. 293.00		13.112.509. 840.00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Optimalisasi pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Persentase warga negara korban bencana yang menghuni rumah layak huni	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase warga negara yang terkena relokasi program pemerintah yang di fasilitasi untuk menghuni rumah layak huni	Persen	100,00	100,00	9.481.394.074,00	100,00	10.529.006.972,00	100,00	11.121.908.007,00	100,00	12.094.099.293,00	100,00	13.112.509.840,00
	Persentase tingkat hunian rusunawa oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Persen	90,00	95,37		96,91		97,88		99,03		100,00	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					22.241.160.000,00		57.860.000.000,00		57.860.000.000,00		57.700.000.000,00		64.640.000.000,00
Meningkatnya akses terhadap hunian layak huni di kawasan pencegahan kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di luar kawasan kumuh kewenangan kota yang mendapat bantuan perbaikan rumah	Persen	NA	10,00	22.241.160.000,00	31,00	57.860.000.000,00	52,00	57.860.000.000,00	74,00	57.700.000.000,00	100,00	64.640.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					46.869.827.466,00		51.224.042.629,00		56.044.446.892,00		61.346.891.584,00		66.514.080.743,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,90	87,21		87,40		87,90		88,40		88,90	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	90,50	92,00	46.869.827.466,00	92,50	51.224.042.629,00	93,00	56.044.446.892,00	93,50	61.346.891.584,00	94,00	66.514.080.743,00
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	inovasi	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (SATPOL PP)					45.985.000.000,00		46.215.000.000,00		46.427.000.000,00		46.632.000.000,00		47.760.000.000,00
Meningkatnya akuntabilitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	87,26	87,50		87,55		87,60		87,65		87,70	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	92,45	93,00	45.985.000.000,00	93,25	46.215.000.000,00	93,50	46.427.000.000,00	93,75	46.632.000.000,00	94,00	47.760.000.000,00
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi		1 Inovasi		1 Inovasi		1 Inovasi		1 Inovasi	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.905.252.000,00		2.037.000.000,00		2.597.000.000,00		2.547.000.000,00		2.547.000.000,00
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100,00	100,00	1.460.252.000,00	100,00	1.512.000.000,00	100,00	1.962.000.000,00	100,00	1.862.000.000,00	100,00	1.862.000.000,00
Meningkatnya kompetensi anggota Satpol PP dan Linmas	Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	Persen	NA	62,10	130.000.000,00	74,70	195.000.000,00	87,30	195.000.000,00	97,20	245.000.000,00	100,00	245.000.000,00
Meningkatnya kualitas penegakan produk hukum daerah	Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persen	100,00	100,00	315.000.000,00	100,00	330.000.000,00	100,00	440.000.000,00	100,00	440.000.000,00	100,00	440.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BPBD)													
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	75,15	80,90		80,95		81,00		81,05		81,1	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persentase	N/A	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
	Nilai Hasil Survey Kepuasan	Angka	85,62	87,62	8.024.560.487	88,62	12.337.804.248	89,62	12.603.602.648	90,62	13.119.486.148	91,62	13.999.057.548
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	Inovasi/tahun	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.070.758.653,00		2.736.748.153,00		2.693.912.580,00		2.580.920.001,00		2.544.632.826,00
Optimalisasi Upaya Pengelolaan	Persentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana	Persentase	100,00	100,00	2.070.758.653,00	100,00	2.736.748.153,00	100,00	2.693.912.580,00	100,00	2.580.920.001,00	100,00	2.544.632.826,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Resiko Bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	Persentas e	36,76	47,06		52,94		58,82		64,71		70,59	
	Persentase SPAB	Persentas e	N/A	0,57		1,15		1,72		2,3		2,87	
	Persentase ketersediaan data kelurahan yang berada di kawasan resiko bencana tinggi	Persentas e	N/A	21,43		42,86		64,29		82,14		100,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (DAMKAR)					23.820.000. 000,00		23.311.000. 000,00		19.870.000. 000,00		23.670.000. 000,00		18.711.000. 000,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorintasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	81,40	82,05		82,10		82,15		82,20		82,25	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85,25	97,50	23.820.000. 000,00	97,50	23.311.000. 000,00	98,00	19.870.000. 000,00	98,25	23.670.000. 000,00	90,25	18.711.000. 000,00
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikemban gkan setiap tahun	inovasi	NA	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					240.000.00 0,00		165.000.00 0,00		165.000.00 0,00		165.000.00 0,00		165.000.00 0,00
Optimalisasi pelaksanaan Pencegahan, Penanggulan n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran	Persen	50,00	79,41		94,12		100,00		100,00		100,00	
	Persentase SDM Aparatur Damkar dan Penyelamatan yang ditingkatkan Kompetensinya	Persen	20,00	40,00	240.000.00 0,00	50,00	165.000.00 0,00	60,00	165.000.00 0,00	70,00	165.000.00 0,00	80,00	165.000.00 0,00
	Rata Rata respon time penanganan kebakaran	Menit	10,65	10,50		10,50		10,45		10,45		10,40	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.777.837. 086,00		17.340.840. 454,00		18.766.979. 244,00		20.558.183. 354,00		20.588.183. 354,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	84,16	84,21		84,26		84,31		84,36		84,41	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	NA	100,00	13.777.837. 086,00	100,00	17.340.840. 454,00	100,00	18.766.979. 244,00	100,00	20.558.183. 354,00	100,00	20.588.183. 354,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	88,75	89,25		89,75		90,25		90,75		91,25	
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	inovasi	NA	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					4.210.499.400,00		4.461.499.400,00		4.241.518.861,00		3.882.242.818,00		4.618.242.818,00
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi masyarakat pemerlu Kesejahteraan Sosial	Persentase Pelayanan PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.	Persen	1,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase penyandang lansia terlanjar, disabilitas dan korban tindak kekerasan yg direhabilitasi	Persen	NA	100,00	4.210.499.400,00	100,00	4.461.499.400,00	100,00	4.241.518.861,00	100,00	3.882.242.818,00	100,00	4.618.242.818,00
PROGRAM PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.802.273.600,00		1.827.975.040,00		1.784.982.726,000		1.907.485.194,00		1.941.685.194,000
Optimalisasi perlindungan sosial bagi Anak Terlanjar	Persentase Penanganan perlindungan sosial bagi Anak Terlanjar	Persen	1,00	100,00	156.468.000,00	100,00	166.468.000,00	100,00	189.326.280,000	100,00	208.258.908,00	100,00	224.258.908,000
Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat pemerlu kesejahteraan sosial	Persentase Penurunan PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persen	0,66	11,00	469.285.000,00	16,19	469.285.000,00	21,70	533.416.400,000	27,00	586.758.040,00	33,00	587.958.040,000
Meningkatnya keterpaduan dan ketepatan sasaran intervensi program pengentasan kemiskinan	Persentase data Kemiskinan yang tervalidasi	Persen	16,60	17,75		38,31		58,87		79,43		100,00	
	Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan	Persen	45,07	63,38	1.176.520.600,00	72,53	1.192.222.040,00	81,69	1.062.240.046,000	90,84	1.112.468.246,00	100,00	1.129.468.246,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					363.358.400,00		415.078.400,00		439.324.864,00		483.257.349,40		483257349,40

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Persentase PSKS kelembagaan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	43,90	62,00		70,73		80,49		90,24		100,00	
	Persentase PSKS Perseorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	16,80	32,92	363.358.40 0,00	49,38	415.078.40 0,00	65,84	439.324.86 4,00	82,30	483.257.34 9,40	98,76	483.257.34 9,40
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					970.275.50 0,00		1.013.075.5 00,00		1.247.967.8 55,00		1.374.564.6 40,00		1.381.564.6 40,00
Optimalisasi perlindungan sosial bagi masyarakat korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	970.275.50 0,00	100,00	1.013.075.5 00,00	100,00	1.247.967.8 55,00	100,00	1.374.564.6 40,00	100,00	1.381.564.6 40,00
	Persentase Tagana Aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					3.206.355.7 24,00		3.849.240.0 88,00		4.288.027.8 40,00		4.773.666.8 13,00		5.312.136.6 63,00
Meningkatnya Keterbukaan Kesempatan Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	94.45	94.80	3.206.355.7 24,00	94.85	3.849.240.0 88,00	94.90	4.288.027.8 40,00	95.00	4.773.666.8 13,00	95.10	5.312.136.6 63,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					5.653.314.6 00,00		7.732.500.0 00,00		8.028.000.0 00,00		7.818.000.0 00,00		7.725.000.0 00,00
Meningkatnya kompetensi Para Pencari Kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi	Persen	100,00	100,00	5.653.314.6 00,00	100,00	7.732.500.0 00,00	100,00	8.028.000.0 00,00	100,00	7.818.000.0 00,00	100,00	7.725.000.0 00,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Jumlah Perusahaan yang Terfasilitasi Tenaga Kerja yang Produktif	Persen	8,08	40,00		43,00		46,00		50,00		53,00	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.876.426.800,00		1.876.426.800,00		1.854.778.600,00		1.893.433.600,00		1.921.743.600,00
Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan kualitas layanan penyelesaian kasus di Sektor Ketenagakerjaan	Persentase rekomendasi LKS Tripartit yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Persen	100,00	100,00	1.876.426.800,00	100,00	1.822.123.600,00	100,00	1.854.778.600,00	100,00	1.893.433.600,00	100,00	1.921.743.600,00
	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.036.117.789,00		17.411.000.000,00		15.373.000.000,00		13.195.000.000,00		13.992.000.000,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka	88,70	89,50		89,90		90,30		90,70		91,10	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	96,98	97,17	14.036.117.789,00	97,21	17.411.000.000,00	97,23	15.373.000.000,00	97,27	13.195.000.000,00	97,31	13.992.000.000,00
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi/tahun	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.051.522.294,00		12.666.059.903,00		13.186.677.569,00		14.419.357.003,00		15.854.658.624,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka	89,85	90,15		90,30		90,45		90,60		90,75	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	100,00	100,00	11.051.522.294,00	100,00	12.666.059.903,00	100,00	13.186.677.569,00	100,00	14.419.357.003,00	100,00	15.854.658.624,00
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	90,00	90,50		90,75		91,00		91,25		91,50	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
peningkatan kualitas pelayanan	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikemban gkan setiap tahun	Inovasi	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					828.517.62 8,00		1.420.219.7 55,00		1.652.912.9 55,00		1.796.512.9 55,00		1.965.512.9 55,00
Optimalisasi pengarusutam aan gender	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender	Persen	100,00	100,00	828.517.62 8,00	100,00	1.420.219.7 55,00	100,00	1.652.912.9 55,00	100,00	1.796.512.9 55,00	100,00	1.965.512.9 55,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					118.082.60 0,00		679.454.68 2,00		758.719.70 0,00		824.881.00 0,00		925.307.80 0,00
Optimalisasi penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100000 penduduk perempuan)	Persen	11,50	11,48	118.082.60 0,00	11,47	679.454.68 2,00	11,46	758.719.70 0,00	11,45	824.881.00 0,00	11,44	925.307.80 0,00
PROGRAM PENGELOLA SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					111.691.00 0,00		292.820.00 0,00		351.384.00 0,00		421.660.80 0,00		505.992.96 0,00
Optimalisasi dan integrasi pengelolaan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak	Persen	100,00	100,00	111.691.00 0,00	100,00	292.820.00 0,00	100,00	351.384.00 0,00	100,00	421.660.80 0,00	100,00	505.992.96 0,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					623.974.12 2,00		735.035.13 9,00		821.521.16 0,00		911.652.37 6,00		1.005.793.2 73,00
Tersedianya layanan konseling/kons ultasi oleh PUSPAGA	Persentase layanan konseling /konsultasi yang terlayani PUSPAGA	Persen	100,00	100,00	623.974.12 2,00	100,00	735.035.13 9,00	100,00	821.521.16 0,00	100,00	911.652.37 6,00	100,00	1.005.793.2 73,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK					1.985.207.5 74,00		1.202.138.1 50,00		1.305.133.4 45,00		1.639.027.3 29,00		1.615.089.3 78,00
Terpenuhinya Hak Anak	1 Skor pada Klaster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan) KLA	Angka	81,83	104,00		105,00		107,00		110,00		110,00	
	2 Skor pada Klaster2 (Perlindungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) KLA	Angka	115,80	135,00	1.985.207.5 74,00	136,00	1.202.138.1 50,00	138,00	1.305.133.4 45,00	142,00	1.639.027.3 29,00	142,00	1.615.089.3 78,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	3 Skor pada klaster 3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan) KLA	Angka	133,50	145,00		147,00		149,00		149,00		149,00	
	4 Skor pada Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) KLA	Angka	102,00	102,50		103,00		104,00		106,00		106,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					197.852.10 0,00		342.743.88 2,00		418.274.30 0,00		468.073.80 0,00		468.073.80 0,00
Terlindunginya Anak	Skor pada Klaster V (Perlindungan Khusus Anak)	Angka	155,00	157,00	197.852.10 0,00	157,00	342.743.88 2,00	160,00	418.274.30 0,00	160,00	468.073.80 0,00	161,00	468.073.80 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					302.000.00 0,00		70.000.000, 00		70.000.000, 00		70.000.000, 00		70.000.000, 00
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	poin	89,80	90,10		90,20		90,30		90,40		90,50	
	Ketersediaan energi	kcal/kapita/hari	2460,00	2400,00	302.000.00 0,00	2400,00	70.000.000, 00	2400,00	70.000.000, 00	2400,00	70.000.000, 00	2400,00	70.000.000, 00
	Ketersediaan Protein	gram/kapita/hari	81,87	63,00		63,00		63,00		63,00		63,00	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00
Meningkatnya kualitas pangan segar asal tumbuhan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Persen	92,39	95,6	25.000.000, 00	95,7	25.000.000, 00	95,8	25.000.000, 00	95,9	25.000.000, 00	96,00	25.000.000, 00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00		100.000.00 0,00
Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU)	Persen	7,98	7,34	100.000.00 0,00	6,96	100.000.00 0,00	6,10	100.000.00 0,00	5,83	100.000.00 0,00	5,53	100.000.00 0,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.613.068. 550,00		161938369 78,00		168036388 26,00		174439257 68,00		181162220 56,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorintasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	89,55	89,60	15.613.068. 550,00	89,65	16.193.836. 978	89,70	16.803.638. 826	89,75	17.443.925. 768	89,8	18.116.222. 056	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00				
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	88,23	89,5		90,00		90,5		91,00		91,5		
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikemban gkan setiap tahun	Inovasi	NA	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						417.086.10 0,00		125.000.00 0,00		150.000.00 0,00		175.000.00 0,00		200.000.00 0,00
Meningkatnya kualitas administrasi pertahanan	Persentase Sengketa Tanah yang difasilitasi sesuai SOP	Persen	100,00	100,00	417.086.10 0,00	100,00	125.000.00 0,00	100,00	150.000.00 0,00	100,00	175.000.00 0,00	100,00	200.000.00 0,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						420.000.00 0,00		400.000.00 0,00				350.000.00 0,00		350.000.00 0,00
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	Persen	100,00	40,00	420.000.00 0,00	60,00	400.000.00 0,00	-		80,00	350.000.00 0,00	100,00	350.000.00 0,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						1.439.999.6 16,00		600.000.00 0,00		650.000.00 0,00		600.000.00 0,00		600.000.00 0,00
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	Persen	70,00	70,09	1.439.999.6 16,00	70,12	600.000.00 0,00	70,21	650.000.00 0,00	70,40	600.000.00 0,00	70,49	600.000.00 0,00	
	Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	Persen	75,00	76,67		77,78		78,89		80,00		81,11		

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	Persen	0,01	0,02		0,03		0,04		0,05		0,06	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					168.988.00 0,00		300.000.00 0,00		300.000.00 0,00		300.000.00 0,00		300.000.00 0,00
Meningkatnya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah yang terkelola	Persen	80,00	82,00	168.988.00 0,00	83,00	300.000.00 0,00	84,00	300.000.00 0,00	85,00	300.000.00 0,00	86,00	300.000.00 0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					303.000.00 0,00		300.000.00 0,00		300.000.00 0,00		300.000.00 0,00		300.000.00 0,00
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	58,00	58,45	303.000.00 0,00	58,58	300.000.00 0,00	59,71	300.000.00 0,00	60,84	300.000.00 0,00	61,04	300.000.00 0,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					800.000.00 0,00		1.025.000.0 00,00		1.025.000.0 00,00		1.025.000.0 00,00		1.025.000.0 00,00
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga/ Kegiatan/Usaha Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	15,00	17,30	800.000.00 0,00	17,35	1.025.000.0 00,00	17,40	1.025.000.0 00,00	17,60	1.025.000.0 00,00	17,80	1.025.000.0 00,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					550.000.00 0,00		600.000.00 0,00		600.000.00 0,00		700.000.00 0,00		750.000.00 0,00
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga yang melakukan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persen	22,18	22,22	550.000.00 0,00	22,24	600.000.00 0,00	22,26	600.000.00 0,00	22,30	700.000.00 0,00	22,32	750.000.00 0,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					50.000.000, 00		50.000.000, 00		50.000.000, 00		50.000.000, 00		159.878.30 0,00
Meningkatnya responsivitas penanganan pengaduan lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	Persen	100,00	100,00	50.000.000, 00	100,00	50.000.000, 00	100,00	50.000.000, 00	100,00	50.000.000, 00	100,00	159.878.30 0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					18.204.371. 100,00		13.220.000. 000,00		13.950.000. 000,00		14.750.000. 000,00		15.650.000. 000,00
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pengolahan sampah di sumber	Persentase sampah yang terkelola di TPS-3R dan Bank Sampah	Persen	66,95	67,13	18.204.371. 100,00	67,23	13.220.000. 000,00	67,33	13.950.000. 000,00	67,43	14.750.000. 000,00	67,53	15.650.000. 000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI					24.091.067. 620,00		35.966.601. 430,00		39.513.261. 573,00		43.414.587. 730,00		48.954.871. 806,00
Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang	Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dibangun	Ha	124,4	126,20	24.091.067. 620,00	127,20	35.966.601. 430,00	128,00	39.513.261. 573,00	128,80	43.414.587. 730,00	129,80	48.954.871. 806,00
	Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dikelola dengan baik"	Ha	116,53	125,20		126,20		127,20		128,00		128,80	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					108.982.58 1.239,00		108.947.42 0.000,00		111.414.42 0.000,00		113.923.84 5.000,00		125.418.00 0.007,00
Meningkatnya akuntabilitas	Nilai SAKIP Peranekat Daerah	Angka	89,50	89,65		89,70		89,75		89,80		89,85	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	3,61	3,62	108.982.581.239,00	3,63	108.947.420.000,00	3,64	111.414.420.000,00	3,65	113.923.845.000,00	3,66	125.418.000.007,00
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							19492859228,00		20034106228,00		20227829628,00		20453339628,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	89,55	89,60		89,65		89,70		89,75		89,90	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	94,66	95,16	14.967.454.503	95,66	19.492.859.228	96,16	20.034.106.228	96,66	20.227.829.628	97,16	20.453.339.628
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	NA	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					2780344000,00		3857208800,00		3739228800,00		3812208800,00		3643228800,00
Meningkatnya Kualitas layanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	0,06	8,41		9,89		11,37		12,86		13,34	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	0,80	80,82	2.780.344.000	81,59	3.857.208.800	82,36	3.739.228.800	83,13	3.812.208.800	83,90	3.643.228.800
PROGRAM PENCATATAN SIPIL					149501600,00		173056000,00		195056000,00		215056000,00		237000000,00
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun	Persen	0,94	97,97		98,22		98,47		98,72		98,97	
	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	0,60	100,00	149.501.600	100,00	173.056.000	100,00	195.056.000	100,00 Persen	215.056.000	100,00	237.000.000
	Persentase akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	Persen	0,62	68,09		69,67		71,25		72,83		74,41	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi penduduk yang bercerai	Persen	0,63	55,56		57,71		59,86		62,01		64,16	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					600952442,00		786402500,00		827427300,00		839027300,00		860527300,00
Meningkatnya pemanfaatan pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	47.22	57,00	600.952.442	58,00	786.402.500	59,00	827.427.300	60,00	839.027.300	61,00	860.527.300
	Persentase pengelolaan profil kependudukan	Persen	1,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA													
Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Rata-rata Nilai Skor EPDESKEKEL	Angka	369,00	371,00	170.305.700	372,00	350.000.000	373,00	350.000.000	374,00	375.000.000	375,00	375.000.000
	Rata-rata Nilai skor PRODESKEKEL	Angka	0,72	0,74		0,76		0,78		0,80		0,82	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT													
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah	Persentase Lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan kelurahan yang aktif	Persen	65,00	0,00	0	70,00	150.000.000	72,05	175.000.000	75,00	180.000.000	77,94	200.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.306.235.000,00		446.000.000,00		446.000.000,00		446.000.000,00		446.000.000,00
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pendampingan keluarga	Persentase kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL PIK-R dan UPPKA yang aktif	Persen	60,50	70,00	1.306.235.000,00	70,25	446.000.000,00	70,50	446.000.000,00	70,70	446.000.000,00	70,75	446.000.000,00
	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Angka	86,40	88,30		89,20		89,90		90,70		91,30	
	Indeks Lansia Berdaya	Angka	55,20	56,00		56,40		56,70		57,10		57,50	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.338.820.050,00		1.694.640.000,00		1.684.680.055,00		1.829.880.000,00		1.829.880.000,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kebijakan pembangunan berbasis kependudukan	Persentase Realisasi Rencana Kebijakan Pengendalian Kependudukan	Persen	NA	40,00	1.338.820.0 50,00	60,00	1.694.640.0 00,00	80,00	1.684.680.0 55,00	100,00	1.829.880.0 00,00	100,00	1.829.880.0 00,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.788.517.0 60,00		9.074.701.0 00,00		9.159.420.0 00,00		9.243.701.0 00,00		9.248.701.0 00,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorintasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	86,20	87,05	9.788.517.0 60,00	87,10	9.074.701.0 00,00	87,15	9.159.420.0 00,00	87,20	9.243.701.0 00,00	87,25	9.248.701.0 00,00
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	95,00	100,00		100,00		100,00		100,00			
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	92,25	92,27		92,28		92,29		92,30		92,30	
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikemban gkan setiap tahun	Inovasi	NA	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA					4.659.400.0 00,00		4.905.450.0 00,00		4.966.650.0 00,00		5.057.450.0 00,00		5.244.250.0 00,00
Meningkatnya kesertaan ber-KB	Persentase Peserta KB Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Persen	20,01	20,07	4.659.400.0 00,00	20,09	4.905.450.0 00,00	20,10	4.966.650.0 00,00	20,13	5.057.450.0 00,00	20,13	5.244.250.0 00,00
	ASFR (Age Specific Fertility Rate) Tingkat Kesuburan Usia Spesifik 15-19 Tahun	Per 1000 Remaja	9,9	9,09		9,08		9,07		9,06		9,05	
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persen	16,1	15,8		15,6		15,5		15,3		15,2	
	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan dalam 42 hari pascapersalinan	Persen	41	41,1		41,15		41,2		41,25		41,3	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					88.920.878. 992.00		95.386.985. 271.00		102.061.75 3.121.00		109.295.88 0.705.00		117.260.17 4.853.00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,50	87,50	88.920.878.992,00	88,50	95.386.985.271,00	89,50	102.061.753.121,00	90,50	109.295.880.705,00	91,50	117.260.174.853,00
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	90,86	92,86		93,86		94,86		95,86		96,86	
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	NA	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					77.967.964.516,00		92.108.220.234,00		86.910.093.698,00		84.634.587.244,00		86.285.730.313,00
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi, Manajemen Lalu Lintas dan Pelayanan Angkutan Umum	Persentase tingkat keselamatan jalan	Persen	N/A	45,00	77.967.964.516,00	50,00	92.108.220.234,00	55,00	86.910.093.698,00	60,00	84.634.587.244,00	65,00	86.285.730.313,00
	Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan	Persen	N/A	45,00		50,00		55,00		60,00		65,00	
	Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik	Persen	85,00	89,00		90,00		91,00		92,00		93,00	
	Persentase angkutan umum yang laik jalan dan beroperasi	Persen	93,97	94,50		95,00		95,50		96,00		96,50	
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					-		200.000.000,00		-		-		-
Meningkatnya pengelolaan perlintasan Kereta Api dalam Daerah Kota	Persentase penetapan kebijakan rencana induk perkeretaapian dan turunannya	Persen	0,00	0,00	-	100,00	200.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						16.946.435.666,00		25.170.000.000,00		27.048.000.000,00		29.094.300.000,00	31.325.730.000,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	89,90	90,55	16.946.435.666,00	90,60	25.170.000.000,00	90,65	27.048.000.000,00	90,70	29.094.300.000,00	90,75	31.325.730.000,00
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	86,50	87,50		88,50		89,50		90,50		91,50	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
pada peningkatan kualitas pelayanan	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	NA	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.831.630.072,00		7.827.000.000,00		8.077.000.000,00		8.327.000.000,00		8.577.000.000,00
Meningkatnya respon dan penyebaran informasi publik	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	Persen	57,54	70,05	3.831.630.072,00	70,10	7.827.000.000,00	70,15	8.077.000.000,00	70,20	8.327.000.000,00	70,25	8.577.000.000,00
	Persentase Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi	Persen	94,08	94,10		94,11		94,12		94,13		94,14	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					21.708.319.294,00		30.018.200.000,00		21.372.800.000,00		20.757.800.000,00		20.672.800.000,00
Meningkatnya kebijakan, tata kelola dan manajemen Pemerintahan Digital	Nilai Aspek Tata Kelola dan Manajemen	Angka	NA	2,60	21.708.319.294,00	2,60	30.018.200.000,00	2,63	21.372.800.000,00	2,63	20.757.800.000,00	2,65	20.672.800.000,00
	Nilai Aspek Teknologi Digital	Angka	NA	2,75		2,75		2,78		2,78		2,81	
	Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Angka	NA	1,80		1,80		1,83		1,83		1,86	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.096.386.051,00		19.669.778.855,00		20.571.514.102,00		21.085.844.501,00		22.673.345.092,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	73,10	83,30	17.096.386.051,00	83,50	19.669.778.855,00	83,60	20.571.514.102,00	83,70	21.085.844.501,00	83,80	22.673.345.092,00
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	89,78	89,25		89,26		89,27		89,28		89,29	
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi/tahun	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
Meningkatnya pelayanan Izin Usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi USP yang mematuhi ketentuan perijinan	Persen	60,00	80,00	20.000.000,00	85,00	20.000.000,00	88,00	20.000.000,00	90,00	40.000.000,00	93,00	40.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pemeriksanaan koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	11,32	12,26	400.000.000,00	13,32	500.000.000,00	14,38	500.000.000,00	15,43	600.000.000,00	16,49	700.000.000,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00
Meningkatnya penilaian kesehatan Koperasi	Persentase Koperasi yang Sehat	Persen	17,05	17,16	250.000.000,00	18,72	250.000.000,00	20,28	250.000.000,00	21,84	300.000.000,00	23,40	350.000.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					1.000.000.000,00		1.200.000.000,00		1.400.000.000,00		1.600.000.000,00		1.800.000.000,00
Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	Persen	48,35	53,33	1.000.000.000,00	56,57	1.200.000.000,00	60,00	1.400.000.000,00	63,33	1.600.000.000,00	66,67	1.800.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					1.600.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.800.000.000,00
Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Persen	32,11	9,36	1.600.000.000,00	10,92	1.700.000.000,00	11,70	1.700.000.000,00	12,48	1.700.000.000,00	13,26	1.800.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					670.053.000,00		690.000.000,00		790.000.000,00		940.000.000,00		940.000.000,00
Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai kelompok usaha	Persen	15,00	16,00	670.053.000,00	18,00	690.000.000,00	20,00	790.000.000,00	22,00	940.000.000,00	24,00	940.000.000,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
dan usaha ultra mikro	Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi kemitraan dan penguatan kelembagaan	Persen	4,00	4,40		4,60		4,80		5,00		5,20	
	Persentase rata rata peningkatan omzet usaha mikro per orang per tahun	Persen	4,20	4,40		4,60		4,80		5,00		5,20	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					178.888.00 0,00		210.000.00 0,00		210.000.00 0,00		260.000.00 0,00		460.000.00 0,00
Meningkatnya kualitas usaha dan pendapatan UMKM	Persentase peningkatan Jumlah wirausaha baru (UMKM start up)	Persen	N/A	2,00		2,30		2,60		2,90		3,20	
	Persentase produk UMKM Binaan yang meningkat omzet penjualannya	Persen	N/A	4,40	178.888.00 0,00	4,60	210.000.00 0,00	4,80	210.000.00 0,00	5,00	260.000.00 0,00	5,20	460.000.00 0,00
	Persentase pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital	Persen	N/A	7,00		8,00		9,00		10,00		11,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.593.885. 496,00		15.575.035. 162,00		16.723.764. 045,00		18.366.865. 816,00		20.008.479. 037,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorintasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP di Lingkup DPMPTSP	Angka	89.50	91.5		92.5		93.5		94.5		95.5	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	100,00	100,00	12.593.885. 496,00	100,00	15.575.035. 162,00	100,00	16.723.764. 045,00	100,00	18.366.865. 816,00	100,00	20.008.479. 037,00
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	86.25	88.25		89.25		90.25		91.25		92.25	
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	NA	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					218.095.35 0,00		600.000.00 0,00		430.000.00 0,00		455.000.00 0,00		480.000.00 0,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya Jumlah Kebijakan dan Program Kerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terimplementasi	Persentase peningkatan jumlah investor	Persen	NA	100,00	218.095.350,00	100,00	600.000.000,00	100,00	430.000.000,00	100,00	455.000.000,00	100,00	480.000.000,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					101.536.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		450.000.000,00
Tersedianya Data dan Informasi Potensi dan Peluang Investasi sebagai upaya pencapaian target realisasi investasi di Kota Bogor	Nilai Realisasi Investasi	Triliun	1975787979022,00	2.019.000.000.000	101.536.000,00	2.039.000.000.000	250.000.000,00	2.060.000.000.000	300.000.000,00	2.080.000.000.000	350.000.000,00	2.100.000.000.000	450.000.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					63.171.360,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal para Pelaku Usaha	Persen	NA	90,00	63.171.360,00	92,00	100.000.000,00	93,00	110.000.000,00	94,00	120.000.000,00	95,00	130.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					1.877.001.944,00		2.000.000.000,00		2.100.000.000,00		2.150.000.000,00		2.200.000.000,00
Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	Persen	98.40	100,00	1.877.001.944,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00	2.100.000.000,00	100,00	2.150.000.000,00	100,00	2.200.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					92.086.200,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	Persen	100,00	100,00	92.086.200,00	100,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
dalam Sistem Informasi													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.514.917.726,00		15.146.338.904,00		15.480.832.714,00		17.535.305.269,00		17.656.967.669,00
Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah sesuai target	Nilai SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	Angka	82,25	85,20		85,25		85,30		85,35		85,40	
	Tingkat Kepatuhan Pengeloan Keuangan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	93,86	94,30	17.514.917.726,00	94,35	15.146.338.904,00	94,43	15.480.832.714,00	94,53	17.535.305.269,00	94,62	17.656.967.669,00
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					381.295.033.000,00		222.261.659.800,00		193.839.955.000,00		62.243.135.800,00		250.387.945.800,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	1. Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR berstandar Nasional atau Internasional	Persen	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	2. Persentase Peningkatan Masyarakat yang menggunakan sarana prasarana Olahraga dikelola Dispora	Persen	NA	6,00	71.218.560.000,00	88,00	76.965.430.000,00	5,00	75.798.169.000,00	5,00	10.451.899.000,00	5,00	102.001.469.000,00
Meningkatnya kapasitas dan daya saing keolahraagaan	3. Persentase Atlet Berprestasi dari Keseluruhan Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	Persen	74,00	55,00		56,00		57,00		59,00		59,00	
	4. Persentase Perolehan Medali dengan Jumlah Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	Persen	NA	45,00	310.076.473.000,00	55,00	145.296.229.800,00	56,00	118.041.786.000,00	57,00	51.791.236.800,00	57,00	148.386.476.800,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2.592.726.120,00		2.753.438.700,00		2.161.375.500,00		1.978.177.000,00		2.478.177.000,00
Meningkatnya kapasitas dan	persentase pemuda yang aktif dalam	Persen	NA	22,00		30,30		30,32		30,35		30,50	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
daya saing pemuda	organisasi kepemudaan												
	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase pemuda yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan	Persen	NA	6,82	2.592.726.1 20,00	6,82	2.753.438.7 00,00	6,82	2.161.375.5 00,00	6,82	1.978.177.0 00,00	6,82	2.478.177.0 00,00
	Persentase Pemuda Pelopor Yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional	Persen	NA	35,00		0,10		0,10		0,13		100,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					990.000.00 0,00		1.200.000.0 00,00		1.200.000.0 00,00		1.200.000.0 00,00		1.200.000.0 00,00
Meningkatnya kapasitas dan daya saing pemuda	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	Persen	100,00	100,00	990.000.00 0,00	100,00	1.200.000.0 00,00	100,00	1.200.000.0 00,00	100,00	1.200.000.0 00,00	100,00	1.200.000.0 00,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					279.955.00 0,00		1.306.000.0 00,00		1.456.000.0 00,00		1.506.000.0 00,00		1.556.000.0 00,00
Meningkatnya pengelolaan satu data Indonesia dan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,70	2,75	279.955.00 0,00	2,78	1.306.000.0 00,00	2,80	1.456.000.0 00,00	2,83	1.506.000.0 00,00	2,85	1.556.000.0 00,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					1.544.028.7 18,00		4.191.000.0 00,00		3.916.000.0 00,00		3.901.000.0 00,00		9.886.000.0 00,00
Meningkatnya penerapan keamanan informasi di pemerintah kota	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan keamanan informasi	Persen	NA	85,71	1.544.028.7 18,00	88,57	4.191.000.0 00,00	91,43	3.916.000.0 00,00	94,29	3.901.000.0 00,00	100,00	9.886.000.0 00,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.514.986.800,00		3.009.427.000,00		3.009.427.000,00		3.317.213.200,00		3.117.213.200,00
Meningkatnya penyelenggaraan pengembangan kebudayaan	jumlah event seni budaya di Kota Bogor	event	54,00	58,00	1.514.986.800,00	61,00	3.009.427.000,00	65,00	3.009.427.000,00	70,00	3.317.213.200,00	74,00	3.117.213.200,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISONAL					61.000.000,00		400.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00
Meningkatnya jumlah pelaku dan lembaga kesenian tradisional dalam pelestarian seni dan budaya	Persentase lembaga seni tradisional yang dibina	Persen	48,80	60,00	61.000.000,00	66,60	400.000.000,00	73,80	300.000.000,00	77,70	300.000.000,00	84,40	300.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					40.000.000,00		40.000.000,00		497.000.000,00		140.000.000,00		147.000.000,00
Meningkatnya Pembinaan Sejarah	Persentase pelaku pelestari sejarah yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	12,60	15,80	40.000.000,00	17,80	40.000.000,00	19,80	497.000.000,00	21,80	140.000.000,00	23,80	147.000.000,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					861.000.000,00		846.000.000,00		758.000.000,00		770.000.000,00		782.000.000,00
Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase status ODCB menjadi CB	Persen	7,00	8,20	861.000.000,00	10,80	846.000.000,00	12,37	758.000.000,00	14,48	770.000.000,00	16,49	782.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					-		5.165.000.000,00		400.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00
Meningkatnya kunjungan ke Museum	jumlah kunjungan ke museum	orang	217.858,00	240.187,00	-	252.196,00	5.165.000.000,00	264.805,00	400.000.000,00	278.045,00	325.000.000,00	291.585,00	325.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					20.901.399.312,00		22.304.729.346,00		16.507.421.456,00		17.648.176.377,00		18.936.208.090,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	87,70	88,00	20.901.399.312,00	88,25	22.304.729.346,00	88,50	16.507.421.456,00	88,75	17.648.176.377,00	89,00	18.936.208.090,00
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00			

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	93,38	93.4		93.41		93.42		93.43		93.44	
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	inovasi	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					816.222.70 0,00		691.162.70 0,00		768.567.75 5,00		793.567.75 5,00		793.567.75 5,00
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Perpustakaan dan Keterlibatan Masyarakat dalam peningkatan literasi masyarakat	IPLM Dimensi Kepatuhan	Angka	NA	0,2864		0,2937		0,3139		0,3341		0,3591	
	IPLM Dimensi Kinerja	Angka	NA	0,3255	816.222.70 0,00	0,3622	691.162.70 0,00	0,3936	768.567.75 5,00	0,4251	793.567.75 5,00	0,4546	793.567.75 5,00
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					134.180.80 0,00		134.180.80 0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		400.000.00 0,00
Terwujudnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase naskah kuno yang diinventarisasi	Persen	NA	100	134.180.80 0,00	100	134.180.80 0,00	100	200.000.00 0,00	100	200.000.00 0,00	100	400.000.00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					418.710.99 8,00		1.402.329.7 48,00		1.803.149.1 97,00		1.619.399.4 37,00		1.705.907.9 01,00
Meningkatnya jumlah Perangkat Daerah yang hasil audit kearsipan bernilai minimal Baik	Persentase Perangkat Daerah yang hasil audit kearsipan bernilai minimal Baik	Persen	77,14	80	418.710.99 8,00	82	1.402.329.7 48,00	84	1.803.149.1 97,00	86	1.619.399.4 37,00	88	1.705.907.9 01,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					105.000.00 0,00		110.000.00 0,00		120.000.00 0,00		125.000.00 0,00		130.000.00 0,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kualitas penyelamatan dan pelestarian arsip	Persentase arsip yang diselamatkan, dilestarikan dan dimanfaatkan	Persen	50,00	54	105.000.00 0,00	56	110.000.00 0,00	58	120.000.00 0,00	60	125.000.00 0,00	62	130.000.00 0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.869.878. 242,00		24.817.014. 944,00		14.574.970. 172,34		13.339.147. 466,65		13.306.428. 343,32
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	83,90	85,75	10.869.878. 242,00	85,80	24.817.014. 944,00	85,85	14.574.970. 172,34	85,90	13.339.147. 466,65	85,95	13.306.428. 343,32
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	NA	100		100		100		100			
	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Angka	85,26	89,25		89,50		90,00		90,40		90,70	
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	1,00	1		1		1		1		1	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					775.000.00 0,00		1.525.500.0 00,00		976.000.00 0,00		977.500.00 0,00		979.000.00 0,00
Meningkatnya pemberdayaan pembudidaya ikan	Persentase peningkatan produksi perikanan (Ikan Konsumsi) (Persen)	Persen	-54,5	1,00	775.000.00 0,00	1,00	1.525.500.0 00,00	1,00	976.000.00 0,00	1,00	977.500.00 0,00	1,00	979.000.00 0,00
	Persentase peningkatan produksi perikanan (Ikan Hias)	Persen	N/A	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00
Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	Persen	1,00	3,00	200.000.00 0,00	4,00	200.000.00 0,00	5,00	200.000.00 0,00	6,00	200.000.00 0,00	7,00	200.000.00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					961.284.20 0,00		11.000.000. 000,00		11.175.000. 000,00		12.500.000. 000,00		11.250.000. 000,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan Jumlah Event Skala Internasional/ Nasional/ Provinsi/ regional yang terselenggara di Kota Bogor	Persen	9,09	10	961.284.200,00	10	11.000.000.000,00	10	11.175.000.000,00	10	12.500.000.000,00	10	11.250.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					475.000.000,00		1.900.000.000,00		2.150.000.000,00		2.225.000.000,00		2.275.000.000,00
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	orang	8.093.203	9.457.751	475.000.000,00	10.167.152	1.900.000.000,00	10.876.956	2.150.000.000,00	11.587.162	2.225.000.000,00	12.297.771	2.275.000.000,00
	Lama Tinggal Wisatawan	hari	2	2		2		2		2		2	
	Tingkat Hunian Kamar Hotel	Persen	70,48	70,49		70,50		70,51		70,52		70,53	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					848.793.030,00		2.570.000.000,00		2.770.000.000,00		2.970.000.000,00		3.170.000.000,00
Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata yang disertifikasi	Persen	0,86	0,91	848.793.030,00	0,93	2.570.000.000,00	0,95	2.770.000.000,00	0,96	2.970.000.000,00	0,97	3.170.000.000,00
	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	pelaku	75,00	95,00		105,00		115,00		125,00		135,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					200.000.000,00		150.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		165.000.000,00
Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif	Persentase produk ekonomi kreatif binaan yang mendapat sertifikasi HKI	Persen	NA	10,2	200.000.000,00	11,2	150.000.000,00	12,2	155.000.000,00	13,2	160.000.000,00	14,2	165.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.700.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00
Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura (26 item)	Persen	62,10	46,14	1.700.000.000,00	59,61	1.550.000.000,00	73,07	1.550.000.000,00	86,54	1.550.000.000,00	100,00	1.550.000.000,00
	persentase pemenuhan sarana peternakan (3 item)	Persen	49,62	58,33		61,67		71,67		75,00		85,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2.200.000.000,00		11.900.000.000,00		9.600.000.000,00		12.500.000.000,00		9.500.000.000,00
Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Produktivitas pertanian (padi) di kawasan LP2B	ton/ha	7,2	7,22		7,24		7,26		7,28		7,30	
	Persentase peningkatan jumlah pemotongan hewan yang dilayani RPH	Persen	N/A	3,08	2.200.000.000,00	4,62	11.900.000.000,00	6,16	9.600.000.000,00	7,70	12.500.000.000,00	9,24	9.500.000.000,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					126.000.000,00		128.000.000,00		128.000.000,00		129.000.000,00		130.000.000,00
Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	93,28	93,46		93,51		93,56		93,60		93,65	
	Persentase peningkatan jumlah kelompok urban farming	Persen	N/A	8,78	126.000.000,00	9,92	127.000.000,00	11,07	128.000.000,00	12,21	129.000.000,00	13,36	130.000.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.075.000.000,00		1.075.000.000,00		1.075.000.000,00		1.075.000.000,00		1.075.000.000,00
Meningkatnya kualitas pangan asal hewan	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	N/A	44,44		30,00		28,57		20,00		25,00	
	Persentase produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	Persen	86,11	83,00	1.075.000.000,00		1.075.000.000,00	83,00	1.075.000.000,00	83,00	1.075.000.000,00	83,00	1.075.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					712.807.000,00		977.875.000,00		1.052.875.000,00		1.102.875.000,00		152.875.000,00
Meningkatnya Pemasaran Produk Dalam negeri	Persentase UMKM yang difasilitasi pemasarannya dari data UMKM yang terverifikasi dalam aplikasi SOLUSI	Persen	60,70	19,50	712.807.000,00	19,94	977.875.000,00	20,39	1.052.875.000,00	20,84	1.102.875.000,00	20,84	152.875.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					567.175.300,00		623.892.830,00		686.282.113,00		754.910.324,00		860.000.000,00
Meningkatnya nilai penjualan produk ke Luar negeri (Ekspor)	Nilai realisasi ekspor	USD	116.229.977,25	154.735.167,19	567.175.300,00	172.372.748,47	623.892.830,00	192.195.614,54	686.282.113,00	214.490.305,82	754.910.324,00	239.985.671,60	860.000.000,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					517.200.00 0,00		544.880.00 0,00		572.560.00 0,00		600.240.00 0,00		600.240.00 0,00
Meningkatnya peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Pemenuhan Sarana Distribusi Perdagangan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)	Persen	4,07	14,28	517.200.00 0,00	21,41	544.880.00 0,00	35,71	572.560.00 0,00	42,85	600.240.00 0,00	50,00	600.240.00 0,00
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					50.000.000, 00		50.000.000, 00		70.000.000, 00		70.000.000, 00		70.000.000, 00
Optimalisasi pengawasan dan pengendalian perizinan serta pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin	Persen	79,78	50,00	50.000.000, 00	50,00	50.000.000, 00	50,00	70.000.000, 00	50,00	70.000.000, 00	50,00	70.000.000, 00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					490.870.00 0,00		293.710.00 0,00		283.954.00 0,00		317.706.00 0,00		353.954.00 0,00
Meningkatnya pengawasan terhadap standarisasi sarana perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang dilakukan standarisasi ukuran (tera dan tera ulang)	Persen	66,10	68,14	490.870.00 0,00	69,15	293.710.00 0,00	70,17	283.954.00 0,00	71,19	317.706.00 0,00	72,20	353.954.00 0,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					91.953.608, 00		225.000.00 0,00		275.000.00 0,00		325.000.00 0,00		350.000.00 0,00
Terjaganya tingkat kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok di koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu ≤ 9.00%	Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Persen	8,35	<9,00	91.953.608, 00	<9,00	225.000.00 0,00	<9,00	275.000.00 0,00	<9,00	325.000.00 0,00	<9,00	350.000.00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah yang produktif	Persen	7,80	24,70	776.130.200	28,40	950.000.000	31,50	900.000.000	33,90	850.000.000	36,00	850.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI													
Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri		NA	13,60	20.000.000	14,86	50.000.000	15,85	100.000.000	16,66	200.000.000	18,18	200.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL													
Meningkatnya perusahaan industri yang terdaftar dalam sistem informasi industri nasional (SIINas)	Persentase Jumlah Industri Kecil Menengah yang teregistrasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persen	21,80	27,20	88.500.000	29,60	100.000.000	32,60	100.000.000	34,90	150.000.000	37,80	150.000.000
SEKRETARIAT DAERAH													
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					49.241.350.006,00		39.038.084.534,00		43.779.900.554,00		48.491.443.855,00		53.137.323.800,00
Meningkatnya penyelenggara n penataan produk hukum daerah dan bantuan hukum daerah	Nilai aspek harmonisasi produk hukum daerah	Angka	21,80	22,00	2.894.083.600,00	22,10	3.924.306.800,00	22,30	4.824.306.800,00	22,50	5.804.306.800,00	22,70	6.880.306.800,00
	Nilai Aspek kompetensi SDM perancang produk hukum daerah	Angka	24,40	24,60		24,70		24,80		24,90		25,00	
	Nilai Aspek deregulasi produk hukum daerah	Angka	27,00	27,30		27,50		27,70		27,90		28,00	
	Nilai Aspek penataan data base per-UU Daerah	Angka	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	
	Persentase terfasilitasinya layanan bantuan hukum litigasi	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase terfasilitasinya layanan bantuan hukum non litigasi	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Optimalisasi pencapaian pelaksanaan program dan SPM di setiap urusan pemerintahan dan penguatan kerjasama daerah	Persentase capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penyelenggaraan Pemerintahan/ Persentase peningkatan capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	94,44	96,03	1.639.492.000,00	96,83	1.745.000.000,00	97,62	1.855.000.000,00	98,41	1.965.000.000,00	99,21	2.015.000.000,00
	Persentase capaian SPM (Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal)	Persen	95,97	96,00		96,01		96,02		96,03		96,04	
	Persentase Kebijakan di Bidang Administrasi Pemerintahan dan Wilayah yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase kerjasama yang diimplementasikan	Persen	92,04	92,50		92,70		93,00		93,20		93,50	
optimalisasi ketepatan sasaran intervensi program kesejahteraan rakyat di bidang pelayanan dasar	Persentase penduduk miskin yang bersekolah di MA, SMA/SMK dan Mahasiswa yang mendapat bantuan sosial siswa Miskin	Persen	NA	32,00	17.601.300.975,00	34,40	12.823.337.597,00	36,00	13.473.337.597,00	38,00	14.023.337.597,00	40,20	14.873.337.597,00
optimalisasi ketepatan sasaran intervensi program kesejahteraan rakyat di bidang pelayanan dasar dan pelayanan non dasar	Persentase realisasi capaian kinerja pemberian hibah untuk lembaga keagamaan	Persen	87,00	90,00	27.106.473.431,00	91,50	20.545.440.137,00	93,00	23.627.256.157,00	94,50	26.698.799.458,00	96,00	29.368.679.403,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					96.930.037.506,00		93.149.150.122,00		91.821.951.059,00		93.115.451.972,00		93.944.881.433,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah daerah	persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai kematangan organisasi lebih dari 50 poin	Persen	50,00	57,14		60,00		62,85		65,71		68,57	
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM diatas sama dengan 3.5	Persen	75,00	81,00	802.711.60 0,00	83,00	664.373.49 0,00	86,00	730.810.83 9,00	89,00	803.891.92 2,00	92,00	884.281.11 3,00
	Rata Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah aspek Pelaporan Kinerja	Angka	12,60	12,65		12,70		12,75		12,80		12,85	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	84,90	87,7		88,7		89,7		90,7		91,7	
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi/ta hun	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	100,00	100,00	94.064.859. 506,00	100,00	90.269.246. 632,00	100,00	88.654.057. 720,00	100,00	89.630.870. 050,00	100,00	90.111.843. 320,00
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	91,50	93,50		94,50		95,50		96,50		97,50	
Meningkatnya kualitas layanan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase pemenuhan layanan protokol dan komunikasi pimpinan	Persen	100,00	100,00	2.062.466.4 00,00	100,00	2.215.530.0 00,00	100,00	2.437.082.5 00,00	100,00	2.680.690.0 00,00	100,00	2.948.757.0 00,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.822.581.8 89,00		2.820.000.0 00,00		2.875.000.0 00,00		2.930.000.0 00,00		3.000.000.0 00,00
Meningkatnya kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan	Persentase Realisasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Strategis	Persen	86,95	87,25		87,50		87,75		87,90		88,00	
	Persentase Ketepatan Waktu pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan sesuai perencanaan	Persen	57,95	67,44	267.429.30 0,00	69,77	270.000.00 0,00	74,42	300.000.00 0,00	76,74	330.000.00 0,00	79,07	350.000.00 0,00
Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi pengadaan barang dan	Tingkat Pemanfaatan Sistem Informasi PPBJ	Angka	28,80	28,51		28,52		28,53		28,54		28,55	
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan JF PPBJ	Persen	9,23	10,77	983.019.58 9,00	11,54	1.600.000.0 00,00	12,31	1.600.000.0 00,00	13,08	1.600.000.0 00,00	13,85	1.600.000.0 00,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
jasa, menguatnya SDM dan kelembagaan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	40,00	40,00		40,00		40,00		40,00		40,00	
Meningkatnya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap implementasi kebijakan sektor UMKM	Persentase realisasi rencana kebijakan sektor perekonomian	Persen	NA	78,85		82,69		84,62		84,91		86,79	
	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Memperoleh KUR (Data SIKP)	Persen	-34,19	5,42	94.495.000, 00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00		200.000.00 0,00
Optimalisasi Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Persentase Capaian Kinerja Rencana Aksi pengendalian Inflasi Daerah	Persen	72,41	84,44	129.691.00 0,00	86,05	300.000.00 0,00	86,19	300.000.00 0,00	89,19	300.000.00 0,00	91,86	300.000.00 0,00
Meningkatnya kinerja BUMD dan kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan BUMD	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kontribusi Deviden BUMD pada PAD	Rp.	29.575.653 .097,00	35.672.65 6.599,00	347.947.00 0,00	37.135.15 5.877,00	450.000.00 0,00	38.652.64 6.834,00	475.000.00 0,00	40.207.34 9.196,00	500.000.00 0,00	41.798.68 7.325,00	550.000.00 0,00
	Rata Rata Skor capaian Kinerja BUMD	Angka	NA	70,65		71,07		71,50		71,93		72,37	
SEKRETARIAT DEWAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					102.626.89 6.916,00		104.882.95 7.774,00		121.764.34 0.210,00		108.899.62 7.014,00		111.077.61 9.554,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorintasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	86,80	88,4		88,45		88,5		88,55		88,6	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	83,39	84,39	102.626.89 6.916,00	85,39	104.882.95 7.774,00	86,39	121.764.34 0.210,00	87,39	108.899.62 7.014,00	88,39	111.077.61 9.554,00
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikemban gkan setiap tahun	Inovasi	NA	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					55.468.469.042,00		56.577.838.423,00		57.709.395.191,00		58.863.583.095,00		60.040.854.757,00
Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Persentase Rencana Kerja DPRD yang di fasilitasi sesuai fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Persen	100,00	100,00	55.468.469.042,00	100,00	56.577.838.423,00	100,00	57.709.395.191,00	100,00	58.863.583.095,00	100,00	60.040.854.757,00
PERENCANAAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.093.739.639,00		21.043.811.298,00		21.598.027.207,00		22.214.829.594,00		22.350.246.052,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorintasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	89,50	90,95	21.093.739.639,00	91,00	21.043.811.298,00	91,50	21.598.027.207,00	92,00	22.214.829.594,00	92,50	22.350.246.052,00
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00					
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	90,48	92,50		93,00		93,50		94,00		94,50	
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikemban gkan setiap tahun	Inovasi	1,00	≥1		≥1		≥1		≥1			
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.100.000.000,00		1.755.000.000,00		1.840.000.000,00		2.112.000.000,00		2.115.000.000,00
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Aspek Perencanaan Kinerja minimal 25.50	Persen	86,11	94,29	2.100.000.000,00	97,14	1.755.000.000,00	100,00	1.840.000.000,00	100,00	2.112.000.000,00	100,00	2.115.000.000,00
	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Aspek Pengukuran Kinerja minimal 25.50	Persen	77,77	85,71		88,57	91,42	94,28		97,14			
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.199.699.200,00		1.785.100.000,00		3.265.100.000,00		1.550.100.000,00		2.845.100.000,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Angka	26,53	27,00	370.100.000,00	27,25	120.100.000,00	27,50	120.100.000,00	27,75	420.100.000,00	28,00	1.320.100.000,00
	Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Angka	26,16	26,35		26,45		26,55		26,65		26,75	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja lingkup bidang Perekonomian dan SDA serta bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Rata-Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah Aspek Perencanaan Kinerja lingkup bidang Perekonomian dan SDA serta bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Angka	27,10	27,50	1.829.599.200,00	27,75	1.665.000.000,00	28,00	3.145.000.000,00	28,10	1.130.000.000,00	28,25	1.525.000.000,00
	Rata-Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja pada Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA serta bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Angka	27,03	27,30		27,45		27,60		27,75		27,85	
KEUANGAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BKAD)					26.962.598.960,00		25.289.319.285,00		25.190.839.419,00		25.190.839.419,00		25.190.839.419,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorintasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88,55	89,90	26.962.598.960,00	89,95	25.289.319.285,00	90,00	25.190.839.419,00	90,05	25.190.839.419,00	90,10	25.190.839.419,00
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	96,84	100,00		100,00		100,00		100,00			
	Nilai Hasil Suvey Kepuasan Masyarakat	Angka	97,43	97,65		97,73		97,78		97,80		97,83	
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					60.839.198. 022,00		60.915.618. 361,00		61.037.106. 346,00		61.330.311. 800,00		61.248.839. 800,00
Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran pada APBD	Nilai IPKD Dimensi 1 (Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran)	Indeks	11676,00	8565,00		8570,00		8574,00		8582,00		8582,00	
	Nilai IPKD Dimensi 2 (Kesesuaian pengelokasian anggaran belanja dalam APBD)	Indeks	20,00	14835,00	952.915.00 0,00	14843,00	1.038.210.0 00,00	14850,00	1.132.035.0 00,00	14858,00	1.430.243.0 00,00	14865,00	1.348.771.0 00,00
	Nilai IPKD Dimensi 3 (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah)	Indeks	9052,00	13708,00		13709,00		13,71		13711,00		13712,00	
Meningkatnya kepatuhan PD terhadap standar pengelolaan keuangan daerah	Nilai IPKD Dimensi 4 (Penyerapan Anggaran)	Indeks	15,00	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00	
	Nilai IPKD Dimensi 5 (Kondisi keuangan daerah)	Indeks	3512,00	2038,00	59.886.283. 022,00	2039,00	59.877.408. 361,00	2,04	59.905.071. 346,00	2041,00	59.900.068. 800,00	2042,00	59.900.068. 800,00
	Nilai IPKD Dimensi 6 (Opini BPK atas LKPD)	Indeks	15,00	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					8.841.939.9 60,00		9.015.933.9 56,00		9.307.327.3 51,00		9.517.860.0 87,00		9.549.446.0 95,00
Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam pengelolaan BMD	Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif	Indeks	4,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
	Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-udangan	Indeks	3,33	3,50	8.841.939.9 60,00	3,83	9.015.933.9 56,00	4,00	9.307.327.3 51,00	4,00	9.517.860.0 87,00	4,00	9.549.446.0 95,00
	Pengawasan dan Pengendalian BMD yang efektif	Indeks	2,37	2,71		3,11		3,11		3,11		3,11	
	Administrasi BMD yang andal	Indeks	2,00	3,33		4,00		4,00		4,00		4,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAPENDA)					43.117.363. 450,00		54.398.893. 312,00		54.496.003. 756,68		55.784.033. 066,85		54.916.100. 612,92
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	82,10	86,45		86,50		86,55		86,60		86,65	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	N/A	100,00	43.117.363. 450,00	100,00	54.398.893. 312,00	100,00	54.496.003. 756,68	100,00	55.784.033. 066,85	100,00	54.916.100. 612,92

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai Hasil Suvey Kepuasan Masyarakat	Angka	93,75	94,25		94,50		94,75		95,00		94,25	
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	4,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					4.202.618.312,00		8.265.406.776,40		9.067.789.155,20		9.549.559.462,68		10.202.530.402,28
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah	Rp.	973.768.860.850	1.224.732.427.374	2.101.309.156,00	1.275.915.308.819	4.132.703.388,20	1.339.161.074.260	4.533.894.577,70	1.405.569.127.973	4.774.779.731,10	1.475.297.584.372	5.101.265.200,99
Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	Target Penerimaan Retribusi Daerah	Rp.	417.445.452.990	396.974.657.213	2.101.309.156,00	403.348.220.579	4.132.703.388,20	408.699.964.512	4.533.894.577,50	414.250.548.277	4.774.779.731,58	419.375.718.563	5.101.265.201,29
KEPEGAWAIAN													
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.273.890.630,00		1.907.333.965,00		1.907.333.965,00		1.907.333.965,00		1.907.333.965,00
Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Aparatur	Indek Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan.	Angka	112,00	114,00		114,00		114,00		114,00		114,00	
	Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan	Angka	150,00	165,00	1.273.890.630,00	167,50	1.907.333.965,00	167,50	1.907.333.965,00	170,00	1.907.333.965,00	170,00	1.907.333.965,00
	Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian	Angka	44,00	44,00		49,00		49,00		54,00		54,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.995.946.596,00		21.075.470.475,00		21.075.470.475,00		21.075.470.475,00		21.075.470.475,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88,65	89,50	17.995.946.596,00	90,00	21.075.470.475,00	90,35	21.075.470.475,00	90,50	21.075.470.475,00	90,60	21.075.470.475,00
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	NA	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai Hasil Suvey Kepuasan Masyarakat	Nilai	93,75	94,25		94,50		94,75		95,00		95,25	
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00			
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.054.215.500,00		2.865.551.800,00		2.865.551.800,00		2.996.561.800,00		3.057.281.800,00
Meningkatnya Kompetensi Sumberdaya Manusia Aparatur	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat	Angka	33,50	38,00	1.054.215.500,00	40,50	2.865.551.800,00	40,50	2.865.551.800,00	45,50	2.996.561.800,00	45,50	3.057.281.800,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.100.000.000,00		1.250.000.000,00		1.390.000.000,00		1.536.500.000,00		1.690.150.000,00
Meningkatnya kematangan inovasi daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Inovasi dengan tingkat Kematangan > 100 pada tahun ke n	Persen	16,67	22,00	1.100.000.000,00	25,00	1.250.000.000,00	28,00	1.390.000.000,00	31,00	1.536.500.000,00	34,00	1.690.150.000,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.450.000.000,00		900.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		400.000.000,00
Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian/hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan yang lebih berkualitas	Persentase dokumen rekomendasi kebijakan yang diusulkan menjadi kebijakan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Nilai rata-rata IKK Perangkat Daerah dimensi Perencanaan, transparansi dan keterlibatan AK dalam perumusan Kebijakan	Angka	NA	39,00	1.450.000.000,00	40,00	900.000.000,00	42,00	500.000.000,00	44,00	500.000.000,00	46,00	400.000.000,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Nilai rata-rata IKK Perangkat Daerah dimensi Implementasi dan evaluasi kemanfaatan Kebijakan	Angka	NA	32,00		33,00		34,00		36,00		38,00	
INSPEKTORAT DAERAH													
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					661.154.00 0,00		30.391.994. 295,00		30.741.609. 249,00		31.092.587. 937,00		31.842.751. 159,00
Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pembangunan ZI dengan nilai ≥ 75	Persen	38,89	45,71	121.794.00 0,00	48,57	28.950.580. 545,00	51,43	29.239.526. 350,00	54,29	29.531.361. 614,00	57,14	30.231.361. 614,00
Meningkatnya Fungsi APIP dalam Pembinaan dan Pengawasan	Nilai Komponen Struktur dan Proses SPIP berdasarkan hasil penjaminan kualitas APIP	Angka	1113,00	1119,00	539.360.00 0,00	1122,00	28.950.580. 545,00	1125,00	29.239.526. 350,00	1128,00	29.531.361. 614,00	1,13	30.231.361. 614,00
	Nilai Capaian MCP KPK Pada Komponen Pengawasan APIP	Persen	91,00	91,00		91,00		91,00		91,00		91,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					717.954.60 0,00		747.202.05 0,00		773.160.61 4,00		795.859.54 4,00		821.014.54 5,00
Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan yang berlaku	Persentase PD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persen	100,00	100,00	717.954.60 0,00	100,00	747.202.05 0,00	100,00	773.160.61 4,00	100,00	795.859.54 4,00	100,00	821.014.54 5,00
	Persentase PD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Aspek Evaluasi Kinerja Internal minimal 20	Persen	69,44	74,29		77,14		80,00		82,86		85,71	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					29.184.470. 589,19		29.239.526. 350,00		28.950.580. 545,00		29.531.361. 614,00		30.231.361. 614,00
Meningkatnya akuntabilitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	90,75	90,85		90,9		90,95		91,00		91,50	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	88,50	89,50	29.184.470.589,19	90,00	29.239.526.350,00	90,75	28.950.580.545,00	91,50	29.531.361.614,00	92,50	30.231.361.614,00
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	N/A	1,00		1,00		1,00		1,00			
UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)													
KECAMATAN BOGOR BARAT													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					41.442.545.006,00		52.409.727.651,00		57.673.481.422,00		62.467.374.132,00		68.002.861.034,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Angka	89,25	89,55		89,60		89,65		89,70		89,75	
					41.442.545.006,00		52.409.727.651,00		57.673.481.422,00		62.467.374.132,00		68.002.861.034,00
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	95,25	95,35		95,40		95,45		95,50		95,55	
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	NA	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					153.526.400,00		85.770.269,99		94.347.296,99		103.782.026,69		114.160.229,36
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	Persen	90,00	95,00	153.526.400,00	95,00	85.770.269,99	95,00	94.347.296,99	95,00	103.782.026,69	95,00	114.160.229,36
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					146.433.202,00		399.403.583,00		439.343.942,00		483.278.336,00		531.606.170,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kecamatan	Persentase	NA	23,00	146.433.202,00	23,00	399.403.583,00	23,00	439.343.942,00	23,00	483.278.336,00	23,00	531.606.170,00
	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SP Dan SOP	Persentase	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					10.833.656.496,00		9.044.825.067,00		9.949.307.572,00		10.944.238.334,00		12.038.662.162,00
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	Persentase	NA	23,00		23,00		23,00		23,00		23,00	
	Persentase rencana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di wilayah kelurahan yang terealisasi sesuai target	Persentase	NA	100,00	10.833.656.496,00	100,00	9.044.825.067,00	100,00	9.949.307.572,00	100,00	10.944.238.334,00	100,00	12.038.662.162,00
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	Persentase	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	Persentase	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
KECAMATAN BOGOR SELATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					46.803.433.990,00		48.059.025.090,00		49.319.331.590,00		50.664.657.890,00		51.668.407.890,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Angka	85,81	87,20	46.803.433.990,00	87,40	48.059.025.090,00	87,60	49.319.331.590,00	88,00	50.633.462.990,00	88,20	51.668.407.890,00
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	90,50	91,50		92,00		92,50		93,00		93,50	
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	NA	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					175.000.000,00		131.662.000,00		141.662.000,00		151.662.000,00		151.662.000,00
	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	Persentase	90,00	95,00	175.000.000,00	95,00	131.662.000,00	95,00	141.662.000,00	95,00	151.662.000,00	95,00	151.662.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					285.000.000,00		312.000.000,00		340.000.000,00		362.000.000,00		362.000.000,00
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kecamatan	Persen	NA	23,00	285.000.000,00	23,00	312.000.000,00	23,00	340.000.000,00	23,00	362.000.000,00	23,00	362.000.000,00
	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SP Dan SOP	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					8.388.300.000,00		9.013.960.000,00		9.640.300.000,00		10.254.100.000,00		10.328.100.000,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n musrenbang kelurahan	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	Persen	NA	23,00		23,00		23,00		23,00		23,00	
	Persentase rencana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di wilayah kelurahan yang terealisasi sesuai target	Persentase	NA	100,00	8.388.300.000,00	100,00	9.013.960.000,00	100,00	9.640.300.000,00	100,00	10.254.100.000,00	100,00	10.328.100.000,00
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	Persentase	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	Persentase	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
KECAMATAN BOGOR TENGAH													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.762.200.364,00		30.538.420.399,00		33.592.262.440,00		36.951.488.685,00		40.646.637.556,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Angka	83,31	83,40	27.762.200.364,00	83,45	30.538.420.399,00	83,50	33.592.262.440,00	83,55	36.951.488.685,00	83,60	40.646.637.556,00
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	94,68	95,25		95,50		95,75		96,00		96,25	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	NA	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					87.872.700,00		96.659.970,00		106.325.967,00		116.958.564,00		128.654.420,00
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	Persentase	90,00	95,00	87.872.700,00	95,00	96.659.970,00	95,00	106.325.967,00	95,00	116.958.564,00	95,00	128.654.420,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					107.894.060,00		118.683.466,00		130.551.813,00		143.606.993,00		157.967.693,00
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kecamatan	Persentase	NA	23,00	107.894.060,00	23,00	118.683.466,00	23,00	130.551.813,00	23,00	143.606.993,00	23,00	157.967.693,00
	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SP Dan SOP	Persentase	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.098.363.490,00		5.608.199.840,00		6.169.019.823,00		6.785.921.807,00		7.464.513.988,00
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	Persentase	NA	23,00		23,00		23,00		23,00		23,00	
	Persentase rencana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di wilayah kelurahan yang terealisasi sesuai target	Persentase	NA	100,00	5.098.363.490,00	100,00	5.608.199.840,00	100,00	6.169.019.823,00	100,00	6.785.921.807,00	100,00	7.464.513.988,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	Persentase	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	Persentase	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
KECAMATAN BOGOR TIMUR													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.263.642.684,00		23.603.253.282,00		25.056.089.495,00		26.634.749.365,00		28.353.501.354,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Angka	88,80	88,90		88,95		89,00		89,05		89,10	
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persentase	NA	100,00	22.263.642.684,00	100,00	23.603.253.282,00	100,00	25.056.089.495,00	100,00	26.634.749.365,00	100,00	28.353.501.354,00
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	91,83	91,90		91,95		92,00		92,05		92,10	
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	NA	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					72.988.125,00		76.637.531,00		80.469.408,00		84.492.878,00		88.717.522,00
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	Persentase	88,00	95,00	72.988.125,00	95,00	76.637.531,00	95,00	80.469.408,00	95,00	84.492.878,00	95,00	88.717.522,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					83.531.280,00		94.307.844,00		98.693.236,00		103.297.898,00		108.132.792,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n musrenbang kecamatan	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kecamatan	Persentase	NA	23,00	83.531.280,00	23,00	94.307.844,00	23,00	98.693.236,00	23,00	103.297.898,00	23,00	108.132.792,00
	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SP Dan SOP	Persentase	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.518.612.605,00		4.646.528.235,00		4.780.839.647,00		4.921.866.629,00		5.069.944.961,00
Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n musrenbang kelurahan	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	Persentase	NA	23,00		23,00		23,00		23,00		23,00	
	Persentase rencana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di wilayah kelurahan yang terealisasi sesuai target	Persentase	NA	100,00	4.518.612.605,00	100,00	4.646.528.235,00	100,00	4.780.839.647,00	100,00	4.921.866.629,00	100,00	5.069.944.961,00
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	Persentase	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	Persentase	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
KECAMATAN BOGOR UTARA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.982.078.999,00		25.686.741.300,00		26.706.729.560,00		27.944.368.294,00		29.150.327.790,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Angka	86,55	87,65	24.982.078.999,00	87,70	25.686.741.300,00	87,75	26.706.729.560,00	87,80	27.944.368.294,00	87,85	29.150.327.790,00
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	95,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	99,25	99,27		99,28		99,29		99,30		99,31	
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	NA	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					103.107.600,00		108.262.980,00		113.676.129,00		119.359.935,00		125.327.932,00
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan	Persen	90,00	95,00	103.107.600,00	95,00	108.262.980,00	95,00	113.676.129,00	95,00	119.359.935,00	95,00	125.327.932,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					214.341.018,00		220.558.069,00		227.085.972,00		233.940.271,00		241.137.284,00
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kecamatan	Persen	NA	23,00	214.341.018,00	23,00	220.558.069,00	23,00	227.085.972,00	23,00	233.940.271,00	23,00	241.137.284,00
	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SP Dan SOP	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.870.663.455,00		2.934.005.183,00		3.049.733.961,00		3.145.765.778,00		3.282.500.615,00

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n musrenbang kelurahan	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musyawarah musrenbang kelurahan	Persentase	NA	23,00		23,00		23,00		23,00		23,00	
	Persentase rencana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di wilayah kelurahan yang terealisasi sesuai target	Persentase	NA	100,00	2.870.663.455,00	100,00	2.934.005.183,00	100,00	3.049.733.961,00	100,00	3.145.765.778,00	100,00	3.282.500.615,00
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	Persentase	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	Persentase	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
KECAMATAN TANAH SAREAL													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.911.355.477,00		33.387.506.419,00		34.747.764.593,00		36.433.953.347,00		37.817.977.575,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorintasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Angka	85,96	86,16	31.911.355.477,00	86,26	33.387.506.419,00	86,36	34.747.764.593,00	86,46	36.433.953.347,00	86,56	37.817.977.575,00
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	NA	95,10		95,20		95,30		95,40		95,50	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	94,48	95,00		95,25		95,50		95,75		96,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	NA	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					81.606.500,00		89.767.150,00		98.743.865,00		108.618.252,00		119.480.077,00
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	Persen	90,00	95,00	81.606.500,00	95,00	89.767.150,00	95,00	98.743.865,00	95,00	108.618.252,00	95,00	119.480.077,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					129.342.832,00		142.277.115,00		156.504.827,00		172.155.309,00		189.370.840,00
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kecamatan	Persen	NA	23,00	129.342.832,00	23,00	142.277.115,00	23,00	156.504.827,00	23,00	172.155.309,00	23,00	189.370.840,00
	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai SP Dan SOP	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					8.810.908.173,00		9.691.998.991,00		10.243.925.440,00		11.167.657.984,00		12.393.763.784,00
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	Persen	NA	23,00	8.810.908.173,00	23,00	9.691.998.991,00	23,00	10.243.925.440,00	23,00	11.167.657.984,00	23,00	12.393.763.784,00
	Persentase rencana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di wilayah kelurahan yang terealisasi sesuai target	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang Aktif	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang Aktif	Persen	NA	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					2.272.183.000,00		2.292.183.000,00		2.312.183.000,00		2.332.183.000,00		2.332.183.000,00
Menguatnya Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk	Rasio	13,5 : 10,000	14,00 : 10,000	2.272.183.000,00	14,25 : 10,000	2.292.183.000,00	14,50 : 10,000	2.312.183.000,00	14,75 : 10,000	2.332.183.000,00	14,75 : 10,000	2.332.183.000,00
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik					6.776.473.600,00		5.847.858.000,00		5.862.858.000,00		5.862.858.000,00		5.862.858.000,00
Meningkatnya peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	84,77	0,00	6.776.473.600,00	0,00	5.847.858.000,00	0,00	5.862.858.000,00	88,00	5.862.858.000,00	0,00	5.862.858.000,00
	Persentase Partisipasi Perempuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bogor	Persen	37,00	0,00		0,00		0,00		39,00		0,00	
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada	Persen	64,30	0,00		0,00		0,00		75,00		0,00	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					175.000.00 0,00		200.000.00 0,00		225.000.00 0,00		250.000.00 0,00		250.000.00 0,00
Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang ada pada strata Dewasa	Persen	4,25	9,43	175.000.00 0,00	14,15	200.000.00 0,00	16,50	225.000.00 0,00	18,87	250.000.00 0,00	18,87	250.000.00 0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					455.537.60 0,00		635.296.80 0,00		665.296.80 0,00		695.296.80 0,00		720.296.80 0,00
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kelurahan Bersih narkoba (bersinar)	Persen	26,47	44,12	455.537.60 0,00	52,94	635.296.80 0,00	61,76	665.296.80 0,00	70,59	695.296.80 0,00	79,17	720.296.80 0,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					29.308.273. 000,00		29.357.973. 000,00		29.407.973. 000,00		29.457.973. 000,00		29.457.973. 000,00
Meningkatnya kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial	Persentase Potensi Konflik Sara yang Tertangani	Persen	100,00	100,00	29.308.273. 000,00	100,00	29.357.973. 000,00	100,00	29.407.973. 000,00	100,00	29.457.973. 000,00	100,00	29.457.973. 000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.275.429. 380,00		10.975.023. 082,00		11.716.282. 202,00		12.585.614. 046,00		12.054.414. 046,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Angka	83,05	84,05	10.275.429. 380,00	84,55	10.975.023. 082,00	85,05	11.716.282. 202,00	85,55	12.585.614. 046,00	86,05	12.054.414. 046,00
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00					
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85,99	86,99		87,99		88,99		89,99		90,99	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan setiap tahun	Inovasi	NA	1 Inovasi		1 Inovasi		1 Inovasi		1 Inovasi		5 Inovasi	

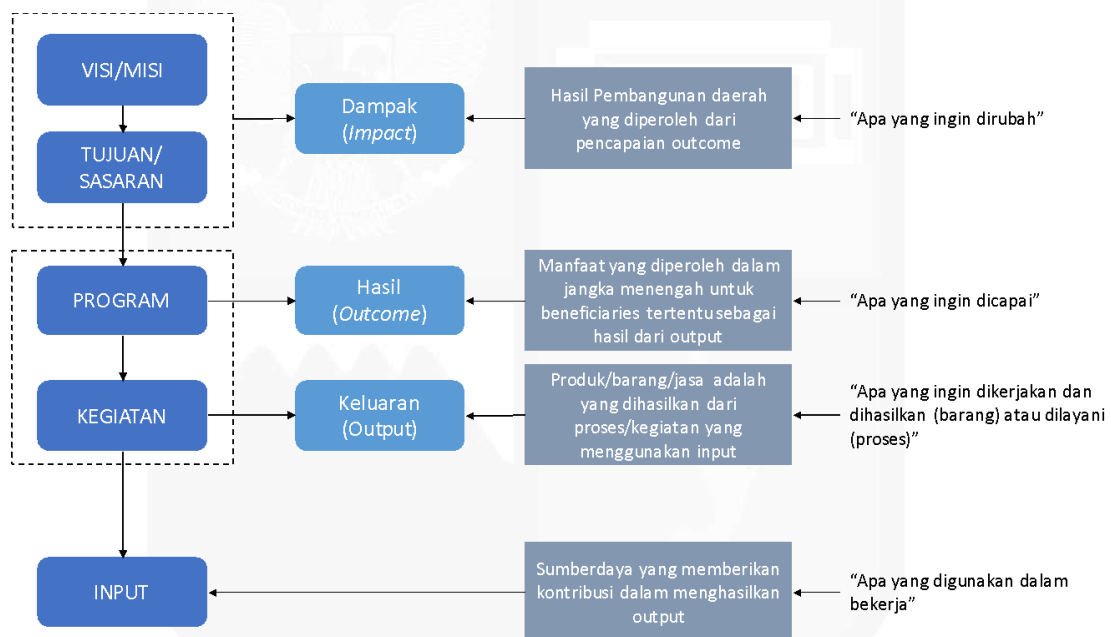
Sumber : Hasil Analisis Bapperida (2025)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengatur substansi yang terkait indikator apa saja yang menyertai bagian RPJMD yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Pada RPJMD, Permendagri 86/2017 menyebutkan indikator-indikator tersebut dengan sebutan Indikator Kinerja. Dijelaskan bahwa Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*), yang secara detail merupakan:

- Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.
- Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.
- Dampak (*impact*), adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir

pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bond dan Continously-Improve* (SMART-C).

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, dan program (pada RPJMD) serta ditambah kegiatan (pada Renstra-PD), dengan indikator kinerja yang menyertainya, secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah (Gambar 4.1).



Gambar 4.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah (Permendagri 86/2017, Gambar G-B.5)

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan

prioritas ditetapkan. Berdasarkan Permendagri 86/2017, penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah;
2. Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah.

4.2. Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor 2025-2030

Indikator Makro pembangunan Kota Bogor menjadi salah satu tolok ukur kunci keberhasilan rencana pembangunan Kota Bogor selama Tahun 2025-2030. Tabel 4.2 berikut adalah Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2030.

Tabel 4.2 Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15	5,3	5,35	5,41	5,49	5,56	5,61
2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	56,616	58,86	64,9	68,51	73,36	78,46	84,07
3	Kontribusi PDRB Kota Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat	Persen	2	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,53	6,05	5,95	5,38	4,64	3,85	3,65
5	Rasio Gini	Angka	0	0,43	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	79,03	79,03	80,21	80,49	81	81,52	82,05
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO2 eq per Miliar Rupiah	NA	0,38	0,71	1,05	1,48	2,07	2,51
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	59,34	57,84	58,09	58,34	58,6	58,85	59,10
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,13	8,11	7,99	7,98	7,94	7,91	7,86

Sumber : Hasil Analisis Bapperida (2025)

4.3. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Bogor yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029 ditampilkan pada Tabel 4.3. IKU Daerah berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya IKU, pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan yang lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data kinerja yang objektif. IKU dapat menjadi alat untuk menilai apakah anggaran yang digunakan sudah efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman yang sama pada seluruh pemangku kepentingan, maka setiap IKU yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 dijabarkan kembali menjadi IKK sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Kota Bogor Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Harapan lama Sekolah	Tahun	13,53	13,54	13,56	13,57	13,59	13,6
2	Rerata Capaian Pembelajaran (Average Harmonized Test Scores)	Angka	74,28	74,35	74,41	74,48	74,54	74,63
3	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	7,85	8,63	9,41	10,2	10,98	11,76
4	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	61,98	62,08	62,10	62,50	62,55	62,58
5	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	65,83	65,83	65,84	65,84	65,85	65,85
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	4,08	<i>diganti menjadi Indeks Pemerintahan Digital</i>				
	Indeks Pemerintahan Digital	Angka	NA	1,87	1,87	1,90	1,90	1,92
7	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	70	71	72	75	77	80
8	Nilai hasil survey penilaian integritas	Angka	77,83	78,12	78,41	78,7	78,99	79,28
9	Indeks Berakhlak	Angka	74,6	76,1	77,6	78,5	79	80
10	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,65	4,66	4,67	4,68	4,69	4,7
11	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	SAKIP Tingkat Kota	Predikat	BB (79,6)	A (80.1)	A (80.65)	A (81.15)	A (81.5)	A (82)
13	Tingkat Maturitas SPIP	Predikat	Level 3 (3,330)	Level 3 (3,335)	Level 3 (3,340)	Level 3 (3,345)	Level 3 (3,350)	Level 3 (3,355)

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	Persen	52,4	53,62	54,84	56,06	57,27	59,94
15	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	Persen	73,3	73,8	74,3	74,8	75,3	75,8
16	Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	6,27	7,77	9,27	10,77	10,8	11,02
17	Indeks Resiko Bencana	Angka	58,03	58,02	58,02	58,01	58,01	58,00
18	Umur Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	75,93	76,14	76,35	76,56	76,77	76,98
19	Prevalensi Stunting	Angka	19,1	17,31	15,76	14,43	13,28	12,28
20	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	(Ton CO2Eq)	21.798,45	35.147,05	53.794,32	82.180,71	130.547,42	191.425,41
21	Indeks kualitas udara	Angka	55,63	56,03	56,43	56,83	57,23	57,63
22	Indeks kualitas air	Angka	71,3	71,5	71,7	71,9	72,1	72,3
23	Indeks kualitas lahan	Angka	38,81	38,88	38,95	39,02	39,09	39,15
24	Angka Kemiskinan	Persen	6,05	5,95	5,38	4,64	3,85	3,65
25	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,11	7,99	7,98	7,94	7,91	7,86
26	Laju PDRB sektor Jasa akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	Persen	7,43	7,54	7,64	7,71	7,75	7,77
27	Laju PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)	Persen	3,26	3,28	3,28	3,29	3,34	3,38

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
28	Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Persen	2,74	2,9	2,99	3,23	3,34	3,56
29	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (persen PDRB)	Persen	34,7	34,76	34,82	34,88	34,94	34,99
30	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	69,14	71,65	74,26	76,96	79,75	82,63
31	Tingkat Inflasi	Persen	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
32	Kapasitas fiskal daerah	Angka	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8	1,85
33	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	80,9	81,21	81,51	81,82	82,13	82,13
34	Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)	Angka	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55
35	Persentase ketercapaian rencana struktur ruang	Persen	59	60	61	62	63	64

Sumber : Hasil Analisis Bapperida (2025)

4.4. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan *Key Performance Indicator* (KPI) atau *Key Success Indicators* (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKD, IKK tergantung ukuran yang ditentukan. IKD, IKK memegang peranan krusial dalam mengarahkan dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. IKD, IKK membantu pemerintah daerah untuk memfokuskan upaya dan sumber daya pada prioritas-prioritas utama yang paling berdampak pada pencapaian visi dan misi daerah. Target capaian indikator kinerja daerah, indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Bogor secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ditampilkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Aspek Geografi dan Demografi							
1	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/Kapita	1421,99	1444,52	1464,03	1481,24	1496,63	1510,56
2	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	77,13	84,76	95,04	107,98	123,58	141,83
3	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	69,14	71,65	74,26	76,96	79,75	82,63
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Angka	7,69	7,34	6,96	6,10	5,83	5,53
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	57,84	58,09	58,34	58,6	58,85	59,10
6	Indeks Kualitas Air	Angka	71,3	71,5	71,7	71,9	72,1	72,3
7	Indeks Kualitas Udara	Angka	55,63	56,03	56,43	56,83	57,23	57,63
8	Indeks Kualitas Lahan	Angka	38,81	38,88	38,95	39,02	39,09	39,15
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	6,27	6,49	6,7	6,91	7,12	7,25
10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	24,29	24,59	24,89	25,19	25,49	25,79
11	Timbulan sampah terdaur ulang	Persen	22,46	22,68	22,86	23,08	23,36	23,56
12	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	71,21	72,81	73,41	74,51	75,11	76,71
13	Indeks Risiko Bencana	Angka	58,03	58,02	58,02	58,01	58,01	58,00
14	Penurunan Emisi GRK	Ton CO2 eq per Miliar Rupiah	0,38	0,71	1,05	1,48	2,07	2,51
15	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,89	1,03	1,22	1,46	1,75	2,09
16	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,25	1,23	1,2	1,17	1,15	1,12

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Rasio Penduduk yang bekerja	Persen	65,24	68,91	69,83	71,07	72,35	75,63
18	Kepadatan penduduk	orang/km2	9756	9841	9926	10010	10095	10180
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,58	5,86	6,15	6,46	6,78	7,12
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,44	6	5,38	4,64	3,85	3,65
3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita	Rp Juta	58,15	59,36	60,29	61	61,54	61,95
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,11	7,99	7,98	7,94	7,91	7,86
5	Indeks Gini	Angka	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	79,76	80,49	81,22	81,95	82,68	83,41
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,93	76,14	76,35	76,56	76,77	76,98
9	Prevalensi Stunting	Angka	19,1	17,31	15,76	14,43	13,28	12,28
10	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,75	10,83	10,92	11,01	11,1	11,18
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,53	13,54	13,56	13,57	13,59	13,6
12	Angka Literasi	Persen	91,35	98,86	100	100	100	100
13	Angka Numerasi	Persen	93,32	100	100	100	100	100
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	28,59	31,38	34,17	36,97	39,78	42,60
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	61,28	63,1	64,9	66,6	68,4	69,1
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	80,9	81,21	81,51	81,82	82,13	82,13
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	54.70 - 54.73	55.29 - 55.33	55.89 - 55.95	56.49 - 56.56	57.09 - 57.18	57.69 - 57.79
18	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	66,77	71,59	76,4	81,22	86,03	90,85

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,336	0,334	0,332	0,330	0,328	0,326
20	Indeks Pembangunan Gender	Angka	91,3	91,35	91,4	91,45	91,5	91,55
21	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	75,85	75,95	76,13	76,25	76,33	76,4
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	65,83	65,83	65,84	65,84	65,85	65,85
23	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,54	0,56	0,58	0,6	0,62	0,64
24	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	Angka	26,80	27,35	28,44	29,24	30,35	31,97
25	Persentase Pekerja Informal	Persen	41,83	43,33	44,83	46,34	47,84	49,35
26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Angka	51,47	52,76	54,04	55,33	56,62	57,91
III	Aspek Daya Saing Daerah							
1	Angka Ketergantungan	Angka	42,8	42,6	42,4	42	41,7	41,5
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	18,61	18,67	18,71	18,74	18,74	18,75
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	5,19	5,27	5,34	5,41	5,49	5,57
4	Rasio Kewirausahaan	Persen	3,39	3,55	3,72	3,9	4,09	4,3
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	69,88	71,2	72,52	73,84	75,17	69,88
6	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	53,78	49,63	44,02	36,95	28,41	18,4
7	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	66,6	66,65	66,7	66,75	66,8	66,85
8	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (persen PDRB)	Persen	34,7	34,76	34,82	34,88	34,94	34,99
9	Ekspor Barang dan Jasa (ekspor terhadap PDRB ADHK)	Persen	6,1	6,45	6,82	7,21	7,64	6,1

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	5,16	6,75	7,55	8,34	9,14	9,74
11	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkenajutan	Persen	52,4	53,62	54,84	56,06	57,27	59,94
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	1,7	1,75	1,78	1,79	1,8	1,81
13	Tingkat Inflasi	Persen	1.5 - 3.5	1.5 - 3.5	1.5 - 3.5	1.5 - 3.5	1.5 - 3.5	1.5 - 3.5
IV Aspek Pelayanan Umum								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	90,38	90,4	90,5	90,75	91	91,01
2	Indeks Reformasi Hukum	Angka	110,96	123,28	135,6	147,92	160,24	172,56
3	Indeks Pemerintahan Digital	Angka	NA	1,87	1,87	1,90	1,90	1,92
4	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,65	4,66	4,67	4,68	4,69	4,7
5	Nilai SPI	Angka	77,83	78,12	78,41	78,7	78,99	79,28
6	Persentase Penegakan Perda	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	5,16	6,75	7,55	8,34	9,14	9,74
8	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	80	83,89	87,78	92,22	96,11	97
INDIKATOR KINERJA KUNCI								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR								
PENDIDIKAN								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	69,79	69,85	69,92	69,99	70,06	70,13

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,58	99,62	99,65	99,69	99,72	99,75
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama)	Persen	91,72	91,77	91,83	91,88	91,94	91,99
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	81,28	81,29	81,3	81,31	81,32	81,34
KESEHATAN								
1	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,3	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33
2	Persentase rumah sakit rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Angka	64,56	64,78	65,10	65,25	65,65	65,75
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Angka	61,85	62,05	62,35	62,65	62,85	63,0
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	98,20	98,40	98,60	98,80	99	99,05
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	79,93	81	81,66	82,49	83,31	84
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Angka	95,90	96,10	96,30	96,65	96,80	97,0
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	90,04	90,05	90,06	90,07	90,08	90,08
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	83,99	84,04	84,08	84,13	84,18	84,25
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Angka	0	0	0	0	0	0

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
PERUMAHAN RAKYAT								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	23,31	30,59	37,87	45,15	52,43	59,71
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	6,16	6,78	8,11	9,45	10,79	12,06
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	51,55	52,26	52,97	53,68	54,39	55,11
KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa	77908	79440	131964	98800	99300	107936
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa	647	1065	663	668	1313	738
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	5088	5616	6144	6673	7201	7729

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15
6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100
SOSIAL								
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR								
TENAGA KERJA								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	86,75	87,38	88,87	89,57	90,38	90,38
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	19	19,20	19,30	19,40	19,50	19,60

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/Pekerja/Tahun	76,5	76,6	76,7	76,8	76,9	76,95
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	73,61	73,9	73,94	73,98	74	74,01
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	94,45	94,65	94,85	94,9	94,95	95,1
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	10,29	10,31	10,33	10,35	10,37	10,39
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Orang	11,49	11,48	11,47	11,46	11,45	11,44
PANGAN								
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	45,06	58,07	69,68	81,29	92,90	100
LINGKUNGAN HIDUP								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	57,84	58,09	58,34	58,6	58,85	59,1

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	94,29	94,33	94,37	94,41	94,45	94,49
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	58,32	58,45	58,58	59,71	60,84	61,04
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	80,05	80,82	81,59	82,36	83,13	83,90
3	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 Tahun	Persen	97,72	97,97	98,22	98,47	98,72	98,97
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	61
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	anak/wanita	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	63,59	63,6	63,6	63,6	63,6	63,6
3	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persen	15,9	15,8	15,6	15,5	15,3	15,2
PERHUBUNGAN								

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,73	0,78	0,78	0,79	0,79	0,8
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Rasio	0,60	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	15,38	16,92	18,46	20	21,54	23,08
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	10,42	10,42	11,31	12,02	13,01	14,14
PENANAMAN MODAL								
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	1	1	1	1	1	1
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	3.102	3.609	3.701	3,75	3,81	3,85

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	8,14	8,25	8,3	8,35	8,4	8,45
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	20	22	24	30	32	35
STATISTIK								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
PERSANDIAN								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	84,2	84,8	85,4	86,1	86,6	87,3
KEBUDAYAAN								
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	7,63	8,25	8,87	9,48	10,10	10,72
PERPUSTAKAAN								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	76	78	80	82	84	86
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	28,59	31,38	34,17	36,97	39,78	42,60
KEARSIPAN								

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	Persen	70	71	72	73	74	75
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	100	100	100	100	100	100
URUSAN PILIHAN								
KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	1.701	1.718	1.735	1.752	1,77	1.788
PARIWISATA								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	70,48	70,49	70,5	70,51	70,52	70,53

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	20,56	18,79	19,05	19,22	19,38	19,54
PERTANIAN								
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Hektar	10,818	10,976	11,135	11,293	11,451	11,609
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	47,62	44,40	30,00	28,57	20,00	25,00
PERDAGANGAN								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	79,79	80,00	80,01	80,02	80,03	80,04
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	70,31	70,32	70,33	70,34	70,35	70,36
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	53,66	53,71	53,76	53,86	53,91	53,96
PERINDUSTRIAN								
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Persen	8,70	9,20	10,10	10,70	11,10	12,10
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	26,00	26,60	26,74	26,84	26,94	27,00

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	0	0	0	0	0	0
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	0	0	0	0	0
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen	0	0	0	0	0	0
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	125	125	125	125	125	125
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
PERENCANAAN DAN KEUANGAN								
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
PERENCANAAN DAN KEUANGAN								
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	25,99	25,98	25,97	25,96	25,95	25,94
2	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	80,15	80,16	80,17	80,18	80,19	80,20
3	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
PENGADAAN								
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	1.952.857.841	19,54	19,55	19,56	19,57	19,58
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	52,99	53	53,01	53,02	53,04	53,05
MANAJEMEN KEUANGAN								
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	1,96	1,95	1,94	1,93	1,92	1,91
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	1,46	1,45	1,44	1,43	1,42	1,41
3	Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar aset tetap?(ya/tidak)	1. Ya	1. Ya	1. Ya	1. Ya	1. Ya	1. Ya

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset? (ya/tidak)	2. Ya	2. Ya	2. Ya	2. Ya	2. Ya	2. Ya
		3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (ya/tidak)	3. Ya	3. Ya	3. Ya	3. Ya	3. Ya	3. Ya
		4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (ya/tidak)	4. Ya	4. Ya	4. Ya	4. Ya	4. Ya	4. Ya
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	1,78	1,77	1,76	1,75	1,74	1,73
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK								
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	96,89	96,90	96,91	96,92	96,93	96,94
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
KEPEGAWAIAN								
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar () (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	60,78	60,78	60,8	60,8	60,85	60,85
2	Rasio pegawai Fungsional () (PNS tidak termasuk guru dan	Persen	22,58	22,58	22,6	22,6	22,65	22,65

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	tenaga kesehatan)							
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi () (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	55,82	55,82	55,85	55,85	55,87	55,87
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	80,9	81,21	81,51	81,82	82,13	83,2

Sumber : Hasil Analisis Bapperida (2025)

4.5. Standar Pelayanan Minimal

Tabel 4.5 Standar Pelayanan Minimal

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN											
1	Pendidikan anak usia dini (PAUD)	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk peserta didik PAUD	Peserta didik PAUD usia 5- 6 TAHUN	Terpenuhiya kecukupan pelayanan dasar pada jenjang Paud yaitu Pengadaan Perlengkapan dasar SPM Jenjang Paud	100	Setiap tahun	100	100	100	100	100	100
2	Pendidikan dasar	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk peserta didik SD dan SMP	Peserta didik SD usia 7 - 12 (SD)	Terpenuhiya kecukupan pelayanan dasar ada jenjang SD/MI yaitu Pengadaan erlengkapan dasar SPM Jenjang SD dan SMP	100	Setiap tahun	100	100	100	100	100	100
			Peserta didik usia 13 - 15 (SMP)	Terpenuhiya kecukupan pelayanan dasar pada jenjang SMP/MTs yaitu Pengadaan erlengkapan dasar SPM Jenjang SD dan SMP	100	Setiap tahun	100	100	100	100	100	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk	Warga belajar kesetaraan 7 - 18 Tahun	Terpenuhiya kecukupan pelayanan dasar ada jenjang yaitu kesetaraan	100	Setiap tahun	100	100	100	100	100	100

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
		wraga belajar PKBM		Pengadaan perlengkapan dasar SPM Kesetaraan								
II	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN											
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar	Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan K4	ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	100	Setiap tahun	100	100	100	100	100	100
2	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar	Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan dan atau dokter dan atau dokter spesialis kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki surat tanda register (str) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.	ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	100	Setiap tahun	100	100	100	100	100	100
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Adalah Pelayanan Yang Diberikan Pada	Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	100	Setiap tahun	100	100	100	100	100	100

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Bayi Baru Lahir sesuai standar	Bayi Usia 0-28 Hari Dan Mengacu Kepada Pelayanan Neonatal Esensial Sesuai Yang Tercantum Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak, Dilakukan Oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak Yang Memiliki Surat Tanda Register (STR)		baru lahir sesuai dengan standar								
4	Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Adalah Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Kepada Anak Berusia 0-59 Bulan dan Dilakukan Oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak Yang Memiliki Surat Tanda Register (STR) dan Diberikan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah	balita	Jumlah balita 0 59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	Setiap tahun	100	100	100	100	100	100

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Maupun Swasta, dan UKBM										
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Adalah Penjangkaran Kesehatan Yang Diberikan Kepada Anak Usia Pendidikan Dasar, Minimal Satu Kali Pada Kelas 1 dan Kelas 7 Yang Dilakukan Oleh Puskesmas.	usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100	Setiap tahun	100	100	100	100	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pelayanan Skrining Kesehatan Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Sesuai Standar	usia lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100	Setiap tahun	100	100	100	100	100	100
7	Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar	Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya)	orang dengan tuberkulosis	Jumlah pasien TB BTA positif yang sembuh dibagi jumlah pasien baru TB BTA positif yang diobati kali seratus persen	100	Setiap tahun	100	100	100	100	100	100

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
		dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta										
8	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelkes yang diberikan kpD ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan LP, dilakukan oleh NAKES sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.	orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100	Setiap tahun	100	100	100	100	100	100
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun sesuai standar	usia produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	Setiap tahun	100	100	100	100	100	100

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	Setiap tahun	100	100	100	100	100	100
11	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.	penderita diabetes melitus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	Setiap tahun	100	100	100	100	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Penduduk ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar	orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	Setiap tahun	100	100	100	100	100	100

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
III	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Sesuai dengan standar air minum	Setiap warga negara	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	Setiap tahun	98,04	99,04	100	100	100	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Sesuai dengan standar air limbah domestic	Setiap warga negara	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	Setiap tahun	79,93	81,00	82,00	82,49	83,31	84,00
IV	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Sesuai dengan standar rumah layak huni	Korban bencana kabupaten/kot a yang memiliki rumah terkena dampak bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	Setiap tahun	100	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Sesuai dengan standar rumah layak huni	Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kot a	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	Setiap tahun	100	100	100	100	100	100
V	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL											
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Standar dan jumlah kualitas barang/jasa, kualitas SDM,tata	Penyandang disabilitas terlantar	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang	100	Setiap Tahun	100	100	100	100	100	100

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
		cara pemenuhan standar yang diterima oleh disabilitas terlantar di luar panti		memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dapat diketahui dari prosentase () penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti								
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Standar dan jumlah kualitas barang/jasa, kualitas SDM,tata cara pemenuhan standar yang diterima oleh anak terlantar di luar panti	Anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dapat diketahui dari prosentase () anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	Setiap Tahun	100	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Standar dan jumlah kualitas barang/jasa, kualitas SDM,tata cara pemenuhan standar yang diterima oleh lanjut usia terlantar di luar panti	Lanjut usia terlantar	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dapat diketahui dari prosentase () lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	Setiap Tahun	100	100	100	100	100	100

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Standar dan jumlah kualitas barang/jasa, kualitas SDM, tata cara pemenuhan standar yang diterima oleh tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Gelandangan dan pengemis	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti dapat diketahui dari prosentase () gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	Setiap Tahun	100	100	100	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota	Standar dan jumlah kualitas barang/jasa, kualitas SDM, tata cara pemenuhan standar yang diterima oleh korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Korban bencana kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dapat diketahui dari prosentase () korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kab/kota	100	Setiap Tahun	100	100	100	100	100	100
VI	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	Pelayanan informasi rawan bencana	a. Prosedur operasional penanggulangan bencana; b.	Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	100	Setiap Tahun	100	100	100	100	100	100

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Sarana prasarana penanggulangan bencana; c. Peningkatan kapasitas personil/ sumber daya manusia; dan d. Pelayanan Warga Negara	yang menjadi korban bencana	informasi rawan bencana								
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100	Setiap Tahun	100	100	100	100	100	100
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Setiap Tahun	100	100	100	100	100	100
4	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	a. Prosedur operasional Penegakan PERDA b. Sarana prasarana Penegakan PERDA c. Peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan d. Pelayanan Warga Negara yang terkena dampak dari penegakan PERDA dan PERKADA	Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kot a dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kot a	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100	Setiap Tahun	100	100	100	100	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	a. Prosedur operasional Penyelamatan dan evakuasi korban	Warga negara yang menjadi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	100	Setiap Tahun	100	100	100	100	100	100

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
		kebakaran b. Sarana prasarana Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran c. Peningkatan kapasitas personil/sumbe r daya manusia; dan d. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Warga Negara yang terkena bencana Kebakaran	atau terdampak kebakaran	penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran								

Sumber : Hasil Analisis Bapperida (2025)

BAB 5

PENUTUP

Perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah, Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan, yang dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan, agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Permendagri 86/2017 menyebutkan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat

daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya di Kota Bogor dan dilaksanakan secara konsisten.

5.1. Pedoman Transisi

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengantisipasi perubahan dalam periode transisi antara RPJMD yang sedang berjalan dengan perencanaan berikutnya, diperlukan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD tahun terakhir periode RPJMD harus tetap mengacu pada RPJPD Kota Bogor 2025-2045 serta RPJMN 2025-2029, sehingga kebijakan pembangunan tetap berorientasi pada agenda pembangunan nasional dan provinsi.
2. RKPD tahun pertama dari periode RPJMD berikutnya harus mencerminkan kesinambungan kebijakan dengan mempertimbangkan program-program strategis yang masih dalam tahap implementasi guna menghindari fragmentasi dalam perencanaan dan penganggaran.
3. Evaluasi menyeluruh terhadap capaian RPJMD sebelumnya harus dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan untuk periode berikutnya, sehingga proses perencanaan dapat berorientasi pada pembelajaran dari pengalaman sebelumnya.
4. Penyusunan RAPBD tahun transisi harus memperhitungkan prioritas pembangunan yang masih dalam proses pelaksanaan, serta mengakomodasi program baru yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang baru.
5. Penerapan prinsip *good governance* dalam proses transisi guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah.

Melalui pedoman transisi ini, diharapkan tidak terjadi kesenjangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah, serta mampu memastikan kesinambungan kebijakan yang selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang Kota Bogor.

5.2. Manajemen Risiko

Dalam rangka menjamin keberhasilan RPJMD Tahun 2025-2029, maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, pengendalian dan evaluasi ex-ante dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan memastikan kecukupan desain kebijakan. Pengendalian dan evaluasi perencanaan mencakup penelaahan konsistensi dokumen perencanaan, pemenuhan kaidah kerangka kerja logis, kesiapan pelaksanaan kebijakan, dan identifikasi risiko. Pada tahap pelaksanaan, pengendalian dilakukan untuk memastikan berjalannya intervensi dan ketercapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dapat dilakukan sepanjang periode pelaksanaan, sedangkan evaluasi dilakukan pada saat periode pelaksanaan rencana dan tahun terakhir periode pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD menjadi penekanan dalam mengawal pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 secara intensif. Dari hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD serta dengan memperhatikan dinamika baik yang dipengaruhi oleh kebijakan nasional maupun daerah, maka dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen ini.

Pada tahun terakhir periode pelaksanaan RPJMD dilakukan evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Evaluasi akhir RPJMD dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan

dalam pelaksanaan prioritas pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun. Mekanisme evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang dapat mencakup evaluasi kinerja pembangunan serta evaluasi kebijakan/program strategis. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan masukan untuk perumusan kebijakan dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya sebagai kerangka penahapan pelaksanaan RPJPD 2025-2045.

Peningkatan intensitas risiko yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan daerah menuntut diterapkannya pendekatan manajemen risiko secara terintegrasi dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan RPJMD. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, pemerintah daerah diharapkan dapat mengadopsi prinsip-prinsip manajemen risiko pembangunan nasional yang mencakup integrasi proses bisnis, sistem informasi risiko, penguatan kapasitas sumber daya manusia, sistem insentif, dan penguatan kelembagaan. Dalam pelaksanaan RPJMD Kota Bogor, integrasi evaluasi dan manajemen risiko perlu diarahkan untuk mengawal pelaksanaan program prioritas secara tepat sasaran, efisien, serta responsif terhadap dinamika yang berkembang.

